Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

SERI-A FoLU Net Sink 2030
Nomor: A-03/Renja-KNSV/09/2022

RENCANA KERJA

Bidang Konservasi

INDONESIA'S FOLU Net Sink 2030

RENCANA KERJA

Bidang Konservasi

Diterbitkan oleh:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ISBN:
xxx - xxxx - xxx - xx

© 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

EDITOR IN CHIEF:
Siti Nurbaya Bakar

ASSOCIATE EDITORS:
Hanif Faisol Nurofiq, Wiratno, Aryzana Sungkar, Marini, Sulistiyawati, Nandang Prihadi, Ammy Nurwati, Jefry Susyafrianto, Indra Exploitasia

REVIEWERS:
Irdika Mansur, Bambang Hendroyono, Ruandha Agung Sugardiman, Agus Justianto

CONTRIBUTORS:
Belinda Arunarwati Margono, Syaiful Anwar, Ahmad Munawir, Thomas Nifinluri, Istanto, Erik Teguh Primiantoro, Sri Handayaningsih, Tulus Laksono, Edy Nugroho Santoso, Yeri Permata Sari, Herban Heryandana, Muhammad Said, Jo Kumala Dewi, Muhammad Zainal Arifin

FACILITATORS:
Hanif Faisol Nurofiq, Triyono Saputro, Ari Sylvia Febriyanti, Nurlela Komalasari, Ali Ma'mur, Dhany Ramdhany, Agung Bayu Nalendro, Romilla Sari, Hasnawati Hamzah, Danny Armando Wikongko, Raden Puri Puspita Sari, Purna Fitria, Claudia Meitrivane Silalahi

Kata Pengantar

Sebagai upaya pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2021. Pada Peraturan Presiden dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), didukung utamanya oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*). Sebagai pendekatan implementasi *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 untuk pengendalian perubahan iklim.

Rencana Operasional *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 merupakan langkah sistematis yang dibangun dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan lahan. Agenda ini merupakan rangkuman kegiatan pengelolaan hutan dalam berbagai aspek dan program kehutanan (dan lahan/pertanian) yang secara resultante akan mendapatkan hasil akhir cadangan karbon atau emisi negatif pada Tahun 2030. Landasan utama pencapaian *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 terdiri dari pembangunan hutan berkelanjutan, tata kelola lingkungan dan tata kelola karbon.

Sasaran kinerja *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 meliputi pengurangan laju deforestasi, pengurangan laju degradasi hutan, pengaturan pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dengan rotasi regular dan sistematis, rehabilitasi hutan non rotasi pada kondisi lahan kritis menurut kebutuhan lapangan, tata kelola restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, perbaikan dan konservasi mangrove, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pengembangan berbagai instrumen

kebijakan baru, pengendalian sistem monitoring, evaluasi dan pelaksanaan komunikasi publik. Pengkoordinasian pelaksanaannya dalam bidang-bidang utama sektor FOLU yang meliputi: Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang Konservasi, Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Bidang Instrumen dan Informasi.

Rencana kerja Bidang Konservasi disusun sebagai pedoman pencapaian target *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dalam bentuk aktifitas meliputi; Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies; *High Conservation Value* (HCV) dan Kelola Fragmentasi Habitat; Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya, dan KHDTK; dan Kemitraan Konservasi.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada unit kerja pusat dan unit kerja wilayah (UPT), bersamasama, kolaborasi dan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara luas, melalui kerja-kerja program struktural, kemitraan dan pembianaan masyarakat.

Jakarta, Oktober 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc.

Daftar Singkatan

FOLU	*Forestry and Other Land Use*
IJE	*Indeks Jasa Ekosistem*
APL	*Areal Penggunaan Lain (Non Forest Area)*
ATR	Agraria dan Tata Ruang
BKT	Bernilai Konservasi Tinggi
CA	*Cagar Alam*
CBD	*Convention on Biological Diversity*
DAS	Daerah Aliran Sungai
DD	Deforestasi Degradasi
DDDT	Daya Dukung dan Daya Tampung
ENR	*Enhanced Natural Regeneration*
GRK	Gas Rumah Kaca
HCV	*High Conservation Value*
HPK	*Hutan Produksi Konversi*
IKH	Indek Kualitas Hutan
IPL	*Indek Prioritas Lokasi*
IBGF	Indeks Biogeofisik
KEE	Kawasan Ekosistem Esensial
KK	Kawasan Konservasi
KPA	Kawasan Pelestarian Alam
KPH	Kawasan Pengelolaan Hutan
KPHL	Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP	Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi
KSA	Kawasan Suaka Alam
LCCP	Low Carbon Compatible with Paris Agreement
LTS-LCCR	Long -Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience
MPTS	Multi-Purpose Tree Species
NDC	Nationally Determined Contribution
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
NPS	Non Party Stakeholders
NZE	Net Zero Emission
PA	Paris Agreement
PBPH	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
PCK	Peningkatan Cadangan Karbon
PDASRH	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan
PHL	Pengelolaan Hutan Lestari
PPKL	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
RE	Restorasi Ekosistem
REDD	Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation
RHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RIL	Reduce Impact Logging
RKTN	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
RKU	Rencana Kerja Usaha
RPPEG	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
SILIN	Silvikultur Intensif
SM	Suaka Margasatwa
TN	Taman Nasional
UPT	Unit Pelaksana Teknis

Daftar Istilah

Areal Bernilai Konservasi Tinggi	Areal yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi budaya bagi masyarakat termasuk HCV dan HCVF
Blok Pemanfaatan	Bagian dari SM, TWA dan TAHURA yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya ((PermenLHK No.76/2015)).
Blok Perlindungan	Bagian dari kawasan yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan selain taman nasional ((PermenLHK No.76/2015)).
Cagar Alam	KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistem yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami (UU No. 5/1990/PP No. 108/2015).
Cross cutting	Isu atau faktor penting yang dapat mempengaruhi aspek atau subsektor/sektor lain secara keseluruhan (KepMenLHK No.168/2022)
Deforestasi	Perubahan tutupan hutan dari hutan alam menjadi non hutan alam (PerMentan No.5/2018).
Degradasi	Perubahan tutupan hutan dari hutan primer menjadi hutan sekunder.
Ekosistem	Sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan dan Satwa Liar serta jasad renik) maupun nonhayati (tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup (PP No. 108/2015).
Ekosistem Gambut	Tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya (PerMenLHK No.23/2021)
Habitat	Lingkungan tempat tumbuhan dan/atau satwa dapat hidup dan berkembang biak secara alami (PP No. 108/2015).
Hutan	Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No. 41/1999).
Hutan Konservasi	Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan kenekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Meskipun fungsi pokoknya pengawetan, namun dimungkinkan pemanfaatan kehati (genetik, spesies dan ekosistem) secara berkelanjutan (UU No. 41/1999).

Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok melindungi sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU No. 41/1999)..
Jenis Terancam Punah	Jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang memiliki resiko kepunahan di alam liar pada waktu akan datang.
Kawasan Hutan	Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU No.41/1999).
Kawasan Konservasi	Kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi terdiri dari kawasan konservasi daratan dan perairan. Secara umum kawasan konservasi dikategorikan menjadi kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan taman buru (UU No. 5/1990).
Kawasan Pelestarian Alam	Kawasan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem (PP No. 108/2015).
Kawasan Suaka Alam	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (PP NO. 108/2015).
Kesatuan Pengelolaan Hutan	Wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari (PerMenLHK No.8/2021).
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Hutan Lindung (PerMenLHK No.8/2021).
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Produksi (PerMenLHK No.8/2021).
Keanekaragaman Hayati	Keragaman makhluk hidup dari semua sumber termasuk ekosistem terestrial, laut, dan perairan lainnya serta kompleks ekologi yang menjadi bagiannya; ini termasuk keanekaragaman dalam spesies, antar spesies dan ekosistem.

Kearifan Lokal	Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
Konservasi	Perlindungan dan pelestarian hutan alam dan keanekaragaman hayati (KepMenLHK No.168/2022).
Locked-In Emission	Emisi GRK di masa depan yang disebabkan oleh pengambilan keputusan maupun kegiatan ekonomi yang dilakukan saat ini, salah satunya kegiatan ekstraksi sumberdaya yang menyebabkan rusaknya ekosistem penyimpan karbon yang sulit dipulihkan, hingga tidak dapat pulih kembali (KepMenLHK No.168/2022).
Masyarakat Adat	Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.
Masyarakat Setempat	Penduduk yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan terhadap sumberdaya alam di zona tradisional untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan tinggal di desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau bukti kependudukan lainnya
Net Sink	Kondisi yang menggambarkan serapan GRK dari atmosfer yang lebih tinggi dibandingkan emisi yang dihasilkan, dimana pada kondisi ini, vegetasi dan ekosistem penyimpan karbon memegang peranan yang penting dalam menyerap GRK (KepMenLHK No.168/2022).
Net Zero Emission	Kondisi yang menggambarkan nilai emisi GRK setara dengan tingkat serapan, sehingga net emisi bernilai nol (KepMenLHK No.168/2022).
Nilai Penting Kawasan	Jenis/habitat/ekosistem /bentang alam/situs prasejarah yang menjadi mandat dan prioritas pengelolaan pada unit KSA/KPA.
Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya (PerMenLHK No.8/2021).
Pemanfaatan Jenis	Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar
Pemanfaatan Kawasan	Kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya (PerMenLHK No.8/2021).
Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	Berkelanjutan adalah usaha atau kegiatan pemanfataan keanekaragaman hayati dengan cara dan tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pemulihan Ekosistem	Kegiatan pemulihan ekosistem KSA/KPA termasuk didalamnya pemulihan terhadap alam hayatinya sehingga terwujud keseimbangan alam hayati dan ekosistemnya di kawasan tersebut
Pengawetan (Preservasi)	Upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya (PP No. 108/2015).
Peran Serta Masyarakat	Peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan Pengelolaan KSA dan KPA (PP No. 108/2015).
Perlindungan (Hutan)	Upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Perubahan Iklim	Berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
Plasma Nut-fah/ Sumber Daya Genetik	Substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
Rehabilitasi	Kegiatan pemulihan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan (KepMenLHK No.168/2022).
Rehabilitasi Ekosistem	Suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi bentang alam laut untuk tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan (PerMenLHK No. 23/2021).
Restorasi	Upaya untuk memulihkan, bahkan meningkatan, fungsi penting sebuah ekosistem yang terdegradasi sebagaimana sedia kala (KepMenLHK No.168/2022).
Restorasi Ekosistem	Tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut serta terganggunya status satwa liar, biota air, atau biota laut melalui Tindakan penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi bentang alam laut, pembinaan habitat dan populasi untuk tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya.

Revegetasi	Kegiatan penghijauan kembali lahan yang sudah terdegradasi dengan nilai biomassa atas permukaan yang rendah (KepMenLHK No.168/2022).
Rewetting	Kegiatan pembasahan kembali lahan gambut yang sudah terdegradasi akibat pengeringan (KepMenLHK No.168/2022).
Satwa Liar	Satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (PP No.108/2015).
Status Keanekaragaman Hayati	Jumlah jenis yang menunjukkan keragaman dari flora dan atau fauna pada suatu wilayah penyebaran tertentu yang dapat dikategorikan kedalam status, berlimpah, jarang, terancam punah dan punah.
Suaka Margasatwa	KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya (PP No.108/2015).
Sumber Daya Alam Hayati	Unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non-hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem (PP No. 108/2015).
Taman Buru	Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu (UU No.41/1999)
Taman Hutan Raya	KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (PP No. 108/2015).
Taman Nasional	KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (PP No. 108/2015).
Taman Wisata Alam	KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
Tumbuhan	Semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
Unit Pelaksana Teknis daerah Taman Hutan Raya	Organisasi pelaksana tugas teknis di bidang taman hutan raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Dinas yang menangani bidang kehutanan, yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan taman hutan raya (PerMenLHK No. 76/2015).
Unplanned Deforestation	Perubahan terencana hutan alam menjadi non hutan alam karena sebab illegal (KepMenLHK No.168/2022)

Wisata Alam	Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di KPA (PerMenLHK No.76/2015).
Zona Inti	Kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli (PermenLHK No.76/2015).
Zona Pemanfaatan	Bagian dari TN yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya (PermenLHK No.76/2015).
Zona Rimba	Bagian TN yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan (PermenLHK No.76/2015).
Zona/Blok Khusus	Bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis (PermenLHK No.76/2015).
Zona/Blok Rehabilitasi	Bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan (PermenLHK No.76/2015).
Zona/Blok Religi, Budaya dan Sejarah	Bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah (PermenLHK No.76/2015).
Zona/Blok Tradisional	Bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam (PermenLHK No.76/2015).

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Sasaran

B.1. Tujuan

B.2. Sasaran

C. Organisasi Bidang Konservasi

C.1. Dasar Hukum

C.2. Struktur Organisasi

C.3. Tugas dan Fungsi

C.4. Tugas Kelompok Kerja

BAB II. Rencana Kerja Tahunan

A. Strategi Konservasi Menuju Indonesia's FOLU Net Sink 2030

A.1.Strategi Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies

A.2. Strategi Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya, dan KHDTK

A.3. Strategi High Conservation Value (HCV) dan Kelola Fragmentasi Habitat

A.4. Strategi Kemitraan Konservasi

B. Rincian Kegiatan dan Target Tahun 2022 – 2030

B.1. Deskripsi Aksi Mitigasi Bidang Konservasi

B.2. Pengelolaan Hutan Lestari (Enhanced Natural Regeneration)

B.3. Peningkatan Cadangan Karbon (Non-Rotasi) (bidang II PCK)

B.4. Pengelolaan Lahan Gambut (Restorasi)

B.5. Konservasi Keanekaragaman Hayati Tinggi (HCV)

B.6. Target Lokasi dan Luas Kegiatan Bidang Konservasi dalam Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030

C. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

D. Dukungan Sumber Daya Manusia

E. Pendanaan Kegiatan

BAB III. Kesimpulan

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

TABEL 1. Kebijakan kunci bidang konservasi menuju Indonesia's FOLU Net Sink 2030

TABEL 2. Pokja Bidang Konservasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030

TABEL 3. Tugas kelompok kerja

TABEL 4. Kegiatan mitigasi lintas eselon KLHK untuk bidang konservasi

TABEL 5. Standar dalam pelaksanaan kegiatan bidang konservasi

TABEL 6. Rincian daftar rencana kegiatan dan indikator kinerja Bidang Konservasi dalam mendukung pencegahan deforestasi dan degradasi di lahan mineral dan gambut

TABEL 7. Lokasi dan Luas Kegiatan Pencegahan Deforestasi dan Degradasi (Ha)

TABEL 8. Rencana kegiatan dan indikator kinerja bidang konservasi dalam mendukung Pengeloaan Hutan Lestari (Enhanced Natural Regeneration)

TABEL 9. Lokasi dan luas Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari (Enhanced Natural Regeneration) (Ha)

TABEL 10. Kegiatan mitigasi peningkatan cadangan karbon (non-rotasi)

TABEL 11. Lokasi dan Luas Kegiatan Peningkatan Cadangan Karbon (Non-rotasi)

TABEL 12. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja bidang konservasi dalam mendukung Pengeloaan Lahan Gambut

TABEL 13. Lokasi dan luas kegiatan pengelolaan gambut melalui restorasi (ha)

TABEL 14. Kegiatan konservasi keanekaragaman kayati pada HCV

TABEL 15. Data target aksi mitigasi renops Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dengan data target hasil verifikasi

TABEL 16. Luas area pelaksanaan program aksi mitigasi menurut pemangku kawasan pada IPL 7, 8 dan 9 (2021-2024) dalam ha

TABEL 17. Target areal indikatif pelaksanaan kegiatan INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030 di dalam kawasan hutan konservasi

TABEL 18. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Way Kambas

TABEL 19. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Barisan Selatan

TABEL 20. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Gunung Leuser

TABEL 21. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Batang Gadis

TABEL 22. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Gumai Pasemah

TABEL 23. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Gunung Raya

TABEL 24. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Padang Sugihan

TABEL 25. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Dangku
TABEL 26. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sembilang
TABEL 27. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Balai Raja
TABEL 28. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Giam Siak Kecil
TABEL 29. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Kerumutan
TABEL 30. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Bukit Batu
TABEL 31. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Bukit Rimbang Bukit Baling
TABEL 32. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tasik Besar Serkap
TABEL 33. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tasik Serkap
TABEL 34. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tasik Belat
TABEL 35. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tanjung Padang
TABEL 36. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Buluh Cina
TABEL 37. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Zamrud
TABEL 38. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Duabelas
TABEL 39. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Tigapuluh
TABEL 40. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Tesso Nilo
TABEL 41. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Arau Hilir-Air Tarusan
TABEL 42. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Siberut
TABEL 43. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Hutan Bakau Pantai Timur
TABEL 44. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kerinci Seblat
TABEL 45. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Berbak
TABEL 46. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sembilang
TABEL 47. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kayan Mentarang
TABEL 48. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku
TABEL 49. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Gunung Kentawan
TABEL 50. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pleihari Tanah Laut
TABEL 51. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Pulau Bakut
TABEL 52. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pulau Kaget
TABEL 53. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Kuala Lupak
TABEL 54. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Pulau Burung dan Suwangi
TABEL 55. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Muara Kaman Sedulang

TABEL 56. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk Adang
TABEL 57. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pulau Semama
TABEL 58. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk Apar
TABEL 59. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kutai
TABEL 60. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di THR Bukit Soeharto
TABEL 61. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di THR Lati Petangis
TABEL 62. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TAHURA Pandan Puloh
TABEL 63. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Mandor
TABEL 64. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Gunung Raya Pasi
TABEL 65. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Karimata
TABEL 66. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Nyiut Penrissen
TABEL 67. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Muara Kendawangan
TABEL 68. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Bukit Kelam
TABEL 69. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Gunung Melintang
TABEL 70. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Sungai Liku
TABEL 71. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Tanjung Belimbing
TABEL 72. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Asuansang
TABEL 73. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Baning
TABEL 74. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Gunung Dunga
TABEL 75. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Danau Sentarum
TABEL 76. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Betung Kerihun
TABEL 77. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Gunung Palung
TABEL 78. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Baka Bukit Raya
TABEL 79. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Bukit Sapat Hawung
TABEL 80. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Pararawen I dan II
TABEL 81. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Lamandau
TABEL 82. Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Bukit Tengkiling
TABEL 83. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Tanjung Keluang
TABEL 84. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Sungai Barito
TABEL 85. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Bukit Rawi
TABEL 86. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Sungai Kapuas

TABEL 87. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Tanjung Puting

TABEL 88. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sebangau

TABEL 89. Target areal indikatif pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati tinggi pada Area Bernilai Konservasi Tinggi per provinsi

TABEL 90. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Aceh

TABEL 91. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Utara

TABEL 92. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Barat

TABEL 93. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Riau

TABEL 94. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Jambi

TABEL 95. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan

TABEL 96. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Lampung

TABEL 97. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Bengkulu

TABEL 98. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Jambi

TABEL 99. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Kepulauan Bangka Belitung

TABEL 100. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Riau

TABEL 101. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan

TABEL 102. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur

TABEL 103. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah

TABEL 104. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat

TABEL 105. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Utara

TABEL 106. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Bali

TABEL 107. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

TABEL 108. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

TABEL 109. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di provinsi Banten

TABEL 110. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Jawa Barat

TABEL 111. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Jawa Tengah

TABEL 112. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Jawa Timur

TABEL 113. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Maluku Utara

TABEL 114. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Maluku

TABEL 115. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Papua

TABEL 116. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Papua Barat

TABEL 117. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Gorontalo

TABEL 118. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sulawesi Barat

TABEL 119. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan

TABEL 120. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah

TABEL 121. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara

TABEL 122. Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sulawesi Utara

TABEL 123. Tata waktu pelaksanaan kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi di kawasan konservasi

TABEL 124. Tata waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan cadangan karbon (PCK non-rotasi) di kawasan konservasi

TABEL 125. Tata waktu pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari (Enhanced Natural Regeneration) di kawasan hutan konservasi

TABEL 126. Tata waktu pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan gambut (restorasi) di kawasan hutan konservasi

TABEL 127. Dukungan SDM dalam kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi di kawasan hutan konservasi

TABEL 128. Dukungan SDM dalam kegiatan peningkatan cadangan karbon (PCK non-rotasi) di kawasan hutan konservasi

TABEL 129. Dukungan SDM dalam kegiatan pengelolaan hutan lestari (enhanced natural regeneration) di kawasan hutan konservasi

TABEL 130. Dukungan SDM dalam kegiatan pengelolaan lahan gambut (restorasi) di kawasan hutan konservasi

TABEL 131. Dukungan SDM dalam kegiatan konservasi keanekaragaman hayati tinggi di ABKT

TABEL 132. Dukungan anggaran untuk kegiatan peningkatan cadangan karbon (PCK non-rotasi) di kawasan hutan konservasi

TABEL 133. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari (ENR) di kawasan konservasi

TABEL 134. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan gambut (restorasi) di kawasan konservasi

TABEL 135. Dukungan anggaran untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan hutan konservasi

Daftar Gambar

GAMBAR 1. Struktur organisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030
GAMBAR 2. Potensi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi pada seluruh fungsi kawasan hutan
GAMBAR 3. Peta potensi jasa lingkungan di Pulau Sumatera
GAMBAR 4. Peta potensi jasa lingkungan di Pulau Kalimantan
GAMBAR 5. Sebaran tumbuhan dan satwa liar pada area bernilai konservasi tinggi
GAMBAR 6. Peta opened area di kawasan hutan konservasi (2021)
GAMBAR 7. Peta lanskap harimau, badak, gajah dan orangutan
GAMBAR 8. Peta lanskap dan koridor multispesies di Kalimantan
GAMBAR 9. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Way Kambas
GAMBAR 10. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Barisan Selatan
GAMBAR 11. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Gunung Leuser
GAMBAR 12. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Batang Gadis
GAMBAR 13. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Gumai Pasemah
GAMBAR 14. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Gunung Raya
GAMBAR 15. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Padang Sugihan
GAMBAR 16. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Dangku
GAMBAR 17. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sembilang
GAMBAR 18. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Balai Raja
GAMBAR 19. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Giam Siak Kecil
GAMBAR 20. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Kerumutan
GAMBAR 21. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Bukit Batu
GAMBAR 22. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Bukit Rimbang Bukit Baling
GAMBAR 23. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tasik Besar Serkap
GAMBAR 24. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tasik Serkap
GAMBAR 25. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tasik Belat
GAMBAR 26. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tanjung Padang
GAMBAR 27. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Buluh Cina
GAMBAR 28. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Zamrud
GAMBAR 29. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Duabelas
GAMBAR 30. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Tigapuluh

GAMBAR 31. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Tesso Nilo
GAMBAR 32. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Arau Hilir-Air Tarusan
GAMBAR 33. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Siberut
GAMBAR 34. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Hutan Bakau Pantai Timur
GAMBAR 35. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kerinci Seblat
GAMBAR 36. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Berbak
GAMBAR 37. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sembilang
GAMBAR 38. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kayan Mentarang
GAMBAR 39. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku
GAMBAR 40. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Gunung Kentawan
GAMBAR 41. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pleihari Tanah Laut
GAMBAR 42. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Pulau Bakut
GAMBAR 43. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pulau Kaget
GAMBAR 44. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Kuala Lupak
GAMBAR 45. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Pulau Burung dan Suwangi
GAMBAR 46. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Muara Kaman Sedulang
GAMBAR 47. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk Adang
GAMBAR 48. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pulau Semama
GAMBAR 49. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk Apar
GAMBAR 50. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kutai
GAMBAR 51. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di THR Bukit Soeharto
GAMBAR 52. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di THR Lati Petangis
GAMBAR 53. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TAHURA Pandan Puloh
GAMBAR 54. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Mandor
GAMBAR 55. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Gunung Raya Pasi
GAMBAR 56. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Karimata
GAMBAR 57. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Nyiut Penrissen
GAMBAR 58. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Muara Kendawangan
GAMBAR 59. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Bukit Kelam
GAMBAR 60. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Gunung Melintang
GAMBAR 61. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Sungai Liku
GAMBAR 62. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Tanjung Belimbing

GAMBAR 63. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Asuansang
GAMBAR 64. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Baning
GAMBAR 65. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Gunung Dunga
GAMBAR 66. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Danau Sentarum
GAMBAR 67. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Betung Kerihun
GAMBAR 68. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Gunung Palung
GAMBAR 69. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Baka Bukit Raya
GAMBAR 70. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Bukit Sapat Hawung
GAMBAR 71. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Pararawen I & II
GAMBAR 72. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Lamandau
GAMBAR 73. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Bukit Tengkiling
GAMBAR 74. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Tanjung Keluang
GAMBAR 75. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Sungai Barito
GAMBAR 76. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Bukit Rawi
GAMBAR 77. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Sungai Kapuas
GAMBAR 78. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Tanjung Putting
GAMBAR 79. Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sebangau
GAMBAR 80. Peta target konservasi tinggi Indonesia's FOLU Net Sink 2030
GAMBAR 81. Peta sebaran satwa dilindungi di luar kawasan hutan konservasi pada target Konservasi Tinggi Indonesia's FOLU Net Sink 2030
GAMBAR 82. Sebaran Satwa Dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Aceh
GAMBAR 83. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sumatera Utara
GAMBAR 84. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sumatera Barat
GAMBAR 85. Sebaran Satwa Dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Riau
GAMBAR 86. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Jambi
GAMBAR 87. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
GAMBAR 88. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Lampung
GAMBAR 89. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Bengkulu
GAMBAR 90. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Jambi
GAMBAR 91. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Bangka Belitung

GAMBAR 92. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kepulauan Riau

GAMBAR 93. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan

GAMBAR 94. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Timur

GAMBAR 95. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah

GAMBAR 96. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Barat

GAMBAR 97. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Utara

GAMBAR 98. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Bali

GAMBAR 99. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Bali

GAMBAR 100. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur

GAMBAR 101. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Banten

GAMBAR 102. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Jawa Barat

GAMBAR 103. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Jawa Tengah

GAMBAR 104. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Jawa Timur

GAMBAR 105. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 106. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Maluku

GAMBAR 107. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Papua

GAMBAR 108. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Papua Barat

GAMBAR 109. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Gorontalo

GAMBAR 110. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sulawesi Barat

GAMBAR 111. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan

GAMBAR 112. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah

GAMBAR 113. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara

GAMBAR 114. Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sulawesi Utara

Daftar Lampiran

LAMPIRAN 1 Daftar nama desa-desa penyangga kawasan konservasi lokasi implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk bidang Konservasi

LAMPIRAN 2 Matrik Rencana Kerja Pencegahan Deforestasi dan Degradasi di Kawasan Konservasi

LAMPIRAN 3 Matrik Rencana Kerja peningkatan Cadangan Karbon (PCK) Non-Rotasi di Kawasan Konservasi

LAMPIRAN 4 Matrik Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) (Enhanced Natural Regeneration) di Kawasan Konservasi

LAMPIRAN 5 Matrik Rencana Kerja Pengelolaan Lahan Gambut (Restorasi) di Kawasan Konservasi

LAMPIRAN 6 Matrik Rencana Kerja Konservasi Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Hutan Konservasi

LAMPIRAN 7 Model Key Result Area Bidang Konservasi Tahun 2022 s/d 2024

01

Pendahuluan

BAB I | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekosistem terestrial (berbasis lahan) memainkan peran penting sebagai penyerap karbon, mengimbangi emisi yang dikeluarkan oleh berbagai sektor ekonomi. Dalam berbagai alternatif mitigasi perubahan iklim, opsi mitigasi berbasis lahan (*land-based*) bahkan termasuk salah satu peluang yang paling hemat biaya untuk menyerap dan menyimpan karbon (Lal 2011). Biaya menangkap satu ton karbon melalui pemulihan lahan terdegradasi diperkirakan dapat mencapai USD 51 per ton karbon; dibandingkan dengan alternatif teknologi rekayasa dalam menyerap karbon, yang dapat menelan biaya hingga USD 306 per ton karbon (McKinsey & Company 2009, Lal 2011). Selain itu, opsi mitigasi berbasis lahan diduga sebagai opsi yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan opsi lain yang banyak digunakan untuk menghindari emisi seperti penggunaan bahan bakar alternatif dengan energi matahari atau angin sebagai pengganti bahan bakar fosil (McKinsey & Company 2009, Lal 2011). Bukti ilmiah lain juga menunjukkan bahwa ekosistem hutan global sendiri, sudah mampu menyerap sebanyak 3.234 juta ton CO2e karbon dari atmosfer pada tahun 2010. Secara umum, dari total emisi karbon global yang bersumber dari aktivitas manusia, sebanyak 46% diperkirakan terakumulasi di atmosfer, 23% lainnya diserap oleh lautan; sementara 31% sisanya dikaitkan dengan penyerapan oleh ekosistem terestrial (Friedlingstein et al. 2020), yang menegaskan peran penting ekosistem berbasis lahan dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Potensi penyimpanan karbon per ha akan bervariasi tergantung pada jenis bioma, praktik di lapangan, dan iklim. Laju rata-rata penyerapan diperkirakan 1,5 ton karbon per ha per tahun, di mana 0,5 ton karbon berasal dari penyerapan karbon organik tanah dan 1,0 ton karbon tambahan dari biomassa. Secara umum, ekosistem terestrial memiliki potensi yang signifikan untuk penyerapan karbon terkait dengan perubahan tata guna lahan. Lebih lanjut, kapasitas lahan untuk menyimpan karbon, sangat penting untuk menjembatani waktu sampai teknologi baru dimungkinkan untuk mengatasi perubahan iklim dalam skala yang lebih besar. Selain itu, opsi menyimpan karbon dalam ekosistem terestrial melalui aksi pemulihan lahan dan ekosistem telah menghasilkan berbagai manfaat ganda yang juga harus diperhitungkan. Beberapa manfaat termasuk: meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi kerawanan pangan, meningkatkan aliran air, meningkatkan tutupan hutan nasional untuk meningkatkan kapasitas adaptif ekosistem terkait, menjaga keanekaragaman hayati, dan memulihkan integritas ekologi di kawasan lindung dan bentang alam penting dari dampak buruk perubahan iklim, dengan penekanan pada ekosistem yang rentan dan spesies dilindungi.

Indonesia memandang mitigasi dan adaptasi memiliki peran yang saling melengkapi dalam merespon perubahan iklim yang dilakukan pada skala spasial, temporal, dan kelembagaan yang berbeda. Sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia berkomitmen tinggi untuk menurunkan emisi GRK, sekaligus merupakan komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi GRK global. Pada NDC Pertama, Indonesia memiliki target tanpa syarat sebesar 29% dan target bersyarat hingga 41% dibandingkan dengan Business As Usual pada tahun 2030. Melalui visi yang disampaikan di dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050, dalam skenario yang paling ambisius (LCCP) Indonesia akan meningkatkan pengurangan emisi GRK dengan

puncak emisi GRK nasional (seluruh sektor) tercapai pada tahun 2030, sehingga emisi bersih mencapai 1.244 juta ton CO2e atau setara 4,23 ton CO2e per kapita. Setelah itu, *net emitter* di sektor hutan dan tata guna lahan akan terus mengalami penurunan dan mencapai tingkat emisi bersih untuk seluruh sector sebesar 540 juta ton CO2e pada tahun 2050 atau setara dengan 1,6 ton CO2e per kapita, dan terus mengeksplorasi peluang untuk mencapai kemajuan lebih cepat menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dokumen LTS-LCCR berperan penting dalam: (i) menyelaraskan tujuan dan target iklim dengan tujuan nasional, sub-nasional dan internasional termasuk SDGs; (ii) melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah *(Non Party Stakeholders*, NPS), (iii) meningkatkan peluang untuk inovasi, dan (iv) memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat. LTS-LCCR 2050 menetapkan sasaran adaptasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap hilangnya PDB nasional sebesar 3,45% pada tahun 2050, melalui peningkatan ketahanan pada empat kebutuhan dasar (pangan, air, energi, dan kesehatan lingkungan), dengan tiga target bidang ketahanan (ekonomi, sosial dan kesejahteraan, serta ekosistem dan bentang alam) (KLHK 2021).

Untuk mencapai target ini, sektor kehutanan melakukan berbagai upaya yang cukup besar untuk mempertahankan tren peningkatan net sink setelah tahun 2030, transisi yang signifikan dari sektor energi dengan meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi batubara dalam jumlah besar dan implementasi *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCS/CCUS) dan *Bioenergy with Carbon Capture and Storage* (BECCS). Target ambisius ini membutuhkan perubahan transformasi nasional baik dalam sistem energi maupun sistem pangan dan tata guna lahan, yang diperlukan untuk mengatasi potensi pertukaran di antara sejumlah besar target seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, menghindari deforestasi, penggunaan air tawar, persaingan penggunaan lahan serta konservasi keanekaragaman hayati.

Meskipun NDC dan LTS belum difokuskan pencermatannya pada kegiatan konservasi keanekaragaman hayati secara kuantitatif, namun secara tidak langsung tergambarkan dari kegiatan konservasi hutan alam, baik untuk areal yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Penggunaan data dan informasi sebaran nilai konservasi tinggi (High Conservation Value, HCV), kualitas hutan, dan nilai daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan, perlindungan hutan alam dapat diarahkan pada pemanfaatan kawasan lindung. Sektor FOLU memiliki peranan yang penting dalam usaha pencapaian target NZE nasional, terutama untuk mengimbangi emisi dari sektor yang sulit untuk menurunkan emisinya, khususnya sektor energi, sehingga kemampuan untuk mempertahankan tren net-sink setelah 2030 akan menentukan ketercapaian ambisi NZE Indonesia.

Sebagai *National Focal Point* pada berbagai isu lingkungan hidup terutama pada perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun dokumen Strategi Implementasi NDC, *Roadmap* NDC Mitigasi, LTS-LCCR 2050, serta berbagai peraturan perundangan terkait bidang pengendalian perubahan iklim, salah satunya Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Upaya dan target penurunan emisi GRK didukung oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/ penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan sektor kehutanan menuju *"Net Sink"* pada tahun 2030 *(Indonesia's FOLU Net Sink 2030)*.

Dalam mencapai target jangka panjang, NDC berperan untuk menjembatani komitmen penurunan emisi menuju *Net Sink* melalui penguatan dan peningkatan aksi mitigasi dan dukungan internasional, terutama pada sektor lahan dan kehutanan sebagai salah satu sektor kunci. Dalam komitmen NDC, sektor FOLU mengalami tren penurunan nilai emisi sejak tahun 2010, namun masih sebagai sektor pengemisi GRK (*net emitter*), dengan tingkat emisi pada tahun 2030 sebesar 216 juta ton CO2e, sementara pada skenario LTS yang sejalan dari target Paris (LCCP), sektor ini sudah mencapai kondisi Net Sink dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO2e. Untuk mencapai *Net Sink*, aksi mitigasi yang tertuang dalam target NDC masih harus ditingkatkan untuk menjaga tren penurunan emisi sektor FOLU. Mempercepat pelaksanaan aksi mitigasi, terutama pencegahan dan penurunan deforestasi dan degradasi pada ekosistem terestrial serta emisi dari ekosistem gambut, dapat menghindari *locked-in emission*. Dalam konteks sektor FOLU, *locked-in emission* berkaitan dengan rusaknya ekosistem yang sulit dipulihkan hingga tidak dapat pulih kembali atau *irreversible*, misalnya perubahan kemampuan ekosistem lahan gambut dalam menyerap air dari hidrofilik/suka air menjadi hidrofobik/menolak air, yang merupakan awal dari kondisi kering tak balik atau *irreversible drying* (Noor et al. 2014). Pada kondisi terjadinya *locked-in*, emisi sektor FOLU semakin meningkat yang akan menyebabkan semakin tingginya beban biaya mitigasi.

Upaya signifikan untuk mengurangi emisi sektor FOLU dan mengubahnya menjadi net sink pada tahun 2030 (dalam skenario LCCP) akan sangat bergantung pada keberhasilan upaya-upaya berikut ini:

1. Mengurangi emisi dari deforestasi dan lahan gambut (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut);
2. Meningkatkan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon (dengan mengurangi degradasi dan meningkatkan regenerasi hutan);
3. Memulihkan lahan gambut;
4. Melakukan restorasi hutan (pengayaan penanaman/peningkatan sink),
5. Mengadopsi praktik pengelolaan hutan lestari; dan
6. Memaksimalkan penggunaan lahan yang tidak produktif untuk pembangunan hutan dan pertanian serta perkebunan

KLHK (2022) juga telah menyusun Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Penyusunan Rencana Operasional yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan Manual/*guidelines*. Manual/*guidelines* disusun sebagai berikut:

1. Manual/*guidelines* pengelolaan hutan lestari berkaitan dengan penerapan teknik *Reduced Impact Logging*, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial, multi usaha kehutanan, pencegahan dan pengendalian deforestasi dan degradasi pada lahan mineral dan gambut, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi.
2. Manual/*guidelines* operasional peningkatan cadangan karbon dengan kegiatan utama

meliputi penanaman hutan tanaman lahan mineral, pengayaan dan rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman mangrove, restorasi-replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian.

3. Manual/*guidelines* operasional peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan kegiatan utama meliputi perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, *high conservation value forest* dan kelola fragmentasi habitat, kemitraan konservasi, pemilikan kawasan dan peran serta masyarakat, intensifikasi jasa lingkungan, taman hutan raya dan kebun raya, pencegahan dan pengendalian deforestasi dan degradasi pada lahan mineral dan gambut, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4. Manual/*guidelines* operasional pengelolaan ekosistem gambut dengan kegiatan utama meliputi pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi vegetasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pembasahan (*rewetting*) gambut, penegakan hukum, pembinaan konsesi, kemitraan masyarakat pengembangan program desa mandiri peduli gambut dalam rangka pengendalian kerusakan ekosistem gambut, penyiapan dan dukungan sarana, pencegahan dan pengendalian deforestasi dan degradasi pada lahan mineral dan gambut, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5. Manual/*guidelines* instrumen dan informasi dengan kegiatan utama meliputi sosialisasi dan komunikasi publik, *law enforcement,* evaluasi, kebijakan *Review Renew Establish* (RRE) dan standarisasi.

B. Tujuan dan Sasaran

Dokumen Rencana Kerja Bidang Konservasi untuk mendukung Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 akan menjabarkan; 1) petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan; 2) pendetilan program kerja dan kegiatan; 3) pendetilan lokasi kegiatan; 4) penyusunan kalender kegiatan; 5) penyusunan rencana penganggaran; 6) pengukuran, verifikasi; dan pelaporan; dan 7) pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap capaian target Rencana Operasional FOLU *Net Sink* 2030 secara detail dan cermat.

B.1 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Bidang Konservasi bertujuan untuk mendukung Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 sebagai berikut:

1. Menjelaskan prosedur kerja Bidang Konservasi dalam rangka mendukung Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030;
2. Menjabarkan target dan program Bidang Konservasi dalam rangka mendukung Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030;
3. Menjelaskan tata waktu pelaksanaan Bidang Konservasi dalam rangka mendukung Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030.
4. Menjabarkan upaya-upaya Bidang Konservasi di tingkat tapak dalam rangka mendukung Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030.

B.2 Sasaran

Dalam mendukung program FOLU *Net Sink* 2030, Bidang Konservasi menetapkan sasaran:

1. Pencegahan deforestasi dan degradasi (DD) hutan alam di lahan mineral dan lahan gambut di dalam kawasan, dengan total luas area sebesar 396.962 ha dengan lokasi kegiatan tersebar di 6 Cagar Alam (CA), 11 Suaka Margasatwa (SM), 2 Taman Wisata Alam (TWA), 3 Taman Nasional (TN), dan 2 Taman Hutan Raya (THR).
2. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui upaya peningkatan cadangan karbon dengan pengayaan (*Enhanced Natural Regeneration*, ENR), seluas 444 ha di 6 Cagar Alam, 4 Suaka Margasatwa, 4 Taman Nasional, dan 2 Taman Hutan Raya.
3. Upaya peningkatan cadangan karbon melalui rehabilitasi hutan untuk pemulihan fungsi dan untuk fungsi tata air dan layanan jasa lingkungan lainnya dengan non-rotasi seluas 653.989 ha di 13 Cagar Alam, 11 Suaka Margasatwa, 2 Taman Wisata Alam, 3 Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA), 8 Taman Nasional TN, dan 2 Taman Hutan Raya (THR).
4. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui rangkaian kegiatan pembasahan (*rewetting*) dan penghijauan kembali (revegetasi) pada lahan gambut di dalam kawasan Termasuk dalam kegiatan ini adalah upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui perbaikan pengelolaan tata air gambut, seluas 9.446 ha dengan lokasi di 3 Cagar Alam, 1 Suaka Margasatwa, 1 Taman Wisata Alam dan 5 Taman Nasional.
5. Upaya pencegahan terjadinya emisi gas rumah kaca yang berasal dari Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di luar kawasan melalui perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari, termasuk habitatnya, melalui penataan fragmentasi kawasan/habitat, serta penetapan kewajiban menjaga ABKT, kewajiban penerapan koridor satwa dalam konstruksi pembangunan serta kegiatan kemitraan dengan masyarakat setempat dan masyarakat adat setempat. Taksiran luas ABKT adalah **39.689.111,18** ha.

C. Organisasi Bidang Konservasi

C.1. Dasar Hukum

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan sektor normatif untuk mendukung pencapaian target NDC melalui peningkatan pelaksanaan aksi mitigasi sektor FOLU menuju *net sink*. Beberapa kebijakan utama sektor lahan dan kehutanan yang dapat mendorong perubahan tata guna lahan ke depan disajikan pada. Konservasi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem lainnya sangat penting bagi kesejahteraan manusia, yang dalam implementasinya memerlukan kerangka hukum yang efektif untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memberikan insentif untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Berbagai dasar kebijakan terkait konservasi keanekaragaman hayati yang dapat mendukung Indonesia dalam pencapaian *net sink* pada tahun 2030 disajikan dalam **Tabel 1.1** berikut ini:

TABEL 1 | Kebijakan kunci bidang konservasi menuju *Indonesia's FOLU Net Sink 203*

No	Dasar Kebijakan	Keterangan
Pencegahan Dan Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan Alam		
1	Peraturan Pemerintah (PP) No.104/2015	Mengatur perubahan fungsi kawasan hutan yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi tetap
2	PerMenLHK No.17/2017 mengenai Perlindungan Hutan Primer dan Lahan Gambut di Dalam Area Konsesi Hutan Tanaman	Kebijakan untuk menkonservasi hutan primer dan ekosistem gambut yang memiliki fungsi lindung di dalam areal kerja hutan tanaman
3	PerMenLHK No.70/2017 mengenai insentif RBP REDD+	Kebijakan yang mengatur insetif untuk perusahaan yang menjaga hutan alam di areal kerjanya, sebagai bagian dari skema REDD+.
4	PerMenLHK No.8/2021 mengenai Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Penataan batas dalam unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) harus memperhatikan keberadaan kawasan lindung, yang mencakup kawasan gambut, resapan air, cagar budaya, dll. Blok perlindungan dalam hutan produksi dibatasi pada kegiatan HHBK dan jasa lingkungan.
5	PerMenLHK No.7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan	Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan pada kawasan HPK dengan mengutamakan kriteria lahan tidak produktif. Keterangan: *Tidak produktif adalah dominasi lahan tidak berhutan lebih dari 70%
6	PerMentan No. 5/2018 mengenai Pembukaan Lahan dan Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar	Kebijakan yang memandatkan pemilik konsesi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di areal kerjanya dengan tidak menggunakan praktik bakar untuk pembukaan lahan.
7	Instruksi Presiden No 10/2011 mengenai Moratorium Perizinan Baru Dan Perbaikan Tata Kelola, yang selanjutnya menjadi Instruksi Presiden No 5/2019 tentang penghentian pemberian perizinan baru dan perbaikan tata kelola. Pada operasionalnya Instruksi Presiden ini, setiap 6 bulan sekali selalu disertai dengan SK MenLHK yang mengatur tentang Peta Indikatif (PIPPIB). SK terupdate adalah SK MenLHK No.5446/2021 tentang penetapan peta PIPPIB periode II tahun 2021	Mengatur kebijakan moratorium dan penangguhan izin baru dan perbaikan tata kelola hutan primer dan lahan gambut. Kebijakan moratorium ini bahkan sudah dibakukan menjadi kebijakan Penghentian izin baru dan perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Pada areal non gambut dan non hutan primer, Perizinan Berusaha dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan atau pemanfaatan HHBK dengan kriteria tidak mengubah bentang alam, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengubah fungsi utamanya.

No	Dasar Kebijakan	Keterangan
8	InPres No. 11/2015 mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	Kebijakan yang memandatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah yurisdiksinya dan menerapkan sanksi bagi pelaku bisnis yang tidak menerapkan pengelolaan kebakaran di wilayahnya.
9	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.	Menjabarkan pendekatan analisis spasial, seperti; Indeks Kualitas Hutan, Nilai Konservasi Tinggi (HCV), Jasa lingkungan ekosistem Tinggi, serta Indeks Biogeofisik (IBGF) Serapan Karbon, maupun Karhutla. Selain itu kebijakan ini juga memberikan pertimbangan atas Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan/RKTN 2011-2030 serta pertimbangan kapasitas kelembagaan dan modal sosial kemasyarakatan di tingkat tapak.
Pengelolaan Hutan Bekelanjutan		
10	PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Pelepasan kawasan hutan pada hutan produksi yang dapat dikonversi hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif.
11	PerMenLHK No. 30/2016 mengenai Evaluasi Performa Pengelolaan Hutan	Kebijakan yang mewajibkan seluruh pemilik konsesi untuk memiliki sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan.
12	PerMenLHK No.8/2021 mengenai Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat melakukan lebih dari satu sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya, termasuk silvikultur intensif.
13	PerDirJen PHL No.9/2018 mengenai Teknik Reduce Impact Logging (RIL)	Kebijakan yang memandatkan pemilik konsesi untuk mengimplementasikan teknologi RIL untuk meningkatkan efisiensi penebangan kayu dan meminimumkan dampak ekologi dari kegiatan penebangan.
14	PerDirjen PHL No. 4/2019 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari No. 12/2018 tentang Pedoman Teknis Silvikultur Intensif (SILIN) Meranti Dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi	Kebijakan yang memandatkan pemilik konsesi untuk mengimplementasikan SILIN seluas minimal 20% dari luas areal produktifnya.
Peningkatan Cadangan Karbon		
15	PP No.23 dan 24/2021 mengenai Penyelenggaraan Kehutanan	Kebijakan ini merupakan perpanjangan dari UUCK yang mengatur keterlanjuran kegiatan budidaya di dalam Kawasan hutan melalui skema TORA dan perhutanan sosial untuk dikonversi menjadi sistem agroforestry untuk meningkatan kualitas tutupan lahan sebagai bagian dari program jangka benah.

No	Dasar Kebijakan	Keterangan
16	PerMenLHK No.39/2016 yang merevisi PerMenLHK No.9/2013 mengenai Pedoman dan Dukungan/Insentif Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dukungan dan insentif untuk kegiatan RHL dan optimisasi penggunaan lahan tidak produktif melalui penenaman multi-purpose tree species (MPTS) dalam sistem agroforestry.
17	PerMenLHK No.105/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Sinkronisasi RHL dengan perizinan perhutanan sosial, yakni permohonan usulan kegiatan RHL dapat diajukan oleh ketua kelompok masyarakat yang tergabung dalam izin perhutanan sosial.
18	PerMenLHK No. 62/2019 Mengenai Pengaturan Area Hutan Tanaman Untuk Mengoptimumkan Fungsi Produksi	Kebijakan yang memperbolehkan penanaman dari komoditas hutan bukan kayu (HHBK) (misalnya tanaman pangan, bioenergy, dan agroforestry) di lahan tidak produktif atau kegiatan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) di hutan alam yang berada di dalam konsesi.
Pengelolaan Ekosistem Gambut		
19	PerMenLHK No. 62/2019 Mengenai Pengaturan Area Hutan Tanaman Untuk Mengoptimumkan Fungsi Produksi	Kebijakan yang memperbolehkan penanaman dari komoditas hutan bukan kayu (HHBK) (misalnya tanaman pangan, bioenergy, dan agroforestry) di lahan tidak produktif atau kegiatan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) di hutan alam yang berada di dalam konsesi.
20	PerMenLHK No. 15/2017 mengenai Monitoring Tinggi Muka Air Lahan Gambut	Kebijakan yang mewajibakan pengelola lahan gambut untuk mempertahankan tinggi muka air lahan gambut tidak lebih dari 40 cm.
21	PerMenLHK No.16 /2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut	Menyatakan bahwa pemulihan fungsi ekosistem gambut merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula
22	SK MenLHK No.246/2020 tentang Rencana Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional (RPPEG)	RPPEG nasional 2020-2049 sebagai pedoman pengelolaan lahan gambut yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut.
Konservasi Keanekaragaman Hayati		
23	a. UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya b. PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa c. PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	1) Melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar dilindungi melalui layanan pengaduan multimedia terhadap kepemilikan dan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi; 2) Melakukan operasi dan satwa liar dilindungi, cyber patrol peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi, pembentukan Unit 9-K, Pembangunan check point dilokasi rawan peredaran; dan 3) Upaya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perusakan kawasan konservasi, kepemilikan dan peredaran peredaran ilegal

No	Dasar Kebijakan	Keterangan
24	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional
25	a. UU No.26/2007 mengenai Penataan Ruang, b. PerMenLHK No.29/2009 mengenai Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, c. PP No.64/2021 tentang Badan Bank Tanah d. Permen LH no. 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati e. Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	Perlindungan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di luar kawasan hutan dapat diarahkan sebagai fungsi lindung dalam tata ruang. Dimandatkan kepada pemerintah daerah untuk menysun profil keanekaragaman hayati dengan pembiayaan APBD dengan output berupa rencana pengelolaan hayati. Areal BKT di luar kawasan yang berhutan dan tidak dimanfaatkan (terlantar dan tidak ada penguasaan diatasnya) masuk ke dalam kewenangan bank tanah.
26	Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Memberikan arahan pengelolaan kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya
27	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Mengatur upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai penyangga kehidupan perlu diselenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan
28	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mengatur tentang Kriteria Baku Kerusakan Mangrove dan Pelaksanaan Pengawasan Penaatan
29	a. PP No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah b. PerMentan No.38/2020 tentang Sertifikasi ISPO	Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi dalam hal areal konservasi berada pada areal hak guna usaha. Pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari keriteria sertifikasi ISPO.

No	Dasar Kebijakan	Keterangan
30	a. PP No.23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan b. PerDirJen KSDAE No.6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Lahan yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam hutan konservasi diselesaikan dengan mekanisme kemitraan konservasi melalui skema pemberdayaan masyarakat dan skema pemulihan ekosistem.
31	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.48/Menhut-Ii/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pemulihan ekosistem penyusun KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam) sebagaimana dimaksud antara lain meliputi kegiatan: Perlindungan dan pengamanan KSA atau KPA termasuk koridor bagi penyebaran satwa liar dan transfer materi genetik, Pemulihan habitat bagi spesies satwa atau tumbuhan asli atau endemik, Mempertahankan dan memulihkan dinamika populasi dan struktur vegetasi, dan Mengurangi atau menghilangkan ancaman terhadap kerusakan ekosistem.
32	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	Adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Kebijakan in mengatur tentang: (a) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; (b) Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; (c) Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut; (d) Jangka Benah kebun rakyat; (e) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; (f) Percepatan pengelolaan perhutanan sosial; (g) Sanksi administratif
33	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.49/Menhut-Ii/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam	Pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan ditujukan untuk menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam) yang terdegradasi, baik dalam bentuk pemulihan maupun perubahan fungsi.
34	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam	Petunjuk teknis evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam bertujuan sebagai acuan kepala UPT/UPTD dalam melakukan evaluasi penerapan kriteria dan kegiatan pada zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar dapat dilakukan secara efektif, efisien dan optimal.
35	Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: INS.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan Dan Perburuan Liar Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan	Instruksi pada semua jajaran KLHK hingga kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar berperan aktif dalam penyelamatan satwa liar dari penjeratan dan perburuan. Khusus untuk pimpinan daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota perlu melakukan sinkronisasi program dan kegiatan di wilayah kerjanya dengan upaya perlindungan satwa liar dari penjeratan dan perburuan.

No	Dasar Kebijakan	Keterangan
36	Peraturan Direktur jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi Balai Besar/ Balai KSDA dan mempertimbangkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati pada area-area yang berada di luar KSA/KPA dan TB.

C.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dijelaskan pada **Gambar 1** dengan susunan anggota Pokja dituliskan pada **Tabel 2.**

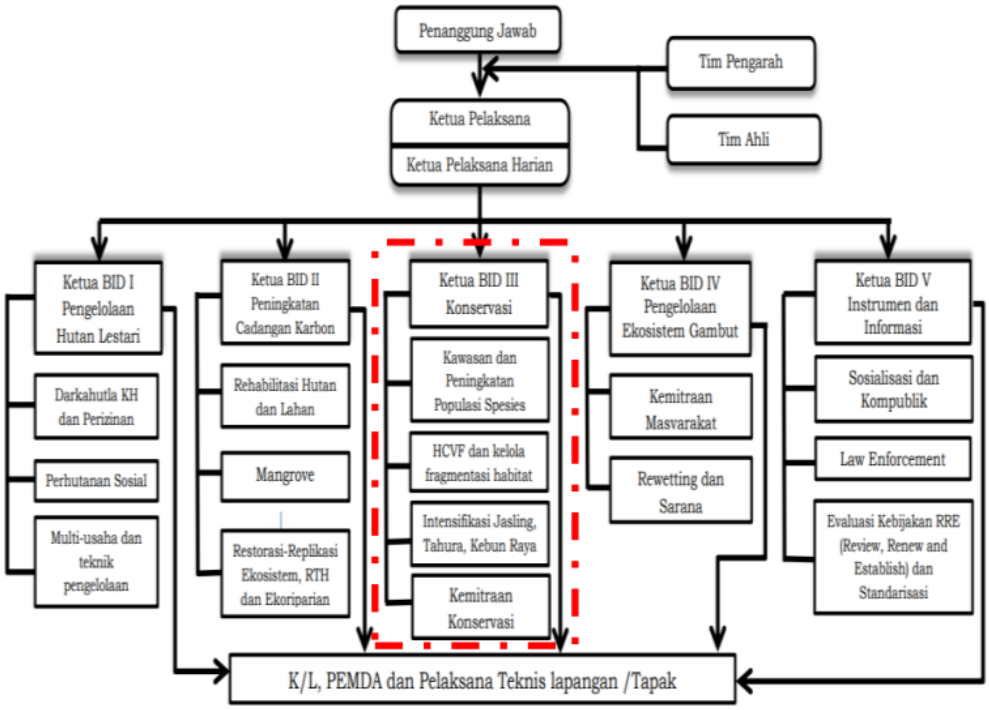

GAMBAR 1 | Struktur organisasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*

Sementara itu, untuk susunan organisasi Bidang Konservasi yang terdiri dari 4 kelompok kerja (pokja) tersaji sebagai berikut:

TABEL 2 | Pokja Bidang Konservasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*

Ketua Bidang Konservasi : Ir. Wiratno, M.Sc		
	Nama Kelompok Kerja	**Anggota**
POKJA 1 :	Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies	**1. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik** 2. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi 3. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 4. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem 5. Kepala Pusat Kebijakan Strategis
POKJA 2 :	Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya, KHDTK	**1. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi** 2. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi 3. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi 4. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan 5. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
POKJA 3 :	*High Conservation Value Forest* dan Kelola Fragmentasi Habitat	**1. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem** 2. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi 3. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi 4. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik 6. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan 7. Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan 8. Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
POKJA 4 :	Kemitraan Konservasi	**1. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi** 2. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat 3. Direktur Kemitraan Lingkungan 4. Direktur Konservasi Tanah dan Air 5. Kepala Pusat Kebijakan Strategis

C.3. Tugas dan Fungsi

Tugas Ketua Bidang Konservasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun manual/*guidelines* operasional peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan kegiatan utama meliputi perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi species, *high conservation value forest* dan kelola fragmentasi habitat, kemitraan konservasi, pemilikan kawasan dan peran serta masyarakat, intensifikasi jasa lingkungan, taman hutan raya dan kebun raya.
1. Memantau implementasi operasional peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan kegiatan utama meliputi perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi species, *high conservation value forest* dan Kelola fragmentasi habitat, kemitraan konservasi, pemilikan kawasan dan peran serta masyarakat, intensifikasi jasa lingkungan, taman hutan raya dan kebun raya.
2. Mengevaluasi implementasi operasional peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan kegiatan utama meliputi perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, high conservation value forest dan kelola fragmentasi habitat, kemitraan konservasi, pemilikan kawasan dan peran serta masyarakat, intensifikasi jasa lingkungan, taman hutan raya dan kebun raya.
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

C.4. Tugas Kelompok Kerja

Pelaksanaan kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di bagi menjadi lima bidang yaitu Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang III Konservasi, Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Bidang V Instrumen dan Informasi. Tugas Ketua Bidang III Konservasi dirinci pada **Tabel 3** di bawah ini.

TABEL 3 | Tugas Kelompok Kerja

Pokja		Tugas
POKJA 1 :	**Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies**	1. Melaksanakan penyusunan manual/*guidelines* operasional perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies; 2. Melaksanakan implementasi operasional perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies; dan 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.

POKJA 2 :	**Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya, KHDTK**	1. Melaksanakan penyusunan manual/*guidelines* operasional intensifikasi jasa lingkungan, taman hutan raya dan pengembangan kebun raya; 2. Melaksanakan implementasi operasional intensifikasi jasa lingkungan, pengembangan dan pengelolaan taman hutan raya dan pengembangan kebun raya; 3. Melaksanakan implementasi operasional intensifikasi jasa lingkungan, dan mendorong serta mendukung pemerintah daerah dalam membangun dan mengelola taman hutan raya dan kebun raya; 4. Mendorong dan memfasilitasi RTH, Tahura dan Kebun Raya dengan dukungan KPBU dan kerja sama masyarakat; dan 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang
POKJA 3 :	***High Conservation Value Forest* (HCVF) dan Kelola Fragmentasi Habitat**	1. Melaksanakan penyusunan manual/*guidelines* operasional pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, *high conservation value forest* dan penataan fragmentasi habitat; 2. Melaksanakan implementasi operasional pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, *high conservation value forest* dan melakukan penataan, tata kelola habitat yang terfragmentasi dan pemulihannya; dan 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang
POKJA 4 :	**Kemitraan Konservasi**	1. Melaksanakan penyusunan manual/*guidelines* operasional kemitraan konservasi; 2. Melaksanakan implementasi operasional kemitraan konservasi; 3. Mendorong dan memberikan dukungan untuk upaya dan langkah kemitraan konservasi oleh Pemerintah Daerah dan para pihak; 4. Menyiapkan dan fasilitasi langkah kemitraan masyarakat; 5. Melakukan evaluasi untuk efektifitas kemitraan konservasi. 6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang

02

Rencana Kerja Tahunan

BAB 2 | RENCANA KERJA TAHUNAN

A. Strategi dalam Mendukung *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 34 provinsi dan total 16.671 pulau bernama terverifikasi dan terstandarisasi per 2018 (UNGEGN 2019) yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa dan dipengaruhi oleh kondisi iklim yang khas. Sebanyak 6.000 pulau berpenghuni dan sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil (kurang dari 2.000 km2). Posisi geografis dan karakteristik fisik kepulauan Indonesia, berkontribusi terhadap kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, yang ditemukan di seluruh fungsi kawasan hutan (**Gambar 2**).

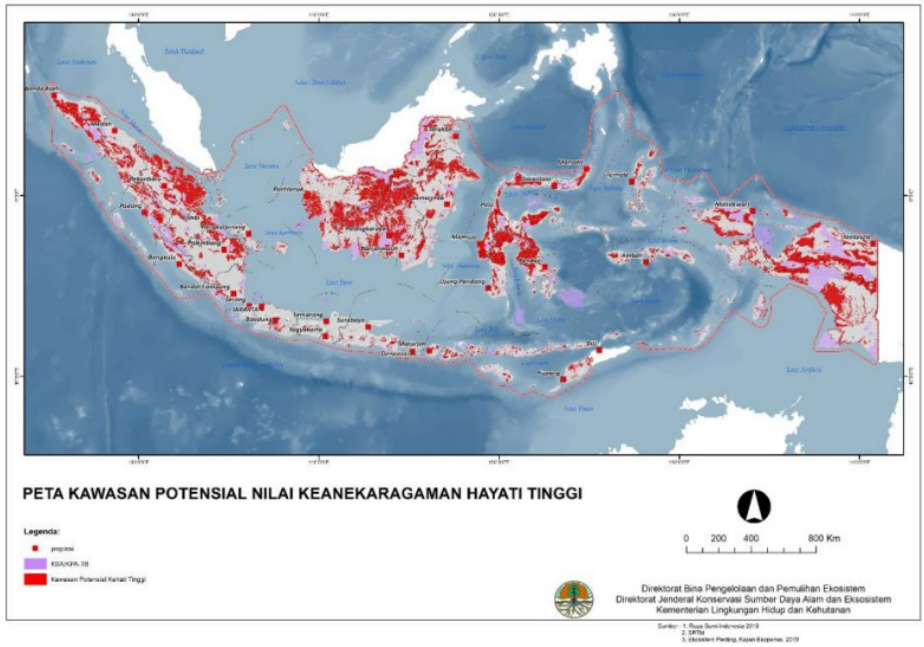

GAMBAR 2 | Potensi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi pada seluruh fungsi kawasan hutan

Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD, 2012), Indonesia memiliki 10% spesies berbunga dunia (diperkirakan 25.000 jenis tanaman berbunga dimana 55% diantaranya adalah endemik dan menempati peringkat sebagai salah satu pusat agrobiodiversitas kultivar tanaman dan ternak peliharaan dunia. Untuk keanekaragaman fauna, sekitar 12% mamalia dunia (515 spesies) terdapat di Indonesia, menempati urutan kedua setelah Brasil; sekitar 16% reptil dunia (781 spesies) dan 35 spesies primata, menempatkan Indonesia di urutan keempat dunia; 17% dari total spesies burung (1.592 spesies) dan 270 spesies amfibi menempatkan Indonesia masing-masing pada peringkat kelima dan keenam dunia.

Potensi keanekaragaman hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan pendukung utama pembangunan rendah karbon. Keanekaragaman hayati meningkatkan resiliensi pada beberapa tipe ekosistem. Hutan yang masih terjaga dengan baik akan memiliki cadangan karbon yang lebih besar daripada hutan terdegradasi/terfragmentasi. Berbagai bukti ilmiah (Hicks *et al.* 2014) menunjukkan bahwa area berhutan yang terintegrasi, memiliki ketahanan yang lebih tinggi daripada area berhutan yang luasannya kecil dan menyebar. Melestarikan hutan alam dapat mempercepat resiliensi dengan mempercepat waktu pemulihan ekosistem hutan akibat gangguan yang berhubungan dengan iklim seperti kebakaran dan kekeringan.

Meskipun demikian, kebutuhan pembangunan saat ini, tetap menjadi tantangan utama bagi keberlanjutan kehidupan spesies Indonesia yang kaya dan beragam, karena salah satu ancaman utamanya adalah potensi hilangnya dan/atau pergeseran habitat yang sesuai. Selain itu, kenaikan suhu juga menghadirkan tantangan lain. Sebagai negara kepulauan, spesies kepulauan memiliki mobilitas dan jangkauan wilayah yang terbatas, sehingga meningkatkan risiko kepunahan karena spesies terperangkap. Perubahan tersebut telah memberikan implikasi luas bagi banyak aspek keanekaragaman hayati, termasuk distribusi spesies, fenologi, dinamika populasi, struktur komunitas,dan fungsi ekosistem (IPBES 2019).

Perubahan iklim merupakan kontributor langsung terhadap hilangnya keanekaragaman hayati. Di bawah perubahan iklim, Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan suhu sekitar 0,8°C pada tahun 2030 dan 0,8–2,0°C pada tahun 2050, dengan pemanasan yang lebih signifikan di pulau-pulau besar di bagian barat (yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan) (USAID, 2017). Selain itu, pola curah hujan diperkirakan akan berubah seiring dengan musim hujan yang lebih pendek dan gelombang panas yang panjang. Suhu yang lebih hangat meningkatkan risiko hama dan penyakit hutan, yang dapat mengakibatkan degradasi hutan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya habitat kritis untuk spesies yang terancam punah (Oktaviani *et al.* 2011), termasuk mengubah siklus hidup dengan mengubah rentang habitat dan distribusi dan kelimpahan spesies, perubahan pola migrasi, dan perubahan frekuensi dan keparahan wabah hama dan penyakit. Peristiwa ekstrim seperti banjir dan kekeringan, serta perubahan jangka panjang akibat kenaikan permukaan laut, peningkatan suhu dan variasi pola curah hujan dapat membatasi pergerakan spesies pulau dalam mobilitas dan jangkauan. Hilangnya spesies dari suatu ekosistem tidak hanya memengaruhi spesies yang hilang, tetapi juga interaksi dengan spesies lain, serta fungsi ekologi secara umum (Sintayehu 2018, Weiskopf *et al.* 2020).

Menggunakan model biogeokimia global, Melilo *et al.* (2016) memperkirakan bahwa kawasan konservasi saat ini mampu menyerap 0,5 Pg karbon (1 Pg=1x1012 kg) setiap tahunnya, yaitu sekitar seperlima dari seluruh karbon yang mampu diserap oleh semua ekosistem terestrial setiap tahunnya. Kawasan konservasi mampu menyerap karbon dioksida (CO2) dari atmosfer melalui fotosintesis tanaman dan menyimpannya sebagai bahan organik di vegetasi dan tanah (Reilly *et al.* 2012). Struktur umur hutan juga memengaruhi tingkat penyimpanan karbon, dengan hutan muda umumnya menyerap karbon lebih cepat dari hutan tua (Pregitzer dan Euskirchen 2004). Kawasan konservasi terutama yang berhutan, dianggap sebagai komponen penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim berbasis lahan untuk mengurangi beban CO2 di atmosfer (Ricketts *et al.* 2010).

Degradasi fungsi area berhutan dalam kawasan konservasi sebagai dampak alih fungsi lahan ataupun akibat deforestasi tidak terencana (*unplanned deforestation*) akan memiliki dua konsekuensi bagi siklus karbon global. Pertama, pembukaan wilayah hutan dan pembakaran, akan melepaskan CO_2 ke atmosfer sehingga mempercepat perubahan iklim. Kedua, hilangnya vegetasi hutan menurunkan atau dapat juga menghilangkan kemampuan kawasan untuk menyerap karbon yang artinya, mengurangi kemampuan ekosistem terestrial dalam memperlambat laju perubahan iklim.

Mengingat peran penting kawasan konservasi dalam melindungi keanekaragaman hayati, memberikan jasa lingkungan dan sumber penghidupan bagi masyarakat serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim, maka pembangunan hutan konservasi ditujukan untuk: (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati; (2) Meningkatkan manfaat ekonomi kawasan konservasi bagi negara; (3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) dalam mendukung peningkatan nilai ekspor; (4) Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi; (5) Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat; (6) Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi; dan (7) Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi. Sejalan dengan tujuan pembangunan hutan konservasi dan strategi konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, dalam mendukung *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, maka Bidang Konservasi dibagi menjadi empat Kelompok Kerja (POKJA) yaitu: **(1) Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies**; **(2) Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya dan KHDTK; (3) *High Conservation Value* (HCV) dan Kelola Fragmentasi Habitat; dan (4) Kemitraan Konservasi.** Untuk bidang konservasi, arahan pelaksanaan kegiatan sektor kehutanan dan lahan dijabarkan melalui pelaksanaan kegiatan yang meliputi berbagai implementasi aksi mitigasi 4+ yaitu empat kegiatan di dalam kawasan hutan konservasi dan satu kegiatan (+) di luar kawasan hutan konservasi sebagai berikut:

1. **Pencegahan Deforestasi dan Degradasi (DD) Hutan Alam**
   Upaya pencegahan terjadinya deforestasi tidak terencana (*unplanned*) di lahan mineral dan lahan gambut di dalam kawasan konservasi. Luas target aksi mitigasi ini adalah 309,617 ha.

2. **Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) (*Enriched Natural Regenartion*)**
   Upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui upaya peningkatan cadangan karbon dengan pengayaan (*Enhanced Natural Regeneration*, ENR). Luas target aksi mitigasi ini adalah 444 ha.

3. **Peningkatan Cadangan Karbon (PCK) Non-Rotasi**
   Upaya peningkatan cadangan karbon melalui rehabilitasi hutan untuk pemulihan fungsi konservasi dan untuk fungsi tata air dan layanan jasa lingkungan lainnya dengan non-rotasi. Luas target aksi mitigasi ini adalah 638,548 ha.

4. **Pengelolaan Lahan Gambut (Restorasi)**
   Upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui rangkaian kegiatan mencakup kegiatan pembasahan (*rewetting*) dan penghijauan kembali (*revegetasi*) yang terutama difokuskan pada lahan gambut dalam yang terdapat di dalam kawasn konservasi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui

perbaikan pengelolaan tata air gambut. Luas target aksi mitigasi ini adalah 9,351 ha.

5. Konservasi Keanekaragamana Hayati Tinggi

Upaya pencegahan terjadinya emisi gas rumah kaca yang berasal dari Areal dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan konservasi melalui perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari, termasuk habitatnya. Dalam hal ini, pencegahan deforestasi untuk perlindungan hutan alam berkontribusi dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati, termasuk melalui penataan fragmentasi kawasan/habitat, serta penetapan kewajiban menjaga kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), serta kewajiban penerapan koridor satwa dalam konstruksi pembangunan serta kegiatan kemitraan konservasi dengan masyarakat lokal/setempat dan masyarakat adat setempat. Luas target aksi mitigasi ini adalah 39,287,508 ha.

A.1. Strategi Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies

Pemantapan kawasan adalah suatu upaya mempertahankan hutan alam dengan membatasi akses dan pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak terkendali serta mencegah konversi lahan. Upaya melestarikan hutan alam melalui pemantapan kawasan konservasi merupakan salah satu strategi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, cadangan karbon dan memberikan beragam manfaat jasa ekosistem pada masyarakat di wilayah hulu dan hilir.

Jika kawasan hutan mengalami ancaman deforestasi dan degradasi, status sebagai kawasan konservasi dapat membantu menyimpan cadangan karbon, melindungi keanekaragaman hayati, dan mempertahankan fungsi jasa lingkungan (pengendalian erosi tanah, pengaturan air dan iklim, perlindungan dari bahaya alam, dsb). Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi akan ditentukan oleh lokasi, pengelolaan kawasan dan karakteristik lokasi yang spesifik lainnya. Pemantapan kawasan konservasi juga dapat menguntungkan jasa lingkungan, misalnya untuk produksi pangan, melalui perlindungan hutan mangrove yang bermanfaat bagi sektor perikanan. Dengan demikian, manfaat mata pencaharian dari hutan konservasi bergantung pada pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, dan terutama mekanisme pembagian manfaat untuk mengurangi dampak negatifnya. Nilai manfaat tambahan dari strategi ini, ditentukan oleh kesesuaian spasial dari fungsi jasa ekosistem dan lokasi kawasan konservasi relatif terhadap masyarakat penerima manfaat. Sinergi yang dapat dihasilkan dari melestarikan keanekaragaman hayati dan mempertahankan hutan konservasi adalah peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Kawasan konservasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya operasional dan biaya peluang, terutama jika tekanan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan/ atau konversi ke penggunaan lahan lain cukup tinggi.

Pentingnya menjaga fungsi ekosistem dan populasi spesies, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi, menghasilkan strategi Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies Bidang Konservasi yaitu menerapkan berbagai kegiatan mitigasi yang mencakup semua kegiatan aksi mitigasi dalam bidang Konservasi (+) sebagai berikut:

1. Aksi pencegahan deforestasi dan degradasi di tanah mineral dan gambut:

a. Pemantapan kawasan konservasi;
b. Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan;

c. Penguatan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak (RBM);
d. Inventarisasi dan verifikasi kehati.

2. Aksi peningkatan populasi spesies
a. Penetapan jenis tumbuhan dan satwa prioritas di setiap KK

3. Aksi pengelolaan hutan lestari (ENR):
a. Pembinaan habitat satwa liar melalui pengkayaan tanaman pakan satwa;
b. Perlindungan, pengamanan, dan penjagaan kawasan.

4. Aksi peningkatan cadangan karbon non-rotasi:
a. Pembinaan populasi.

5. Aksi restorasi ekosistem gambut:
a. Perlindungan, pengamanan, dan penjagaan kawasan.

6. Aksi konservasi keanekaragaman hayat tinggi pada Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT/HCV):
a. Inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati.

Kemitraan dengan masyarakat sekitar KK tanpa atau dengan dukungan pihak lain, akan meningkatkan pemahaman masyarakat pada kawasan dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Masyarakat sekitar KK sebagai ujung tombak domestikasi tumbuhan maupun satwa yang telah berhasil ditangkarkan akan meningkatkan populasi jenis, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keunikan tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan dan dibudidayakan (domestikasi) akan menjadi atraksi wisata alam di KK yang menarik.

A.2. Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya, dan KHDTK

Jasa lingkungan di kawasan konservasi berupa panas bumi, air, energi air, karbon dan bentang alam yang menjadi tempat wisata perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat (Dit PJLKK 2021). Sebagai alternatif upaya meningkatkan pendapatan negara dari PNBP dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi, perluasan izin wisata alam (Izin Usaha Jasa Lingkungan) dapat diberikan pada zona pemanfaatan. Hingga tahun 2017, luas ruang KK yang telah dinyatakan sebagai zona pemanfataan untuk penyelenggaran berbagai kegiatan jasa pariwisata alam dan jasa lingkungan lainnya adalah seluas 4.33 juta hektar. Secara mendasar, luas ruang yang mengandung sumberdaya wisata alam di dalam berbagai kawasan konservasi di Indonesia setara dengan total luas KK itu sendiri (27.26 juta hektar) yang meliputi keenam kategori KK dan kategori KSA/KPA. Luas areal yang telah diberikan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) baru mencapai 16.8 ribu hektar (Dit PJLKK 2021) atau 0,4%, sehingga sangat potensial untuk dilakukan pengembangan wisata alam (**Gambar 3 dan 4**).

Kegiatan wisata alam menjadi salah satu kegiatan penting dalam pencapaian target *Indonesia's FOLU Net Snk 2030* karena wisata alam dapat mengurangi deforestasi dengan memberikan alternatif ekonomi kepada masyarakat efin untuk turut berpartisipasi dalam melestarikan efinit tersebut untuk nilai alam dan ekonominya, dan memperluas kesadaran akan pentingnya melestarikan hutan. Wisata memiliki potensi untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan nilai alam dan

mengarah pada perilaku dan kegiatan sadar lingkungan untuk melestarikan lingkungan. Secara umum, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat efin dalam mencegah deforestasi dan degradasi di dalam hutan konservasi, mereka harus dapat hidup layak secara ekonomi. Oleh karenanya kegiatan untuk meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar KK dan pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar KK menjadi esensial.

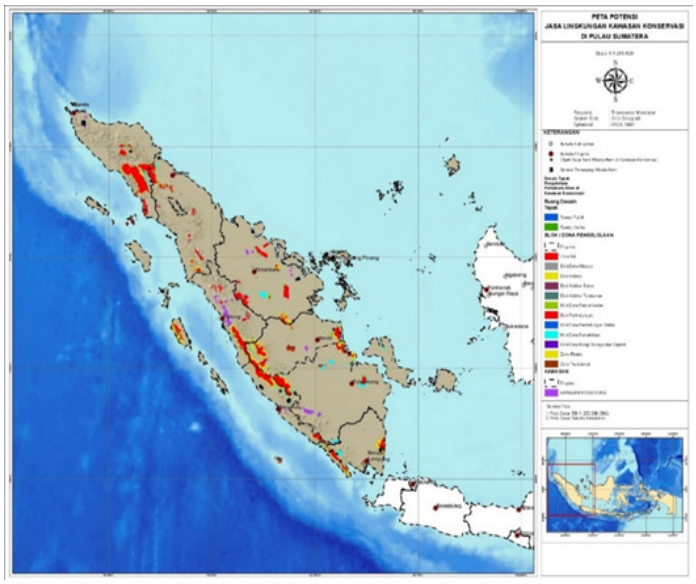

GAMBAR 3 | Peta potensi jasa lingkungan di Pulau Sumatera

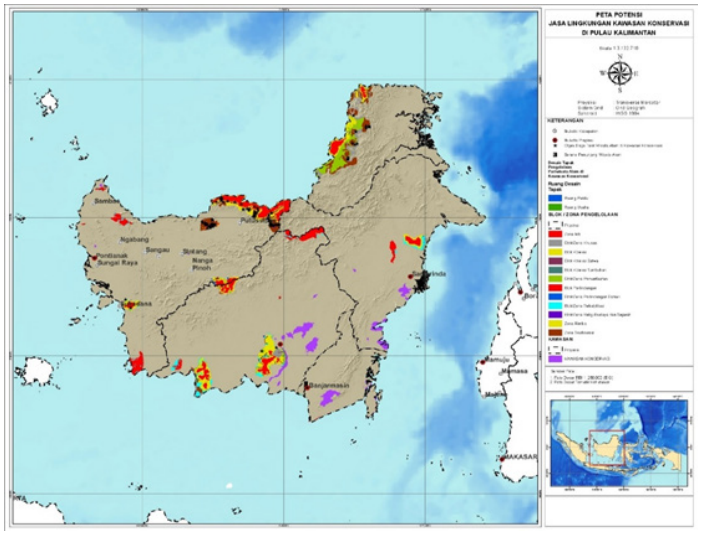

GAMBAR 4 | Peta potensi jasa lingkungan di Pulau Kalimantan

Pada strategi intensifikasi jasa lingkungan, taman hutan raya dan KHDTK, kegiatan mitigasi yang akan diimplementasikan meliputi satu aksi mitigasi yaitu *Aksi pencegahan deforestasi dan degradasi di hutan alam (tanah mineral dan gambut)*, yang meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Intensifikasi jasa lingkungan dan wisata alam;
2. Pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air;
3. Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar efinit konservasi;
4. Pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar efinit konservasi.

Wisata alam yang dikembangkan di Kawasan Konservasi adalah wisata yang terpandu, sehingga pergerakan dan aktifitas wisatawan terkontrol untuk mencegah rusaknya Kawasan Konservasi dan masuknya jenis-jenis tumbuhan maupun satwa efiniti yang sengaja maupun tidak sengaja dibawa oleh para wisatawan. Keterkaitan dengan FOLU, wisatawan secara terpandu dapat melakukan penanaman jenis-jenis pohon efin yang telah ditangkarkan oleh Kawasan Konservasi efinit masyarakat mitra, di areal-areal terbuka yang secara aturan dimungkinkan. Bagi wisatawan kegiatan ini menarik karena mereka memiliki kenangan berupa tanaman di areal Kawasan Konservasi yang dikunjungi, bagi pengelola Kawasan Konservasi akan meringankan biaya restorasi areal Kawasan Konservasinya, sedangkan bagi mitra mereka mendapat penghasilan dari penyediaan bibit dan membantu kegiatan penanaman dan pemeliharaan. Pemandu wisata berasal dari masyarakat efin yang telah mendapatkan pelatihan yang memadai terkait hospitality maupun materi wisata di areal Kawasan Konservasinya. Kelembagaan perlu dibentuk untuk memudahkan pembinaan para pemandu dan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi.

A.3. Strategi *High Conservation Value* (HCV) dan Kelola Fragmentasi Habitat

Hasil kajian Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta beberapa organisasi non pemerintah pada tahun 2010-2011, memperkirakan sebanyak 80% dari seluruh spesies yang ditemukan di dalam efinit hutan konservasi juga tersebar di berbagai efinit hutan dengan fungsi lain. Sejalan dengan hasil tersebut, hasil kajian Bappenas (2018 *dalam* Dit BPPE 2021) mendapatkan seluas 43 juta hektar efinit hutan (di luar efinit hutan konservasi) diduga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk jenis-jenis dilindungi seperti orangutan, harimau sumatra, gajah sumatra, anoa, efini, babirusa dan macan tutul (**Gambar 5**). Dugaan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa ditemukan berbagai jenis satwa liar yang berkonflik dengan manusia dan atau terperangkap di wilayah-wilayah hutan produksi dan konsesi lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi keanekaragaman hayati penting yang belum terlindungi karena posisinya berada di dalam efinit hutan di luar efinit hutan konservasi.

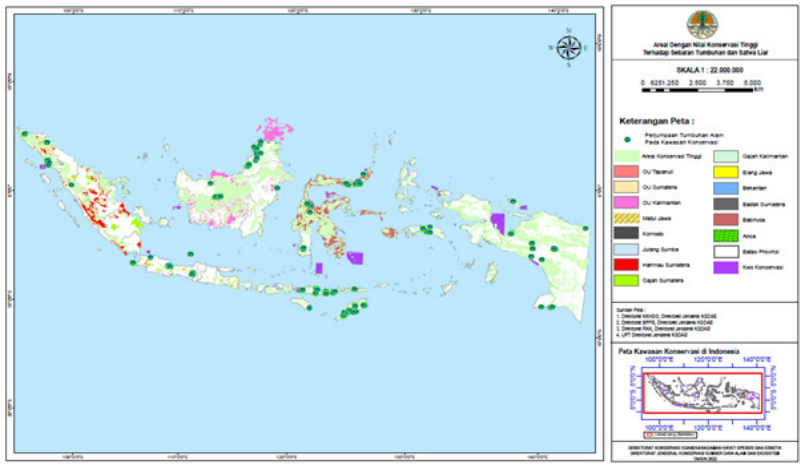

GAMBAR 5 | Sebaran tumbuhan dan satwa liar pada area bernilai konservasi tinggi

Peraturan Pemerintah No.104/2015 memberikan peluang untuk meningkatkan efinit hutan di bawah fungsi lindung, berdasarkan nilai jasa ekosistem efinit tersebut. Total luas hutan di bawah fungsi lindung saat ini adalah 51,8 Juta ha (yaitu hutan konservasi: 22,1 juta ha, hutan lindung: 29,7 Juta ha). Dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia telah menambah areal efinit hutan di bawah fungsi lindung menjadi sekitar 65 juta ha, di mana efiniti efinit hutan di bawah fungsi produksi dialokasikan sebagai efinit lindung. Sekitar 5,2 juta ha lahan berhutan yang dialokasikan dengan fungsi lindung berada di dalam konsesi dan di APL.

Selain upaya menjaga keanekaragaman hayati di luar efinit hutan konservasi, strategi konservasi juga mencakup upaya pemulihan hutan alam melalui percepatan regenerasi alami/*enriched natural regeneration* (ENR) atau restorasi hutan terdegradasi. Upaya pengayaan dengan membantu mempercepat regenerasi alami, dapat memulihkan tutupan hutan di lahan yang terdegradasi dan meningkatkan penyerapan karbon dan menyediakan jasa ekosistem hutan lainnya. Menurut Benayas et al., (2009), restorasi ekologi ditemukan sangat efektif di wilayah tropis. Rehabilitasi hutan, secara signifikan dapat meningkatkan cadangan karbon di tanah dan vegetasi, dan pemulihan ekosistem hutan alam melalui ENR umumnya mengarah pada peningkatan cadangan karbon. Kegiatan ini meliputi upaya intervensi pengelola untuk mempercepat proses regenerasi alami, termasuk efinit-langkah untuk mendorong penyebaran benih restorasi pada tanah, membersihkan tumbuhan pesaing (tumbuhan efiniti), mengelola hama, dan sebagainya (Epple dan Thorley 2012). Demikian pula, pendekatan ENR dapat berdampak positif pada pengaturan jasa ekosistem seperti aliran dan kualitas air pada tingkat yang lebih cepat daripada regenerasi alami tanpa bantuan manusia, dan kemungkinan akan menghasilkan tutupan hutan yang lebih berkualitas (Miles *et al*, 2010). Pada pendekatan ENR, spesies yang akan ditanam, dapat juga dipilih untuk meningkatkan ketersediaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan tanaman obat, di area yang dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat. Kozlowski (2002) mencatat bahwa ENR seringkali membutuhkan intensitas pengelolaan yang lebih besar dan diterapkan di area hutan terdegradasi, di mana regenerasi alami tidak dimungkinkan, atau bisa lebih dipercepat dengan bantuan manusia. Keanekaragaman hayati yang meningkat melalui kegiatan ENR dapat meningkatkan ketahanan terhadap gangguan.

Pada tingkat tapak, ekosistem esensial, termasuk didalamnya koridor lanskap dapat berpotongan dengan efinit non-konservasi. Pelindungan Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), terutama yang masih berhutan alam membutuhkan efinitiv dengan pihak pemangku efinit (pemilik perizinan PBPH, pemilik HGU, pemerintah daerah, dan lain-lain), misalnya melalui penyesuaian tata ruang (di APL) atau penentuan wilayah ABKT sebagai efinit lindung (di efinit hutan produksi) sesuai dengan PerMenLHK No.8/2021. Sebagai upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan konservasi dan mempercepat regenerasi alami, maka kegiatan yang diimplementasikan dalam strategi *High Conservation Value* (HCV) dan Kelola Fragmentasi Habitat adalah:

1. Aksi pencegahan deforestasi dan degradasi di tanah mineral dan gambut:
a. Pengendalian karhutla di efinit konservasi dan daerah penyangga;
b. Mitigasi konflik manusia dan satwa liar.

2. Aksi pengelolaan hutan lestari (ENR):
a. Penanganan *opened area*;
b. Pemulihan ekosistem;
c. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pada efinit konservasi;
d. Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem;
e. Mitigasi konflik manusia dan satwa liar;
f. Pengendalian karhutla di efinit konservasi dan daerah penyangga.

3. Aksi peningkatan cadangan karbon non-rotasi:
a. Pembinaan habitat
b. Pengkayaan jenis
c. Revegetasi
d. Pengendalian karhutla di efinit konservasi dan daerah penyangga

4. Aksi restorasi ekosistem gambut:
a. Rewetting (pembasahaan) dengan pembangunan sekat kanal;
b. Pemeliharaan sekat kanal.

5. Aksi konservasi keanekaragaman hayati tinggi pada Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT/HCV):
a. Perlindungan, *rescue*, rehab dan *release* satwa;
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan ABKT;
c. Inventarisasi dan verifikasi ABKT;
d. Mitigasi konflik manusia dan satwa liar;
e. Penyusunan NSPK Kehati di ABKT;
f. Peningkatan upaya penangkaran dan domestikasi tumbuhan dan satwa liar di ABKT
g. Kemitraan konservasi dalam rangka penangkaran dan domestikasi tumbuhan dan satwa liar di ABKT.

A.3.1 Strategi dan target kegiatan perhutanan sosial dalam mendukung Konservasi Kehati tinggi di Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

Upaya pencegahan terjadinya emisi gas rumah kaca yang berasal dari kawasan konservasi dilakukan melalui perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari, termasuk habitatnya. Dalam hal ini, pencegahan deforestasi untuk perlindungan hutan alam berkontribusi dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati, termasuk melalui penataan fragmentasi kawasan/habitat, serta penetapan kewajiban menjaga kawasan dengan Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) serta kewajiban penerapan koridor satwa dalam konstruksi pembangunan serta kegiatan efinitiv konservasi dengan masyarakat efin/setempat dan masyarakat adat setempat. Keberhasilan perlindungan areal konservasi tinggi akan sangat ditentukan juga oleh keberhasilan program perhutanan sosial di sekitar efinit tersebut.

Berdasarkan dokumen Rencana *Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, aksi mitigasi pada lokasi Perhutanan Sosial dalam mendukung perlindungan areal konservasi tinggi adalah seluas **3.209.441 ha** yang meliputi **1.267.529 ha** areal PS efinitive dan **1.941.912 ha** areal Perhutanan Sosial (PS) indikatif. Luasan tersebut dikelola melalui skema PPHD (termasuk hutan adat), PPHKM, PPHTR dan Kemitraan Kehutanan. Luas areal aksi mitigasi kegiatan perlindungan areal konservasi tinggi di areal perhutanan efini efinitive dan indikatif ditampilkan pada **Table 4** dan **Table 5** dengan total jumlah desa sebanyak 3.997 di seluruh Indonesia dengan ttal luas 1.941.911,57 ha.

TABEL 4 | Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan perlindungan areal konservasi tinggi di areal PS efinitive

No	Provinsi	Skema							
		PPHD		PPHKM		PPHTR		Kemitraan Kehutanan	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	Aceh	36	66.670,08	15	32.611,32	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	8	1.882,60	67	15.396,90	1	92,40	11	1.595,78
3	Sumatera Barat	89	115.461,66	37	14.580,21	-	-	-	-
4	Riau	21	37.604,11	34	14.461,63	-	-	-	-
5	Jambi	40	75.150,18	16	4.309,84	11	1.338,05	-	-
6	Sumatera Selatan	12	8.874,40	47	3.527,70	1	4,83	-	-
7	Bengkulu	3	1.206,32	16	781,24	-	-	-	-
8	Lampung	19	562,39	32	5.110,73	-	-	4	67,73
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1.625,49	23	6.476,64	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	2	71,93	12	2.524,04	4	425,36	-	-
11	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	20	2.834,39
12	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	4	33,88
13	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	50	9.373,90
14	Banten	-	-	-	-	-	-	2	291,76
15	Bali	30	6.703,99	4	516,89	-	-	20	534,55
16	NTB	-	-	34	3.418,76	-	-	21	3.193,94
17	NTT	-	-	83	8.716,78	5	228,93	-	-
18	Kalimantan Barat	116	278.117,29	3	706,47	1	188,92	-	-
19	Kalimantan Tengah	41	57.747,93	42	26.100,72	28	13.617,59	-	-
20	Kalimantan Selatan	20	19.047,71	9	1.604,93	1	0,02	-	-
21	Kalimantan Timur	28	132.118,50	12	497,45	2	2.916,64	-	-
22	Kalimantan Utara	20	53.981,13	3	58,07	-	-	-	-
23	Sulawesi Utara	-	-	29	2.055,78	-	-	-	-
24	Sulawesi Tengah	43	27.623,18	35	8.650,95	-	-	-	-
25	Sulawesi Selatan	54	25.849,63	93	19.776,00	5	150,13	-	-
26	Sulawesi Tenggara	17	23.215,63	66	10.968,64	1	845,01	-	-
27	Gorontalo	7	1.388,01	18	2.070,99	2	95,57	-	-
28	Sulawesi Barat	3	2.427,34	35	5.818,80	2	0,02	-	-
29	Maluku	31	19.602,52	12	2.181,46	-	-	-	-
30	Maluku Utara	56	20.260,63	15	2.932,70	-	-	5	952,96
31	Papua	35	16.435,82	1	0,03	-	-	2	181,99
32	Papua Barat	51	37.301,75	8	673,76	-	-	-	-
	Total	**788**	**1.030.930,22**	**801**	**196.529,42**	**64**	**19.903,47**	**139**	**19.060,89**

	Skema		Total Unit	Total Luas
	IPHPS			
	Unit	Luas		
	-	-	51	99.281,40
			87	18.967,69
	-	-	126	130.041,87
	-	-	55	52.065,74
	-	-	67	80.798,07
	-	-	60	12.406,93
	-	-	19	1.987,57
	-	-	55	5.740,85
	-	-	29	8.102,13
	-	-	18	3.021,33
	9	356,31	29	3.190,70
	-	-	4	33,88
	8	749,13	58	10.123,04
	-	-	2	291,76
	-	-	54	7.755,44
	-	-	55	6.612,70
	-	-	88	8.945,71
	-	-	120	279.012,68
	-	-	70	97.466,24
	-	-	30	20.652,66
	-	-	42	135.532,59
	-	-	23	54.039,19
	-	-	29	2.055,78
	-	-	78	36.274,13
	-	-	152	45.775,76
	-	-	84	35.029,28
	-	-	27	3.554,57
	-	-	40	8.246,16
	-	-	43	21.783,99
	-	-	76	24.146,29
	-	-	38	16.617,84
	-	-	59	37.975,51
	17	**1.105,44**	**1.768**	**1.267.529,43**

A.4. Strategi Kemitraan Konservasi

Kawasan konservasi Indonesia berada dan dikelilingi oleh 6.747 wilayah administratif kelurahan/desa, dengan jumlah penduduk 16 juta jiwa (BPS, 2018). Pada umumnya penduduk di desa-desa tersebut memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam di kawasan konservasi. Setidaknya terdapat 1,8 juta ha lahan terbuka yang mengindikasikan kerusakan atau degradasi ekosistem sebaga indikasi peningkatan populasi penduduk. Kerusakan yang terjadi disebabkan oleh tumpang tindih kawasan konservasi dengan lahan yang dimanfaatkan dan diusahakan oleh masyarakat, penebangan liar, perburuan liar serta kerusakan-kerusakan akibat faktor-faktor alam. Oleh karenanya, pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sangat diperlukan untuk mengurangi gangguan terhadap kawasan hutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan.

Saat ini, diketahui terdapat 120 komunitas dengan indikasi hutan adat, dan seluas 2,5 juta ha potensi hutan adat di kawasan APL. Pengembalian wilayah adat ke dalam kawasan hutan juga menjadi perhatian Ditjen PSKL, KLHK dengan tujuan memastikan pemanfaatan hutan adat berada di bawah peraturan kehutanan dan bukan dalam kewenangan daerah. Namun, proses pengembalian hutan adat ke dalam kawasan hutan harus disertai pengakuan identitas masyarakat dengan basis legal dari pemerintah daerah, sehingga proses pengakuannya membutuhkan waktu cukup lama. Untuk mempercepat proses penetapan hutan adat, diperlukan instrumen kebijakan baru yang dapat mempermudah proses administrasi menjadi hutan adat.

Dengan situasi tersebut maka sejak tahun 2019 telah ditempuh kebijakan dan langkah untuk mendekatkan pada terbentuknya Hutan Adat. Secara formal Hutan Adat diakui keberadaannya dalam sistematika pemetaaan kehutanan (legenda peta hutan) yakni pada Desember 2016 dengan pengakuan secara resmi negara oleh Presiden RI tentang Hutan Adat. Kondisi ini mampu menolong percepatan dukungan pengelolaan kawasan oleh Masyarakat Hukum Adat melalui Perhutanan Sosial yaitu dalam bentuk Hutan Desa. Hutan Desa sudah dapat dikelola oleh Masyarakat Adat, sembari terus memperoses legitimasi tentang Kelompok Masyarakat Adat sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.

Keberadaan hutan adat sangat penting diantaranya dengan tujuan dan fungsi melestarikan ekosistem (hutan dan lingkungan), menjamin ruang hidup Masyarakat Hukum Adat, perlindungan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan penyelesaian konflik terkait dengan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan. Berdasarkan data Ditjen PSKL per Januari 2022 telah ditetapkan Hutan Adat sebanyak 89 unit kelompok adat dengan luas 75.802 Ha. Sementara itu luas indikatif Hutan Adat yaitu 1.091.109 Ha, bila sudah ada penetapan tentang Satuan Masyarakat Adatnya. Penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat (WILHA) atau calon Hutan Adat menjadi Hutan Adat, sesuai UU bisa dilakukan bila sudah ada penetapan tentang Satuan Masyarakat Hutan Adat pada wilayah calon hutan adat tersebut yang ditetapkan dengan Perda atau Keputusan Bupati.

Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui kemitraan konservasi atau pengelolaan hutan bersama masyarakat, membutuhkan pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan sebagian kepada masyarakat lokal, dengan tujuan mendorong pengelolaan hutan yang lebih efektif, konservasi keanekaragaman hayati, dan manfaat mata pencaharian. Melalui pengelolaan berbasis masyarakat, penyimpanan karbon, jasa lingkungan ekosistem

dan manfaat mata pencaharian dapat dicapai. Terkait jasa ekosistem, kemitraan konservasi dapat menjadi strategi yang efektif dalam mempertahankan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Jika pengelolaan oleh masyarakat dapat meningkatkan legitimasi perlindungan hutan dan mengurangi konflik, maka akan lebih baik.

Berdasarkan hasil ekstraksi citra satelit dan analisa spasial penutupan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang divalidasi dan direklasifikasi lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), sampai dengan tahun 2019 terdapat 1,83 juta ha bagian dari kawasan konservasi yang terindikasi sebagai area terbuka (*opened area*) (**Gambar 6**).

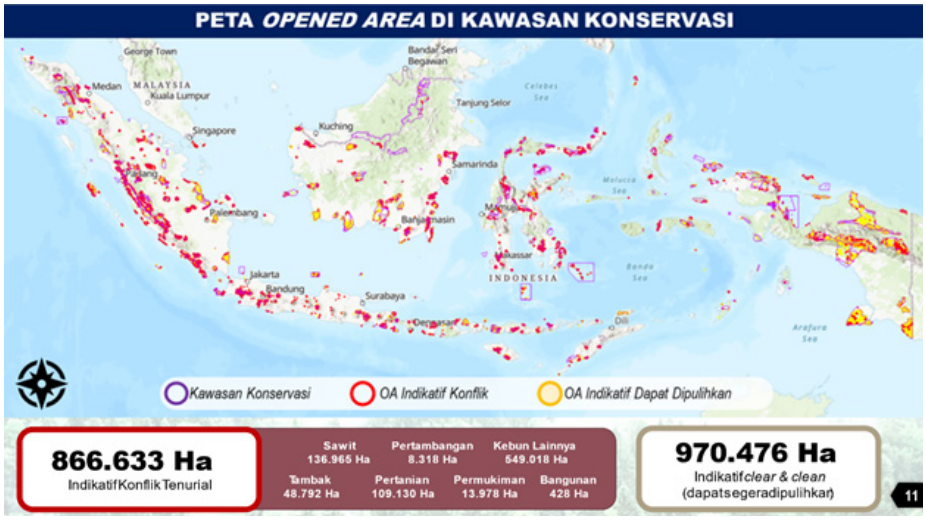

GAMBAR 6 | Peta opened area di kawasan hutan konservasi (2021)

Berdasarkan hasil ekstraksi citra satelit dan analisa spasial penutupan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang divalidasi dan direklasifikasi lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), sampai dengan tahun 2019 terdapat 1,83 juta ha bagian dari kawasan konservasi yang terindikasi sebagai area terbuka (*opened area*) (**Gambar 6**).

Indikasi *opened area* tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor alami maupun oleh anthropogenic, seperti aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, penguasaan dan penggunaan lahan pada hutan konservasi secara ilegal, seperti penebangan liar, perambahan kawasan, klaim lahan, pertambangan tanpa izin, serta berbagai tindakan pemanfaatan, penggunaan, dan penguasaan ilegal lainnya. Indikasi *opened area* yang disebabkan faktor anthropogenik inilah yang kemudian perlu penanganan lebih lanjut karena teridentifikasi sebagai konflik tenurial.

Penanganan konflik tenurial dilakukan untuk menghindari ancaman laten bagi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di dalamnya, yang dapat kemudian meluas tanpa terkendali hingga dapat merusak seluruh tatanan ekosistem yang terwakili di dalam kawasan konservasi. Penanganan konflik tenurial dalam Kawasan Konservasi dilakukan secara

adaptif, terstruktur dan penuh kehati-hatian mengingat kompleksnya kondisi yang menjadi akar masalah. Penanganan konflik tenurial dan perumusan alternatif solusinya, dirumuskan berdasar pada informasi yang konkrit dan komprehensif sebagai justifikasi. Nilai intrinsik kawasan konservasi juga perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan perumusan solusi, mengingat kedudukannya sebagai perwakilan kekayaan keanekaragaman hayati yang dicadangkan untuk masa depan dan generasi mendatang.

Dalam wilayah konservasi, perlindungan hutan alam berkaitan dengan perlindungan wilayah koridor satwa, terutama dari *unplanned deforestation* atau perambahan hutan. Dalam konteks keterlanjuran di kawasan hutan konservasi, mekanisme penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 salah satunya melalui Perhutanan Sosial dengan skema kemitraan konservasi (PerMenLHK No.9/2021). Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No.6/2018, proses kemitraan konservasi dapat berupa program pemberdayaan masyarakat atau perjanjian kerjasama (pada blok tradisional) dengan penekanan pada penyelesaian konflik dan kemitraan untuk pemanfaatan HHBK, atau konservasi dalam pemulihan ekosistem (zona rehabilitasi) dengan tujuan utama pengembalian fungsi ekosistem secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, kemitraan konservasi dapat diselaraskan dengan kegiatan RHL maupun perhutanan sosial, namun tetap harus disesuaikan dengan konteks konservasi, misalnya lokasi koridor lintas satwa. Dengan demikian, strategi kemitraan konservasi untuk Bidang Konservasi dalam rangka menuju *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* diterapkan dengan mengimplementasikan:

1. ***Aksi pencegahan deforestasi dan degradasi di tanah mineral dan gambut:***
   a. Kemitraan konservasi akses HHBK
   b. Pemberdayaan masyarakat desa penyangga
   c. Peningkatan upaya budidaya HHBK di desa penyangga
2. ***Aksi pengelolaan hutan lestari (ENR):***
   a. Inventarisasi dan verifikasi kehati
3. ***Aksi restorasi ekosistem gambut:***
   a. Pemberdayaan masyarakat
4. ***Aksi restorasi ekosistem gambut:***
   a. Rewetting (pembasahaan) dengan pembangunan sekat kanal;
   b. Pemeliharaan sekat kanal.
5. ***Aksi konservasi keanekaragaman hayat tinggi pada Area Bernilai Konservasti Tinggi (ABKT/HCV):***
   a. Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan
   b. Inventarisasi dan verifikasi kehati
   c. Peningkatan upaya penangkaran dan domestikasi tumbuhan dan satwa liar

A.5. Strategi Lintas Eselon (*Cross-cutting*)

Dalam konteks sektor kehutanan dan lahan, keberhasilan mencapai *Net Sink* secara tidak langsung harus bersinergi dengan berbagai lintas Eselon dalam KLHK itu sendiri. **Tabel 5** menunjukkan strategi Perhutanan Sosial dalam mendukung upaya konservasi kehati tinggi di Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT/HCV) dapat menjadi opsi instrumen untuk menjaga

kelestarian ekosistem. HCV adalah hutan yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global, meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya. Area BKT sangat berpotensi menyumbang penurunan emisi di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Selain kawasan hutan konservasi, terdapat ABKT yang mempunyai tutupan lahan berhutan. Wilayah seperti ini menuntut kehati-hatian dalam pengelolaannya karena mengandung nilai konservasi tinggi yang seharusnya dipertahankan.

TABEL 5 | Strategi kegiatan PS dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Area Bernilai Konservasi Tinggi

No	Program	Kegiatan
1	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Industri nilai tambah produk
		Kemitraan investasi/usaha
		Pemasaran/promosi produk perhutanan sosial
		Peningkatan kapasitas (Kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha kelompok masyarakat)
		Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan produktivitas usaha tani
2	Penyiapan kawasan Perhutanan Sosial	Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat
1	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Inventarisasi dan identifikasi tumbuhan dan satwa liar bernilai ekonomi tinggi
		Penangkaran tumbuhan dan satwa liar bernilai ekonomi tinggi
		Domestikasi tumbuhan dan satwa liar bernilai ekonomi tinggi
		Pemanfaatan, pengolahan, dan pemasaran tumbuhan dan satwa liar hasil domestikasi
		Kemitraan investasi/usaha domestikasi tumbuhan dan satwa liar hasil domestikasi
		Peningkatan kapasitas (Kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha kelompok masyarakat)
		Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan usaha domestikasi tumbuhan dan satwa liar hasil domestikasi
2	Penyiapan kawasan Perhutanan Sosial	Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat

Selanjutnya dapat dilihat pada **Tabel 6**, kegiatan di Bidang Konservasi didukung oleh kegiatan dari bidang lain yaitu Bidang I (Pengelolaan Hutan Lestari), Bidang II (Peningkatan Cadangan Karbon), Bidang IV (Pengelolaan Ekosistem Gambut) dan Bidang V (Instrumen

dan Informasi). **Tabel 6** menunjukkan bahwa untuk kegiatan Bidang Konservasi yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan Lestari melalui *Enhanced Natural Regeneration* tidak ditemukan adanya kegiatan lintas sektor bidang lain yang dapat mendukung Bidang Konservasi. Selain dari Bidang I, II dan IV, kegiatan mitigasi di bidang konservasi juga didukung oleh Bidang V (Instrumen dan Informasi) sebagi penguat implementasi kegiatan melalui Standar pendukung (**Tabel 7**). Beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mendukung kegiatan di Bidang Konservasi diantaranya: *SNI 8013:2018 Pengelolaan pariwisata alam* yang menetapkan prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan pariwisata alam sebagai panduan pengelolaan pariwisata alam di kawasan hutan dan/atau kawasan lainnya yang dikelola dengan prinsip-prinsip pariwisata alam; *SNI 8748:2019 Pengelolaan pendakian gunung* yang menetapkan kriteria dan persyaratan pengelolaan kegiatan pendakian gunung dengan tujuan wisata alam dan wisata minat khusus berkelanjutan dengan mengikuti kaidah pengelolaan jalur pendakian gunung yang mempertimbangkan kelestarian alam, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan pelibatan masyarakat sekitar wilayah pendakian; *SNI 9006:2021 Wisata hutan untuk terapi kesehatan* yang menetapkan prinsip, orientasi, penentuan lokasi, dan komponen sebagai panduan dalam menetapkan lokasi wisata dalam hutan dan pengembangan program wisata hutan untuk terapi kesehatan (*healing forest*); *SPM-FP Pariwisata alam* yang menetapkan kriteria generik dan spesifik pelayanan masyarakat pada fasilitas publik Pariwisata Alam; *SNI 7897:2013 Tanaman penghasil gaharu yang berasal dari hasil propagasi (budidaya) - Panduan penelusuran Standar* meliputi informasi penanaman, perlakuan/pemeliharaan, pemanenan dan peredaran dalam Perda.

TABEL 6 | Kegiatan mitigasi lintas eselon KLHK untuk bidang konservasi

Kegiatan Mitigasi FOLU	Kegiatan Bidang Konservasi	Kegiatan terkait di luar Bidang Konservasi	Bidang FOLU*
Pencegahan Deforestasi dan Degradasi di Lahan Mineral dan Gambut	Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan	Menerapkan kebijakan pelarangan penebangan hutan primer	I
		Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	V
	Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga	Sosialisasi dan komunikasi publik	V
		Peningkatan peran serta masyarakat dibidang Dalkarhutla	I
		Pencegahan penebangan liar di areal hutan konservasi	
	Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga	Peningkatan kapasitas (Kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha) kelompok masyarakat.	
		Fasilitasi implementasi standar pendukung (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	V

Kegiatan Mitigasi FOLU	Kegiatan Bidang Konservasi	Kegiatan terkait di luar Bidang Konservasi	Bidang FOLU*
	Kemitraan Konservasi Akses HHBK	Sosialisasi dan Komunikasi Publik	V
		Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK	
		Fasilitasi implementasi standar pendukung (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	
	Pengelolaan Jasling dan Wisata Alam	Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK	
		Fasilitasi implementasi standar pendukung (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	
	Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar	Sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan setempat	II
Peningkatan Cadangan Karbon (Non Rotasi)	Penanganan *Opened area*	Penanganan *opened area* Penanganan konflik tenurial	II
		Sosialisasi dan komunikasi publik	V
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga	Peningkatan kapasitas (Kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha) kelompok masyarakat	II
		Fasilitasi implementasi standar pendukung (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	V
	Intensifikasi Jasling dan Wisata Alam	Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan.	II
		Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi jasa lingkungan dan HHBK.	
		Fasilitasi implementasi standar pendukung (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	V I
	Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan	Menerapkan kebijakan pelarangan penebangan hutan primer	
	RHL pada Kawasan Konservasi	Rehabilitasi, perlindungan dan konservasi mangrove	
	Pemberdayaan Masyarakat	Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)	IV
		Pengembangan usaha masyarakat gambut	
		Fasilitasi implementasi standar pendukung (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	V

Kegiatan Mitigasi FOLU	Kegiatan Bidang Konservasi	Kegiatan terkait di luar Bidang Konservasi	Bidang FOLU*
	Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga	Penyusunan manual/guidelines operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan	
Pengelolaan Lahan Gambut	Revegetasi (Penanaman Intensif Bersama Masyarakat, Pemulihan Ekosistem Melalui Mekanisme Alam, Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	Desa Mandiri Peduli Gambut	**IV**
		Revegetasi lahan gambut	
		Pemulihan fungsi ekosistem gambut di kawasan konservasi	
		Fasilitasi implementasi standar pendukung (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	**V**
	Rewetting (Pembasahan) dengan Pembangunan Sekat Kanal	Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tingkat KHG	
		Revegetasi lahan gambut	
	Pemeliharaan Sekat Kanal	Pengembangan kebijakan pengendalian deforestasi dan pemulihan ekosistem gambut	
	Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan	Pengembangan kebijakan pengendalian deforestasi dan pemulihan ekosistem gambut	
		Peningkatan perlindungan lingkungan hidup	**V**
		Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tingkat KHG	
		Fasilitasi implementasi standar pendukung (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	
	Pengendalian Kebakaran Hutan	Penyusunan manual/guidelines operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan	
Konservasi Keanekaragaman Hayati Tinggi	Peningkatan efektifitas pengelolaan KEE	Menerapkan kebijakan pelarangan penebangan hutan primer	**I**
		Peningkatan perlindungan lingkungan hidup	**V**
	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Peningkatan perlindungan lingkungan hidup (law enforcement)	
		Fasilitasi implementasi standar pendukung (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	
		Sosialisasi dan komunikasi public	
	Penyusunan NSPK Kehati di ABKT	Penyediaan enabling condition bagi Bidang Konservasi (penyusunan dan penetapan standar/NSPK)	

*Catatan: Bidang I-Pengelolaan Hutan Lestari (PHL); Bidang II-Peningkatan Cadangan Karbon (PCK); Bidang IV-Pengelolaan Ekosistem Gambut (PEG); Bidang V-Instrumen dan Informasi

TABEL 6 | Standar dalam pelaksanaan kegiatan bidang konservasi

Rincian Kegiatan (Rk)	Pokja Terkait	Standar
Pencegahan Degradasi dan Deforestasi di Lahan Mineral dan Gambut		
1 Pemantapan Kawasan Konservasi 2 Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan 3 Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga 4 Kemitraan Konservasi Akses HHBK 5 Pemantapan Kawasan Konservasi 6 Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan 7 Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga 8 Kemitraan Konservasi Akses HHBK	• Pokja 1: Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies • Pokja 2: Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya dan KHDTK • Pokja 3: High Conservation Value Forest dan Kelola Fragmentasi Habitat • Pokja 4: Kemitraan konservasi	• SNI 8033:2014 Metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual (RK 2) • SNI 8515:2018 Pengelolaan Tahura (RK 1,6) • Standar Khusus Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (RK 4) • Seri SNI HHBK (31 SNI) (RK 4) • SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam (RK 5, 6) • SNI 8748:2019 Pengelolaan Pendakian Gunung (RK 5, 6) • SPM-FP Pariwisata Alam (RK 6) • SNI 7897:2020 Tanaman penghasil gaharu yang berasal dari hasil propagasi (budidaya) - Panduan penelusuran (RK 7) • SNI 8014:2014 Metode penilaian jasa lingkungan keanekaragaman hayati (biodiversity) (RK 7) • SNI 8015:2014 Penilaian pengelolaan jasa lingkungan keanekaragaman hayati (biodiversity)((RK 7)
Peningkatan Cadangan Karbon		
1 Penanganan Opened area 2 Pemulihan Ekosistem 3 RHLPada Kawasan Konservasi 4 Pembinaan Habitat Satwa Liar Melalui Pengkayaan Tanaman Pakan Satwa 5 Kemitraan Konservasi dalam Rangka Pemulihan Ekosistem	• Pokja 1: Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies • Pokja 3: High Conservation Value Forest dan Kelola Fragmentasi Habitat • Pokja 4: Kemitraan Konservasi	• Seri SNI Mikoriza (2 SNI) (RK 1) • SNI 7943:2014 Panduan konservasi tanah dan air untuk penanggulangan degradasi lahan (RK 1-3) • Standar Khusus Pengelolaan Hutan dengan Sistem Agroforestry (RK 1-3, 5,6) • Standar Khusus Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (RK 1-3, 5,6) • SNI 7513-2008 Penanganan benih dan bibit bakau (mangrove) (RK 2,3) • Seri SNI Perbenihan (7 SNI) dan Pembibitan (8 SNI) Tanaman Hutan (RK 1-3,5)

Rincian Kegiatan (Rk)	Pokja Terkait	Standar
6 Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga		•SNI 8014:2014 Metode penilaian jasa lingkungan keanekaragaman hayati (biodiversity) (RK 7) • SNI 8015:2014 Penilaian pengelolaan jasa lingkungan keanekaragaman hayati (biodiversity) (RK 7) • SNI 7897:2020 Tanaman penghasil gaharu yang berasal dari hasil propagasi (budidaya) - Panduan penelusuran (RK 7) • SNI 8033:2014 Metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual (RK 9)
7 Inventarisasi dan Verifikasi Kehati		
8 Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar		
9 Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan		
10 Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga		
11 RHL serta PE pada areal IKN		
Pengelolaan Hutan lestari (*Enhanced Natural Regeneration*)		
1 Pembinaan Habitat	• Pokja 1: Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies • Pokja 3: High Conservation Value Forest dan Kelola Fragmentasi Habitat	• SNI 7897:2020 Tanaman penghasil gaharu yang berasal dari hasil propagasi (budidaya) - Panduan penelusuran (RK 1,2) • SNI 8014:2014 Metode penilaian jasa lingkungan keanekaragaman hayati (biodiversity) (RK 1-3) • SNI 8015:2014 Penilaian pengelolaan jasa lingkungan keanekaragaman hayati (biodiversity) (RK 1-3) • SNI 7513-2008 Penanganan benih dan bibit bakau (mangrove) (RK 3) • SNI 8515:2018 Pengelolaan Tahura (RK 3) • SNI 8033:2014 Metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual (RK 4)
2 Pembinaan Populasi		
3 Pengkayaan Jenis		
4 Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan		
5 Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga		
Pengelolaan Lahan Gambut (Restorasi)		
1 Revegetasi	• Pokja 1: Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies • Pokja 3: High Conservation Value Forest dan Kelola Fragmentasi Habitat	• Standar Khusus Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (RK 4) • SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam (RK 6)
2 Rewetting (Pembasahan) dengan pembangunan sekat kanal		

Rincian Kegiatan (Rk)	Pokja Terkait	Standar
3 Pemeliharaan sekat kanal		• SNI 8748:2019 Pengelolaan Pendakian Gunung (RK 6) • SNI 8033:2014 Metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual (RK 5)
4 Pemberdayaan masyarakat		
5 Perlindungan, pengamanan, dan penjagaan kawasan		
6 Pengendalian kebakaran hutan		
Konservasi Keanekaragaman Hayati di Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT/HCV)		
1 Perlindungan, Rescue, Rehab Dan Release Satwa	• Pokja 1: Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies • Pokja 3: High Conservation Value dan Kelola Fragmentasi Habitat	• SNI 8033:2014 Metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual (RK 2) • Standar Khusus Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (RK 3) • SNI 7897:2020 Tanaman penghasil gaharu yang berasal dari hasil propagasi (budidaya) - Panduan penelusuran (RK 4) • SNI 8014:2014 Metode penilaian jasa lingkungan keanekaragaman hayati (biodiversity)(RK 4) • SNI 8015:2014 Penilaian pengelolaan jasa lingkungan keanekaragaman hayati (biodiversity)(RK 4)
2 Peningkatan efektifitas pengelolaan KEE		
3 Inventarisasi dan verifikasi ABKT		
4 Mitigasi konflik manusia dan satwa liar		
5 Penyusunan NSPK Kehati di ABKT		

B. Rincian Kegiatan dan Target Tahun 2022 – 2030

Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target dan kebijakan serta langkah kerja untuk penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050 dan NDC 2030. RENOP memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

B.1. Deskripsi Aksi Mitigasi Bidang Konservasi

B.1.1 Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Mineral dan Gambut

Lokasi yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan kegiatan mitigasi ini adalah pada kawasan yang masih memiliki tutupan hutan alam dengan IPL relatif tinggi dan berdasarkan IJL termasuk arahan lindung dan produksi. Lokasi dengan IPL tinggi memiliki tingkat risiko tinggi untuk terkonversi menjadi non-hutan ataupun terdegradasi. Lokasi masih berhutan

alam yang masuk ke dalam arahan lindung dan produksi harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan hutan memberikan layanan jasa lingkungan dan juga produk hasil hutan.

Beberapa rencana kegiatan dan indikator kinerja pencegahan deforestasi dan degradasi yang akan dilakukan dalam upaya mendukung pencapaian *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, disajikan pada **Tabel 6** sebagai berikut:

TABEL 4 | Rincian daftar rencana kegiatan dan indikator kinerja Bidang Konservasi dalam mendukung pencegahan deforestasi dan degradasi di lahan mineral dan gambut

No	Kegiatan	Rincian Output	Verifier	Satuan
1	Pemantapan Kawasan Konservasi	Kawasan konservasi yang dilakukan penetapan (prakondisi) status dan fungsi untuk peningkatan nilai efektivitas	Jumlah unit kawasan konservasi yang telah dilakukan pengukuhan	Unit KK
2	Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	(i) Perubahan status dan fungsi kawasan konservasi, (ii) Kuantitas dan kualitas hutan konservasi, (iii) Berkurangnya jumlah kejadian pembalakan dan perambahan hutan, (iv) Penyelesaian konflik tenurial	Unit KK
3	Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga	Kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya; Tersusunnya pedoman pengelolaan kebakaran bagi habitat yang rentan terbakar	(i) Kemampuan bertahan spesies/ komunitas ekologis yang terancam, (ii) Dampak kebakaran hutan terhadap keanekaragaman hayati, (iii) Luas areal terbakar	Unit KK
4	Penguatan Pengelolaan KK di tingkat tapak (RBM)	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	(i) Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Unit KK

No	Kegiatan	Rincian Output	Verifier	Satuan
5	Kemitraan Konservasi Akses HHBK	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	(i) Pemberian akses kelola kepada masyarakat, (ii) Memfasilitasi kegiatan pemungutan HHBK di beberapa bagian kawasan konservasi dengan dampak lingkungan yang minimal	Unit KK
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	(i) Perubahan zona gangguan di sekitar perkemahan, (ii) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa
7	Pengelolaan Jasling dan Wisata Alam	Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	(i) Jumlah pohon di lokasi perkemahan yang rusak, (ii) Persen Peningkatan efektifitas pengelolaan	Unit KK
8	Inventarisasi dan Verifikasi Kehati	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	(i) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (juta ha)	Ha
9	Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	(i) Jumlah penyelamatan satwa liar, (ii) Persistensi dan kondisi populasi tumbuhan langka	Unit KK

Dalam implementasi ke-9 kegiatan mitigasi yang mendukung Pencegahan Deforestasi dan Degradasi secara terperinci dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pemantapan Kawasan Konservasi

Dalam rangka mencapai pengelolaan Kawasan Konservasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan kegiatan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi serta Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi yang meliputi: Fasilitasi Pemantapan Kawasan Konservasi, Penataan Kawasan Konservasi melalui Zonasi dan Blok, dan Kerjasama dalam rangka pengelolaan KK. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara simultan antara Direktorat Teknis dan UPT seluruh Indonesia, sesuai dengan perannya masing-masing. Pemantapan kawasan konservasi setidaknya bisa dimaknai melalui 3 aspek, yakni pengukuhan kawasan konservasi, kejelasan status fungsi kawasan konservasi, dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal KSDAE dan Renstra Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2020 – 2024, salah satu IKK Direktorat RKK yang menjadi embanan adalah jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK). Melalui kegiatan pemantapan kawasan konservasi tersebut, secara tidak langsung akan berdampak pada pencegahan deforestasi maupun degradasi.

2. Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan

Kegiatan perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Mengingat fakta menunjukan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada sekala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Menindaklanjuti hal ini, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan mengganti PP Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. Kegiatan Perlindungan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini terdapat pada pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Lindung (KPHP/L).

3. Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga

Merujuk pada hasil pada dokumen FOLU *Net Sink* diketahui bahwa potensi terjadinya kebakaran hutan pada kawasan hutan konservasi relatif rendah dibanding kawasan lainnya. Areal berhutan alam dalam kawasan hutan koservasi yang masuk ke dalam prioritas tinggi karena tingginya tingkat risiko deforestasi maupun kebakaran tinggi (IPL 7-9) ada di dua provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jambi. Namun demikian upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kawasan konservasi dan penyangga penting dilaksanakan dalam upaya pencegahan deforestasi.
Pengendalian karhutla tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, perlu adanya sanksi yang tegas diberikan pada pihak yang dengan sengaja dan/atau lalai menyebabkan karhutla agar menimbulkan efek jera sehingga karhutla tidak terulang kembali.

4. Penguatan Pengelolaan KK di tingkat tapak (RBM)

"Efektivitas Pengelolaan" (*management effectiveness*) menjadi kata kunci bagi upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi baik di lingkungan darat maupun laut. Didefinisikan sebagai "tingkat sejauh mana upaya pengelolaan mencapai tujuan dan sasaran (yang dinyatakan di dalam dokumen rencana pengelolaan)" (Hockings *et al.* 2000; 2006), efektivitas pengelolaan dinyatakan secara eksplisit pada Target Keanekaragaman Hayati Aichi 11 yang menjadi acuan utama bagi pendirian, pengembangan dan pengelolaan kawasan-kawasan konservasi sejagad. Target tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2020, paling tidak 17 persen wilayah daratan dan perairan darat, dan 10 persen wilayah pesisir dan laut, khususnya yang memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa-jasa ekosistem, dikonservasi melalui sistem-sistem kawasan pelindungan yang terkoneksi dengan baik dan secara ekologi terwakili, dan melalui upaya konservasi berbasis-kawasan lainnya, yang dikelola secara efektif dan adil, dan terintegrasi dengan bentang-alam dan bentang-laut yang lebih luas".

Beberapa sub kegiatan yang dapat dilakukan dalam mendukung upaya Pengelolaan KK di tingkat tapak antara lain adalah:

a. Penguatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi dengan memperhatikan keterlibatan perwakilan para pemangku kepentingan dengan pendekatan *adaptive collaborative* manajemen (ACM)/ pengelolaan yang kolaboratif dan adaptif.

b. Penguatan dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah dan kelestarian lingkungan.

c. Menciptakan kemandirian masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya melalui peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan untuk mencapai pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan lestari.

5. Kemitraan Konservasi Akses HHBK

Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No.6/2018 proses kemitraan konservasi dapat berupa program pemberdayaan masyarakat atau perjanjian kerjasama (pada blok tradisional) dengan penekanan pada penyelesaian konflik dan kemitraan untuk pemanfaatan HHBK, atau konservasi dalam pemulihan ekosistem (zona rehabilitasi) dengan tujuan utama pengembalian fungsi ekosistem secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, kemitraan konservasi dapat diselaraskan dengan kegiatan RHL maupun perhutanan sosial, namun tetap harus disesuaikan dengan konteks konservasi misalnya lokasi koridor lintas satwa, pemberian akses kelola kepada masyarakat, dan memfasilitasi kegiatan pemungutan HHBK di beberapa bagian kawasan konservasi dengan dampak lingkungan yang minimal. Secara bertahap akan diupayakan penangkaran jenis-jenis HHBK dan dibudidayakan secara luas melalui kegiatan RHL maupun perhutanan sosial, dengan demikian kuantitas dan kualitas HHBK dapat dipanen dan bertahap akan mengurangi ketergantungan masyarakat ke hutan.

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga.

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi melalui kegiatan berbasis masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan penyadartahuan akan fungsi kawasan hutan sehingga masyarakat bisa berkontribusi dalam pengamanan dan pelestarian ekosistem hutan. Upaya dan bentuk sub kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa penyangga diantaranya sebagai berikut:

a. Pembinaan daerah penyangga dan Model Desa Konservasi (MDK);

b. Pembentukan dan pendampingan kelompok masyarakat mitra polhut;

c. Pembentukan dan pembinaan kader konservasi, kelompok pecinta alam, dan generasi muda;

d. Pelatihan dan kunjungan kerja usaha ekonomi kreatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat mitra berbasis sumberdaya/kekayaan plasma nutfah yang ada dalam area Kawasan Konservasi hasil domestikasi;

e. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi kreatif dan berkelanjutan.

7. Pengelolaan Jasling dan Wisata Alam

Meningkatnya tekanan kawasan akibat desakan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan menuntut pihak pengelola kawasan untuk lebih secara intensif

menggali dan mengembangkan potensi jasa lingkungan dan wisata alam, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Penggalian dan pengembangan kedua potensi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian daerah (masyarakat dan pemerintah daerah) dengan adanya investasi-investasi dari pihak swasta maupun berkembanganya wisata alam. Adapun sub kegiatan yang diharapkan dapat mendukung kegiatan ini antara lain:

a. Identifikasi potensi jasa lingkungan dan wisata alam;

b. Promosi dan penyebaran informasi model pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan kepada masyarakat luas dan khususnya pihak swasta terkait;

c. Pembangunan kapasitas kelembagaan wisata alam;

d. Koordinasi dengan para pihak terkait (Pemerintah Pusat, Pemda, dan Swasta/ lembaga-lembaga lainnya).

8. Inventarisasi dan Verifikasi Kehati

Output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL, Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan terhadap areal yang diindikasikan memiliki kriteria nilai keanekaragaman hayati tinggi, upaya mengetahui kondisi faktual secara lebih rinci terhadap areal yang diindikasikan memiliki kriteria nilai keanekaragaman hayati tinggi. Sementara verifikasi adalah upaya pemeriksaan kebenaran terhadap areal yang diindikasikan memiliki kriteria nilai keanekaragaman hayati tinggi. Untuk bisa mencapai output yang diinginkan terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu:

a. Penentuan target kinerja;

b. Penetapan Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi Luasannya telah diuraikan menjadi 5 tahun untuk seluruh UPT KSDA;

c. Penangkaran dan domestikasi jenis tumbuhan dan satwa liar prioritas hasil inventarisasi;

d. Pengalokasian anggaran;

e. Pembagian anggaran secara proporsional ke seluruh UPT KSDA yang melakukan kegiatan inventarisasi kehati tinggi;

f. Penyusunan NSPK;

g. Penyusunan norma standar pedoman dan kriteria (NSPK) dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penyusunan NSPK dilaksanakan dengan metode pertemuan dan diskusi, baik secara internal maupun bersama dengan para pihak yang berkompeten yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal;

h. Bimbingan teknis pelaksanaan;

i. Penyusunan norma standar pedoman dan kriteria (NSPK) dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penyusunan NSPK dilaksanakan dengan metode pertemuan dan diskusi, baik secara internal maupun bersama dengan para pihak yang berkompeten

yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal;

j. Koordinasi pelaksanaan;

k. Koordinasi dilaksanakan dengan metode pertemuan daring dan tatap muka, serta kunjungan ke Balai Besar/Balai KSDA. Selain itu, dalam upaya percepatan pelaksanaan kegiatan;

l. Verifikasi hasil pelaksanaan;

m. Kegiatan verifikasi hasil inventarisasi merupakan tahapan dimana data dan infomasi yang diperoleh oleh Balai Besar/Balai KSDA akan dikumpulkan dan diverifikasi, sesuai dengan ketentuan NSPK yang berlaku.

Sementara itu, tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam upaya inventarisasi dan verifikasi kehati di luar kawasan konservasi dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P. 8/KSDAE/ SET.3/ KUM.1/11/2020

9. Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar

Konflik manusia dan satwa liar terjadi akibat adanya interaksi yang berdampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung, antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya kepedulian manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik antara lain rusaknya tanaman pertanian atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, bahkan kadang menimbulkan korban jiwa manusia, dan tidak jarang satwa liar yang berkonflik tersebut mengalami kematian.

Berbagai cara bisa dilakukan untuk bisa menangani hal ini, dimulai dari upaya preventif. Kegiatan penyadartahuan masyarakat terkait pentingnya hidup berdampingan dengan satwa liar, serta upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjamin keberlangsungan keduanya. Saat ini telah terdapat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.53/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-Ii/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar. Beragam kegiatan dalam aksi mitigasi pencegahan deforestasi dan degradasi di hutan alam akan diimplementasikan di 11 provinsi yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan (Tabel 7).

TABEL 5 | Lokasi dan Luas Kegiatan Pencegahan Deforestasi dan Degradasi (Ha)

No	Provinsi	Kegiatan		Nama Kawasan	Luas Lahan (ha)	
		No	UPT		Mineral	Gambut
1	Kalimantan Tengah	1	BKSDA Kalimantan Tengah	CA Bukit Sapat Hawung	0	0
				CA Pararawen I dan II	64	0
				SM Lamandau	0	0
				TWA Bukit Tangkiling	0	0
				TWA Tanjung Keluang	762	376
				KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG 2)	5	3,818
				KSA/KPA Sungai Barito (Eks PLG)	6,127	15,629
				KSA/KPA Sungai Kapuas (Eks PLG)	734	42,230
		2	BTN Tanjung Putting	TN Tanjung Puting	82,077	65,810
		3	BTN Sebangau	TN Sebangau	0	65
2	Kalimantan Barat	4	BKSDA Kalimantan Barat	CA Mandor	1,151	0
				CA Gunung Raya Pasi	0	0
				CA Karimata	0	0
				CA Nyiut Penrissen	29	0
				CA Muara Kendawangan	2,956	22
				TWA Bukit Kelam	0	0
				TWA Gunung Melintang	187	0
				TWA Sungai Liku	14	0
				TWA Tanjung Belimbing	21	0
				TWA Asuansang	0	0

No	Provinsi	Kegiatan		Nama Kawasan	Luas Lahan (ha)	
		No	UPT		Mineral	Gambut
				TWA Baning	0	0
				TWA Gunung Dungan/ Gunung Batu	0	0
	Kalimantan Tengah	5	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Danau Sentarum	13	0
				N Betung Kerihun	0	0
		6	BTN Gunung Palung	TN Gunung Palung	310	58
		7	BTN Bukit Baka Bukit Raya	TN Bukit Baka Bukit raya	0	0
		8	UPTD Tahura Pandan Puloh	Tahura Pandan Puloh	1,677	0
3	Kalimantan Timur	9	BKSDA Kalimantan Timur	CA Muara Kaman Sedulang	4,123	170
				CA Teluk Adang	9,280	0
				SM Pulau Semama	0	0
				CA Teluk Apar	3,677	0
		10	BTN Kutai	TN Kutai	0	0
		11	UPTD Tahura Bukit Suharto	THR Bukit Soeharto	10,174	0
		12	UPTD Tahura Lati Petangis	THR Lati Petangis	0	0
4	Kalimantan Selatan	13	BKSDA Kalimantan Selatan	CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	25	0
				CA Gunung Kentawan	0	0
				SM Pleihari Tanah Laut	192	0
				TWA Pulau Bakut	0	0
				SM Pulau Kaget	0	0

No	Provinsi	Kegiatan		Nama Kawasan	Luas Lahan (ha)	
		No	UPT		Mineral	Gambut
				SM Kuala Lupak	0	0
				TWA Pulau Burung dan Suwangi	0	0
5	Kalimantan Utara	14	BTN Kayan Mentarang	TN Kayan Mentarang	0	0
6	Jambi	15	BKSDA Jambi	CA Hutan Bakau Pantai Timur	1,409	0
		16	BBTN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	0	0
		17	BTN Berbak Sembilang	TN Berbak	25,375	69,973
		18	BTN Bukit Duabelas	TN Bukit Duabelas	0	0
7	Sumatera Barat	19	BKSDA Sumatera Barat	SM Arau Hilir dan Air Tarusan	0	0
		20	BTN Siberut	TN Siberut	0	0
8	Riau	21	BBKSDA Riau	SM Balai Raja	150	0
				SM Giam Siak Kecil	0	37
				SM Bukit Batu	0	3
				SM Kerumutan	45	1,292
				SM Bukit Rimbang, Bukit Baling & Rimbang Baling	6	0
				SM Tasik Belat	0	325
				SM Tasik Besar Serkap	0	278
				SM Tasik Serkap	0	14
				SM Tasik Tanjung Padang	0	24

No	Provinsi	Kegiatan		Nama Kawasan	Luas Lahan (ha)	
		No	UPT		Mineral	Gambut
				TWA Buluh Cina	16	0
				TN Zamrud	3,215	24,342
		22	BTN Bukit Tigapuluh	TN Bukit Tigapuluh	18	0
		23	BTN Tesso Nilo	TN Tesso Nilo	444	0
9	Sumatera Selatan	24	BKSDA Sumatera Selatan	SM Gumai Pasemah	391	0
				SM Gunung Raya	7,213	0
				SM Padang Sugihan	0	0
				SM Dangku	10,595	0
		25	BTN Berbak Sembilang	TN Sembilang	23	0
8	Sumatera Utara	26	BBTN Leuser	TN Gunung Leuser	0	0
				TN Batang Gadis	0	0
8	Lampung	27	BTN Way Kambas	TN Way Kambas	0	0
		28	BBTN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan	0	0
			TOTAL		172,495	224,467

B.2. Pengelolaan Hutan Lestari (Enhanced Natural Regeneration)

Mengacu pada Permenhut No. 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam, ENR merupakan kegiatan pengayaan hutan, melalui Kegiatan pengkayaan jenis guna mengembalikan struktur vegetasi mendekati aslinya, dan kegiatan perlindungan dan pengamanan terhadap proses suksesi alam, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat aktivitas manusia.

Upaya pengkayaan tanaman hutan di kawasan konservasi dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Merujuk kepada dokumen Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, pada kawasan

konservasi terdapat areal untuk kegiatan pengayaan sebesar 548 ha, dimana lebih dari separuhnya berada di Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum kegiatan pengelolaan hutan lestari di bidang konservasi diarahkan pada peningkatan kualitas habitat untuk kehidupan liar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran dari Ditjen KSDAE dalam pencapaian FOLU Net Sink khususnya di bidang Pengeloaan Hutan Lestari (*Enhanced Natural Regeneration*). Beberapa rencana kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari (*ENR*) dalam upaya mendukung pencapaian FOLU Net *Sink 2030* disajikan pada **Tabel 8**, sedangkan luas danlokasi implementasi kegiatan ini disajikan di **Tabel 9**.

TABEL 6 | Rencana kegiatan dan indikator kinerja bidang konservasi dalam mendukung Pengeloaan Hutan Lestari (*Enhanc ed Natural Regeneration*)

No	Kegiatan	Rincian Output	Verifier	Satuan
1	Pembinaan Habitat (Tumbuhan dan Komunitas Vegetasi Asli)	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	a. Populasi spesies tumbuhan yang terancam punah atau rentan, b. Keanekaragaman dan kondisi komunitas vegetasi asli, c. Jumlah dan luas tutupan species bernilai penting	Unit KK
2	Pembinaan Populasi	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	a. Rentang dan jumlah populasi spesies fauna endemik local b. Keanekaragaman jenis fauna asli dan habitatnya c. Keberhasilan tingkat pertumbuhan tanaman pengayaan d. Jumlah jenis yang berhasil ditangkarkan	Unit KK
3	Pengkayaan Jenis	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	a. Status konservasi spesies fauna yang terancam b. Presentase jumlah satwa yang berhasil di rescue (sitaan) c. Jumlah flora dan fauna yang terancam punah yang berhasil ditangkarkan	Unit KK
4	Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	a. Perubahan status dan fungsi kawasan konservasi, (ii) Kuantitas dan kualitas hutan Konservasi b. Berkurangnya jumlah kejadian pembalakan dan perambahan hutan c. Penyelesaian konflik	Unit KK

TABEL 7 | Lokasi dan luas Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari (*Enhanced Natural Regeneration*) (Ha)

No	Provinsi	Kawasan Konservasi	Pengelolaan Hutan Lestari (Enhanced Natural Regeneration) (Ha)
1	Jambi	CA Hutan Bakau Pantai Timur, TN Berbak	0,13
2	Kalimantan Barat	CA Mandor, CA Muara Kendawangan	2,64
3	Kalimantan Selatan	SM Pleihari Tanah Laut	-
4	Kalimantan Tengah	TN Tanjung Putting	7,41
5	Kalimantan Timur	CA Muara Kaman Sedulang, CA Teluk Adang, CA Teluk Apar, TAHURA Bukit Soeharto, TAHURA Lati Petangis	433,03
6	Lampung	SM Gunung Raya	0,75
7	Riau	SM Balai Raja, TN Tesso Nilo, TN Zamrud	0
8	Sumatera Selatan	SM Dangku, SM Gunung Raya	0,02
		TOTAL	**444**

Dalam implementasi kegiatan mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari (*Enhanced Natural Regeneration*) yang tertera pada tabel 2.25 secara terperinci dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pembinaan Habitat (Tumbuhan dan Komunitas Vegetasi Asli)

Kaitannya dengan kegiatan pengkayaan hutan, maka pada kawasan konservasi diarahkan sebagai habitat tempat tumbuh jenis tumbuhan dan satwa serta seluruh komponen ekosistem hutan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Kegiatan pembinaan habitat satwa liar yang dilakukan ini juga merupakan bagian dari upaya pemulihan ekosistem dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pengkayaan tanaman dan satwa ;

b. Menanam tanaman lokal yang merupakan tanaman pendukung peningkatan populasi satwa liar;

c. Melindungi keanekaragaman dan kondisi komunitas vegetasi asli.

2. Pembinaan Populasi

Pemerintah melaksanakan pembinaan populasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Pasal 8 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk menjaga keberadaan populasi jenis tumbuhan dan satwa dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya. Pembinaan populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan melalui sub-sub kegiatan:

a. Pembinaan padang rumput untuk makan satwa;

b. Penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa pohon sumber makan satwa;

c. Pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi satwa;

d. Penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa;

e. Penambahan tumbuhan atau satwa asli;

f. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

3. Pengkayaan Jenis

Pengkayaan jenis dapat dilakukan pada seluruh areal di luar ruang terbuka, guna mengembalikan struktur vegetasi mendekati aslinya. Pengkayaan jenis dapat dilaksanakan melalui penaburan biji (*direct seeding and airoseeding*) dan penanaman anakan pohon terutama dari jenis asli yang mempunyai nilai konservasi sebagai pakan satwa, penanaman tumbuhan sisipan terutama pada tempat berlindung/bersarangnya satwa atau pada lokasi yang tidak terdapat kecukupan jenis dan populasi untuk memperkaya dan meningkatkan keragaman spesies. Pengkayaan jenis harus didahului dengan pembersihan permukaan tanah, pengolahan/pendangiran tanah pada lokasi rencana penaburan dan atau penanaman.

4. Penyelamatan Satwa

Kegiatan penyelamatan satwa merupakan tanggungjawab Pusat Penyelamatan Satwa BKSDA yang mana adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan satwa hasil sitaan atau temuan atau penyerahan dari masyarakat yang pengelolaannya bersifat sementara sebelum adanya penetapan penyaluran satwa (*animal disposal*) lebih lanjut oleh Pemerintah. Kegiatan ini dimaksud untuk melestarikan jenis satwa dan juga kelayakan dalam segi ekonomi/finansial.

5. Pembinaan Obyek Wisata Alam

Objek wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta mempunyai daya tarik bagi wisatawan serta upaya pembinaan cinta alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usahanya. Pembinaan objek wisata alam ini dimaksudkan untuk bisa meningkatkan hasil ataupun kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan jasling dan wisata alam di kawasan konservasi dengan tanpa mengabaikan segi pengelolaan kawasan hutan konservasi.

B.3. Peningkatan Cadangan Karbon (Non-Rotasi) (Bidang II PCK)

Kegiatan mitigasi selanjutnya yang diampu oleh Bidang Konservasi adalah Peningkatan Cadangan Karbon (Non-Rotasi). Kegiatan peningkatan cadangan karbon hutan (Non-Rotasi) merupakan kegiatan rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon yang tidak dipanen kayunya (non-rotasi). Kegiatan rehabilitasi tanpa rotasi dilakukan di lokasi prioritas yang memiliki tutupan lahan tidak produktif, lahan budidaya semusim dan perkebunan yang masuk ke dalam arahan lindung untuk area di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung serta bukan merupakan lahan gambut. Kegiatan rehabilitasi yang tutupan lahannya berupa lahan budidaya dan perkebunan yaitu berupa kegiatan *agroforestry* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Analisis spasial perencanaan operasional penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan lahan menghasilkan area pelaksanaan untuk Kegiatan kegiatan Peningkatan Cadangan Karbon (Non-Rotasi) bidang konservasi adalah 638.548 Ha. Keseluruhan kegiatan PCK Non-rotasi ini tentunya dilakukan pada kawasan hutan konservasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini nantinya akan dibiayai melalui Dana DIPA yang telah disediakan, ataupun nantinya dipenuhi lebih lanjut melalui bantuan hibah maupun dari pihak sponsor.

Area terluas ada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Berdasarkan PerMenLHK No.48/2014, di area hutan konservasi, kegiatan rehabilitasi dilakukan pada ekosistem dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat, yang ditunjukan oleh gangguan kerusakan fungsi kawasan sebagai habitat dan ruang jelajah kehidupan satwa dan adanya perubahan dinamika populasi spesies kunci yang signifikan dalam jangka waktu kurang dari lima tahun. Selain itu, kegiatan rehabilitasi non-rotasi juga dapat dilakukan pada lahan terbuka yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melalui skema kemitraan konservasi, bagian dari program perhutanan sosial. Mengacu kepada PerDirJen KSDAE No.6/2018 proses kemitraan konservasi dapat berupa program pemberdayaan masyarakat atau perjanjian kerjasama (pada zona/blok tradisional) dengan penekanan pada penyelesaian konflik dan kemitraan untuk pemanfaatan HHBK, atau konservasi dalam pemulihan ekosistem (zona rehabilitasi) dengan tujuan utama pengembalian fungsi ekosistem secara bertahap. Pada program pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik menjadi utama, dengan pendekatan persuasif. Dalam pelaksanaannya, program ini dapat diselaraskan dengan kegiatan RHL, namun tetap harus disesuaikan dengan konteks konservasi, misalnya lokasi koridor lintas satwa dan menggunakan jenis-jenis pohon asli. Program konservasi dalam pemulihan ekosistem juga dapat diarahkan pada komoditas pemanfaatan HHBK, sehingga kegiatan konservasi dapat diselaraskan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa program dan kegiatan Ditjen KSDAE yang terkait dan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi non-rotasi dapat dilihat pada **Tabel 10**.

TABEL 8 | Kegiatan mitigasi peningkatan cadangan karbon (non-rotasi)

No	Kegiatan	Rincian Output	Uraian/Indikator Kinerja	Satuan
1	Penanganan *Opened area*	Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Ribu Ha
2	Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	Luas ekosistem yang dipulihkan	Ribu Ha
3	RHL pada Kawasan Konservasi	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	Luas ekosistem yang dipulihkan	Ribu Ha

No	Kegiatan	Rincian Output	Uraian/Indikator Kinerja	Satuan
4	Pembinaan habitat satwa liar melalui pengkayaan tanaman pakan satwa	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	(i) Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies (ii) Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (iii) Jumlah penyelamatan satwa liar	Entitas, Kejadian
5	Kemitraan Konservasi dalam rangka Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan	Ha
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Unit desa
7	Intensifikasi Jasling dan Wisata Alam	Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Jumlah Destinasi WIsata Alam	Unit KK
8	Inventarisasi dan Verifikasi Kehati	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan	Entitas, Kejadian
9	Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	Jumlah penyelamatan satwa liar	Kejadian
10	Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	Unit KK
11	Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	Unit KK

No	Kegiatan	Rincian Output	Uraian/Indikator Kinerja	Satuan
12	RHL serta PE pada areal IKN	Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	Ha

Kegiatan PCK (non-rotasi) dibawah bidang konservasi dilakukan di 5 lokasi dengan rincian luas dapat dilihat pada **Tabel 11** berikut :

TABEL 9 | Lokasi dan Luas Kegiatan Peningkatan Cadangan Karbon (Non-rotasi)

No	Provinsi	Unit KK	Luas (Ha)
1	Jambi	CA Hutan Bakau Pantai Timur, TN Berbak	32.019
2	Kalimantan Barat	CA Mandor, CA Muara Kendawangan	136.758
3	Kalimantan Selatan	SM Pleihari Tanah Laut	6.180
4	Kalimantan Tengah	TN Tanjung Puting	133.790
5	Kalimantan Timur	CA Muara Kaman Sedulang, CA Teluk Adang, CA Teluk Apar, Tahura Bukit Soeharto, Tahura Lati Petangis	160.925
6	Lampung	SM Gunung Raya	3.418
7	Riau	SM Balai Raja, TN Tesso Nilo, TN Zamrud	94.032
8	Sumatera Selatan	SM Dangku, SM Gunung Raya	71.427
		TOTAL	**638.548**

Dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi ini, terdapat 12 kegiatan yang akan dilakukan sehingga dapat mencapai target FOLU Net Sink di tahun 2030. Adapun rincian kegiatan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penanganan Opened Area

Areal terbuka yang terdapat di KSA/KPA merupakan kenampakan biofisik yang terbentuk oleh sebab-sebab alami (kebakaran, pasang surut, suksesi alami, kondisi-kondisi khusus alami geologi seperti blang di Aceh,) ataupun akibat pembukaan lahan oleh manusia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* diketahui bahwa terdapat beberapa lokasi yang memang sengaja dijaga sebagai opened area seperti yang ada di wilayah TN Baluran.

Pada pelaksanaannya, penanganan opened area biasanya dilakukan dengan *Resort Based Management (RBM)*. Area terbuka dan perambahan dinilai sebagai salah satu gejala akibat kurangnya kehadiran di lapangan yang menyebabkan kawasan menjadi tidak terkuasai. Tool RBM diciptakan untuk menjawab akar masalah tersebut. Selain itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penanganan area terbuka, yakni:

a. Sumber daya manusia *Geographic Information System* (GIS)
Sumberdaya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan staf di resort pada masing-masing UPT untuk bisa menguasai aplikasi pemetaan dan juga peralatan survey yang berkaitan dengan pemetaan seperti GPS. Aplikasi pemetaan ini dimaksudkan untuk bisa melakukan digitasi peta satelit pada daerah yang terindikasi sebagai *opened area* selanjutnya diperlukan upaya konfirmasi lokasi di lapangan.

b. SDM untuk assessment konflik
Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk penanganan *opened area* adalah adanya SDM yang berkemampuan mengidentifikasi konflik. Dengan adanya kemampuan untuk mengidentifikasi konflik maka hal mendasar yang menyebabkan timbulnya *opened area* bisa teridentifikasi dan nantinya dapat teratasi. Untuk bisa mewujudkan pendampingan assessment konflik, maka pada awalnya perlu dilakukan pelatihan SDM untuk bisa menjadi agen resolusi konflik. Pengawalan komunikasi pasca pelatihan dikembangkan untuk membangun jaringan kerja sekaligus memantau perkembangan penyelesaian konflik.

Output yang diharapkan bisa tercapai dalam kegiatan ini termasuk dalam Indikator Kinerja Program yaitu luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (800.000 Ha).

2. Pemulihan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pemulihan ekosistem di dalam Kawasan konservasi. Indikator kegiatan ini yaitu luas ekosistem yang dipulihkan (200.000 Ha). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024. Pemulihan ekosistem ini difokuskan pada area yang terdegradasi. Program pemulihan ekosistem merupakan program nasional yang baru ditetapkan pada tahun 2015 sehingga perlunya penguatan dan persiapan prakondisi pelaksanaan di lapangan.

Kegiatan pemulihan ekosistem merupakan kegiatan mempertahankan, memulihkan, dan/atau mengembalikan ekosistem menjadi seperti kondisi aslinya ataupun kondisi masa depan tertentu sesuai dengan tujuan pengelolaan. Pemulihan ekosistem dapat dilaksanakan melalui mekanisme alam (penyelamatan anakan alam), rehabilitasi (penanaman), dan restorasi (eksplorasi jenis tumbuhan/introduksi satwa liar). Cara pemulihan ekosistem yang dilakukan dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang terjadi, yakni suksesi alam, rehabilitasi, dan restorasi. Tata cara pemulihan ekosistem dapat merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya alam dan Ekosistem Nomor : P.12/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman dan Pengkayaan Jenis Dalam rangka Pemulihan Ekosistem daratan pada Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Perdirjen KSDAE Nomor P.12 Tahun 2015 ini disusun sebagai pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Menteri Kehutanan No. 48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem di KPA/KSA.

Secara ringkas langkah yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan pemulihan ekosistem

adalah sebagai berikut:

a. Pembuatan Peta Areal dan Peta Kerja

Peta rencana areal pemulihan ekosistem penting dibuat untuk mengetahui areal yang akan dipulihkan dan menjelaskan batas-batas yang terdapat di lapangan. Informasi yang dimuat dalam peta ini adalah informasi terkait nama lokasi, garis kontur, luas areal yang dipulihkan, jalan setapak, sungai, pal batas, dan informasi lainnya.

Peta kerja dibuat lebih terperinci dan memberikan informasi yang lebih banyak, antara lain batas kompartemen, batas petak, lokasi persemaian, pondok kerja, pondok jaga, jalan kendaraan dan jalan setapak, embung air, dan lain sebagainya. Peta kerja dibuat dengan tujuan mempermudah pelaksanaan kegiatan pada tingkat lapangan.

b. Pemilihan Jenis Tumbuhan

Pemilihan jenis yang tepat akan menentukan tingkat keberhasilan dalam melakukan kegiatan pemulihan ekosistem. Pemilihan jenis dilakukan berdasarkan hasil survei dan juga peruntukkan kawasan. Namun, hal yang perlu diingat adalah jenis yang akan ditanam merupakan jenis-jenis asli yang terdapat di sekitar areal yang akan dipulihkan atau mengacu pada jenis yang ada di areal hutan referensi.

c. Penentuan Pola dan Sistem Penanaman

Ada beberapa pola yang bisa diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Pola tersebut adalah suksesi alami, penunjang suksesi alami, pengayaan tanaman, dan penanaman.

d. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi bertujuan menginformasikan dan meminta dukungan dari pemangku kepentingan lain terhadap kegiatan pemulihan ekosistem. Selain UPT pelaksana, pemangku kepentingan adalah pemerintah daerah pada tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan masyarakat lokal, dan sebagainya. Hal ini untuk membuktikan bahwa kegiatan pemulihan ekosistem merupakan kegiatan yang penting dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

3. RHL pada Kawasan Konservasi

Kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) pada kawasan konservasi ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan pemulihan ekosistem. Output yang diharapkan pada kegiatan ini adalah pemulihan eksosistem yang ada di kawasan konservasi. Aturan terkait kegiatan RHL ini dapat dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Kegiatan RHL pada kawasan konservasi ditujukan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati. Untuk bisa mencapai output yang diharapkan maka kegiatan penanaman area yang terdegradasi dapat dilakukan. Hal utama yang harus diperhatikan dalam kegiatan RHL ini adalah berkaitan dengan pemilihan jenis asli, diutamakan jenis yang telah diketahui nilai ekologi, ekonomi, dan sosialnya, untuk pelaksanaan kegiatan.

4. Pembinaan Habitat Satwa Liar Melalui Pengkayaan Tanaman Pakan Satwa

Kegiatan pembinaan habitat satwa liar yang dilakukan ini juga merupakan bagian dari upaya pemulihan ekosistem. Kegiatan ini dilakukan dengan fokus utama untuk pengkayaan tanaman satwa. Pengkayaan tanaman untuk pakan satwa ini pada kenyataannya juga bisa dilakukan untuk memperbaiki tempat hidup, tempat pakan, tempat bersarang, dan tempat penjelajahan dengan menanam berbagai jenis tumbuhan asli setempat dan/atau endemik. Meskipun demikian perlu juga dilakukan. Pengkayaan jenis dapat dilakukan pada seluruh areal di luar ruang terbuka, guna mengembalikan struktur vegetasi mendekati aslinya. Pengkayaan jenis dapat dilaksanakan melalui penaburan biji dan penanaman anakan pohon terutama dari jenis asli yang mempunyai nilai konservasi sebagai pakan satwa, penanaman tumbuhan sisipan terutama pada tempat berlindung/bersarangnya satwa atau pada lokasi yang tidak terdapat kecukupan jenis dan populasi untuk memperkaya dan meningkatkan keragaman spesies. Pengkayaan jenis harus didahului dengan pembersihan permukaan tanah, pengolahan/pendangiran tanah pada lokasi rencana penaburan dan atau penanaman.

5. Kemitraan Konservasi dalam rangka Pemulihan Ekosistem

Definisi kemitraan konservasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimaknai sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Dalam kegiatan ini kemitraan konservasi difokuskan untuk pemulihan ekosistem. Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dilakukan untuk tujuan memulihkan fungsi ekosistem secara bertahap agar kembali mendekati kondisi aslinya atau mencapai kodisi sesuai tujuan yang ditetapkan oleh pengelola. Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan eksosistem dapat dilakukan pada ekosistem yang rusak di KSA dan KPA. Kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti bencana alam dan kebakaran, jenis invasif, dan juga akibat aktivitas manusia.

Dalam menjalankan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem, mitra konservasi berhak untuk mendapatkan pendampingan dari penyuluh atau mitra unit pengelola, memanfaatkan tumbuhan invasif yang ditebang dalam kegiatan pemulihan ekosistem, mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada hutan. Hal lain yang harus dilakukan oleh mitra konservasi adalah untuk menaati kesepakatan dalam perjanjian kerja sama, menjaga dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan dan penambangan, berperan aktif dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem, melaporkan kepada petugas apabila menemukan gangguan di dalam atau sekitar areal kemitraan, serta paling lama 1 tahun setelah kemitraan dilaksanakan mitra wajib menanam tanaman asli/endemik. Dalam mendukung kemitraan, unit pengelola menyediakan tenaga pendamping kepada mitra dan dapat dibantu oleh *stakeholders* terkait.

Lokasi kemitraan konservasi pemulihan ekosistem yaitu pada zona rehabilitasi taman nasional atau blok rehabilitasi suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau areal yang telah mengalami kerusakan dan bukan pada areal jelajah satwa dilindungi atau habitat satwa dilindungi.

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga

Pemberdaayan masyarakat yang dilakukan dalam hal ini berfokus untuk mengurangi adanya tekanan terhadap kawasan konservasi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pembangunan berbasis konservasi alam dengan tujuan utama meningkatkan keberdayaan masyarakat yang masih tertinggal atau miskin di sekitar kawasan konservasi menuju kemandirian dan mutu kehidupan yang lebih baik, serta hidup harmonis dengan alam sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk pengembangan sumberdaya hayati yang berada dalam areal KK setempat melalui program penangkaran dan domestikasi. Hal ini yang membedakan program pemberdayaan masyarakat di sekitar KK dengan program di kawasan hutan lainnya.

Tugas dari pendamping berikutnya selain rutin mendampingi juga membuat jejaring kemitraan antara kelompok dengan pelaku usaha misalnya pengusaha produk olahan tempe/tahu/pisang, distributor produk usaha kecil menengah, sehingga produktivitas kelompok tidak terhenti. Manfaat dari membangun jejaring kemitraan/ usaha ini adalah:

a. Sarana meningkatkan pengetahuan
Melalui jejaring, pelaku usaha dan kelompok tani Sadar Lestari dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan, sehingga akan diperoleh informasi penting yang dapat memperbaiki pola usaha menuju arah lebih baik.

b. Sarana membagi informasi
Melalui jejaring, dimungkinkan terjadi tukar menukar informasi, bahkan dapat diperoleh informasi mengenai peluang, ancaman, kecenderungan usaha yang dijalankan atau usaha lainnya.

c. Sarana promosi
Jejaring adalah media strategis untuk mempromosikan usaha yang dijalankan karena faktanya adalah setiap pelaku usaha telah memiliki jejaring yang terbangun sebelumnya.

d. Sarana awal pembentukan kemitraan mutualisme
Jejaring berfungsi sebagai wahana untuk saling mengenal satu sama lain dan menginformasikan potensi atau bakat. Pada tingkat komunikasi tertentu dapat berpeluang melahirkan kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat.

e. Meningkatkan daya dukung
Hubungan yang baik dengan banyak orang akan mendatangkan keberpihakan atau daya dukung atas apa yang dikerjakan. Hal ini akan berperan meminimalisir potensi gangguan dan ancaman yang tidak dapat dihadapi kelompok itu sendiri.

7. Intensifikasi Jasling dan Wisata Alam

Intensifikasi Jasling dan Wisata Alam ini dimaksudkan untuk bisa meningkatkan hasil ataupun kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan jasling dan wisata alam di kawasan konservasi. seperti yang diungkap dalam rencana strategis, hingga tahun 2024 nanti diharapkan ada peningkatan PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. Cara untuk bisa mencapai hal tersebut adalah dengan meningkatkan upaya penataan tapak di area-area pemanfaatan baru maupun yang telah ada, pembangunan sarana dan prasarana serta dilakukan juga upaya promosi pengelolaan wisata di kawasan konservasi. Melalui hal tersebut maka diharapkan akan muncul *site-site* baru pemanfaatan dan juga meningkatkan pendapatan.

8. Inventarisasi dan Verifikasi Kehati

Output yang diharapkan pada kegiatan ini terdiri dari 3 hal yaitu Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL, Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan terhadap areal yang diindikasikan memiliki kriteria nilai keanekaragaman hayati tinggi, upaya mengetahui kondisi faktual secara lebih rinci terhadap areal yang diindikasikan memiliki kriteria nilai keanekaragaman hayati tinggi. Sementara verifikasi adalah upaya pemeriksaan kebenaran terhadap areal yang diindikasikan memiliki kriteria nilai keanekaragaman hayati tinggi. Untuk bisa mencapai output yang diinginkan terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu:

a. Penentuan target kinerja
Penetapan Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi Luasannya telah diuraikan menjadi 5 tahun untuk seluruh UPT KSDA

b. Pengalokasian anggaran
Pembagian anggaran secara proporsional ke seluruh UPT KSDA yang melakukan kegiatan inventarisasi kehati tinggi

c. Penyusunan NSPK
Penyusunan norma standar pedoman dan kriteria (NSPK) dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penyusunan NSPK dilaksanakan dengan metode pertemuan dan diskusi, baik secara internal maupun bersama dengan para pihak yang berkompeten yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal

d. Bimbingan teknis pelaksanaan
Bimbingan teknis pelaksanaan ini harus dilakukan guna menjamin pemahaman dan kelancaran pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar keseluruhan pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas sesuai dengan rencana.

e. Koordinasi pelaksanaan
Koordinasi dilaksanakan dengan metode pertemuan daring dan tatap muka, serta kunjungan ke Balai Besar/Balai KSDA. Selain itu, dalam upaya percepatan pelaksanaan kegiatan

f. Verifikasi hasil pelaksanaan
Kegiatan verifikasi hasil inventarisasi merupakan tahapan dimana data dan infomasi yang diperoleh oleh Balai Besar/Balai KSDA akan dikumpulkan dan diverifikasi, sesuai dengan ketentuan NSPK yang berlaku.

Sementara itu, tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam upaya inventarisasi dan verifikasi kehati di luar kawasan konservasi dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem NOMOR: P. 8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020.

9. Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar

Konflik manusia dan satwa liar terjadi akibat adanya inter-kegiatan yang berdampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung, antara manusia dan satwa liar. Pada

kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yakni berkurangnya kepedulian manusia terhadap satwa liar.

Kerugian yang umum terjadi akibat konflik antara lain rusaknya tanaman pertanian atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, bahkan kadang menimbulkan korban jiwa manusia, dan tidak jarang satwa liar yang berkonflik tersebut mengalami kematian.

Pada kenyataannya berbagai cara dapat dilakukan untuk menangani hal ini, dimulai dari upaya preventif. Kegiatan penyadartahuan masyarakat terkait pentingnya hidup berdampingan dengan satwa liar, serta upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjamin keberlangsungan keduanya. Saat ini telah terdapat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.53/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-Ii/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.

10. Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan

Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, yakni kegiatan pengamanan dan penjagaan kawasan yang dilakukan langsung oleh tim dari pihak resort maupun bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Masyarakat yang ikut dalam penjagaa bisa juga masyarakat yang telah bergabung dalam masyarakat mitra polhut. Pedoman pelaksanaan operasi gabungan pengamanan hutan dapat dilihat pada Peraturan direktur jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Nomor: P.3/PHLHK/SET/GKM.2/5/2018. Bahkan dalam kegiatan pengamanan hutan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bantuan dari masyarakat melalui kemitraan. Dengan demikian, masyarakat yang telah merasakan manfaat langsung dari kawasan akan ikut menjaga.

11. Pengendalian Karhutla di KK dan Daerah Penyangga

Kegiatan pengendalian kebakaran di KK dan Daerah Penyangga penting untuk dilakukan. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan. Kegiatan ini sebenarnya sudah terlaksana, hanya saja dibutuhkan peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran hutan. Keberhasilan dalam pengendalian karhutla dapat dilihat pada poin berikut:

a. Penurunan frekuensi kebakaran hutan di 34 provinsi;

b. Ketersediaan data informasi deteksi dini kebakaran (*hotspot*) real time paling tidak di Sumatera, Kalimantan dan Jawa;

c. Terselesaikannya kasus tindak pidana bidang Kebakaran hutan sampai penetapan pengadilan Terbentuknya Masyarakat Peduli Api.

Upaya pencegahan dan juga pengendalian kebakaran juga terus dilakukan oleh kementerian melalui penyaluran sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Prosedur dan tata cara pengendalian kebakaran telah dirangkum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

12. RHL serta PE pada areal IKN

Area IKN (Ibu Kota Negara) yang berada di Kalimantan Timur tentunya juga menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam program pemulihan ekosistem dan juga kegiatan RHL. Mengingat salah satu prinsip pendirian area IKN ini adalah tersedianya lebih dari 75% kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN. Guna mencapai hal tersebut pada akhirnya diperlukan upaya pemulihan ekosistem maupun rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan tujuan dan juga jenis tumbuhan asli. Tata cara pelaksanaan RHL dan Pemulihan Ekosistem cenderung sama dengan pemulihan ekosistem yang dilakukan di luar kawasan konservasi.

B.4. Pengelolaan Lahan Gambut (Restorasi)

Kegiatan restorasi gambut merupakan upaya pemulihan fungsi ekosistem gambut terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur dan fungsinya berada pada kondisi pulih. Sementara itu, pelaksanaan restorasi gambut dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab. Berdasarkan penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana, kegiatan restorasi dalam kawasan konservasi dilakukan oleh pemangku kawasan konservasi yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Ekosistem (KSDAE). Rencana kegiatan dan indikator kinerja bidang konservasi dalam mendukung pengelolaan Lahan Gambut selengkapnya disajikan pada Tabel 12.

TABEL 10 | Rencana kegiatan dan indikator kinerja bidang konservasi dalam mendukung pengeloaan lahan gambut

No	Kegiatan	Rincian Output	Uraian/Indikator Kinerja	Satuan
1	Revegetasi (Penanaman Intensif Bersama Masyarakat, Pemulihan Ekosistem Melalui Mekanisme Alam, Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem)	Pemulihan Ekosistem Di Kawasan Konservasi	Luas ekosistem yang	Ribu Ha
2	Rewetting (Pembasahan) Dengan Pembangunan Sekat Kanal	Pemulihan Ekosistem Di Kawasan Konservasi	a. Jumlah infrastruktur pembasahan lahan gambut/ sekat kanal yang terbangun b. Terlaksananya manajemen tata air gambut dengan baik	Unit Kanal, Unit Kk
3	Pemeliharaan Sekat Kanal	Kawasan Konservasi Yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah sekat kanal yang masih berfungsi dengan baik	Unit Kanal

No	Kegiatan	Rincian Output	Uraian/Indikator Kinerja	Satuan
4	Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif Di Kawasan Konservasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan restorasi gambut	Desa
5	Perlindungan, Pengamanan, Dan Penjagaan Kawasan	Kawasan Konservasi Yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	a. Perubahan status dan fungsi kawasan konservasi, b. Kuantitas dan kualitas hutan konservasi, c. Berkurangnya jumlah kejadian pembalakan dan perambahan hutan, d. Penyelesaian konflik	Unit Kk
6	Pengendalian Kebakaran Hutan	Kawasan Konservasi Yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah MPA (Masyarakat Peduli Api) Yang Masih Aktif Dalam Aktivitas Pengendalian Karhutla, Terlaksananya Kegiatan 3R (*Rewetting, Revegetation, Revitalization*) dengan Baik	Desa

TABEL 11 | Lokasi dan luas kegiatan pengelolaan gambut melalui restorasi (ha)

No	Provinsi	Kawasan Konservasi	Kegiatan Pengelolaan Gambut Melalui Restorasi (Ha)
1	Kalimantan Timur	CA Muara Kaman Sedulang, CA Teluk Adang	9.351
		TOTAL	**638.548**

Dalam implementasi kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut yang tertera pada Tabel 12 secara terperinci dideskripsikan sebagai berikut:

1. Revegetasi

Kegiatan restorasi hutan dan lahan gambut berupa revegetasi (*revegetation*) adalah suatu tindakan pemulihan tutupan lahan pada ekosistem rawa gambut melalui kegiatan penanaman kembali di lahan gambut. Penanaman kembali ini dilakukan untuk beberapa tujuan, antara lain:

a. Penanaman kembali tanaman asli (endemis) dan tanaman yang adaptif di lahan gambut terbuka,

b. Penanaman pengkayaan (*enrichment planting*) pada kawasan hutan gambut yang terdegradasi,

c. Peningkatan dan penerapan teknik agen penyebar benih (*seed dispersal techniques*) untuk mendorong regenerasi vegetasi gambut (https://brgm.go.id/program-kerja-2/).

Berdasarkan status dan fungsi kawasan, kegiatan revegetasi (R2) ini dapat dilaksanakan tidak hanya di kawasan hutan lindung, namun juga di kawasan budidaya dan Areal Penggunaan Lain (APL). Sehingga pemilihan jenis tanaman dapat disesuaikan dengan fungsi kawasan yang akan dilakukan kegiatan revegetasi. Penanaman jenisjenis tanaman asli (endemis) gambut sebaiknya dilakukan di kawasan dengan fungsi lindung/ konservasi. Kemudian, kawasan dengan fungsi budidaya dapat ditanami dengan jenis-jenis tanaman asli dan jenis lainnya yang adaptif terhadap kondisi lahan gambut yang selalu basah dan lembab serta memiliki nilai ekonomi. Dalam pelaksanaannya di lapangan, kegiatan revegetasi menggunakan Teknik yang disesuaikan dengan kondisi lahan gambut. Teknik revegetasi yang umumnya digunakan di lahan gambut adalah sistem surjan dan paludikultur.

2. Rewetting

Kegiatan *Rewetting* atau pembasahan kembali, dilakukan pada material gambut yang mengering akibat turunnya muka air tanah gambut. Terdapat tiga cara melakukan pembasahan kembali tersebut:

a. Pembuatan bangunan penahan air, antara lain dalam bentuk sekat kanal

b. Penimbunan kanal yang terbuka

c. Pembangunan sumur bor

3. Pemeliharaan Sekat Kanal

Pembuatan sekat kanal merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam pecegahan kebakaran hutan dan lahan. Setelah pembuatan sekat kanal selesai dilakukan, maka tahap yang paling penting untuk dilaksanakan selanjutnya adalah pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan sekat kanal bertujuan untuk: memastikan fungsi dan kelayakan bangunan sekat kanal, serta terselenggaranya supervisi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal secara transparan dan bertanggung jawab (supervisi dalam survei, investigasi, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sekat kanal).

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah upaya mengembangkan, mendirikan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan sehingga masyarakat terbiasa dan bertanggung jawab terhadap lahan sekitar mereka. Pemberdayaan masyarakat sangat penting artinya dalam menunjang keberhasilan konservasi suatu lahan. Setidaknya terdapat tiga pertimbangan yang dapat dikemukakan, yaitu:

a. *Pertama*, Pemberdayaan masyarakat gambut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan kontribusi masyarakat dunia terhadap kelestarian ekosistem gambut.

b. *Kedua*, karena kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di lahan, seringkali menjadi penyebab ketidakpedulian mereka terhadap kualitas lingkungan.

c. *Ketiga*, Upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi dalam pelestarian lahan terbukti sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum bisa terpenuhi.

5. Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan

Sebagian besar gambut berupa hutan dan menyimpan karbon jumlah besar, dimana karbon yang tersimpan mulai permukaan hingga kedalaman. Saat terjadi penebangan hutan terutama dalam skala besar, oksigen dan sinar matahari memicu pelepasan karbon dari dalam tanah gambut. Dengan demikian sangat diperlukan upaya perlindungan, pengamanan, dan penjagaan kawasan gambut melalui beberapa sub kegiatan berikut:

a. Dilakukan pemetaan sosial-spasial kawasan gambut
b. Pembentukan perdesaan dengan masyarakat peduli api
c. Membangun pos penjagaan

6. Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan dalam Pengendalian Kebakaran Hutan

Pentingnya sinergi para pemangku kepentingan dalam pencegahan karhutla di lahan gambut menjadi fokus utama dalam menjaga lahan gambut dari karhutla. Kesadaran dan peran serta masyarakat pun harus terus diperkuat. Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan, KLHK telah menyempurnakan langkah penanganan karhutla menuju solusi permanen. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencetuskan tiga klaster dalam strategi penanganan karhutla, yaitu:

a. Pertama, melakukan analisis iklim dan langkah monitoring cuaca secara kontinyu kemudian didukung oleh rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). TMC sebagai upaya pencegahan karhutla dilakukan dengan tujuan membasahi kawasan gambut yang rawan karhutla, mengisi kanal-kanal, kolam retensi, dan embung untuk menekan potensi karhutla.

b. Kedua, pengendalian operasional dalam sistem satgas terpadu oleh para pihak di tingkat wilayah yang diperkuat dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dilengkapi sarana dan pengetahuan teknis serta dibekali pengetahuan paralegal

c. Ketiga, pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku usaha/ pemegang konsesi, praktik pertanian, dan penanganan.

B.5. Konservasi Keanekaragaman Hayati Tinggi (HCV)

Upaya pencegahan terjadinya emisi gas rumah kaca yang berasal dari kawasan hutan konservasi melalui perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari, termasuk habitatnya. Dalam hal ini, pencegahan deforestasi untuk perlindungan hutan alam berkontribusi dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati, termasuk melalui penataan fragmentasi kawasan/habitat, serta penetapan kewajiban menjaga kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) serta kewajiban penerapan koridor satwa dalam konstruksi pembangunan serta kegiatan kemitraan konservasi dengan masyarakat lokal/setempat dan masyarakat adat setempat. Berdasarkan analisis jasa lingkungan ekosistem, banyak area yang berada di luar kawasan hutan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati karena memiliki nilai konservasi tinggi dan menjadi kantong habitat satwa liar sehingga perlu menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati.

Perlindungan Area Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan hutan konservasi dapat diarahkan sebagai fungsi lindung dalam tata ruang. Dimandatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun profil keanekaragaman hayati dengan pembiayaan APBD dengan

output berupa rencana pengelolaan hayati. Area BKT di luar kawasan yang berhutan dan tidak dimanfaatkan (terlantar dan tidak ada penguasaan diatasnya) dikelola oleh pemerintah daerah. Area Bernilai Konservasi Tinggi atau High Conservation Value (HCV) ditetapkan berdasarkan keberadaan mega fauna (satwa dilindungi; badak, harimau, gajah, orangutan, anoa, owa, macan tutul, babirusa, dll).

Konservasi hutan alam yang ada di luar kawasan hutan konservasi dilakukan untuk menjaga area bernilai konservasi tinggi. Demikian juga di dalam kawasan hutan dilakukan dengan menjaga area bernilai konsentrasi tinggi. Berdasarkan IJLH, area berhutan alam yang menjadi area konservasi adalah area yang masuk ke dalam arahan lindung. Beberapa program pendukung kegiatan konservasi keanekaragaman hayati pada HCV diberikan pada Tabel 14.

TABEL 12 | Kegiatan konservasi keanekaragaman kayati pada HCV

No	Kegiatan	Rincian Output	Uraian/Indikator Kinerja	Satuan
1	Perlindungan, Rescue, Rehab dan Release Satwa			
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan KEE	Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi	Juta Ha
3	Inventarisasi dan verifikasi ABKT	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	Juta Ha
4	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	Jumlah penyelamatan satwa liar	Desa
5	Penyusunan NSPK Kehati di ABKT			

Pelaksanaan kegiatan konservasi kehati pada Areal HCV juga berfokus di Sumatera dan juga Kalimantan. Hal ini berkaitan dengan sebaran satwa-satwa megafauna dan juga penting yang tidak semua berada di kawasan hutan konservasi namun tersebar juga pada hutan lindung, hutan produksi, perkebunan, dan lahan masyarakat. Lanskap penting untuk beberapa habitat satwa penting tersebut dapat dilihat pada **Gambar 7** dan **8** berikut:

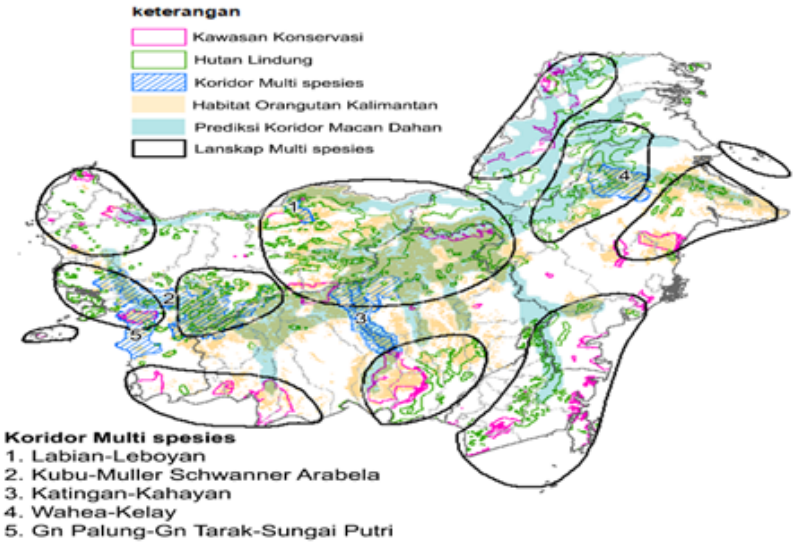

GAMBAR 7 | Peta lanskap harimau, badak, gajah dan orangutan
GAMBAR 8 | Peta lanskap dan koridor multispesies di Kalimantan

Dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi ini, terdapat 7 kegiatan yang akan dilakukan sehingga dapat mencapai target *Indonesia's FOLU Net Sink* di tahun 2024. Adapun rincian kegiatan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penetapan dan pengelolaan site monitoring

Penetapan dan pengelolaan *site monitoring* diawali dari identifikasi, pemilihan serta penetapan lokasi yang akan dijadikan sebagai site monitoring permanen. Pemilihan site monitoring ini nantinya mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan jenis satwa/tumbuhan endemik, luas jelajah, hingga sebaran satwa/tumbuhan yang akan dimonitoring. Dengan adanya site monitoring yang tetap ini diharapkan akan tersedia data yang berkaitan dengan populasi satwa /tumbuhan yang update dan kontinyu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kegiatan konservasi nantinya.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

Peningkatan efektivitas KEE ini merupakan kegiatan yang menyangkut kepada persiapan berbagai aspek. Yang perlu dipersiapkan dalam upaya peningkatan ini dimulai dari:

a. Persiapan SDM pengelolaan KEE melalui pelatihan sebanyak 2 kali pada tahun berjalan;

b. Peningkatan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan KEE, termasuk untuk tujuan ekowisata;

c. Integrasi pangkalan/basis data serta updating berkala;

d. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan, pengawetan, pemulihan ekosistem serta pemanfaatan;

e. Adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan yang digolongkan dalam hal ini dimulai dari kegiatan pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat yang ada di sekitar Kawasan Konservasi, pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang ada di sekitar Kawasan Konservasi. Dengan adanya pendampingan dan juga pemberdayaan terhadap masyarakat, diharapkan nantinya masyarakat akan merasakan manfaat dari adanya area HCV ini dan akan berkontribusi langsung untuk kelestarianya.

4. Inventarisasi dan Verifikasi ABKT

Kegiatan ini memiliki indikator berupa luasan kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (*43 Juta Ha*). Penyusunan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan hutan konservasi merupakan bagian dari kegiatan Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di Luar Kawasan Konservasi.

e. Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar

Konflik satwa dan manusia biasanya terjadi antara *umbrella species* (satwa payung) yang keberadaannya dapat mewakili kondisi keanekaragaman hayati di ekosistemnya, seperti gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Orangutan sumatera (*Pongo abelii*), Orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*) dengan manusia yang tinggal di sekitar habitatnya. Satwa ini biasanya mencari makanan yang berada di area perkebunan milik manusia karena ketersediaan pakan yang menipis di habitatnya maupun karena habitatnya sudah dirusak oleh manusia. Alternatif-alternatif strategi untuk menghadapi isu-isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Melindungi potensi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di hutan konservasi dengan melibatkan keberadaan masyarakat disekitar kawasan konservasi karena jumlah SDM yang belum memadai;

b. Meningkatkan kualitas pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar serta pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, komponen yang ada dalam kegiatan ini berfokus juga pada penanganan satwa konflik dan transit efektivitas penanganan konflik satwa dengan manusia dapat ditingkatkan dengan adanya *call centre* dan unit khusus penanganan konflil. Meskipun demikian, kegiatan ini nantinya juga harus bisa menjamin kesejahteraan dan kelestarian satwa yang berkonflik agar bisa kembali ke alam.

B.6. Target Lokasi dan Luas Kegiatan Bidang Konservasi dalam Mendukung *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*

Pemilihan area/UPT yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan mitigasi di dalam kawasan konservasi dinilai berdasarkan Indeks Prioritas Lokasi (IPL). Nilai IPL berkisar dari 1 sampai 9, semakin tinggi nilai IPL semakin tinggi tingkat urgensi atau prioritas lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi sasaran pelaksanaan program/kegiatan. Nilai IPL merupakan gabungan dari tiga peta Indeks Biogeofisik (IBGF) dikembangkan berdasarkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*. Dalam hal ini IBGF disusun dalam 3 jenis informasi yaitu IBGF Emisi, IBGF Serapan dan IBGF Kebakaran. Target lokasi bidang konservasi di dalam kawasan konservasi diutamakan memiliki indeks 7-9 (kategori tinggi-ekstrim tinggi), yaitu wilayah dengan tutupan hutan alam dengan ancaman deforestasi tinggi – sangat tinggi, terdapat lahan tidak produktif yang luas dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Selain itu, juga memiliki potensi masalah kebakaran yang cukup tinggi. Pelaksanaan kegiatan nantinya memberikan dampak yang signifikan pada penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan serta penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan, juga berkontribusi dalam mensukseskan kerjasama global penanganan perubahan iklim melalui komitmen NDC.

Total luas area pelaksanaan program bidang konservasi pada kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* pada arahan dalam dokumen Renops *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* (KLHK 2022) (Tabel 16) adalah seluas 39.287.508 ha yang terdiri dari 177.732 ha aksi mitigasi pencegahan deforestasi dan degradasi hutan alam di tanah mineral dan 131.885 di lahan gambut, 444 ha aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari, 638.548 ha aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dan 9.351 ha untuk aksi mitigasi pengelolaan lahan gambut dan 38.329.548 ha untuk aksi mitigasi konservasi kehati tinggi. Meskipun demikian, hasil verifikasi peta *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dengan peta rencana dan target pemulihan ekosistem di kawasan konservasi serta peta indikatif kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi mendapatkan angka 40.749.958 ha, meliputi 1.060.847 ha di dalam kawasan hutan konservasi dan 39.689.111 ha di luar kawasan hutan konservasi, sesuai tabel di bawah ini. Selanjutnya, rincian target per unit kawasan konservasi untuk AM 1 – AM 4 tersaji pada **Tabel 15** dan secara lebih rinci untuk setiap lokasi disajikan pada **Tabel 16.**

TABEL 13 | Data target aksi mitigasi Renops *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dengan data target hasil verifikasi

Kode AM	Aksi Mitigasi	Target pada RenOps FoLU (Hektar)	Target Hasil Verifikasi (hektar)
AM 1	Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan (Mineral)	177.732	177.732
	Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan (Gambut)	131.885	224.467
AM 2	Pengelolaan Hutan Lestari (*Enhanced Natural Regeneration*)	444	450
AM 3	Peningkatan Cadangan Karbon (PCK) (Non Rotasi)	638.548	653.989
AM 4	Restorasi Gambut	9.351	9.446
AM +	Konservasi Keanekaragaman Hayati Pada Areal HCV	38.329.548	39.689.111
	Total Target Aksi Mitigasi	39.287.508	40.749.958

Berdasarkan analisis risiko, area berhutan alam di luar kawasan hutan konservasi yang masuk arahan lindung dengan indek prioritas lokasi sedang sampai agak tinggi (IPL 5-6) mencapai 6,9 juta hektar dan yang tinggi sampai ekstrim tinggi (IPL 7-9) mencapai 2,2 juta hektar Pada area yang terdapat Arae Penggunaan Lain (APL), dapat diarahkan menjadi Taman Hutan Raya (Tahura).

TABEL 14 | Luas area pelaksanaan program aksi mitigasi menurut pemangku kawasan pada IPL 7, 8 dan 9 (2021-2024) dalam ha

Pemangku Kawasan	Jenis Pengelolaan	Deforestasi		Degradasi Konsesi[3]	PBPH-HT[3]	PHL	
		Mineral	Gambut			ENR[3]	RIL-C[3]
DITJEN PHL	HP-Non Konsesi	245.657	183.704			1.806	
	HPK-HP	145.372	60.659			1.881	
	KPHP-HTI	199.936	199.659	402.222	1.346.427	1.201.355	192.367
	KPHP-HPH	53.778	77.641	5.444.456		5.881.374	4.380.996
	KPHP-RE	147.384	9.478	84.277		6.257	
DITJEN PDASRH	HL-Non PIAPS	46.056	22.670			30	
DITJEN KSDAE	KONSERVASI	177.732	131.885			444	
DITJEN PSKL	KPHL-PIAPS	11.943	12.577			100	
	KPHP-PIAPS	126.803	89.867		116.041	2.531	
DITJEN PPKL[4]	GAMBUT						
BRGM[5]	BRGM						
PEMDA	PEMDA-Non HGU	552.267	117.857				
	PEMDA-HGU	116.701	56.465				
	TOTAL	**1.823.630**	**962.461**	**5.930.955**	**1.462.467**	**7.095.778**	**4.573.363**
TARGET NDC 20241		5.056.451	55.617	N.A	9.307.332	1.589.494	
TARGET NDC 20301		7.195.913	75.321	N.A	11.227.332	3.105.817	
TARGET LTS 20242		2.954.287	187.854	1.705.000	9.307.332	1.413.203	
TARGET LTS 20302		3.973.232	252.645	2.282.500	11.227.332	2.207.061	

Berdasarkan data verifikasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, terdapat 1.267.529 ha kegiatan Perhutanan Sosial definitif dan 1.941.912 ha kegiatan Perhutanan Sosial indikatif yang akan dilaksanakan di kawasan dengan nilai konservasi tinggi (HCV). Target total kegiatan PS yang akan dilaksanakan di kawasan HCV pada tahun 2022-2030 adalah seluas 3.209.441 ha.

	Peningkatan Cadangan Karbon		Pengelolaan Gambut		Konservasi Tinggi[3]
	Rotasi	Non-Rotasi	Tata Air[3]	Restorasi	
	88.457	215.842		13	11.095.028
	304.044	123.972		1.486	840.150
	2.106.325	971.734	718.021	506.024	1.443.708
	1.519.486	320.782		129.751	5.460.254
	23.987	43.052		26.852	360.930
		92.711		-	14.128.824
		638.548		9.351	
		29.000		43.593	1.459.031
	38.869	168.036		200.624	1.750.410
				40.749	
				1.070.689	
	1.230.100	85.070			1.350.742
	221.820	33.488	956.682	116.940	440.472
	5.533.087	**2.722.236**	**1.674.703**	**2.146.059**	**38.329.548**
	2.422.563	1.453.538	863.914	977.034	
	3.460.804	2.076.482	863.914	1.395.763	
	1.951.493	1.756.344	785.439	1.996.762	
	2.787.847	2.509.062	946.050	2.724.866	

Catatan: Angka yang tercantum dalam tabel dalam satuan ha1Dihitung berdasarkan target NDC dan 2 LTS-LCCP (KLHK, 2021), nilai menunjukan target kumulatif sejak 2011 (kecuali deforestasi dan degradasi hutan, kumulatif sejak 2013) dan belum dikoreksi dengan nilai aktual historis 2013-2020, luatas target kegiatan peningkatan cadangan karbon dan restorasi gambut belum dikalikan dengan survival rate; 3 Area untuk pencegahan degradasi hutan, pembangunan HT, pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (PHL) dan pengelolaan tata aiur gambut yang ada di area konsesi (PBPH-HT dan HGU) adalah di semua IPL 1-9; 4 Berdasarkan Perpres 92 Tahun 2020 dan Permen LHK No. 15 Tahun 2021, pengelolaan HL dilaksanakan oleh Ditjen PHL 5 PPKL sebagai pemangku pelaksanaan kegiatan restorasi di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL) yang bukan HGU; 6 BRGM sebagai pemangku pelaksanan kegiatan restorasi gambut di 7 Provinsi (Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua) yang berada di luar konsesi di seluruh fungsi Kawasan hutan, sedangkan di luar ke 7 provinsi tetap dalam kewenangan masing-masing pemangku kawasan.

TTABEL 15 | Target areal indikatif pelaksanaan kegiatan INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030 di dalam kawasan hutan konservasi

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan	Luas (ha)				
		No	UPT		PCK	ENR	Restorasi Gambut	DD Mineral	DD Gambut
1	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	1	BKSDA Kalimantan Tengah	CA Bukit Sapat Hawung	10,086	0	0	0	0
				CA Pararawen I dan II	500	0	0	64	0
				SM Lamandau	20,000	0	0	0	0
				TWA Bukit Tangkiling	200	0	0	0	0
				TWA Tanjung Keluang	1,267	0	200	762	376
				KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG 2)	0	0	0	5	3,818
				KSA/KPA Sungai Barito (Eks PLG)	0	0	0	6,127	15,629
				KSA/KPA Sungai Kapuas (Eks PLG)	0	0	0	734	42,230
		2	BTN Tanjung Putting	TN Tanjung Puting	86,020	60	5,000	82,077	65,810
		3	BTN Sebangau	TN Sebangau	2,000	0	63	0	65
2	Kalimantan Barat	4	BKSDA Kalimantan Barat	CA Mandor	734	150	0	1,151	0
				CA Gunung Raya Pasi	500	0	0	0	0

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan	Luas (ha)				
		No	UPT		PCK	ENR	Restorasi Gambut	DD Mineral	DD Gambut
				CA Karimata	500	0	0	0	0
				CA Nyiut Penrissen	535	0	0	29	0
				CA Muara Kendawa-ngan	111,323	0	1,000	2,956	22
				TWA Bukit Kelam	500	0	0	0	0
				TWA Gunung Melintang	284	0	0	187	0
				TWA Sungai Liku	884	0	0	14	0
				TWA Tanjung Belimbing	1,072	0	0	21	0
				TWA Asuansang	200	0	0	0	0
				TWA Baning	100	0	0	0	0
				TWA Gunung Dungan/ Gunung Batu	100	0	0	0	0
		5	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Danau Sentarum	50,021	0	0	13	0
				TN Betung Kerihun	1,000	0	0	0	0
		6	BTN Gunung Palung	TN Gunung Palung	1,324	0	33	310	58
		7	BTN Bukit Baka Bukit Raya	TN Bukit Baka Bukit raya	3,000	0	0	0	0

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan	Luas (ha)				
		No	UPT		PCK	ENR	Restorasi Gambut	DD Mineral	DD Gambut
		8	UPTD Tahura Pandan Puloh	Tahura Pandan Puloh	0	0	0	1,677	0
3	Kalimantan Timur	9	BKSDA Kalimantan Timur	CA Muara Kaman Sedulang	49,358	0	2,000	4,123	170
				CA Teluk Adang	4,800	100	100	9,280	0
				SM Pulau Semama	20	0	0	0	0
				CA Teluk Apar	14,348	15	0	3,677	0
		10	BTN Kutai	TN Kutai	40,000	0	0	0	0
		11	UPTD Tahura Bukit Suharto	THR Bukit Soeharto	8,783	0	0	10,174	0
		12	UPTD Tahura Lati Petangis	THR Lati Petangis	1,009	0	0	0	0
4	Kalimantan Selatan	13	BKSDA Kalimantan Selatan	CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	10,582	0	0	25	0
				CA Gunung Kentawan	200	0	0	0	0
				SM Pleihari Tanah Laut	4,879	0	0	192	0
				TWA Pulau Bakut	20	0	0	0	0
				SM Pulau Kaget	100	0	0	0	0

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan	Luas (ha)				
		No	UPT		PCK	ENR	Restorasi Gambut	DD Mineral	DD Gambut
				SM Kuala Lupak	400	0	0	0	0
				TWA Pulau Burung dan Suwangi	500	0	0	0	0
5	Kalimantan Utara	14	BTN Kayan Mentarang	TN Kayan Mentarang	1,000	0	0	0	0
6	Jambi	15	BKSDA Jambi	CA Hutan Bakau Pantai Timur	592	0	0	1,409	0
		16	BBTN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	50,000	0	0	0	0
		17	BTN Berbak Sembilang	TN Berbak	36,480	80	1,000	25,375	69,973
		18	BTN Bukit Duabelas	TN Bukit Duabelas	1,500	0	0	0	0
7	Sumatera Barat	19	BKSDA Sumatera Barat	SM Arau Hilir dan Air Tarusan	10,000	0	0	0	0
		20	BTN Siberut	TN Siberut	10,000	0	0	0	0
8	Riau	21	BBKSDA Riau	SM Balai Raja	507	0	0	150	0
				SM Giam Siak Kecil	10,000	0	0	0	37
				SM Bukit Batu	0	0	0	0	3
				SM Kerumutan	0	0	29	45	1,292

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan	Luas (ha)				
		No	UPT		PCK	ENR	Restorasi Gambut	DD Mineral	DD Gambut
				SM Bukit Rimbang, Bukit Baling & Rimbang Baling	0	0	0	6	0
				SM Tasik Belat	0	0	0	0	325
				SM Tasik Besar Serkap	0	0	0	0	278
				SM Tasik Serkap	0	0	0	0	14
				SM Tasik Tanjung Padang	0	0	0	0	24
				TWA Buluh Cina	0	0	0	16	0
				TN Zamrud	128	0	21	3,215	24,342
		22	BTN Bukit Tigapuluh	TN Bukit Tigapuluh	7,000	0	0	18	0
		23	BTN Tesso Nilo	TN Tesso Nilo	20,849	45	0	444	0
9	Sumatera Selatan	24	BKSDA Sumatera Selatan	SM Gumai Pasemah	470	0	0	391	0
				SM Gunung Raya	6,827	0	0	7,213	0
				SM Padang Sugihan	10,000	0	0	0	0
				SM Dangku	15,487	0	0	10,595	0
		25	BTN Berbak Sembilang	TN Sembilang	10,000	0	0	23	0

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan	Luas (ha)				
		No	UPT		PCK	ENR	Restorasi Gambut	DD Mineral	DD Gambut
10	Sumatera Utara	26	BBTN Leuser	TN Gunung Leuser	10,000	0	0	0	0
				TN Batang Gadis	6,000	0	0	0	0
11	Lampung	27	BTN Way Kambas	TN Way Kambas	10,000	0	0	0	0
		28	BBTN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan	10,000	0	0	0	0
				Total	653,989	450	9,446	172,495	224,467

Catatan: Lokasi target merupakan hasil analisis Peta Indonesia'S FOLU Net Sink 2030 dengan Peta Rencana dan Target Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi.

B.6.1 Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki dua kawasan konservasi sebagai lokasi aksi mitigasi yaitu di TN Way Kambas dan TN Bukit Barisan Selatan dengan nilai IBGF 5 untuk kedua lokasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu terus dilakukan untuk menjamin kedua kawasan konservasi tersebut tetap di dalam kondisi ekosistem yang ideal.

1. Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan perwakilan ekosistem hutan dataran rendah yang terdiri dari hutan rawa air tawar, padang alang-alang/semak belukar, dan hutan pantai serta memiliki potensi wisata yang menarik. Dengan memiliki potensi-potensi tersebut maka dapat dilakukan suatu pengembangan kegiatan ekowisata dengan upaya pengelolaan sumberdaya ekowisata yang ada berdasarkan potensinya dan ditujukan untuk memberikan daya tarik serta pengalaman bagi wisatawan. Dalam hal ini kawasan Pusat Konservasi Gajah (PKG) menjadi lokasi Pengembangan Ekowisata yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara pembagian kawasan yang diperuntukkan bagi pengunjung, pengadaan program interpretasi, pembuatan jalur sirkulasi pengunjung dan pembangunan fasilitas.

Namun demikian, kawasan TN Way Kambas menghadapi ancaman terhadap keberlangsungan ekosistemnya karena lanskapnya yang berada pada dataran yang paling rendah "*low land*" dibandingkan dengan lahan di sekitarnya. Dampak yang diakibatkan oleh ancaman ini tidak bersifat langsung tetapi secara perlahan yang sifatnya laten. Sistem hirologis utama kawasan Taman Nasional Way Kambas dapat dikelompokkan menjadi tiga sungai utama yaitu Way Pegadungan, Way Kambas dan Way Penet (BTNWK, 2010). Sebagai akibat dari posisi geografis tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa Taman Nasional Way Kambas menjadi tempat melintasnya berbagai material yang dibawa air mengalir dari wilayah yang berada di atasnya. Berbagai aktivitas manusia dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian yang berasal dari daerah di atasnya akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air sungai di Taman Nasional Way Kambas. Padahal, air di lokasi kawasan Taman Nasional Way Kambas menjadi sangat vital karena banyak habitat satwa liar yang menjadikan air sebagai sumber kehidupannya.

Melihat potensi ancaman ekologis karena aktivitas manusia yang berada dari luar kawasan hutan, perlu dilakukan pemantauan kualitas air sungai di Taman Nasional Way Kambas. Pemangku wilayah secara periodik harus melakukan pemantauan terhadap kualitas aliran air sungai yang ada di Taman Nasional Way Kambas. Selain itu ditketahui pula bahwasannya terdapat beberapa area di dalam kawasan yang sudah tergolong dalam *opened area* sehingga dilakukan upaya untuk memperbaikinya melalui kegiatan PCK. TN Way Kambas juga terpilih menjadi lokasi untuk pelaksanaan aksi mitigasi karena kerawanan area nya (IPL = 5). Lokasi dan luasan area untuk pelaksanaan kegiatan PCK dapat dilihat melalui **Tabel 17** di bawah.

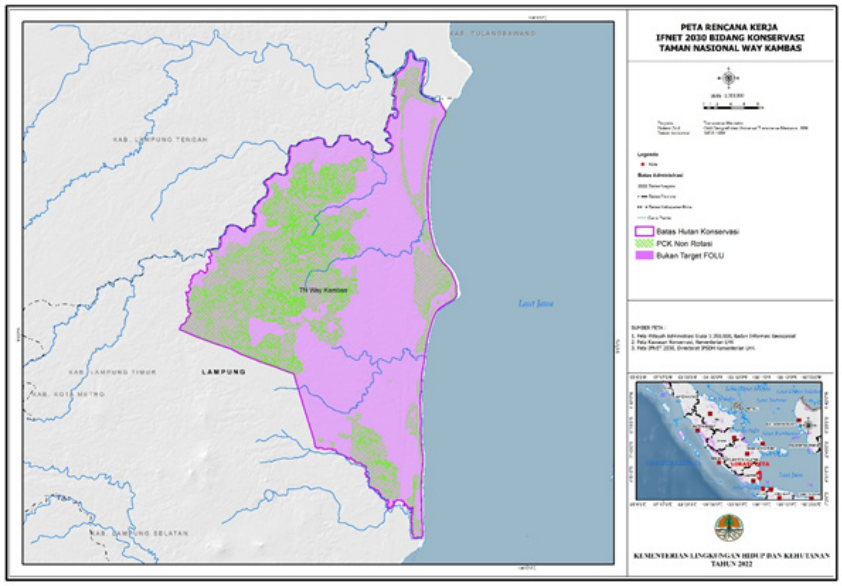

GAMBAR 9 | Lokasi kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di TN Way Kambas

TABEL 16 | Luas kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di TN Way Kambas

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	10,000

5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,000**

2. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional melalui surat pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 melalui SK Menteri Kehutanan No.185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 statusnya berubah menjadi Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), sebagai kawasan konservasi terbesar ketiga di Sumatera dengan status, potensi dan fungsi penting, sering dihadapkan pada benturan berbagai kepentingan dengan masyarakat berkaitan dengan akses terhadap sumberdaya alam yang dimilikinya. Sejak tahun 1985-1999 kawasan TNBBS telah kehilangan lebih dari 28% dari luas totalnya (Kinnaird 2003). Pola ekstensifikasi lahan, pencurian kayu, dan eksploitasi flora fauna telah menyebabkan deforestasi dan degradasi kawasan. Dari total luas kawasan 356.800 ha, TNBBS telah mengalami pembukaan tutupan hutan seluas 60.296 ha, dimana 60.286 ha diantaranya diakibatkan perambahan oleh ±14.703 orang perambah (BTNBBS, 2011). Laju kehilangan tutupan lahan mencapai 22,5 % dari total luas kawasan selama 10 tahun terakhir (BTNBBS, 2010). Penanganan serius dan tepat diperlukan bukan hanya untuk mempertahankan status sebagai tapak warisan dunia, serta juga upaya untuk mempertahankan tutupan lahan tetapi lebih pada mempertahankan kawasan sebagai penyangga fungsi kehidupan tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat. Nilai IPL area TNBBS yang berjumlah 4 juga meningkatkan potensinya untuk termasuk dalam lokasi pelaksanaan kegiatan PCK (**Gambar 10** dan **Tabel 19**).

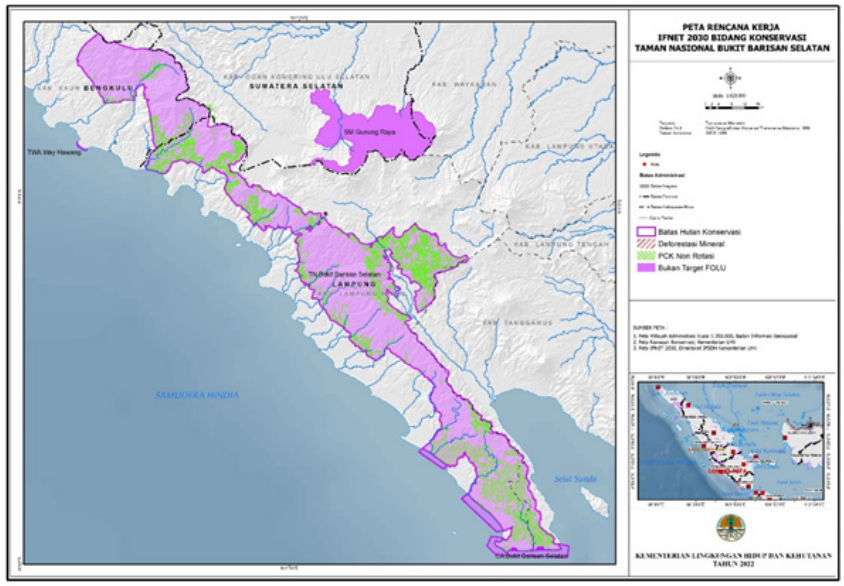

GAMBAR 10 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Barisan Selatan

TABEL 17 | Luas kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di TN Bukit Barisan Selatan

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	10,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,000**

B.6.2 Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki dua kawasan konservasi yaitu, TN Gunung Leuser dan TN Batang Gadis. Kedua kawasan konservasi tersebut sudah berada pada kondisi baik dengan nilai IBGF ideal. Penggantian lahan oleh masyarakat tercatat oleh Rahmawati *et al.* (2021) sebanyak 16 jenis perubahan penggunaan lahan menjadi perkebunan, hutan, lahan kering, industri, hutan mangrove, kebun campuran, lahan terbuka, sawah, perkebunan, kolam, permukiman, bandara, danau, sungai, peternakan, dan pertambangan.

1. Taman Nasional Gunung Leuser

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan satu dari tiga taman nasional di Sumatera yang terdaftar sebagai situs warisan dunia atau *Tropical Rainforest Heritage of* Sumatra. Dalam SK Menteri Kehutanan No. 276/Kpts-II/1997, tercantum luas kawasan TNGL yang berada di Aceh dan Sumatera Utara ini mencapai 1.094.692 hektar. Dalam perkembangannya, luasan taman nasional ini berkurang menjadi 838.872 hektar, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.6589/Menhut-VII/KUH/2014. Di Aceh, luas Leuser sesuai SK MenLHK No. 103/MenLHK-II/2015 mencapai 625,115 hektar.

Berdasarkan data Geographic Information System (GIS) Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) 2017, tutupan hutan di TNGL saat ini adalah 592.454 hektar. Atau rusak sekitar 32.661 hektar. Di Kabupaten Gayo Lues, dari luasannya sekitar 201.672 hektar rusak sebesar 9.622 hektar. Sementara di Kabupaten Aceh Selatan, dari luasan TNGL 78.385 hektar, rusak seluas 1.880 hektar. Paling parah, terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, dari luasan 281.845 hektar kerusakannya mencapai 19.554 hektar.

Temuan lapangan FKL (2017) pun menunjukkan, ada 245 kasus perambahan, 196 pembalakan hutan, dan 3 pertambangan ilegal yang terjadi di TNGL. Sedangkan pembangunan jalan di TNGL mencapai 24 kasus dengan panjang sekitar 67 Kilometer. Hal ini juga diperkuat dengan kajian Dariana (2011), menyebutkan bahwa isu penyebab konflik yang terjadi di kawasan TNGL adalah pemantapan kawasan, perambahan kawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, lemahnya kesadaran dan ekonomi masyarakat sekitar hutan serta konflik sosial yang berkepanjangan. Wujud konflik 23% tertutup, 60% telah mencuat kepermukaan dan 17% konflik telah terbuka. Penyebab konflik lahan 43% disebabkan pembukaan lahan penanaman tanaman kakao yang kini

sedang ditekuni masyarakat desa hutan.

Melihat masih banyaknya permasalahan yang terjadi di TN Gunung Leuser, maka diperlukan efektifitas penyelesaian masalah diantaranya adalah dengan melakukan tata batas ulang secara mufakat, tingkatkan Peran Para Ketua Adat dan Pemuka Agama, Kerjasama Intensif Dengan Aparat Penegak Hukum. Selain itu, kondisi tutupan lahan TNGL yang semakin terbuka menjadikan areal ini sebagai salah satu lokasi pelaksanaan PCK (**Gambar 11** dan **Tabel 20**).

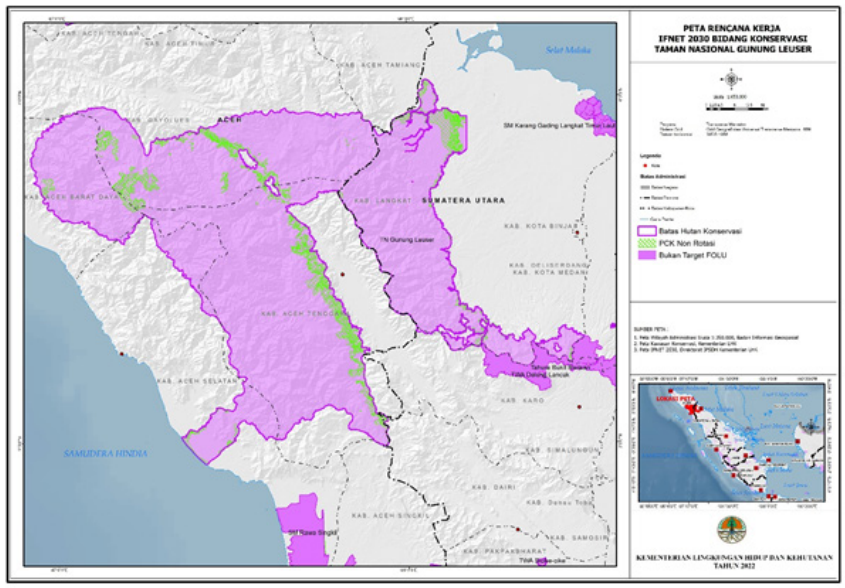

GAMBAR 11 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Gunung Leuser

TABEL 18 | Luas kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di TN Gunung Leuser

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	10,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,000**

2. Taman Nasional Batang Gadis

Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) merupakan salah satu taman nasional yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan luas mencapai 108.000 hektar, namun pada 2012 luasnya dikurangi menjadi 72.150 hektar. Secara administratif, luas TNBG itu mencakup 26 persen dari total luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Secara letak geografisnya, TNBG merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis. DAS ini mempunyai luas 386.455 hektar atau 58,8% dari luas Kabupaten Madina dan sangat penting artinya sebagai penyedia air yang teratur untuk mendukung kelangsungan hidup dan kegiatan perekonomian utama masyarakat, yaitu pertanian. Kurang lebih 36% dari luas wilayahnya merupakan daerah pegunungan sampai ketinggian 2.145-meter dpi (di atas permukaan laut) dan merupakan daerah vulkanis aktif dengan jenis tanah yang rawan erosi dan longsor, serta curah hujan tinggi.

Tercatat ada sekitar 47 jenis mamalia yang hidup dan dilindungi di TNBG, antara lain ayam hutan, macan, harimau sumatera, kambing hutan, rusa, hingga tapir, seperti lutung, wau-wau, monyet ekor panjang, hingga siamang. Burung yang ada di TNBG ini jumlahnya diperkirakan mencapai 247 jenis, dengan 47 di antaranya dilindungi, 7 jenis terancam punah, serta 12 jenis mendekati terancam punah. Namun demikian artikel dari (ksdae.menlhk.go.id) menyebutkan banyaknya kejadian konflik antara msyarakat dan satwa yang terjadi di TNBG. Sedikitnya 10 kejadian konflik masyarakat dan satwa di sekitatr TNBG dilaporkan dari tahun 2017-2019. Kejadian - kejadian tersebut berasal dari Kecamatan Batang Natal (6 kejadian), Puncak Sorik Marapi (1 kejadian), Panyabungan Selatan (1 kejadian) dan Tambangan (1 kejadian). Selain itu Polhut Balai TNBG juga membantu merespon di 3 (tiga) lokasi wilayah kerja KPH 8 Kotanopan (hutan lindung) yaitu di Kecamatan Siabu (1 kejadian), Kotanopan (1 kejadian) dan Tambangan (1 kejadian).

Berkaca dari kondisi konflik yang terjadi di TNBG, maka diperlukan penanganan konflik secara terintegrasi lintas stakeholder. Kerjasama yang baik antara Kepolisian, TNI, Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Balai TN Batang Gadis, KPH Dinas Kehutanan Sumut, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa adalah keharusan untuk mencapai keberhasilan. Salah satu upaya penanganan akan kondisi TN Batang Gadis dalam rangkaian FoLu Net Sink adalah dengan melakukan kegiatan PCK seluas 6000 Ha (**Gambar 12** dan **Tabel 21**).

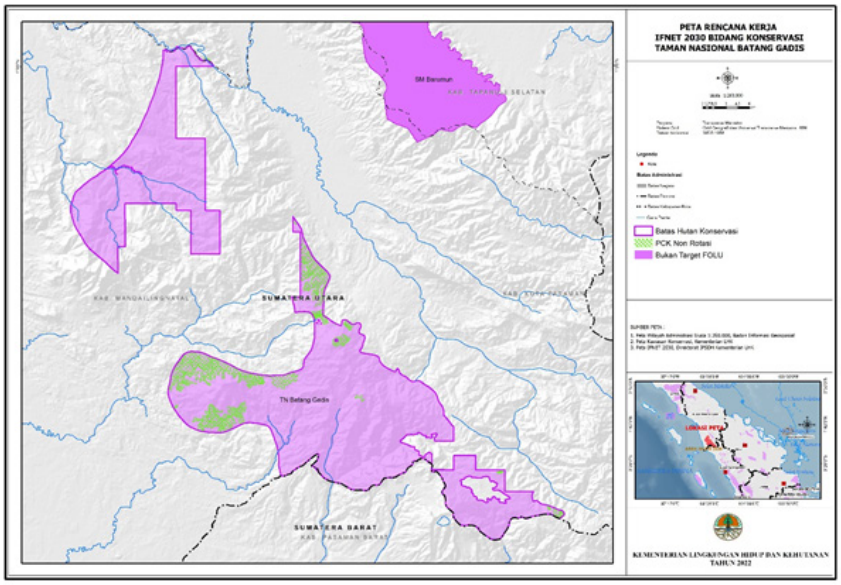

GAMBAR 12 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Batang Gadis

TABEL 19 | Luas kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di TN Batang Gadis

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	6,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**6,000**

B.6.3 Provinsi Sumatera Selatan

Sebanyak 60% kawasan konservasi di Sumatera Selatan berada pada kondisi ideal, namun di SM Gunung Raya dan SM Dangku masih di perlukan adanya penanaman pohon untuk meminimalisir emisi.

1. Suaka Margasatwa Gumai Pasemah

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 76/Kpts-II/2001, Suaka Margasatwa (SM) Gumai Pasemah secara administratif pemerintahan termasuk dalam wilayah Kabupaten Lahat. Secara geografis kawasan S.M. ini terletak pada 103o 2'– 103o 20' bujur timur dan 3o 42' – 3o 57' lintang selatan. Luas kawasan adalah 46.123 hektar. Dua dataran

tinggi yang berada di S.M. Gumai Pasemah yaitu dataran tinggi Gumai dan dataran tinggi Pasemah. Tipe ekosistem di kawasan S.M. adalah tipe hujan tropis dataran tinggi yang didominasi oleh vegetasi rotan, meranti (*Shorea spp.*), rasamala (*Altingia exelsa*), suren (*Toona sureni*). Beberapa jenis satwa yang mendiami kawasan S.M. Gumai Pasemah antara lain harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatraensis*), gajah (*Elephas maximus*), kambing hutan (*Capricornus sumatraensis*), siamang (*Symphalagus*), rangkong (*Buceros spp.*), dan kuau (*Argusianus argus*).

Aktivitas dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi di sekitar area SM, menyebabkan terjadinya perambahan hutan serta pembukaan hutan untuk pertanian dan permukiman, yang jelas mengancam habitat satwa liar di hutan, demikian juga dengan ketersediaan tumbuhan hutan sebagai sumber pakannya. Pembalakan liar/perburuan liar disebabkan oleh dorongan keuntungan ekonomi, juga karena penegakan hukum yang lemah, vonis yang ringan, kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS sehingga kasus tidak tertangani. Sebagai tindakan preventif, perlu dilakukan monitoring hutan dengan lebih baik. Pada kasus perburuan liar, selain penyebab tersebut di atas, kesadaran masyarakat akan nilai konservasi satwa liar juga masih sangat masih rendah. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah masih sangat rendah. (Ringkasan Eksekutif Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan/SeHati Sumsel (2017-2021).

Kerusakan habitat semakin meluas akibat penebangan liar dan pembakaran hutan untuk tujuan pembukaan kebun/ladang. Keberadaan mamalia berstatus dilindungi semakin terancam akibat meningkatnya perburuan liar dan perdagangan satwa. Ekspansi perkebunan, pertanian dan pemukiman (transmigrasi) baik yang dilakukan secara terencana oleh pemerintah atau secara sporadis oleh masyarakat menyebabkan perubahan habitat alami yang berada dalam jalur wilayah jelajah satwaliar menjadi lahan perkebunan/pertanian. Hal ini telah terbukti memicu konflik antara satwa liar dan masyarakat, ketika satwa liar berpindah melalui jalur tersebut. Konflik ini sering menyebabkan kerusakan rumah, lahan pertanian, perkebunan, hingga kematian satwa atau anggota masyarakat. Berbagai respon telah dilakukan oleh pemerintah/BKSDA ataupun LSM, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kapasitas masyarakat dan perusahaan dalam menangani konflik dan pentingnya kehati perlu ditingkatkan melalui pembinaan/penyuluhan kepada perusahaan/desa yang dilalui jalur jelajah satwa (gajah, harimau). Pada sisi pemerinatah, penambahan jumlah petugas dan frekuensi patroli, dan pembentukan satgas/reaksi cepat penanganan konflik satwa-manusia juga diperlukan (Wartika 2013). Kondisi SM yang terkena pembalakan dan juga permasalahan lain inilah yang menjadikannya sebagai lokasi target pencegahan deforestasi dan juga PCK (**Gambar 13** dan **Tabel 22**).

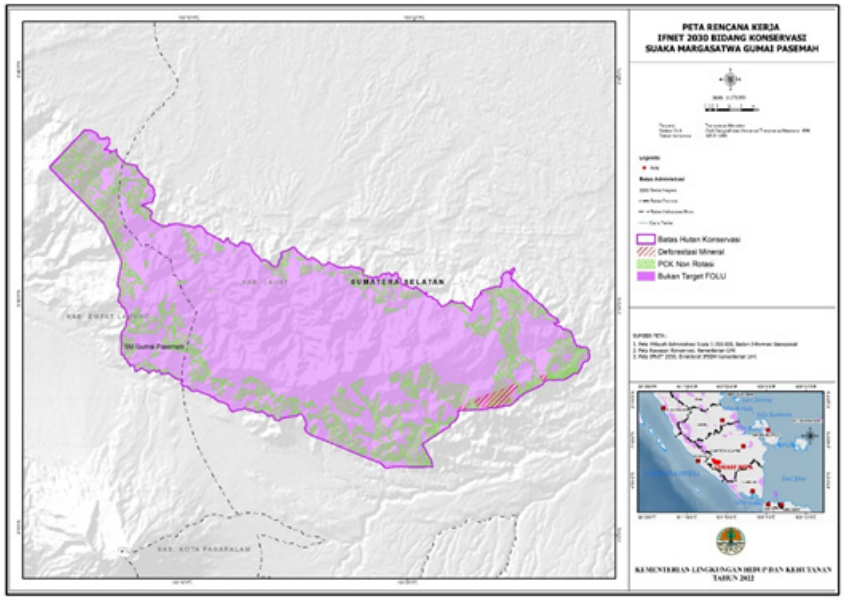

GAMBAR 13 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Gumai Pasemah

TABEL 20 | Luas kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di SM Gumai Pasemah

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	390.96
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	470
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**860.96**

2. Suaka Margasatwa Gunung Raya

Suaka Margasatwa Gunung Raya merupakan salah satu kawasan konservasi di Sumatera Selatan yang memiliki tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran tinggi. SM Gunung Raya telah memiliki kepastian hukum dan ditetapkan menjadi Suaka Margasatwa Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3050/Menhut-VII/KUM/2014 Tanggal 23 April 2014 sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan SM Gunung Raya telah mantap dari sisi kepastian hukum. Jenis Blok Pengelolaan SM Gunung Raya dibedakan menjadi 2 (dua) blok pengelolaan meliputi Blok Perlindungan (seluas 14.400,76 Hektar atau 32,02%), Blok Rehabilitasi (seluas 30.589,35 Hektar atau 67,98 %) dari luas total SM

Gunung Raya: 44.996,11 Hektar.

Menurut BKSDA Sumsel (2015), fauna kunci dalam kawasan SM Gunung Raya antara lain harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus). Kemudian jenis mamalia yang di temukan di kawasan SM Gunung Raya terdapat 23 spesies, 9 diantaranya merupakan spesies yang di lindungi berdasarkan PerMen LHK No. 20 Thn 2018 yaitu Symphalangus syndactylus, Nesolagus netscheri, Manis javanica, Lariscus insignis, Ratufa affinis, Tapirus indicus, Presbytis melalophos, Trachypithecus cristatus, dan Helarctos malayanus. Dalam rangka melindung dan menjaga kelestarian beragam satwa yang terdapat di SM Gunung Raya tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan inventarisasi secara berkelanjutan oleh pihak pengelola kawasan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada keanekaragaman jenis mamalia di SM Gunung Raya. Disamping itu kebijakan pihak pengelola SM Gunung Raya dalam penentuan zonasi kawasan perlu memperhati kan jenis-jenis mamalia dan satwa lain yang dilindungi secara khusus. Kondisi SM yang terkena pembalakan dan juga permasalahan lain inilah yang menjadikannya sebagai lokasi target pencegahan deforestasi dan juga PCK (**Gambar 14** dan **Tabel 23**).

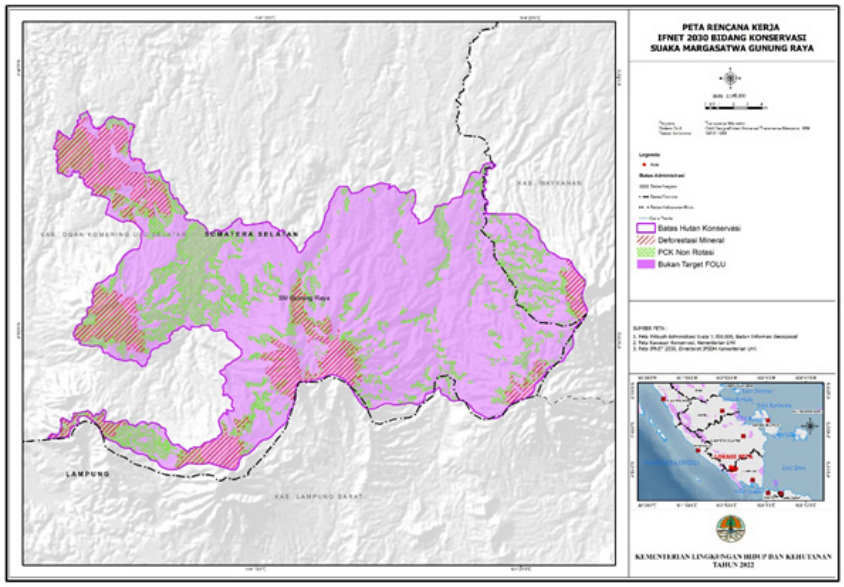

GAMBAR 14 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Gunung Raya

TABEL 21 | Luas kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di SM Gunung Raya

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	7,212.76
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	6,827
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**14,039.76**

3. Suaka Margasatwa Padang Sugihan

Suaka Margasatwa Padang Sugihan meropidan salah Satu kawasan konservasi yang berada di Sumatera Selatan dan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2585/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014 dengan luas 88.148,05 hektar. Secara administratifSM Padang Sugihan berada di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). SM Padang Sugihan merupakan habitat alami Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan didalamnya terdapat pusat latihan gajah. Sebelum ditetapkan menjadi suaka margasatwa, kawasan Padang Sugihan semula diperuntukkan sebagai areal transmigrasi pada awal tahun 980-an. Kondisi SM Padang Sugihan pada saat itu digambarkan sebagai habitat yang paling kaya

dan khas di landsekap Padang Sugihan (Mahanani 2012). Kawasan ini juga merupakan representasi tipe hutan alam rawa gambut di Sumatera Selatan. Pohon-pohon yang ada banyak ditumbuhi epifit dan palem menjalar yang tersebar di dalam hutan.

Menurut Kunarso *et al.* 2017, kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan merupakan habitat penting bagi Gajah sumatera. Namun demikian kondisinya saat ini terus mengalami tekanan terutama akibat kebakaran, pembalakan liar, dan penguasan lahan oleh oknum masyarakat.

Kawasan SM Padang Sugihan yang didominasi oleh lahan rawa dan gambut rentan terhadap kebakaran. Akibat dari kebakaran adalah turunnya produktivitas tumbuhan pakan gajah seperti rumput dan semak. Penurunan produktivitas pakan untuk gajah mengakibatkan rentannya konflik antara gajah dan manusia karena gajah akan terus berjalan mencari sumber pakan sampai masuk ke kebun warga dan pemukiman penduduk. Kondisi inilah yang mengakibatkan manusia akan menganggap gajah sebagai hewan penganggu serta perusak yang merugikan padahal sebenarnya gajah hanya menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan sifat alamiah gajah untuk berkelana mencari sumber makanan yang tersedia di kebun warga ataupun pemukiman penduduk. SM Padang Sugihan merupakan salah satu perwakilan ekosistem dataran rendah yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem seperti area padang rumput, hutan sekunder dan rawa yang diperuntukkan terutama bagi gajah. Keberadaan PLG didalam kawasan SM Padang Sugihan memiliki peran sebagai tempat penangkaran gajah-gajah liar yang di tangkap dari hutan karena dianggap menganggu masyarakat sekitar hutan. Gajah jinak yang ada di PLG awalnya juga merupakan gajah liar yang dipindahkan dan dilatih oleh mahout. Gajah di PLG masing-masing memiliki mahout/pengasuh dalam mengontrol perilaku gajah. Mahout ini juga memiliki peran terbesar dalam aspek pengelolaan pelatihan gajah karena paling intensif berinteraksi dan merawat gajah (Sari 2012). Kondisi SM saat ini yang memiliki areal terbuka sebagai akibat kebakaran maupun pembalakan menjadikan lokasi ini sebagai lokasi target untuk pelaksanaan PCK (**Gambar 15** dan **Tabel 24**).

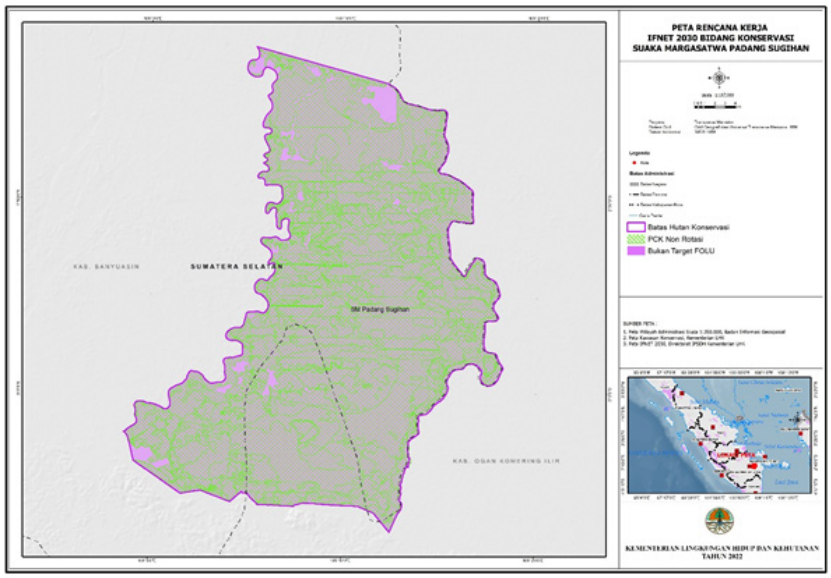

GAMBAR 15 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Padang Sugihan

TABEL 22 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Padang Sugihan

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	10,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,000**

4. Suaka Margasatwa Dangku

Suaka Margasatwa Dangku ditetapkan sebagai hutan konservasi yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap flora dan fauna khas hutan tropis Sumatera beserta ekosistemnya sejak tahun 1986. Sampai dengan saat ini telah mengalami enam kali perubahan luas, baik itu penambahan ataupun pengurangan. Namun, semenjak tanggal 15 Maret tahun 2001 melalui SK Menteri Kehutanan RI No. 76/ Kpts-II/2001, luas Suaka Margasatwa Dangku relatif tetap, yaitu seluas 48 ribu hektare. Dari analisis yang dilakukan FWI, ditemukan indikasi keberadaan 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan (SM Dangku) dengan luasan mencapai sekitar 6 ribu hektar.

Kawasan SM Dangku sendiri merupakan salah satu *Tiger Conservation Unit* (TCU) di

kawasan Asia Tenggara yang memerlukan evaluasi habitat (*Dinerstein et al.* 1997). harimau sumatera di kawasan SM Bentayan dan SM Padang Sugihan telah dinyatakan tidak ada lagi.

Dalam sebuah studi diketahui bahwa kawasan restorasi ekosistem PT REKI dan kawasan konservasi SM Dangku sama□sama menghadapi masalah pembalakan liar, perambahan kawasan, konflik pengelolaan kawasan dan juga konflik manusia dengan satwa liar. Keberadaan KPHP Meranti, yang sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan produksi, di antara kedua kawasan tersebut memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam mendorong pihak swasta pemegang ijin konsesi untuk dapat berperan dan terlibat aktif dalam pengembangan koridor konservasi satwa, pelestarian kawasan ekosistem esensial dan juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Konflik peruntukan ataupun pemanfaatan lahan hutan masih banyak terjadi di kawasan ini. Berbagai bentuk konflik lahan yang ada diantaranya adalah:

- Pemanfaatan kawasan hutan untuk pemukiman masyarakat;
- Pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola masyarakat tanpa melalui proses legal;
- Pemanfaatan kawasan hutan untuk fasilitas umum: sekoah, puskesmas, sarana ibadah
- Tata batas desa;
- Konflik lahan masyarakat dengan perusahaan pemegang ijin.

Semua kategori konflik diatas masih banyak dijumpai di area ini, sehingga membutuhkan upaya-upaya pengelolaan dan resolusi konflik dari pihak-pihak terkait. Konflik lahan yang ada mempunyai beberapa dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak yang muncul sebagai akibat dari Suaka Margasatwa Dangku yang juga mengalami konflik pemanfaatan lahan dengan masyarakat dan juga dengan perusahaan. Perambahan terjadi di 4 desa yaitu Desa Sungai Napuh (242 KK), Desa Sungai Petai (555 KK), Desa Sungai Biduk (139 KK), Desa Rebon Jaro (66 KK), sementara itu dalam hal *illegal logging* terdapat 6 *Sawmill* yang beroperasi di sekitar kawasan yang diduga menggunakan bahan baku dari dalam kawasan. Selain itu teridentifikasi juga lahan kritis yang masih cukup luas baik di dalam kawasan KPH Meranti maupun di dalam kawasan SM Dangku. Kondisi sempadan sungai juga perlu diperhatikan dan diawasi, mengingat kondisi sungai-sungai yang semakin keruh dan berkurangnya populasi ikan di sungai. Kondisi yang kompleks dan memerlukan adanya kegiatan rehabilitasi menjadikan lokasi ini terpilih sebagai lokasi pencegahan deforestasi dan juga sebagai lokasi PCK (**Gambar 16** dan **Tabel 25**).

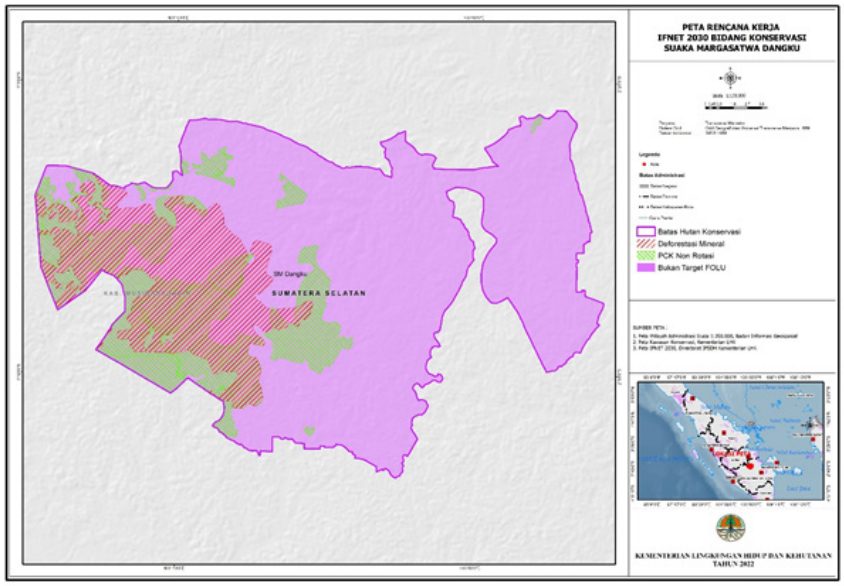

GAMBAR 16 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Dangku

TABEL 23 | Lokasi kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di SM Dangku

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	10,594.85
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	15,487
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**26,081.85**

5. Taman Nasional Sembilang

TN Sembilang adalah taman nasional yang terletak di pesisir provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. TN Sembilang ditunjuk sebagai taman nasional dengan SK Menteri Kehutanan No.76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan luas ± 202.896,31 hektar termasuk kawasan perairannya. Sebagian fungsi dari kawasan hutan Sembilang mengalami perubahan setelah ditunjuk sebagai TN Sembilang. Penetapan kawasan hutan Sembilang menjadi Taman Nasional (TN) Sembilang menimbulkan beberapa permasalahan mendasar, antara lain: konflik mengenai kepemilikan lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Keberadaan desa di dalam TN Sembilang dan desa transmigasi di sekitar TN Sembilang memberikan tekanan yang dapat berpengaruh terhadap cadangan karbon di

TN Sembilang. TN Sembilang untuk meningkatkan cadangan karbon dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi TN yang rawan konflik dan juga berdekatan dengan desa menjadikan TN ini sebagai salah satu lokasi dalam pelaksanaan kegiatan *FoLU Net Sink*. Kegiatan yang dilakukan dalam lokasi ini juga cukup banyak yaitu pencegahan deforestasi di lahan gambut dan mineral serta pelaksanaan PCK (**Gambar 17** dan **Tabel 26**).

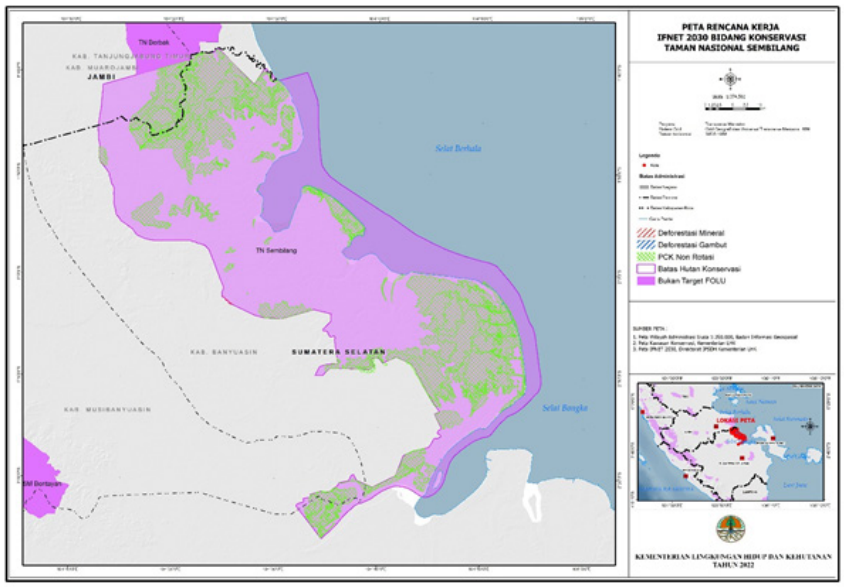

GAMBAR 17 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sembilang

TABEL 24 | Lokasi kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di TN Sembilang

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	22.87
2	Deforestrasi Gambut	0.20
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	10,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,023.07**

B.6.4 Provinsi Riau

Riau menjadi provinsi dengan kawasan konservasi terbanyak di Sumatera, namun sebanyak 64% kawan konservasinya memiliki nilai IBGF tinggi yaitu terancam kebakaran hutan dan lahan (3).

1. Suaka Margasatwa Balai Raja

Kawasan SM Balai Raja ini ditunjuk melalui SK Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dengan luas ± 18.000 hektar dan telah dilakukan penetapan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3978/ MenhutVII/KUH/ 2014 Tanggal 23 Mei 2014 dengan luas 15.343,95 hektar yang terletak di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Hasil analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Suaka Margasatwa Balai Raja masuk ke dalam wilayah dengan risiko IBGF emisi tinggi, IBGF kebakaran tinggi, dan IBGF serapan sedang. Hal ini sejalan dengan beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan, diketahui bahwa salah satu masalah di Kawasan SM Balai Raja adalah perubahan tutupan lahan dari kawasan berhutan menjadi tidak berhutan. Menurut Darmawan (2002) salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penutupan lahan adalah faktor sosial ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan pertumbuhan penduduk, mata pencaharian, aksesibilitas dan fasilitas pendukung kehidupan serta kebijakan pemerintah.

Perubahan tutupan lahan dari kawasan berhutan menjadi tidak berhutan juga dapat mengancam keberlangsungan habitat Gajah sumatera yang ada di Kawasan SM Balai Raja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aktivitas manusia menjadi penyebab perubahan tutupan lahan tersebut, di antaranya aktivitas perusahaan Migas, masyarakat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan konflik antara manusia dengan Gajah sumatera. Hal ini terjadi karena berkurangnya areal hutan yang menjadi habitat satwa gajah tersebut, dan menjadikan lokasi ini sebagai target dalam kegiatan mitigasi *FOLU Net Sink* berupa pencegahan deforestasi dan juga PCK (**Gambar 18** dan **Tabel 27**).

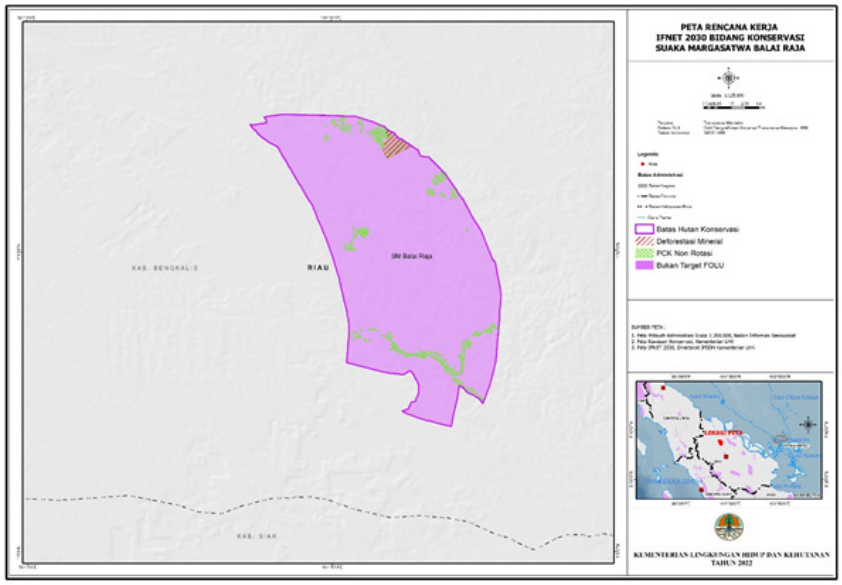

GAMBAR 18 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Balai Raja

TABEL 25 | Lokasi kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di SM Balai Raja

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	149.66
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	507
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**656.66**

2. Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil

Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil ditunjuk pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Riau Nomor Kpts.342/XI/1983 tanggal 3 November 1983 dengan luas +50.000 hektar, diikuti penunjukan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dengan luas 84.967 hektar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang selanjutnya diubah dengan SK.314/MenLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/MenLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016, kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil ditunjuk kembali dengan luas ± 78.294,45 hektar Penunjukan kawasan Giam Siak Kecil sebagai

suaka margasatwa diperuntukkan bagi perlindungan hidupan liar khususnya mamalia besar, yaitu harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Tapir (*Tapirus indicus*), serta untuk perlindungan tumbuhan Giam (*Cotylelobium malayanum*).

Sesuai potensi kawasan, permasalahan pengelolaan, kondisi situasional dan intervensi pemanfaatan kawasan maka keseluruhan kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas 78.294,45 hektar ditata ke dalam blok pengelolaan yang mencakup: (1) Blok perlindungan seluas 63.793,33 hektar (81,48%); (2) Blok pemanfaatan seluas 4.174,87 hektar (5,33%); (3) Blok rehabilitasi seluas 334,68 hektar (0,43%); (4) Blok Religi, Budaya dan Sejarah seluas 3,23 hektar (0,004%); dan (5) Blok Khusus seluas 9.988,34 hektar (12,76%).

Sebagian besar landskap di SM Giam Siak Kecil adalah lahan gambut yang terdrainase sehingga kondisinya sangat rentan terhadap kebakaran lahan dan hutan. Hal ini sesuai dengan hasil analisis IBGF, dimana SM Giam Siak Kecil memiliki nilai IBGF kebakaran tinggi. Drainase di lahan gambut umumnya dilakukan oleh usaha perkebunan yaitu HTI seluas 350.396,15 ha dan sawit seluas 43.591,23 ha dengan presentase pembagian ruang landscap SM GSK hanya 14% untuk suaka alam dan Kawasan pelestarian alam, dan 44% untuk konsesi HGU HTI (Buku PLTB 2021).

Menurut buku PLTB tahun 2021 mengindikasikan kondisi permasalahan di SM Giam Siak Kecil adalah sebagai berikut:

a. Karhutla; Berdasarkan hasil pemantauan satelit NOAA periode 2001-2018 terdapat 14.575 titik api dengan confidence level diatas 75%, dan setiap tahunnya selalu terdapat titik api. Puncaknya terjadi pada bulan Februari-Maret 2014 saat kebakaran meluas sampai ke Kawasan SM GSK di sekitar desa Bukit Kerikil.

b. Perambahan Kawasan Hutan; Meskpiun dalam skala kecil, penebangan liar (illegal logging) masih terjadi di landkap GSK-BB. Salah satu lokasi penebangan liar adalah di areal eks HPH PT Multi Eka Jaya dan eks HPH Dexter Timber Perkasa Indonesia yang berada di sekitar SM Giam Siak Kecil. Penebang liar memanfaatkan kanal Go Tek sepanjang 25 km yang bermuara di Desa Bukit Kerikil. Perambahan tidak hanya terjadi di Kawasan eks HPH yang belum memiliki izin, tetapi juga di konsesi hutan tanaman dan Kawasan SM Giam Siak Kecil.

c. Konflik Tenurial dan Satwa; Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tentang kawasah hutan provinsi Riau belum memngakomodir penggunaan lahan masyarakat di wilayah ini. Hal ini juga menjadi kendala dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat, khususnya yang berbasis lahan termasuk pengembangan infrastruktur bagi perekonomian wilayah. Masyarakat di Dusun Kampung Baru Desa Tasik Betung dan Dusun Began Benio Desa Tasik Serai sudah memanfaatkan sumber daya di Kawasan SM Giam Siak Kecil secara turun temurun. Selain menangkap ikan, mereka juga berkebun dan bermukim. Akibatnya muncul konflik lahan antara masyarakat dengan negara trmasuk pihak swasta yang mempunyai konsesi IUPHHK-HT dari pemerintah. Perubahan tutupan lahan hutan alam untuk hutan tanaman, perkebunan, dan permukiman telah menyebabkan degradasi habitat satwa. Selain berdamoak pada penurunan populasi satwa harimau Sumatera dan Gajah sumatera. Kondisi ini juga meningkatkan konflik antara satwa liar dengan manusia. Menurut laporan Yayasan Rimba Satwa 2018 dalam periode tahun 2016-2017 ditemukan lebih dari 20 kasus rumah/pondok masyarakat yang roboh dan

ratusan hektar kebun masyarakat dirusak oleh gajah, serta 2 orang meninggal dunia karena serangan gajah. Di pihak lain ditemukan kematian gajah yang tidak wajar disebabkan oleh racun perburuan dan jebakan. Masyarakat memasang jebakan racun untuk melumpuhkan gajah karena satwa dianggap sebagai hama yang menganggu usaha pertanian dan perkebunan.

d. Kerusakan Ekosistem Gambut; Mengacu pada kriteria baku kerusakan ekosistem gambut diketahui banyak wilayah gambut di lanskap GSK-BB yang perlu diperbaiki kondisi hidrologisnya. Pada Kawasan fungsi budidaya banyak ditemukan muka air tanah diatas 0,4 meter. Masih perlu dilakakan upaya pemulihan keseimbangan hidrologis melalui pembangunan sekat kanal, sumur bor, dan timbun kanal. Pemulihan keseimbangan hidrologis diperlukan untuk menjaga kondisi lahan gambut agar selalu basah atau lembab sehigga dapat mengurangi laju subsiden, kejadian kebakaran, dan emisi karbon.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas menjadikan area ini sebagai lokasi tepat untuk kegiatan pencegahan deforestasi di lahan gambut serta pelaksanaan PCK (**Gambar 19 dan Tabel 28**)

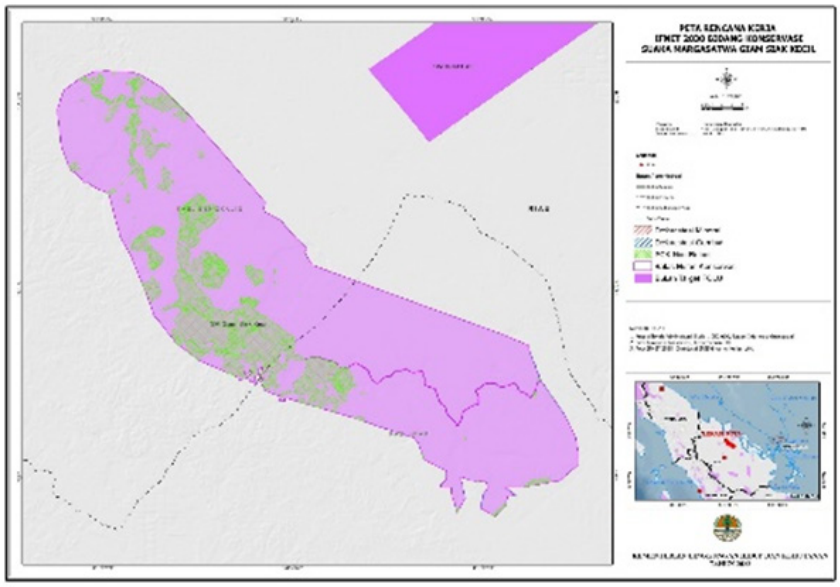

GAMBAR 19 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Giam Siak Kecil

TABEL 26 | Lokasi kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di SM Giam Siak Kecil

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	37.04

3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	10,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,037.04**

3. Suaka Margasatwa Kerumutan

Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan merupakan salah satu kawasan hutan konservasi yang berada di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 350/Kpts/Um/6/1979, Suaka Margasatwa Kerumutan ditunjuk dengan luasan 120.000,09 Hektar. Kawasan ini kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 dengan luasan sebesar 95.047,87 Hektar. Turunnya luasan kawasan SM. Kerumutan tersebut, salah satunya disebabkan gangguan – gangguan kawasan yang telah terjadi dari proses penunjukan, penataan batas hingga penetapan. Gangguan – gangguan terhadap kawasan hutan tersebut, berupa kegiatan penebangan liar, perambahan hutan, serta kebakaran hutan. Rekapitulasi gangguan terhadap kawasan hutan konservasi SM.

Terdapat 24 desa yang berbatasan dengan kawasan SM. Kerumutan. Salah satu desa tersebut adalah Desa Teluk Binjai yang kondisi perekonomiannya masih tertinggal dibandingkan desa lainnya. Tingkat perekonomian yang rendah pada 4 masyarakat – masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan akan menyebabkan adanya upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang berada di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan melakukan penebangan liar ataupun mengaku kemudian menjual tanah yang merupakan kawasan hutan negara, serta melakukan perambahan di dalam kawasan hutan. Laporan identifikasi kerawanan Balai Besar KSDA Riau (2015) menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Teluk Binjai yang melakukan aktivitas penebangan liar dan perambahan di dalam kawasan SM. Kerumutan. Rekapitulasi gangguan terhadap kawasan hutan konservasi SM.

Aktivitas penebangan dan perambahan yang terjadi di dalam kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah No. P. 28 Tahun 2011, kawasan Suaka Margasatwa tidak diperkenankan untuk kegiatan penebangan liar dan perambahan. Namun, dalam kawasan ini dapat dilakukan pemanfaatan secara lestari guna pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan tingginya luasan area terbuka di dalam SM dan menjadikannya sebagai lokasi untuk pencegahan deforestasi dan juga area restorasi gambut (**Gambar 20 dan Tabel 29**).

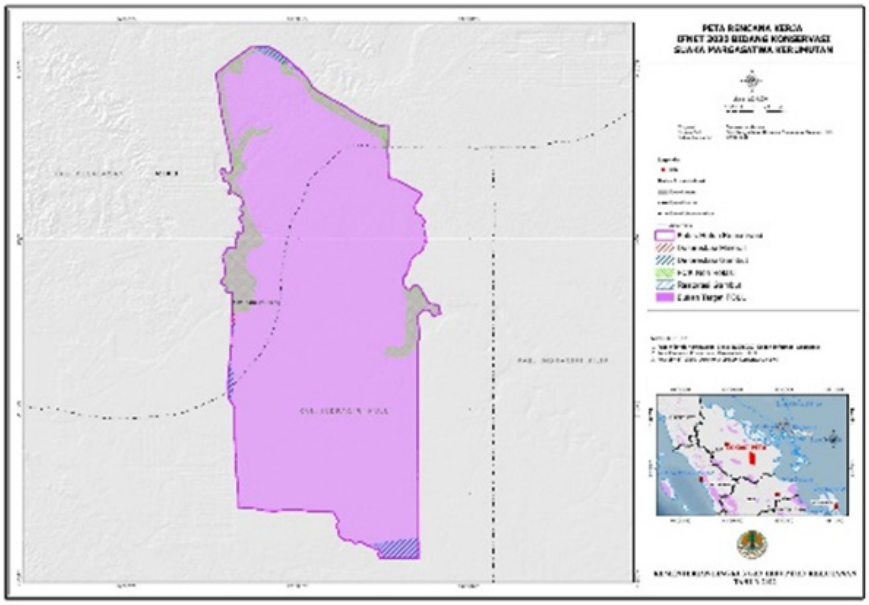

GAMBAR 20 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Kerumutan

TABEL 27 | Lokasi kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di SM Kerumutan

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	44.61
2	Deforestrasi Gambut	1,291.79
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	29
Total Keseluruhan		**1,365.40**

4. Suaka Margasatwa Bukit Batu

Suaka Margasatwa Bukit Batu (SMBB) (**Gambar 21**) merupakan zona inti Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tempat ekowisata. Kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dalam Sidang *21st Session of the International Coordinating Council of the Man and Biosphere*, adalah salah satu nominasi dari 22 lokasi yang diusulkan oleh 17 negara (Gesima *et al.* 2015).

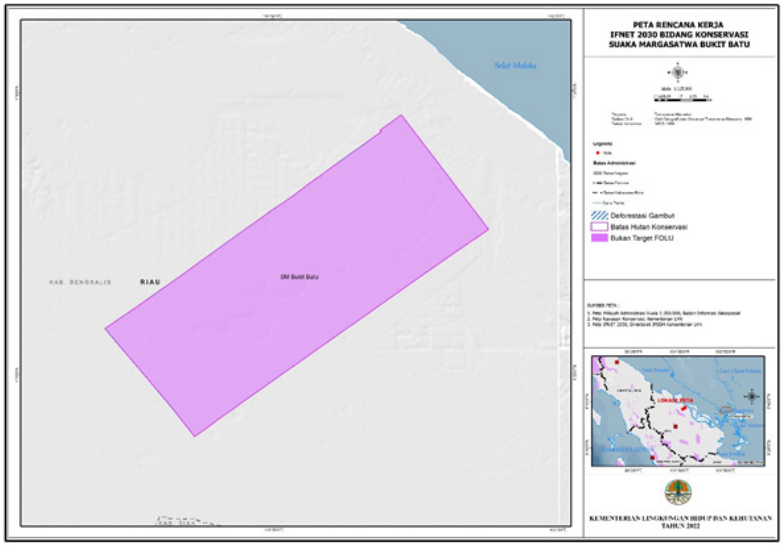

GAMBAR 21 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Bukit Batu

TABEL 28 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Bukit Batu

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	2.77
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**2.77**

Suaka Margasatwa Bukit Batu ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa didasarkan atas pertimbangan bahwa kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu tipe hutan hujan dataran rendah dan rawa gambut dengan keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi habitat berbagai jenis satwa langka dan terancam punah disamping juga sebagai penyangga sistem kehidupan di sekitarnya.

Berdasarkan hasil analisis IBGF kebakaran, menunjukkan bahwa Suaka Margasatwa Bukit Batu berada pada tingkat risiko kebakaran tinggi. Selain berada di kawasan rawa gambut, sebagian besar kondisi hutan dan lingkungan di sekitar Blok Suaka Margasatwa Bukit Batu (SMBB) telah berubah fungsinya. Sungai dengan air hitam yang keruh, dan perubahan tutupan hutan menjadi kebun-kebun karet masyarakat, terutama di sepanjang tanggul-tanggul sungai. Kondisi demikian akan dapat mengancam keberadaan SMBB

dengan keunikan ekosistem dan fungsi-fungsi lingkungannya pada masa datang. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha yang sistematis dalam rangka penyelamatan ekosistem hutan gambut tropis di Blok Suaka Margasatwa Bukit Batu (LIPI 2014), salah satunya adalah melalui kegiatan pencegahan deforestasi area gambut dalam FOLU Net Sink.

5. Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

SM Bukit Rimbang Bukit Baling telah dilakukan tata batas dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014. Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling mencakup wilayah seluas 141.226 hektare di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Disamping itu Kawasan SM ini juga telah ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 seluas ± 142.156 hektar.

Menurut kondisi masyarakatnya diketahui di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling ini tidak pernah terlepas dari perspektif adat budaya yang telah mengakar di dalamnya. Sebelum pengesahan keputusan SM Bukit Rimbang Bukit Baling, daerah ini telah berisi masyarakat adat yang mengandalkan hutan untuk kehidupan. Namun demikian, kawasan tersebut tidak terlepas dari ancaman. Ancaman tersebut meliputi pembukaan kawasan untuk perkebunan, perburuan satwa, pemukiman illegal, pertambangan dan lainnya. Aktivitas tersebut menimbulkan penurunan kualitas ekologi sehingga habitat harimau serta mata pencaharian masyarakat menurun. Untuk mengurangi ancaman tersebut, diperlukan penguatan pengelolaan Kawasan dan pelibatan masyarakat sekita kawasan dengan baik (P4W-LPPM IPB 2017), dan untuk mempertahankan kondisi tutupan maka penting dilakukan pencegahan deforestasi (**Gambar 22 dan Tabel 31**)

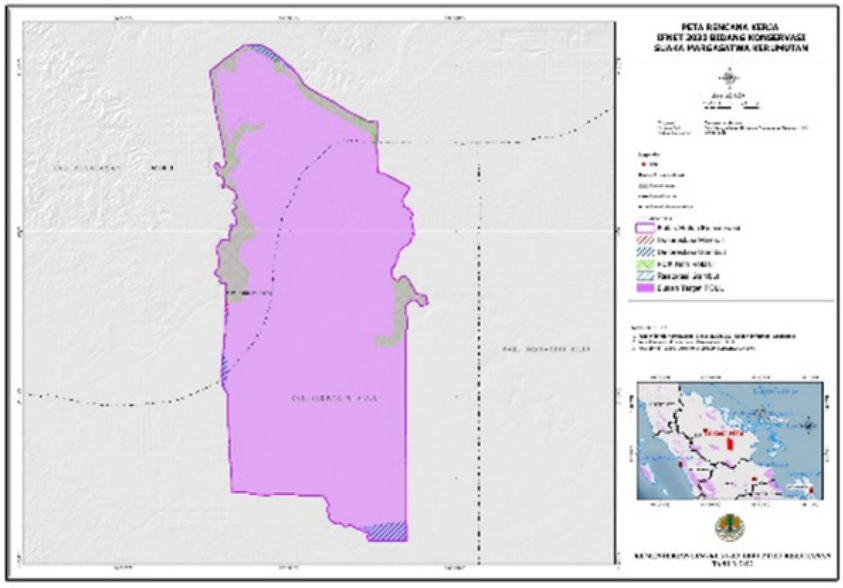

GAMBAR 22 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Bukit Rimbang Bukit Baling

TABEL 29 | Lokasi kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di SM Bukit Rimbang Bukit Baling

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	5.74
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**5.74**

6. Suaka Margasatwa Tasik Besar Serkap

Suaka Margasatwa Tasik Besar Serkap Ditunjuk berdasarkan SK. Menhut No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dengan luas kawasan 3.200 ha. Pada kawasan SM ini sudah dilakukan tata batas dan temu gelang dan penetapan SK.Menhut No.95/II/2014 Tanggal 24 Januari 2014 dengan luas kawasan 4.978,98. Adapun pengesahan blok di kawasan Suaka Margasatwa baru dilakukan di tahun 2018 berdasarkan SK.418/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018.

Hasil analisis IBGF menunjukkan Suaka Margasatwa Tasik Serkap mempunyai risiko kebakaran sedang. Kondisi ini dimungkinkan karena karakteristik lahan di SM Tasik Besar Serkap berupa hutan rawa gambut. Selain itu jenis keanekaragaman hayati flora dan fauna yang ada pada SM ini juga sangat khas. Dengan melihat kondisi tersebut, sehingga perlu adanya upaya pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan terhadap keanekaragaman tersebut, salah satunya melalui pencegahan deforestasi (**Gambar 23 dan Tabel 32**).

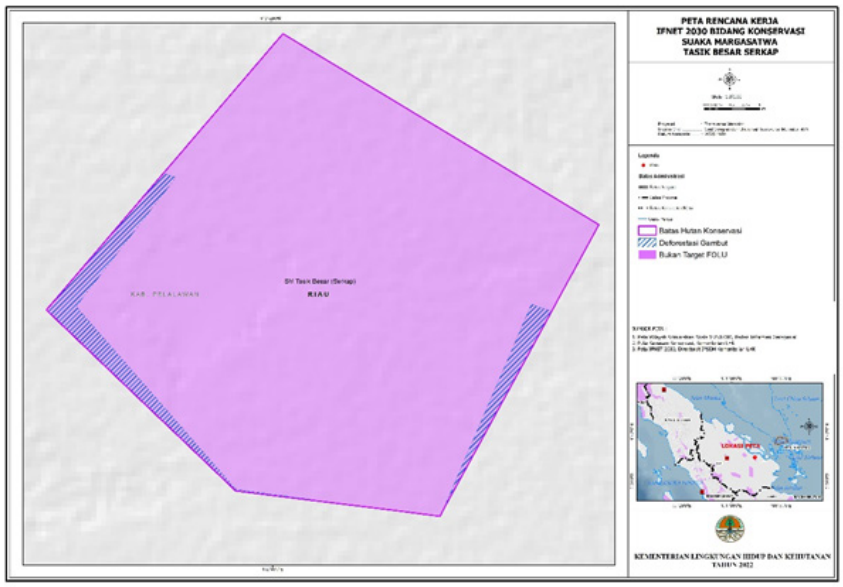

GAMBAR 23 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tasik Besar Serkap

TABEL 30 | Lokasi kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di SM Tasik Besar Serkap

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	278.35
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**278.35**

7. Suaka Margasatwa Tasik Serkap

Suaka Margasatwa Tasik Serkap ini memiliki luas 6.900 ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986. Suaka Margasatwa Tasik Serkap memiliki karekteristik yang khas, yakni tipe hutan rawa gambut dengan jenis keanekaragaman hayati flora dan fauna yang khas. Ekosistem rawa gambut pada kawasan SM Tasik Serkap terjaga dengan baik, dikarenakan keberadaan Sungai Serkap yang menyebabkan terjaganya kondisi hidrologi gambut.

Hasil analisis IBGF menunjukkan Suaka Margasatwa Tasik Serkap mempunyai risiko tinggi. Kondisi ini dimungkinkan karena karakteristik lahan di SM Tasik Belat berupa hutan rawa gambut, yang mana sifat tanah gambut menyerupai spons pada saat kondisi

normal akan menyerap dan menahan air secara maksimal, namun pada musim kemarau lahan ini akan menjadi kering sampai kedalaman tertentu dan mudah terbakar. Dengan adanya ancaman kebakaran hutan lahan tersebut, maka perlu adanya upaya program dan kegiatan untuk pencegahan kebakaran hutan lahan pada Suaka Margasatwa Tasik Serkap. Sementara itu, untuk mempertahankan tutupan lahan maka dilakukan upaya pencegahan deforestasi (**Gambar 24 dan Tabel 33**).

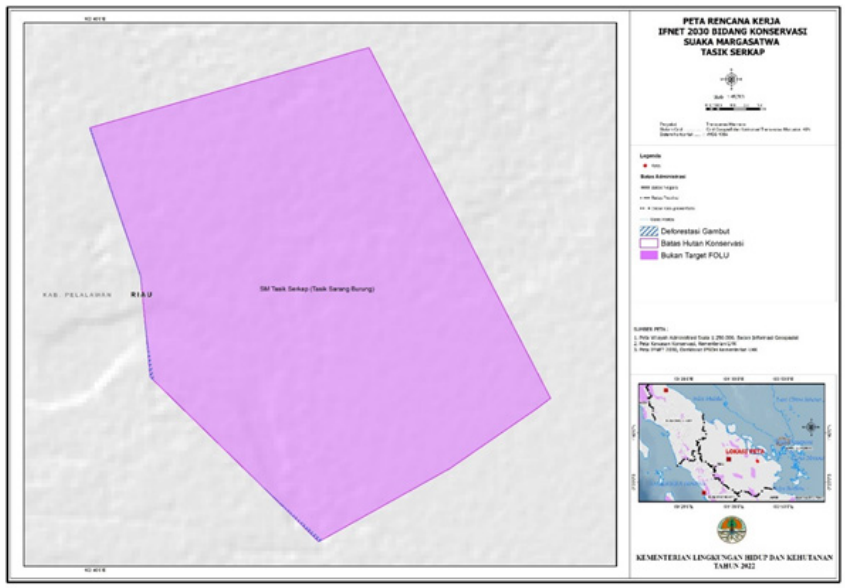

GAMBAR 24 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tasik Serkap

TABEL 31 | Lokasi kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di SM Tasik Serkap

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	14.01
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**14.01**

8. Suaka Margasatwa Tasik Belat

Suaka Margasatwa Tasik Belat secara administrasi terletak di Kabupaten Siak, hal ini didasarkan pada Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Siak dikukuhkan dengan

Undang-Undang No. 53 tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (ad interim) Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara penetapan kawasam Suaka Margasatwa Tasik Belat mengacu berdasarkan SK Menhutbun No.480/Kpts-II/1999. Luas SM Tasik Belat 2.529 Ha yang terletak di 0˚ 40' – 0˚ 44' LU dan 102˚ 41' - 102˚ 45' BT. Berdasarkan wilayah administrasi, lokasi suaka margasatwa Tasik Belat terdapat di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Siak seluas 2.044,53 Ha dan kabupaten Pelalawan seluas 484,47 Ha.

Hasil analisis IBGF menunjukkan Suaka Margasatwa Tasik Serkap mempunyai risiko tinggi. Kondisi ini dimungkinkan karena karakteristik lahan di SM Tasik Belat berupa hutan rawa gambut. Disamping itu, pada kawasan SM ini terdapat keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Mengacu pada kondisi tersebut, maka perlu adanya upaya program dan kegiatan baik untuk pencegahan kebakaran hutan lahan dan juga perlindungan keanekaragaman flora dan fauna yang ada, salah satunya bisa dilakukan melalui kegiatan pencegahan deforestasi di lahan gambut (**Gambar 25 dan Tabel 34**).

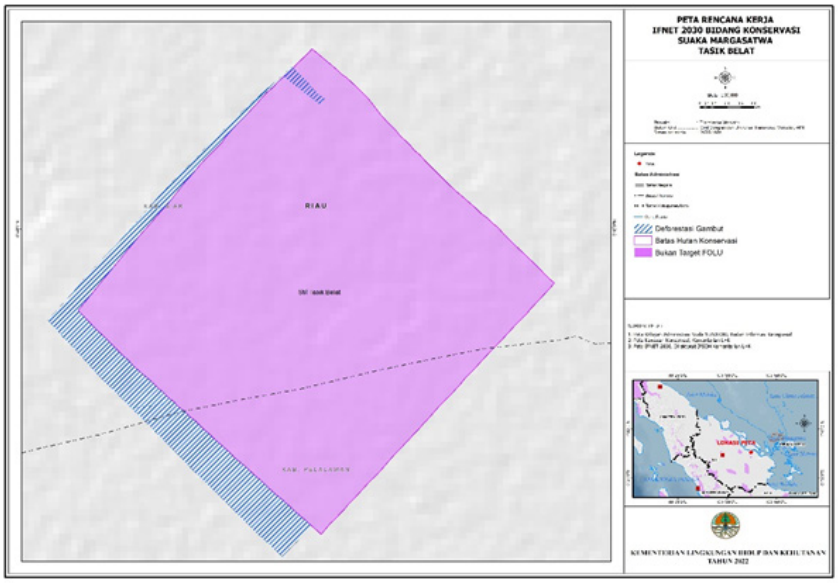

GAMBAR 25 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tasik Belat

TABEL 32 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tasik Belat

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	325.04
3	ENR	-

4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**325.04**

9. Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang

Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang Ditunjuk berdasarkan SK. Menhut No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan ditindaklanjuti dengan SK. TGHT Propinsi Riau seluas 4.500 Ha) SK. Menhutbun No. 349/Kpts-II/1999 Tgl. 26 Mei 1999. SM Tasik Tanjung Padang berada dikawasan Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luasan 4,925.00 yang merupakan wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah III Bidang KSDA Wilayah II Balai Besar KSDA Riau.

Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang merupakan kawasan yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu type hutan hujan dataran rendah dengan tipe ekosistem hutan rawa gambut. Disamping itu, pada kawasan SM ini terdapat keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi habitat berbagai jenis satwa langka dan terancam punah. Berdasarkan hasil analisis IBGF menunjukkan bahwa Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang berada pada tingkat risiko kebakaran tinggi. Jika melihat jenis ekosistem di SM ini yaitu dominan rawa gambut, maka indikasi potensi kebakaran tinggi adalah sesuai. Dalam upaya antisipasi kemungkinan tersebut, sangat diperlukan prioritas pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan, salah satunya melalui upaya pencegahan deforestasi (**Gambar 26 dan Tabel 35**)

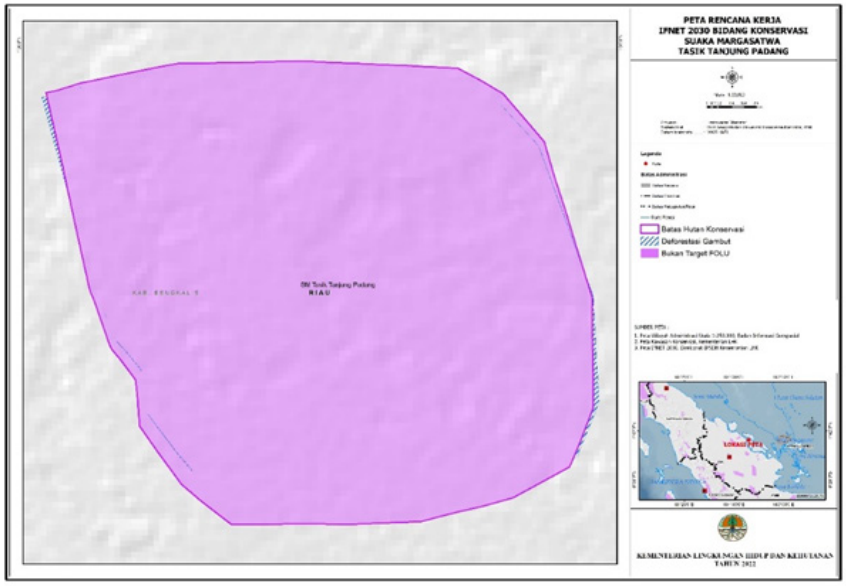

GAMBAR 26 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tanjung Padang

TABEL 33 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Tanjung Padang

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	23.89
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**23.89**

10. Taman Wisata Alam Buluh Cina

Taman Wisata Alam Bulih Cina ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 3587/ Menhut-VII/KUH/2014 dengan luas -+1.000 hektar. Dalam pelaksanaannya, Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, dilindungi dan dijaga oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dibawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bedasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.80/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016.

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina memiliki banyak potensi alam, jenis tanaman yang ada di hutan ini umumnya didominasi oleh pohon kayu seperti rengas, meranti, cimpur, belanti, karet, keiung, mahang, tapa-tapa, rotan, anggrek dan sebagainya. Sementara untuk jenis fauna diantaranya adalah elang, kijang, rusa, trenggiling, beruang madu, landak, siamang, kera, monyet, burung punai, murai, ayam hutan dan sebagainya. Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini memiliki usia yang sudah ratusan tahun yang berada ditengah-tengah budaya keikhlasan warga masyarakat Desa Buluh Cina untuk merawat dan mempertahankan keasrian, kandungan dan kekayaan kandungan flora dan fauna tropis yang ada di dalamnya (Darmansyah dan Amin 2019).

Berdasarkan hasil analisis IBGF menunjukkan bahwa TWA Buluh Cina berada pada tingkat risiko emisi tinggi, dan IBGF kebakaran sedang. Kondisi ini sangat memungkinkan, karena dengan adanya beragam jenis tanaman berkayu tersebut, Taman Wisata Alam Buluh Cina sangat berpotensi terhadap ancaman perambahan atau illegal logging. Salah satu upaya yang dirasa dapat dilakukan dalam upaya pencegahan deforestasi (**Gambar 27 dan Tabel 36**).

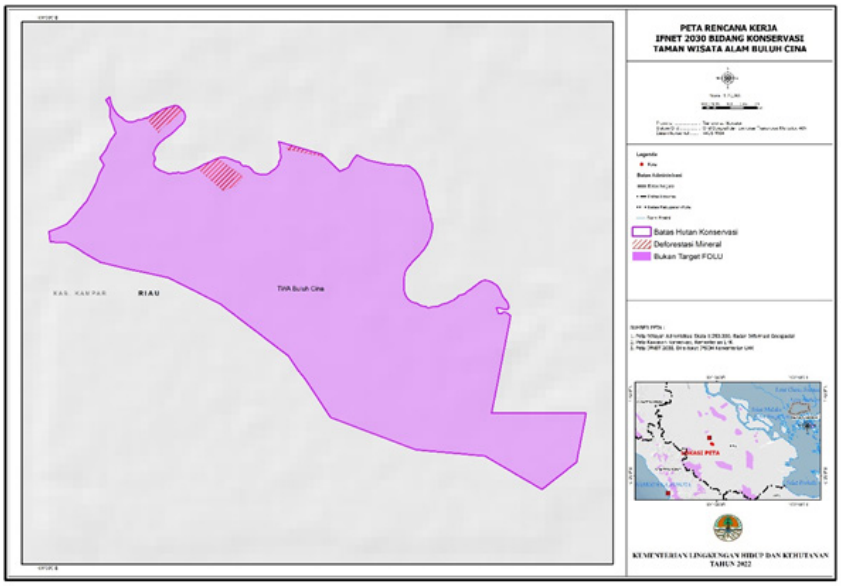

GAMBAR 27 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Buluh Cina

TABEL 34 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Buluh Cina

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	15.77
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**15.77**

11. Taman Nasional Zamrud

Taman Nasional (TN) Zamrud merupakan bagian dari hamparan gambut penting dari Landskap Semenanjung Kampar, dengan luas 31.480 hektar yang terdiri dari 100% lahan gambut dengan tutupan hutan masih terjaga dengan baik. Kawasan ini merupakan habitat beragam flora dan fauna yang khas. Disamping itu, terdapat potensi wisata alam melalui Danau Pulau Besar dan Danau Bawah yang dapat dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata alam khas rawa gambut di Provinsi Riau. Pengelolaan kawasan tersebut tidak hanya penting untuk pelestarian keanekaragaman hayati tetapi juga penting untuk kegiatan wisata alam yang dapat dimanfaatkan salah satunya untuk

menunjang perekonomian masyarakt di sekitar kawasan.

Terkait pengelolaan Taman Nasional Zamrud BBKSDA Riau telah mengeluarkan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) yang berlaku selama sepuluh tahun ke depan. Dalam dokumen ini ditegaskan bahwa tujuan dari pengelolaan TN Zamrud bukan hanya sebatas pada ranah konservasi namun juga diharapkan dapat menyentu perekonomian masyarakat terutama pada strategi pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

Taman Nasional seluas 31.480 hektare hampir seluruhnya berada di wilayah administrasi Desa Dayun. Di balik keindahan dan kekayaan keanekaragaman-hayatinya, tersimpan ancaman yang dapat merusak kelestarian TN Zamrud. Dari data perubahan tutupan lahan KLHK 1990 – 2014, Siak merupakan salah satu kabupaten dengan laju deforestasi tertinggi yaitu sekitar 5.7%. Dengan hampir 60% wilayahnya merupakan hutan gambut, Siak telah kehilangan hutannya sekitar 440.000 ha atau 18.000 ha per tahun. Salah satu penyebab kerusakan hutan dan lahan gambut di Desa Dayun adalah adanya perkebunan kelapa sawit serta HTI pulp dan kertas, selain dari perambahan oleh masyarakat desa dan luar desa.

Kesadaran yang rendah dari masyarakat di sekitar kawasan penyangga terkait pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan juga menjadi hal yang dapat mengancam kelestarian ekosistem hutan TN Zamrud. Praktik-praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar masih dijumpai di beberapa lokasi. Untuk itu dibutuhkan penyadartahuan akan pentingnya pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan tanpa melakukan pembakaran lahan maupun pengeringan dengan cara kanalisasi. Di samping itu jumlah polisi hutan di TN Zamrud masih sangat terbatas menjadikan BBKSDA Riau tidak mungkin melakukan pengamanan dan pemantauan yang efektif, sehingga diperlukan pelibatan masyarakat setempat dalam hal penjagaan Kawasan TN Zamrud. Kondisi yang kompleks ini mendorong dilakukannya beberapa kegiatan di lokasi ini meliputi pencegahan deforestasi, PCK dan restorasi gambut (**Gambar 28 dan Tabel 37**).

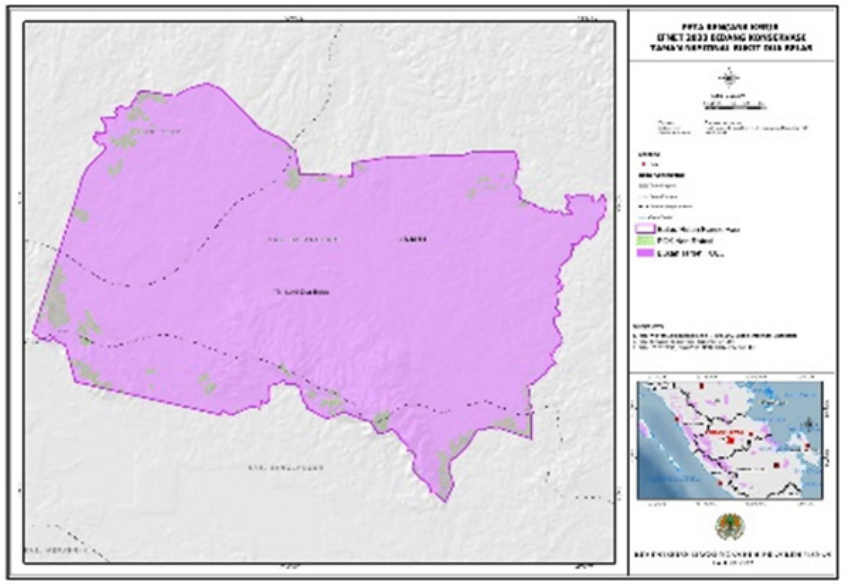

GAMBAR 28 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Zamrud

TABEL 35 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Zamrud

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	3,215.01
2	Deforestrasi Gambut	24,341.79
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	128
5	Restorasi Gambut	21
Total Keseluruhan		**27,705.80**

12. Taman Nasional Bukit Duabelas

Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) seluas 60.500 ha ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 285/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 melalui Hutan Produksi Tetap Serengam Hilir (11.400 ha) serta areal penggunaan lain (1.200 ha) dan cagar biosfer Bukit Duabelas (27.200 ha).

Penunjukan Taman Nasional Bukit Duabelas merupakan perubahan fungsi hutan yang berasal dari sebagian Hutan Produksi Terbatas Serengam Hulu (20.700 ha) dan sebagian Hutan Produksi Tetap Serengam Hilir (11.400 ha) serta Areal Penggunaan Lain (1.200 ha) dan Suaka Alam Bukit Duabelas (27.200 ha). Perubahan Fungsi Hutan Produksi dan Fungsi Hutan Suaka Alam menjadi Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas tentunya

juga merubah sistem pengelolaannya dari sistem pengelolaan hutan produksi menjadi sistem pengelolaan taman nasional. Perubahan sistem pengelolaan hutan tersebut telah menimbulkan konflik pengelolaan dan akses terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya antara pengelola kawasan dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional. Masyarakat Orang Rimba yang telah hidup dan mencari penghidupan di dalam kawasan hutan tersebut jauh sebelum ditunjuk sebagai taman nasional merasa terancam kehidupannya akibat wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan taman nasional. Konflik yang terjadi sudah pada tingkat konflik terbuka sehingga dalam mengelola taman nasional seringkali menghadapi penolakan dari masyarakat. Hal ini menyebabkan pengelolaan taman nasional menjadi kurang efektif. Guna mengatasi adanya area yang terbuka maka dilakukanlah upaya untuk memperbaiki melalui kegiatan PCK (**Gambar 29 dan Tabel 38**).

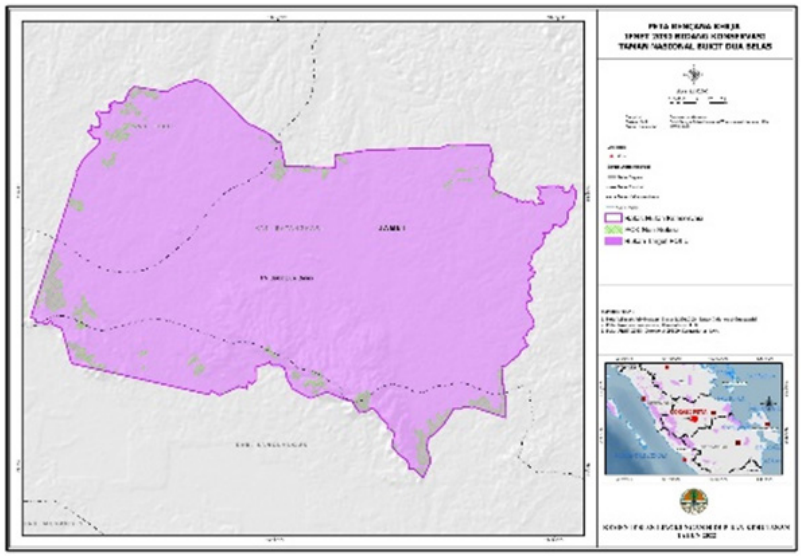

GAMBAR 29 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Duabelas

TABEL 36 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Duabelas

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	1,500
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**1,500**

13. Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), atau disebut juga Taman Bukit Tigapuluh adalah salah satu taman nasional yang terletak di pulau Sumatera, perbatasan antara Propinsi Riau dan Propinsi Jambi. Secara administratif, taman ini terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, dan Kabupaten Bungo Tebo dan Tanjung Jabung, Propinsi Jambi. TNBT adalah kawasan hutan tropis dataran rendah dengan ekosistem asli yang masih tersisa di Pulau Sumatra. Semula, kawasan TNBT merupakan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Meskipun demikian, kondisi hutan dan kekayaan flora dan faunanya relatif masih terjaga.

Taman Nasional Bukit Tigapuluh menyimpan kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. Di dalamnya terdapat sekitar 660 spesies tumbuh-tumbuhan, 246 di antaranya adalah tumbuhan obat-obatan yang sering dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Sebanyak 550 spesies merupakan spesies langka yang sudah didata, dikumpulkan, dan dipelihara. Adapun jenis spesies langka tersebut di antaranya adalah cendawan muka rimau (*Rafflessia hasselti*), jernang (*Daemonorops draco*), pulai (*Alstonia scholaris*), getah merah (*Palaguyum sopi*), jelutung (*Dyear cosculata*), dan lain-lain. Dengan adanya wisata alam yang dimiliki Provinsi Riau, sebenarnya dapat dijadikan salah satu potensi penerimaan PAD daerah, apabila potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik. Karena minat pengunjung terhadap suatu daerah tujuan wisata dapat ditingkatkan melalui pengembangan daya tarik wisata alam dengan memperhatikan kelestarian alam. Daya tarik tersebut dapat berupa keindahan alam, atraksi alam, dan atraksi budaya. Daerah Taman Nasional Bukit Tigapuluh sebagai daerah tujuan wisata di wilayah Provinsi Riau memiliki daya tarik alam yang unik dan tersebar di beberapa lokasi.

Kelemahan pengembangan kawasan TNBT ini terletak pada koordinasi dan kerjasama yang belum berjalan dengan baik antara pihak Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (BTNBT) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengelola TNBT ini namun dapat bepartisipasi dalam mengembangkan kawasan TNBT. Untuk itu, perlu dijalin komunikasi yang intens dan sinergitas program sehingga pengembangan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dapat dilaksanakan secara berkelanjutan yang berbasiskan atas kebutuhan masyarakat. Potensi Objek Wisata Flora dan Fauna Kawasan ini juga merupakan satu kesatuan ekosistem dengan wilayah sekitarnya yang menjadi habitat flora dan satwa liar penting dan endemik sumatera antara lain bagi satwa liar yang terancam punah di sumatera misalnya harimau sumatera, gajah sumatera, orangutan sumatera, dan tapir. Satwa liar ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Terdapat sejenis tumbuhan langka yaitu cendawan muka rimau atau *Rafflesia hasseltii*, anggota suku Raflesiaceae. Disamping itu ada lagi jenis fauna yang sangat dilindungi yaitu harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*) yang terancam kepunahannya akibat perburuan liar. Strategi yang perlu dilakukan kedepan adalah membuat prioritas terhadap jenis-jenis fauna yang mempunyai potensi besar untuk dilakukan penangkaran atas dasar aspekaspek pembiayaan, teknologi, nilai ekonomi dan manfaat, kapasitas sumberdaya manusia pengelola serta kemampuan adaptasi spesies. Salah satu prioritas kegiatan penangkaran yang perlu segera dikembangkan adalah budidaya lebah madu, kupu-kupu, burung berkicau dan burung eksotik (Sadad 2018). Kegiatan-kegiatan FOLU yang akan dilakukan ini merupakan wujud untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi.

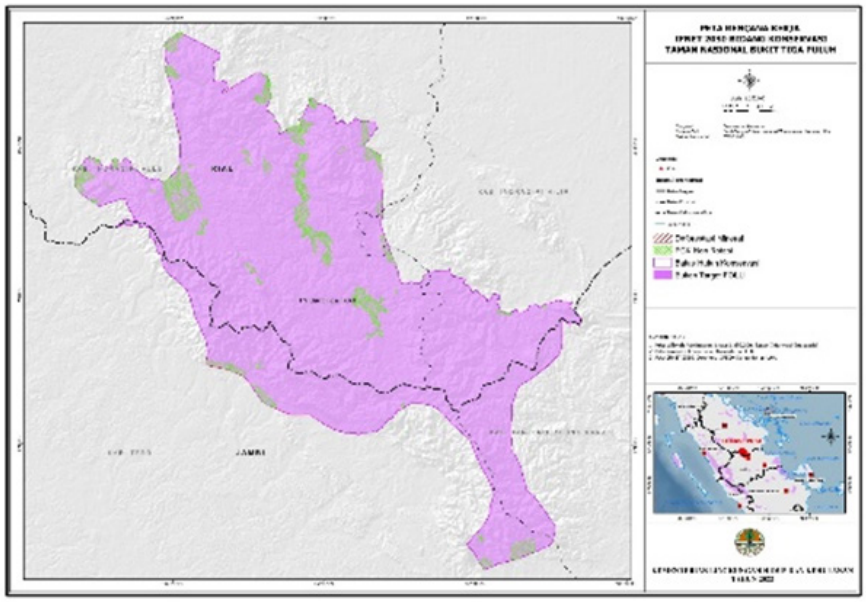

GAMBAR 30 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Tigapuluh

TABEL 37 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Tigapuluh

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	17.82
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	7,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**7,017.82**

14. Taman Nasional Tesso Nilo

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan hutan konservasi alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, parawisata dan rekreasi Tesso Nilo adalah salah satu hutan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Kawasan ini terletak di Provinsi Riau yang merupakan salah satu dari 200 ecoregion. Pemerintah dan pihak terkait berjuang untuk melestarikan Taman Nasional Tesso Nilo dan menjadikannya sebagai contoh bentang alam hutan dataran rendah Sumatera yang luas. Taman Nasional Tesso Nilo memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan potensi

ekowisata yang menarik. Disamping itu, Taman Nasional Tesso Nilo juga merupakan hutan daratan rendah yang sangat mempesona karena Hutan Tesso Nilo merupakan hutan hujan tropika daratan rendah (*lowland tropical rain forest*). Hasil penelitian LIPI dan WWF Indonsia (2003), menemukan 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku dengan rincian jumlah jenis pohon 215 jenis dan anak pohon 305 jenis. Bahkan Tesso Nilo juga desebut-sebut sebagai hutan yang terkaya keanekaragaman hayatinya di dunia dengan ditemukannya 218 jenis tumbuhan vascular dalam petakan seluas 200m2 oleh Center for Biodiversity Management dari Australia pada tahun 2001 (BTNTN, 2015).

Sebagai salah satu area hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tidak luput dari tekanan masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya penebangan liar, penguasaan lahan dan pembukaan lahan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI). Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sumber daya hutan ditenggarai menjadi penyebab banyaknya terjadi pembalakan liar. Masyarakat hanya melihat kayu sebagai komoditas utama yang mempunyai prospek dan memiliki nilai ekonomis tinggi untuk dimanfaatkan tanpa mencoba untuk lebih memberdayakan hasil hutan lain selain kayu sebagai komoditas utamanya.

TN Tesso Nilo menghadapi masalah pelik berkaitan dengan perambahan, *illegal logging,* termasuk juga pemekaran desa ke dalam kawasan. Selama lima tahun terakhir jumlah perambahan dalam kawasan TN Tesso Nilo semakin meningkat, mencapai 53.530,39 hektar melibatkan sekitar 10.000 KK dengan modus pengakuan lahan sebagai tanah adat yang dikuasai Bathin (Tokoh Adat). Bathin merasa berhak menguasakan lahan pada anak kemenakan untuk diolah. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah para oknum tokoh adat itu bekerjasama dengan para pemodal memperjualbelikan lahan dalam kawasan kepada masyarakat umum. (siaran pers PPID KLHK http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3086/operasi-terpadu-penanganan-perambah-tn-tesso-nilo).

Salah satu alasan mudahnya terjadi perambahan dalam kawasan TN Tesso Nilo adalah kondisi kawasan yang merupakan areal bekas konsesi HPH sehingga jalan akses masuk kawasan sudah lebih terbuka. Topografi kawasan yang cenderung datar, memudahkan dalam pembukaan lahan. Di samping itu tingginya harga komoditas sawit, menjadi daya tarik luar biasa bagi masyarakat maupun pemodal untuk merambah taman nasional menjadi kebun sawit. Sehingga sangat diperlukan upaya untuk mengatasi masalah perambahan tersebut, baik secara preemtif, preventif maupun represif. Kondisi TN yang cukup kompleks ini menjadikan lokasi ini dipilih menjadi lokasi pelaksanaan beberapa kegiatan seperti pencegahan deforestasi, ENR dan juga PCK (**Gambar 31 dan Tabel 40**)

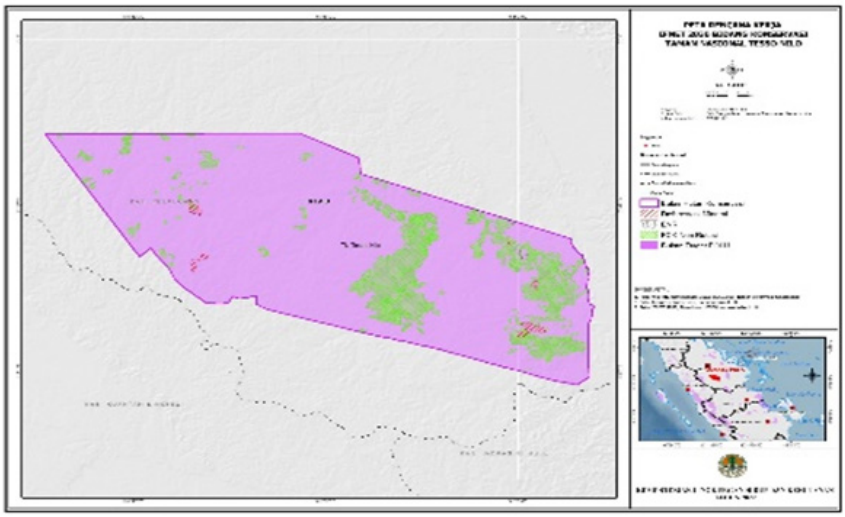

GAMBAR 31 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Tesso Nilo

TABEL 38 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Tesso Nilo

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	443.80
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	45
4	Non-Rotasi (PCK)	20,849
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**21,337.80**

B.6.5 Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat memiliki 2 kawasan konservasi yang memilki nilai total IBGF ideal di bawah 3.

1. Suaka Margasatwa Arau Hilir dan Air Tarusan

Unit KK ini tergolong dalam wilayah BKSDA Pesisir Selatan. Area ini ditetapkan karena menjadi salah satu habitat harimau sumatera dan Gajah sumatera. Kawasan Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir Pessel- Padang- Solok memiliki luas 20.799, 92 Ha. Saat ini terdapat jalan lintas antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Pesisir Selatan yang melintasi area ini. Indeks serapan dan indeks emisi di area ini bernilai 1.

Ancaman utama yang dijumpai di SM ini adalah adanya pembalakan liar dan masih minimnya kesadaran masyarakat. Hingga saat ini pengelolaan dan pemulihan ekosistem yang ada di SM Arau Hilir masih tergolong minim. Meskipun demikian, berdasarkan

peta indikatif lokasi pelaksanaan kegiatan mitigasi INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030, sebanyak 10.000 Ha dari kawasan ini akan menjadi lokasi indikatif pelaksanaan PCK (**Gambar 32 dan Tabel 41**).

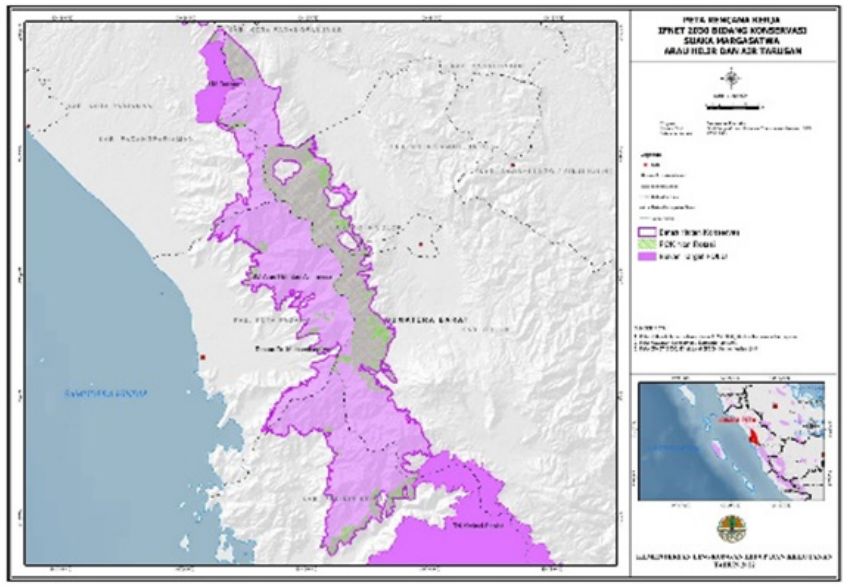

GAMBAR 32 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Arau Hilir-Air Tarusan

TABEL 39 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Arau Hilir-Air Tarusan

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	10,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,000**

2. Taman Nasional Siberut

Pada awalnya, kawasan ini ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa, yang kemudian semakin bertambah luasannya dan status resmi sebagai taman nasional dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 407/Kpts-II/1993 tentang penetapan Taman Nasional Siberut seluas 190.500 ha yang merupakan gabungan dari kawasan Suaka Alam seluas 132.900 ha, Hutan Lindung seluas 3.500 ha, Hutan Produksi

Terbatas seluas 36.600 ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas 36.600 ha. Secara geografis TN Siberut berada di 01°05' – 01° 05' Lintang Selatan dan 98° 36' – 99° 03' Bujur Timur. Terdapat beberapa tipe ekosistem yang ada di wilayah ini, diantaranya adalah ekosistem hutan primer *Dipterocarpaceae*, ekosistem hutan primer campuran, ekosistem hutan sekunder *Dipterocarpaceae*, ekosistem hutan rawa air tawar, ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan rawa sagu, ekosistem pantai.

Hingga saat ini, disinyalir terdapat beberapa ancaman terkait kelestarian Taman Nasional ini, diantaranya adalah pembukaan lahan untuk komersial, pembalakan liar, Konversi hutan menjadi perkebunan, serta perburuan liar. Adanya aktivitas tersebut tentunya semakin meningkatkan potensi timbulnya opened area dan juga penurunan kualitas ekosistem. Indeks biogeofisik serapan di area ini tergolong sedang, dengan indeks emisi rendah.

Berdasarkan kondisinya saat ini, TN Siberut menjadi salah satu lokasi indikatif kegiatan mitigasi. 10.000 Ha dari luas total TN Siberut akan dijadikan sebagai lokasi indikatif untuk kegiatan PCK (**Gambar 33 dan Tabel 42**). Dengan adanya sinkronisasi ini diharapkan permasalahan dan ancaman di TN Siberut dapat diminimalisir.

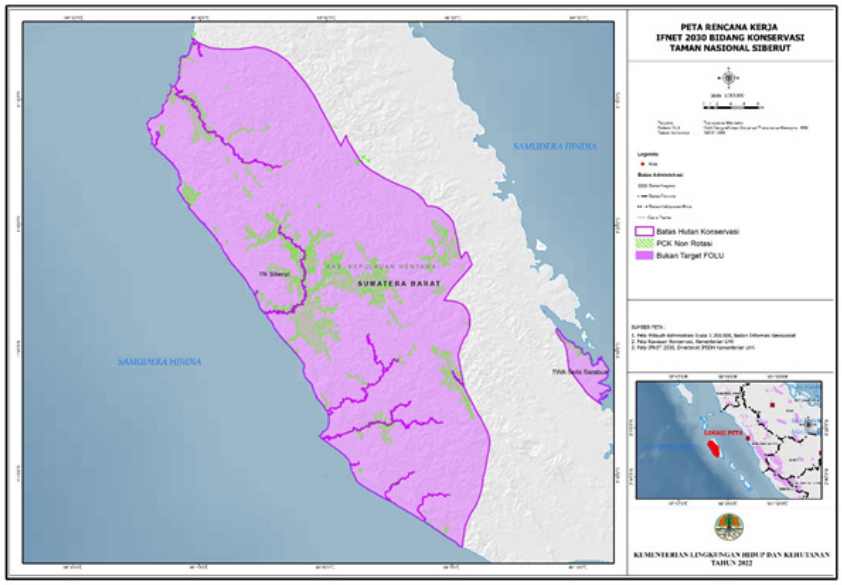

GAMBAR 33 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Siberut

TABEL 40 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Siberut

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-

4	Non-Rotasi (PCK)	10,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,000**

B.6.6 Provinsi Jambi

Sebanyak 66,67% kawasan konservasi yang memiliki nilai total IBGF tinggi (7) di Jambi, yaitu CA Hutan Bakau Pantai Timur dan TN Berbak. Kedua kawasan Konservasi ini menunjukkan perlunya dilakukan penanaman pohon untuk memperbaiki tutupan lahan dan mengurangi emisi yang dihasilkan.

1. Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur

Unit KK ini sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 507/Kpts-Um/6/1981 tanggal 14 Juni 1981 dengan luas 6.500 Hektar. Setelah dilakukan tata batas pada tahun 1986 kawasan Hutan Bakau Pantai Timur ditetapkan sebagai cagar alam melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 14/Kpts-II/2003 tanggal 7 Januari 2003 dengan luas 4.126,60 hektar dan panjang batas 109,331 km.

Sesuai namanya, lokasi ini memiliki ekosistem berupa mangrove. Beberapa jenis tumbuhan yang dijumpai di area ini adalah pedada (*Sonneratia caseolaris*), Api-api (*Avicennia alba*), Tanjang (*Bruguiera gymnorrhizaa*). Saat ini, menurut penuturan BKSDA Jambi terdapat hampir setengah kawasan CA ini yang mengalami kerusakan dan perlu pemulihan. Bahkan BKSDA telah menetapkan kawasan/zonasi untuk areal yang akan direhabilitasi. Kondisi tersebut juga dapat dilihat dari nilai indeks biogeofisik yang tergolong tinggi. Indeks emisi dan serapan mencapai nilai tinggi, dengan indeks kebakaran yang rendah. Berdasarkan peta lokasi indikatif Indonesia's FOLU Net Sink 2030, diketahui bahwa 592 Ha area CA Hutan Bakau Pantai Timur akan dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan aksi mitigasi berupa PCK (**Gambar 34 dan Tabel 43**). Dengan adanya kegiatan mitigasi ini diharapkan dapat disinkronkan dengan rencana rehabilitasi sehingga dapat mempercepat rehabilitasi.

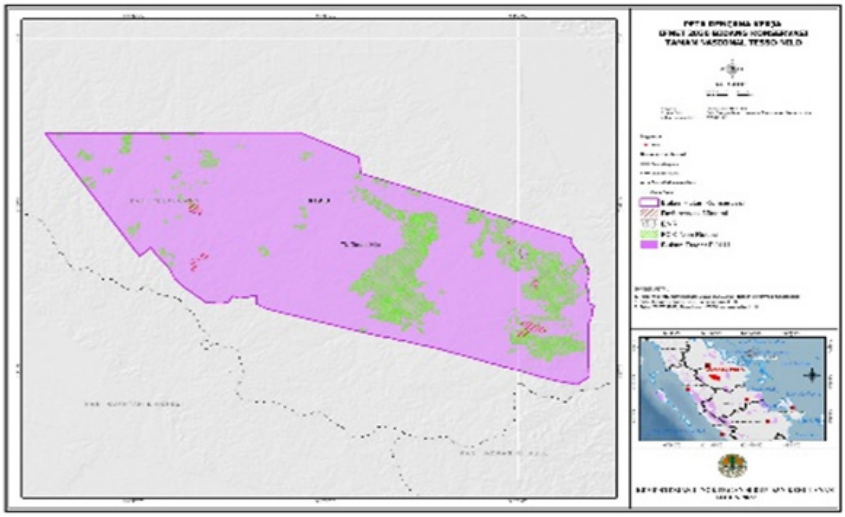

GAMBAR 34 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Hutan Bakau Pantai Timur

TABEL 41 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Hutan Bakau Pantai Timur

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	1,408.91
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	592
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**2,000.91**

2. Taman Nasional Kerinci Seblat

TN Kerinci Seblat dikukuhkan pada tahun 1996, kemudian mengalami beberapa kali perubahan luas. Pada akhirnya tahun 2004, Menteri Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan produksi di Sipurak Hook seluas ± 14.160 Ha menjadi bagian dari kawasan TNKS dengan surat keputusan No. 420/Menhut-II/2004, sehingga luas TNKS menjadi ± 1.389.509,867 ha.

Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dengan variasi ketinggian mulai dari 200 mdpl sampai dengan 3.805 mdpl di puncak Gunung Kerinci memiliki variasi ekosistem yang sangat beragam. Ekosistem yang terletak di area TNKS terdiri dari beberapa tipe diantaranya adalah Hutan dataran rendah, hutan perbukitan, hutan sub-montana, hutan montana rendah, hutan montana tengah, hutan montana atas, belukar sub-alpine, serta terdapat juga rawa. Tumbuhan yang mendominasi adalah suku *Dipterocarpaceae, Fabaceae, Lauraceae, Myrtaceae, dan Bombacaceae.* Jenis tumbuhan khas dengan sebaran

terbatas dapat dijumpai di kawasan ini, yaitu pinus strain kerinci (*Pinus merkusii strain kerinci*), kayu pacet (*Harpullia arborea*), pakis sunsang (*Dyera costulata*), dan bunga rafflesia (*Rafflesia arnoldii*).

Nilai indeks emisi dan serapan menunjukkan nilai 1 yang berarti rendah. Akibat luasnya kawasan, masalah utama kawasan ini adalah adanya berupa perambahan dan usulan pembangunan jalan di dalam kawasan. Hal ini menyebabkan timbulnya ancaman yang serius terhadap kelestarian kawasan. Untuk semakin mempercepat pemulihan kawasan, *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* menjadi kawasan TNKS ini sebagai lokasi indikatif untuk kegiatan mitigasi. Sebanyak 50.000 Ha kawasan akan dijadikan lokasi indikatif untuk pelaksanaan kegiatan mitigasi PCK (**Gambar 35 dan Tabel 44**).

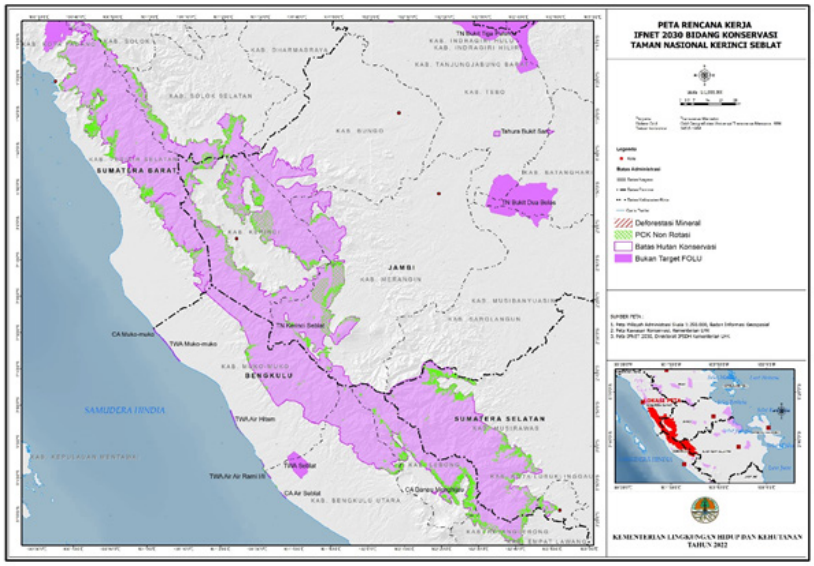

GAMBAR 35 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kerinci Seblat

TABEL 42 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kerinci Seblat

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	0.23
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	50,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**50,000.23**

3. Taman Nasional Berbak

Kawasan Taman Nasional Berbak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 285/Kpts-II/1992 seluas 162.700 Ha sebagai salah satu kawasan pelestarian alam yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian flora, fauna dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Akan tetapi setelah mengalami perubahan keputusan, luasan TN ini saat ini mencapai 142.750 Ha.

TN ini memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut. Meskipun demikian, keberadaan TN Berbak terus mengalami gangguan dan berbagai ancaman. Berdasarkan analisis nilai indeks biogeofisik diketahui bahwa nilai IBGF di lokasi mencapai nilai 7 (tinggi). Nilai ini terdiri indeks emisi dan kebakaran yang tinggi, dengan indeks serapan rendah.

Ancaman tersebut berupa tingginya ancaman kebakaran, serta *illegal logging*. Akibat kondisinya yang rawan inilah, maka TN Berbak masuk dalam lokasi indikatif pelaksanaan 3 aksi mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. 36.480 Ha TN Berbak akan dijadikan sebagai lokasi indikatif pelaksanaan kegiatan PCK, 80 Ha untuk ENR, dan 1.000 Ha untuk restorasi gambut (**Gambar 36 dan Tabel 45**).. Dengan adanya aksi mitigasi ini diharapkan ancaman untuk kelestarian TN Berbak dapat semakin berkurang dan mempercepat pemulihannya.

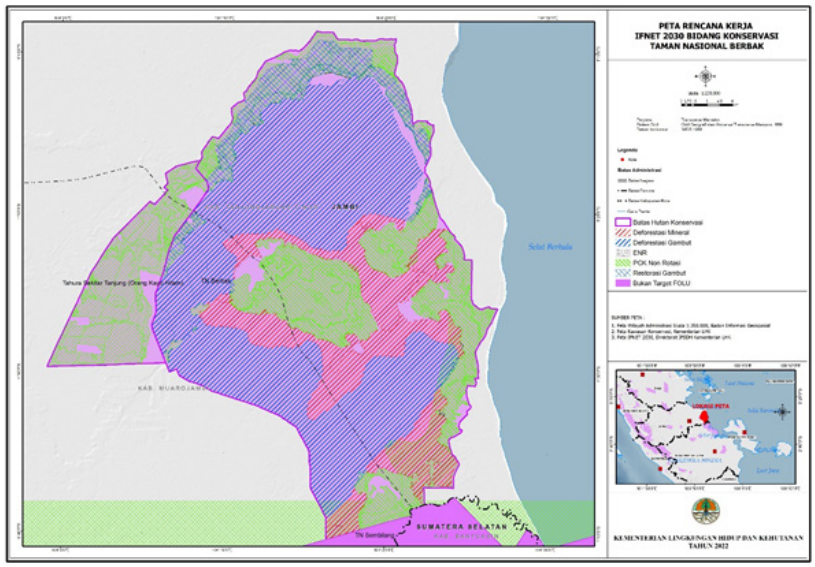

GAMBAR 36 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Berbak

TABEL 43 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Siberut

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	25,374.53

2	Deforestrasi Gambut	69,973.49
3	ENR	80
4	Non-Rotasi (PCK)	36,480
5	Restorasi Gambut	1,000
Total Keseluruhan		**132,908.02**

4. Taman Nasional Sembilang

Unit Kawasan Konservasi ini ditetapkan pada tahun 2001 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi kawasan Taman Nasional Sembilang. Penetapan secara resmi menjadi taman nasional dikeluarkan pada tahun 2003 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95/Kpts-II/03 tanggal 19 Maret 2003 mengenai penetapan status Kawasan Taman Nasional Sembilang seluas 202.896,31 hektar. Secara geografis Taman Nasional Sembilang berada pada koordinat 104° 12′ – 104° 55′ Bujur Timur dan 1° 38′ – 2° 25′ Lintang Selatan.

Beberapa tipe ekosistem di Taman Nasional Sembilang merupakan ekosistem hutan rawa gambut, ekosistem hutan rawa air tawar, dan ekosistem hutan riparian. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di Taman Nasional Sembilang antara lain gajah paku (*Acrostichum aureum*), nipah (*Nypa fruticans*), cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*), pandan (*Pandanus tectorius*), laut (*Hibiscus tiliaceus*), nibung (*Oncosperma tigillaria*), jelutung, menggeris (*Koompassia excelsa*), dan gelam tikus (*Syzygium inophylla*). Selain itu, terdapat juga beberapa jenis mangrove yang hidup di TN ini.

Indeks biogeofisik di area ini tegrolong sedang, dengan indeks emisi dan kebakaran bernilai sedang. Berbagai ancaman timbul di kawasan konservasi ini, diantaranya adalah pembalakan liar, perubahan kawasan menjadi pertambakan masyarakat, serta rawan kebakaran. Unit KK ini menjadi salah satu lokasi indikatif dalam pelaksanaan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 2030, dimana 10.000 Ha areanya dijadikan sebagai area indikatif dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi PCK (**Gambar 37 dan Tabel 46**)

.

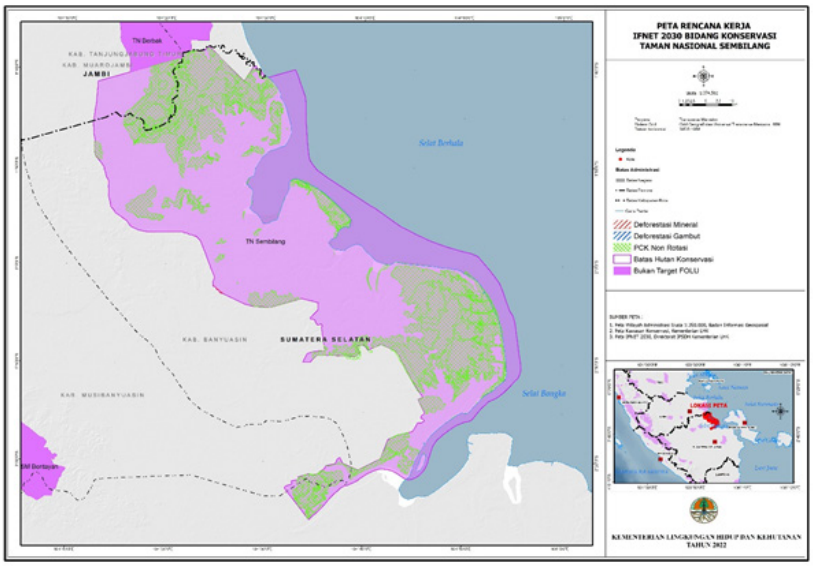

GAMBAR 37 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sembilang

TABEL 44 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sembilang

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	22.87
2	Deforestrasi Gambut	0.20
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	10,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,023.07**

B.6.7 Provinsi Kalimantan Utara

Data menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Utara memiliki TN Kayan Mentarang dalam kondisi ideal, baik nilai IBGF emisi, karhutla dan, serapan tidak menunjukkan potensi kerusakan lahan yang signifikan, namun tetap perlu diadakannya monitoring untuk menjaga kondisi lahan.

1. Taman Nasional Kayan Mentarng

TN Kayan Mentarang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 631/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996. Awalnya kawasan ini merupakan Cagar Alam, namun akhirnya pada tahun 1996 resmi menjadi Taman Nasional Kayan Mentarang. Tn ini terletak pada 40 07' 38,94" - 20 08' 48,12'' Lintang Utara dan 1150 54' 06,27" - 1140

48' 38,90'' Bujur Timur. Kawasan konservasi ini merupakan kawasan konservasi terbesar di pulau Kalimantan dan termasuk salah satu yang terbesar di wilayah Asia Pasifik. TN ini terletak pada ketinggian antara 200 meter sampai sekitar ±2.500 m di atas permukaan laut, mencakup lembah-lembah dataran rendah, dataran tinggi pegunungan, serta gugus pegunungan terjal yang terbentuk dari berbagai formasi sedimen dan vulkanis.

Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1.360.500 hektar, dengan beberapa tipe hutan yang dapat dijumpai antara lain hutan Dipterokarp, hutan Fagaceae-Myrtaceae atau juga biasa disebut sebagai hutan ek, hutan pegunungan tingkat tengah sampai tinggi pada ketinggian di atas 1.000 m di atas permukaan laut, dan hutan kerangas. Selain itu, ada juga hutan rawa meski cukup terbatas, beberapa hutan sekunder, hutan agathis, dan tipe hutan khusus berupa hutan lumut Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di kawasan taman nasional ini yaitu kayu ulin (Eusideroxylon zwageri), ramin (Gonystylus bancanus), jelutung (Dyera costulata), pulai (Alstonia scholaris), rengas (Gluta wallichii), agathis (Agathis borneensis), aren (Arenga pinnata), dan gaharu (Aquilaria malacensis).

Masalah yang muncul di kawasan ini adalah aktivitas illegal logging dan pembalakan liar. Ancaman pencurian Gaharu oleh masyarakat sekitar dan luar kawasan juga menjadi perhatian penting. Ancaman lain di daerah TNKM yang berbatasan dengan hutan produksi yakni adanya illegal logging yang masuk ke kawasan TNKM, hal ini juga disebabkan karena adanya 2 SK penunjukkan TNKM yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan batas TNKM dengan batas Hutan Produksi (Briefing Paper No. 7 Monitoring Partisipatif Taman Nasional Kayan Mentarang). Kondisi tersebut dapat terlihat juga dari indeks emisi dan serapan yang bernilai 1 (rendah).

Dengan demikian, alokasi 1000 Ha dari total kawasan Kayan Mentarang yang akan dijadikan sebagai lokasi indikatif pelaksanaan kegiatan mitigasi PCK merupakan salah satu wujud untuk rehabilitasi kawasan (Gambar 38 dan Tabel 47).. Kegiatan PCK ini nantinya diharapkan dapat memebrikan dampak positif bagi perbaikan ekosistem TNKM.

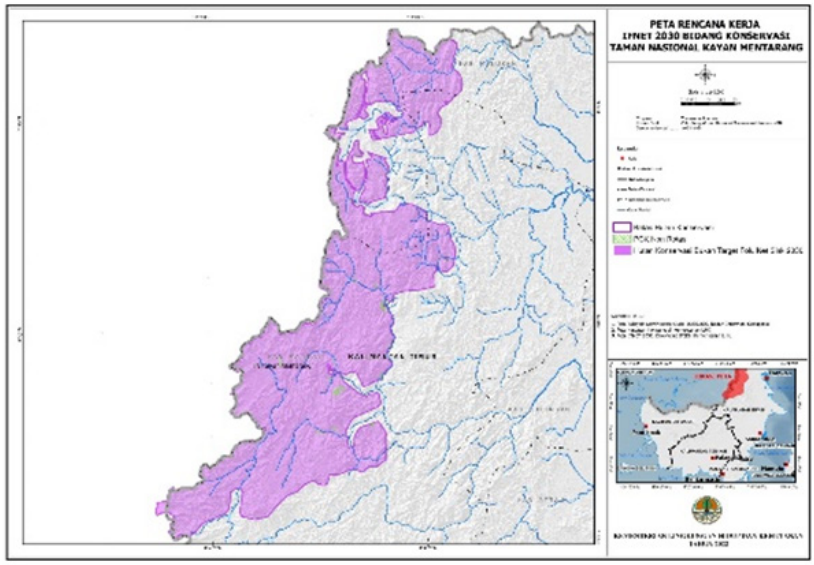

GAMBAR 38 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kayan Mentarang

TABEL 45 |Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kayan Mentarang

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	1,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**1,000**

B.6.8 Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan dikenal akan hutan hujan tropisnya yang kaya karena menjadi bagian dari pusat keanekaragaman hayati Borneo. Namun menurut Pratama (*Et al,* 2021), beberapa tahun terakhir terdapat banjir yang secara tidak langsung menyebabkan kerusakan ekosistem Kalimantan Selatan. Masyarakat mulai melakukan subtitusi ekosistem hutan menjadi sawah dan pohon karet untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan (Supriatna *et al.* 2022). Terdapat 29% KK yaitu SM Kuala Lupak dan SM Pleihari Tanah Laut, yang memiliki nilai 3 untuk indeks biogeofisik emisi, hal ini berarti perlu dilakukannya penanaman untuk meminimalisir lahan terbuka yang ada.

1. Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku

Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku (CA. Kelautku) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 329/Kpts-II/1987 dengan luas 66.650 Ha. Secara geografis CA ini terletak pada 2°42'00" – 3°33'00"LS dan 115°58'00"m – 116°19'00"BT. Secara umum area ini terdiri atas dataran berawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Area ini merupakan perwakilan tipe ekosistem mangrove dan hutan dataran rendah yang unik memiliki berbagai jenis fauna yang dilindungi serta flora khas hutan mangrove dan hutan dataran rendah. Jenis-jenis tumbuhan yang cukup mendominasi area ini adalah jenis bakau (*Rhizopora mucronate, R. apiculate*) *Avicennia marina, Nypa fruticans, Xylocarpus granatum* dll.

Gangguan terhadap kawasan CA berupa pembuatan tambak liar dan penebangan kayu pada area CA. Peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta kebutuhan ekonomi dan pembangunan juga menimbulkan tekanan yang semakin tinggi terhadap kawasan CA berupa penurunan kualitas dan kuantitas kawasan. Pembuatan tambak di kawasan CA. Selat Sebuku mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove yang ada. Berbagai macam gangguan yang sedang dialami kawasan saat ini terutama dari kegiatan pertambakan, perkebunan, pelabuhan khusus, industri, persawahan, pemukiman dan penebangan liar. Adanya gangguan yang ada di wilayah ini, juga dapat tergambar dari besaran nilai indeks biogeofisik (IBGF) yang tergolong Agak tinggi (6), terdiri dari indeks emisi tinggi, indeks kebakaran sedang, dan indeks serapan rendah.

Masih maraknya penebangan dan juga perubahan peruntukkan menjadi tambak tentunya harus menjadi fokus utama dalam penanganan area terbuka di wilayah ini. Luas

area CA yang akan dijadikan sebagai lokasi indikatif untuk *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* seluas 10.582 Ha. Area ini nantinya akan dijadikan sebagai lokasi untuk pelaksanaan kegiatan PCK (**Gambar 39 dan Tabel 48**) dengan memperhatikan kondisi dan juga jenis tumbuhan asli.

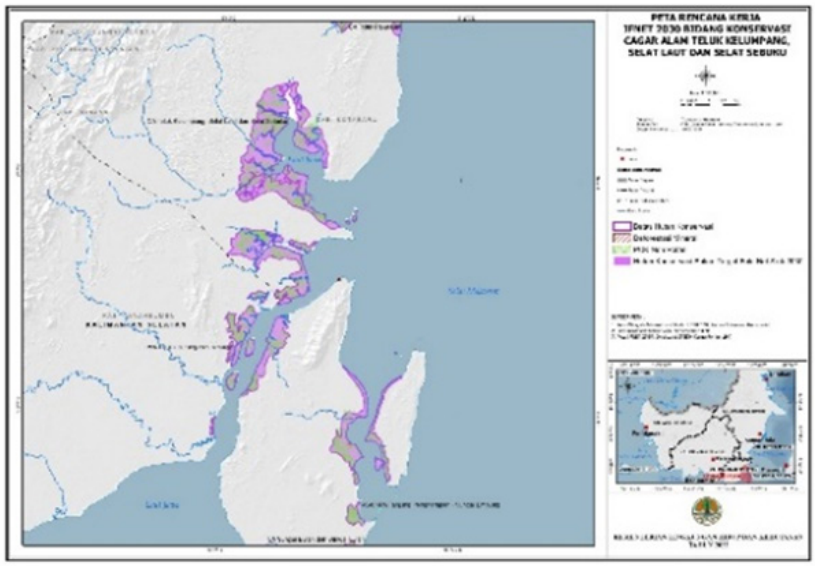

GAMBAR 39 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku

TABEL 46 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	24.67
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	10,582
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,606.67**

2. Cagar Alam Gunung Kentawan

Secara geografis kawasan Cagar Alam Gunung Kentawan terletak di antara 115°29 - 115°31 BT dan 2° - 2°41 LS, dengan luasan 246,24 Ha. Kawasan hutan Gunung Kentawan ditunjuk Berdasarkan SK.Menteri Kehutanan Nomor.336/KptsII/1999 tanggal 24

Mei1999.Luas 257,90 Ha. Berkaitan adanya usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan, yang memuat perubahan fungsi kawasan hutan, maka keberadaan kawasan CA Gunung Kentawan tetap dipertahankan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009.

Secara umum area ini berupa area hutan pegunungan dengan beberapa titik berupa area karst yang memiliki topografi yang cukup terjal. Topografi kawasan Cagar Alam Gunung Kentawan yang sangat terjal ini memiliki potensi erosi tanah yang cukup besar, oleh karena itu peranannya sangat penting untuk menekan tingkat kerusakan akibat erosi tanah. Beberapa jenis vegetasi yang tumbuh di antaranya adalah: kariwaya (*Ficus indicata*), damar batu (*Vatica bancana*), barui laki (*Hibiscus sp.*), loa (*Ficus variegata*), kemiri (*Aleurites moluccana*), Damar Putih (*Hopea ferrugenia*), kayu tahun (*Shorea sandakanensis*), Surian (*Toona sureni*), Natu (*Palaquium xanthochymum*), ulin (*Eusideroxylon zwageri*), kujajing (*Ficus sp.*). Area Gunung Kentawan yang akan menjadi lokasi kegiatan mitigasi berupa PCK seluas 200 Ha (**Gambar 40 dan Tabel 49**). Adanya kegiatan ini nantinya diharapkan mampu untuk bisa mencegah erosi sebagai dampak lanjut dari penanganan area terbuka. Pemilihan area ini sebagai lokasi indikatif ditinjau dari indeks kebakaran dan indeks serapannya yang bernilai 1 (rendah).

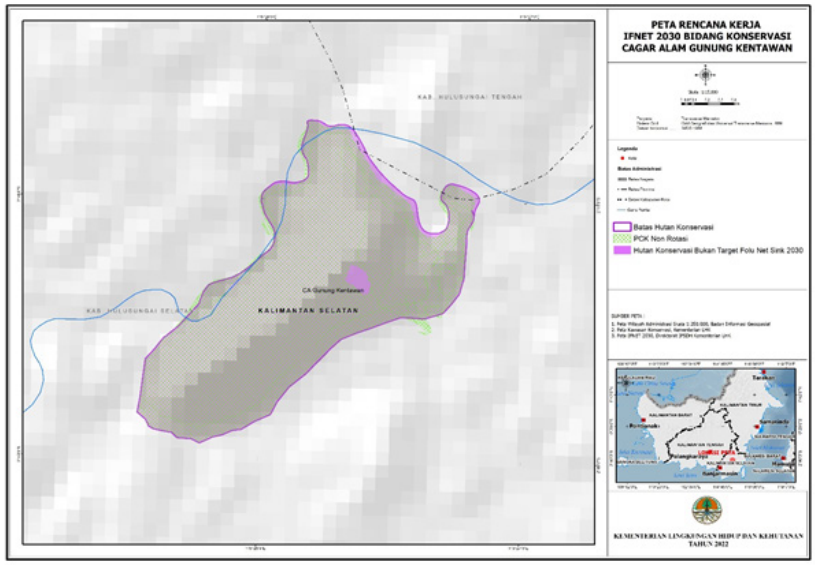

GAMBAR 40 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Gunung Kentawan

TABEL 47 | Luas kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di CA Gunung Kentawan

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-

3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	200
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**200**

3. Suaka Margasatwak Pleihari Tanah Laut

Pleihari Tanah Laut terletak antara 3°59'40" – 4°10'40" Lintang Selatan dan 114°41'20" – 114°56'00" Bujur Timur. Unit KK ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 695/Kpts-II/91 tanggal 10 November 1999. Kemudian terjadi perubahan berdasarkan SK Menhut No.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan kawasan hutan di SM Pleihari mengalami penambahan luasan dengan luas seluruhnya 6.647 Ha. SM. Permasalahan utama area ini adalah luasan nya yang mengalami perubahan beberapa kali. Dengan demikian Peluang terjadinya silang sengketa antar-pihak dalam pemanfaatan ruang akan sangat besar.

Secara umum area ini terbagi menjadi beberapa ekosistem diantaranya adalah Hutan pantai, hutan payau, hutan rawa, hutan dataran rendah, dan hutan mangrove. Sekitar tiga perempat luas SMPTL adalah lahan basah. Lahan basah ini antara lain berupa hutan rawa, hutan mangrove,dan pertambakan

Jenis tumbuhan yang umum dijumpai di area ini adalah galam (*Melaleuca sp*), mahoni (*Shorea belangeran*), nipah (*Nipa fruticans*), renghas (*Gluta renghas*), rambai (*Sonneratia sp*), jambu (*Eugenia sp*), bakau (*Rhizopora sp*), pulatan (*Alstonia sp*), api-api (*Avicennia sp*), tancang (*Bruguiera sp*), panggang (*Ficus sp*), pandan (*Pandanus tectorius*). Berdasarkan analisis dari indeks biogeofisik, diketahui bahwa lokasi ini memiliki nilai indeks yang tergolong tinggi, dengan indeks emisi tinggi, dan indeks kebakaran dan serapan rendah.

Dengan adanya aktivitas masyarakat yang sering membuka tambak inilah yang menjadikan kawasan SM ini semakin terbuka dan berkurang luasannya. Berdasarkan peta *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* , diketahui bahwa luasan lokasi indikatif kegiatan indikatif di SM ini adalah seluas 4.879 Ha (**Gambar 41 dan Tabel 50**), dimana lebih dari setengah luasan SM. Kegiatan mitigasi yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan cadangan karbon, dan seluas 191,95 Ha yang dipertahankan untuk mencegah diforestasi. Faktanya, pihak BKSDA Kalimantan Selatan sebenarnya telah melakukan beberapa kegiatan rehabilitasi. Pada Tahun 2010 melakukan pengkayaan galam (*Melaleuca cajuputi*) sebagai tanaman endemik kawasn SM pelaihari seluas ± 500 Ha dan tahun 2011 ± 450 Ha seluas kemudian di tahun 2013 dilakukan rehabilitas hutan di areal mangrove seluas 100 Ha dengan jenis bakau (*Rhizopora mucronata*).

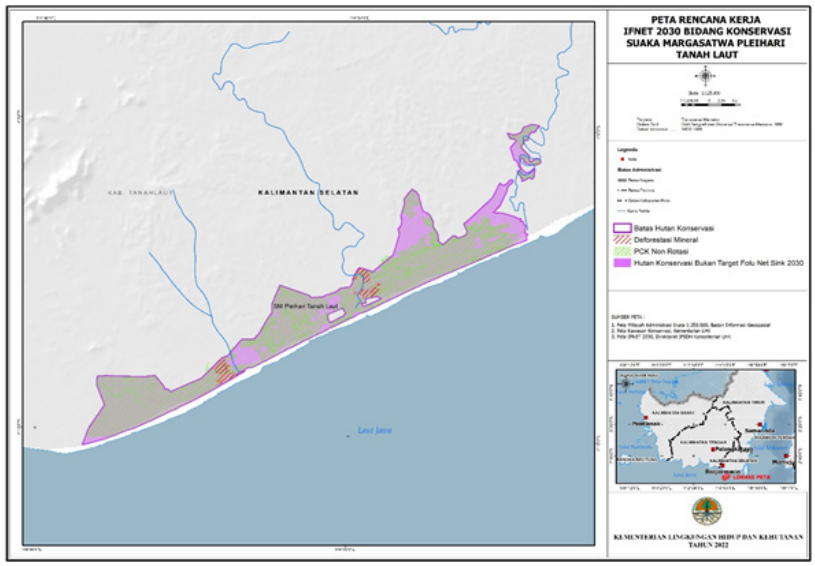

GAMBAR 41 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pleihari Tanah Laut

TABEL 48 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pleihari Tanah Laut

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	191.95
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	4,879
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**5,070.95**

4. Taman Wisata Alam Pulau Bakut

Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Bakut ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 140/Kpts-II/2003 tanggal 21 April 2003 dengan luas 18,70 Ha. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai site monitoring spesies prioritas terancam punah Bekantan di Kalimantan Selatan sejak Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BKSDA Kalsel Nomor : SK. 1653/IV-K.23/KKH/2012 tanggal 31 Juli 2012. Penetapan ini dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) meningkatkan populasi spesies terancam punah sebanyak 3% dan mengacu pada peta jalan peningkatan populasi 14 spesies prioritas utama terancam punah untuk menetapkan area monitoring.

Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Bakut bertopografi datar dan merupakan kawasan

hutan berbentuk pulau yang ada di tengah Sungai Barito dan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala 2011-2031, Pulau Bakut merupakan kawasan lindung dan kawasan peruntukan pariwisata yang menjadi satu paket dengan Jembatan Barito (daya tarik pemandangan sungai dan Pulau Bakut). Wisata Pulau Bakut juga terintegrasi dalam Rencana Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Indeks kebakaran di wilayah ini tergolong sedang (2), dengan indeks lainnya tergolong rendah (1).

Kawasan ini memiliki ekosistem mangrove, beberapa jenis lora yang mendominasi antara lain Api-api (Avicenia spp), Tinjang (Rhizophora apiculata), Pedada Bogem (Sonneratia alba), Nyiirih (Xilocarpus granatum) dan Tancang (Bruguiera gymnorrixa). Mengingat fungsi kawasan yang diperuntukkan untuk Taman Wisata Alam, maka kegiatan mitigasi yang dilakukan di pulau ini tentunya juga harus memperhatikan hal tersebut. Kegiatan mitigasi yang akan dilakukan berupa PCK di area seluas 20 Ha (Gambar 42 dan Tabel 51). Kegiatan ini nantinya diharuskan untuk bisa menyediakan habitat bagi bekantan yang menjadi daya tarik pulau ini.

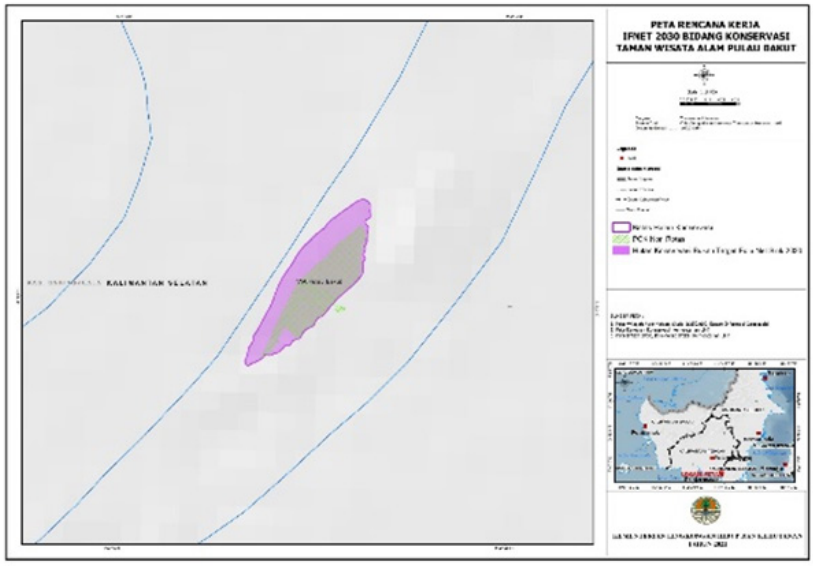

GAMBAR 42 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pleihari Tanah Laut

TABEL 49 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Pulau Bakut

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-

4	Non-Rotasi (PCK)	20
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**20**

5. Suaka Margasatwa Pulau Kaget

Kawasan Suaka Margasatwa Pulau Kaget pada tahun 1976 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 701/Kpts/Um/11/1976 tanggal 6 November 1976 dengan luas 63,60 ha dan pada tahun 1999 Kawasan Suaka Margasatwa Pulau Kaget ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 337/Kpts-II/1999 tanggal 24 Mei 1999 dengan luas 63.60 Ha,

Kawasan hutan yang ditunjuk awalnya terdiri atas tipe ekosistem hutan daratan rendah, hutan rawa air tawar dan padang rumput (alang-alang) yang cukup luas, ditambah hutan mangrove dan hutan pantai. Sebagian besar kawasan tersebut berupa ekosistem hutan mangrove yang merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Ekosistem mangrove bersifat kompleks, dinamis dan labil. Flora yang ada di kawasan ini terdiri dari Galam (*Melaleyca sp*), Meranti (*Shorea belangeran*), Nipah (*Nipa fruticans*), Renghas (*Gluta renghas*), Rambai (*Sonneratia sp*), Jambu (*Eugenia sp*), Bakau (*Rhizopora sp*), Pulatan (*Alstonia sp*), Api-api (*Avicennia sp*), Tancang (*Bruguiera sp*), Panggang (*Ficus sp*).

Permasalahan utama yang ada di unit Kawasan Konservasi ini adalah adanya masyarakat yang masih mengklaim lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan sawah. Bagi masyarakat yang menjadikan kawasan Pulau Kaget sebagai lahan persawahan, ini merupakan mata pencaharian utama dan vital sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali bersawah di lahan yang ada. Nantinya penting untuk bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat, namun tanpa mengurangi atau mengganggu fungsi kawasan konservasi ini. Berdasarkan indeks biogeofisik, diketahui bahwa indeks kebakaran di lokasi ini tergolong sedang, dengan indeks lainnya tergolong rendah (emisi dan serapan).

Sama halnya dengan TWA Pulau Bakut area ini memiliki fungsi penting sebagai habitat bekantan. Luasan pulau yang akan dijadikan sebagai lokasi indikatif kegiatan PCK adalah 100 Ha (**Gambar 43 dan Tabel 52**). Meskipun demikian, sebenarnya pemerintah setempat Bersama BKSDA telah beberapa kali menggalakkan kegiatan penanaman dan juga pemeliharaan tumbuhan yang ada di lokasi pulau ini.

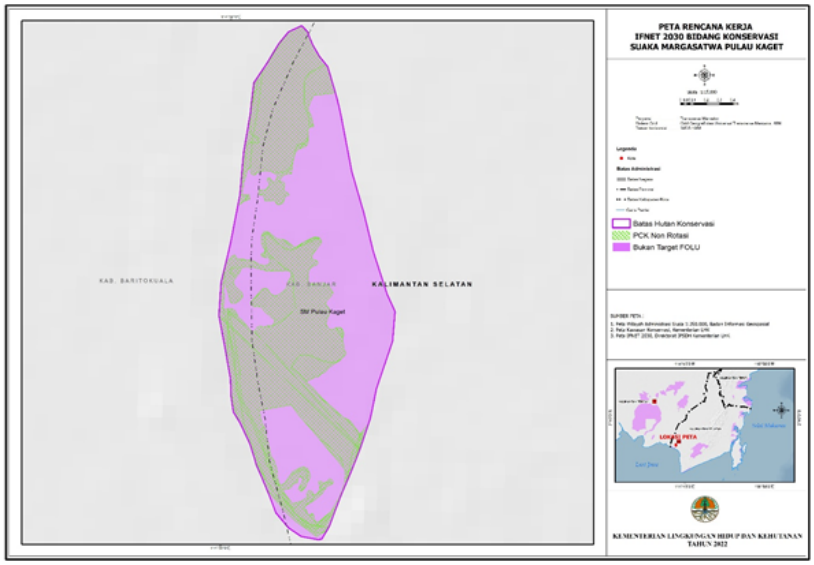

GAMBAR 43 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pulau Kaget

TABEL 50 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pulau Kaget

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	100
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**100**

6. Suaka Margasatwa Kuala Lupak

Kawasan Suaka Margasatwa Kuala Lupak ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Kpts/II/1999 tanggal 17 Juni 1999 dengan luas 3.375 Ha. Secara geografis terletak diantara 3o26'30" – 3o29'55" Lintang Selatan, 114o22'30" – 114o29'20" Bujur Timur. Kawasan hutan yang ditunjuk terdiri atas tipe ekosistem hutan daratan rendah, hutan rawa air tawar dan padang rumput (alang-alang) yang cukup luas, ditambah hutan mangrove dan hutan pantai. Jenis tumbuhan yang mayoritas dijumpai di area ini adalah Nipah (*Nipa fruticans*), Renghas (*Gluta renghas*), Rambai (*Sonneratia sp*), Jambu (*Eugenia sp*), Pulatan (*Alstonia sp*), Api-api (*Avicennia sp*), Tancang (*Bruguiera sp*), Panggang (*Ficus sp*), Pandan (*Pandanus tectorius*).

Permasalahan utama di area ini adalah masyarakat yang masih sering mengklaim kawasannya menjadi pertambakan, sehingga menyebabkan peningkatan luasan opened area dan perubahan peruntukkan kawasan. Hal ini sesuai dengan hasil analisis peta indeks biogeofisik di wilayah ini yang tergolong agak tinggi, terdiri dari indeks emisi tinggi, indeks kebakran sedang, dan indeks serapan rendah. Sejarah konflik penggunaan lahan untuk pertambakan di dalam kawasan SM. Kuala Lupak ini diawali dengan masuknya masyarakat pendatang dari Suku Bugis pada tahun 1997 untuk melakukan aktivitas bertambak di dalam kawasan. Sebenarnya saat ini telah dilakukan beberapa kegiatan yang dimaksudkan untuk pemulihan ekosistem. Salah satunya adalah inisiasi dengan mitra dalam rangka penanaman mangrove disertai dengan pemeliharaan lanjutan yang dilakukan melalui Kerjasama dengan pihak ketiga/swasta. Kegiatan mitigasi yang dilakukan di area ini nantinya akan dilaksanakan di lahan seluas 400 Ha untuk peningkatan cadangan karbon serta 10 Ha untuk ENR (**Gambar 44 dan Tabel 53**). Mayoritas kawasan yang berupa mangrove tentunya harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi.

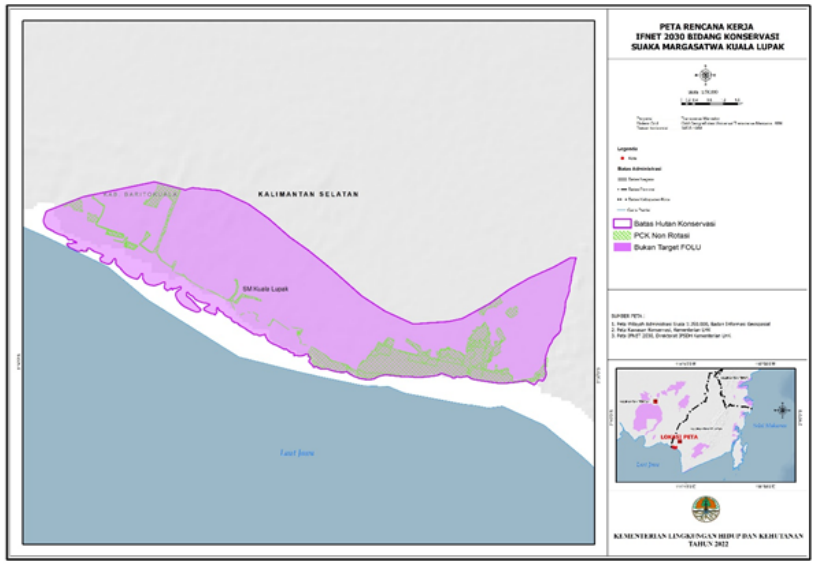

GAMBAR 44 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Kuala Lupak

TABEL 51 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Kuala Lupak

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	10

4	Non-Rotasi (PCK)	400
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**410**

7. Taman Wisata Alam Pulau Burung dan Suwangi

Unit Kawasan Konservasi ini masih tergolong baru. TWA Pulau Burung dan Suwangi ditunjuk sejak tahun 2019 dengan luas ± 1.239 Ha, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 652/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 yang Terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Burung dengan luas ± 545 Ha dan Pulau Suwangi dengan luas ± 694 Ha. Unit Kawasan Konservasi ini awalnya menyandang status sebagai Cagar Alam, namun kemudian atas aspirasi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama masyarakatnya pada akhirnya dirubahlah statusnya menjadi TWA.

Sesuai Namanya Kawasan ini memiliki formasi ekosistem pantai, mangrove dan hutan dataran rendah, juga merupakan habitat bekantan dan berbagai jenis burung, termasuk burung terestrial dan jenis - jenis burung pantai/litoreal, Kawasan ini mayoritas berupa lahan basah yang dimanfaatkan oleh burung untuk mencari pakan. Tingginya persentase lahan basah di wilayah inilah yang menjadikannya terpilih sebagai lokasi indikatif kegiatan mitigasi.

Dalam pelaksanaannya 500 Ha area TWA akan dijadikan sebagai lokasi indikatif untuk kegiatan PCK (Gambar 45 dan Tabel 54). Akan tetapi, nantinya dalam pelaksanaan pemilihan lokasi pastinya harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti pertimbangan area untuk pakan burung.

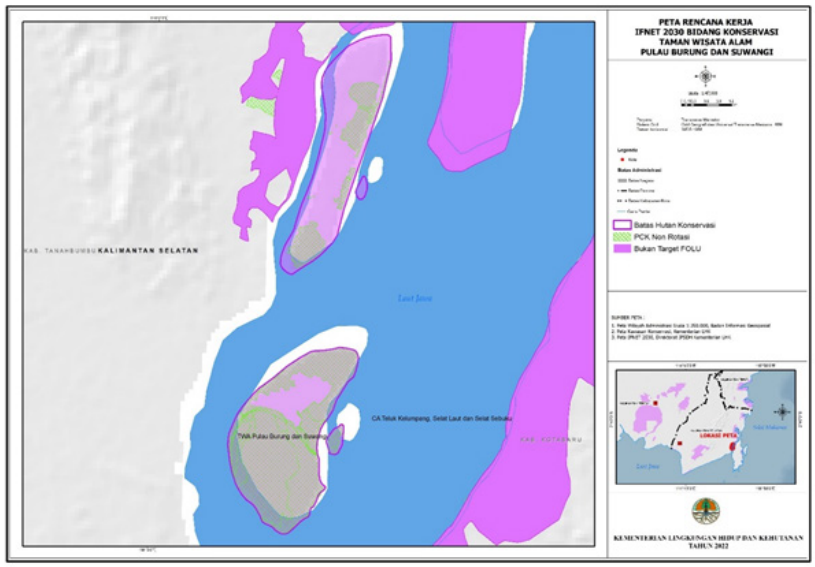

GAMBAR 45 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Pulau Burung dan Suwangi

TABEL 51 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Pulau Burung dan Suwangi

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	500
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**500**

B.6.9 Provinsi Kalimantan Timur

Data menunjukkan sebanyak 57% kawasan konservasi di provinsi Kalimantan Timur memiliki total nilai IBGF tinggi (8), hal ini menunjukkan perlu diadakannya penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas lahan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan.

1. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang

Kawasan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan koordinat 00° 25' 50'' LU - 00° 10' 00'' LS dan 116° 38' 00'' - 116° 50' 00'' BT. Cagar alam ini ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 598/Kpts-II/1995 tanggal 10 Mei 1976 dengan luas ± 62.500,70 Ha dan bertujuan untuk melindungi kondisi alam yang masih asli di ekosistem tersebut dengan mewakili formasi ekosistem hutan rawa dan perairan tawar yang merupakan habitat alami terutama lumba-lumba air tawar/pesut (*Orcaella brevirostris*) dan resevat bagi jenis-jenis ikan air tawar, flora, dan fauna lain di dalamnya (KLHK, 2016).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Cagar Alam Muara Kaman Sedulang memiliki resiko IBGF emisi yang rendah, serta IBGF kebakaran dan serapan yang sedang. Lokasi yang menjadi area PCK di cagar alam ini adalah seluas 49.358 Ha, dan juga terdapat kegiatan-kegiatan lainnya untuk memperbaiki adanya open area seperti pencegahan deforestasi dan juga restorasi gambut (**Gambar 46 dan Tabel 55**).

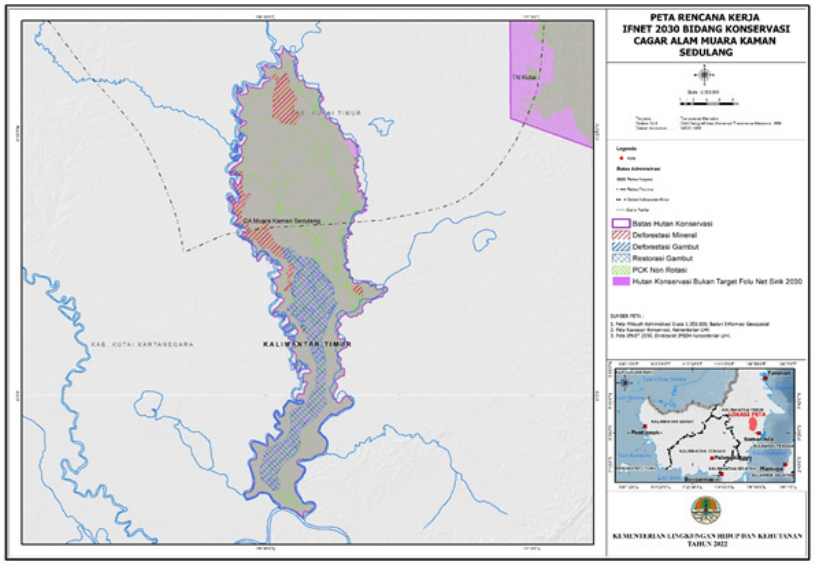

GAMBAR 46 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Muara Kaman Sedulang

TABEL 53 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Muara Kaman Sedulang

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	4,122.70
2	Deforestrasi Gambut	169.77
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	49,358
5	Restorasi Gambut	2,000
Total Keseluruhan		**55,650.47**

2. Cagar Alam Teluk Adang

Cagar Alam Teluk Adang terletak pada koordinat 00° 45' 00'' - 02° 28' 20'' LS dan 116° 00' 00'' - 117° 00' 00'' BT di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Cagar alam ini ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan luas ± 61.900 Ha dengan tujuan untuk melindungi kondisi alam yang masih asli di ekosistem tersebut (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), cagar alam ini mewakili formasi hutan mangrove dan jenis-jenis flora dan fauna yang ada di dalamnya. Tipe ekosistem yang berada pada Cagar Alam Teluk Adang mencakup: 1) Ekosistem Hutan Mangrove, 2) Ekosistem Hutan Rawa Air Tawar, 3) Ekosistem Hutan Kerangas, dan 4) Ekosistem Hutan Dataran Rendah. Flora yang terdapat di cagar alam ini adalah Bangkirai (*Shorea laevifolia*), Mata Kucing (*Hopea sangal*),

Keruing (*Dipterocarpus sp*), Kapur (*Dryobalanops sp*), Resak (*Vatica subcordata*), Tengkawang (*Shorea stenoptera*), Meranti Putih (*Shorea virescens*), Meranti Kuning (*Shorea platycados*), dll. Jenis fauna yang terdapat di cagar alam ini adalah mamalia, Bekantan (*Nasalis larvatus*), Owa (*Hylobates mulleri*), Monyet ekor panjang (*Maccaca fascicularis*), Lutung dahi putih (*Presbytis frontata*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Macan Dahan (*Neofelis nebulosa*), Landak (*Hystryx brachyura*), dll.

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Cagar Alam Teluk Adang memiliki resiko IBGF emisi dan kebakaran yang sedang, serta IBGF serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di cagar alam ini adalah seluas 4.800 Ha (Gambar 47 dan Tabel 56), dan juga dilakukan kegiatan-kegiatan lainnya untuk pemulihan *opened area*.

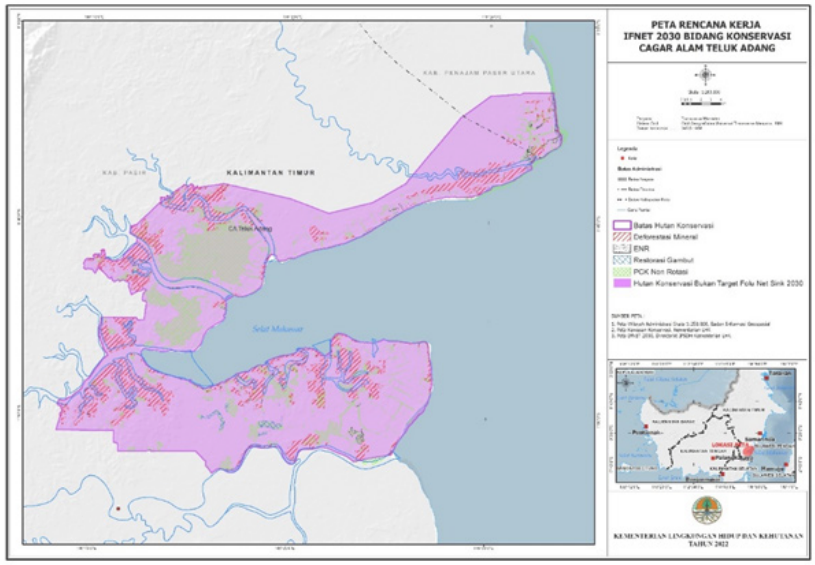

GAMBAR 47 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk Adang

TABEL 54 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk Adang

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	9,279.53
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	100
4	Non-Rotasi (PCK)	4,800
5	Restorasi Gambut	100
Total Keseluruhan		**14,279.53**

3. Suaka Margasatwa Pulau Semama

Suaka Margasatwa Pulau Semama ditunjuk dengan SK. Menteri Pertanian No. 604/ Kpts-II/Um/8/1982 tanggal 19 Agustus 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan beserta perairannya seluas ± 220 Ha yang terletak di Daerah Tk. II Berau, Daerah Tk. I Kalimantan Timur sebagai Suaka Margasatwa dan Penunjukan Areal Hutan Pulau Sangalaki beserta perairannya seluas ± 280 Ha yang terletak di Daerah Tk.II Berau, Daerah Tk.I Kalimantan Timur sebagai Taman Laut. Tujuan penunjukan tersebut adalah untuk melindungi fauna yang khas terutama tempat hidup dan berkembang biak penyu dengan keragaman populasi yang tinggi (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), jenis flora Pulau Semama memiliki kekhasan karena hutan mangrove yang ada langsung berbatasan dengan karang hidup. Jenis yang mampu tumbuh di atas karang hidup atau mati adalah *Rhizopora stylosa*. Jenis fauna yang terdapat di kawasan ini adalah Penyu hijau (*Chelonia mydas*), biawak (*Varanus salvator*), burung gosong (*Falconidius freicynet Reinward*), punai (*Treron olax*), raja udang (*Halcyon capensis*), Pergam (*Ducula aenea*), dara laut jambul besar (*Sterna bergii*), dara laut jambul kecil (*Sterna bengelansis*), kuntul karang (*Egretta sacra*), lumba-lumba (*Ziphiicae/Dolphinidae*), dan Elang (*Accipter sp*). Tipe ekosistem kawasan ini adalah hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

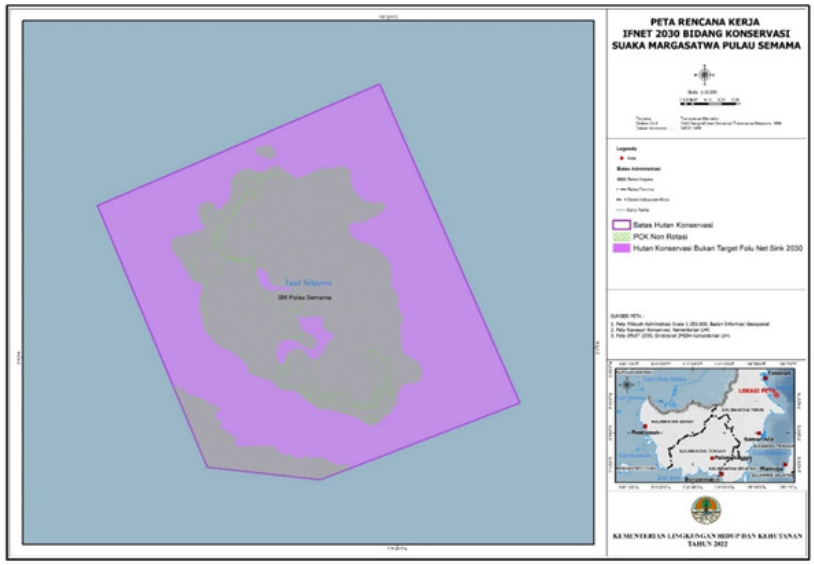

GAMBAR 48 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pulau Semama

TABEL 55 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Pulau Semama

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-

3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	20
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**20**

4. Cagar Alam Teluk Apar

Cagar Alam Teluk Apar ditetapkan dengan SK. Menhut No. 86/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Teluk Apar, yang terletak di Kabupaten Tingkat II Pasir, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 46.900 Ha. sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Cagar Alam pada tanggal 16 Februari 1993 dengan luas ± 46.900 Ha. Cagar alam ini berlokasi di Kabupaten Tingkat II Pasir, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), tujuan penunjukan cagar alam ini adalah untuk melindungi kondisi alam yang masih asli di ekosistem tersebut mencakup hutan mangrove dan jenis-jenis flora dan fauna yang ada di dalamnya. Jenis flora yang ada di kawasan ini adalah Api-api (*Avicenia marina*), Avicenia alba, Tancang (*Soneratia alba*), Lenggadai (*Aegiceros corniculatus*), *Rhyzopora mucronata, Ceriops decandra,* (*Bruguiera parvifolia*), *Bruguiera sexagula, Nipah (Nypa sp)*. Jenis fauna yang terdapat di kawasan ini adalah Bekantan (*Nasalis larvatus*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung dahi putih (*Presbytis frontata*), Raja udang (*Halcyon capensis*), Cucak rowo (*Pycnonotus zeylenicus*), Elang (*Accipiter sp*), Walet Coklat (*Callocalia fuciphaga*), Layang-layang (*Hemiproene longipernis*), Srigunting (*Dicrurus paradiseus*), Burung kipas (*Rhipidura perlata*), Trinil (*Actitis hypoleucas*), Jog-jog (*Pycnonotus goavier*), Biawak (*Varanus salvator*), Ular sanca (*Phyton reticulatus*), Kadal (*Mabouya multifasciata*), Buaya muara (*Crocodylus porossus*), Ular tambak (*Cerberus rhynchops*), Tempakul (*Periopthalmus sp*), dan Katak (*Rana sp*).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan Cagar Alam Teluk Apar memiliki resiko IBGF emisi dan kebakaran yang sedang, serta serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di cagar alam ini adalah seluas 14.348 Ha (**Gambar 49 dan Tabel 58**), dan juga kegiatan-kegiatan lainnya untuk menjamin kondisi tutupan di lokasi.

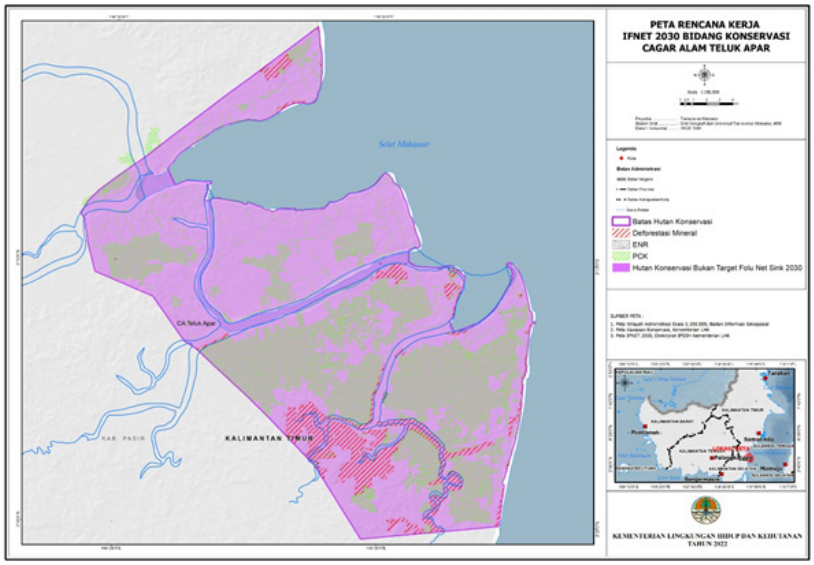

GAMBAR 49 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk Apar

TABEL 55 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Teluk Apar

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	3,676.81
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	15
4	Non-Rotasi (PCK)	14,348
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**18,039.81**

5. Taman Nasional Kutai

Dengan luas 1.986 km², Taman Nasional Kutai ditetapkan pada tahun 1982. Taman Nasional Kutai memiliki berbagai tipe vegetasi utama yaitu vegetasi hutan pantai/ mangrove, hutan rawa air tawar, hutan kerangas, hutan rawa dataran rendah, dan hutan *Dipterocarpaceae* campuran. Taman nasional ini merupakan perwakilan hutan ulin yang paling luas di Indonesia. Taman nasional ini membentang di sepanjang garis khatulistiwa dari pantai Selat Makasar sebagai batas bagian Timur menuju arah daratan sepanjang kurang lebih 65 km (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), pada awalnya Pemerintah Belanda menunjuk kawasan ini untuk Hutan Persediaan dengan luas 2.000.000 Ha. Pemerintah Kerajaan Kutai kemudian menetapkannya menjadi Suaka Margasatwa Kutai dengan luas 306.000 ha. Secara umum

kawasan Taman Nasional Kutai merupakan dataran rendah. Jenis flora yang ada di taman nasional di antaranya bakau (*Rhizophora sp*), tancang (*Bruguiera sp*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), simpur (*Dillenia sp*), meranti (*Shorea sp*), benuang (*Octomeles sumatrana*), kapur (*Dryobalanops sp*), dan yang lain. Jenis fauna yang dimiliki taman nasional ini sebagian besar dari kelompok primata seperti orangutan (*Pongo satyrus*), dan lainya.

Wangke (2017) menyebutkan bahwa TN Kutai membentuk Mitra Kutai dengan sembilan perusahaan ekstraksi di sekitar TN Kutai. Namun fungsinya hanya sebatas berkontribusi dalam pendanaan, belum dilibatkan secara substantif. Komunikasi dan transparansi yang lebih baik antar pihak terkait dibutuhkan untuk membangun sistem yang berkelanjutan termasuk FOLU. Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan Taman Nasional Kutai memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di cagar alam ini adalah seluas 40.000 Ha (**Gambar 50 dan Tabel 59**).

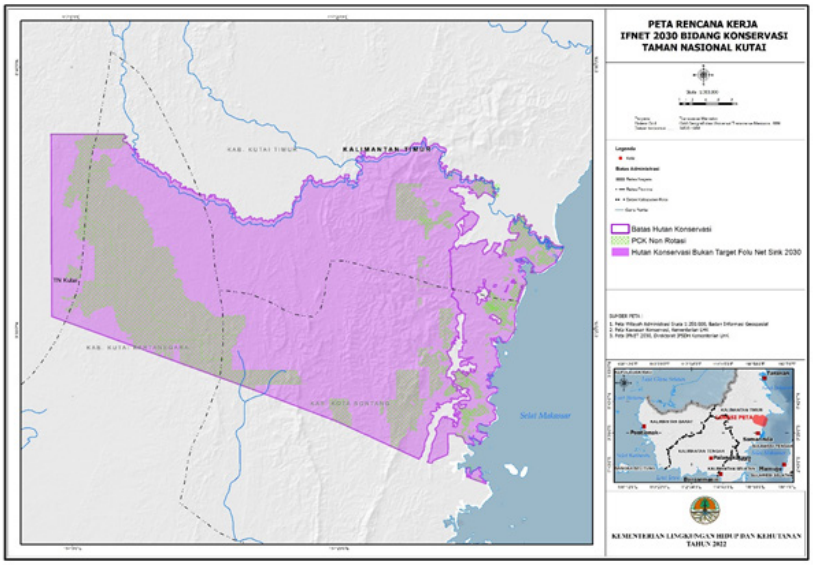

GAMBAR 50 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kutai

TABEL 57 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Kutai

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	40,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**40,000**

6. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Berdasarkan geografis kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (Tahura Bukit Soeharto) terletak antara 0˚41'LS sampai dengan 1˚05' LS dan 116˚36' BT sampai dengan 117˚10' BT. Tahura Bukit Soeharto terletak Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas ± 61.850 Ha. Kawasan ini ditunjuk sebagai Taman Hutan Raya Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 Ha.

Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto memiliki tipe ekosistem hutan yang lengkap dari pantai ke perbukitan, yang meliputi antara lain: hutan campuran Dipterocarpaceae dataran rendah, hutan kerangas, hutan rawa, hutan pantai, dan yang terdegradasi menjadi semak belukar dan alang-alang (PT. ITCI, 2010; Laporan BKSDA, 2003). Mayoritas lokasi Tahura didominasi oleh semak belukar dan juga masih dijumpai penggunaan lahan yang belum sesuai dengan peruntukan kawasan diantaranya adalah pertambangan, pertanian lahan kering campuran, pertanian lahan kering, tanah terbuka/kosong, pemukiman, tambak/perikanan dan perkebunan dengan luasan seluas 14.425,05 Ha (21,29%) dari luas kawasan Taman hutan Raya Bukit Soeharto (Suryadi *et al.* 2017).

Hasil analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Tahura Bukit Soeharto masuk ke dalam wilayah dengan risiko IBGF emisi sedang, IBGF kebakaran sedang, dan IBGF serapan tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan di wilayah THR Bukit Soeharto diketahui bahwa kondisi kawasan hutan ini sudah sangat terdegradasi, rapuh, serta terancam akibat berbagai faktor. Berdasarkan peta indikatif *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* diketahui bahwa, luasan tahura yang akan dijadikan sebagai lokasi kegiatan PCK adalah seluas 8.783 Ha, dan juga pencegahan deforestasi seluas 10.173,73 Ha (**Gambar 51 dan Tabel 60**). Dengan demikian, adanya program *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dengan kegiatan mitigasinya diharapkan mampu untuk bisa mengurangi dan memperbaiki kerusakan ekosistem yang terjadi.

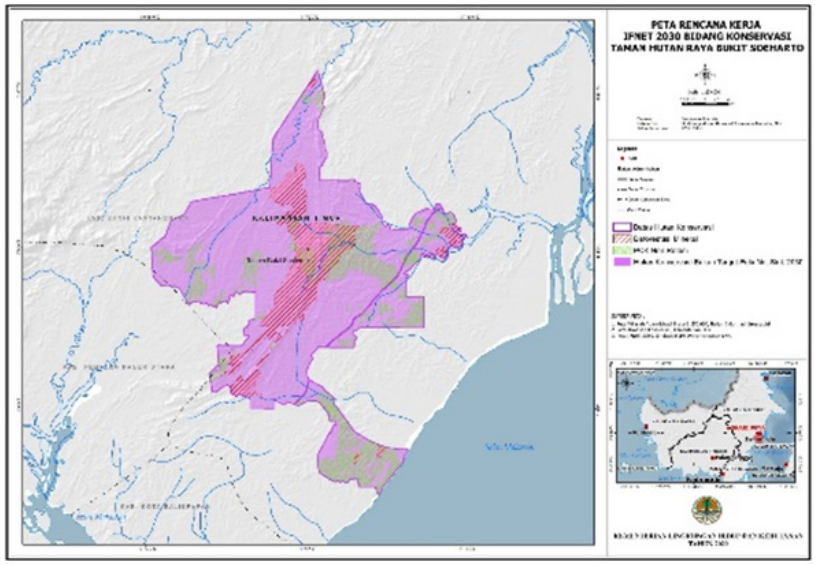

GAMBAR 51 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di THR Bukit Soeharto

TABEL 58 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di THR Bukit Soeharto

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	10,173.73
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	8,783
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**18,956.73**

7. Hutan Raya Lati Petangis

Tahura Lati Petangis secara geografis terletak antara 116°3'40,996" BT – 116°6'21,502" BT dan antara 2°2'30,786"LS – 2°9'24,983"LS dan secara administrasi pemerintahan terletak di Kabupaten Paser dan masuk dalam administrasi pemerintahan Kecamatan Batu Engau. Kawasan Tahura Lati Petangis termasuk dalam tipe hutan dataran rendah. Hutan dataran rendah adalah bentuk hutan yang terletak setelah hutan pantai. Sesuai dengan namanya, hutan ini tumbuh berkembang di wilayah dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 5 hingga 1.000 mdpl. Pada umumnya, kawasan hutan jenis ini menjadi habitat pepohonan yang berasal dari famili Dipterocarpaceae. Adapun marga dari famili 16 tersebut antara lain: Vatica, Dryobalanops, Cotylelobium, Shorea, Balanocarpus, Hopea, Parashorea, Dipterocarpus dan Anisoptera. Tahura Lati Petangis

terbagi menjadi beberapa fragmen ekosistem yaitu : Hutan Alam Sekunder, Areal reklamasi pasca tambang, area peternakan sapi, perkebunan kelapa sawit, dan areal terbuka bekas terbakar/ladang.

Wilayah Tahura Lati Petangis sebagian merupakan areal bekas tambang dengan tutupan vegetasi yang ada berupa hutan sekunder, hutan tanaman hasil revegetasi, belukar, kebun kelapa sawit, dan semak. Sebagian besar wilayah memiliki aksesibilitas cukup tinggi sehingga menimbulkan terjadinya perambahan wilayah Tahura untuk kebun kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di area ini mencapai 446.02 Ha. Tahura Lati Petangis memiliki nilai indeks biogeofisik yang tergolong sangat tinggi (8), dengan komposisi IBGF emisi tinggi, IBGF Kebakaran tinggi, serta IBGF serapan sedang.

Taman Hutan Raya (Tahura) Lati Petangis diarahkan untuk mengemban fungsi Tahura sebagai kawasan pelestarian tumbuhan dan satwa yang alami maupun non-alami serta spesies asli setempat maupun spesies introduksi. Tahura Lati Petangis merupakan area pelestarian alam yang ditetapkan sejak September tahun 2015. Saat ini pengelolaannya telah menghadapi suatu permasalahan yang cukup serius yaitu kerusakan ekosistem akibat perubahan kondisi vegetasi. Kerusakan kondisi ekosistem ini disebabkan oleh beragam faktor seperti kebakaran, penebangan liar, kegagalan regenerasi vegetasi, dan perambahan kawasan hutan.

Luas kawasan Tahura Lati Petangis berdasarkan data spasial mencapai 3.445,37 ha yang berada pada lingkup 3 wilayah administrasi desa, yaitu Desa Saing Prupuk, Desa Petangis, dan Desa Tebru Paser Damai. Untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan pengelolaan, kawasan Tahura Lati Petangis dibagi menjadi 5 blok, yaitu blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok khusus, blok rehabilitasi, dan blok koleksi. Kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan Tahura Lati Petangis saat ini terfokus pada kawasan blok rehabilitasi yang mencapai 1.284,9 ha.

Jenis kegiatan pemulihan ekosistem kawasan Tahura Lati Petangis selama periode 2020 s.d. 2024 adalah dengan cara mekanisme alami dan cara mekanisme restorasi melalui kegiatan penanaman dan pembinaan habitat. Mekanisme restorasi melalui kegiatan penanaman dilakukan pada kawasan yang mengalami kerusakan berat khususnya area bekas hutan tanaman dan lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di dalam Kawasan Tahura Lati Petangis. Luas kawasan yang ditargetkan untuk dipulihkan selama periode 2020 s.d. 2024 adalah seluas 3.445,37 hektar dengan prioritas pada lahan seluas 1.284,9 hektar yang berada di kawasan blok rehabilitasi.

Adanya rencana pemulihan ekosistem yang akan dilaksanakan di area Tahura Lati Petangis tentunya dapat disinkronisasikan dengan kegiatan mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 . Dengan demikian kegiatan pemulihan ekosistem serta penanganan opened area (Indonesia's FOLU Net Sink 2030) dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, luasan area untuk mitigasi melalui kegiatan PCK adalah 1.009 Ha (Gambar 52 dan Tabel 61), dimanah luasan ini masih dapat dijangkau dan masih berada di bawah luasan area yang akan direhabilitasi oleh pengelola.

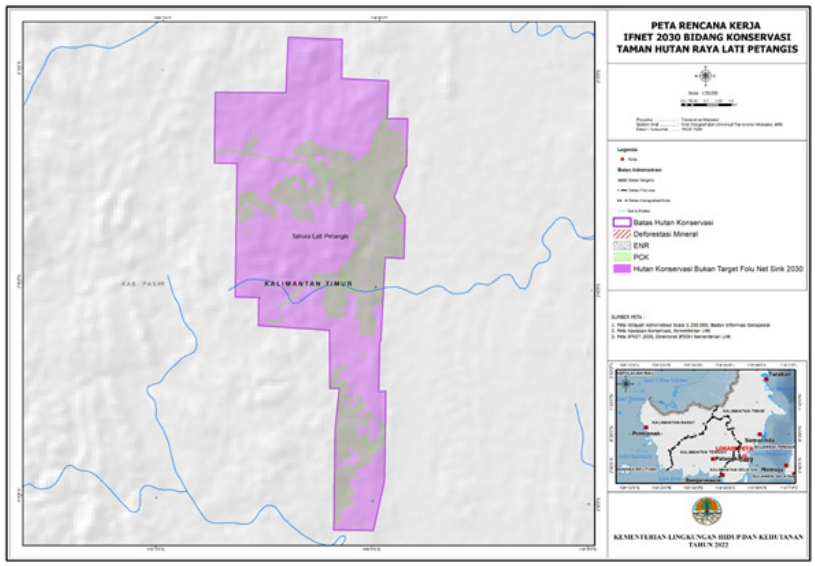

GAMBAR 52 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di THR Lati Petangis

TABEL 59 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di THR Lati Petangis

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	1,009
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**1,009**

B.6.10 Provinsi Kalimantan Barat

Terdapat 36.36% kawasan konservasi di Kalimantan Barat yang memiliki total nilai IBGF tinggi, salah satunya adalah CA Muara Kendawangan dengan total nilai 8. Hal ini menunjukkan telah terjadinya perubahan penggunaan lahan. Penelitian Juniarti dan Rusniarsya (2021) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menanam karet, sawit, dan tumbuhan pertanian untuk mengoptimalkan pendapatan ekonomi. Maka perlu dilakukan penanaman untuk meminimalisir dampak dari emisi dan karhutla.

1. Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh

Unit TAHURA Pandan yang Puloh seluas ± 16.300 Ha berlokasi di Kabupaten Landak dan Bengkayang, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor

150 Tahun 2016. Adapun yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan telnis penunjang adalah Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh. Kondisi tutupan yang masih cukup terjaga menjadikan lokasi ini cocok dijadikan sebagai area untuk pencegahan deforestasi (**Gambar 53 dan Tabel 62**).

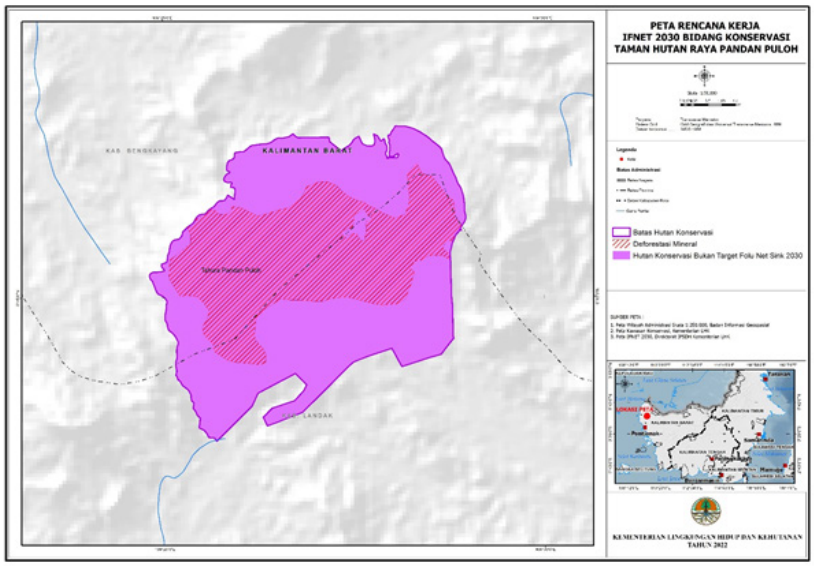

GAMBAR 52 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TAHURA Pandan Puloh

TABEL 60 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TAHURA Pandan Puloh

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	1,676.79
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**1,676.79**

2. Cagar Alam Mandor

Cagar Alam Mandor terletak di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Letak titik koordinat cagar alam ini adalah 00°15' - 00°20' LU dan 109°18' - 109°23' BT. Cagar alam ini ditetapkan dengan SK. Het Zelfbestuur Van Het Landschap Pontianak, Nomor 8 tanggal 16 Maret 1936, yang disahkan oleh De Residen der Westafdeeling Van Borneo pada tanggal 30 Maret 1936 dengan luas 3.080 Ha (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016) cagar alam ini berfungsi sebagai tempat untuk melindungi spesies seperti Anggrek Alam. Di lokasi ini terdapat 15 jenis anggrek dan 8 jenis Nephentes antara lain Anggrek Hitam (Cologyne pandurata), Anggrek Kuping Gajah (Bulbophylum beccarii) dan sebagainya. Jenis flora yang terdapat di kawasan ini antara lain Jelutung (Dyera costulata), Ramin (Gonystylus bancanus), Meranti (Shorea spp), Rengas (Gluta renghas), dan Tengkawang (Shorea stenoptera). Jenis fauna yang terdapat di taman nasional ini antara lain Beruang Madu (Herlactos malayanus), Kelempiau (Hylobates agilis), Babi Hutan (Sus barbatus), Burung Enggang (Buceros rhinoceros), Kukang (Nycticebos coucang) dan lain-lain.

Cagar Alam Mandor sebagian besar merupakan dataran rendah dan perbukitan dengan jenis tanah podsolik. Tipe ekosistem yang terdapat di kawasan ini adalah hutan rawa gambut, hutan hujan dataran rendah dan hutan kerangas (KLHK, 2016).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Cagar Alam Mandor memiliki resiko IBGF emisi dan kebakaran yang sedang, serta IBGF serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di cagar alam ini adalah seluas 734 Ha, dan juga dilakukan juga upaya untuk penanganan opened area melalui kegiatan lainnya pencegahan deforestasi dan ENR (Gambar 54 dan Tabel 63) .

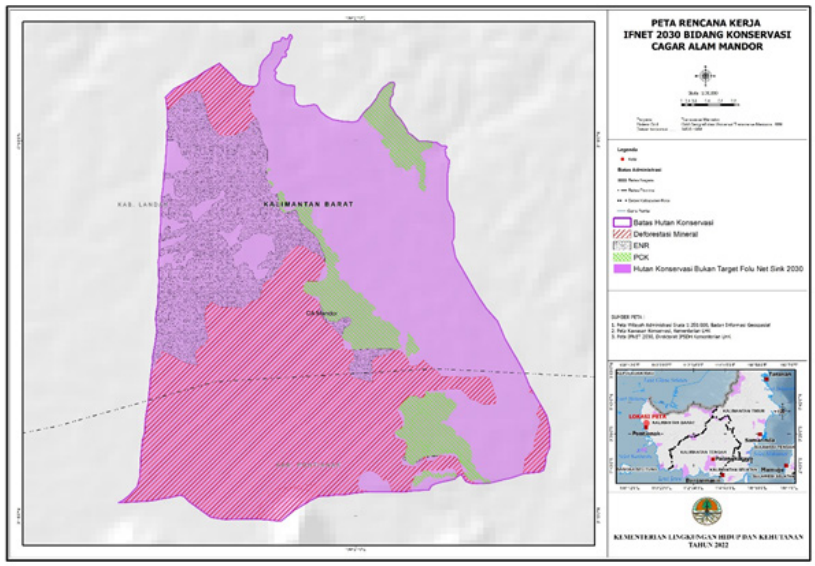

GAMBAR 54 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Mandor

TABEL 61 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Mandor

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	1,150.82
2	Deforestrasi Gambut	-

3	ENR	150
4	Non-Rotasi (PCK)	734
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**2,034.82**

3. Cagar Alam Gunug Raya Pasi

Cagar Alam Raya Pasi secara geografis terletak antara 108º59'00" - 109º07'40" BT dan 0º48'30" - 0º59'00" LU. Cagar ala mini termasuk dalam Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Cagar Alam Raya Pasi ditetapkan dengan SK. Zelfbestuur Van Sambas No. 39 oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 20 Januari 1931 dengan luas 900 Ha. Dalam rangka mempertegas keputusan tersebut SK. Mentan No. 376/Kpts/Um-5/1978 tanggal 20 Mei 1978 dengan luas kawasan 3.742 Ha pun diterbitkan. Berdasarkan SK. Menhut No. 111/Kpts-II/1990 tanggal 14 Maret 1990, Gunung Raya Pasi kemudian ditetapkan menjadi Cagar Alam dengan luas 3.700 Ha (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), Cagar Alam Raya Pasi merupakan jajaran perbukitan dengan ketinggian bervariasi dari 15 hingga 947 m dpl. Perbedaan ketinggian berpengaruh pada vegetasinya. Fungsi penting Cagar Alam Raya Pasi selain kawasan perlindungan adalah untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Kota Singkawang dan sekitarnya. Jenis flora yang ada di cagar alam ini adalah jenis anggrek Bunga Patma (Ralesia tuan-mudae), Bunga Law Belacan (Rhizanthes zippelii) dan berbagai jenis yang lain. Jenis fauna yang terdapat di cagar alam ini adalah Beruang Madu (Herlactos malayanus), Landak (Hysterix branchyura) dan Trenggiling (Manis Javanica).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Cagar Alam Gunung Raya Pasi memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di cagar alam ini adalah seluas 500 Ha (**Gambar 55 dan Tabel 64**).

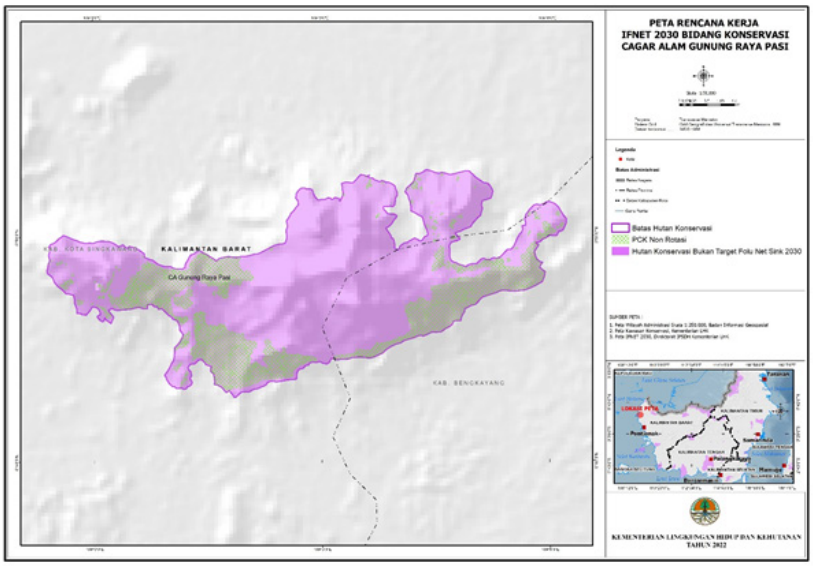

GAMBAR 55 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Gunung Raya Pasi

TABEL 62 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Gunung Raya Pasi

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	500
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**500**

4. Cagar Alam Karimata

Kepulauan Karimata terletak pada 1°25' - 1°50' LS dan 108°40' - 109°10' BT ± 100 Km sebelah barat Kota Ketapang. Kepulauan Karimata ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut dengan luas 77.000 Ha.dengan SK. Menhut No. 381/Kpts-II/1985. Surat Keputusan tersebut kemudian ditegaskan kembali dengan SK. Menhut No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 sebagai Suaka Alam Laut Kepulauan Karimata dengan luas 210.000 Ha (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016) Kepulauan Karimata terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Karimata dan Pulau Serutu serta beberapa pulau yang lain. Topografi kawasan ini berupa dataran rendah sampai dataran tinggi (0 – 1.030 m dpl). Jenis fauna endemik yang ditemui di cagar alam ini adalah Duyung (Dugong-dugong), Tuntong (Batagur baska), dan Kura-

kura Gading (Orlitia borneensis). Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Cagar Alam Karimata memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di cagar alam ini adalah seluas 500 Ha (Gambar 56 dan Tabel 65)

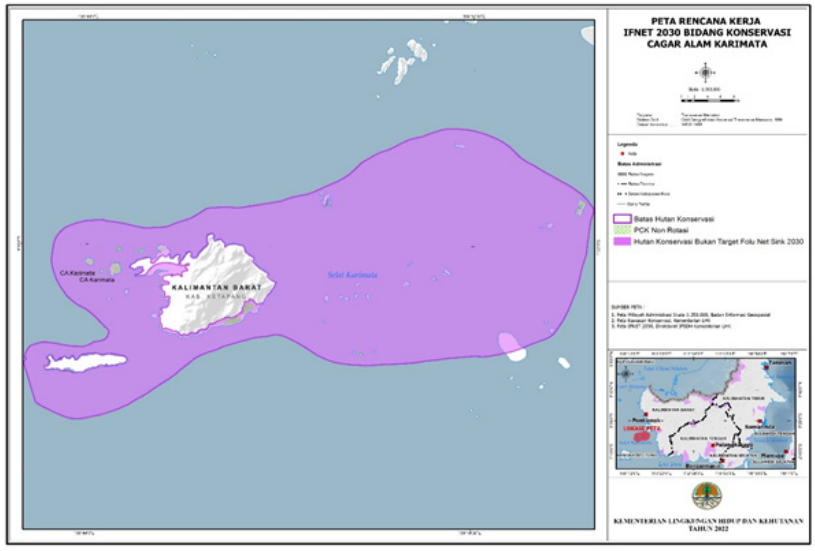

GAMBAR 56 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Karimata

TABEL 63 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Karimata

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	500
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**500**

5. Cagar Alam Nyiut Penrissen

Cagar Alam Gunung Nyiut termasuk wilayah Kabupaten Bengkayang, Sanggau dan Sambas. Kawasan ini ditetapkan pertama kalinya berdasarkan SK. Dirjen Kehutanan No. 2240/DJ/l/1981 tanggal 15 Juni 1981 dengan luas 140.000 Ha dan dipertegas melalui SK. Menhut No. 059/Kpts-II/1988 tanggal 29 Februari 1988 dengan luas 124.500 Ha, kemudian ditetapkan melalui SK. Menhut No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), Cagar Alam Gunung Nyiut berbentuk perbukitan dengan kelerengan sedang sampai curam dengan puncak bukit tertinggi adalah Gunung Nyiut (1.701 m dpl). Kondisi ekosistem pada kawasan ini adalah hutan hujan pegunungan sampai sedang. Potensi flora yang menonjol dari cagar alam ini adalah anggrek dan beberapa jenis langka seperti Bunga Patma (Ralesia tuanmudae).

Hutan hujan pegunungan rendah didominasi jenis Dipterocarpaceae dan Euphorbiaceae sedangkan pada hutan hujan pegunungan sedang didominasi oleh Dipterocarpaceae perbukitan. Jenis satwa liar yang dijumpai umumnya dari beberapa jenis seperti Owa (Hylobates agilis), Orangutan (Pongo pygmaeus), Kera Ekor Panjang (Macaca fascicularis) dan Trenggiling (Manis javanica).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Cagar Alam Nyiut Penrissen memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di cagar alam ini adalah seluas 535 Ha (Gambar 57 dan Tabel 66).

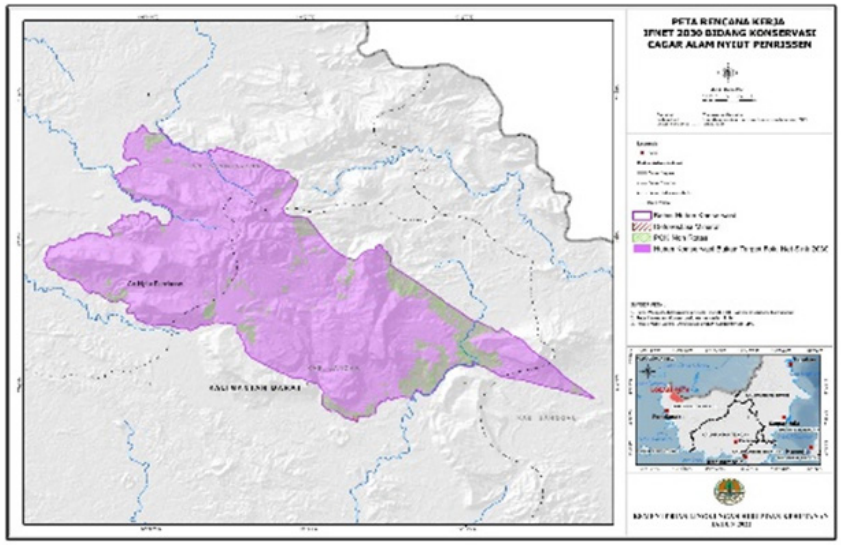

GAMBAR 57 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Nyiut Penrissen

TABEL 64 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Nyiut Penrissen

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	29.34
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	535
5	Restorasi Gambut	-

Total Keseluruhan	**564.34**

6. Cagar Alam Muara Kendawangan

Cagar Alam Muara Kendawangan terletak pada koordinat 2°20' - 3°00' LS dan 110°05' - 110°35' BT dan mencakup Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Cagar alam ini diusulkan oleh Dirjen Kehutanan No. 2240/DJ/l/1981 dengan luas 150.000 Ha pada tanggal 12 Oktober 1981. Cagar alam ini dikukuhkan menjadi Cagar Alam melalui SK. Mentan No. 575/Kpts/Um/10/1982 dengan luas 175.000 Ha, kemudian dengan SK. Menhut No. 174/Kpts-II/1993 pada tanggal 4 November 1993 dilakukan kembali penataan batas kawasan dengan luas 149.079 Ha (KLHK, 2016). Menurut KLHK (2016), tipe ekosistem di dalam kawasan ini adalah ekosistem hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, hutan kerangas dan padang rumput. Ekosistem pantai menjadi tempat Penyu Sisisk (Eretmochlys imbricata), Penyu Hijau (Chelonia mydas) dan Penyu Belimbing (Dermochellys coreaceae) bertelur. Flora yang dapat ditemui dalam kawasan antara lain adalah Meranti (Shorea sp), Ulin (Euderoxylon zwageri) dan Jelutung (Dyera lowii). Padang rumput yang sangat luas yang sering menjadi tempat/habitat berbagai jenis satwa pemakan rumput, terutama jenis Rusa (Cervus timorensis) dan Pelanduk Kerangas (Tragulus javanicus) menjadi salah satu keunikan tempat ini.

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Cagar Alam Muara Kendawangan memiliki resiko IBGF emisi dan kebakaran yang sedang, serta IBGF serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di cagar alam ini adalah seluas 111.323 Ha (Gambar 58 dan Tabel 67). Kondisi CA yang cukup kompleks juga menjadikan area CA sebagai lokasi target untuk pelaksanaan kegiatan yang lainnya.

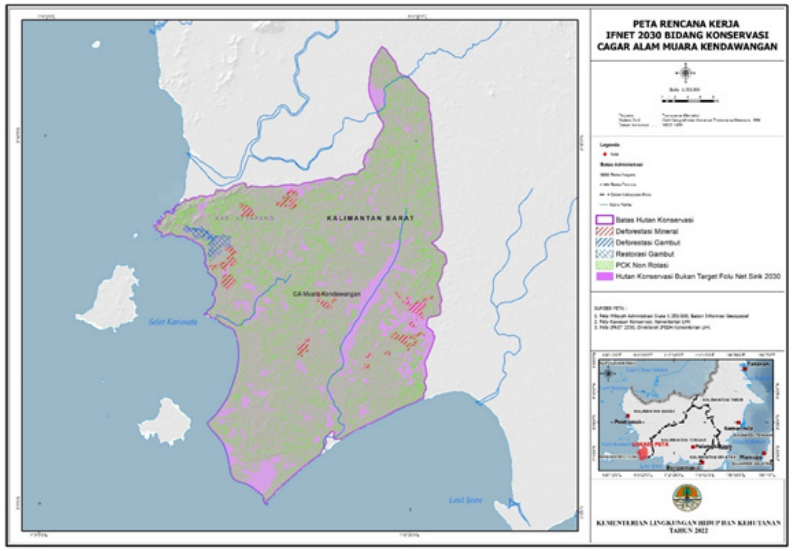

GAMBAR 58 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Muara Kendawangan

TABEL 65 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Muara Kendawangan

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	2,955.72
2	Deforestrasi Gambut	22.43
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	111,323
5	Restorasi Gambut	1,000
Total Keseluruhan		**115,301.15**

7. Taman Wisata Alam Bukit Kelam

Taman Wisata Alam Bukit Kelam terletak pada koordinat 111°34'11" - 111°34'13" LU dan 0° 05'25" - 0°05'27" BT. Taman wisata alam ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Sintang. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan Hutan Wisata berdasarkan SK. Menhut No. 594/Kpts-II/1992 tanggal 6 Juni 1992 karena tipe ekosistem gunung batu yang unik (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016) kawasan ini mempunyai topografi datar sampai berbukit dengan tanah didominasi Podsolik Merah Kuning. Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam memiliki daya tarik wisata alam yang menarik dengan kondisi bukit yang indah, air terjun, goa-goa alam serta tebing yang menantang dengan ketinggian lebih kurang 600 meter dan diselingi hutan lebat di kaki bukit dan puncaknya. Jenis fauna yang terdapat di kawasan ini adalah Burung Walet (Collocaloa maxima). Jenis flora yang paling unik di dalam kawasan ini adalah Kantong Semar (Nephentes sp) yang merupakan tumbuhan endemik kawasan ini. Selain itu pada kawasan ini terdapat Bunga Patma (Ralesia tuanmudae).

Pada bagian kaki bukit terdapat tipe hutan hujan tropis yang masih primer di antaranya jenis dari family Dipterocarpaceae seperti Meranti (Shorea spp), Keruing (Dipterocarpaceae spp) dan Resak (Vatica rassak). Pada bagian tengah bukit terdapat tipe hutan hujan tropis yang kondisi hutannya sudah tidak primer lagi. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997, sehingga didominasi dengan batang kayu besar yang telah mengering serta sebagian tumbang menghalangi jalan setapak (KLHK, 2016).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam Bukit Kelam memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di TWA ini adalah seluas 500 Ha (Gambar 59 dan Tabel 68).

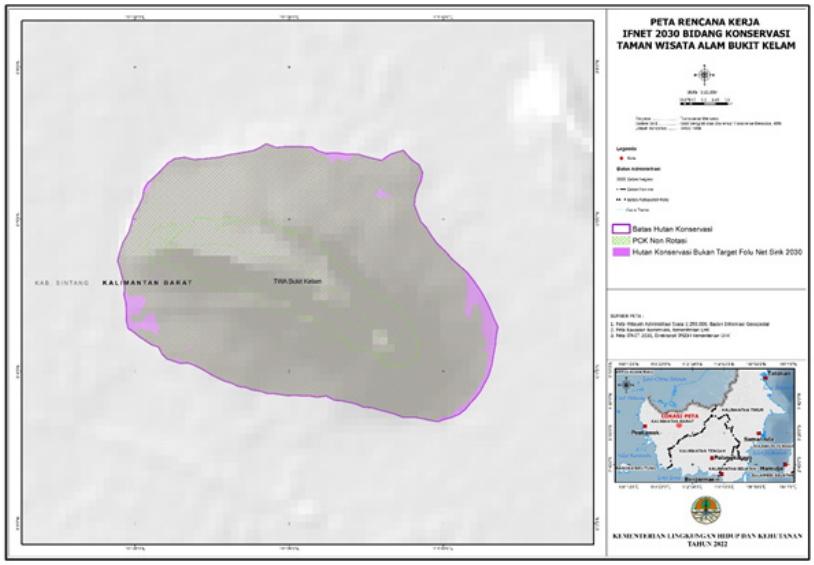

GAMBAR 59 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Bukit Kelam

TABEL 66 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Bukit Kelam

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	500
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**500**

8. Taman Wisata Alam Gunung Melintang

Taman Wisata Alam Gunung Melintang terletak pada 1°38'0" - 1°47'0" LU dan 109°20'0" - 109°37'0" BT. Kawasan ini ditetapkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 1995, dengan luas 17.640 Ha dan dipertegas dengan SK. Menhut No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), tipe ekosistem dari kawasan ini adalah ekosistem hutan rawa gambut dengan vegetasi yang rapat dan berdiameter kecil. Vegetasi yang primer hanya pada puncak-puncak bukit dan didominasi oleh famili Dipterocarpaceae sementara pada kakinya hanya ada hutan sekunder akibat perladangan dan penebangan. Jenis fauna yang dapat ditemukan antara lain Beruk (Macaca nemestrina), Rusa (Cervus unicolor), Trenggiling (Manis javanica), dan jenis-jenis Enggang (Bucerotidae).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam Gunung Melintang memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di taman wisata alam ini adalah seluas 284 Ha (Gambar 60 dan Tabel 69), sementara area yang cukup bagus dilakukan upaya pencegahan deforestasi sehingga kondisi tutupan tetap terjaga.

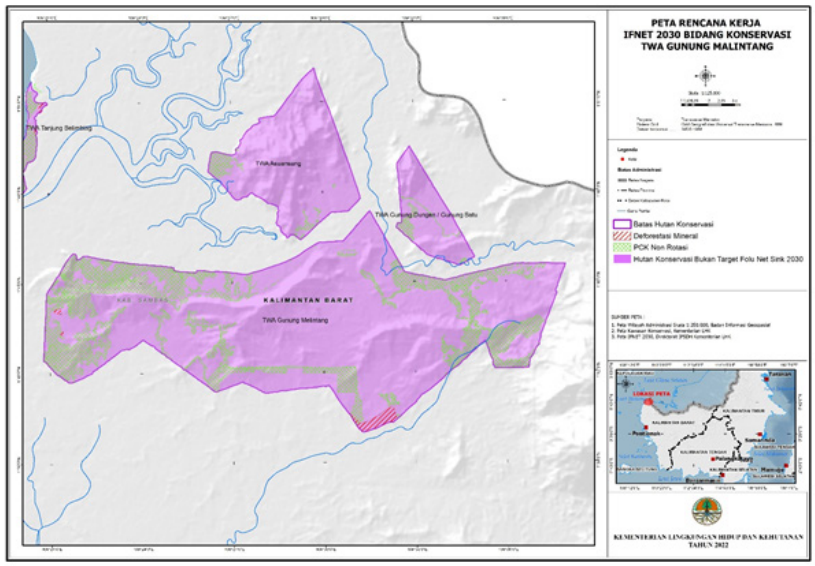

GAMBAR 60 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Gunung Melintang

TABEL 67 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Gunung Melintang

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	187.45
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	284
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**471.45**

9. Taman Wisata Alam Sungai Liku

Taman Wisata Alam Sungai Liku yang berada di Kabupaten Sambas merupakan kawasan yang paling akhir ditunjuk sebagai kawasan konservasi di Kalimantan Barat. Data-data terkait taman wisata alam ini masih terbatas. Kawasan Taman Wisata Alam Sungai Liku ditetapkan dengan SK. Menhut No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dengan luas 82.130 Ha (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), tipe ekosistem kawasan ini adalah mangrove. Jenis flora yang dapat ditemui di taman wisata alam ini adalah Api-api (Avicenia spp), Tinjang (Rhizophora apiculata), Soneratia/Pedada Bogem (Sonneratia alba), Nyiirih (Xylocarpus granatum), dan Tancang (Bruguiera gymnorriza). Jenis fauna yang terdapat di kawasan tersebut antara lain Bekantan (Nasalis larvatus), Kera Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Ular Sanca (Phyton morulus) dan Biawak (Veranus borneensis).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam Sungai Liku memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di TWA ini adalah seluas 884 Ha, dengan area seluas 13,77 Ha yang dipertahankan dengan pencegahan deforestasi (Gambar 61 dan Tabel 70).

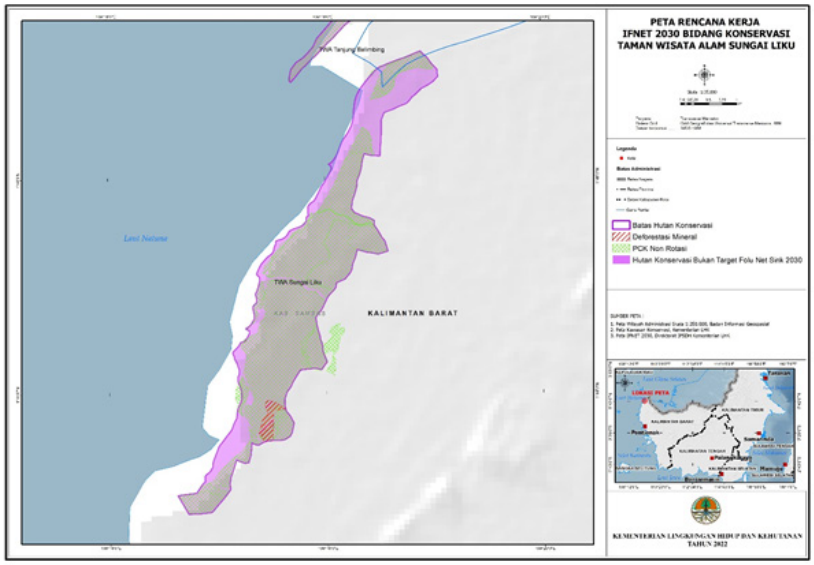

GAMBAR 61 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Sungai Liku

TABEL 68 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Sungai Liku

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	13.77
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	884
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**897.77**

10. Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing

Kawasan ini ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat pada tahun 1995 dengan luas 810,30 Ha, yang kemudian dipertegas dengan SK. Menhut No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000. Fasilitas yang dikelola dan dibangun belum seintensif kawasan lain yang terlebih dahulu terbentuk (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), berdasarkan Survey Lapangan tahun 1998, terdapat 31 jenis famili Aves di kawasan ini. Salah satu jenis aves tersebut adalah Punai Imbuk (Chocohap indica) yang merupakan catatan jenis baru untuk Kalimantan Barat. Jenis mamalia yang dapat ditemui di kawasan ini di antaranya adalah Bekantan (Nasalis larvatus) dan Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis). Jenis fauna unggulan di taman wisata ala mini adalah Penyu termasuk Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Ridel/Lekang (Lepidochelys olivacea), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea), Tuntong (Batagur baska) dan Buaya Muara (Crocodilus porosus) serta Biawak (Varanus salvator).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing memiliki resiko IBGF emisi yang sedang, serta IBGF kebakaran dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di TWA ini adalah seluas 1072 Ha, dan area seluas 21,45 Ha yang dipertahankan untuk pencegahan deforestasi (Gambar 62 dan Tabel 71).

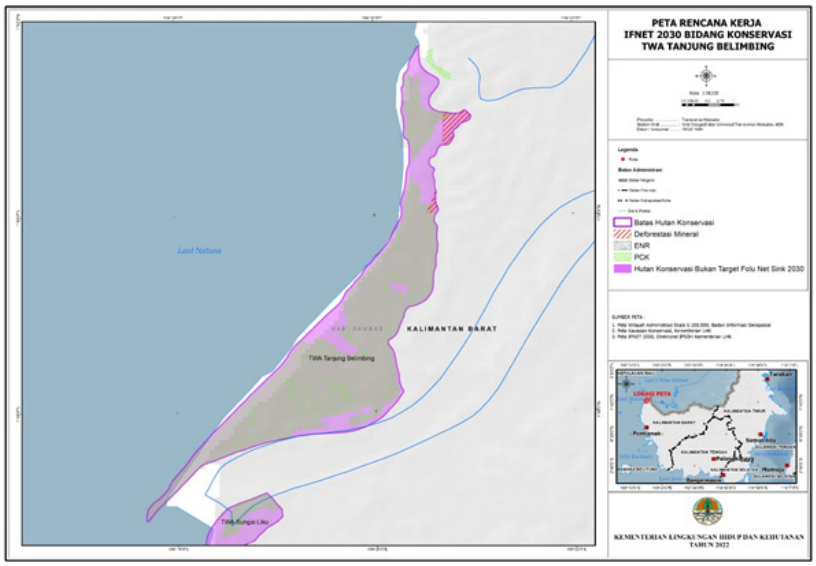

GAMBAR 62 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Tanjung Belimbing

TABEL 69 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Tanjung Belimbing

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	21.45
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	1,072
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**1,093.45**

11. Taman Wisata Alam Asuansang

Rino et al. (2016) melakukan studi tentang Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang yang terletak di Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsisi Kalimantan Barat. Gunung Asuansang ditunjuk dan ditetapkan sebagai TWA sejak tahun 1995 berdasarkan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat dengan zonasi kawasan sebagai Taman Wisata Alam adalah seluas 4.464 ha, dan SK Menhutbun RI No. 259/KptsII/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 untuk penunjukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 4.464 ha. Mereka juga menyebutkan bahwa Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang berbatasan langsung dengan Negara Serawak Malaysia.

Menurut KLHK (2016), Taman Wisata Alam Gunung Asuansang terletak pada 1°49'0" LU dan 109°29'0" BT. Jenis flora kawasan ini didominasi oleh famili Myrtaceae, famili Dipterocarpaceae, famili Sapotaceae dan famili Euphorbiaceae. Terdapat Sembilan jenis Anggrek (Orchidaceae) di kawasan ini termasuk Acriopsis javanica, Agrostophylum sp, Bulbophyllum sp, Coelogyne spp, Dendrobium anusnum, Liparis latifolia, Pholidota sp dan Scortechinii sp. Jenis mamalia yang ditemukan di kawasan ini adalah Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Beruk (Macaca nemestrina), Lutung (Presbitys sp), Rusa (Cervus unicolor), Binturong (Arctitis binturong) serta Babi Hutan (Sus barbatus), Trenggiling (Manis javanica) dan Kelempiau (Hylobates muellerii). Burung yang paling banyak ditemukan di kawasan ini adalah terutama dari jenis burung air seperti Sternidae, Accepitridae dan Estrildidae. Selain burung air kawasan ini juga kaya akan jenis burung-burung rimba dan burung semak serta jenis-jenis burung malam. Beberapa jenis reptilia yang ditemukan adalah Ular Sanca (Python molurus bivittatus), Ular Punai (Trimeresurus wagleri), Ular Hijau (Ahaetula nasuta). Keluarga Cicak-cicakan yang banyak terdapat di kawasan ini adalah seperti Tokek (Draco volans), Bengkarung (Mabuya sp) serta Biawak (Varanus borneensis). Keluarga Amphibia yang ditemukan di kawasan ini adalah Racophorus, Rana dan Bufonidae.

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam Asuansang memiliki resiko IBGF emisi dan kebakaran yang sedang, serta IBGF serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di TWA ini adalah seluas 200 Ha (Gambar 63 dan Tabel 72).

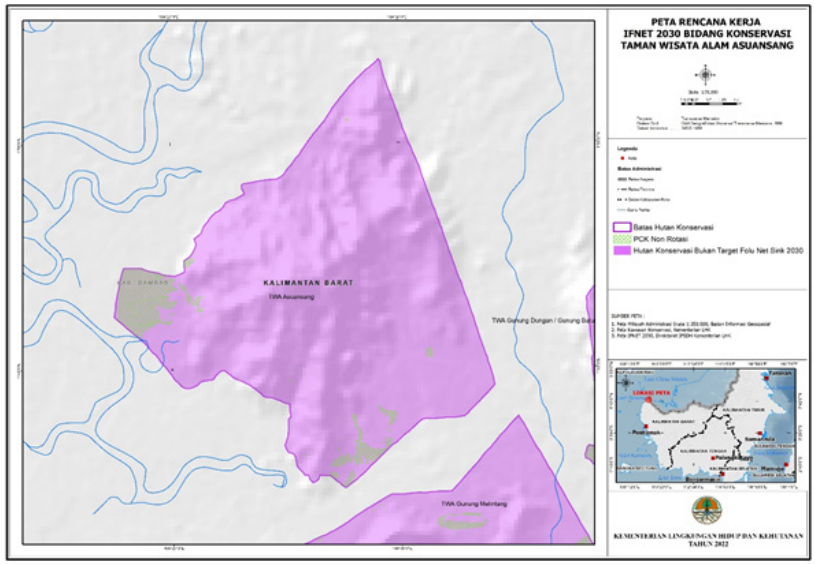

GAMBAR 63 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Asuansang

TABEL 70 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Asuansang

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	200
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**200**

12. Taman Wisata Alam Baning

Taman Wisata Alam Baning terletak di Pusat Kota dan Kabupaten Sintang dengan titik koordinat antara 1°03' - 1°16' LS dan 110° 37' - 113°37' BT. Taman wisata ini dibangun pada pada tahun 1975 dengan SK. Bupati Kab. Sintang No. 07/A-II/1975 tanggal 1 Juni 1975 dengan luas 315 Ha. SK Penunjukan oleh Menhut No. 129/Kpts-II/1990 tanggal 10 April 1990 tentang Perubahan Fungsi Hutan Lindung menjadi Hutan Wisata Baning lalu diterbitkan. Tipe ekosistem kawasan ini adalh hutan rawa gambut yang selalu tergenang hampir sepanjang tahun. Jenis tanahnya adalah organosol, gley dan gambut. Tujuan pembentukan taman wisata alam ini adalah untuk pelestarian jenis tumbuhan dan sebagai paru-paru Kota Sintang (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), jenis flora yang terdapat di kawasan ini adalah Rengas (Gluta

renghas), Meranti Buaya (Shorea dictryloba) mencakup Meranti Merah (Shorea leprosula), Medang (Litsea sp) dan Ubah (Eugenia). Beberapa jenis fauna yang terdapat di kawasan ini adalah Burung Bubut Coklat (Centropus sinansis), Burung Murai Batu (Copyschus pygrrhopyga), Burung Pipit Hitam (Lonchura fuscans), Kelasi (Presbytis rubicunda). Selain itu di kawasan ini terdapat juga Trenggiling (Manis javanica) dan Biawak Kalimantan (Veranus borneensis).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam Baning memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran, dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di TWA ini adalah seluas 100 Ha (Gambar 64 dan Tabel 73).

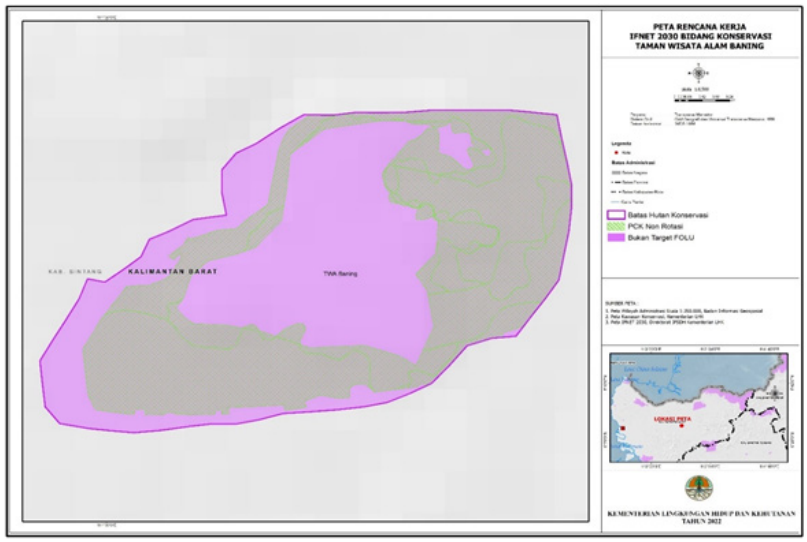

GAMBAR 64 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Baning

TABEL 71 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Baning

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	200
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**200**

13. Taman Wisata Alam Gunung Dunga

Taman Wisata Alam Gunung Dungan terletak pada 1°47'0" - 1°50'0" LU dan 109°31'0" - 109°32'0" BT. Kawasan ini ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 1995, dengan luas 1.142 Ha, kemudian dipertegas dengan SK. Menhut No. 259/ Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000. Ekosistem penyusun kawasan ini antara lain terdiri dari ekosistem riparian, kerangas, dan hutan rawa gambut (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), Jenis flora taman wisata ini didominasi oleh famili Bombaceae, famili Anacardiaceae, famili Dipterocarpaceae dan jenis-jenis anggrek seperti Dendrobium anusnum, Apendiculata sp, Liparis latifolia, Pholidota sp dan Scortechinii sp. Jenis fauna yang terdapat di taman wisata alam ini antara lain Beruang Madu (Helarctos malayanus), Kera Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Lutung (Presbitys sp), Babi Hutan (Sus barbatus), dan Biawak (Varanus borneensis). Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam Gunung Dungan memiliki resiko IBGF emisi dan serapan yang rendah, serta IBGF kebakaran yang sedang. Lokasi yang menjadi area PCK di TWA ini adalah seluas 100 Ha (Gambar 65 dan Tabel 74).

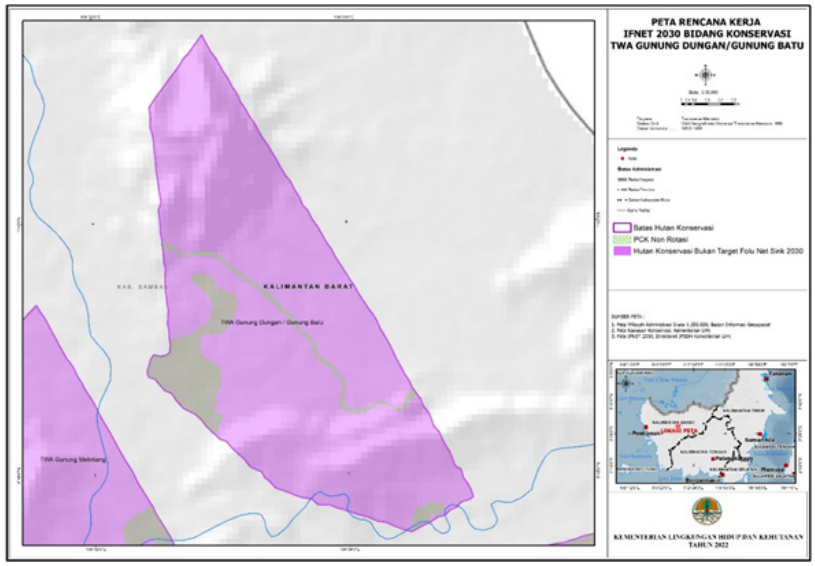

GAMBAR 65 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Gunung Dunga

TABEL 72 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Gunung Dunga

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-

4	Non-Rotasi (PCK)	100
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**100**

14. Taman Nasional Danau Sentarum

Taman Nasional Danau Sentarum (TNBD) mewakili ekosistem danau, danau, hutan rawa air tawar dan hutan hujan tropika di Kalimantan. Taman nasional ini juga ditetapkan sebagai Lahan Basah International dalam Konvensi ramsar. Danau Sentarum dan danau musiman yang berada di taman nasional ini terletak 700 km dari muara yang menuju Laut Cina Selatan pada bagian cekungan sungai Kapuas. Taman nasional ini dikelilingi oleh bukit-bukit dan dataran tinggi, menjadikanya daerah tangkapan air dan pengatur tata air bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas (KLHK, 2016). Menurut KLHK (2016), flora yang terdapat di kawasan ini termasuk Tembesu/tengkawang (Shorea beccariana), jelutung (Dyera costulata), ramin (Gonystylus bancanus), meranti (Shorea sp), keruing (Dipterocarpus sp), kayu ulin (Eusideroxylon zwageri) dan jenis fauna diantaranya ikan arwana (Sclerophages formosus), belida (Chitalia lopis), toman (Channa micropeltes), betutu (Oxyeleotris marmorata), jelawat (Leptobarbus hoeveni) dan ikan indah ulanguli (Botia macracanthus). Prijono (2017) menyampaikan bahwa TNBD berupaya untuk mengembangkan pencegahan kebakaran hutan menggunakan periau dengan meningkatan kapasitas petani madu dalam mencegah kebakaran hutan. Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa TNBD memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran, dan serapan yang rendah. Lokasi area PCK di TNBD seluas 50.021 ha dan 13.36 ha dipertahankan dengan pencegahan deforestasi (Gambar 66 dan Tabel 75).

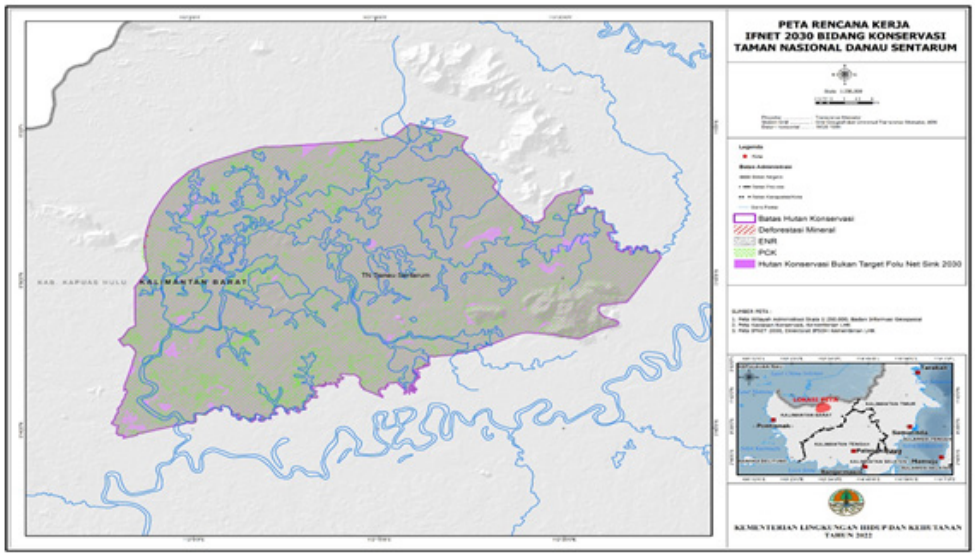

GAMBAR 66 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Danau Sentarum

TABEL 73 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Danau Sentarum

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	13,36
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	50,021
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**50,034.36**

15. Taman Nasional Betung Kerihun

Taman Nasional Betung Kerihun terletak di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak. Taman nasional ini merupakan kawasan konservasi terbesar di Kalimantan Barat. Taman Nasional ini pertama ditunjuk tahun 1995 dengan nama Taman Nasional Bentuang Karimun. Sejak tahun 1999 nama tersebut diganti menjadi Betung Kerihun. Terdapat delapan ekosistem dalam taman nasional ini; mulai dari ekosistem hutan dataran rendah sampai ekosistem sub Montana dan Montana. Taman nasional ini juga memiliki 75 % jenis tumbuhan yang endemik (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), delapan tipe ekosistem hutan di kawasan TN Betung Kerihun mencakup: 1) Ekosistem Hutan Dipterocarpaceae Dataran Rendah (Low Land Dipterocarp Forest), 2) Ekosistem Hutan Aluvial (Alluvial Forest), 3) Ekosistem Hutan Rawa (Swamp Forest), 4) Ekosistem Hutan Sekunder Tua (Old Secondary Forest), 5) Ekosistem Hutan Dipterocarpaceae Bukit (Hill Dipterocarp Forest), 6) Ekosistem Hutan Berkapur (Limestone Forest), 7) Ekosistem Hutan Sub-Gunung (Sub-Montane Forest), 8) Ekosistem Hutan Gunung (Montane forest). Flora taman nasional ini memiliki 1.216 jenis yang terdiri dari 418 genus dan 110 famili mencakup 75 jenis endemik Borneo; sebanyak 14 jenis di antaranya merupakan "catatan baru" di Indonesia, termasuk; Musa lawitiensis, Neouvaria acuminatissima, Castanopsis inermis, Lithocarpus philippinensis, Chisocheton caulilorus. Fauna Orangutan (Pongo pygmaeus), Kelampiau (Hylobates muelleri), Hout (Presbytis frontata), Kelasi (Presbytis rubicunda), Beruk (Macaca nemestrina), Kera (Macaca fascicularis), dan Tarsius (Tarsius bancanus). Terdapat tidak kurang dari 48 jenis mamalia, sedangkan kelompok mamalia yang berukuran kecil sebanyak 35 jenis, terdiri atas kelelawar (Chiroptera).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Nasional Betung Kerihun memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran, dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di taman nasional ini adalah seluas 1.000 Ha (Gambar 67 dan Tabel 76).

.

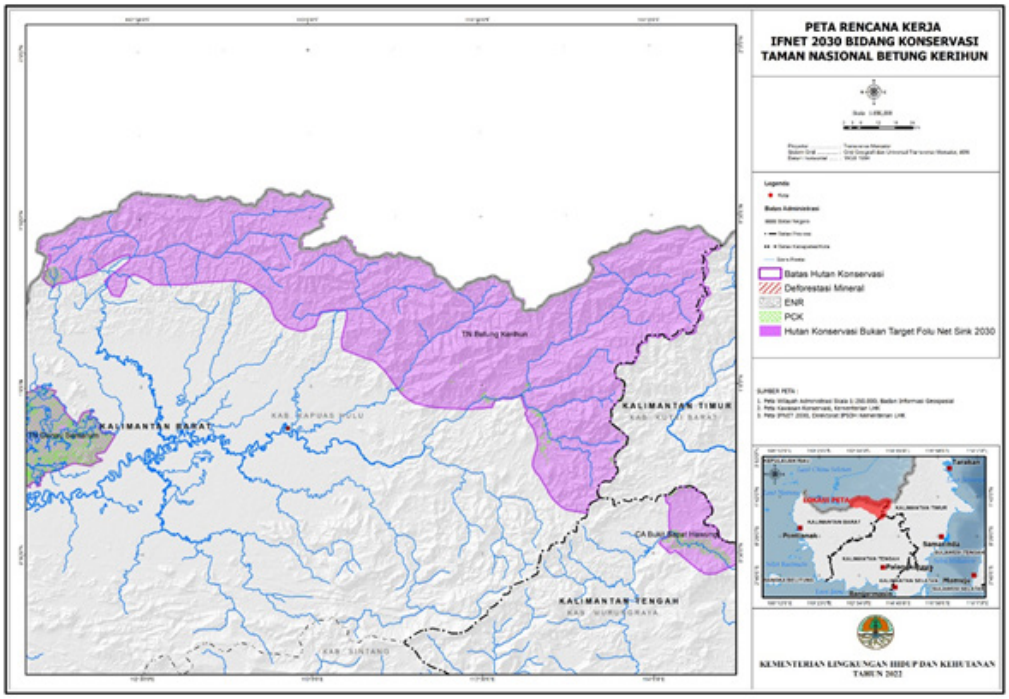

GAMBAR 67 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Betung Kerihun

TABEL 74 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Betung Kerihun

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	1,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**1,000**

16. Taman Nasional Gunung Palung

Taman Nasional Gunung Palung merupakan satu-satunya kawasan hutan tropika Dipterocarpus yang terbaik dan terluas di Kalimantan. Taman nasional ini memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi karena memiliki banyak komunitas tumbuhan dan satwa liar; mencakup 65 persen kawasan masih berupa hutan primer yang tidak terganggu aktivitas manusia (KLHK, 2016).

Berdasarkan KLHK (2016), pada tahun 1937, kawasan hutan Gunung Palung ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pada tahun 1990 kawasan hutan Gunung Palung ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai Taman Nasional dengan luas 90.000 Ha. Perwakilan ekosistem taman nasional ini lengkap meliputi: Hutan Mangrove, Hutan Rawa, Rawa Gambut, Hutan Rawa Air Tawar, Hutan Pamah Tropika, dan Hutan Pegunungan yang selalu ditutupi kabut. Flora yang terdapat di kawasan ini mencakup ramin (Gonystylus bancanus), ulin (Eusideroxylon zwageri), medang dan nyatoh (Palaquium spp), jelutung (Dyera costulata), damar (Agathis borneensis), pulai (Alstonia scholaris), rengas (Gluta renghas), Bruguiera sp, Lumitzera sp, Rhizophora sp, Sonneratia sp, ara si pencekik, dan anggrek hitam (Coelogyne pandurata). Fauna yang terdapat di kawasan ini adalah Bekantan (Nasalis larvatus), orangutan (Pongo pygmaeus), bajing tanah bergaris empat (Lariscus hosei), kijang (Muntiacus muntjak), beruang madu (Helarctos malayanus), beruk (Macaca nemestrina), klampiau (Hylobates muelleri), kukang (Nyticebus coucang), rangkong badak (Buceros rhinoceros), kancil (Tragulus napu), ayam hutan (Gallus gallus), enggang gading (Rhinoplax vigil), buaya siam (Crocodylus siamensis), kura-kura gading (Orlitia borneensis), dan penyu tempayan (Caretta caretta). Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Nasional Gunung Palung memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran, dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di taman nasional ini adalah seluas 1.324 Ha, dan juga terdapat area dengan tutupan yang dipertahankan melalui pencegahan deforestasi (Gambar 68 dan Tabel 77).

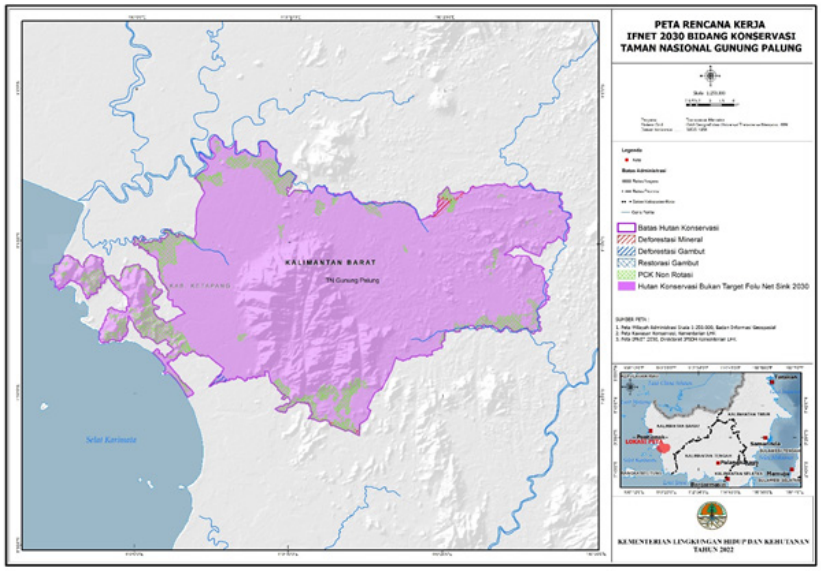

GAMBAR 68 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Gunung Palung

TABEL 75 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Gunung Palung

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	309.73
2	Deforestrasi Gambut	58
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	1,324
5	Restorasi Gambut	33-
Total Keseluruhan		**1,724.73**

17. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya

Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBKBR) berada di jantung pulau Kalimantan. Taman nasional ini merupakan area penyerapan air bagi DAS Melawi di Kalimantan Barat dan DAS Katingan di Kalimantan Tengah. TN Bukit Baka-Bukit Raya merupakan gabungan dua Cagar Alam yaitu Bukit Baka di Kalimantan Barat dan Cagar Alam Bukit Raya di Kalimantan Tengah (KLHK, 2016).

Menurut KLHK (2016), pada tahun 1978 kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam Bukit Raya dengan luas 50.000 Ha dan tahun 1979, diperluas menjadi 110.000 Ha. Pada tahun 1981, kawasan Bukit Baka ditetapkan sebagai Cagar Alam dengan luas 100.000 Ha. Kemudian pada tahun1982 luas Cagar Alam Bukit Baka bertambah menjadi 116.063 Ha. Pengurangan Luas Cagar Alam Bukit Baka menjadi 70.500 ha terjadi pada tahun 1987; kemudian pada tahun 1992 Cagar Alam Bukit Baka dan Cagar Alam Bukit Raya disatukan dan statusnya diubah menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Jenis flora yang terdapat di taman nasional ini adalah Dipterocarpaceae, Myrtaceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, dan Ericadeae, anggrek hutan, bunga Ralesia (Rallesia sp). Jenis fauna yang terdapat di taman nasional ini adalah Macan dahan (Neofelis nebulosa), Orangutan (Pongo satyrus), Beruang Madu (Helarctos malayanus), dan Lutung Merah (Presbytis rubicunda). Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka memiliki resiko IBGF emisi, kebakaran, dan serapan yang rendah. Lokasi yang menjadi area PCK di TN ini adalah seluas 3.000 Ha (Gambar 69 dan Tabel 78).

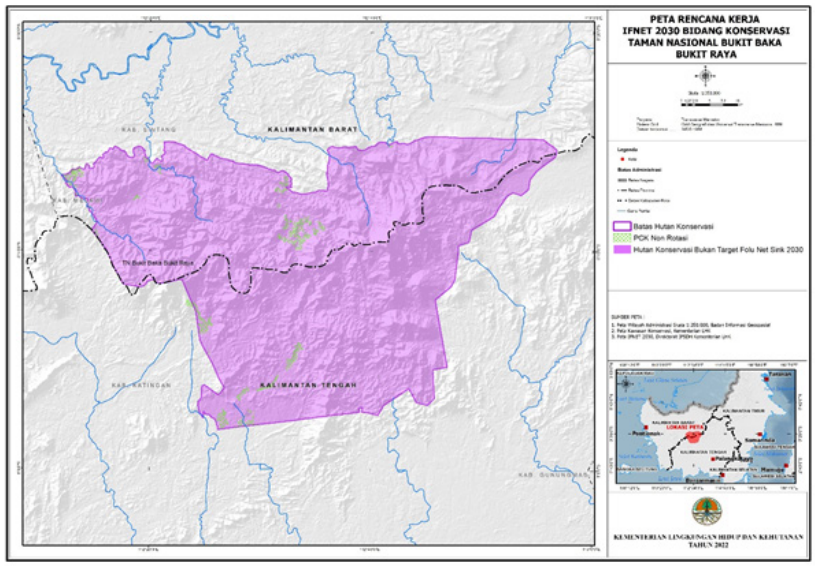

GAMBAR 69 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Baka Bukit Raya

TABEL 76 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Bukit Baka Bukit Raya

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	3,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**3,000**

B.6.11 Provinsi Kalimantan Tengah

Sebanyak 90% KK di Kalimantan Tengah rawan kebakaran hutan (IBGF=3), dan 50% memiliki nilai emisi tinggi. Hal ini menunjukkan perlu dilakukannya penanaman serta pemantauan lahan untuk meningkatkan kualitas lahan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan.

1. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung

Cagar Alam Bukit Sapat Hawung berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administrasi cagar alam ini mencakup wilayah Desa Karamu, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Tupus, Desa Tumbang Tujang, Desa Takajung dan Desa Tumbang Mulut, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Barito Utara. Secara astronomis cagar alam ini

terletak antara 114°00' - 115°02' BT sampai dengan 00°25' - 00°50' LS. Dengan kawasan seluas 239.000 Ha cagar alam ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor. 174/Kpts/Um/3/1983 tanggal 8 Oktober 1983 (KLHK, 2016).

KLHK (2016) mengkategorikan ekosistem Cagar Alam Bukit Sapat Hawung sebagai hutan hujan tropika pegunungan laut. Cagar alam ini memiliki jenis flora kayu-kayuan termasuk meranti (Shorea sp), Bangkirai (Shorea spp), Agathis (Agathis borneensis), Tengkawang (Shorea spp), Keruing (Dipterocarpus sp), Nyatoh (Callophyllum pulcherriumj wall), Kempas (Koompassia malacensis maing) dan Ulin (Eusideroxylon zwageri). Selain itu cagar alam ini juga mempunyai jenis anggrek hutan (Orchidceae). Jenis fauna yang terdapat di cagar alam ini di antaranya adalah Owa-owa (Hylobates muelleri), Beruang madu (Helarctos malayanus), Rusa (Cervus sp), Kancil (Tragulus javanicus), Kijang (Muntiacus muntjak), Macan dahan (Neofelis nebulosa), Biawak Kalimantan (Varanus bornensis) dan Burung Rangkong (Buceros sp).

Dengan menggunakan analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) diketahui bahwa Cagar Alam Bukit Sapat Hawung merupakan wilayah dengan resiko IBGF emisi, kebakaran, dan serapan rendah. Lokasi yang menjadi area Peningkatan Cadangan Karbon (PCK) di cagar alam ini adalah seluas 10.086 Ha (Gambar 70 dan Tabel 79).

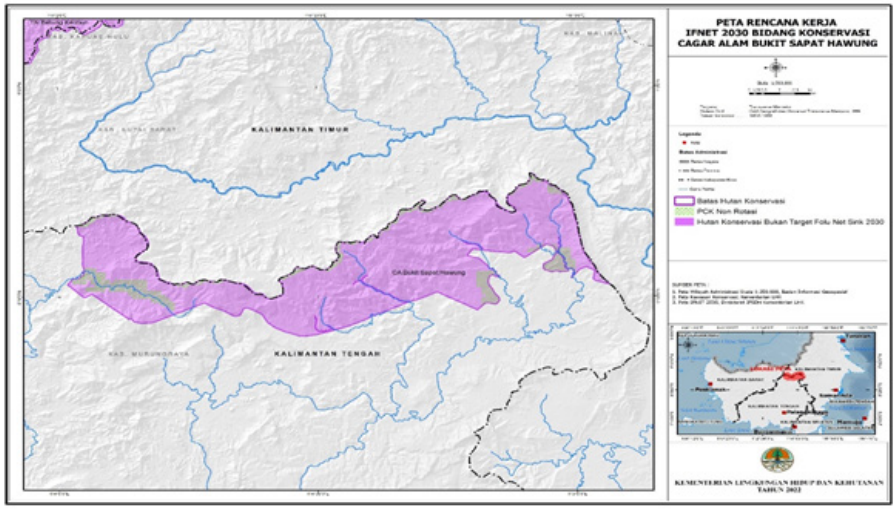

GAMBAR 70 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Bukit Sapat Hawung

TABEL 77 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Bukit Sapat Hawung

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-

4	Non-Rotasi (PCK)	10,086
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**10,086**

2. Cagar Alam Pararawen I dan II

Cagar Alam Pararawen I dan II terletak antara 114°44' - 114°50' BT sampai dengan 0°37' - 1°02' LS. Cagar Alam Pararawen I dan II terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Cagar alam ini mencakup wilayah Desa Lemo I dan II dan Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Sebagian dari kawasan ini (5.855 Ha) ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. 85/Kpts-II//1999 tanggal 3 Nopember 1979, lalu dikukuhkan dengan SK. Menteri Kehutanan Nomor. 85/Kpts-II/1999 tanggal 25 Februari 1999 (KLHK, 2016).

KLHK (2016) mengkategorikan tipe ekosistem cagar alam ini adalah hutan hujan tropika pegunungan. Sebagian besar flora di kawasan ini adalah tegakan bersuku Dipterocarpaceae. Jenis fauna yang terdapat di cagar alam ini adalah Owa-owa (Hylobates muelleri), Beruang madu (Helarctos malayanus), Rusa (Cervus sp), Kancil (Tragulus javanicus), Kijang (Muntiacus muntjak), dan Bangkui (Presbytis rubicunda).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Cagar Alam Pararawen I dan II memiliki resiko IBGF emisi dan serapan yang rendah, serta IBGF kebakaran yang sedang. Lokasi yang menjadi area PCK di cagar alam ini adalah seluas 500 Ha, dan area seluas 63.44 Ha yang dipertahankan melalui pencegahan deforestasi (Gambar 71 dan Tabel 80).

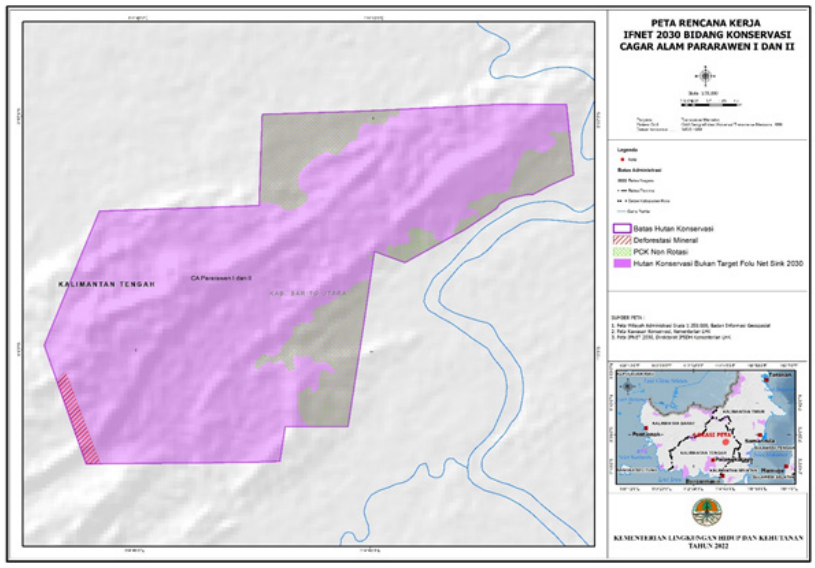

GAMBAR 70 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Bukit Sapat Hawung

TABEL 71 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di CA Pararawen I & II

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	64.34
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	500
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**564.34**

3. Suaka Margasatwa Lamandau

Suaka Margasatwa Lamandau terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 111°11'8,48" - 111°30'13,04" BT sampai dengan 02°33'24,4" - 02°53'42,53" LS. Suaka margasatwa ini mencakup wilayah Kelurahan Mendawai, Desa Babual Baboti, Desa Tanjung Putri, Desa Natai Sedawak, Desa Karta Mulya, Desa Tempayung, Desa Saka Bulin, Desa Kinjil, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat. Kawasan suaka margasatwa ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Kpts-II/1998 tanggal 26 Februari 1998 dengan luas kawasan 76.110 Ha (KLHK, 2016).

KLHK (2016) mengkategorikan tipe ekosistem kawasan ini adalah hutan rawa air tawar dan tipe hutan dataran rendah. Selain kayu-kayuan seperti Ramin (Gonystilus bancanus), Meranti (Shorea sp), Jejambu (Eugenia sp), Cemara (Cassuarina sp), Ulin (Eusideroxylon zwageri) dan Kempas (Koompasia malaccensis), suaka margasatwa ini juga memiliki berbagai bahan jenis tumbuhan yang menjadi makanan Orangutan seperti Ketiau, Bakunyit, Bentan Merang dan Banitan. Jenis-jenis satwa yang terdapat di Suaka Margasatwa Sungai Lamandau adalah Orangutan (Pongo pygmaeus), Bekantan (Nasalis larvatus), Owa-owa (Hylobates muelleri), Rusa (Cervus sp), Kancil (Tragulus javanicus), Beruang madu (Helarctos malayanus), Burung Raja Udang (Anhinga sp), Burung Rangkong (Buceros sp), and Burung Cucak rowo (Pycnonotus zeylanicus).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Suaka Margasatwa Lamandau memiliki resiko IBGF emisi dan serapan yang rendah, serta IBGF kebakaran yang sedang. Lokasi yang menjadi area PCK di suaka margasatwa ini adalah seluas 20.000 Ha (Gambar 72 dan Tabel 81).

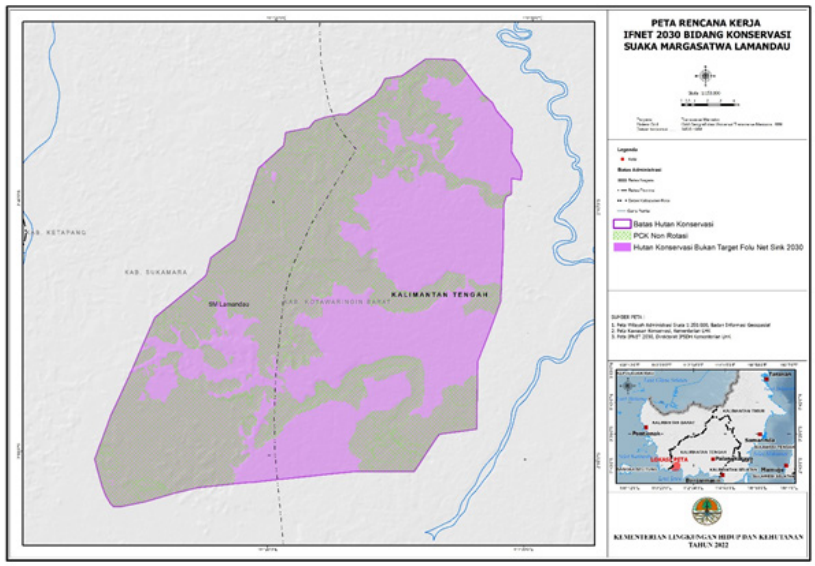

GAMBAR 72 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Lamandau

TABEL 79 | Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di SM Lamandau

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	20,000
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**20,000**

4. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling

Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling terletak pada koordinat 113°00' - 113°02' BT sampai dengan 01°45' - 02°00' LS. Taman wisata alam ini mencakup wilayah Desa Tangkiling dan Desa Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor. 046/Kpts/Um/1/1977 tanggal 25 Juli 1977 dengan luas kawasan 533 Ha (KLHK, 2016).

KLHK (2016) mengkategorikan tipe ekosistem taman wisata alam ini sebagai hutan hujan tropika dataran rendah/rawa. Jenis flora yang terdapat di taman wisata alam ini adalah tumbuhan hutan hujan tropika dataran rendah mencakup Pelawan (Tristania obovata), Meranti (Shorea sp), Tengkawang (Shorea spp), Geronggang (Cratoxylon

arborescens), dan lain-lain. Jenis fauna yang berada di taman wisata alam ini adalah Buaya sapit (Tomistoma schlenegelli), Burung Tekukur (Streptillia chinensis), Burung Cucak rowo (Pycnonotus zeylanicus), dan lain-lain.

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling memiliki resiko IBGF emisi dan kebakaran yang rendah, serta IBGF serapan yang sedang. Lokasi yang menjadi area PCK di suaka margasatwa ini adalah seluas 200 Ha (Gambar 73 dan Tabel 82).

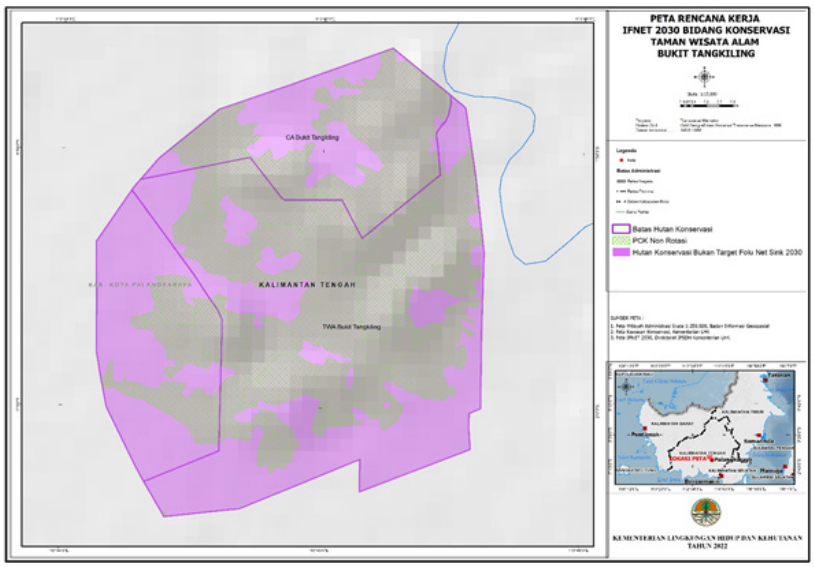

GAMBAR 73 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Bukit Tengkiling

TABEL 80 | . Luas kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Bukit Tengkiling

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	-
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	200
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**200**

5. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang

Taman Wisata Alam Tanjung Keluang terletak pada koordinat 111°00'45" - 111°42'00" BT sampai dengan 03°42' - 03°55' LS. Taman wisata alam ini secara administrasi terletak

di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 046/Kpts-II/1984 tanggal 3 Desember 1984 dengan luas kawasan 2.000 Ha (KLHK, 2016).

KLHK (2016) mendeskripsikan taman wisata alam ini dengan hamparan pasir putih dengan laut yang tenang dan tumbuhan cemara serta mangrove. Jenis flora yang dominan di kawasan ini adalah Cemara Laut (Casuarina sp), dan Bakau (Rhizophora sp). Jenis fauna yang terdapat di kawasan ini adalah Musang air (Cycnogale sp), Burung elang (Henicopersis novaeguineae), dan Burung raja udang (Anhinga sp).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam Tanjung Keluang memiliki resiko IBGF emisi yang rendah, serta IBGF kebakaran dan serapan yang sedang. Lokasi yang menjadi area PCK di taman wisata alam ini adalah seluas 1.267 Ha. Kompleksitas kondisi di dalam TWA ini menjadikan terdapat beberapa kegiatan lainnya seperti pencegahan deforestasi dan juga restorasi gambut (Gambar 74 dan Tabel 83)

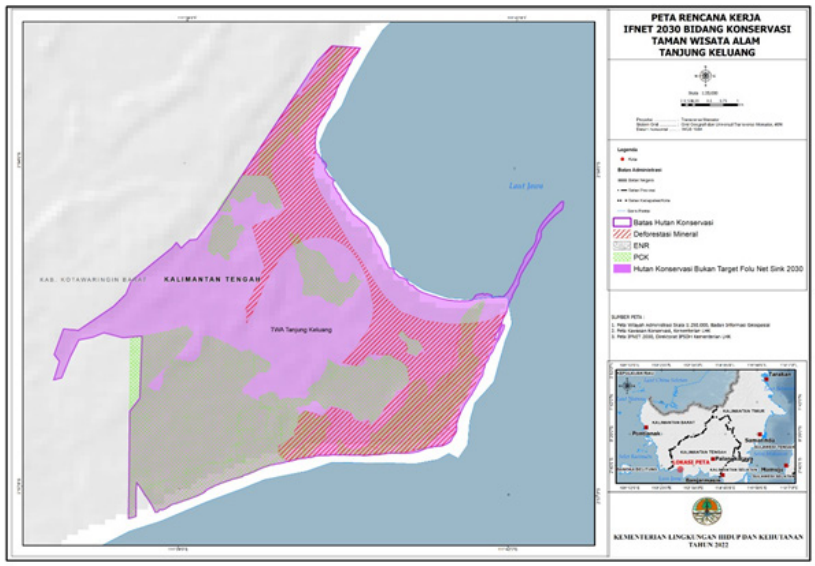

GAMBAR 74 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Tanjung Keluang

TABEL 81 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TWA Tanjung Keluang

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	761.96
2	Deforestrasi Gambut	376.27
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	1,267

5	Restorasi Gambut	200
Total Keseluruhan		**2,605,23**

6. KSA/KPA Sungai Barito

Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Sungai Barito berada di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian fungsi KSA/KPA Sungai Barito pada tahun 2019, usulan rekomendasi pengelolaan KSA/KPA Sungai Barito adalah sebagai Suaka Margasatwa. Usulan tersebut sejalan dengan kondisi KSA/KPA Sungai Barito yang sesuai memiliki kriteria Tahura berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 9.

Berdasarkan dokumen laporan evaluasi kesesuaian fungsi KSA dan KPA Barito tahun 2019, diketahui bahwa kawasan KSA/KPA Sungai Barito telah mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan tersebut antara lain meliputi kerusakan bentang alam dan hilangnya species flora fauna. Terjadinya kerusakan diakibatkan adanya kegiatan penambangan emas tanpa ijin, penebangan liar dan sebagian kebakaran hutan. Selain kerusakan, akibat penambangan emas kawasan dan sekitarnya telah mengalami pencemaran akibat Mercuri (Hg). Menurut hasil analisis IBGF diketahui bahwa kawasan KSA/KPA Sungai Barito memiliki indeks emisi tinggi dan indeks kebakaran juga tinggi.

Merujuk pada kondisi permasalahan yang terjadi pada kawasan KSA/KPA Sungai Barito sebagaimana dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan pengkajian untuk penanganan pengelolaan berikutnya. Penanganan selanjutnya adalah pada lokasi tersebut dapat dilakukan kegiatan reklamasi, rehabilitasi dan kegiatan budidaya baik jenis satwa dan flora yang ada dan endemik di KSA/KPA Sungai Barito. Kegiatan lain yang bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat adalah pemanfaatan lokasi ini sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan memadukan pemandangan alam yang ada. Kondisi tutupan lahan yang cukup bagus, menjadikan area ini sebagai fokus kegiatan pencegahan deforestasi (Gambar 75 dan Tabel 84).

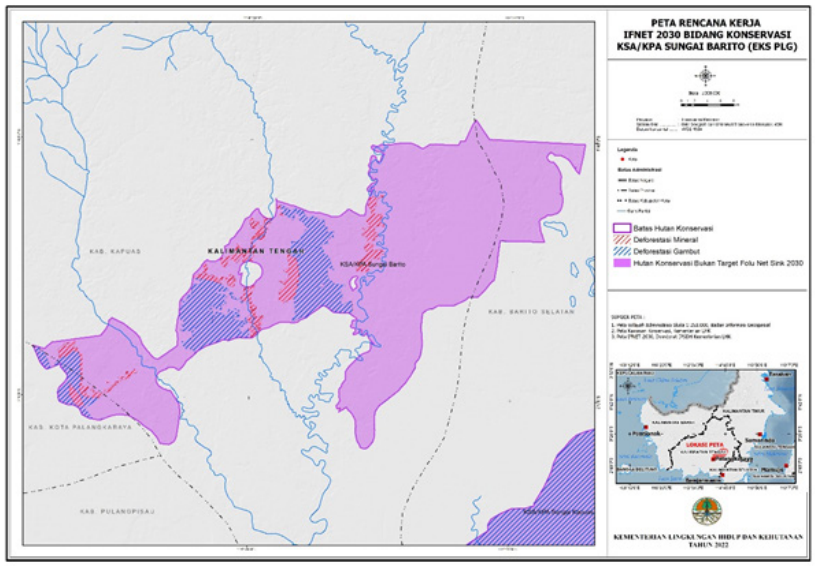

GAMBAR 75 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Sungai Barito

TABEL 82 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Sungai Barito

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	6.127,43
2	Deforestrasi Gambut	15.629,39
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**21.756,82**

7. KSA/KPA Bukit Rawi

Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Bukit Rawi ditetapkan beerdasarkan SK. Menhut Nomor 529/Kpts-II/2012; Tanggal 25 Februari 2012. Adapun luas kawasan KSA/KPA ini adalah 10.608,43 Ha. Secara umum ekosistem gambut mendominasi di KSA/KPA Bukit Rawi, yaitu sebesar 6.175,43 Ha. Hampir 58% data penutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KSA/KPA Bukit Rawi menyebutkan hutan rawa sekunder dan semak belukar rawa dan sisanya lahan terbuka dan semak belukar. Kawasan KSA/KPA Bukit Rawi masuk ke dalam kawasan bergambut dengan status kedalaman gambut dangkal/tipis. Kedalaman gambut di kawasan ini berkisar antara 50 – 100 cm. Kondisi tutupan lahan yang cukup ideal, menjadikan

kegiatan mitigasi di area ini berfokus pada pencegahan deforestasi (Gambar 76 dan Tabel 85).

Merujuk pada laporan Eks KSA KPA Bukit Rawi Tahun 2019 diketahui permasalahan yang dihadapi pada kawasan tersebut antara lain adalah konflik kepemilikan lahan. Dalam upaya minimalisir kondisi tersebut, sehingga perlu dilakukan penyelesaian konflik dengan membentuk enclave dan membuat Blok Khusus di lokasi kepemilikan masyarakat yang dapat dibuktikan secara legal dan sah.

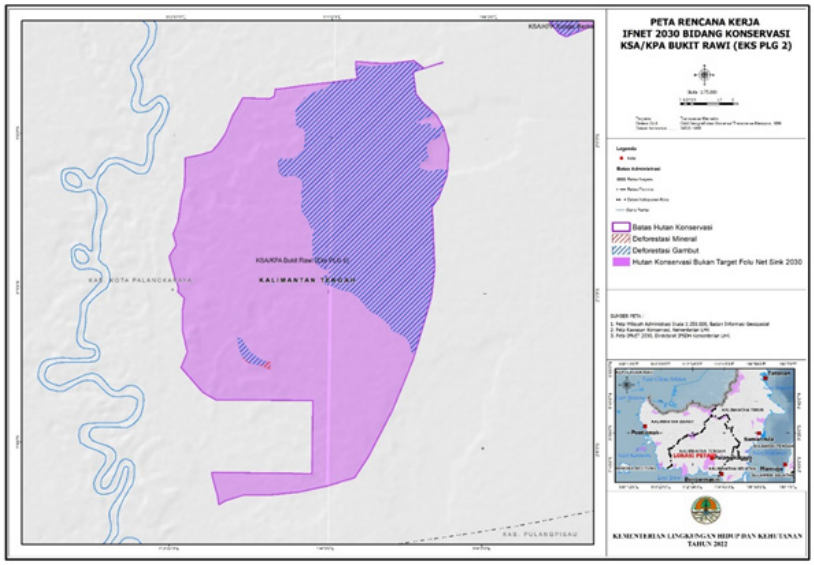

GAMBAR 76 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Bukit Rawi

TABEL 83 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Bukit Rawi

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	5,37
2	Deforestrasi Gambut	3,818
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**3,823.37**

8. KSA/KPA Sungai Kapuas

Penunjukkan KSA/KPA Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/MenhutII/2012.

Namun demikian Surat keputusan menteri ini belum menetapkan fungsi kawasan KSA/KPA Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan kedalam kriteria khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011tentang Pengelolaan KSA dan KPA yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015. Secara administratif kawasan KSA/KPA Sungai Kapuas memiliki luasan +86.746Ha, yang terletak pada di 2(dua) kabupaten yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas.

Hasil analisis IBGF diketahui bahwa kawasan KSA/KPA Sungai Barito memiliki indeks emisi tinggi dan indeks kebakaran juga tinggi. Hal ini dinilai sesuai, karena kondisi penutupan lahan pada KSA/KPA ini secara umum di dominasi oleh ekosistem gambut, yaitu sebesar 6.175,43 Ha. Hampir 49,09% data penutupan lahan utanan KSA/KPA Sungai Kapuas adalah hutan rawa sekunder, semak belukar rawa, dan sisanya adalah lahan terbuka dan semak belukar. Kondisi tutupan lahan yang cukup ideal, menjadikan kegiatan mitigasi di area ini berfokus pada pencegahan deforestasi (Gambar 77 dan Tabel 86)

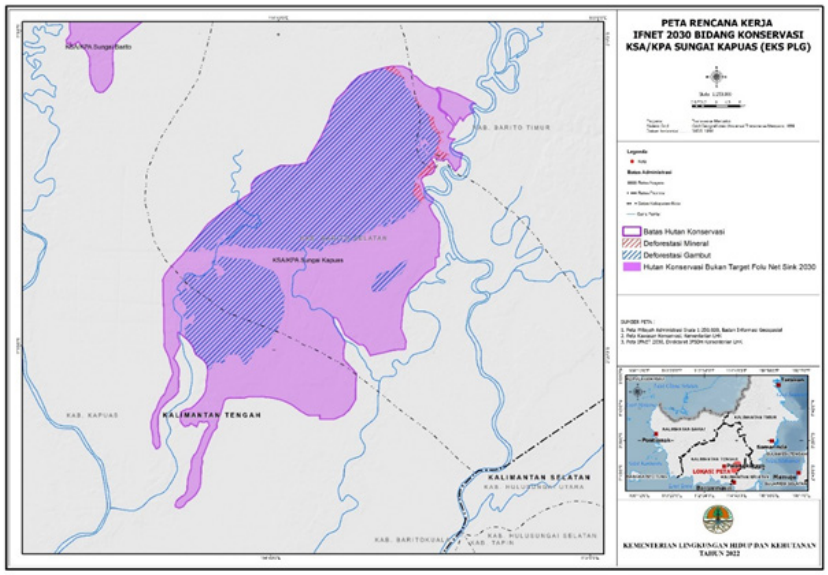

GAMBAR 77 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Sungai Kapuas

TABEL 84 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di KSA/KPA Sungai Kapuas

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	733,54
2	Deforestrasi Gambut	42.230,23
3	ENR	-

4	Non-Rotasi (PCK)	-
5	Restorasi Gambut	-
Total Keseluruhan		**42,963.77**

9. Taman Nasional Tanjung Puting

Taman Nasional Tanjung Puting terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Barat. KLHK (2016) menyatakan bahwa Suaka Margasatwa Tanjung Puting ditetapkan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1936 dengan luas 305.000 Ha untuk melindungi orangutan dan bekantan. Pada tanggal 12 Mei 1984 Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan sebagai taman nasional dengan SK Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/84. Dengan SK. Dirjen PHPA No. 46/Kpts/IV-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984, wilayah kerja Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan meliputi areal Suaka Marga satwa Tanjung Putting dengan luas 300.040 Ha.

Potensi flora yang terdapat di taman nasional ini adalah Licuala sp, Vatica sp, Tetramerista sp, Palaquium sp, Campnosperma sp, Casuarina sp, Ganua sp, Mesua sp, Dactylocladus sp, Alstonia sp, Durio sp, Eugenia sp, Calophyllum sp, Pandanus sp, Crinum sp, Sonneratia, Rhizophora, Barringtonia, nipah (Nypafruticans), Podocarpus sp, rotan (Calamus sp), dan Imperata cylindrica. Imperata cylindrica atau alang-alang tengah dikembangkan di Indonesia untuk biogas. Jenis fauna yang dilindungi di Taman Nasional Tanjung Puting adalah orangutan (Pongo pygmaeus), Bekantan (Nasalis larvatus), Owa-owa (Hylobates agilis), dan Beruang madu (Helarctos malayanus).

Meskipun demikian Harmita (2021) menyatakan bahwa kawasan ini diklasifikasikan kritis sebagai daerah tangkapan air, sumber daya hidrologi, penyimpanan keanekaragaman hayati, konservasi flora dan fauna, dan ekowisata. Manajemen kolaboratif diperkenalkan pada tahun 2010 oleh proyek JICA-CFET, namun hasilnya masih dipertanyakan, terutama karena kebijakan yang belum harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. TN Tanjung Puting bekerja sama dengan beberapa LSM seperti Orangutan Foundation Indonesia (OFI), Friends of National Park Foundation (FNPF), Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin), dan Illegal Logging Response Center (ILRC) untuk menerapkan manajemen kolaboratif. Keterlibatan pemangku kepentingan terkait di TN Tanjung Puting telah diakui, namun perlu dukungan yang kuat dari pemerintah dalam hal kebijakan. Urgensi harmonisasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam disampaikan Harmita (2021, hal. 43) sebagai berikut.

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Nasional Tanjung Puting memiliki resiko IBGF emisi dan kebakaran yang rendah, serta IBGF serapan yang sedang. Lokasi yang menjadi area PCK di taman nasional ini adalah seluas 80.020 Ha (Gambar 78 dan Tabel 87). Kondisi TN yang kompleks menjadikan area TN sebagai lokasi untuk kelima kegiatan mitigasi.

.

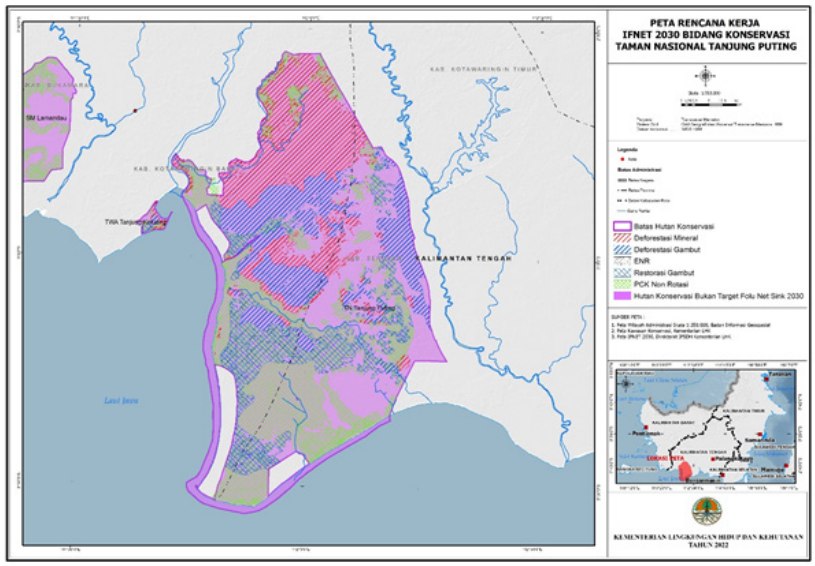

GAMBAR 78 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Tanjung Putting

TABEL 85 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Tanjung Puting

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	82,076.90
2	Deforestrasi Gambut	65,810.05
3	ENR	60
4	Non-Rotasi (PCK)	86,020
5	Restorasi Gambut	5,000
Total Keseluruhan		**238,966.95**

10. Taman Nasional Sebangau

Taman Nasional Sebangau terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. KLHK (2016) menyatakan bahwa tipe ekosistem taman nasional ini adalah rawa gambut yang relatif masih utuh. Taman nasional ini ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 423/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 568.700 ha.

Menurut KLHK (2016) taman nasional ini memiliki habitat satwa langka orangutan (Pongo pygmeus) terbesar; mencapai 14 % dari total populasi di Pulau Kalimantan. Jenis fllora yang terdapat di taman nasional ini adalah jelutung (Dyera costulata), belangeran (Shorea belangeran), bintangur (Calophyllum sclerophyllum), meranti (Shorea spp), nyatoh (Palaquium spp), kruing (Dipterocarpus spp), agathis (Agathis spp), dan menjalin (Xanthophyllum spp). Jenis fauna yang terdapat di taman nasional ini adalah rusa (Cervus

unicolor), kijang (Muntiacus atheroides), kancil (Tragulus javanicus), macan dahan (Neofelis nebulosa), tupai (Tupaia spp), loris (Nycticebus coucang), dan tarsius (Tarsius bancanus).

Taman Nasional Sebangau terdiri dari endapan alluvium (Qa) sungai dan gambut dan atau bahan organik, endapan bahan organik berwarna hitam sampai hitam kemerahan dengan kedalaman mencapai 12 meter yang membentuk kubah gambut (peat dome). Sebangau terdiri dari satuan lahan alluvial dan satuan lahan kubah gambut (gambut ombrogen/oligotroik) dengan tingkat kematangan ibril sampai saprik (KLHK, 2016).

Analisis peta Indeks Biogeofisik (IBGF) menunjukkan bahwa Taman Nasional Sebangau memiliki resiko IBGF emisi dan serapan yang rendah, serta IBGF kebakaran yang sedang. Lokasi yang menjadi area PCK di taman nasional ini adalah seluas 2.000 Ha (Gambar 79 dan Tabel 88), dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

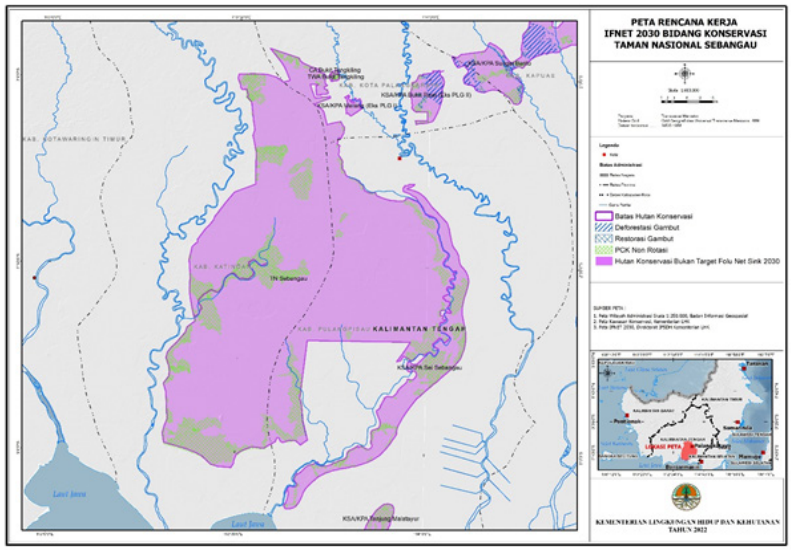

GAMBAR 79 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sebangau

TABEL 86 | Lokasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di TN Sebangau

No	Kegiatan Mitigasi	Luas (Ha)
1	Deforestrasi Mineral	-
2	Deforestrasi Gambut	64,59
3	ENR	-
4	Non-Rotasi (PCK)	2,000
5	Restorasi Gambut	63
Total Keseluruhan		**2,127.59**

12. Area Bernilai Konservasi Tinggi

Lokasi dan target pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi dalam rangka mendukung pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru sesuai dengan peta lokasi yang telah dipetakan ulang oleh Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem seluas 39,689,111.18 hektar (Tabel 89, Gambar 80 dan 81). Total luas tersebut terdiri atas 37,951,779.17 hektar di dalam kawasan hutan dan 1,723,551.17 hektar berada di area penggunaan lain, sedangkan sisanya seluas 13,780.84 hektar menunjukkan bahwa satwa liar juga melakukan aktivitas di sekitar badan air.

TABEL 87 | Target areal indikatif pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati tinggi pada Area Bernilai Konservasi Tinggi per provinsi

Provinsi	Luasan Target Per Fungsi Kawasan (Ha)*						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Total
Aceh	12.076,24	3.447,04	1.637.634,27	281.519,30	615,69	93.572,81	2.128.865,36
Bali	20,92	7,63	71.621,66	0	0,74	0,01	72.250,95
Banten	49,53	0,56	2.484,12	19,91	0	232,47	2.886,59
Bengkulu	6.430,56	0,00	76.010,42	13.565,77	28,12	54.897,29	150.932,17
Daerah Istimewa Yogyakarta	1,71	0	0	0	0	0	1,71
Dki Jakarta	13,87	2,25	5,30	3,65	0	0	25,06
Gorontalo	2.623,84	24,51	151.356,22	36.404,57	50.559,47	106.626,52	347.595,13
Jambi	38.398,77	13,04	129.849,48	150.089,78	1,24	133.472,91	451.825,22
Jawa Barat	511,41	0,00	61.536,52	90,07	0	337,08	62.475,08
Jawa Tengah	1.402,31	0,01	38.957,05	2.912,02	0	1.554,09	44.825,48
Jawa Timur	1.696,19	281,94	165.495,96	6.614,12	0	0	174.088,21
Kalimantan Barat	321.400,25	163,15	2.214.940,88	548.946,38	54.381,91	1.212.428,43	4.352.261,00
Kalimantan Selatan	1.863,08	36,77	372.855,14	2.131,39	81,57	0	386.967,96
Kalimantan Tengah	79.227,98	8,28	1.155.915,41	1.516.606,66	435.872,99	2.422.392,61	5.610.023,93
Kalimantan Timur	370.438,11	446,36	1.021.775,14	886.956,39	31.330,86	776.190,73	3.087.137,58

Provinsi	Luasan Target Per Fungsi Kawasan (Ha)*						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Total
Kalimantan Utara	114.472,79	5,04	1.034.192,94	64.111,44	6.723,71	18.772,93	1.238.278,85
Kepulauan Bangka Belitung	7.454,23	195,35	63.931,73	22.948,18	10,97	0	94.540,45
Kepulauan Riau	13.374,28	2.061,33	50.580,96	8.358,09	2.895,73	13.319,95	90.590,34
Lampung	4.842,29	80,60	46.229,42	0	0	2.364,73	53.517,05
Maluku	10.338,93	1.002,83	509.145,35	21.505,13	148.641,43	1.292,17	691.925,84
Maluku Utara	10.832,21	649,56	473.680,03	778,29	1.792,00	247,17	487.979,26
Nusa Tenggara Barat	9.005,69	369,65	360.337,91	5.634,28	0	18.951,17	394.298,70
Nusa Tenggara Timur	9.390,43	2,70	409.398,00	11.368,96	7.769,86	12.645,62	450.575,58
Papua	113.879,29	1.004,26	6.980.766,33	211.389,89	376.058,77	793.454,65	8.476.553,20
Papua Barat	52.152,61	1.163,15	1.497.016,37	406.755,60	300.277,21	81.509,34	2.338.874,29
Riau	42.776,78	3,56	63.737,01	630.820,23	38.781,92	199.382,76	975.502,26
Sulawesi Barat	14.443,16	38,52	276.523,20	24.497,30	6.557,33	138.077,19	460.136,70
Sulawesi Selatan	48.570,97	125,30	790.191,61	30.214,74	11.373,34	226.744,31	1.107.220,27
Sulawesi Tengah	155.969,35	1.461,54	1.289.451,23	161.479,75	96.256,22	614.189,38	2.318.807,47
Sulawesi Tenggara	33.216,14	434,55	892.378,14	42.286,19	18.114,74	246.334,60	1.232.764,36
Sulawesi Utara	8.908,87	161,32	112.067,85	5.276,60	6,40	29.946,45	156.367,49
Sumatera Barat	64.332,83	231,88	593.440,23	10.243,75	33.708,72	139.536,02	841.493,43
Sumatera Selatan	6.920,07	0,52	328.074,67	41.406,38		21.829,62	398.231,26
Sumatera Utara	55.815,47	357,62	667.891,02	51.160,34	3.954,62	230.113,84	1.009.292,91
Grand Total	**1.723.551,17**	**13.780,84**	**23.539.471,58**	**5.196.095,16**	**1.625.795,56**	**7.590.416,87**	**39.689.111,18**

Catatan: APL=Area Penggunaan Lain: HL=Hutan Lindung; HP=Hutan Produksi; HPK=Hutan Produksi Konversi; HPT=Hutan Produksi Terbatas

Beberapa spesies prioritas yang dijumpai di dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati di luar KSA, KPA dan TB diantaranya adalah harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), Gajah sumatera (Elephas maximus sumatrensis), orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus), bekantan (Nasalis larvatus), Anoa (Bubalus sp).

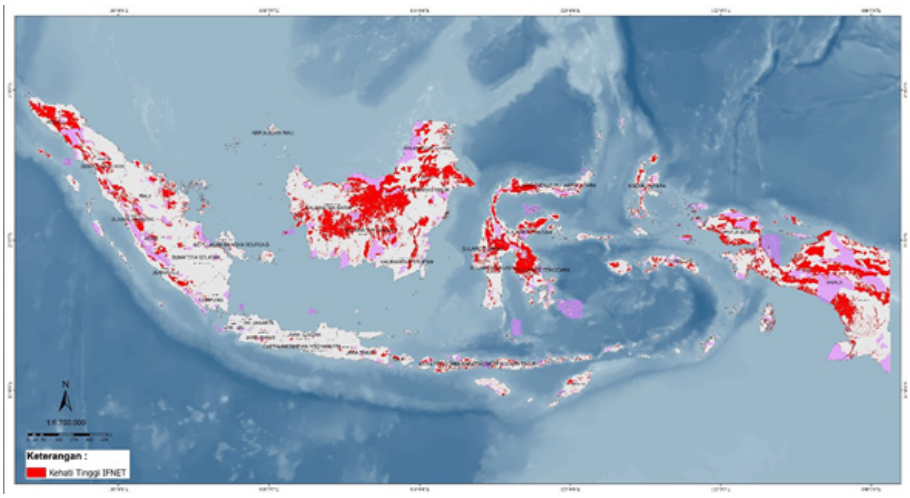

GAMBAR 80 | Peta target konservasi tinggi Indonesia's FOLU Net Sink 2030

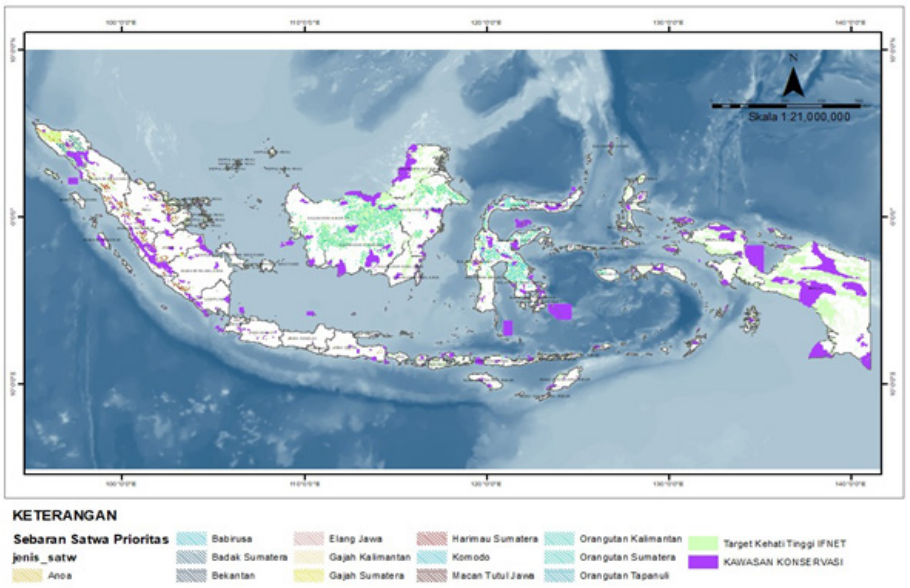

GAMBAR 81 | Peta sebaran satwa dilindungi diluar kawasan hutan konservasi pada target Konservasi Tinggi Indonesia's FOLU Net Sink 2030

Sebaran biogeografi keanekaragaman hayati Indonesia merujuk kepada pembagian bioregion yang dibagi menjadi 7 (tujuh), yaitu: (i) Sumatra, (ii) Jawa dan Bali, (iii) Kalimantan, (iv) Sulawesi, (v) Kepulauan Sunda Kecil (Lesser Sunda Island), (vi) Maluku, dan (vii) Papua.

A. Bioregion Sumatera

Region Sumatera merupakan area sebaran habitat fauna penting yang jenisnya pada umumnya terdapat di daratan Asia, meliputi jenis mamalia besar diantaranya harimau sumatera, Gajah sumatera, Badak sumatera, beruang madu dan orang utan sumatera. Data BPPE (2021) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kehati tinggi, sebagian besar terdapat pada tutupan lahan berupa: hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, badan air, hutan tanaman, pertanian lahan kering campur, perkebunan/kebun, belukar, belukar rawa, hutan rawa sekunder, pertanian lahan kering, semak belukar, perkebunan, pertanian lahan kering campur semak/kebun campur, dan tipe tutupan lahan lainnya dalam cakupan yang lebih kecil. Area ini secara garis besar merupakan area dengan tipe ekosistem dengan tipe komunitas vegetasi hutan dipterokarpa pamah, hutan pegunungan bawah, hutan pegunungan bawah, hutan gambut, hutan pamah (non dipterokarpa), hutan batugamping pamah pada bentang alam karst, terna rawa gambut, hutan kerangas pamah, mangrove, serta berbagai tipe ekosistem lainnya dalam cakupan yang lebih kecil. Bioregion Sumatera menaungi sembilan provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera barat, Bengkulu dan Lampung.

1. Provinsi Aceh

Sebagian besar target konservasi tinggi Provinsi Aceh merupakan habitat harimau sumatera, gajah sumatera, badak sumatera dan orangutan sumatera yang saling beririsan dengan total luas 5.410.867,65 hektar. Habitat satwa-satwa tersebut (Gambar 82) beririsan dengan sekitar 275.942 hektar APL (Tabel 90)

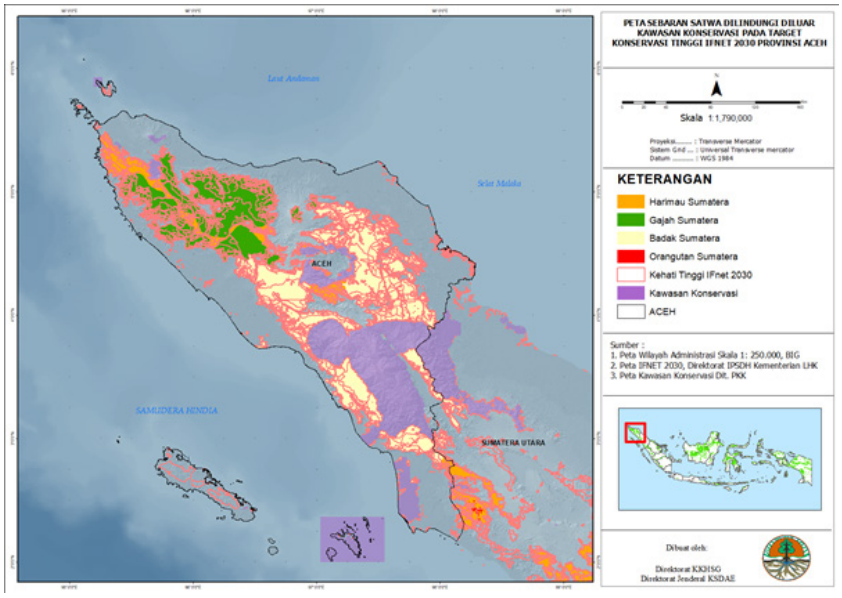

GAMBAR 82 | Sebaran Satwa Dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Aceh

TABEL 88 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Aceh

Provinsi/Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
ACEH	275.942,73	9.145,37	4.061.705,47	855.182,12	79,80	208.812,16	5.410.867,65
Lintas Kabupaten Unit I			590.903,85	100.007,30		96.950,22	787.861,37
Gajah sumatera			235.741,35	36.285,68		44.616,85	316.643,88
Harimau Sumatera			336.816,88	38.912,97		52.333,37	428.063,22
Orangutan sumatera			18.345,62	24.808,66			43.154,27
Lintas Kabupaten Unit II			262.161,78	163.708,72		26.621,36	452.491,86
Badak sumatera			14.661,33	22.033,85			36.695,19
Gajah sumatera			113.162,22	60.416,33		13.312,90	186.891,45
Harimau sumatera			124.941,25	63.480,49		13.308,46	201.730,21
Orangutan sumatera			9.396,97	17.778,05			27.175,02
Lintas Kabupaten Unit IV			621.320,36	56.101,30			677.421,66
Badak sumatera			68.275,44	13.623,33			81.898,76
Gajah sumatera			233.475,14	14.608,99			248.084,13
Harimau sumatera			281.422,69	14.608,69			296.031,38
Orangutan sumatera			38.147,09	13.260,29			51.407,38
Lintas Kabupaten Unit V			576.131,73	4.372,20		44.306.47	624.810,40
Badak sumatera			197.841,12	1.732,56		13.893,27	213.466,94
Gajah sumatera			31.878,22			690,60	32.568,83

Provinsi/Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Harimau sumatera			220.525,24	1.735,53		16.871,67	239.132,44
Orangutan sumatera			125.887,14	904,12		12.850,93	139.642,18
Lintas Kabupaten Unit VI			805.273,55	53.138,95		18.516,38	876.928,87
Badak sumatera			237.967,36	9.973,02		5.315,44	253.255,83
Gajah sumatera			120.436,29	8.594,92		2.851,05	131.882,26
Harimau sumatera			240.625,65	20.331,08		5.383,63	266.340,36
Orangutan sumatera			206.244,24	14.239,93		4.966,26	225.450,43
Unit III Aceh			1.205.031,04	477.593,94		22.409,68	1.705.034,65
Badak sumatera			348.466,89	124.796,71		5.666,35	478.929,94
Gajah sumatera			227.244,80	98.310,51		5.666,35	331.221,66
Harimau sumatera			362.314,82	132.930,72		5.666,35	500.911,90
Orangutan sumatera			267.004,53	121.555,99		5.410,63	393.971,15
Non-KPH	275.942,73	9.145,37	883,17	259,71	79,80	8,06	286.318,85
Badak sumatera	60.073,92	1.962,59	0,75	70,50		0,00	62.107,77
Gajah sumatera	55.723,49	2.007,38	427,48	63,37	39,90	2,47	58.264,09
Harimau sumatera	105.652,25	3.410,91	454,39	100,60		4,06	109.622,21
Orangutan sumatera	54.493,06	1.764,49	0,56	25,25	39,90	1,53	56.324,78

2. Provinsi Sumatera Utara

Luasan total target Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Utara adalah 1.009.292,91 hektar. Sebagian besar target konservasi tinggi Provinsi Sumatera Utara merupakan habitat harimau sumatera, orangutan sumatera, orangutan tapanuli, badak sumatera dan gajah sumatera dengan total luas 962.269,64 hektar. Terdapat sekitar 70.532,93 hektar APL yang sebagian besar adalah habitat harimau sumatera.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan kawasan hutan yang luas dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi menjadi habitat yang sesuai bagi harimau sumatera, karena harimau sumatera memiliki wilayah jelajah yang luas berkisar 8,5-18,9 km2. Variasi topografi yang dimiliki kawasan hutan di provinsi Sumatera Utara juga menjadi habitat bagi gajah sumatera yang menyukai dataran rendah dan cenderung landai, serta orangutan sumatera dan orangutan tapanuli yang menyukai pepohonan untuak memudahkan berpindah antar pohon. Namun konflik satwa dan manusia terus terjadi karena satwa sering dianggap menjadi hama bagi kebun masyarakat. Maka kualitas hutan di provinsi Sumatera Utara menjadi penting karena akan memengaruhi penyebaran satwa tersebut serta perlu dilakukannya mitigasi konflik manusia dan satwa liar, perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan hutan untuk menjamin keberadaan satwa.

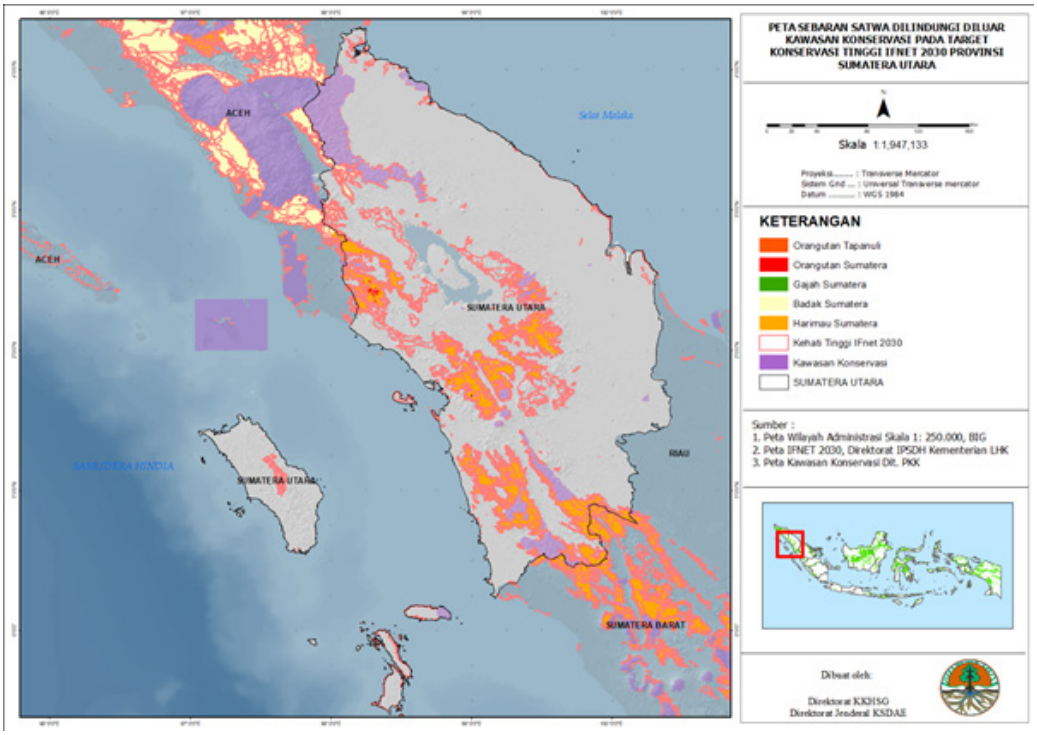

GAMBAR 83 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sumatera Utara

TABEL 89 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Utara

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
SUMATERA UTARA	70.532,93	580.136,56	47.746,03	3.924,23	259.929,89	962.269,64

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Deli Serdang		111,48	251,19		56,85	419,52
Badak sumatera			23,85		17,66	41,52
Harimau sumatera		111,48	169,89		19,76	301,13
Orangutan sumatera			57,45		19,42	76,87
KPH Tapteng		23.819,84				23.819,84
Harimau sumatera		12.673,69				12.673,69
Orangutan tapanuli		11.146,15				11.146,15
KPH Wilayah I Stabat	7,47		82,36		3.090,41	3.180,24
Badak sumatera	1,88		27,73		1.036,09	1.065,70
Gajah sumatera	1,84				21,79	23.,63
Harimau sumatera	1,88		27,73		1.036,09	1.065,70
Orangutan sumatera	1,87		26,89		996,43	1.025,20
KPH Wilayah VI Sipirok		263,87	104,32		6.564,12	6.932,31
harimau sumatera		263,87	104,32		6.564,12	6.932,31
KPH Wilayah XV Kabanjahe		58.699,40			1.364,66	60.064,05
Badak sumatera		20.349,17			612,47	20.961,64
Harimau sumatera		20.596,12			624,81	21.220,93
Orangutan sumatera		17.754,11			127,38	17.881,49

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
KPHP Simalungun Aek Nauli		299,42				299,42
Harimau sumatera		299,42				299,42
KPHP Tapanuli Utara		11.502,78	1.194,42		496,39	13.193,59
Harimau sumatera		11.502,78	1.194,42		496,39	13.193,59
KPHP Unit XV Pakpak Bharat		65.017,95	469,52		40.721,91	106.209,38
Harimau sumatera		33.567,09	402,05		30.757,53	64.726,67
Orangutan sumatera		31.450,86	67,47		9.964,37	41.482,71
Palas dan Paluta		28.762,49	457,87		300,10	29.520,45
Gajah sumatera			1,07			1,07
Harimau sumatera		28.762,49	456,80		300,10	29.519,38
Panyabungan	22,47	7.314,09	5.419,78	9,23	74.335,12	87.100,68
Harimau sumatera	22,47	7.314,09	5.419,78	9,23	74.335,12	87.100,68
Tapsel dan Padang Sidempuan		56.224,20	6.715,69		18.217,33	81.157,21
harimau sumatera		40.081,52	4.627,34		18.217,33	62.926,19
Orangutan tapanuli		16.142,68	2.088,34			18.231,02
Tapteng dan Humbahas		19.657,06	44,64		4.684,80	24.386,49
harimau sumatera		9.000,70	44,64		3.920,58	12.965,92

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Orangutan sumatera		10.656,36			764,22	11.420,58
Tapteng, Taput dan Humbahas		2.885,52	7.235,17		12.824,17	22.944,85
harimau sumatera		2.885,52	7.235,17		12.824,17	22.944,85
Taput		135.712,43			14.133,56	149.845,98
Harimau sumatera		86.548,33			14.117,33	100.665,66
Orangutan Tapanuli		49.164,10			16,23	49.180,32
Toba Samosir Labuhanbatu Utara	1,12	33.785,71			11.323,57	45.110,39
Harimau sumatera	1,12	33.785,71			11.323,57	45.110,39
Unit XVII Doloksanggul		1.988,50	25.087,52		369,67	27.445,68
harimau sumatera		1.670,12	25.087,52		369,67	27.127,30
Orangutan sumatera		318,38				318,38
Unit XVIII Doloksanggul		117,74				117,74
Harimau sumatera		117,74				117,74
UPT KPH Rokan		367,29			14.217,52	14.584,81
Harimau sumatera		367,29			14.217,52	14.584,81
UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan Unit XXX Panyabungan (Madina)	6,04	80.377,46			19.472,56	99.856,06

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Harimau sumatera	6,04	80.377,46			19.472,56	99.856,06
Non-KPH	70.495,84	53.229,35	683,56	3915.01	37.757,17	166.080,93
Badak sumatera	4.406,62	6.514,73			9.174,34	20095.69
Gajah sumatera	0,01					0,01
Harimau sumatera	52.167,42	38.804,34	630,21	3915.01	19.412,09	114.929,07
Orangutan sumatera	5.334,30	7.910,28	53,36		9.170,73	22.468,67
Orangutan tapanuli	8.587,49	0,00				8587,49

3. Provinsi Sumatera Barat

Luasan total target Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah 841.493,43 hektar. Sebagian besar target Konservasi Tinggi Provinsi Sumatera Barat merupakan habitat harimau sumatera seluas 782.105,38 hektar. Terdapat sekitar 59.650,87 hektar APL yang merupakan habitat harimau sumatera.

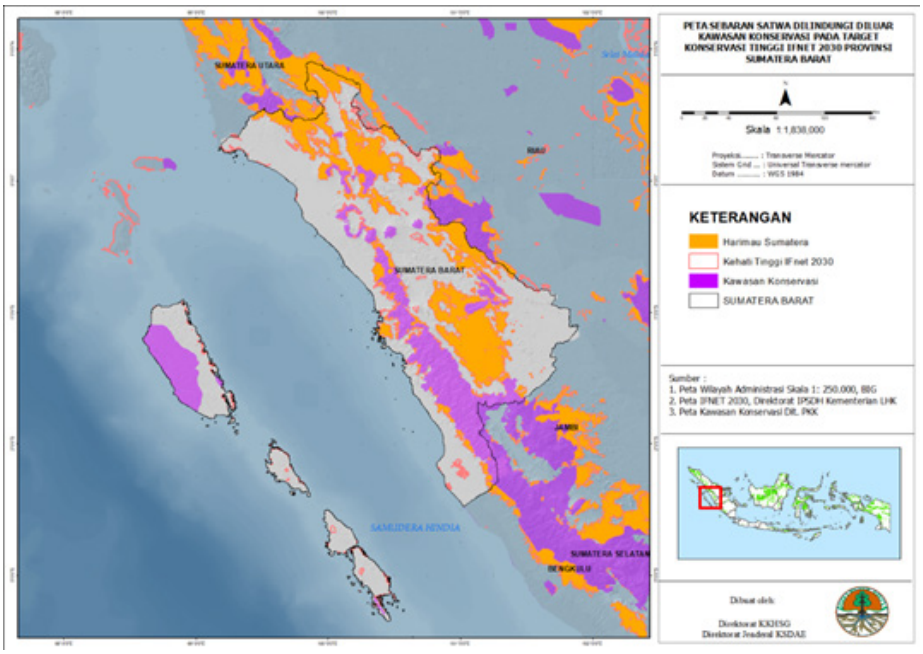

GAMBAR 84 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sumatera Barat

TABEL 90 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Barat

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
SUMATERA BARAT	59.650,87	10,24	546.964,59	8.483,73	27.534,26	139.461,69
Bukit Barisan	6,99		32.947,54	37,47		197,37
Harimau sumatera	6,99		32.947,54	37,47		197,37
Dharmasraya	24,66					22,59
Harimau sumatera	24,66					22,59
Kampar Kiri			8.268,94			11.411,26
Harimau sumatera			8.268,94			11.411,26
Kuantan Singingi			4.198,88			1.209,62
Harimau sumatera			4.198,88			1.209,62
Lima Puluh Kota	27,13	7,09	54.297,65			11.151,09
Harimau sumatera	27,13	7,09	54.297,65			11.151,09
Muko-Muko						415,89
Harimau sumatera						415,89
Pesisir Selatan:				107,88		15.437,27
Harimau sumatera				107,88		15.437,27
Rokan Hulu			6,15			1.404,60
Harimau sumatera			6,15			1.404,60
Sijunjung			52.221,55	5.153,26	0,32	21.719,89

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Harimau sumatera			52.221,55	5.153,26	0,32	21.719,89
Solok			94.285,46	876,22		8.657,89
Harimau sumatera			94.285,46	876,22		8.657,89
Unit I	24,13	2,86	201.792,91	284,92		14.652,26
Harimau sumatera	24,13	2,86	201.792,91	284,92		14.652,26
Unit III			17.877,52			3.918,78
Harimau sumatera			17.877,52			3.918,78
Unit VII			80.132,26	2.023,89		48.837,23
Harimau sumatera			80.132,26	2.023,89		48.837,23
Non-KPH	59.567,95	0,29	935,74	0,10	27.533,94	425,96
Harimau sumatera	59.567,95	0,29	935,74	0,10	27.533,94	425,96

4. Provinsi Riau

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Riau adalah 975.502,26 hektar. Lebih dari setengahnya target konservasi tinggi Provinsi Riau merupakan habitat harimau sumatera, orangutan sumatera dan gajah sumatera dengan total luas 694.474,42 hektar. Terdapat sekitar 11.077,99 hektar APL yang sebagian besar merupakan habitat harimau sumatera.

Provinsi Riau memiliki ekosistem hutan hujan tropis dengan curah hujan tinggi, beriklim tropis, serta pepohonan hijau dengan ketinggian hingga 30 m (Suwondo et al. 2019). Pohon yang tinggi akan memudahkan orangutan sumatera untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Upaya yang bisa dilakukan adalah perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan hutan untuk menjamin keberadaan satwa.

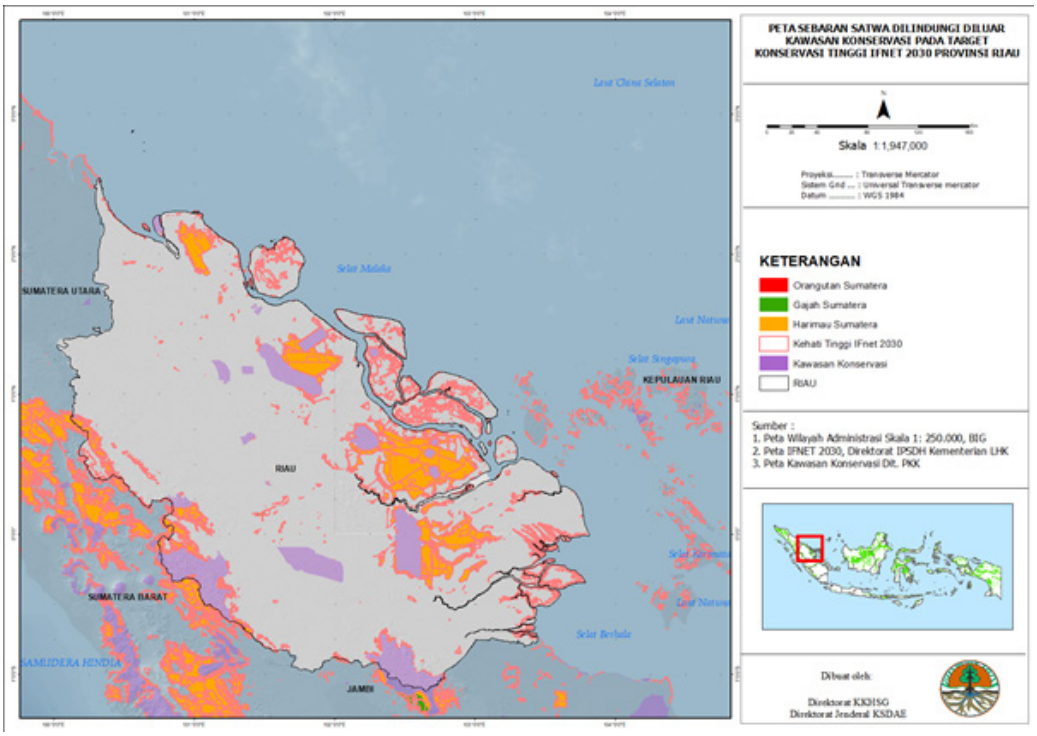

GAMBAR 85 | Sebaran Satwa Dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Riau

TABEL 91 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Riau

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
RIAU	11.077,99	32.535,87	586.318,03	13.492,46	51.050,07	694.474,42
Indragiri Hulu		4.048,07			10.053,97	14.102,04
Gajah sumatera		1.350,31				1.350,31
Harimau sumatera		1.350,31			5.245,80	6.596,11
Orangutan sumatera		1.347,46			4.808,17	6.155,63
Kampar Kiri		22.235,76	606,25		15.963,03	38.805,04
Harimau sumatera		22.235,76	606,25		15.963,03	38.805,04

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Kuantan Singingi		11,60			490,14	501,75
Harimau sumatera		11,60			490,14	501,75
Pelalawan XX			157,65		248,78	406,42
Gajah sumatera			134,86		124,39	259,25
Harimau sumatera			22,79		124,39	147,18
Pelalawan XXI			17.033,15			17.033,15
Harimau sumatera			17.033,15			17.033,15
Rokan Hulu					6.154,14	6.154,14
Harimau sumatera					6.154,14	6.154,14
Siak			3.628,89		0,32	3.629,21
Gajah sumatera			561,61			561,61
Harimau sumatera			3.067,28		0,32	3.067,60
Tasik Besar Unit II Riau Serkap		122,41	273.021,74		285,57	273.429,73
Harimau sumatera		122,41	273.021,74		285,57	273.429,73
(blank)			54.945,17		1.185,65	56.130,82
Harimau sumatera			54.945,17		1.185,65	56.130,82
Unit III			3.527,31			3.527,31
Harimau sumatera			3.527,31			3.527,31
Unit VI			82.797,66		85,13	82.882,79
Harimau Sumatera			82.797,66		85,13	82.882,79

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Unit XIX			5707.54			5.707,54
Gajah sumatera			2.680,91			2.680,91
Harimau sumatera			3.026,63			3.026,63
Unit XVI		34,37			6.728,02	6.762,39
Harimau sumatera		34,37			6.728,02	6.762,39
Unit XVII		6.083,64			893,43	6.977,06
Harimau Sumatera		6.083,64			893,43	6.977,06
Unit XXIX					818,60	818,60
Harimau sumatera					435,67	435,67
Orangutan sumatera					382,93	382,93
Unit XXVII			89.788,97			89.788,97
Harimau sumatera			89.788,97			89.788,97
Unit XXVIII		0,01	54.527,49		37,87	54.565,38
Harimau sumatera		0,01	54.527,49		37,87	54.565,38
Unit XXXII			575,35		8.079,11	8.654,47
Harimau sumatera			575,35		8.079,11	8.654,47
Non-KPH	11.077,99		0,86	13.492,46	26,30	24.597,61
Gajah sumatera	3,61			162,00		165,60
Harimau sumatera	10.396,80		0,86	12.320,75	26,30	22.744,70
Orangutan sumatera	677,59			1.009,71		1687,30

5. Provinsi Jambi

Luasan total target konservasi tinggi di provinsi jambi adalah 451.825,22 hektar. sebagian besar target konservasi tinggi Provinsi Jambi merupakan habitat harimau sumatera, gajah sumatera, dan orangutan sumatera yang saling beririsan dengan total luas 549.696,89 hektar. Terdapat sekitar 38.108,08 hektar APL yang sebagian besar merupakan Habitat harimau sumatera.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki hutan hujan tropis dataran rendah yang luas dan keanekragaman hayati yang tinggi. Provinsi Jambi memiliki ketinggian rata rata 68-554 mdpl dengan 80% wilayahnya memiliki topografi landai, yang menjadi preferensi area jelajah gajah sumatera untuk mencari makan maupun melakukan aktivitas sosial.

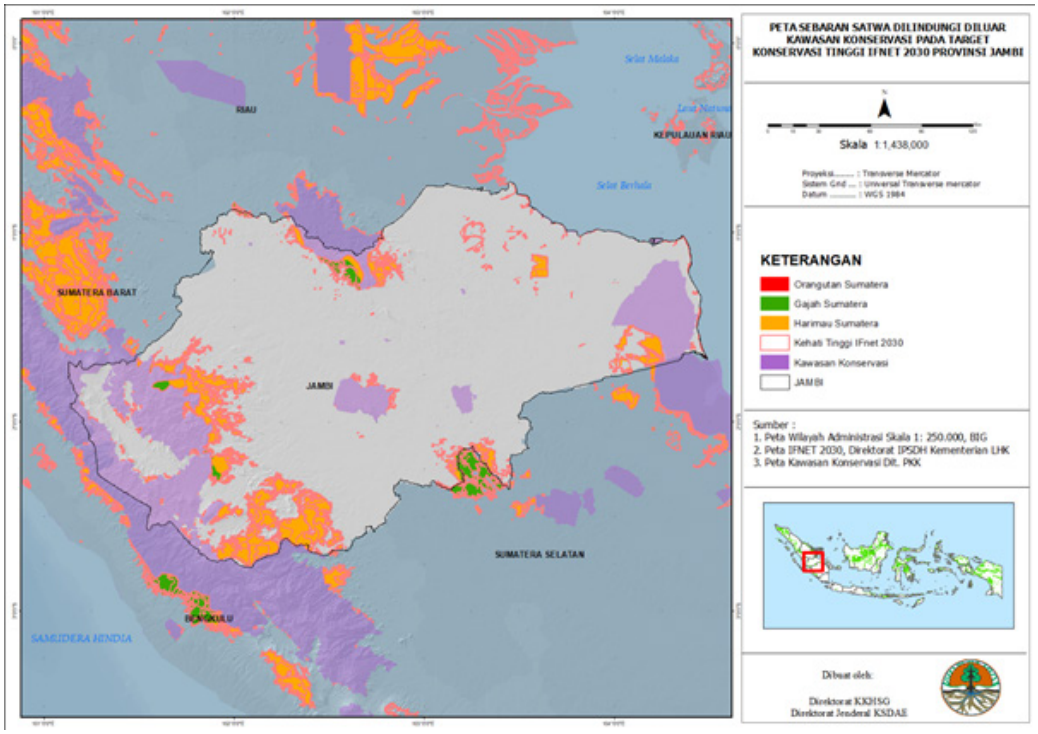

GAMBAR 86 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Jambi

TABEL 92 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Jambi

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
JAMBI	38.108,08	1,17	127.081,83	194.960,08	189.545,73	549.696,89
Kerinci				3.058,76		3.058,76

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Gajah sumatera				553,25		553,25
Harimau sumatera				2.505,51		2.505,51
Lalan Sembilang				2.091,76		2.091,76
Harimau sumatera				2.091,76		2.091,76
Limau			46.824,96	22.796,62	19.738,03	89.359,61
Harimau sumatera			46.824,96	22.796,62	19.738,03	89.359,61
Merangin			27.723,18	5.302,03	19.299,80	52.325,02
Harimau sumatera			27.723,18	5.302,03	19.299,80	52.325,02
Meranti				19.999,81	53.222,57	73.222,37
Gajah sumatera				9.851,36	26.222,37	36.073,74
Harimau sumatera				10.148,44	27.000,19	37.148,64
Tebo Barat			4.342,12	12.138,90	6.856,04	23.337,06
Gajah sumatera			1.449,44	3.854,46	15,33	5.319,24
Harimau sumatera			1.449,44	4.458,92	3.420,35	9.328,72
Orangutan sumatera			1.443,23	3.825,52	3.420,35	8.689,10
Tebo Timur				34.469,48	19.051,55	53.521,03
Gajah sumatera				10.992,99	2.444,07	13.437,06
Harimau sumatera				12.144,72	8.303,74	20.448,46
Orangutan sumatera				11.331,76	8.303,74	19.635,51
Unit II				13.728,46		13.728,46

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Gajah sumatera				569,81		569,81
Harimau sumatera				13.158,65		13.158,65
Unit III			24.110,93	26.381,48		50.492,41
Gajah sumatera			4.325,27			4.325,27
Harimau sumatera			19.785,66	26.381,48		46.167,14
Unit IV				14.462,47		14.462,47
Gajah sumatera				7,96		7,96
Harimau sumatera				14.454,51		14.454,51
Unit V			1.448,87	20.675,36	4.992,45	27.116,68
Gajah sumatera				3.687,28		3.687,28
Harimau sumatera			1.448,87	16.988,08	4.992,45	23.429,40
Unit VIII				9.064,25	7.316,93	16.381,18
Gajah sumatera				2.035,73	2.432,00	4.467,73
Harimau sumatera				7.028,52	4.884,94	11.913,45
Unit XII				3.845,75	14.566,94	18.412,69
Gajah sumatera				146,20	1.919,07	2.065,27
Harimau sumatera				3.699,55	12.647,87	16.347,42
Unit XIII			12.509,62		13.399,58	25.909,20
Harimau sumatera			12.509,62		13.399,58	25.909,20
Unit XIV			10.073,81	15,95		10.089,75

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Harimau sumatera			10.073,81	15,95		10.089,75
Unit XVI				6.920,99	31.006,30	37.927,28
Harimau sumatera				3.549,66	15.592,57	19.142,23
Orangutan sumatera				3.371,33	15.413,73	18.785,06
Non-KPH	38.108,08	1,17	48,35	8,01	95,54	38.261,15
Gajah sumatera	2.202,42			1,90		2.204,32
Harimau sumatera	35.432,35	1,17	48,35	4,54	95,53	35.581,94
Orangutan sumatera	473,30			1,58	0.01	474,89

6. Provinsi Sumatera Selatan

Luasan total target Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan adalah 398.231,26 hektar. Sebagian besar target Konservasi Tinggi Provinsi Sumatera Selatan merupakan habitat harimau sumatera, dan gajah sumatera seluas 277.257,69 hektar. Terdapat sekitar 3.688,42 hektar APL yang sebagian besar merupakan Habitat harimau sumatera.

Habitat harimau sumatera di Provinsi Sumatera Selatan, dapat dijumpai di ekosistem hutan hujan dataran rendah hingga hingga dataran tinggi seperti perbukitan dan pegunungan, dan juga menghuni berbagai jenis habitat lainnya. Sementara itu Gajah sumatera memiliki preferensi dataran rendah yang cenderung landau. Sebagai provinsi dengan berbagai tipe eoksistem hutan hujan tropis dan kenaekaragaman hayati yang tinggi, maka menjadi penting untuk melakukan mitigasi konflik manusia dan satwaliar, perlindungan, pengamanan dan panjagaan kawasan konservasi.

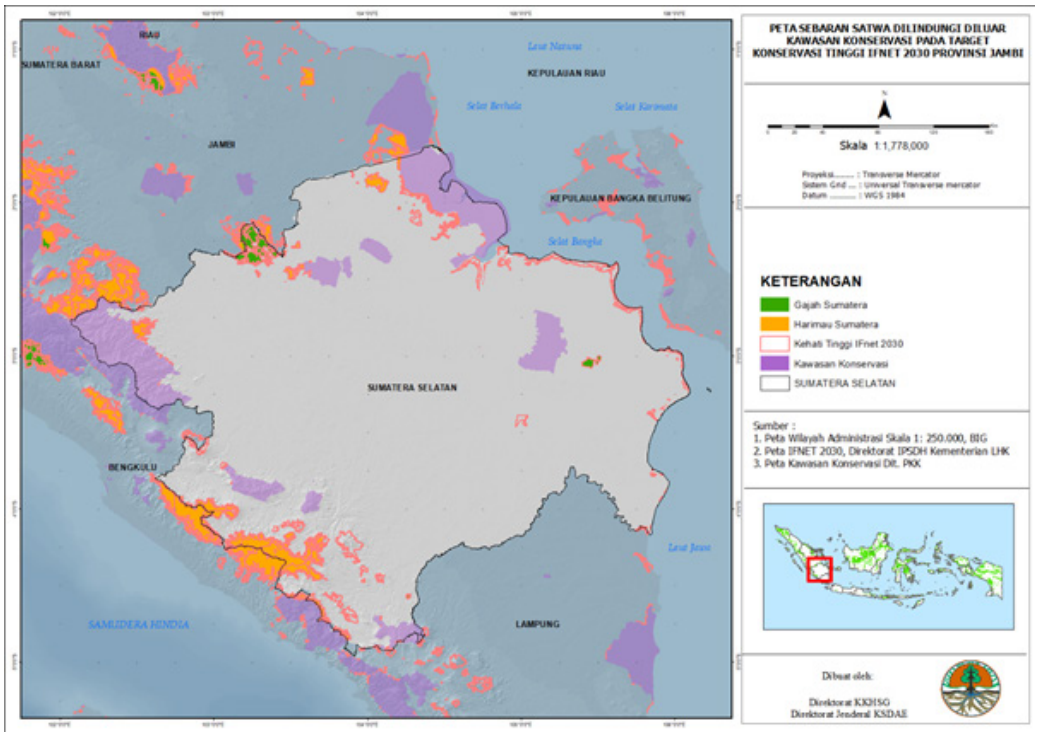

GAMBAR 87 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sumatera Selatan

TABEL 93 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan				
	APL	HL	HP	HPT	Grand Total
SUMATERA SELATAN	3.688,42	222.110,85	32.623,25	18.835,17	277.257,69
Bukit Nanti		9.434,95			9.434,95
Harimau sumatera		9.434,95			9.434,95
Dempo		17.249,53			17.249,53
Harimau sumatera		17.249,53			17.249,53
Kaur		35.053,94			35.053,94
Harimau sumatera		35.053,94			35.053,94

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan				
	APL	HL	HP	HPT	Grand Total
Lalan Mangsang Mendis			13.903,68		13.903,68
Gajah sumatera			248,63		248,63
Harimau sumatera			13.655,06		13.655,06
Lalan Sembilang			10.680,04		10.680,04
harimau sumatera			10.680,04		10.680,04
Limau			1,95		1,95
harimau sumatera			1,95		1,95
Liwa		120,52			120,52
Gajah sumatera		120,52			120,52
Meranti		4.603,47	1.428,37	5.317,05	11.348,89
Gajah sumatera			79,08	460,70	539,78
Harimau sumatera		4.603,47	1.349,29	4.856,35	10.809,11
Ogan Ulu	18,79	39.828,58			39.847,36
Harimau sumatera	18,79	39.828,58			39.847,36
Rawas			1.226,34	13.517,82	14.744,16
Harimau sumatera			1.226,34	13.517,82	14.744,16
Seluma	46,17	45.526,22			45.572,39
Harimau sumatera	46,17	45.526,22			45.572,39
Unit X		12.715,44			12.715,44
Harimau sumatera		12.715,44			12.715,44

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan				
	APL	HL	HP	HPT	Grand Total
Unit XI		16.862,01			16.862,01
Harimau Sumatera		16.862,01			16.862,01
Unit XIX		665,63			665,63
Gajah sumatera		665,63			665,63
Unit XVII		15.725,33			15.725,33
Harimau sumatera		15.725,33			15.725,33
Unit XVIII		24.290,43			24.290,43
Harimau sumatera		24.290,43			24.290,43
Unit XXIII			5.372,62		5.372,62
Gajah sumatera			5.372,62		5.372,62
Unit XXIV		8,27	10,24		18,51
Gajah sumatera		8,27	10,24		18,51
Non-KPH	3.623,47	26,53		0,30	3.650,30
Gajah sumatera	102,66				102,66
Harimau sumatera	3.520,81	26,53		0,30	3.547,65

7. Provinsi Lampung

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Lampung adalah 53.517,05 hektar. Sebagian kecil target konservasi tinggi Provinsi Lampung merupakan habitat harimau sumatera, dan Gajah sumatera seluas 6.309,01 hektar. Terdapat sekitar 1.367,50 hektar APL yang sebagian besar merupakan Habitat harimau sumatera

Provinsi Lampung memiliki berbagai jenis kawasan konservasi yang tersebar, seperti TN Way Kambas dan TN Bukit Barisan Selatan. Kondisi topografi yang landai, berbukit dan ketinggian rata-rata 300 mdpl memudahkan satwa besar khususnya gajah sumatera dan harimau sumatera dalam beraktivitas. Hal ini menjadi penting untuk dilakukannya, maka menjadi penting untuk melakukan mitigasi konflik manusia dan satwaliar, perlindungan, pengamanan dan panjagaan kawasan konservasi.

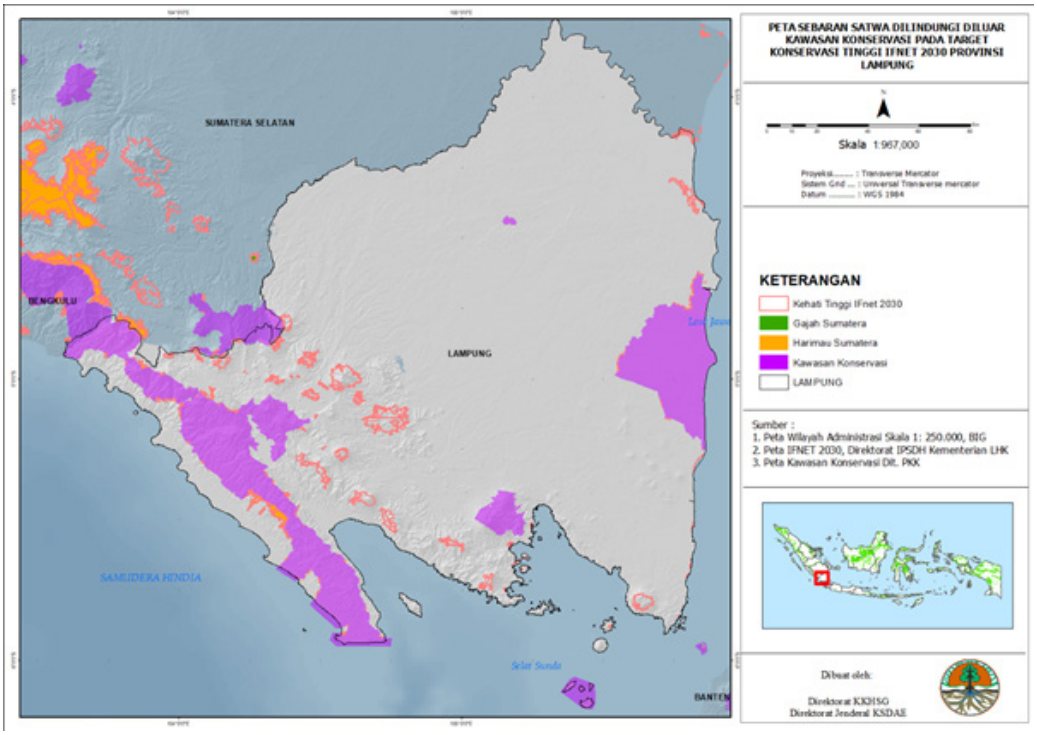

GAMBAR 88 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Lampung

TABEL 94 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Lampung

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan				
	APL	Badan Air	HL	HPT	Grand Total
LAMPUNG	1.367,50	17,20	2.733,78	2.190,53	6.309,01
Kota Agung Utara			382,25		382,25
Gajah sumatera			57,59		57,59
Harimau sumatera			324,66		324,66

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan				
	APL	Badan Air	HL	HPT	Grand Total
Register 47 Way Terusan			65,77		65,77
Gajah sumatera			0,03		0,03
Harimau sumatera			65,74		65,74
Unit I			2.285,34	2.190,53	4.475,87
Gajah sumatera			113,57	180,15	293,73
Harimau sumatera			2.171,77	2.010,37	4.182,14
Non-KPH	1.367,50	17,20	0,41		1.385,12
Gajah sumatera	161,20	8,26			169,46
Harimau sumatera	1.206,31	8,94	0,41		1.215,66

8. Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang memiliki hutan hujan tropis dataran rendah yang luas dan keanekragaman hayati yang tinggi. Provinsi Bengkulu memiliki ketinggian rata rata kurang dari 500 mm. Luas total target konservasi tinggi di Provinsi Bengkulu adalah 185.421,16 hektar. Sebagian besar target konservasi tinggi Provinsi Bengkulu merupakan habitat harimau sumatera seluas 128.065,53. Terdapat sekitar 7.091,60 hektar APL yang sebagian besar merupakan habitat harimau sumatera.

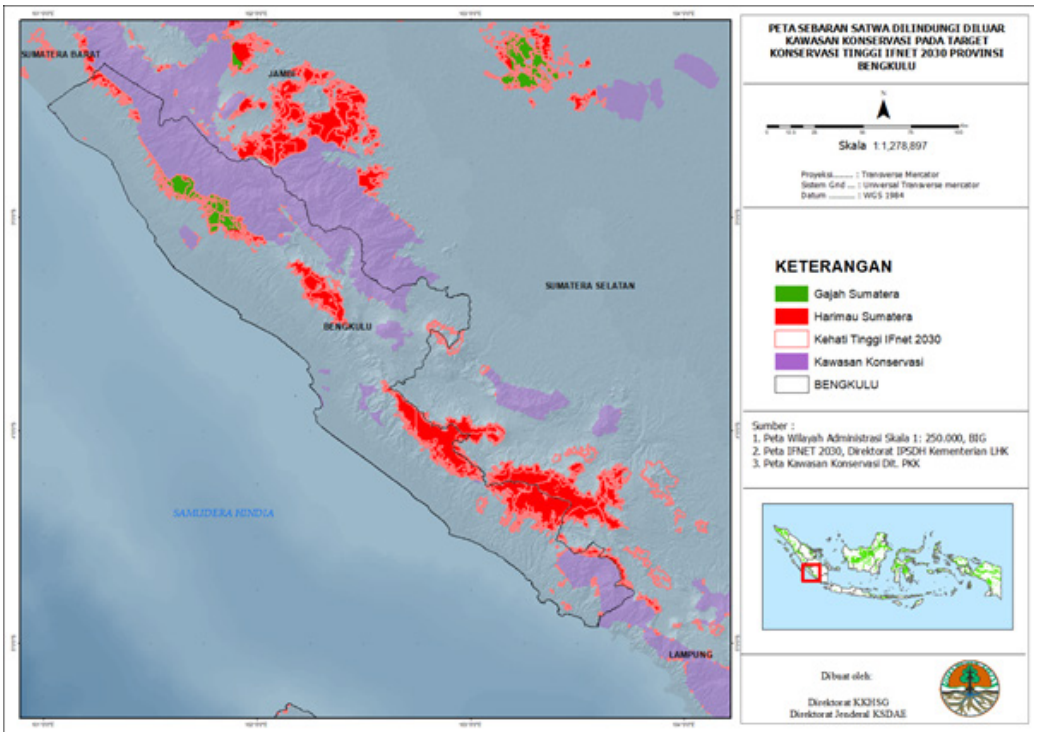

GAMBAR 89 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Bengkulu

TABEL 95 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Bengkulu

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
BENGKULU	7.091,60	68.441,59	26.915,98	55,74	82.916,25	185.421,16
Bengkulu Selatan		21.639,45			1.638,95	23.278,40
Harimau Sumatera		21.639,45			1.638,95	23.278,40
Bengkulu Utara			17.747,81		28.468,30	46.216,11
Gajah sumatera			8.873,90		10.996,36	19.870,27
Harimau Sumatera			8.873,90		17.471,94	26.345,84
Kaur		4.324,87	215,56		4.208,72	8.749,14

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Harimau Sumatera		4.324,87	215,56		4.208,72	8.749,14
Lintas Kabupaten		35.280,30				35.280,30
Harimau Sumatera		35.280,30				35.280,30
Muko-Muko			8.952,62		46.321,17	55.273,79
Gajah sumatera			4.476,31		17.058,91	21.535,22
Harimau Sumatera			4.476,31		29.262,26	33.738,57
Seluma		7.194,42			2.228,00	9.422,42
Harimau Sumatera		7.194,42			2.228,00	9.422,42

9. Provinsi Jambi

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki hutan hujan tropis dataran rendah yang luas dan keanekragaman hayati yang tinggi. Provinsi Jambi memiliki ketinggian rata rata 10 – 60 mdpl. Luas total target konservasi tinggi di Provinsi Jambi adalah 549.696,89 hektar. Sebagian besar target konservasi tinggi Provinsi Jambi merupakan habitat harimau sumatera seluas 429.401,41. Terdapat sekitar 38.108,08 hektar APL yang sebagian besar merupakan habitat harimau sumatera.

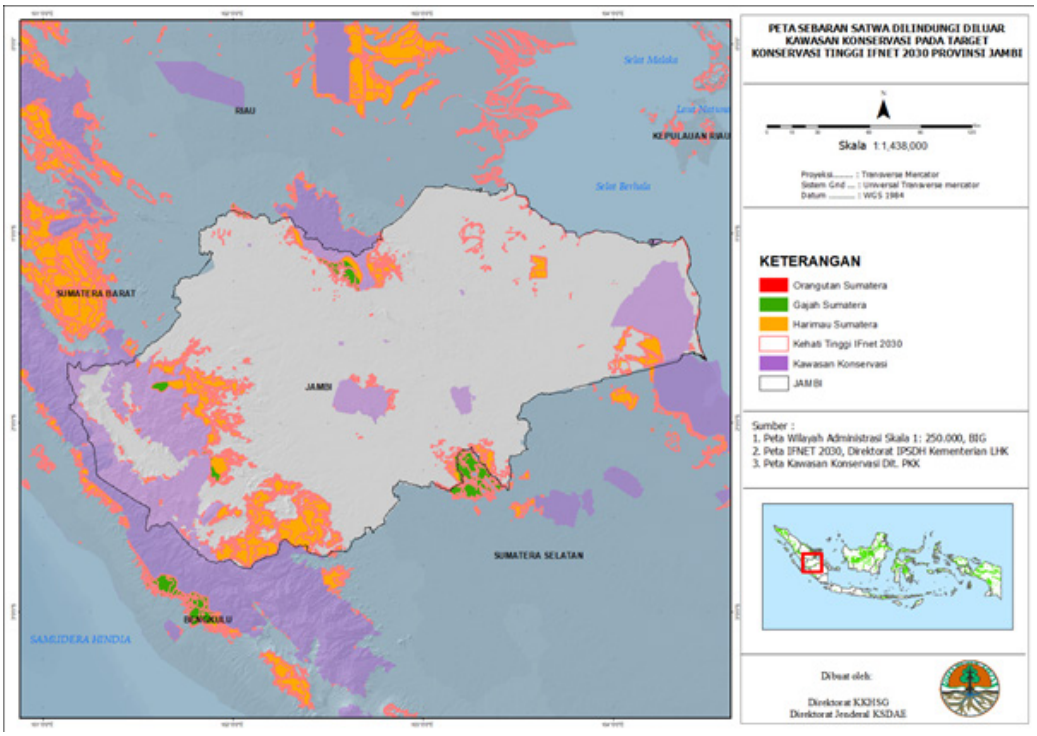

GAMBAR 90 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Jambi

TABEL 96 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Jambi

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	Badan Air	HL	HP	HPT	Grand Total
JAMBI	38108.08	1.17	127081.83	194960.08	189545.73	549696.89
Kerinci				3058.76		3058.76
Gajah sumatera				553.25		553.25
Harimau Sumatera				2505.51		2505.51
Lalan Sembilang				2091.76		2091.76
Harimau Sumatera				2091.76		2091.76
Limau			46824.96	22796.62	19738.03	89359.61

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	Badan Air	HL	HP	HPT	Grand Total
Harimau Sumatera			46824.96	22796.62	19738.03	89359.61
Merangin			27723.18	5302.03	19299.80	52325.02
Harimau Sumatera			27723.18	5302.03	19299.80	52325.02
Meranti				19999.81	53222.57	73222.37
Gajah sumatera				9851.36	26222.37	36073.74
Harimau Sumatera				10148.44	27000.19	37148.64
Tebo Barat			4342.12	12138.90	6856.04	23337.06
Gajah sumatera			1449.44	3854.46	15.33	5319.24
Harimau Sumatera			1449.44	4458.92	3420.35	9328.72
Orangutan sumatera			1443.23	3825.52	3420.35	8689.10
Tebo Timur				34469.48	19051.55	53521.03
Gajah sumatera				10992.99	2444.07	13437.06
Harimau Sumatera				12144.72	8303.74	20448.46
Orangutan sumatera				11331.76	8303.74	19635.51
Unit II				13728.46		13728.46
Gajah sumatera				569.81		569.81
Harimau Sumatera				13158.65		13158.65
Unit III			24110.93	26381.48		50492.41
Gajah sumatera			4325.27			4325.27
Harimau Sumatera			19785.66	26381.48		46167.14

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	Badan Air	HL	HP	HPT	Grand Total
Unit IV				14462.47		14462.47
Gajah sumatera				7.96		7.96
Harimau Sumatera				14454.51		14454.51
Unit V			1448.87	20675.36	4992.45	27116.68
Gajah sumatera				3687.28		3687.28
Harimau Sumatera			1448.87	16988.08	4992.45	23429.40
Unit VIII				9064.25	7316.93	16381.18
Gajah sumatera				2035.73	2432.00	4467.73
Harimau Sumatera				7028.52	4884.94	11913.45
Unit XII				3845.75	14566.94	18412.69
Gajah sumatera				146.20	1919.07	2065.27
Harimau Sumatera				3699.55	12647.87	16347.42
Unit XIII			12509.62		13399.58	25909.20
Harimau Sumatera			12509.62		13399.58	25909.20
Unit XIV			10073.81	15.95		10089.75
Harimau Sumatera			10073.81	15.95		10089.75
Unit XVI				6920.99	31006.30	37927.28
Harimau Sumatera				3549.66	15592.57	19142.23
Orangutan sumatera				3371.33	15413.73	18785.06
Non-KPH	38108.08	1.17	48.35	8.01	95.54	38261.15

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	Badan Air	HL	HP	HPT	Grand Total
Gajah sumatera	2202.42			1.90		2204.32
Harimau Sumatera	35432.35	1.17	48.35	4.54	95.53	35581.94
Orangutan sumatera	473.30			1.58	0.01	474.89

10. Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang memiliki hutan hujan tropis dataran rendah yang luas dan keanekragaman hayati yang tinggi. Kepulauan Bangka Belitung memiliki ketinggian rata-rata dataran rendah 50 mdpl dan ketinggian pegunungan mencapai 699 mdpl. Luasan total target konservasi tinggi di Kepulauan Bangka Belitung adalah 2.517.327,27 hektar (Tabel 99) dengan 23% di kawasan hutan lindung dan 77% di kawasan hutan produksi.

TABEL 97 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan			
	Badan Air	HL	HP	Grand Total
BANGKA BELITUNG				
Unit I - KPHP	2.16	5866.72	6422.51	12291.39
Unit II - KPHP		4890.17	1388.21	6278.38
Unit III - KPHP		1433.20	812.80	2246.00
Unit IV - KPHP		2137.58	295.60	2433.17
Unit IX - KPHP		7866.99	1982.03	9849.02
Unit V - KPHP		2762.61	6682.48	9445.09
Unit VI - KPHP		506.60	453.38	959.98
Unit VII - KPHL		3511.00		3511.00
Unit VIII - KPHP		1904.36	1338.45	3242.81
Unit X - KPHL		9806.67	3135.23	12941.90
Unit XI - KPHP		6093.21		6093.21

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan			
	Badan Air	HL	HP	Grand Total
Unit XII - KPHL		16255.41	341.83	16597.24
Unit XIII - KPHP		854.25		854.25

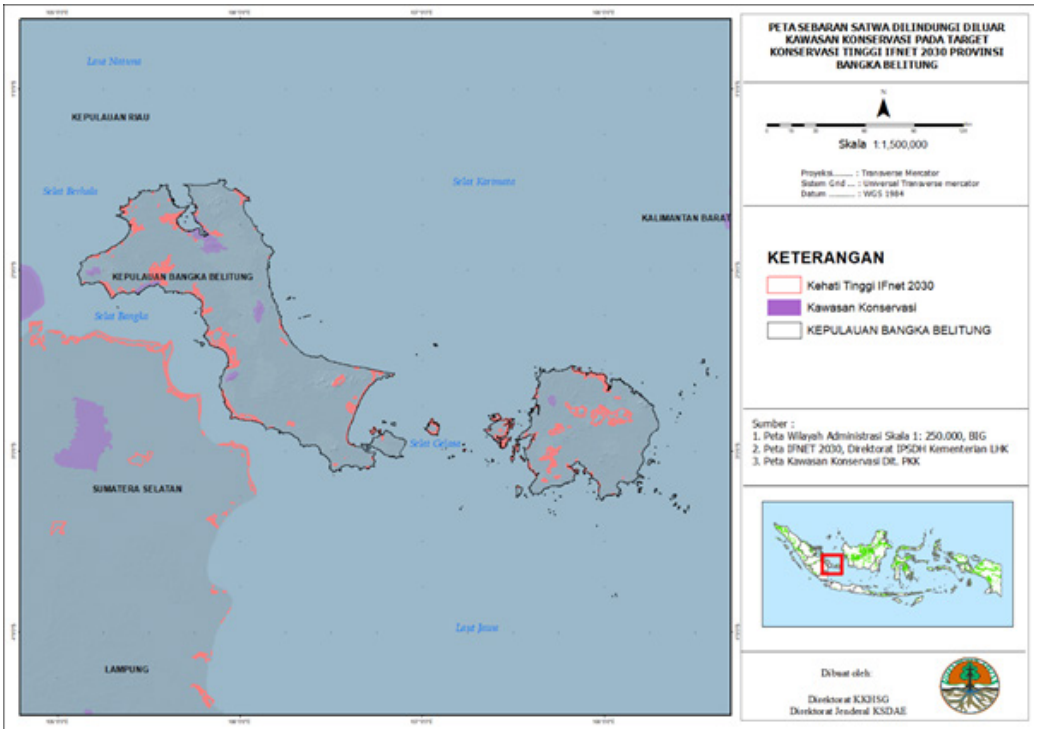

GAMBAR 91 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Bangka Belitung

11. Provinsi Kepulauan Riau

Luas total target konservasi tinggi di Kepulauan Riau adalah 90.590,34 hektar (Tabel 100) dengan mayoritas (96,7%) menyebar di kawasan hutan produksi dan 3% di kawasan hutan lindung.

TABEL 98 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Riau

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Unit I - KPHP		0.01		226.64		2071.78	2298.44
Unit II - KPHP		0.05		55019.57		1618.99	56638.61
Unit III - KPHP			299.64	4078.14		1113.22	5490.99
Unit IV - KPHP		0.22	7.82	14802.46		14026.91	28837.42
Unit IX - KPHP				15.06			15.06
Unit V - KPHP	6.10	0.00		757.63		6156.10	6919.83
Unit VI - KPHP		0.07		85076.83		494.21	85571.12
Unit VII - KPHP				4306.54		0.32	4306.85
Unit VIII - KPHP				0.85			0.85
Unit X - KPHP						9.33	9.33
Unit XI - KPHP				73.01			73.01
Unit XII - KPHP				402.79			402.79
Unit XIV - KPHP						6161.97	6161.97
Unit XIX - KPHP				3303.51		474.59	3778.10
Unit XVI - KPHL			14414.78			6731.11	21145.89
Unit XVII - KPHP			7523.38			894.74	8418.11
Unit XVIII - KPHP			24107.30	606.25		15965.56	40679.12
Unit XX - KPHP				214.63		124.39	339.02
Unit XXI - KPHP			360.56	17865.63			18226.20
Unit XXII - KPHP		2.73	2502.75	280349.29	0.49	636.12	283491.38
Unit XXIII - KPHP		0.00				31761.82	31761.82

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Unit XXIV - KPHP		0.02	195.42	10948.69		31384.97	42529.10
Unit XXIX - KPHP						1465.54	1465.54
Unit XXV - KPHP			1117.08	6089.88		10065.78	17272.74
Unit XXVI - KPHP		0.01	10673.73	2.29		54226.85	64902.87
Unit XXVII - KPHP				90394.68			90394.68
Unit XXVIII - KPHP			8.46	55709.63		37.87	55755.96
Unit XXX - KPHP			1373.14			5250.42	6623.55
Unit XXXI - KPHP	4.43		1152.95			490.14	1647.52
Unit XXII - KPHP				575.35	0.00	8079.20	8654.55

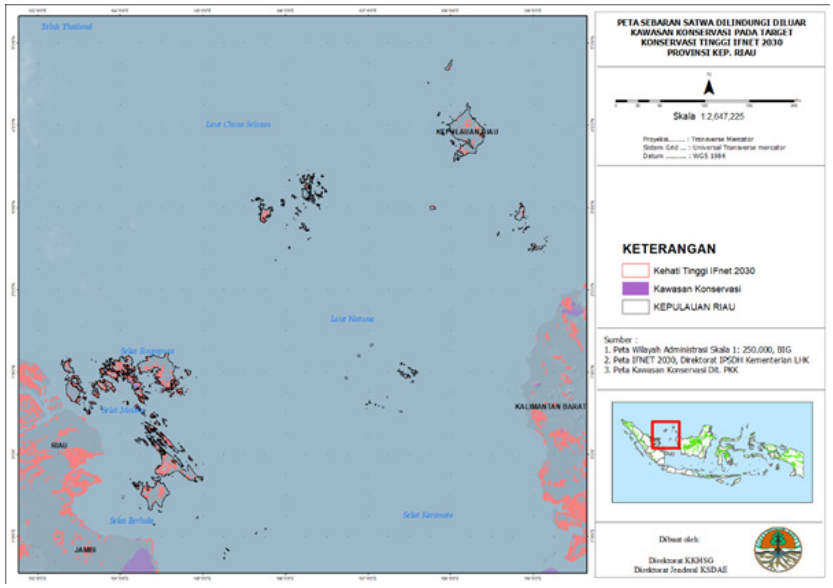

GAMBAR 92 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kepulauan Riau

B. Bioregion Kalimantan

Region Kalimantan, merupakan area sebaran habitat fauna penting yang jenisnya yang juga terdapat di daratan Asia pada umumnya, yang meliputi jenis mamalia besar diantaranya, orang utan, Beruang madu, dan fauna endemik khas Kalimantan seperti bekantan. Daerah yang di inventarisasi dan verifikasi dengan tingkat kehati tinggi sebagian besar terdapat di area dengan tutupan lahan berupa: badan air, hutan lahan kering sekunder, belukar rawa, hutan lahan kering primer, semak belukar, hutan rawa sekunder,pertambangan dan lahan terbuka serta beberapa tipe tutupan lahan lainnya dalam cakupan yang lebih kecil. Area ini secara garis besar merupakan area dengan tipe ekosistem dengan tipe komunitas hutan dipterokarpa pamah, hutan batugamping pamah pada bentang alam karst, hutan pegunungan bawah, hutan pamah (non dipterokarpa), hutan kerangas pamah, mangrove, terna tepian sungai payau, hutan batuan ultrabasa, dan hutan gambut, serta berbagai tipe ekosistem lainnya dalam cakupan yang lebih kecil. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa keberadaan kehati penting di Bioregion Kalimantan sangat dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan (Dit BPPE 2021).

1. Provinsi Kalimantan Selatan

Luasan total target Konservasi Tinggi di Provinsi Kalsel adalah 386.967,96 hektar. Supriatna et al. (2022) menyebutkan hutan tanaman di Kalimantan Selatan meningkat dari 5.389,96 ha pada 2011 menjadi 38.447,11 ha pada 2020 berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

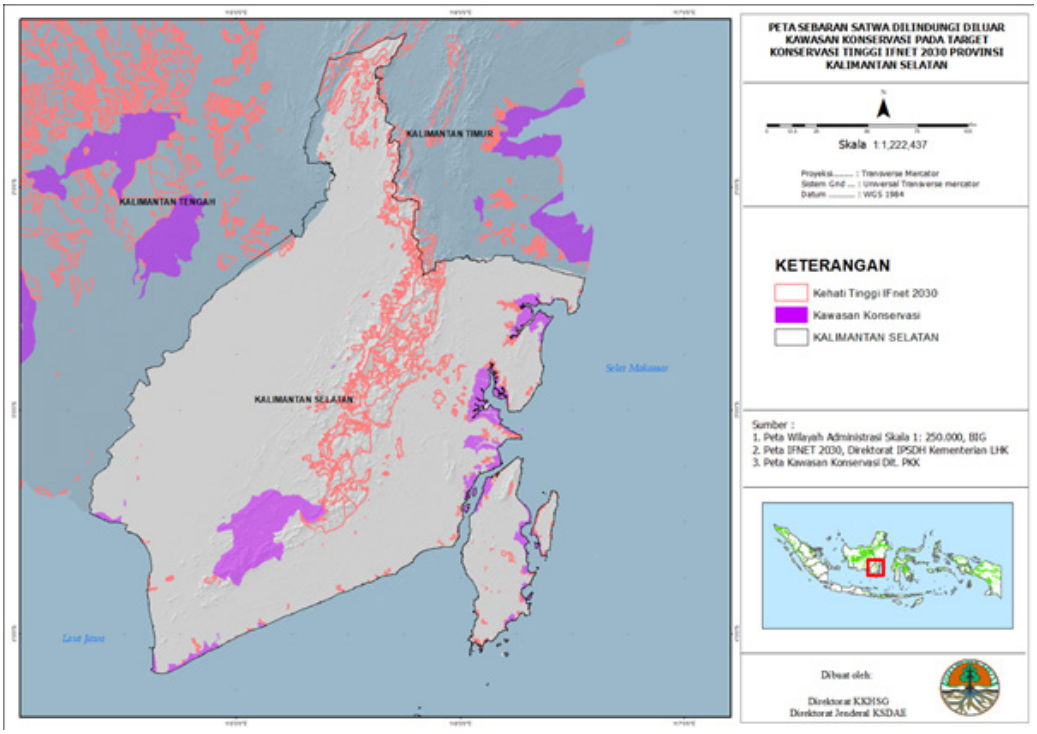

GAMBAR 93 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan

TABEL 99 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan				
	APL	Badan Air	HL	HP	Grand Total
Kalimantan Selatan					
Non-KPH	11863.08	36.77	18.74	81.57	12000.16
Unit I - KPHP			22927.83		22927.83
Unit II - KPHP			44050.81		45082.74
Unit III - KPHP			1703.90		2267.96
Unit IV - KPHL			85477.99		85477.99
Unit IX - KPHL			19657.32		19657.32
Unit V - KPHP			16252.91		16345.47
Unit VI - KPHP			74930.57		74930.57
Unit VII - KPHP			1834.11		2276.95
Unit VIII - KPHL			44431.65		44431.65
Unit X - KPHP			11403.41		11403.41

2. Provinsi Kalimantan Timur

Luasan total target Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur adalah 3.087.137,58 hektar. Lebih dari setengahnya target Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Timur merupakan habitat Orangutan Kalimantan dan Bekantan seluas 2.194.399,34 hektar. Terdapat sekitar 314.172,44 hektar APL yang sebagian besar merupakan Habitat Orangutan Kalimantan.

Berdasarkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (2016), provinsi Kaltim memiliki jasa ekosistem pendukung biodiversitas pada kategori Tinggi (58%). Hal ini disebabkan adanya 2 tipe ekorogion yaitu pegunungan struktural meratus, dan pegunungan karst. Hal ini dapat membantu satwa dalam bertahan hidup karean adanya ketersediaan air dan zat hara serta bahan makanan

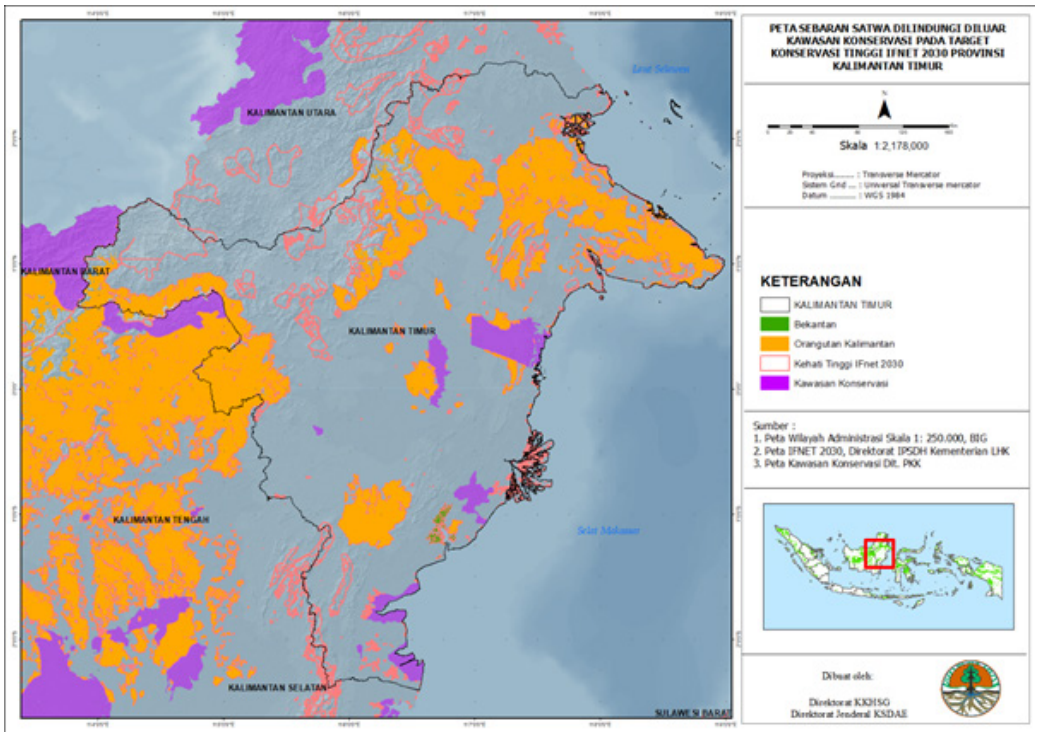

GAMBAR 94 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Timur

TABEL 100 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
KALIMANTAN							
TIMUR	314.172,44	10,99	300.178,74	825.832,71	30.612,81	723.591,65	2.194.399,34
Balikpapan			6.484,98	29,38			6.514,36
Bekantan			38,57				38,57
Orangutan Kalimantan			6.446,41	29,38			6.475,79
Batu Ayau			6.375,60	52.981,32		28.559,13	87.916,05
Orangutan Kalimantan			6.375,60	52.981,32		28.559,13	87,916,05

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Batu Rok		0,00	3.027,78				3.027,78
Orangutan Kalimantan		0,00	3.027,78				3.027,78
Bengalon			44.576,72	75.178,46		100.634,16	220.389,34
Orangutan Kalimantan			44.576,72	75.178,46		100.634,16	220.389,34
Berau Barat	23,70		38.706,29	33.600,07		149.759,45	222.089,50
Orangutan Kalimantan	23,70		38.706,29	33.600,07		149.759,45	222.089,50
Berau Pantai			32.157,65	75.992,58	62,61	772,73	10.8985,58
Orangutan Kalimantan			32.157,65	75.992,58	62,61	772,73	10.8985,58
Berau Tengah			60.521,14	75.117,83		113.207,81	248.846,78
Orangutan Kalimantan			60.521,14	75.117,83		113.207,81	248.846,78
Berau Utara				5.411,14			5.411,14
Orangutan Kalimantan				5.411,14			5.411,14
Bongan				181.085,29			181.085,29
Orangutan Kalimantan				181.085,29			181.085,29
Damai			17.056,67	105.458,74		51.394,38	173.909,80
Orangutan Kalimantan			17.056,67	105.458,74		51.394,38	173.909,80
Kelinjau			82.693,86	32.292,05		214.286,63	329.272,54
Orangutan Kalimantan			82.693,86	32.292,05		214.286,63	329.272,54
Manubar	182,33	0,00	6.622,89	139.133,49			145.938,72
Orangutan Kalimantan	182,33	0,00	6.622,89	139.133,49			145.938,72
Meratus				10.483,23		40.266,06	50.749,30

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Bekantan				2.933,25			2.933,25
Orangutan Kalimantan				7.549,99		40.266,06	47.816,05
Mook Manor Bulatn						125,59	125,59
Orangutan Kalimantan						125,59	125,59
Santan			1.822,18	17.790,94			19.613,12
Orangutan Kalimantan			1.822,18	17.790,94			19.613,12
Sub DAS Belayan			25,71	16.070,73		24.574,78	40.671,22
Orangutan Kalimantan			25,71	16.070,73		24.574,78	40.671,22
Telake			8,26				8,26
Orangutan Kalimantan			8,26				8,26
Non-KPH	313.966,40	10,99	99,00	5.207,47	30.550,20	10,92	349.844,98
Bekantan	9.733,46	8,63		5,01	80,02		9.827,13
Orangutan Kalimantan	304.232,94	2,35	99,00	5.202,46	30.470,18	10,92	340.017,86

3. Provinsi Kalimantan Tengah

Luasan total target Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 5.610.023,93 hektar. Sebagian besar target Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah merupakan habitat Orangutan Kalimantan seluas 5.246.437,61 hektar. Terdapat sekitar 75.494,37 hektar APL yang merupakan Habitat Orangutan Kalimantan.

Penyebaran Orangutan Kalimantan bergantung pada kualitas habitatnya. Kalteng memiliki presentase yang cukup tinggi untuk tutupan lahan hutan lahan tinggi, sehingga wilayah ini mempunyai potensi pendukung biodiversitas yang tinggi dan telah menjadi tempat tinggal bagi Orangutan Kalimantan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukannya, maka menjadi penting untuk melakukan mitigasi konflik manusia dan satwaliar, perlindungan, pengamanan dan panjagaan kawasan konservasi.

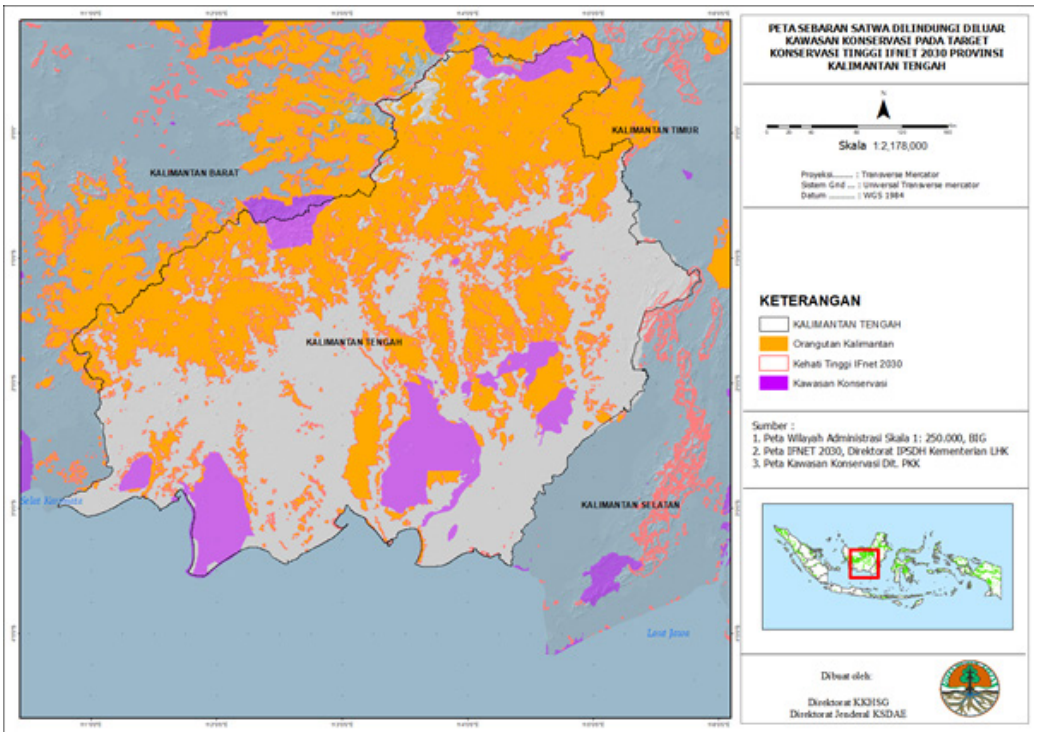

GAMBAR 95 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah

TABEL 101 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
KALIMANTAN							
TENGAH	75.494,37	6,57	840.165,57	1.490.584,43	426.376,26	2.413.810,42	5.246.437,61
BATU AYAU			31.790,42	452,26		32.307,22	64.549,90
Orangutan Kalimantan			31.790,42	452,26		32.307,22	64.549,90
BATU ROK			5.622,71				5.622,71
Orangutan Kalimantan			5.622,71				5.622,71
DAMAI			107.751,59			1.146,86	108.898,45

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Orangutan Kalimantan			107.751,59			1.146,86	108.898,45
Unit I			243.641,29	3.803,48		565.373,10	812.817,87
Orangutan Kalimantan			243.641,29	3.803,48		565.373,10	812.817,87
Unit II			85.591,04	122.216,54		489.879,30	697.686,88
Orangutan Kalimantan			85.591,04	122.216,54		489.879,30	697.686,88
Unit III				44.550,49			44.550,49
Orangutan Kalimantan				44.550,49			44.550,49
Unit IV			2.557,93				2557.93
Orangutan Kalimantan			2.557,93				2557.93
Unit IX			48.203,35	25.944,44		14.016,26	88.164,04
Orangutan Kalimantan			48.203,35	25.944,44		14.016,26	88.164,04
Unit V			12.530,57	16.982,49		51.626,78	81.139,84
Orangutan Kalimantan			12.530,57	16.982,49		51.626,78	81.139,84
Unit VI				1.102,78			1.102,78
Orangutan Kalimantan				1.102,78			1.102,78
Unit VII				13.542,25			13.542,25
Orangutan Kalimantan				13.542,25			13.542,25
Unit VIII				79.181,73			79.181,73
Orangutan Kalimantan				79.181,73			79.181,73
Unit X				150.375,04		6.762,76	157.137,80

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Orangutan Kalimantan				150.375,04		6.762,76	157.137,80
Unit XI				143.101,66		15.264,66	158.366,32
Orangutan Kalimantan				143.101,66		15.264,66	158.366,32
Unit XII			3.459,64	17.957,35		114.342,16	135.759,15
Orangutan Kalimantan			3.459,64	17.957,35		114.342,16	135.759,15
Unit XIII				94.845,39			94.845,39
Orangutan Kalimantan				94.845,39			94.845,39
Unit XIV				10.423,41			10.423,41
Orangutan Kalimantan				10.423,41			10.423,41
Unit XIX			5.827,16	59.473,10		147.382,80	212.683,07
Orangutan Kalimantan			5.827,16	59.473,10		147.382,80	212.683,07
Unit XX				33.247,58		53.611,18	86.858,75
Orangutan Kalimantan				33.247,58		53.611,18	86.858,75
Unit XXI			34.236,97	4.271,25		266.444,22	304.952,44
Orangutan Kalimantan			34.236,97	4.271,25		266.444,22	304.952,44
Unit XXII			5.769,02	41.303,27		46.547,49	93.619,77
Orangutan Kalimantan			5.769,02	41.303,27		46.547,49	93.619,77
Unit XXIII			22.245,78	961,43		138.175,31	161.382,53
Orangutan Kalimantan			22.245,78	961,43		138.175,31	161.382,53
Unit XXIV			3.539,85	12.784,34		29.415,43	45.739,62

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Orangutan Kalimantan			3.539,85	12.784,34		29.415,43	45.739,62
Unit XXIX				71.313,66			71.313,66
Orangutan Kalimantan				71.313,66			71.313,66
Unit XXV				2.674,72		882,82	3.557,55
Orangutan Kalimantan				2.674,72		882,82	3.557,55
Unit XXVI				22.325,43			22.325,43
Orangutan Kalimantan				22.325,43			22.325,43
Unit XXVII				20.558,25			20.558,25
Orangutan Kalimantan				20.558,25			20.558,25
Unit XXVIII			794,69	2.580,45			3.375,15
Orangutan Kalimantan			794,69	2.580,45			3.375,15
Unit XXX				110.802,38			110.802,38
Orangutan Kalimantan				110.802,38			110.802,38
Unit XXXI			10021,92	28.305,48			38.327,40
Orangutan Kalimantan			10021,92	28.305,48			38.327,40
Unit XXXII			46.848,78				46.848,78
Orangutan Kalimantan			46.848,78				46.848,78
Unit XXXIII			62.875,67				62.875,67
Orangutan Kalimantan			62.875,67				62.875,67
Non-KPH	75.494,37	6,57	0,42	22.055,71	426.376,26	1,81	523.935,13
Orangutan Kalimantan	75.494,37	6,57	0,42	22.055,71	426.376,26	1,81	523.935,13

4. Provinsi Kalimantan Barat

Luasan total target Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat adalah 4.352.261,00 hektar. Sebagian besar target Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Barat merupakan habitat Orangutan Kalimantan seluas 3.153.226,13 hektar. Terdapat sekitar 250.787,23 hektar APL yang merupakan Habitat Orangutan Kalimantan. Provinsi ini didominasi oleh tutupan lahan berupa semak belukar dan perkebunan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukannya, maka menjadi penting untuk melakukan mitigasi konflik manusia dan satwaliar, perlindungan, pengamanan dan panjagaan kawasan konservasi.

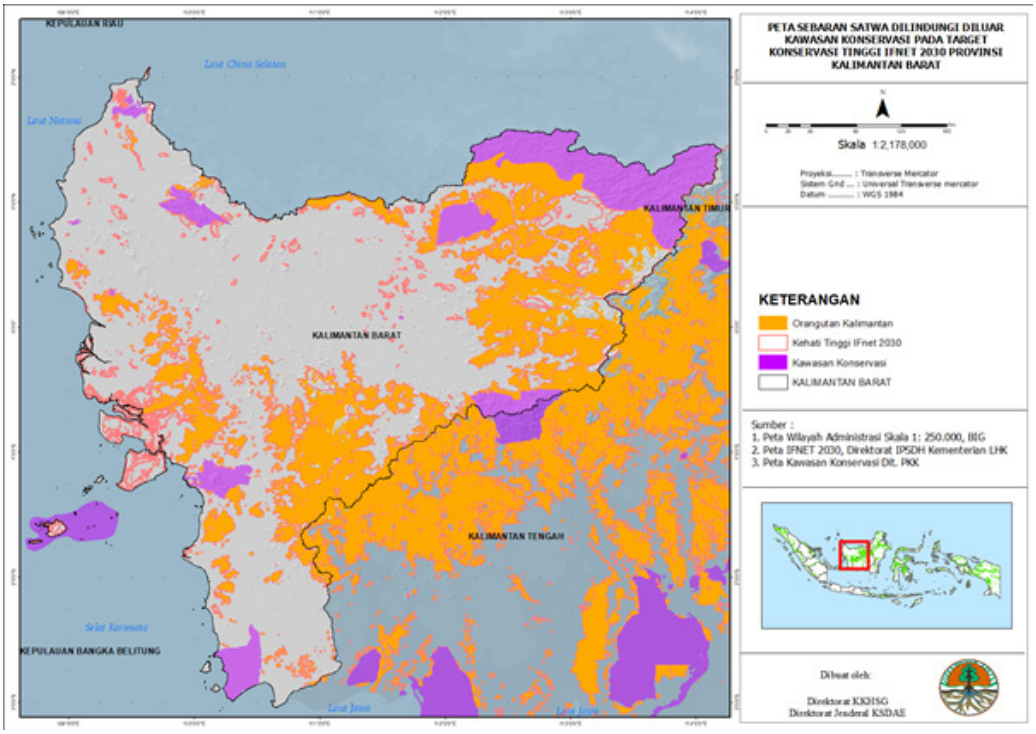

GAMBAR 96 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Barat

TABEL 101 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
KALIMANTAN							
BARAT	250.787,23	45,52	1.191.200,33	488.020,84	48.269,04	1.174.903,17	3.153.226,13
Batu Rok			44.229,71				44.229,71

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Orangutan kalimantan			44.229,71				44.229,71
Belimbing			7.246,06	116.263,65			123.509,72
Orangutan kalimantan			7.246,06	116.263,65			123.509,72
Kendawangan			1.513,00	8.193,91			9.706,92
Orangutan kalimantan			1.513,00	8.193,91			9.706,92
Menukung			62.895,21	7.507,57		70.154,89	140.557,67
Orangutan kalimantan			62.895,21	7.507,57		70.154,89	140.557,67
Sintang				4.563,07			4.563,07
Orangutan kalimantan				4.563,07			4.563,07
Sokan			43.352,02	9.009,68		25.917,36	78.279,06
Orangutan kalimantan			43.352,02	9.009,68		25.917,36	78.279,06
Unit I			532,35	2.995,99			3.528,34
Orangutan kalimantan			532,35	2.995.99			3.528,34
Unit II			4.469,63			4.602,52	9.072,16
Orangutan kalimantan			4.469,63			4.602,52	9.072,16
Unit III			2.326,93				2.326,93
Orangutan kalimantan			2.326,93				2.326,93
Unit IX			33.587,90			22.418,20	56.006,10
Orangutan kalimantan			33.587,90			22.418,20	56.006,10
Unit V				26.840,32			26.840,32

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Orangutan kalimantan				26.840,32			26.840,32
Unit VII			1.900,10	9.305,19			11.205,30
Orangutan Kalimantan			1.900,10	9.305,19			11.205,30
Unit VIII			240,86	38.488,92		4.406,60	43.136,39
Orangutan Kalimantan			240,86	38.488,92		4.406,60	43.136,39
Unit XII			16.787,26	1.765,26		1.343,42	19.895,94
Orangutan Kalimantan			16.787,26	1.765,26		1.343,42	19.895,94
Unit XIII			13.310,32				13.310,32
Orangutan Kalimantan			13.310,32				13.310,32
Unit XIV			19.265,88			14.594,78	33.860,67
Orangutan Kalimantan			19.265,88			14.594,78	33.860,67
Unit XIX			115.678,68			64.666,54	180.345,22
Orangutan Kalimantan			115.678,68			64.666,54	180.345,22
Unit XV			30.138,72	197,48		60.395,57	90.731,77
Orangutan Kalimantan			30.138,72	197,48		60.395,57	90.731,77
Unit XVI			97.718,93			100.292,97	198.011,91
Orangutan Kalimantan			97.718,93			100.292,97	198.011,91
Unit XVII			57.671,79	168,03		173.823,42	231.663,23
Orangutan Kalimantan			57.671,79	168,03		173.823,42	231.663,23
Unit XVIII			50.004,23	37.732,85		21.831,41	109.568,48

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Orangutan Kalimantan			50.004,23	37.732,85		21.831,41	109.568,48
Unit XX			202.393,73	22.169,91		90.828,30	315.391,94
Orangutan Kalimantan			202.393,73	22.169,91		90.828,30	315.391,94
Unit XXI			133.106,54	32.620,78		93.300,44	259.027,76
Orangutan Kalimantan			133.106,54	32.620,78		93.300,44	259.027,76
Unit XXII			25.751,75	12.228,79		45.261,77	83.242,31
Orangutan Kalimantan			25.751,75	12.228,79		45.261,77	83.242,31
Unit XXIX			39.187,38	33.881,81		66.557,14	139.626,34
Orangutan Kalimantan			39.187,38	33.881,81		66.557,14	139.626,34
Unit XXVI			15.371,97	1.827,83		71.381,99	88.581,80
Orangutan Kalimantan			15.371,97	1.827,83		71.381,99	88.581,80
Unit XXVII			97.866,01	31.785,58		126.596,88	256.248,47
Orangutan Kalimantan			97.866,01	31.785,58		126.596,88	256.248,47
Unit XXVIII			20.176,52			65.865,98	86.042,50
Orangutan Kalimantan			20.176,52			65.865,98	86.042,50
Unit XXX			20.787,39	29.928,67			50.716,06
Orangutan Kalimantan			20.787,39	29.928,67			50.716,06
Unit XXXI			9.071,65	23.027,22		41.856,87	73.955,74
Orangutan Kalimantan			9.071,65	23.027,22		41.856,87	73.955,74
Unit XXXIII			24.358,69	37.425,57		7.328,25	69.112,51

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Orangutan Kalimantan			24.358,69	37.425,57		7.328,25	69.112,51
Non-KPH	250.787,23	45,52	259,11	92,75	48.269,04	1.477,87	300.931,52
Orangutan Kalimantan	250,787,23	45,52	259,11	92,75	48.269,04	1.477,87	300.931,52

5. Provinsi Kalimantan Utara

Luasan dan total target Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Utara adalah 1.238.278,55 hektar. Lebih dari setengahnya target konservasi tinggi Provinsi Kalimantan Utara merupakan habitat orangutan kalimantan dan gajah kalimantan seluas 23.035,56 hektar. Terdapat sekitar 52,17 hektar APL yang sebagian besar merupakan habitat orangutan kalimantan.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki dua tipe ekoregion di wilayah kalimantan timur yaitu ekoregion pegunungan struktural komplek meratus dan perbukitan struktural komplek meratus merupakan bentanglahan yang memiliki potensi tinggi di semua jenis jasa ekosistem, termasuk budaya rekreasi dan ekoturisme, dan yang mendukung biodiversitas

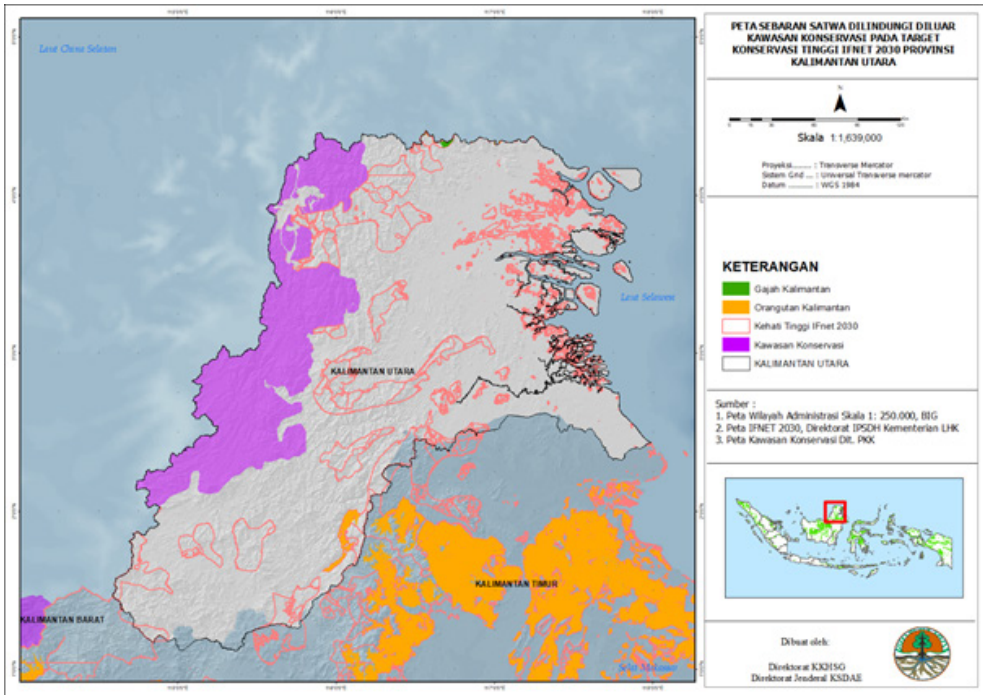

GAMBAR 97 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Utara

TABEL 103 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	Badan Air	HL	HP	HPT	Grand Total
KALIMANTAN UTARA	52,17	0,00	4.956,60	783,02	17.243,78	23.035,56
Unit IV			3.018,45	379,15		3.397,60
Gajah Kalimantan			2.381,15	114,02		2.495,17
Orangutan Kalimantan			637,30	265,13		902,43
Unit XI			0,08	403,87	12.279,28	12.683,23
Orangutan Kalimantan			0,08	403,87	12.279,28	12.683,23
Unit XX			1.938,07		4.964,50	6.902,57
Orangutan Kalimantan			1.938,07		4.964,50	6.902,57
Non-KPH	52,17	0,00		0,00		52,17
Orangutan Kalimantan	52,17	0,00		0,00		52,17

C. Bioregion Bali dan Nusa Tenggara

Lokasi inventarisasi dan verifikasi di Provinsi Bali sebagian besar berada di wilayah kawasan hutan. Selanjutnya, pada area yang terverifikasi memiliki kategori keanekaragaman hayati tinggi di Region Bali Nusra ditemukan beberapa jenis satwa liar yang menjadi satwa kunci dalam penentuan kategori. Satwa liar yang terverifikasi di Provinsi NTB diantaranya Elang Laut Perut Putih, Elang Bondol, serta Rusa Timor (Dit BPPE 2021).

1. Bali

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki hutan hujan tropis dataran rendah yang luas dan keanekragaman hayati yang tinggi. Provinsi Bali memiliki ketinggian tertinggi di puncak Gunung Agung yang mencapai 3.148 mdpl. Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Bali adalah 72.069,59 hektar. Curik Bali (Leucopsar rothschildi) adalah satwa endemik Provinsi Bali. Jumlah Curik Bali yang dilepas ke alam liar di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) meningkat dari tahun ke tahun, dari 81 ekor pada tahun 2016 hingga 256 ekor pada tahun 2019 (KLHK, 2021).

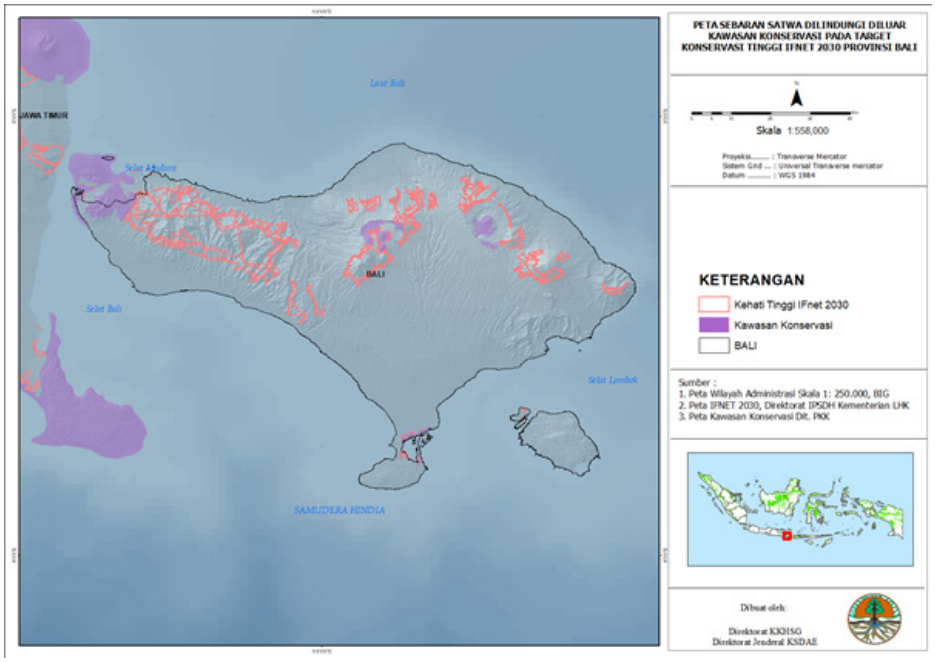

GAMBAR 98 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Bali

TABEL 104 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Bali

Provinsi/Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan		
	APL	HL	Grand Total
BALI	454.47	71,615.11	72,069.59
Unit I - KPHL		28629.11	28629.11
Unit II - KPHL	206.73	26048.42	26255.16
Unit III - KPHL	127.31	8465.94	8593.25
Unit IV - KPHL	120.43	8471.64	8592.07

2. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil inventarisasi dan verifikasi kehati tinggi di Provinsi NTB mendapatkan bahwa seluruh area yang terverifikasi dengan kategori keanekaragaman hayati tinggi berada pada area dengan tutupan lahan vegetasi sekunder, dengan karakteristik berupa pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi padang rumput monsun pamah. Selanjutnya, pada area dengan kategori keanekaragaman hayati tinggi didominasi oleh sumber air atau sungai yang karakteristiknya musiman (Dit BPPE 2021).

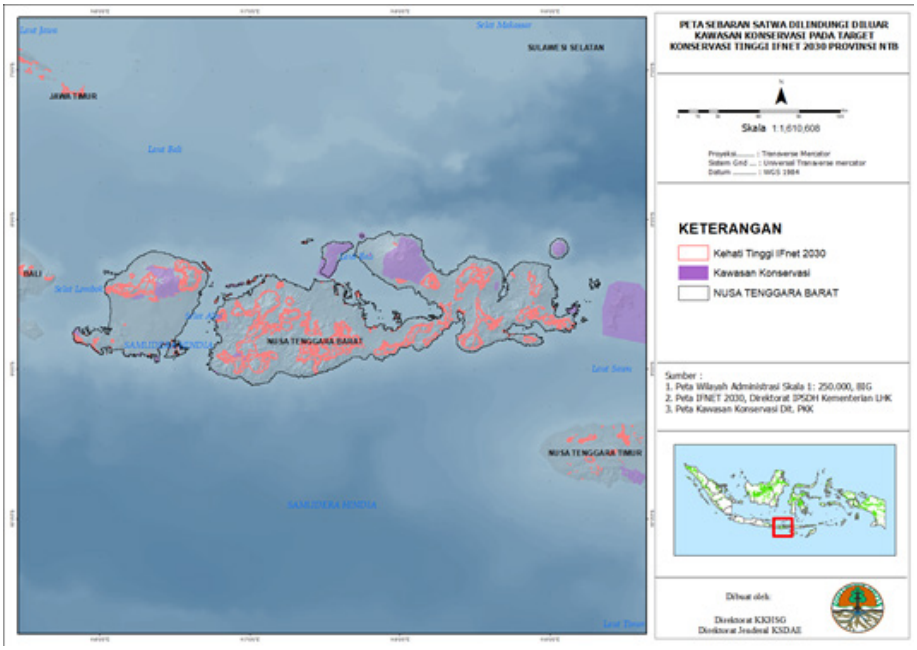

GAMBAR 99 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Bali

TABEL 105 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	Badan Air	HL	HP	HPT	Grand Total
NUSA TENGGARA BARAT						
Unit I - KPHL	154.82		24911.64	182.33	180.84	25429.62
Unit II - KPHP	61.19	18.07	1810.62		1016.23	2906.10
Unit III - KPHL	117.46		5726.53			5843.99
Unit IV - KPHL	234.02	26.10	23958.26	402.72		24621.10
Unit IX - KPHP	636.34		11198.07	94.11	211.63	12140.15
Unit V - KPHP			15248.81	84.28	580.45	15913.54
Unit VI - KPHL	53.99		21471.03		230.32	21755.34
Unit VII - KPHL	552.57	13.13	18425.91	40.16	650.93	19682.69

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	Badan Air	HL	HP	HPT	Grand Total
Unit VIII - KPHL	415.57	46.98	26546.06		2947.39	29956.01
Unit X - KPHP	330.78		19929.80	1850.42	90.63	22201.63
Unit XI - KPHP			13699.55		695.72	14395.27
Unit XII - KPHL	1186.40	45.90	46908.58		4736.25	52877.13
Unit XIII - KPHP	166.08	13.64	11757.83		589.27	12526.83
Unit XIV - KPHL	386.39	8.94	16139.46	348.60	1549.90	18433.28
Unit XIX - KPHL	494.39		28483.19		138.00	29115.58
Unit XV - KPHP	1245.80	2.15	12067.08	423.47	1475.75	15214.25
Unit XVI - KPHL			12974.80			12974.80
Unit XVII - KPHP	45.75		7499.77	926.93	1785.49	10257.94
Unit XVIII - KPHP				26.23	16.03	42.26
Unit XX - KPHP	148.81		14672.88	662.63	560.98	16045.30
Unit XXI - KPHP			2489.73		31.62	2521.35
Unit XXII - KPHL	557.80		17460.96	400.18	1254.35	19673.28
Unit XXIII - KPHP	505.33		6852.80	180.05	185.16	7723.34

3. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki tantangan kekeringan. Meskipun demikian, BMKG (2022) menyatakan bahwa kekeringan metereologis di Indonesia tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tingkat peringatan dini yang serupa: awas hingga waspada. Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT memiliki ketinggian rata-rata 100-350 mdpl. Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi NTT adalah 436.421,22 hektar. Komodo (Varanus komodoensis) merupakan hewan endemik Provinsi NTT.

Area yang terverifikasi sebagai area dengan kategori keanekaragaman hayati tinggi, khususnya di Provinsi NTT, di dominasi oleh tutupan lahan berupa hutan lahan kering

sekunder/bekas tebangan dan savana/padang rumput, dengan karakteristik yang didominasi oleh pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat vegetasi hutan batugamping pamah monsun meranggas, pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batu gampingpegunungan bawah monsun, serta pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah monsun. Selain itu juga terverifikasi tutupan lahan berupa semak belukar, serta sebagian kecil area hutan lahan kering primer.

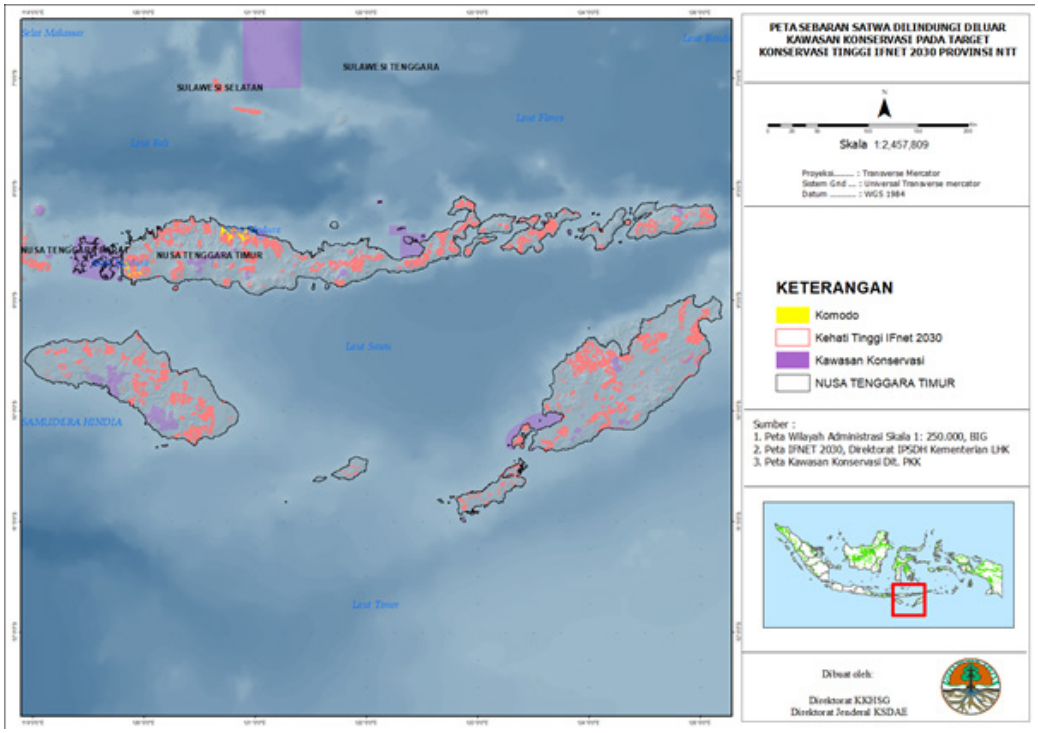

GAMBAR 100 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur

TABEL 106 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
NUSA TENGGARA TIMUR						
Unit I - KPHL		45386.15				45386.15

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Unit II - KPHL		14389.88				14389.88
Unit III - KPHL		31486.07				31486.07
Unit IV - KPHL	400.12	21233.39	17.35	198.43		21849.28
Unit IX - KPHL		23216.35				23216.35
Unit V - KPHP	393.80	8141.41	149.03		174.04	8858.27
Unit VI - KPHP		16786.49	3453.75			20240.24
Unit VII - KPHL		21555.32				21555.32
Unit VIII - KPHL		23828.09	78.58		59.47	23966.15
Unit X - KPHL		25555.29	641.18		2239.25	28435.71
Unit XI - KPHL		5395.14	139.42			5534.56
Unit XII - KPHP		1135.05	90.07			1225.12
Unit XIII - KPHP	6.42	2028.58	80.43		1193.99	3309.42
Unit XIV - KPHL	1184.59	32645.75	3285.57		4954.70	42070.61
Unit XIX - KPHP		2252.08				2252.08
Unit XV - KPHL		594.11				594.11
Unit XVI - KPHP	12.45	4960.57	214.20			5187.22
Unit XVII - KPHP		68711.73	2411.93		1401.00	72524.65
Unit XVIII - KPHL		689.07				689.07
Unit XX - KPHP		23421.45	772.41		228.37	24422.22
Unit XXI - KPHP	317.13	20703.79	27.27		2249.98	23298.18
Unit XXII - KPHL	519.26	15269.69			141.61	15930.56

D. Bioregion Jawa

1. Provinsi Banten

Provinsi Banten memiliki topografi sebagian besar dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 1-200 mdpl. Provinsi ini sering mengalami gempa karena lokasinya yang terletak pada bibir laut. Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Banten adalah 2.886 hektar. Fauna asli dari Provinsi Banten adalah badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), owa Jawa (Hylobates moloch), surili (Presbytis aigula), dan anjing hutan (Cuon alpinus javanicus). Selain itu juga terdapat macan tutul Jawa yang mendominasi area bernilai konservasi tinggi.

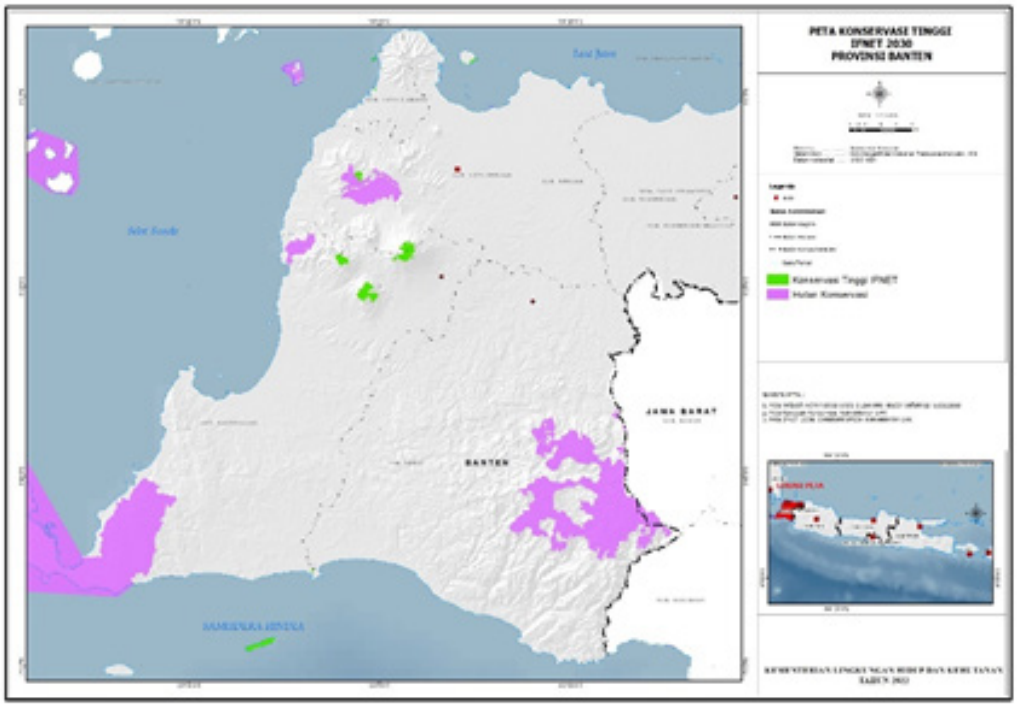

GAMBAR 101 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Banten

TABEL 107 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di provinsi Banten

Provinsi/Unit KPH/Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan				
	APL	HL	HP	HPT	Grand Total
Banten					2,886 ha
Non-KPH	0,99	2.091,52	19,91	91,87	2,204,28
Elang Jawa	0,08	1.131,13		24,61	1.155,82
Macan Tutul jawa	0,91	1.960.39	19,91	67,26	2.048,47

2. Provinsi Jawa Barat

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Jawa Barat adalah 55.153,63 hektar. Macan tutul Jawa mendominasi provinsi ini seluas 39.882,18 ha. Gunung-gunung di Jawa Barat memiliki ketinggian rata-rata 1.000 mdpl. Elang Jawa dan Macan tutul Jawa dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

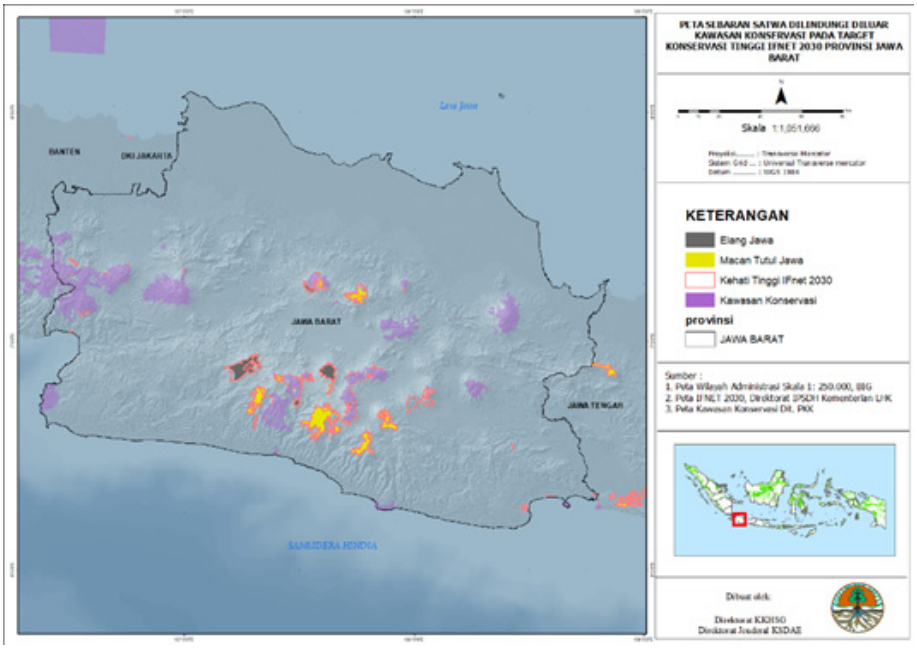

GAMBAR 102 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Jawa Barat

TABEL 108 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Jawa Barat

Provinsi/Unit KPH/Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan				
	APL	HL	HP	HPT	Grand Total
JAWA BARAT	108,83	54.707,74	0,00	337,06	55.153,63
Elang Jawa	5,79	15.265,66			15.271,45
Macan Tutul Jawa	103,04	39.442,08	0,00	337,06	39.882,18

3. Provinsi Jawa Tengah

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Jawa Tengah adalah 58.838,58 hektar. Macan tutul Jawa mendominasi area tersebut dengan luas 34.168,21 ha. Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten tertinggi di provinsi ini dengan ketinggian rata-rata 250 - 2.250 mdpl.

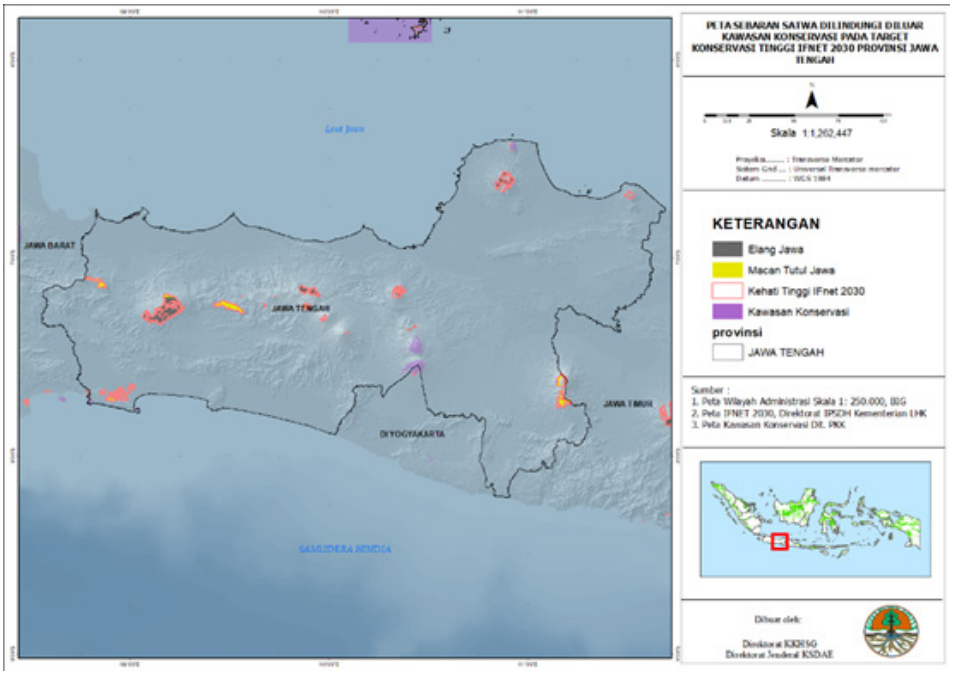

GAMBAR 103 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Jawa Tengah

TABEL 109 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Jawa Tengah

Provinsi/Unit KPH/Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan				
	APL	HL	HP	HPT	Grand Total
JAWA TENGAH	844,14	55.539,13	297,20	2.158,12	58.838,58
Elang Jawa	20,89	23.609,98	191,00	848,50	24.670,37
Macan Tutul Jawa	823,25	31.929,16	106,19	1.309,62	34.168,21

4. Provinsi Jawa Timur

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Jawa Timur adalah 127.542,98 hektar. Elang Jawa mendominasi area tersebut dengan luas 98.874,30 ha. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di provinsi ini dan di Pulau Jawa, dengan ketinggian mencapai 3.676 mdpl.

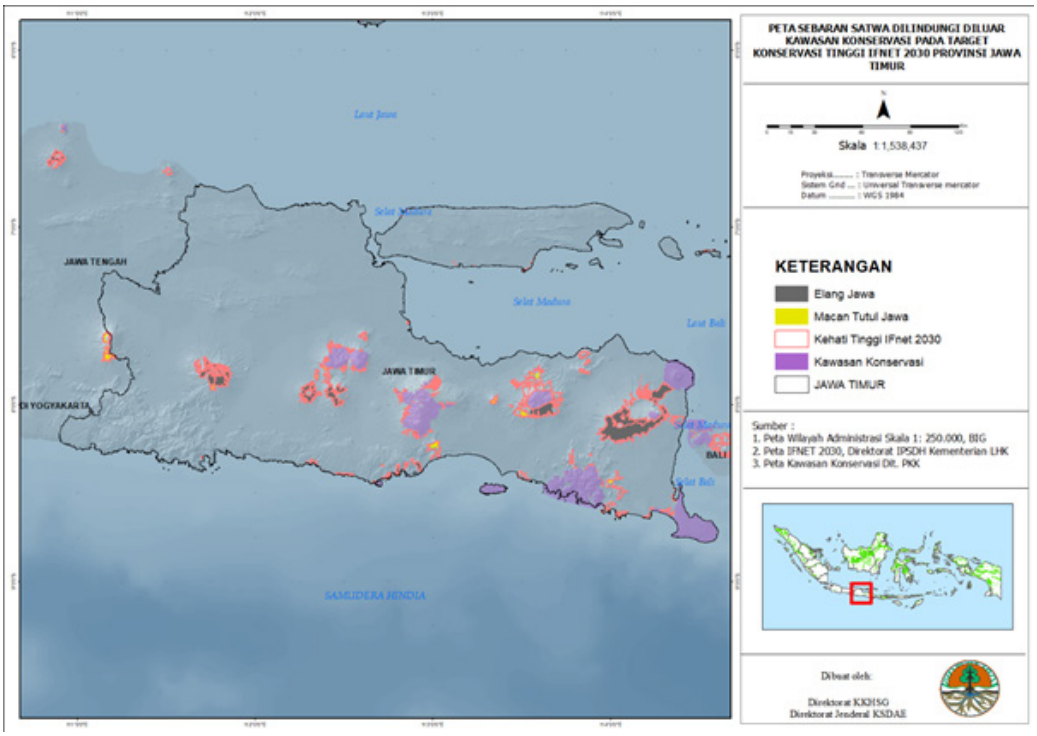

GAMBAR 104 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Jawa Timur

TABEL 110 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Jawa Timur

Provinsi/Unit KPH/Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan				
	APL	Badan Air	HL	HP	Grand Total
JAWA TIMUR	393,94	205,07	125.223,35	1.720,62	127.542,98
Elang Jawa	220,47	105,80	97.779,44	768,59	98.874,30
Macan Tutul Jawa	173,47	99,27	27.443,91	952,03	28.668,68

E. Bioregion Maluku dan Papua

Keragaman satwa liar yang tinggi di Region Papua dikarenakan faktor lansekap dan vegetasi yang juga beragam mulai dari Vegetasi Alpin hingga Vegetasi Pantai yang cocok untuk habitat berbagai macam kelompok satwa liar. Kehati Tinggi di Region Papua sebagian besar terdapat di area dengan tutupan lahan berupa Hutan lahan kering primer, Hutan lahan kering sekunder, Savana padang rumput, Savanna/Padang rumput, Hutan rawa sekunder, Pertambangan, Hutan rawa primer, Hutan mangrove primer, Semak belukar rawa, Rawa, Lahan terbuka, Semak belukar, Belukar Rawa, Belukar, Tubuh air, Hutan mangrove sekunder, serta beberapa kondisi tutupan lain dalam luasan yang lebih sempit.

1. Provinsi Maluku Utara

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Maluku Utara adalah 39.255,94 hektar. Gunung tertinggi di Maluku Utara adalah Gunung Kie Matubu di Kepulauan Tidore dengan ketinggian mencapai 1.730 mdpl. Maluku Utara memiliki 25 burung endemik mencakup Burung Weka.

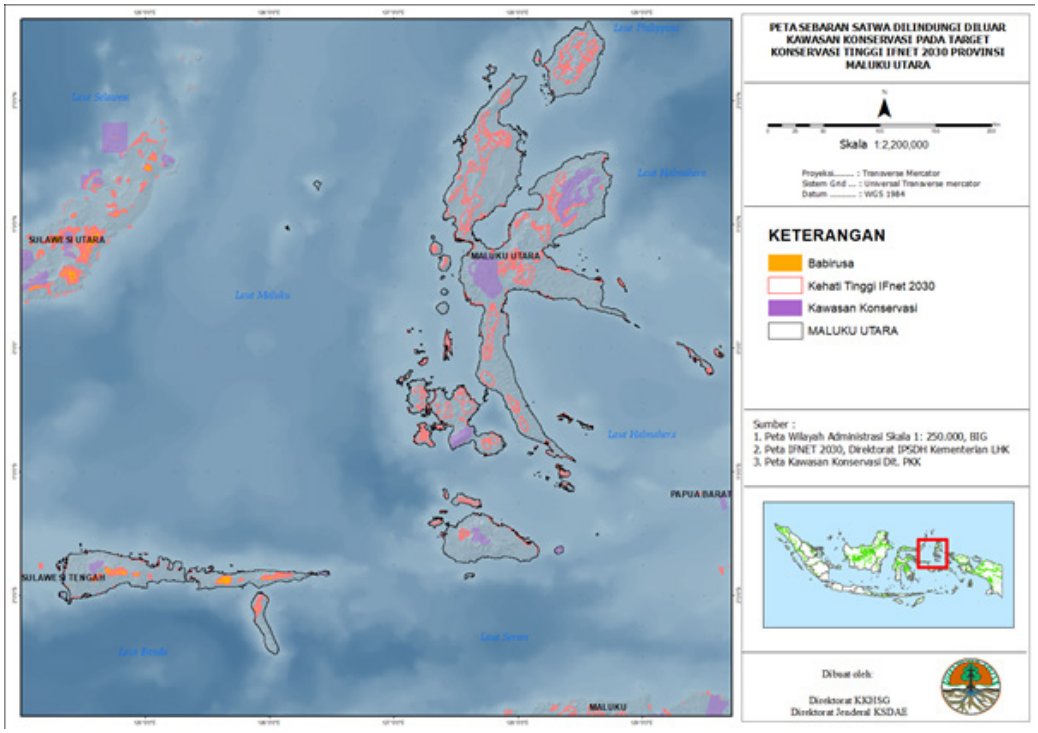

GAMBAR 105 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Maluku Utara

TABEL 111 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Maluku Utara

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
MALUKU UTARA	1.431,07	32,53	37.764,78		27,55		39.255,94
Unit I - KPHL		60.39	82498.19				82558.59
Unit II - KPHL			49938.95				49938.95
Unit III - KPHL			79281.82				79281.82
Unit IV - KPHP		79.36	34430.59	67.93		0.00	34577.88

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Unit IX - KPHP			503.01				503.01
Unit V - KPHP		41.56	17065.48			0.01	17107.05
Unit VI - KPHL		82.67	31692.35				31775.01
Unit VII - KPHP		17.94	5084.31			213.47	5315.72
Unit VIII - KPHP		23.32	7971.61			0.00	7994.93
Unit X - KPHP			19220.02				19220.02
Unit XI - KPHL			3139.16				3139.16
Unit XII - KPHP		54.14	44620.74	411.32			45086.20
Unit XIII - KPHP		75.76	49541.81	299.05		33.69	49950.31
Unit XIV - KPHP			10026.02				10026.02
Unit XV – KPHP: bairusa			15.541,26				15.541,26
Unit XVI - KPHP			16261.72				16261.72

2. Provinsi Maluku

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Maluku adalah 157.420,80 hektar. Fauna endemik provinsi ini adalah Halmahera Walking Shark (Hemiscyllium halmahera), Blue-eyed cuscus (Spilocuscus wilsoni), Halmahera angel bird, dan Psychedelic frogfish (Histiophryne psychedelica). Ketinggian tertinggi Provinsi Maluku adalah 3.027 mdpl.

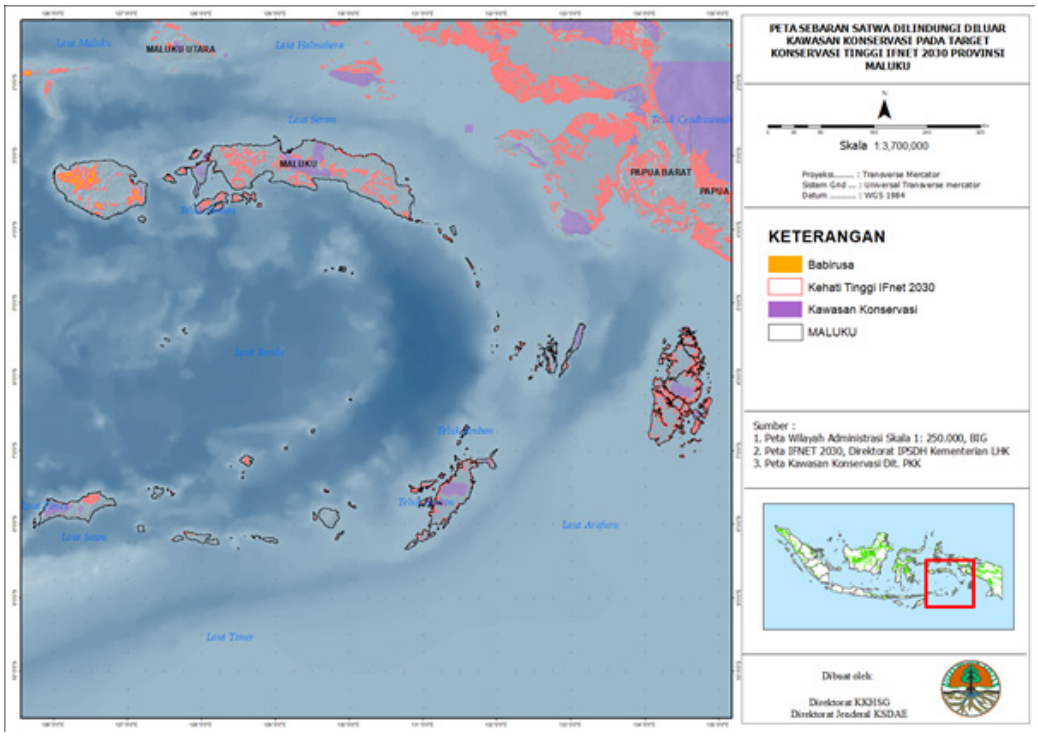

GAMBAR 106 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Maluku

TABEL 112 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Maluku

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
MALUKU	655,74	10,42	153.248,79	16,93	2.852,10	636,82	157.420,80
Wae Apu			71.659,30			627,94	72.287,24
Babirusa			71.659,30			627,94	72.287,24
Wae Mala-Wae Mikona			44.269,62	16,93		8,88	44.295,42
Babirusa			44.269,62	16,93		8,88	44.295,42
Wae Tina			37.319,86				37.319,86

3. Provinsi Papua

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Papua adalah 7.999.183,06 hektar. Cenderawasih adalah burung cantik yang merupakan salah satu fauna endemik provinsi ini. Pegunungan di Papua rata-rata memiliki ketinggian 1.500 – 2.000 mdpl. Taman

Nasional Lorentz di Papua memiliki ketinggian 0 – 4.884 mdpl dengan Puncak Cartenz sebagai salju abadinya.Keragaman satwa liar yang tinggi di Region Papua dikarenakan faktor lansekap dan vegetasi yang juga beragam mulai dari vegetasi alpin hingga vegetasi pantai yang cocok untuk habitat berbagai macam kelompok satwa liar.

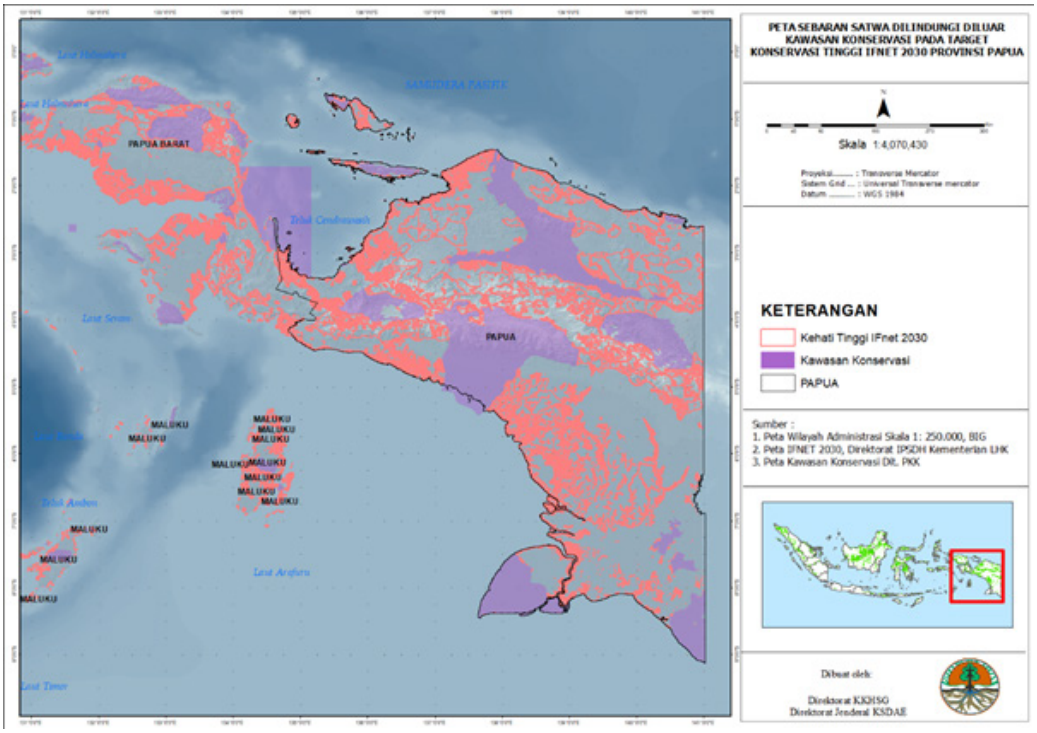

GAMBAR 107 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Papua

TABEL 113 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Papua

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand To-tal
PAPUA							
Unit I - KPHL	11.79		122655.67	26.98		1084.04	123778.48
Unit II - KPHL		0.00	209641.22	202.24		213.55	210057.01
Unit III - KPHP		0.95	35560.23	0.79		533.90	36095.87
Unit IV - KPHP	0.99	44.22	74057.26	54866.03	142.03	44858.49	173969.03
Unit IX - KPHP			129075.60	3933.19	222.79	2801.51	136033.08

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand To-tal
Unit L - KPHP			26.61	110.13	4.45	59.46	200.64
Unit LI - KPHP	5.12	0.01	12380.19	13988.71	0.30	16537.66	42912.00
Unit LII - KPHP	3.50	0.21	138148.12	10572.97	64.10	112.32	148901.23
Unit LIII - KPHP	12.19	0.03		22032.30	13.17	17866.31	39924.00
Unit LIV - KPHP	0.28	11.58		347.74	0.11		359.72
Unit LV - KPHP		4.02	10745.97	13081.53	35.96	1466.84	25334.33
Unit LVI - KPHL	23.54	37.67	108900.30			2133.01	111094.52
Unit LVII - KPHL	2.53	0.00	62231.55		211.41	27.00	62472.49
Unit V - KPHL	0.67	28.00	105241.37	1.70	67.96	15397.18	120736.88
Unit VI - KPHL		1.33	127159.04	2.13	0.49	8800.28	135963.27
Unit VII - KPHL	1261.62	33.10	370445.81	0.11	245.58	72731.61	444717.83
Unit VIII - KPHL			182571.38		8.22	99.30	182678.90
Unit X - KPHL			382934.20	2392.61		1415.74	386742.54
Unit XI - KPHL			192036.40		8.20		192044.60
Unit XII - KPHL		0.00	208447.96		0.93	30106.54	238555.43
Unit XIII - KPHP			139444.33	6047.63		8273.36	153765.32
Unit XIV - KPHP		0.00	27875.60	0.00		3479.01	31354.61
Unit XIX - KPHP	2.99	38.05	16730.59	78.65	3.33	1954.43	18808.05
Unit XL - KPHL	8.51	0.34	356886.87		57.99		356953.71

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand To-tal
Unit XLI - KPHL		0.00	227630.81		64.34	21445.86	249141.01
Unit XLII (JAYA) - KPHL	0.00	0.00	37922.83		65.35	6.15	37994.33
Unit XLIII - KPHP		0.00	548.98	6014.80			6563.78
Unit XLIV - KPHL	32.67	49.17	497209.91	1747.05		28103.68	527142.49
Unit XLIX - KPHP	0.01	133.86	68385.05	10747.73	0.97	9220.96	88488.58
Unit XLV - KPHL	52.38	98.15	454623.83	1.89	1.44	29502.14	484279.83
Unit XLVI - KPHP	1.57	192.96	2.20	5.73		42955.58	43158.02
Unit XLVII - KPHP	0.31	0.01	136838.07	10970.08	1.09	164425.18	312234.74
Unit XLVIII - KPHP		0.10		14573.61	1.06	53384.49	67959.26
Unit XV - KPHP	0.00	12.07	225258.20	2781.50	53.66	11615.16	239720.59
Unit XVI - KPHP	34.51	3.55	56012.38	3826.79	11.40	108244.10	168132.73
Unit XVII - KPHP	67.09	2.62	82292.19	15639.76	0.24	732.49	98734.41
Unit XVIII - KPHL	1.15	62.56	174154.45	3372.54	53.50	3404.47	181048.67
Unit XX - KPHL	125.98	158.70	98687.71	582.13		334.51	99889.03
Unit XXI - KPHP		0.01	49915.93	62.81	335.40	6445.73	56759.89
Unit XXII - KPHP	9.52	2.48	38065.62	5975.42	0.56	3470.52	47524.11
Unit XXIII - KPHP	20.37	0.26	61324.61	111.48		715.49	62172.22
Unit XXIV - KPHP			46040.39	3133.89	23.50	61027.53	110225.32

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand To-tal
Unit XXIX - KPHP	74.38	0.13	48878.43	22.40	632.30	2.06	49609.70
Unit XXV - KPHP	7.15	0.59	138460.51	2.37	36.48	138.78	138645.89
Unit XXVI - KPHL	6.62	0.77	226274.80	14.09	150.01	5.54	226451.83
Unit XXVII - KPHP		0.02	153052.47	0.00	41.19	4279.42	157373.10
Unit XXVIII - KPHP		13.69	3733.61	1964.25		49.82	5761.37
Unit XXX - KPHP		0.01	73027.26	59.11		5660.33	78746.71
Unit XXXI - KPHP	114.50	1.75	187859.51		13135.88	7513.36	208624.99
Unit XXXII - KPHP		0.00	61736.74	22.37		22.40	61781.51
Unit XXXIII - KPHP		0.00	67323.03	0.00		0.00	67323.03
Unit XXXIV - KPHL		0.00	19750.78				19750.78
Unit XXXIX - KPHL		0.00	110925.40		49.90	174.14	111149.45
Unit XXXV - KPHL		0.03	237815.61	99.12	13.65	83.74	238012.14
Unit XXXVI - KPHL		0.00	55705.79				55705.79
Unit XXXVII - KPHL			101230.83		4.47		101235.29
Unit XXXVIII - KPHL	0.41	0.01	223889.75	295.54	0.00	203.22	224388.93

4. Provinsi Papua Barat

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Papua Barat adalah 3.969.946,92 hektar. Papua Barat setidaknya memiliki 37 satwa endemik yang menurut Media Indonesia (2021) dilepaskan ke alam liar mencakup 30 ekor kakatua koki (Cacatua galerita). Papua Barat memiliki ketinggian 0 - 100 mdpl.

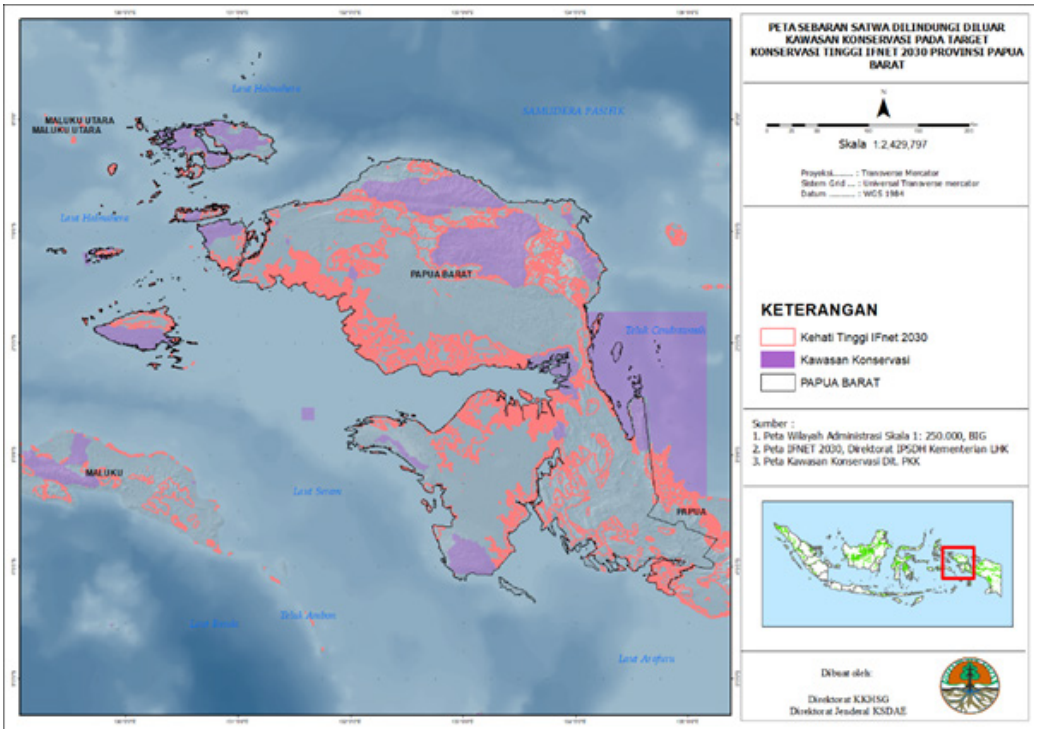

GAMBAR 108 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Papua Barat

TABEL 114 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Papua Barat

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
PAPUA BARAT							
Unit I - KPHL		398.39	125577.64	1278.57		498.97	127753.58
Unit II - KPHL			3813.86				3813.86
Unit II - KPHP		27.67	11693.02	296.27		355.64	12372.60
Unit III - KPHL			215091.68			3.29	215094.97
Unit IV - KPHP			33713.64			146.98	33860.61
Unit IX - KPHP			70077.55	31.24		0.73	70109.52
Unit V - KPHP		27.80	112962.23	31415.16		3708.21	148113.40

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Unit VI - KPHL			76317.39	52518.85		1614.32	130450.56
Unit VII - KPHP			30493.55	50040.10		18750.27	99283.92
Unit VIII - KPHP			31908.41	47119.42	0.16	30043.73	109071.71
Unit X - KPHP			36476.67				36476.67
Unit XI - KPHP			12355.77	353.33		3122.25	15831.34
Unit XII - KPHL			188284.46				188284.46
Unit XIII - KPHL			138694.50				138694.50
Unit XIV - KPHP			52466.73	185.32		3296.66	55948.71
Unit XIX - KPHP			106043.43	230.01		834.21	107107.64
Unit XV - KPHP		53.12	8124.70	143517.79		4890.57	156586.19
Unit XVI - KPHP		153.89	26387.98	108.08		1034.44	27684.39
Unit XVII - KPHP				7294.19			7294.19
Unit XVIII - KPHP			50109.78	16968.37		10061.52	77139.66
Unit XX - KPHP		182.15	19563.52	54266.94		1279.59	75292.20
Unit XXI - KPHP			146830.66	11.54		1866.59	148708.78
Unit I - KPHL		398.39	125577.64	1278.57		498.97	127753.58
Unit II - KPHL			3813.86				3813.86
Unit II - KPHP		27.67	11693.02	296.27		355.64	12372.60
Unit III - KPHL			215091.68			3.29	215094.97
Unit IV - KPHP			33713.64			146.98	33860.61
Unit IX - KPHP			70077.55	31.24		0.73	70109.52
Unit V - KPHP		27.80	112962.23	31415.16		3708.21	148113.40

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Unit VI - KPHL			76317.39	52518.85		1614.32	130450.56
Unit VII - KPHP			30493.55	50040.10		18750.27	99283.92
Unit VIII - KPHP			31908.41	47119.42	0.16	30043.73	109071.71
Unit X - KPHP			36476.67				36476.67
Unit XI - KPHP			12355.77	353.33		3122.25	15831.34
Unit XII - KPHL			188284.46				188284.46
Unit XIII - KPHL			138694.50				138694.50
Unit XIV - KPHP			52466.73	185.32		3296.66	55948.71
Unit XIX - KPHP			106043.43	230.01		834.21	107107.64
Unit XV - KPHP		53.12	8124.70	143517.79		4890.57	156586.19
Unit XVI - KPHP		153.89	26387.98	108.08		1034.44	27684.39
Unit XVII - KPHP				7294.19			7294.19
Unit XVIII - KPHP			50109.78	16968.37		10061.52	77139.66
Unit XX - KPHP		182.15	19563.52	54266.94		1279.59	75292.20
Unit XXI - KPHP			146830.66	11.54		1866.59	148708.78

F. Bioregion Sulawesi

Daerah dengan tingkat Kehati Tinggi terdapat di area dengan tutupan lahan berupa: Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Vegetasi Sekunder, Hutan Sekunder, Belukar, Pertanian Lahan Kering Campur, Vegetasi Primer, Pertanian Lahan Kering, Semak Belukar, Hutan Primer, Tambak, Savana / Padang Rumput, Pertanian Lahan Kering Bercampur, Semak, Hutan Mangrove Sekunder, Tubuh Air, dan beberapa tipe tutupan lahan lainnya dalam cakupan yang lebih kecil.

Area ini secara garis besar merupakan area dengan tipe ekosistem dengan tipe komunitas vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa), vegetasi hutan pamah monsun malar hijau, vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun, vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah, vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan pada bentang alam karst, vegetasi hutan pamah

monsun meranggas, vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah, vegetasi hutan pegunungan bawah,vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst, vegetasi savanna pegunungan monsun, vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan, vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst, vegetasi terna tepian danau, vegetasi hutan batugamping pamah monsun, vegetasi mangrove, vegetasi terna rawa gambut, serta berbagai tipe ekosistem lainnya dalam cakupan yang lebih kecil (Dit BPPE 2021).

1. Provinsi Gorontalo

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Gorontalo adalah 341.388,14 hektar. Anoa sebagai hewan endemik Pulau Sulawesi juga terdapat di Gorontalo. Provinsi ini memiliki ketinggian 0 – 2.100 mdpl.

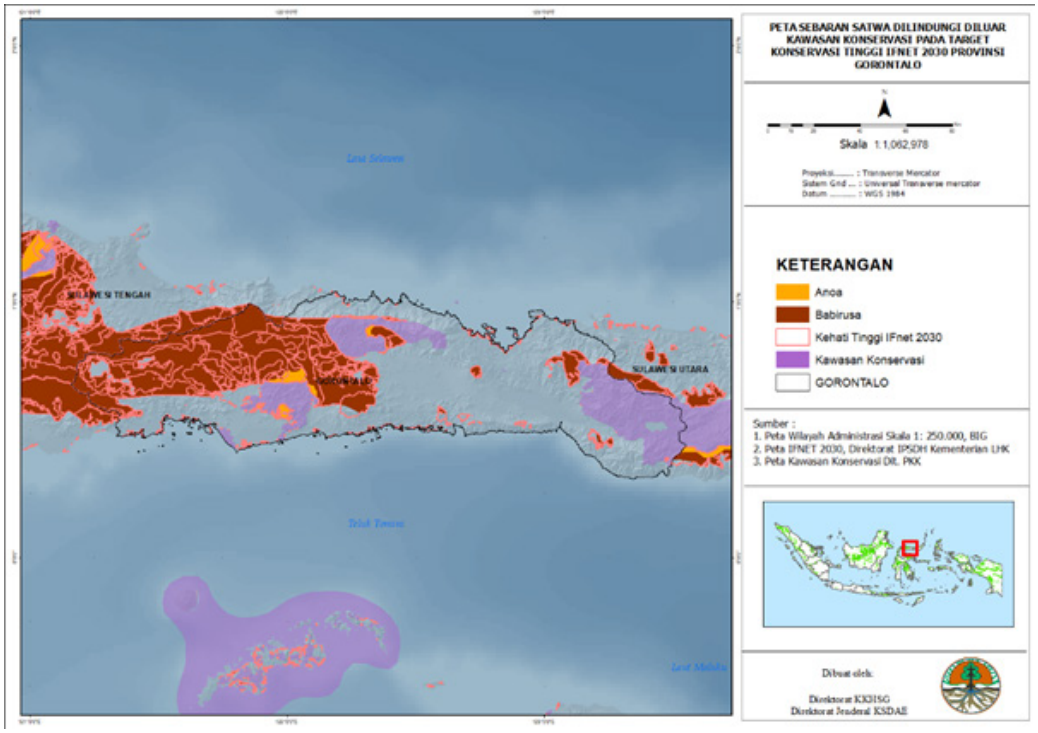

GAMBAR 109 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Gorontalo

TABEL 115 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Gorontalo

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
GORONTALO	2.160,19	13,71	147.818,26	37.856,80	50.872,19	112.667,00	341.388,14
Boalemo			20.919,18	6.195,35		37.085,50	64.200,03

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Anoa						7,37	7,37
Babirusa			20.919,18	6.195,35		37.078,12	64.192,65
Bone Bolango			2.076,20				2.076,20
Anoa			94,95				94,95
Babirusa			1.981,25				1.981,25
Gorontalo			2.001,87			9.468,89	11.470,76
Anoa						1.543,45	1.543,45
Babirusa			2.001,87			7.925,44	9.927,31
Gorontalo Utara						1.856,84	1.856,84
Anoa						628,09	628,09
Babirusa						1.228,75	1.228,75
Pohuwato			39.008,09	14.319,10		42.198,52	95.525,71
Anoa			5.725,68	1.463,92		4.031,24	11.220,83
Babirusa			33.282,41	12.855,18		38.167,29	84.304,88
Unit I			14.365,95	8.141,37		5.782,33	28.289,66
Babirusa			14.365,95	8.141,37		5.782,33	28.289,66
Unit II			58.600,44	9.165,14		16.274,61	84.040,20
Babirusa			58.600,44	9.165,14		16.274,61	84.040,20

2. Provinsi Sulawesi Barat

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Sulawesi Barat adalah 395.761,29 hektar. Seperti Gorontalo, selain Anoa provinsi ini juga memiliki babirussa. Gunung tertinggi di provinsi ini adalah Gunung Ganda Dewata yang memiliki ketinggian 3.037 mdpl.

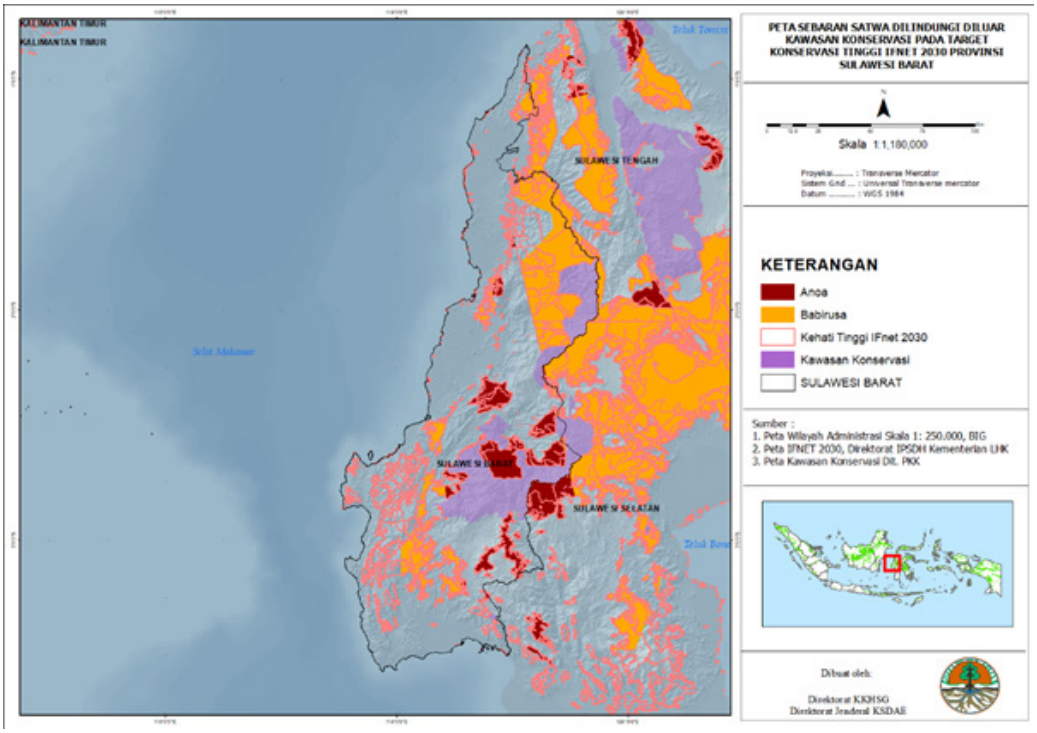

GAMBAR 110 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sulawesi Barat

TABEL 116 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
SULAWESI BARAT	7342,83	18,36	270053,74	15077,26	94,04	103175,07	395761,29
Budong-Budong	1,99		14875,15	13699,01		24515,29	53091,44
Anoa			7430,17	14,47		5,73	7450,38
Babirusa	1,99		7444,97	13684,54		24509,56	45641,06
Ganda Dewata			77938,21				77938,21
Anoa			37488,67				37488,67
Babirusa			40449,54				40449,54
Karama	2,83	0,56	24352,23	907,73		8005,35	33268,69

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Anoa		0,27	12092,33	2,92		32,54	12128,06
Babirusa	2,83	0,29	12259,90	904,81		7972,81	21140,64
Karossa			15063,72			27079,41	42143,13
Anoa			3716,20			2,23	3718,43
Babirusa			11347,52			27077,17	38424,70
Lariang			1249,95	470,46		9541,83	11262,24
Babirusa			1249,95	470,46		9541,83	11262,24
Malunda			5255,67			131,39	5387,06
Babirusa			5255,67			131,39	5387,06
Mamasa Barat		17,29	4852,08			15582,05	20451,42
Babirusa		17,29	4852,08			15582,05	20451,42
Mamasa Tengah			12364,41			888,07	13252,49
Anoa			1535,60				1535,60
Babirusa			10828,81			888,07	11716,89
Mapili			4999,32			6297,04	11296,35
Babirusa			4999,32			6297,04	11296,35
Unit I			6749,18			336,29	7085,47
Babirusa			6749,18			336,29	7085,47
Unit III			29609,99			10517,53	40127,52
Anoa			777,99			17,37	795,36
Babirusa			28832,00			10500,17	39332,16
Unit IX			21483,72			278,24	21761,96
Anoa			21426,09			278,24	21704,34
Babirusa			57,63				57,63
Unit XIII			51248,13				51248,13

3. Provinsi Sulawesi Selatan

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 883.424,50 hektar. Babirussa di Rongkong menempati area terluas di provinsi ini, yaitu seluas 328.810,94 hektar. Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang terkenal dengan kupu-kupu memiliki puncak tertinggi di sebelah utara Pegunungan Bulusaraung dengan ketinggian 1.565 mdpl.

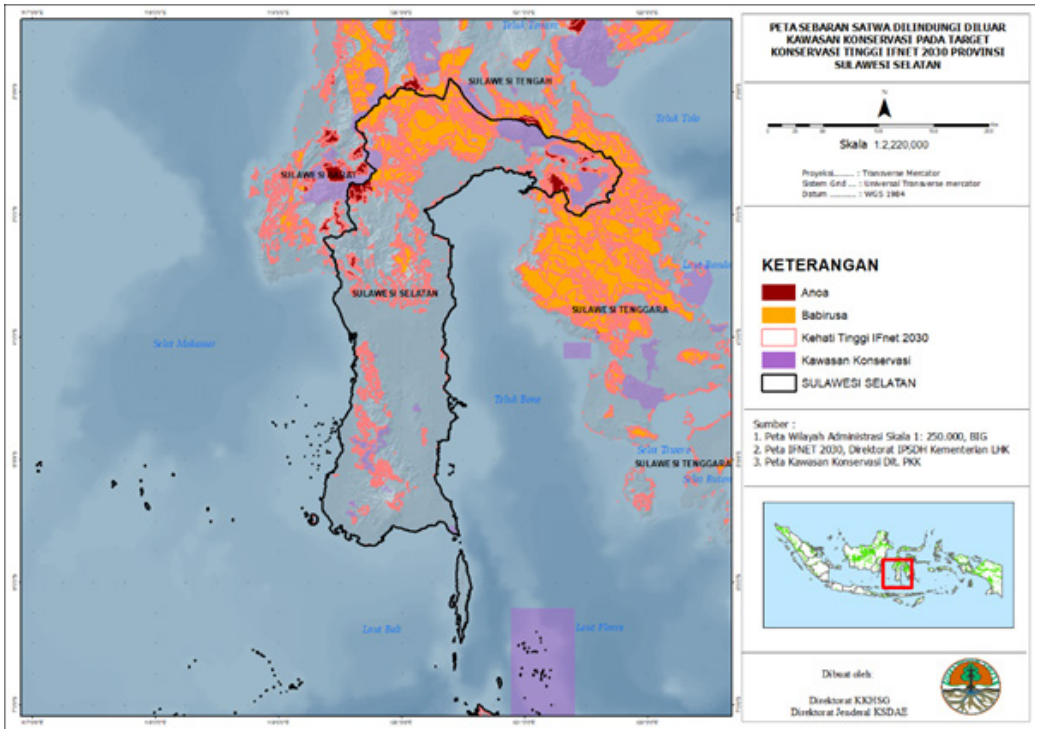

GAMBAR 111 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan

TABEL 117 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
SULAWESI SELATAN	30.184,06	7,50	618.124,46	14.712,25	7.843,12	212.553,11	883.424,50
Budong-Budong			14,37	1.010,77			1.025,14
Babirusa			14,37	1.010,77			1.025,14
Kalaena	248,95	0,25	67.557,76	5.011,99	1.490,05	62.943,49	137.252,49

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Babirusa	248,95	0,25	67.557,76	5.011,99	1.490,05	62.943,49	137.252,49
Laiwoi Barat			40.173,97				40.173,97
Babirusa			40.173,97				40.173,97
Larona Malili	1.411,75	6,56	75.545,29	283,80	2,26	63.353,17	140.602,83
Anoa	406,53		14.586,90			18.213,50	33.206,94
Babirusa	1.005,22	6,56	60.958,39	283,80	2,26	45.139,66	107.395,90
Latimojong	1.420,19		30.805,64	3.467,13		1.431,53	37.124,50
Babirusa	1.420,19		30.805,64	3.467,13		1.431,53	37.124,50
Mata Allo	115,35		14.111,80			35,59	14.262,74
Anoa			66,92				66,92
Babirusa	115,35		14.044,88			35,59	14.195,83
Patampanua Utara			11.591,54			13.864,93	25.456,47
Anoa			19,08			35,94	55,03
Babirusa			11.572,46			13.828,98	25.401,44
Rongkong	4.500,71	0,16	265.124,59	3.589,57		56.056,10	329.271,13
Anoa		0,00	460,20				460,20
Babirusa	4.500,71	0,16	264.664,39	3.589,57		56.056,10	328.810,94
Saddang I	296,96		34.302,42			2.296,94	36.896,32
Anoa	0,09		21.970,13			466,42	22.436,63
Babirusa	296,87		12.332,29			1.830,53	14.459,69
Saddang Ii	910,18		48.727,06				49.637,25
Anoa	72,69		10.486,25				10.558,95
Babirusa	837,49		38.240,81				39.078,30
Sawitto	0,04		9.804,87				9.804,91
Anoa	0,04		9.804,87				9.804,91

4. Provinsi Sulawesi Tengah

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 2.387.232,81 hektar. Babirussa di Toili Baturube menempati area terluas di provinsi ini, yaitu seluas 215.817,28 hektar. Taman Nasional Lore Lindu merupakan surga para peneliti baik keanekaragaman hayati maupun komunitas yang terletak di provinsi ini, dengan ketinggian 200 - 2.610 mdpl.

TABEL 118 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
SULAWESI TEN-GAH	150.474,52	217,00	1.364.043,94	158.298,78	87.528,13	626.670,45	2.387.232,81
Balantak		11,35	28.162,01	8.400,67		25.054,48	61.628,51
Babirusa		11,35	28.162,01	8.400,67		25.054,48	61.628,51
Banawa Lalundu	9,40		28.462,56	4.268,81	8,92	20.356,25	53.105,95
Anoa	0,01		2.900,78				2.900,79
Babirusa	9,40		25.561,78	4.268,81	8,92	20.356,25	50.205,16
Budong-Budong			49,39				49,39
Babirusa			49,39				49,39
Dampelas Tinombo			25.247,83	5.624,09		40.475,97	71.347,89
Anoa			243,26	8,49		781,54	1.033,29
Babirusa			25.004,57	5.615,60		39.694,42	70.314,59
Papua Barat Utara			1.775,62			6.977,35	8.752,98
Anoa						576,33	576,33
Babirusa			1.775,62			6.401,03	8.176,65
Gunung Dako	45,69		44.721,22	16.414,42		68.953,16	130.134,49
Anoa			4.335,79	1.765,16		14.136,48	20.237,43
Babirusa	45,69		40.385,43	14.649,26		54.816,68	109.897,06
Kalaena			1.305,79				1.305,79

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Babirusa			1.305,79				1.305,79
Karossa						72,69	72,69
Babirusa						72,69	72,69
Laiwoi Barat		81,65	1.496,17	13.309,35			14.887,18
Babirusa		81,65	1.496,17	13.309,35			14.887,18
Laiwoi Utara			2.963,29	11.377,63		2.103,08	16.444,00
Babirusa			2.963,29	11.377,63		2.103,08	16.444,00
Lariang			23.969,47	3,76			23.973,23
Babirusa			23.969,47	3,76			23.973,23
Larona Malili			47.819,39		53,26	35,43	47.908,08
Anoa			6.661,82				6.661,82
Babirusa			41.157,57		53,26	35,43	41.246,26
Morowali	374,06	47,19	66.490,94	25.114,94	256,92	82.333,86	174.617,93
Babirusa	374,06	47,19	66.490,94	25.114,94	256,92	82.333,86	174.617,93
Pogogul	1,22	2,89	51.787,24	18.547,91	47,07	70.519,27	140.905,60
Anoa						214,35	214,35
Babirusa	1,22	2,89	51.787,24	18.547,91	47,07	70.304,91	140.691,24
Pohuwato			22.724,31			29,25	22.753,56
Babirusa			22.724,31			29,25	22.753,56
Rano Patanu	45,77		49.071,64			1,54	49.118,95
Anoa			4.677,72			0,00	4.677,72
Babirusa	45,77		44.393,92			1,54	44.441,23
Rongkong			54.968,50			21.968,50	76.937,01
Anoa			2.846,64			122,03	2.968,67
Babirusa			52.121,86			21.846,48	73.968,34

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Toili Baturube	541,48		112.154,50	28.220,99	129,65	74.770,66	215.817,28
Anoa				0,00		0,00	0,00
Babirusa	541,48		112.154,50	28.220,99	129,65	74.770,66	215.817,28
Tojo Una-Una			52.028,67	581,32		53.249,16	105.859,15
Anoa						0,74	0,74
Babirusa			52.028,67	581,32		53.248,43	105.858,41
Unit III	909,62		90.772,17			8.759,51	100.441,30
Anoa	192,26		7.816,13			495,52	8.503,91
Babirusa	717,36		82.956,04			8.263,98	91.937,38
Unit IX			26.576,82				26.576,82
Anoa			3.087,17				3.087,17
Babirusa			23.489,65				23.489,65
Unit V			45.211,06	347,04		37.553,19	83.111,28
Anoa						0,17	0,17
Babirusa			45.211,06	347,04		37.553,02	83.111,11
Unit VI			44.839,45			1,87	44.841,32
Anoa			11.378,31			0,93	11.379,25
Babirusa			33.461,14			0,93	33.462,07
Unit VIII	51,47		113.183,98			22.768,59	136.004,03
Anoa	1,64		17.068,41			11,71	17.081,76
Babirusa	49,82		96.115,56			22.756,88	118.922,27
Unit X	10,40		67.157,69			25,80	67.193,89
Anoa	0,61		8.794,08			0,06	8.794,75
Babirusa	9,79		58.363,61			25,74	58.399,13
Unit XII			14.403,34			17,49	14.420,82

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Babirusa			14.403,34			17,49	14.420,82
Unit XIII	41,48		107.861,63	23.901,20		30.340,42	162.144,73
Anoa			14.335,75				14.335,75
Babirusa	41,48		93.525,88	23.901,20		30.340,42	147.808,98
Unit XV	531,51		76.928,34	2.095,09		40,73	79.595,68
Anoa			12.391,95	189,32			12.581,27
Babirusa	531,51		64.536,39	1.905,78		40,73	67.014,41
Unit XVI			109.126,54				109.126,54
Anoa			18.123,53				18.123,53
Babirusa			91.003,01				91.003,01
Unit XVIII	200,72		52.215,76			60.095,90	112.512,39
Anoa			1.153,19				1.153,19
Babirusa	200,72		51.062,57			60.095,90	111.359,19

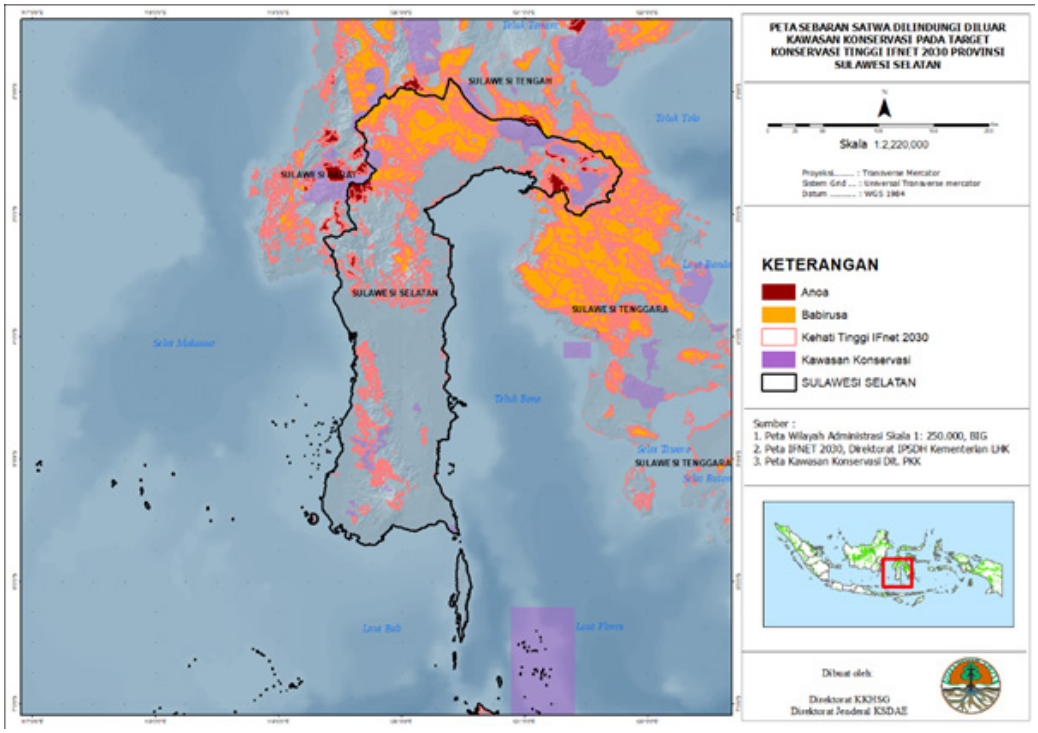

GAMBAR 112 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah

5. Provinsi Sulawesi Tenggara

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 1.179.334,42 hektar. Babirussa di Ueesi menempati area terluas di provinsi ini, yaitu seluas 150.156,44 hektar. Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yang juga memiliki Anoa dan babirussa yang terletak di Provinsi ini memiliki ketinggian hingga 981 mdpl.

TABEL 118 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
SULAWESI TENGGARA	29.528,40	220,71	841.915,02	43.158,46	18.305,46	246.206,37	1.179.334,42
Alaaha	1,58		41.714,82	5.044,83		44.827,71	91.588,94
Babirusa	1,58		41.714,82	5.044,83		44.827,71	91.588,94
Gantara		10,00	1.551,05			60,24	1.621,28
Anoa						30,12	30,12

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Babirusa		10,00	1.551,05			30,12	1.591,16
Gularaya	198,01	1,97	27.283,86	3.784,47		22,29	31.290,61
Anoa	69,06	0,00	435,57	313,28			817,91
Babirusa	128,95	1,97	26.848,30	3.471,19		22,29	30.472,70
Kapontori			2.183,12	829,00		76,74	3.088,85
Babirusa			2.183,12	829,00		76,74	3.088,85
Katondoki	12,07	2,67	465,80	72,18			552,71
Babirusa	12,07	2,67	465,80	72,18			552,71
Ladongi	279,73		6.613,02	2.607,25		17.408,82	26.908,82
Anoa			1,33				1,33
Babirusa	279,73		6.611,69	2.607,25		17.408,82	26.907,49
Laiwoi	112,46		93.555,80	4.695,54	205,49	18.258,09	116.827,38
Babirusa	112,46		93.555,80	4.695,54	205,49	18.258,09	116.827,38
Laiwoi Barat	288,77	50,92	44.240,01	5.448,25	38,34	50.410,75	100.477,04
Babirusa	288,77	50,92	44.240,01	5.448,25	38,34	50.410,75	100.477,04
Laiwoi Tengah	82,29		176.417,27	4.281,57	340,15	37.728,41	218.849,69
Babirusa	82,29		176.417,27	4.281,57	340,15	37.728,41	218.849,69
Laiwoi Tenggara	105,44	6,52	38.851,03	662,77		2.728,91	42.354,68
Babirusa	105,44	6,52	38.851,03	662,77		2.728,91	42.354,68
Laiwoi Utara	387,69	0,84	12.639,21	2.150,81		117,13	15.295,68
Babirusa	387,69	0,84	12.639,21	2.150,81		117,13	15.295,68
Lakompa			7.145,01	39,55		6,74	7.191,30
Babirusa			7.145,01	39,55		6,74	7.191,30
Larona Malili			18,35				18,35
Babirusa			18,35				18,35

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Lasalimu		3,82	8.150,52	221,29			8.375,63
Anoa			2.839,94	48,70			2.888,64
Babirusa		3,82	5.310,58	172,59			5.486,99
Mekongga Se-latan	13,49		7.500,47	6.603,94	2,19	9.478,97	23.599,05
Anoa	1,77		1.312,65				1.314,42
Babirusa	11,72		6.187,82	6.603,94	2,19	9.478,97	22.284,63
Mekongga Utara	46,35		93.521,28	6.116,02			99.683,65
Anoa			297,52	664,40			961,92
Babirusa	46,35		93.223,76	5.451,62			98.721,73
Patampanua Se-latan	108,69		86.757,44		33,38	485,14	87.384,65
Babirusa	108,69		86.757,44		33,38	485,14	87.384,65
Patampanua Utara	57,29	9,56	23.186,40			38.281,68	61.534,94
Babirusa	57,29	9,56	23.186,40			38.281,68	61.534,94
Peropa Ea	0,95	21,57	6.548,09				6.570,61
Anoa			11,01				11,01
Babirusa	0,95	21,57	6.537,09				6.559,61
Pulau Muna	370,73	39,08	13.964,06				14.373,87
Babirusa	370,73	39,08	13.964,06				14.373,87
Tina Orima	112,88	1,66	20.060,63	19,47	213,03	57,38	20.465,05
Anoa	0,02	0,00	370,52	0,03			370,58
Babirusa	112,86	1,66	19.690,10	19,44	213,03	57,38	20.094,47
Ueesi	391,53		124.372,51	48,47		25.343,94	150.156,44
Babirusa	391,53		124.372,51	48,47		25.343,94	150.156,44

Provinsi/ Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan						
	APL	Badan Air	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Wakonti	16,95		3.447,25	3,10		3,69	3.470,99
Anoa			285,09			0,32	285,41
Babirusa	16,95		3.162,16	3,10		3,37	3.185,57

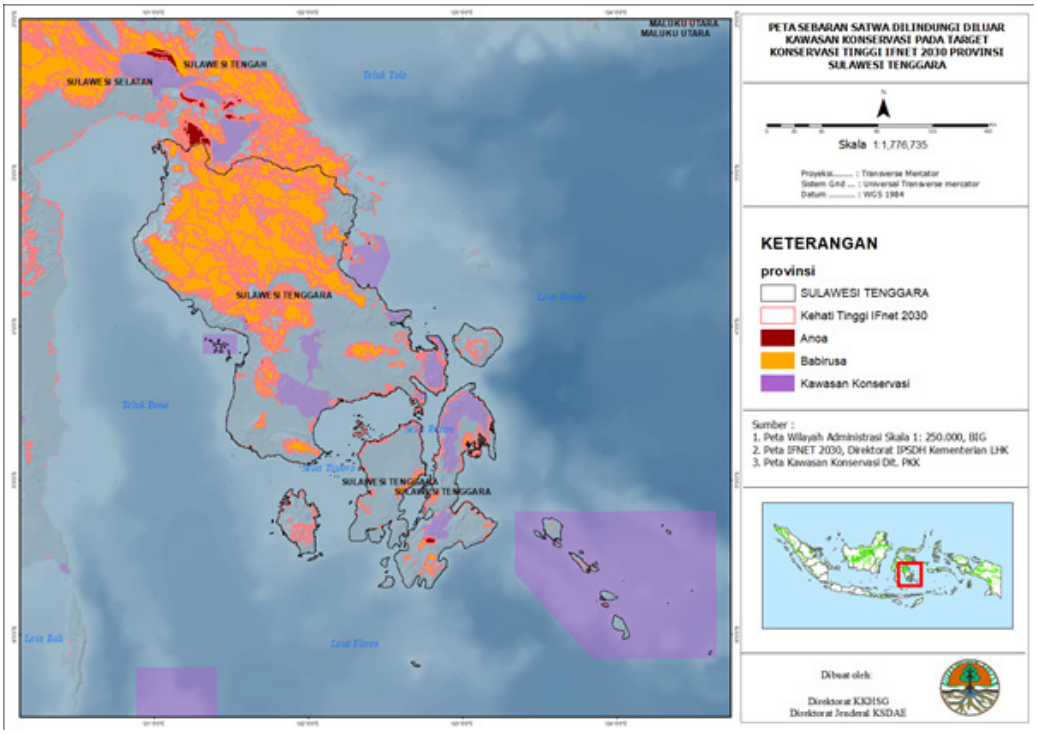

GAMBAR 113 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara

6. Provinsi Sulawesi Utara

Luasan total target konservasi tinggi di Provinsi Sulawesi Utara adalah 156.132,89 hektar. Babirussa di Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur menempati area terluas di provinsi ini, yaitu seluas 65.810,26 hektar. Terdapat 41 gunung di provinsi ini dengan ketinggian 1.112–1.995 mdpl.

TABEL 120 | Luas total target Area Bernilai Konservasi Tinggi di Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi/Unit KPH/ Jenis Satwa	Luasan Habitat Satwa Berdasarkan Fungsi Kawasan					
	APL					Grand Total
SULAWESI UTARA	7.544,14	74,07	113.269,91	5.298,63	29.946,13	156.132,89
Bolaang Mongondow Dan Bolaang Mongondow Utara			17.400,15		33,44	17.433,58
Anoa					0,01	0,01
Babirusa			17.400,15		33,43	17.433,58
Bolaang Mongondow Selatan Dan Bolaang Mongondow Timur		4,44	60.282,72	901,05	17.026,21	78.214,42
Anoa			12.381,74	22,04	0,38	12.404,16
Babirusa		4,44	47.900,98	879,01	17.025,83	65.810,26
Bone Bolango			6,99			6,99
Anoa			0,33			0,33
Babirusa			6,67			6,67
Minahasa Utara, Bitung, Dan Manado		66,17	7.898,93			7.965,10
Babirusa		66,17	7.898,93			7.965,10
Minahasa, Tomohon, Minahasa Tenggara, Dan Minahasa Selatan			11.979,10	555,04	5.421,58	17.955,71
Babirusa			11.979,10	555,04	5.421,58	17.955,71
Poigar			3.270,45	3.842,54	7.464,90	14.577,90
Babirusa			3.270,45	3.842,54	7.464,90	14.577,90

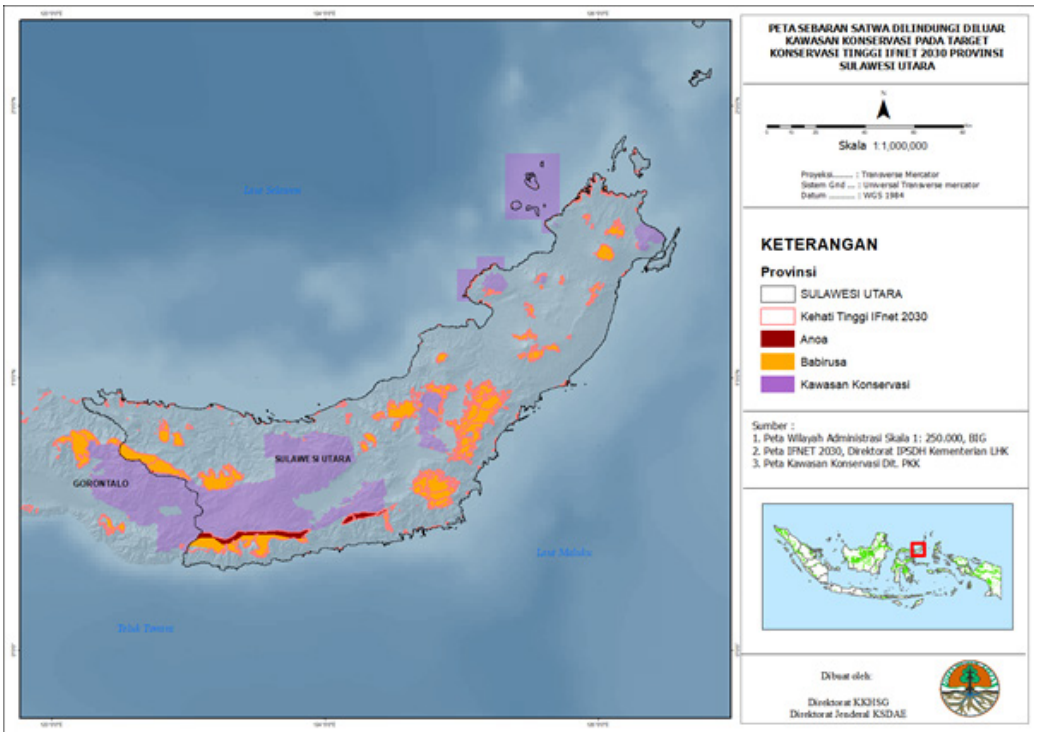

GAMBAR 114 | Sebaran satwa dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi Sulawesi Utara

C. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Implementasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk bidang konservasi diuraikan dalam Tabel 123-127 berikut:

TABEL 121 | Tata waktu pelaksanaan kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi di kawasan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Pemantapan Kawasan Konservasi**	Kawasan Konservasi yang Dilakukan Penetapan (Prakondisi) Status dan Fungsi untuk Peningkatan Nilai Efektifitas	Penataan dan Penandaan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi	BKSDA Jambi			■					
				BKSDA Sumsel	■	■		■				
				BBKSDA Riau	■	■	■	■	■	■	■	■
				BKSDA Kalteng			■	■				
				BKSDA Kalbar	■	■		■		■	■	■
				Tahura Pandan Puloh			■					
				BKSDA Kaltim	■					■		■
				BKSDA Kalsel	■	■						
			Perencanaan Kelola Kawasan Konservasi Jangka Panjang	BKSDA Kalteng		■	■		■	■		■
				BTN Tanjung Puting			■					
				BKSDA Kalbar	■	■	■	■		■		■
				BBTN BKDS				■				
				BTN Gunung Palung						■		
				Tahura Pandan Puloh					■			
				BKSDA Kaltim							■	
				Tahura Bukit Soeharto							■	
				BKSDA Kalsel		■						
				BKSDA Jambi				■				
				BTN Berbak dan Sembilang	■							■
				BKSDA Riau	■	■	■	■	■	■	■	■

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Bukit Tigapuluh			■					
				BTN Tesso Nilo						■		
				BKSDA Sumsel	■	■						■
		Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	■		■		■	■		■
				BTN Tanjung Puting			■	■	■	■		
				BKSDA Kalbar	■		■	■	■	■		■
				BBTN BKDS							■	
				BTN Gunung Palung					■			
				Tahura Pandan Puloh								■
				BKSDA Kaltim	■			■	■		■	
				Tahura Bukit Soeharto					■			
				BKSDA Kalsel		■	■					
				BKSDA Jambi	■							
				BTN Berbak dan Sembilang	■	■						
				BKSDA Riau	■	■	■	■	■	■	■	■
				BTN Bukit Tigapuluh	■							
				BTN Tesso Nilo				■				
				BKSDA Sumsel	■			■			■	
2	**Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	■	■	■	■	■	■	■	■
				BTN Tanjung Puting	■	■	■	■	■	■	■	■
				BKSDA Kalbar	■	■	■	■	■	■	■	■
				BBTN BKDS	■	■	■	■	■	■	■	■
				BTN Gunung Palung	■	■	■	■	■	■	■	■

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
3	**Pengendalian Kahutla Di Kawasan Konservasi dan Daerah Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
4	**Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Tingkat Tapak (RBM)**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	Sama dengan AM I.2								
5	**Kemitraan Konservasi Akses HHBK dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat**	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Pemberian Akses Kelola Kepada Masyarakat	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
6	**Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga**	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif Di Kawasan Konservasi	Pengem-bangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat Di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
			Pendam-pingan dalam Rangka Pem-berdayaan Masyarakat	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
7	**Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam**	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
		Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktid masyarakat Desa di sekitar kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
8	**Inventarisasi dan Verifikasi Kehati**	Kawasan Konservasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
		Kawasan Perlindungan Keaneka-ragaman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di Dalam Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	**Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar**	Entitas Perlindungan, dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati Yang Dikembangkan	Penanganan Satwa Transit dan Konflik	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								
10	**Menerapkan Kebijakan Pelarangan Penebangan Hutan Primer Masuk Arahan Lindung Berdasarkan IJLH.**				Sama Dengan AM I.2							
11	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Dalkarhutla**				Sama Dengan AM I.3							
12	**Pencegahan Penebangan Liar di Areal Hutan Konservasi.**				Sama Dengan AM I.3							

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	**Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan dan Kelola Usaha) Kelompok Masyarakat**			Sama Dengan AM I.4 & 1.6								
14	**Identifikasi, Pemetaan dan Pengem-bangan Potensi Jasa Lingkungan dan HHBK**			Sama Dengan AM I.5								
15	**Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Setempat**	Kawasan Konservasi yang Ditingkat-kan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BKSDA Kalbar								
				BBTN BKDS								
				BTN Gunung Palung								
				Tahura Pandan Puloh								
				BKSDA Kaltim								
				Tahura Bukit Soeharto								
				BKSDA Kalsel								
				BKSDA Jambi								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Riau								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumsel								

TABEL 122 | Tata waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan cadangan karbon (PCK non-rotasi) di kawasan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Penanganan Opened area**	Luas Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang Ditangani	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Konflik Tenurial	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
2	**Penanganan Opened area**	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
			Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
3	**RHL pada Kawasan Konservasi**				Sama dengan AM II.2							
4	**Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga**	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
			Pendam-pingan dalam Rangka Pem-berdayaan Masyarakat	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
5	**Inventarisasi dan Verifikasi Kehati**	Kawasan Konservasi dengan Nilai Kehati Tinggi	Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
		Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
6	**Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar**	Entitas Perlindungan, Dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati yang di Kembangkan	Penanganan Satwa Transit dan Konflik	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	**Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
8	**Pengendalian Karhutla di Kawasan Konservasi dan Daerah Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efefektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
9	**Penanganan Opened area Penangann Konflik Tenurial**	Kawasan Konservasi dang Dilakukan Penetapan (Prakondisi) Status dan Fungsi untuk Peningkatan Nilai Efektifitas	Penataan dan Penandaan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
			Perencanaan Kelola Kawasan Konservasi Jangka Panjang	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
			Kerjasama Penyelengga-raan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
10	**Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan dan Kelola Usaha) Kelompok Masyarakat**			Sama dengan AM II.6								
10	**Fasilitas Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efefektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								
		Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								
				BTN Bukit Tigapuluh								
				BTN Tesso Nilo								
				BKSDA Sumatera Selatan								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BBTN Gunung Leuser								
				BTN Batang Gadis								
				BTN Way Kambas								
				BBTN Bukit Barisan Selatan								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalimantan Barat								
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum								
				BTN Gunung Palung								
				BTN Bukit Baka Bukit Raya								
				BKSDA Kalimantan Timur								
				BTN Kutai								
				UPTD Tahura Bukit Suharto								
				UPTD Tahura Lati Petangis								
				BKSDA Kalimantan Selatan								
				BTN Kayan Mentarang								
				BKSDA Jambi								
				BBTN Kerinci Seblat								
				BTN Berbak dan Sembilang								
				BKSDA Sumatera Barat								
				BTN Siberut								
				BBKSDA Riau								
				BTN Bukit Duabelas								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Bukit Tigapuluh						■		
				BTN Tesso Nilo				■				
				BKSDA Sumatera Selatan	■	■				■		■
				BTN Berbak dan Sembilang				■				
				BBTN Gunung Leuser	■							
				BTN Batang Gadis			■					
				BTN Way Kambas						■		
				BBTN Bukit Barisan Selatan								■
12	**Identifikasi, Pemetaan dan Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan dan HHBK**				Sama dengan AM II.11							
13	**Menerapkan Kebijakan Pelarangan Penebangan Hutan Primer Masuk Arahan Lindung Berdasarkan IJLH**				Sama dengan AM II.7							
14	**Penangann Konflik Tenurial**				Sama dengan AM II.1							
15	**Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Mangrove**				Sama dengan AM II.3							
16	**Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan IKN**				Sama dengan AM II.9							
17	**Melaksanakan Penyusunan Manual/ Guidelines Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**				Sama dengan AM II.11							

TABEL 124 | Tata waktu pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan gambut (restorasi) di kawasan hutan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Revegetasi**	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN Gunung Palung								
				BKSDA Kaltim								
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN Gunung Palung								
				BKSDA Kaltim								
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								
			Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN Gunung Palung								
				BKSDA Kaltim								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								
2	**Rewetting (Pembasahan) Dengan Pembangunan Sekat Kanal**	Pemulihan Ekosistem	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN GunungPalung								
				BKSDA Kaltim								
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN Gunung Palung								
				BKSDA Kaltim								
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								
			Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem				Sama dengan AM IV.1					
3	**Patroli & Pemeliharaan Sekat Kanal**	Pemulihan Ekosistem	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat				Sama dengan AM IV.1					
		Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN Gunung Palung								
				BKSDA Kaltim								
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								
4	**Pemberdayaan Masyaraat Desa Penyangga**	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN Gunung Palung								
				BKSDA Kaltim								
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								
			Pendampingan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN Gunung Palung								
				BKSDA Kaltim								
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa disekitar KK	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN Gunung Palung								
				BKSDA Kaltim								
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								
5	**Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN Gunung Palung								
				BKSDA Kaltim								
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								
6	**Pengendalian Karhutla di Kawasan Konservasi Dan Desa Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BKSDA Kalteng								
				BTN Tanjung Puting								
				BTN Sebangau								
				BKSDA Kalbar								
				BTN Gunung Palung								
				BKSDA Kaltim								
				BTN Berbak Sembilang								
				BBKSDA Riau								

TABEL 127 | Tata waktu pelaksanaan kegiatan konservasi kehati tinggi di Area Bernilai Konservasi Tinggi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	Tahun							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Perlindungan, Rescue, Rehab dan Release Satwa**	Kawasan Perlindungan Keaneka-ragaman Rincian Spesies dan Genetik TSL	Satwa Transit dan Konflik	Lokasi target di ABKT								
2	**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan KEE**	Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah, Taman Kehati dan Karst	Lokasi target di ABKT								
3	**Inventarisasi dan Verifikasi ABKT**	Kawasan dengan Nilai Keaneka-ragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati	Lokasi target di luar kawasan konservasi								
4	**Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar**	Entitas Per-lindungan, dan Pengawetan Keaneka-ragaman Hayati yang di Kembangkan		Lokasi target di luar kawasan konservasi								
5	**Penyusunan NSPK Kehati di ABKT**			Direktorat BPPE dan KKHSG								

Kegiatan konservasi kehati tinggi di Area bernikai Konservasi Tinggi di kawasan hutan akan didukung oleh kegiatan perhutanan sosial. Pelaksanaan kegiatan konservasi kehati tinggi di areal Perhutanan Sosial disajikan pada Tabel 128 berikut:

TABEL 128 | Tata waktu kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial dalam mendukung pengelolaan HCV periode 2022-2030

Intervensi	Tujuan	Kegiatan	Tahun								
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Percepatan Akses Kelola Kawasan	Meningkatnya Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial									
Tata Kelola Usaha Dan Hutan Adat	Meningkatnya Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Dan Hutan Adat	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat									

Intervensi	Tujuan	Kegiatan	Tahun								
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SDM Pendampingan	Meningkatnya Pendampingan Perhutanan Sosial	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat									
Penguatan Kemitraan	Meningkatnya Kemitraan	Kemitraan Lingkungan									

D. Dukungan Sumber Daya Manusia

Ditjen KSDAE tahun 2021 memiliki memiliki 9.380 pegawai yang terdiri dari 6.041 orang ASN (PNS dan CPNS) dan 3.339 orang PPNPN. Seluruh pegawai tersebut tersebar di unit kerja 74 UPT yang mengelola 27 juta Ha di 560 unit kawasan konservasi. Jumlah tersebut sangat tidak memadai, dimana di luar jawa misalnya di TN Gunung Leuser 1 unit resort pengelolaan luasnya 30-50 ribu Ha yang hanya dikelola 3 – 4 orang petugas resort, sementara di Jawa, TN Gunung Merapi seluas 6.607 Ha yang dikelola oleh 74 staf, dimana luas 1 resort rata-rata 1.000 Ha yang dikelola 5 – 7 orang. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* untuk bidang konservasi per tahunnya disajikan pada Tabel 129-132.

TABEL 125 | Dukungan SDM dalam kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi di kawasan hutan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
1	**Pemantapan Kawasan Konservasi**	Kawasan Konservasi yang Dilakukan Penetapan (Prakondisi) Status dan Fungsi untuk Peningkatan Nilai Efektifitas	Penataan dan Penandaan Zonasi/ Blok Kawasan Konservasi	BKSDA Jambi	35
				BKSDA Sumsel	80
				BBKSDA Riau	48
				BKSDA Kalteng	45
				BKSDA Kalbar	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				BKSDA Kalsel	45
			Penataan dan Penandaan Zonasi/ Blok Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
			Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
2	**Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
3	**Pengendalian Kahutla Di Kawasan Konservasi dan Daerah Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
4	**Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Tingkat Tapak (RBM)**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	Sama dengan AM I.2	
5	**Kemitraan Konservasi Akses HHBK dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat**	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Pemberian Akses Kelola Kepada Masyarakat	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
5	**Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga**	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif Di Kawasan Konservasi	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat Di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
			Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
7	**Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam**	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/ Energi Air	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
		Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktid masyarakat Desa di sekitar kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
8	**Inventarisasi dan Verifikasi Kehati**	Kawasan Konservasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
		Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di Dalam Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
9	**Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar**	Entitas Perlindungan, dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati Yang Dikembangkan	Penanganan Satwa Transit dan Konflik	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80
10	**Menerapkan Kebijakan Pelarangan Penebangan Hutan Primer Masuk Arahan Lindung Berdasarkan IJLH.**		Sama dengan AM I.2		

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
11	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Dalkarhutla**		Sama dengan AM I.2		
12	**Pencegahan Penebangan Liar di Areal Hutan Konservasi.**		Sama dengan AM I.2		
13	**Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan dan Kelola Usaha) Kelompok Masyarakat**		Sama dengan AM I.2		
14	**Identifikasi, Pemetaan dan Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan dan HHBK**		Sama dengan AM I.2		
15	**Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Setempat**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BBTN BKDS	59
				BTN Gunung Palung	41
				UPTD Tahura Pandan Puloh	-
				BKSDA Kaltim	62
				UPTD Tahura Bukit Soeharto	-
				BKSDA Kalsel	45
				BKSDA Jambi	35
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Riau	48
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumsel	80

TABEL 126 | Dukungan SDM dalam kegiatan peningkatan cadangan karbon (PCK non-rotasi) di kawasan hutan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
1	**Penanganan Opened area**	Luas Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang Ditangani	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Konflik Tenurial	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
2	**Pemulihan Ekosistem**	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
			Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	-
				BTN Kayan Mentarang	-
				BKSDA Jambi	-
				BBTN Kerinci Seblat	-
				BTN Berbak dan Sembilang	-
				BKSDA Sumatera Barat	-
				BTN Siberut	-
				BBKSDA Riau	-
				BTN Bukit Duabelas	-
				BTN Bukit Tigapuluh	-
				BTN Tesso Nilo	-
				BKSDA Sumatera Selatan	-
				BTN Berbak dan Sembilang	-
				BBTN Gunung Leuser	-

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Batang Gadis	-
				BTN Way Kambas	-
				BBTN Bukit Barisan Selatan	-
3	**RHL pada Kawasan Konservasi**		Sama dengan AM II.2		
4	**Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga**	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah	-
				BTN Tanjung Puting	-
				BTN Sebangau	-
				BKSDA Kalimantan Barat	-
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	-
				BTN Gunung Palung	-
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	-
				BKSDA Kalimantan Timur	-
				BTN Kutai	-
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	-
				BTN Kayan Mentarang	-
				BKSDA Jambi	-
				BBTN Kerinci Seblat	-
				BTN Berbak dan Sembilang	-
				BKSDA Sumatera Barat	-
				BTN Siberut	-
				BBKSDA Riau	-
				BTN Bukit Duabelas	-
				BTN Bukit Tigapuluh	-
				BTN Tesso Nilo	-
				BKSDA Sumatera Selatan	-

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Berbak dan Sembilang	-
				BBTN Gunung Leuser	-
				BTN Batang Gadis	-
				BTN Way Kambas	-
				BBTN Bukit Barisan Selatan	-
			Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat	BKSDA Kalimantan Tengah	-
				BTN Tanjung Puting	-
				BTN Sebangau	-
				BKSDA Kalimantan Barat	-
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	-
				BTN Gunung Palung	-
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	-
				BKSDA Kalimantan Timur	-
				BTN Kutai	-
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	-
				BTN Kayan Mentarang	-
				BKSDA Jambi	-
				BBTN Kerinci Seblat	-
				BTN Berbak dan Sembilang	-
				BKSDA Sumatera Barat	-
				BTN Siberut	-
				BBKSDA Riau	-
				BTN Bukit Duabelas	-
				BTN Bukit Tigapuluh	-

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Tesso Nilo	-
				BKSDA Sumatera Selatan	-
				BTN Berbak dan Sembilang	-
				BBTN Gunung Leuser	-
				BTN Batang Gadis	-
				BTN Way Kambas	-
				BBTN Bukit Barisan Selatan	-
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
5	**Inventarisasi dan Verifikasi Kehati**	Kawasan Konservasi dengan Nilai Kehati Tinggi	Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
		Kawasan Perlindungan Keanekaraga man Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
6	**Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar**	Entitas Perlindungan, Dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati yang di Kembangkan	Penanganan Satwa Transit dan Konflik	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
7	**Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
8	**Pengendalian Karhutla di Kawasan Konservasi dan Daerah Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efefektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
9	**Penanganan Opened area Penangann Konflik Tenurial**	Kawasan Konservasi dang Dilakukan Penetapan (Prakondisi) Status dan Fungsi untuk Peningkatan Nilai Efektifitas	Penataan dan Penandaan Zonasi/ Blok Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
			Perencanaan Kelola Kawasan Konservasi Jangka Panjang	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
			Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
10	**Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan dan Kelola Usaha) Kelompok Masyarakat**				
11	**Fasilitas Peningka-tan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan**	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangk An	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/ Energi Air	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
11	**Fasilitas Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan**	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				BKSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalimantan Tengah	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalimantan Barat	41
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	59
				BTN Gunung Palung	41
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	27
				KSDA Kalimantan Timur	62
				BTN Kutai	47
				UPTD Tahura Bukit Suharto	-
				UPTD Tahura Lati Petangis	-
				BKSDA Kalimantan Selatan	45
				BTN Kayan Mentarang	42
				BKSDA Jambi	35
				BBTN Kerinci Seblat	135
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BKSDA Sumatera Barat	68
				BTN Siberut	34
				BBKSDA Riau	48
				BTN Bukit Duabelas	38
				BTN Bukit Tigapuluh	40
				BTN Tesso Nilo	41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BKSDA Sumatera Selatan	80
				BTN Berbak dan Sembilang	60
				BBTN Gunung Leuser	53
				BTN Batang Gadis	36
				BTN Way Kambas	84
				BBTN Bukit Barisan Selatan	71
12	**Identifikasi, Pemetaan dan Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan dan HHBK**		Sama dengan AM II.11		
13	**Menerapkan Kebijakan Pelarangan Penebangan Hutan Primer Masuk Arahan Lindung Berdasarkan IJLH**		Sama dengan AM II.7		
14	**Penangann Konflik Tenurial**		Sama dengan AM II.1		
15	**Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Mangrove**		Sama dengan AM II.3		
16	**Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan IKN**		Sama dengan AM II.9		
17	**Melaksanakan Penyusunan Manual/ Guidelines Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**		Sama dengan AM II.11		

TABEL 127 | Dukungan SDM dalam kegiatan pengelolaan hutan lestari (enhanced natural regeneration) di kawasan hutan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
1	**Pembinaan Habitat**	Kawasan Perlindungan Keanekarag aman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi	BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BKSDA Kaltim	62
				BKSDA Kalsel	45
				BTN Berbak Sembilang	60
				BTN Tesso Nilo	41
			Penanganan Satwa Transit dan Konflik	BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BKSDA Kaltim	62
				BKSDA Kalsel	45
				BTN Berbak Sembilang	60
				BTN Tesso Nilo	41
1	**Pembinaan Habitat**	Kawasan Perlindungan Keanekarag aman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi	BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BKSDA Kaltim	62
				BKSDA Kalsel	45
				BTN Berbak Sembilang	60
				BTN Tesso Nilo	41
			Penanganan Satwa Transit dan Konflik	Sama dengan AM III.1	
3	**Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BKSDA Kaltim	62
				BKSDA Kalsel	45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Berbak Sembilang	60
				BTN Tesso Nilo	41
4	**Pengendalian Karhutla di Kawasan Konservasi dan Desa Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BTN Tanjung Puting	39
				BKSDA Kalbar	41
				BKSDA Kaltim	62
				BKSDA Kalsel	45
				BTN Berbak Sembilang	60
				BTN Tesso Nilo	41

ABEL 128 | Dukungan SDM dalam kegiatan pengelolaan lahan gambut (restorasi) di kawasan hutan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
1	**Pemantapan Kawasan Konservasi**	Kawasan Konservasi yang Dilakukan Penetapan (Prakondisi) Status dan Fungsi untuk Peningkatan Nilai Efektifitas	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41
				BTN Gunung Palung	41
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60
				BBKSDA Riau	48
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41
				BTN Gunung Palung	41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60
				BBKSDA Riau	48
			Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41
				BTN Gunung Palung	41
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60
				BBKSDA Riau	48
2	**Rewetting (Pembasahan) Dengan Pembangunan Sekat Kanal**	Pemulihan Ekosistem	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41
				BTN GunungPalung	41
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60
				BBKSDA Riau	48
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BTN Gunung Palung	41
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60
				BBKSDA Riau	48
			Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	Sama dengan AM IV.1	
3	**Patroli & Pemeliharaan Sekat Kanal**	Pemulihan Ekosistem	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	Sama dengan AM IV.1	
		Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41
				BTN Gunung Palung	41
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60
				BBKSDA Riau	48
4	**Pemberdayaan Masyaraat Desa Penyangga**	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41
				BTN Gunung Palung	41
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60
				BBKSDA Riau	48

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
			Pendampingan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41
				BTN Gunung Palung	41
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60
				BBKSDA Riau	48
			Pengelolaan Usaha EkonomiProduktif Masyarakat Desa disekitar KK	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41
				BTN Gunung Palung	41
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60
				BBKSDA Riau	48
5	**Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41
				BTN Gunung Palung	41
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	Sumber Daya Manusia (orang)
				BBKSDA Riau	48
6	**Pengendalian Karhutla di Kawasan Konservasi dan Desa Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BKSDA Kalteng	41
				BTN Tanjung Puting	39
				BTN Sebangau	37
				BKSDA Kalbar	41
				BTN Gunung Palung	41
				BKSDA Kaltim	62
				BTN Berbak Sembilang	60
				BBKSDA Riau	48

TABEL 129 | Dukungan SDM dalam kegiatan konservasi keanekaragaman hayati tinggi di ABKT

No	Kegiatan	Rincian Output	Para Pihak
1	**Perlindungan, Rescue, Rehab dan Release Satwa**	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Rincian Spesies dan Genetik TSL	UPT KSDAE, Pemerintah daerah, Swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Masyarakat
2	**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan ABKT**	Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	UPT KSDAE, Pemerintah daerah, Swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Masyarakat
3	**Inventarisasi dan Verifikasi ABKT**	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	UPT KSDAE, Pemerintah daerah, Swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Masyarakat
4	**Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar**	Penyelamatan Satwa Liar	UPT KSDAE, Pemerintah daerah, Swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Masyarakat
5	**Penyusunan NSPK Kehati di ABKT**	Pedoman Pengelolaan ABKT	Ditjen KSDAE

Keberadaan sumber daya manusia dalam menjaga Area Bernilai Konservasi Tinggi juga sebagai upaya pemulihan ekosistem dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan upaya konservasi kehati membutuhkan dukungan sejumlah tenaga pendamping dan pelaksana kegiatan. Sebagai upaya mendukung tercapainya Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di ABKT, maka implementasi kegiatan perhutanan sosial juga dipastikan dengan adanya sejumlah pendamping dan kelompok-kelompok kemitraan untuk perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (Tabel 134).

E. Pendanaan Kegiatan

Implementasi kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk bidang konservasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Rincian anggaran indikatif yang dibutuhkan per UPT per aksi mitigasi dapat dilihat pada Tabel 135-139 di bawah ini.

TABEL 134 | Jumlah tenaga pendamping PS dan kemitraan kelompok PS dan KL pada aksi mitigasi konservasi kehati tinggi di ABKT pada areal PS indikatif (2022-2030)

No	Provinsi	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	
1	**Aceh**	204	150.812	
2	**Sumatera Utara**	349	62.991	
3	**Sumatera Barat**	208	253.637	
4	**Riau**	159	62.590	
5	**Jambi**	96	12.788	
6	**Sumatera Selatan**	42	16.632	
7	**Bengkulu**	64	6.518	
8	**Lampung**	54	8.578	
9	**Kepulauan Bangka Belitung**	31	2.965	
10	**Kepulauan Riau**	106	9.830	
11	**Bali**	10	902	
12	**Nusa Tenggara Barat**	177	126.862	
13	**Nusa Tenggara Timur**	476	85.306	
14	**Kalimantan Barat**	165	179.068	
15	**Kalimantan Tengah**	114	32.001	
16	**Kalimantan Selatan**	23	5.970	
17	**Kalimantan Timur**	97	92.994	
18	**Kalimantan Utara**	54	40.160	
19	**Sulawesi Utara**	92	7.630	
20	**Sulawesi Tengah**	263	40.275	
21	**Sulawesi Selatan**	192	132.485	
22	**Sulawesi Tenggara**	173	40.768	
23	**Gorontalo**	68	3.155	
24	**Sulawesi Barat**	115	23.416	
25	**Maluku**	30	3.024	
26	**Maluku Utara**	107	19.472	
27	**Papua Barat**	287	284.921	
28	**Papua**	241	236.161	
	Total	3997	1941912	

	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial TARGET VOLUME (orang)									Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial TARGET VOLUME (orang)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	-	-	204	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-
	-	-	-	349	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-
	-	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
	-	-	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	177	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-
	-	-	-	476	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-
	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	263	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-	-
	-	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-
	-	-	-	-	173	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-
	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	-
	-	-	-	-	-	241	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-
	-	-	208	1250	887	487	1080	-	-	-	-	104	625	444	244	540	-	-

TABEL 135 | Pendanaan untuk kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi di dalam kawasan hutan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	
1	**Pemantapan Kawasan Konservasi**	Kawasan Konservasi yang Dilakukan Penetapan (Prakondisi) Status dan Fungsi untuk Peningkatan Nilai Efektifitas	Penataan dan Penandaan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi	BKSDA Jambi	
				BKSDA Sumsel	
				BBKSDA Riau	
				BKSDA Kalteng	
				BKSDA Kalbar	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				BKSDA Kalsel	
			Perencanaan Kelola Kawasan Konservasi Jangka Panjang	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
			Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	

	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial TARGET VOLUME (orang)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			69.8					
	69.8	69.8			69.8			
	69.8	69.8	139.6	69.8	139.6	69.8	139.6	69.8
			69.8	69.8				
	69.8	69.8		69.8		69.8	69.8	69.8
			69.8					
	69.8					69.8		69.8
	69.8	69.8						
		165	165		165	165		165
			165					
	165	165	165	165		165		165
				165				
						165		
					165			
	165				165			165
							165	
		165					165	
				165				
	165							165
	165	165	330	165	330	165	165	330
			165					
						165		
	165	165						165
	15		15		15	15		15
				15				
	15		15	15	15	15		15
							15	
					15			

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
2	**Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perencanaan Kelola Kawasan Konservasi Jangka Panjang	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
3	**Pengendalian Kahutla Di Kawasan Konservasi dan Daerah Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	

	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial TARGET VOLUME (orang)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
								15
	15			15			15	
					15			
		15	15					
	15							
	15	15						
	15	15	30	15	30	30	15	15
	15							
				15				
	15			15			15	
	1374	1374	1374	1374	1374	1374	1374	1374
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	1648.8	1648.8	1648.8	1648.8	1648.8	1648.8	1648.8	1648.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	3022.8	3022.8	3022.8	3022.8	3022.8	3022.8	3022.8	3022.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4
	390	390	390	390	390	390	390	390
	78	78	78	78	78	78	78	78
	468	468	468	468	468	468	468	468
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
4	**Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Tingkat Tapak (RBM)**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi		
5	**Kemitraan Konservasi Akses HHBK dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat**	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Pemberian Akses Kelola Kepada Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
5	**Kemitraan Konservasi Akses HHBK dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat**	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Pemberian Akses Kelola Kepada Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	

	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial TARGET VOLUME (orang)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	78	78	78	78	78	78	78	78
	234	234	234	234	234	234	234	234
	78	78	78	78	78	78	78	78
	156	156	156	156	156	156	156	156
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	858	858	858	858	858	858	858	858
	78	78	78	78	78	78	78	78
	234	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	Sama dengan AM I.2							
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	21.6				21.6			
	245							
		49						
			294					

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
			Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	

	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial TARGET VOLUME (orang)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		49						
				49				
					49			
				147				
						49		
	98							
							49	
		49						
					539			
	49							
								49
							147	
	62	62	62	62	62	62	62	62
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	67.5	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2
	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	405	405	405	405	405	405	405	405

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
5	**Kemitraan Konservasi Akses HHBK dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat**	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Pemberian Akses Kelola Kepada Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
		Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	

Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial TARGET VOLUME (orang)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.533	67.5	67.5
202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5
67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
135	135	135	135	135	135	135	135
67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5
64.3		64.3		64.3	64.3		64.3
			64.3				
64.3		64.3	64.3	64.3	64.3		64.3
						64.3	
				64.3			
							64.3
64.3			64.3			64.3	
				64.3			
	64.3	64.3					
64.3							
64.3	64.3						
64.3	128.6	64.3		64.3	128.6	64.3	128.6
64.3							
		64.3					
64.3			64.3			64.3	
72.1							
	72.1						
			72.1				

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktid masyarakat Desa di sekitar kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
8	**Inventarisasi dan Verifikasi Kehati**	Kawasan Konservasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	

Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial TARGET VOLUME (orang)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		72.1					
				72.1			
		72.1					
					72.1		
							72.1
						72.1	
	72.1						
72.1							
	72.1						
				72.1			
							72.1
			72.1				
67.5		67.5		67.5	67.5		67.5
			67.5				
67.5		67.5	67.5	67.5	67.5		67.5
						67.5	
				67.5			
							67.5
67.5			67.5			67.5	
				67.5			
	67.5	67.5					
67.5							
67.5	67.5						
67.5	135	67.5	67.5	135	67.5	67.5	135
					67.5		
		67.5					
67.5			67.5			67.5	
252				252			
50.4				50.4			
302.4				302.4			

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
		Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di Dalam Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
9	**Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar**	Entitas Perlindungan, dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati Yang Dikembangkan	Penanganan Satwa Transit dan Konflik	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	

	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial TARGET VOLUME (orang)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	151.2				151.2			
	50.4				50.4			
	100.8				100.8			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	554.4				554.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	151.2				151.2			
	119	119	119	119	119	119	119	119
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	142.8	142.8	142.8	142.8	142.8	142.8	142.8	142.8
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	261.8	261.8	261.8	261.8	261.8	261.8	261.8	261.8
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT Pelaksana	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	
10	**Menerapkan Kebijakan Pelarangan Penebangan Hutan Primer Masuk Arahan Lindung Berdasarkan IJLH**				
11	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Dalkarhutla**				
12	**Pencegahan Penebangan Liar di Areal Hutan Konservasi**				
13	**Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan dan Kelola Usaha) Kelompok Masyarakat**				
14	**Identifikasi, Pemetaan dan Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan dan HHBK**				
15	**Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Setempat (bid**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN BKDS	
				BTN Gunung Palung	
				Tahura Pandan Puloh	
				BKSDA Kaltim	
				Tahura Bukit Soeharto	
				BKSDA Kalsel	
				BKSDA Jambi	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumsel	

Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial TARGET VOLUME (orang)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
Sama dengan AM I.2							
Sama dengan AM I.2							
Sama dengan AM I.2							
Sama dengan AM I.2							
Sama dengan AM I.2							
1374	1374	1374	1374	1374	1374	1374	1374
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
1648.8	1648.8	1648.8	1648.8	1648.8	1648.8	1648.8	1648.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
3022.8	3022.8	3022.8	3022.8	3022.8	3022.8	3022.8	3022.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4

TABEL 130 | Dukungan anggaran untuk kegiatan peningkatan cadangan karbon (PCK non-rotasi) di kawasan hutan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
1	**Penanganan Opened area**	Luas Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang Ditangani	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Konflik Tenurial	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1147.5							
		229.5						
			229.5					
				2754				
					459			
						229.5		
								229.5
		918						
			229.5					
			229.5					
							229.5	
				1606.5				
								229.5
							229.5	
		229.5						
					229.5			
						229.5		
								229.5
	688.5							
			229.5					
								229.5
					229.5			
		918						
				229.5				
								229.5
	229.5							
		229.5						
					229.5			

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
2	**Pemulihan Ekosistem**	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	68112.625	68112.625	68112.625	68112.625	68112.625	68112.625	68112.625	68112.625
	182792.5	182792.5	182792.5	182792.5	182792.5	182792.5	182792.5	182792.5
	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250
	248055.5	248055.5	248055.5	248055.5	248055.5	248055.5	248055.5	248055.5
	108419.625	108419.625	108419.625	108419.625	108419.625	108419.625	108419.625	108419.625
	2813.5	2813.5	2813.5	2813.5	2813.5	2813.5	2813.5	2813.5
	6375	6375	6375	6375	6375	6375	6375	6375
	145617.75	145617.75	145617.75	145617.75	145617.75	145617.75	145617.75	145617.75
	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000
	18663.875	18663.875	18663.875	18663.875	18663.875	18663.875	18663.875	18663.875
	2144.125	2144.125	2144.125	2144.125	2144.125	2144.125	2144.125	2144.125
	35447.125	35447.125	35447.125	35447.125	35447.125	35447.125	35447.125	35447.125
	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125
	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258
	106250	106250	106250	106250	106250	106250	106250	106250
	77520	77520	77520	77520	77520	77520	77520	77520
	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250
	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250
	22599.375	22599.375	22599.375	22599.375	22599.375	22599.375	22599.375	22599.375
	3187.5	3187.5	3187.5	3187.5	3187.5	3187.5	3187.5	3187.5
	14875	14875	14875	14875	14875	14875	14875	14875
	44304.125	44304.125	44304.125	44304.125	44304.125	44304.125	44304.125	44304.125
	69666	69666	69666	69666	69666	69666	69666	69666
	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250
	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250
	12750	12750	12750	12750	12750	12750	12750	12750
	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250
	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250
		20433.7875	6811.2625					
		54837.75	18279.25					
		1275	425					

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
			Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	

	Anggaran - Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		74416.65	24805.55					
		32525.8875	10841.9625					
		844.05	281.35					
		1912.5	637.5					
		43685.325	14561.775					
		25500	8500					
		5599.1625	1866.3875					
		643.2375	214.4125					
		10634.1375	3544.7125					
		637.5	212.5					
		377.4	125.8					
		31875	10625					
		23256	7752					
		6375	2125					
		6375	2125					
		6779.8125	2259.9375					
		956.25	318.75					
		4462.5	1487.5					
		13291.2375	4430.4125					
		20899.8	6966.6					
		6375	2125					
		6375	2125					
		3825	1275					
		6375	2125					
		6375	2125					
	106.5							
	21.3							
	21.3							
	255.6							
	42.6							

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
3	**RHL pada Kawasan Konservasi**				
4	**Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga**	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	21.3							
	21.3							
	85.2							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	149.1							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	63.9							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	85.2							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
				Sama dengan AM I.2				
	245							
			49					
					49			
		588						
						98		
							49	

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
			Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
								49
			196					
				49				
		49						
					49			
						343		
	49							
								49
							49	
					49			
			49					
				49				
		147						
			49					
							49	
						49		
				196				
								49
		49						
	49							
					49			
								49
	62	62	62	62	62	62	62	62
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	148.8	148.8	148.8	148.8	148.8	148.8	148.8	148.8
	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	810	810	810	810	810	810	810	810
	135	135	135	135	135	135	135	135
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	270	270	270	270	270	270	270	270
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
5	**Inventarisasi dan Verifikasi Kehati**	Kawasan Konservasi dengan Nilai Kehati Tinggi	Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	

	Anggaran - Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	472.5	472.5	472.5	472.5	472.5	472.5	472.5	472.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	270	270	270	270	270	270	270	270
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	252				252			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	604.8				604.8			
	100.8				100.8			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	201.6				201.6			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	352.8				352.8			

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
		Kawasan Perlindungan Keanekaraga man Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	151.2				151.2			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	201.6				201.6			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	50.4				50.4			
	119	119	119	119	119	119	119	119
	23.8							
	23.8							
	285.6	285.6	285.6	285.6	285.6	285.6	285.6	285.6
	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6
	23.8							
	23.8							
	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2
	23.8							
	23.8							
	23.8							
	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6
	23.8							
	23.8							

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
6	**Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar**	Entitas Perlindungan, dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati yang di Kembangkan	Penanganan Satwa Transit dan Konflik	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	23.8							
	23.8							
	23.8							
	23.8							
	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4
	23.8							
	23.8							
	23.8							
	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2
	23.8							
	23.8							
	23.8							
	23.8							
	23.8							
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
7	**Perlindungan, Pengamanan, dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	1374	1374	1374	1374	1374	1374	1374	1374
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	3297.6	3297.6	3297.6	3297.6	3297.6	3297.6	3297.6	3297.6
	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	1099.2	1099.2	1099.2	1099.2	1099.2	1099.2	1099.2	1099.2
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	1923.6	1923.6	1923.6	1923.6	1923.6	1923.6	1923.6	1923.6
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
8	**Pengendalian Karhutla di Kawasan Konservasi dan Daerah Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efefektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	

Anggaran - Rp (juta)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4	824.4
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
1099.2	1099.2	1099.2	1099.2	1099.2	1099.2	1099.2	1099.2
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
390	390	390	390	390	390	390	390
78	78	78	78	78	78	78	78
78	78	78	78	78	78	78	78
936	936	936	936	936	936	936	936
156	156	156	156	156	156	156	156
78	78	78	78	78	78	78	78
78	78	78	78	78	78	78	78
312	312	312	312	312	312	312	312
78	78	78	78	78	78	78	78
78	78	78	78	78	78	78	78
78	78	78	78	78	78	78	78
546	546	546	546	546	546	546	546
78	78	78	78	78	78	78	78
78	78	78	78	78	78	78	78
78	78	78	78	78	78	78	78
78	78	78	78	78	78	78	78
78	78	78	78	78	78	78	78
78	78	78	78	78	78	78	78
234	234	234	234	234	234	234	234
78	78	78	78	78	78	78	78

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
9	**Penanganan Opened area Penangann Konflik Tenurial**	Kawasan Konservasi dang Dilakukan Penetapan (Prakondisi) Status dan Fungsi untuk Peningkatan Nilai Efektifitas	Penataan dan Penandaan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BTN Bukit Duabelas	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	312	312	312	312	312	312	312	312
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
		69.8		69.8	69.8	69.8		69.8
			69.8					
	69.8							
	69.8	139.6	69.8	139.6	69.8	139.6	69.8	139.6
		69.8				69.8		
				69.8				
		69.8						
			69.8		69.8	69.8	69.8	
		69.8						
	69.8							
	69.8							
		69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8
								69.8
				69.8				
		69.8						
								69.8
		69.8						
					69.8			
	69.8							
		69.8			69.8			69.8
				69.8				
								69.8

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
			Penataan dan Penandaan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BTN Bukit Duabelas	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			69.8		69.8		69.8	69.8
	69.8							
				69.8				
								69.8
			69.8					
						69.8		
		165	165		165		165	165
				165				
						165		
	165	330	165	330	165	330	165	330
		165		165				
								165
			165					
	165	165			165		165	
				165				
						165		
			165					
		165	165	165	165	165	165	165
	165							
			165					
								165
					165			
						165		
							165	
	165							
		165	165	165				
							165	
								165
	165		165		165	165		
	165							

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
			Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BTN Bukit Duabelas	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				165				
						165		
								165
		165						
	15		15		15	15		15
							15	
		15						
	15	30	30	15	30	15	30	15
			15			15		
		15						
								15
				15		15	15	15
	15							
					15			
		15						
	15	15	15	15	15	15	15	
	15							
								15
							15	
		15						
	15							
					15			
								15
		15		15			15	
				15				
							15	
	15		15			15		15
		15						
				15				
							15	

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
10	**Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan dan Kelola Usaha) Kelompok Masyarakat**				
11	**Fasilitas Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan**	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangk An	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BTN Bukit Duabelas	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					15			
		15						
					Sama dengan AM I.2			
		64.3	64.3		64.3		64.3	64.3
				64.3				
							64.3	
	128.6	64.3	128.6	64.3	128.6	64.3	64.3	128.6
		64.3			64.3			
								64.3
							64.3	
		64.3		64.3		64.3		64.3
			64.3					
	64.3							
					64.3			
		64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3
	64.3							
		64.3						
				64.3				
		64.3						
						64.3		
								64.3
				64.3				
		64.3		64.3			64.3	
						64.3		
				64.3				
	64.3	64.3				64.3		64.3
				64.3				
	64.3							
			64.3					
						64.3		

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
		Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
								64.3
	72.1							
				72.1				
						72.1		
	72.1							
			72.1					
					72.1			
	72.1							
								72.1
						72.1		
							72.1	
			72.1					
		72.1						
				72.1				
						72.1		
	72.1							
							72.1	
								72.1
		72.1						
					72.1			
		72.1						
							72.1	
		72.1						
				72.1				
								72.1
	72.1							
					72.1			
								72.1
							72.1	
		67.5	67.5		67.5		67.5	67.5
				67.5				
							67.5	
	135	135	135	135	135	135	135	135

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
				BTN Gunung Palung	
				BTN Bukit Baka Bukit Raya	
				KSDA Kaltim	
				BTN Kutai	
				UPTD Tahura Bukit Suharto	
				UPTD Tahura Lati Petangis	
				BKSDA Kalimantan Selatan	
				BTN Kayan Mentarang	
				BKSDA Jambi	
				BBTN Kerinci Seblat	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BKSDA Sumatera Barat	
				BTN Siberut	
				BBKSDA Riau	
				BTN Bukit Duabelas	
				BTN Bukit Tigapuluh	
				BTN Tesso Nilo	
				BKSDA Sumatera Selatan	
				BTN Berbak dan Sembilang	
				BBTN Gunung Leuser	
				BTN Batang Gadis	
				BTN Way Kambas	
				BBTN Bukit Barisan Selatan	
12	**Identifikasi, Pemetaan dan Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan dan HHBK**				
13	**Menerapkan Kebijakan Pelarangan Penebangan Hutan Primer Masuk Arahan Lindung Berdasarkan IJLH**				
14	**Penangann Konflik Tenurial**				
15	**Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Mangrove**				
16	**Melaksanakan Penyusunan Manual/Guidelines Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**				

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		67.5			67.5			
								67.5
							67.5	
		67.5		67.5		67.5		67.5
			67.5					
	67.5							
					67.5			
		67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5							
		67.5						
				67.5				
		67.5						
								67.5
				67.5				
		67.5		67.5			67.5	
						67.5		
						67.5		
				67.5				
	67.5	67.5				67.5		67.5
				67.5				
	67.5							
			67.5					
						67.5		
								67.5
				Sama dengan AM I.2				
				Sama dengan AM I.2				
				Sama dengan AM I.2				
				Sama dengan AM I.2				
				Sama dengan AM I.2				

TABEL 131 | Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari (ENR) di kawasan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
1	**Pembinaan Habitat**	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi	BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BKSDA Kaltim	
				BKSDA Kalsel	
				BTN Berbak Sembilang	
				BTN Tesso Nilo	
			Penanganan Satwa Transit dan Konflik	BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BKSDA Kaltim	
				BKSDA Kalsel	
				BTN Berbak Sembilang	
				BTN Tesso Nilo	
2	**Pengkayaan Jenis**	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di Dalam Kawasan Konservasi	BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BKSDA Kaltim	
				BKSDA Kalsel	
				BTN Berbak Sembilang	
				BTN Tesso Nilo	
			Penanganan Satwa Transit dan Konflik		
3	**Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BKSDA Kaltim	
				BKSDA Kalsel	
				BTN Berbak Sembilang	
				BTN Tesso Nilo	
4	**Pengendalian Karhutla di Kawasan Konservasi dan Desa Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BTN Tanjung Puting	
				BKSDA Kalbar	
				BKSDA Kaltim	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1428	1428	1428					
	3570	3570		3570				
				2737		2737	2737	
			238		238			238
			1904			1904		1904
					1071		1071	1071
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6	345.6
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
				Sama dengan kegiatan ENR 1.2				
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	156	156	156	156	156	156	156	156

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BKSDA Kalsel	
				BTN Berbak Sembilang	
				BTN Tesso Nilo	

BEL 132 | Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan gambut (restorasi) di kawasan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
1	**Revegetasi**	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN Gunung Palung	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Berbak Sembilang	
				BBKSDA Riau	
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN Gunung Palung	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Berbak Sembilang	
				BBKSDA Riau	
			Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN Gunung Palung	
				BKSDA Kaltim	

	Anggaran - Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78

	Anggaran - Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	445	445	445	445	445	445	445	445
	11125	11125	11125	11125	11125	11125	11125	11125
	140.175	140.175	140.175	140.175	140.175	140.175	140.175	140.175
	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225
	73.425	73.425	73.425	73.425	73.425	73.425	73.425	73.425
	4672.5	4672.5	4672.5	4672.5	4672.5	4672.5	4672.5	4672.5
	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225
	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25
	70	70	70	70	70	70	70	70
	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05
	350	350	350	350	350	350	350	350
	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55
	735	735	735	735	735	735	735	735
	350	350	350	350	350	350	350	350
	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	21.3							
	42.6							

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BTN Berbak Sembilang	
				BBKSDA Riau	
2	**Rewetting (Pembasahan) Dengan Pembangunan Sekat Kanal**	Pemulihan Ekosistem	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN GunungPalung	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Berbak Sembilang	
				BBKSDA Riau	
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN Gunung Palung	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Berbak Sembilang	
				BBKSDA Riau	
			Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem		
3	**Patroli & Pemeliharaan Sekat Kanal**	Pemulihan Ekosistem	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat		
		Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN Gunung Palung	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Berbak Sembilang	
				BBKSDA Riau	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	21.3							
	42.6							
	26							
	26							
	26							
	26							
	26							
	52							
	26							
	52							
		2.8						
		2.8						
		2.8						
		2.8						
		2.8						
		5.6						
		2.8						
		5.6						
				Sama dengan AM IV.1				
				Sama dengan AM IV.1				
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
4	**Pemberdayaan Masyaraat Desa Penyangga**	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN Gunung Palung	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Berbak Sembilang	
				BBKSDA Riau	
			Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN Gunung Palung	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Berbak Sembilang	
				BBKSDA Riau	
			Pengelolaan Usaha EkonomiProduktif Masyarakat Desa disekitar Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN Gunung Palung	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Berbak Sembilang	
				BBKSDA Riau	
5	**Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN Gunung Palung	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Berbak Sembilang	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	49							
				49				
							49	
								49
		49						
					98			
			49					
						98		
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	135	135	135	135	135	135	135	135
	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	135	135	135	135	135	135	135	135
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8
	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6
	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8	274.8

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	UPT	
				BBKSDA Riau	
6	**Pengendalian Karhutla di Kawasan Konservasi dan Desa Penyangga**	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan	BKSDA Kalteng	
				BTN Tanjung Puting	
				BTN Sebangau	
				BKSDA Kalbar	
				BTN Gunung Palung	
				BKSDA Kaltim	
				BTN Berbak Sembilang	
				BBKSDA Riau	

BEL 133 | Dukungan anggaran untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan hutan konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	
1	**Perlindungan, Rescue, Rehab dan Release Satwa**	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Rincian Spesies dan Genetik TSL	
2	**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan ABKT**	Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	
3	**Inventarisasi dan Verifikasi ABKT**	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	
4	**Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar**	Penyelamatan Satwa Liar	
5	**Penyusunan NSPK Kehati di ABKT**	Pedoman Pengelolaan ABKT	

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6	549.6
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	78	78	78	78	78	78	78	78
	156	156	156	156	156	156	156	156
	78	78	78	78	78	78	78	78
	156	156	156	156	156	156	156	156

	Anggaran – Rp (juta)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100
	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	16600	16600	16600	16600	16600	16600	16600	16600
	500	500	-	-	500	-	-	-

BEL 136 | Target volume aksi mitigasi pengelolaan HCV pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum, pendamping PS dan kemitraan kelompok PS dan kemitraan lingkungan

No	Provinsi	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS) TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Aceh**	51	99.281,40	-	40	80	160	200	200	160	140	40
2	**Sumatera Utara**	87	18.967,69	-	100	200	300	300	300	240	180	120
3	**Sumatera Barat**	126	130.041,87	-	160	300	500	500	500	300	160	100
4	**Riau**	55	52.065,74	-	40	120	160	220	220	160	140	40
5	**Jambi**	67	80.798,07	-	60	120	200	240	240	240	200	40
6	**Sumatera Selatan**	60	12.406,93	-	60	120	200	220	200	200	160	40
7	**Bengkulu**	19	1.987,57	-	20	40	60	80	80	40	40	20
8	**Lampung**	55	5.740,85	-	40	120	160	220	220	160	140	40
9	**Kepulauan Bangka Belitung**	29	8.102,13	-	40	60	100	140	120	60	40	20
10	**Kepulauan Riau**	18	3.021,33	-	20	40	60	60	60	60	40	20
11	**Jawa Barat**	29	3.190,70	-	40	60	100	140	120	60	40	20
12	**Jawa Tengah**	4	33,88	-	20	20	20	20	-	-	-	-
13	**Jawa Timur**	58	10.123,04	-	40	120	160	260	240	160	140	40
14	**Banten**	2	291,76	-	20	20	-	-	-	-	-	-
15	**Bali**	54	7.755,44	-	40	120	160	220	200	160	140	40
16	**NTB**	55	6.612,70	-	40	120	160	220	220	160	140	40
17	**NTT**	88	8.945,71	-	100	200	300	320	300	240	180	120
18	**Kalimantan Barat**	120	279.012,68	-	160	240	500	500	500	240	160	100
19	**Kalimantan Tengah**	70	97.466,24	-	60	120	220	260	260	240	200	40
20	**Kalimantan Selatan**	30	20.652,66	-	20	80	120	120	120	80	40	20
21	**Kalimantan Timur**	42	135.532,59	-	40	40	140	200	200	140	40	40
22	**Kalimantan Utara**	23	54.039,19	-	20	60	80	80	80	60	40	40
23	**Sulawesi Utara**	29	2.055,78	-	40	60	100	160	100	60	40	20
24	**Sulawesi Tengah**	78	36.274,13	-	120	180	240	280	240	200	180	120
25	**Sulawesi Selatan**	152	45.775,76	-	200	360	400	440	440	440	400	360

	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS) TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)									INDIKATOR KINERJA : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ (UNIT SATUAN: KUPS) TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	200	400	800	1000	1000	800	700	200	-	80	80	80	80	80	-	-	-
	-	500	1000	1500	1500	1500	1200	900	600	-	80	80	160	80	80	80	80	80
	-	800	1500	2500	2500	2500	1500	800	500	-	80	80	160	160	160	160	160	80
	-	200	600	800	1100	1100	800	700	200	-	80	80	80	80	80	80	-	-
	-	300	600	1000	1200	1200	1200	1000	200	-	80	80	80	80	80	80	80	-
	-	300	600	1000	1100	1000	1000	800	200	-	80	80	80	80	80	80	-	-
	-	100	200	300	400	400	200	200	100	-	80	80	-	-	-	-	-	-
	-	200	600	800	1100	1100	800	700	200	-	80	80	80	80	80	80	-	-
	-	200	300	500	700	600	300	200	100	-	80	80	80	-	-	-	-	-
	-	100	200	300	300	300	300	200	100	-	-	80	80	-	-	-	-	-
	-	200	300	500	700	600	300	200	100	-	80	80	80	-	-	-	-	-
	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	200	600	800	1300	1200	800	700	200	-	80	80	80	80	80	80	-	-
	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	200	600	800	1100	1000	800	700	200	-	80	80	80	80	80	-	-	-
	-	200	600	800	1100	1100	800	700	200	-	80	80	80	80	80	80	-	-
	-	500	1000	1500	1600	1500	1200	900	600	-	80	80	160	160	160	80	-	-
	-	800	1200	2500	2500	2500	1200	800	500	-	80	80	160	160	160	160	80	80
	-	300	600	1100	1300	1300	1200	1000	200	-	80	80	80	80	80	80	80	-
	-	100	400	600	600	600	400	200	100	-	80	80	80	-	-	-	-	-
	-	200	200	700	1000	1000	700	200	200	-	80	80	80	80	-	-	-	-
	-	100	300	400	400	400	300	200	200	-	80	80	-	-	-	-	-	-
	-	200	300	500	800	500	300	200	100	-	-	80	80	80	-	-	-	-
	-	600	900	1200	1400	1200	1000	900	600	-	80	80	80	80	80	80	80	80
	-	1000	1800	2000	2200	2200	2200	2000	1800	-	80	160	160	240	160	160	160	80

No	Provinsi	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS) TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
26	**Sulawesi Tenggara**	84	35.029,28	-	100	200	280	280	280	240	180	120
27	**Gorontalo**	27	3.554,57	-	40	60	100	120	100	60	40	20
28	**Sulawesi Barat**	40	8.246,16	-	40	40	140	200	160	140	40	40
29	**Maluku**	43	21.783,99	-	40	40	140	200	200	160	40	40
30	**Maluku Utara**	76	24.146,29	-	120	180	240	240	240	200	180	120
31	**Papua**	38	16.617,84	-	40	40	140	160	160	140	40	40
32	**Papua Barat**	59	37.975,51	-	40	120	160	220	200	160	140	40
	TOTAL	1768	1.267.529,43	-	1960	3680	5800	6820	6500	4960	3640	1900

	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS) TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)									INDIKATOR KINERJA : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ (UNIT SATUAN: KUPS) TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	500	1000	1400	1400	1400	1200	900	600	-	80	80	80	80	80	80	80	80
	-	200	300	500	600	500	300	200	100	-	80	80	80	-	-	-	-	-
	-	200	200	700	1000	800	700	200	200	-	80	80	80	80	-	-	-	-
	-	200	200	700	1000	1000	800	200	200	-	80	80	80	80	-	-	-	-
	-	600	900	1200	1200	1200	1000	900	600	-	80	80	80	80	80	80	80	80
	-	200	200	700	800	800	700	200	200	-	80	80	80	80	-	-	-	-
	-	200	600	800	1100	1000	800	700	200	-	80	80	80	80	80	80	-	-
-	9800	18400	29000	34100	32500	24800	18200	9500	-	2240	2480	2640	2240	1760	1520	880	560	-

TABEL 138 | Target anggaran aksi konservasi kehati tinggi di Area Bernilai Konservasi Tinggi pada areal indikatif PS (2022-2030) berdasarkan luas prakondisi persetujuan PS dan luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS dalam skema HD, HKm, HTR dan KK

NO	Provinsi	Total Unit	Total Luas	INDIKATOR KINERJA : Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Aceh	204	150.812	-	-	-	15.081,19	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	349	62.991	-	-	-	6.299,12	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	208	253.637	-	-	25.363,75	-	-	-	-	-	-
4	Riau	159	62.590	-	-	-	-	6.259,03	-	-	-	-
5	Jambi	96	12.788	-	-	-	-	-	-	1.278,79	-	-
6	Sumatera Selatan	42	16.632	-	-	-	-	-	-	1.663,17	-	-
7	Bengkulu	64	6.518	-	-	-	-	-	-	651,78	-	-
8	Lampung	54	8.578	-	-	-	-	-	-	857,80	-	-
9	Kep.Bangka Belitung	31	2.965	-	-	-	-	-	-	296,47	-	-
10	Kepulauan Riau	106	9.830	-	-	-	-	-	-	982,98	-	-
11	Bali	10	902	-	-	-	90,23	-	-	-	-	-
12	Nusa Tenggara Barat	177	126.862	-	-	-	-	12.686,24	-	-	-	-
13	Nusa Tenggara Timur	476	85.306	-	-	-	8.530,56	-	-	-	-	-
14	Kalimantan Barat	165	179.068	-	-	-	-	17.906,78	-	-	-	-
15	Kalimantan Tengah	114	32.001	-	-	-	3.200,10	-	-	-	-	-
16	Kalimantan Selatan	23	5.970	-	-	-	-	597,03	-	-	-	-
17	Kalimantan Timur	97	92.994	-	-	-	9.299,44	-	-	-	-	-
18	Kalimantan Utara	54	40.160	-	-	-	-	-	4.016,00	-	-	-
19	Sulawesi Utara	92	7.630	-	-	-	-	763,04	-	-	-	-
20	Sulawesi Tengah	263	40.275	-	-	-	-	-	-	4.027,49	-	-
21	Sulawesi Selatan	192	132.485	-	-	-	-	-	13.248,47	-	-	-
22	Sulawesi Tenggara	173	40.768	-	-	-	-	4.076,83	-	-	-	-
23	Gorontalo	68	3.155	-	-	-	-	315,46	-	-	-	-
24	Sulawesi Barat	115	23.416	-	-	-	-	-	-	2.341,62	-	-
25	Maluku	30	3.024	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
26	Maluku Utara	107	19.472	-	-	-	-	-	-	1.947,22	-	-
27	Papua Barat	287	284.921	-	-	-	-	-	-	28.492,12	-	-
28	Papua	241	236.161	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-
Total		3997	1.941.912	-	-	25.363,75	42.500,64	42.604,42	17.264,70	42.539,44	-	-

INDIKATOR KINERJA : Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat								
TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	7.540,59	-	-	-	-	-
-	-	-	3.149,56	-	-	-	-	-
-	-	12.681,87	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.129,51	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	639,40	-	-
-	-	-	-	-	-	831,59	-	-
-	-	-	-	-	-	3.258,88	-	-
-	-	-	-	-	-	428,90	-	-
-	-	-	-	-	-	148,24	-	-
-	-	-	-	-	-	491,49	-	-
-	-	-	45,11	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.343,12	-	-	-	-
-	-	-	4.265,28	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8.953,39	-	-	-	-
-	-	-	1.600,05	-	-	-	-	-
-	-	-	-	298,52	-	-	-	-
-	-	-	4.649,72	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.008,00	-	-	-
-	-	-	-	381,52	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.013,75	-	-
-	-	-	-	-	6.624,23	-	-	-
-	-	-	-	2.038,41	-	-	-	-
-	-	-	-	157,73	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.170,81	-	-
-	-	-	-	151,18	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	973,61	-	-
-	-	-	-	-	-	14.246,06	-	-
-	-	-	-	-	11.808,05	-	-	-
-	-	12.681,87	21.250,32	21.453,39	20.440,28	24.202,71	-	-

TABEL 139 | Target anggaran aksi mitigasi pengelolaan HCV pada areal indikatif PS (2022-2030) berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan dan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan

NO	Provinsi	Total Unit	Total Luas	INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Aceh	204	150.812	-	-	-	600	800	1.000	800	480	400
2	Sumatera Utara	349	62.991	-	-	-	1.000	1.200	1.500	1.480	1.200	600
3	Sumatera Barat	208	253.637	-	-	400	400	600	960	800	600	400
4	Riau	159	62.590	-	-	-	-	400	600	1.180	600	400
5	Jambi	96	12.788	-	-	-	-	-	-	600	720	600
6	Sumatera Selatan	42	16.632	-	-	-	-	-	-	300	300	240
7	Bengkulu	64	6.518	-	-	-	-	-	-	400	480	400
8	Lampung	54	8.578	-	-	-	-	-	-	300	480	300
9	Kep.Bangka Belitung	31	2.965	-	-	-	-	-	-	200	220	200
10	Kepulauan Riau	106	9.830	-	-	-	-	-	-	600	920	600
11	Bali	10	902	-	-	-	40	40	40	40	40	-
12	Nusa Tenggara Barat	177	126.862	-	-	-	-	400	800	1.000	800	540
13	Nusa Tenggara Timur	476	85.306	-	-	-	1.000	1.600	2.000	2.000	2.000	920
14	Kalimantan Barat	165	179.068	-	-	-	-	600	600	800	700	600
15	Kalimantan Tengah	114	32.001	-	-	-	300	400	400	480	400	300
16	Kalimantan Selatan	23	5.970	-	-	-	-	40	120	160	100	40
17	Kalimantan Timur	97	92.994	-	-	-	200	400	400	400	400	140
18	Kalimantan Utara	54	40.160	-	-	-	-	-	200	400	400	80
19	Sulawesi Utara	92	7.630	-	-	-	-	240	400	500	500	200
20	Sulawesi Tengah	263	40.275	-	-	-	-	-	-	1.260	2.000	2.000
21	Sulawesi Selatan	192	132.485	-	-	-	-	-	440	1.200	1.200	1.000
22	Sulawesi Tenggara	173	40.768	-	-	-	-	360	800	1.000	1.000	300
23	Gorontalo	68	3.155	-	-	-	-	100	300	360	300	300
24	Sulawesi Barat	115	23.416	-	-	-	-	-	-	500	1.300	500
25	Maluku	30	3.024	-	-	-	-	100	100	200	100	100
26	Maluku Utara	107	19.472	-	-	-	-	-	-	540	800	800
27	Papua Barat	287	284.921	-	-	-	-	-	-	1.700	2.140	1.900
28	Papua	241	236.161	-	-	-	-	-	800	1.500	1.500	1.020
Total		3997	1.941.912	-	-	400	3.540	7.280	11.460	20.700	21.680	14.880

INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)								
TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	3.000	4.000	5.000	4.000	2.400	2.000
-	-	-	5.000	6.000	7.500	7.400	6.000	3.000
-	-	2.000	2.000	3.000	4.800	4.000	3.000	2.000
-	-	-	-	2.000	3.000	5.900	3.000	2.000
-	-	-	-	-	-	3.000	3.600	3.000
-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.200
-	-	-	-	-	-	2.000	2.400	2.000
-	-	-	-	-	-	1.500	2.400	1.500
-	-	-	-	-	-	1.000	1.100	1.000
-	-	-	-	-	-	3.000	4.600	3.000
-	-	-	200	200	200	200	200	-
-	-	-	-	2.000	4.000	5.000	4.000	2.700
-	-	-	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000	4.600
-	-	-	-	3.000	3.000	4.000	3.500	3.000
-	-	-	1.500	2.000	2.000	2.400	2.000	1.500
-	-	-	-	200	600	800	500	200
-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	700
-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	400
-	-	-	-	1.200	2.000	2.500	2.500	1.000
-	-	-	-	-	-	6.300	10.000	10.000
-	-	-	-	-	2.200	6.000	6.000	5.000
-	-	-	-	1.800	4.000	5.000	5.000	1.500
-	-	-	-	500	1.500	1.800	1.500	1.500
-	-	-	-	-	-	2.500	6.500	2.500
-	-	-	-	500	500	1.000	500	500
-	-	-	-	-	-	2.700	4.000	4.000
-	-	-	-	-	-	8.500	10.700	9.500
-	-	-	-	-	4.000	7.500	7.500	5.100
-	-	2.000	17.700	36.400	57.300	103.500	108.400	74.400

TABEL 140 | Target anggaran aksi mitigasi pengelolaan hcv pada areal indikatif ps (2022-2030) berdasarkan indikator kinerja kelompok usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan menjadi kelas gold dan jumlah tenaga pendamping perhutanan sosial

NO	Provinsi	Total Unit	Total Luas	INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Aceh	204	150.812	-	-	-	240	320	400	320	160	160
2	Sumatera Utara	349	62.991	-	-	-	400	480	560	560	480	320
3	Sumatera Barat	208	253.637	-	-	160	160	240	320	320	240	240
4	Riau	159	62.590	-	-	-	-	160	240	400	240	240
5	Jambi	96	12.788	-	-	-	-	-	-	240	320	240
6	Sumatera Selatan	42	16.632	-	-	-	-	-	-	80	160	80
7	Bengkulu	64	6.518	-	-	-	-	-	-	160	160	160
8	Lampung	54	8.578	-	-	-	-	-	-	80	160	160
9	Kep. Bangka Belitung	31	2.965	-	-	-	-	-	-	80	80	80
10	Kepulauan Riau	106	9.830	-	-	-	-	-	-	240	320	240
11	Bali	10	902	-	-	-	-	-	80	-	-	-
12	Nusa Tenggara Barat	177	126.862	-	-	-	-	160	320	400	320	240
13	Nusa Tenggara Timur	476	85.306	-	-	-	400	640	800	800	800	400
14	Kalimantan Barat	165	179.068	-	-	-	-	240	240	320	320	240
15	Kalimantan Tengah	114	32.001	-	-	-	80	160	160	160	160	160
16	Kalimantan Selatan	23	5.970	-	-	-	-	-	80	80	-	-
17	Kalimantan Timur	97	92.994	-	-	-	80	160	160	160	160	80
18	Kalimantan Utara	54	40.160	-	-	-	-	-	80	160	80	80
19	Sulawesi Utara	92	7.630	-	-	-	-	-	160	160	160	80
20	Sulawesi Tengah	263	40.275	-	-	-	-	-	-	480	800	800
21	Sulawesi Selatan	192	132.485	-	-	-	-	-	160	480	480	400
22	Sulawesi Tenggara	173	40.768	-	-	-	-	80	400	400	400	80
23	Gorontalo	68	3.155	-	-	-	-	80	80	160	160	80
24	Sulawesi Barat	115	23.416	-	-	-	-	-	-	160	480	320
25	Maluku	30	3.024	-	-	-	-	-	-	800	80	80
26	Maluku Utara	107	19.472	-	-	-	-	-	-	240	320	320
27	Papua Barat	287	284.921	-	-	-	-	-	-	720	800	800
28	Papua	241	236.161	-	-	-	-	-	320	560	560	480
Total		3997	1.941.912	-	-	160	1.360	2.720	4.560	8.720	8.400	6.560

INDIKATOR KINERJA : Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (UNIT SATUAN: ORANG)								
TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	7.344	-	-	-	-	-
-	-	-	12.564	-	-	-	-	-
-	-	7.488	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.724	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3.456	-	-
-	-	-	-	-	-	1.512	-	-
-	-	-	-	-	-	2.304	-	-
-	-	-	-	-	-	1.944	-	-
-	-	-	-	-	-	1.116	-	-
-	-	-	-	-	-	3.816	-	-
-	-	-	360	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.372	-	-	-	-
-	-	-	17.136	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.940	-	-	-	-
-	-	-	4.104	-	-	-	-	-
-	-	-	-	828	-	-	-	-
-	-	-	3.492	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.944	-	-	-
-	-	-	-	3.312	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9.468	-	-
-	-	-	-	-	6.912	-	-	-
-	-	-	-	6.228	-	-	-	-
-	-	-	-	2.448	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.080	-	-
-	-	-	-	1.080	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3.852	-	-
-	-	-	-	-	-	10.332	-	-
-	-	-	-	-	8.676	-	-	-
-	-	7.488	45.000	31.932	17.532	38.880	-	-

TABEL 141 | Target anggaran aksi konservasi kehati di ABKT pada areal indikatif PS (2022-2030) untuk Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA: KEMITRAAN KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Aceh	204	150.812	-	-	-	25.500	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	349	62.991	-	-	-	43.625	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	208	253.637	-	-	26.000	-	-	-	-	-	-
4	Riau	159	62.590	-	-	-	-	19.875	-	-	-	-
5	Jambi	96	12.788	-	-	-	-	-	-	12.000	-	-
6	Sumatera Selatan	42	16.632	-	-	-	-	-	-	5.250	-	-
7	Bengkulu	64	6.518	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-
8	Lampung	54	8.578	-	-	-	-	-	-	6.750	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	31	2.965	-	-	-	-	-	-	3.875	-	-
10	Kepulauan Riau	106	9.830	-	-	-	-	-	-	13.250	-	-
11	Bali	10	902	-	-	-	1.250	-	-	-	-	-
12	Nusa Tenggara Barat	177	126.862	-	-	-	-	22.125	-	-	-	-
13	Nusa Tenggara Timur	476	85.306	-	-	-	59.500	-	-	-	-	-
14	Kalimantan Barat	165	179.068	-	-	-	-	20.625	-	-	-	-
15	Kalimantan Tengah	114	32.001	-	-	-	14.250	-	-	-	-	-
16	Kalimantan Selatan	23	5.970	-	-	-	-	2.875	-	-	-	-
17	Kalimantan Timur	97	92.994	-	-	-	12.125	-	-	-	-	-
18	Kalimantan Utara	54	40.160	-	-	-	-	-	6.750	-	-	-
19	Sulawesi Utara	92	7.630	-	-	-	-	11.500	-	-	-	-
20	Sulawesi Tengah	263	40.275	-	-	-	-	-	-	32.875	-	-
21	Sulawesi Selatan	192	132.485	-	-	-	-	-	24.000	-	-	-
22	Sulawesi Tenggara	173	40.768	-	-	-	-	21.625	-	-	-	-
23	Gorontalo	68	3.155	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-
24	Sulawesi Barat	115	23.416	-	-	-	-	-	-	3.750	-	-
25	Maluku	30	3.024	-	-	-	-	3.750	-	-	-	-
26	Maluku Utara	107	19.472	-	-	-	-	-	-	13.375	-	-
27	Papua Barat	287	284.921	-	-	-	-	-	-	35.875	-	-
28	Papua	241	236.161	-	-	-	-	-	30.125	-	-	-
Total		3997	1.941.912	-	-	26.000	156.250	110.875	60.875	135.000	-	-

Program Perhutanan Sosial saat ini termasuk kedalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menerima dukungan pendanaan dari APBN yang ditujukan untuk kegiatan pemberian akses dan fasilitas pengembangan usaha, termasuk penyusunan rencana kelola. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung konservasi kehati tinggi di Area Bernilai Konservasi Tinggi, secara keseluruhan memerlukan total anggaran sebesar Rp 1.555.684.520.000 untuk periode 2022 – 2030 dengan rincian sebagai berikut:

Pendanaan kegiatan PS dalam mendukung aksi konservasi kehati tinggi di ABKT pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 membutuhkan total pendanaan sebesar Rp 1.023.856.000.000.

Pendanaan kegiatan PS dalam mendukung aksi konservasi kehati tinggi di ABKT pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 adalah sebesar Rp 531.828.520.000.

03

Penutup

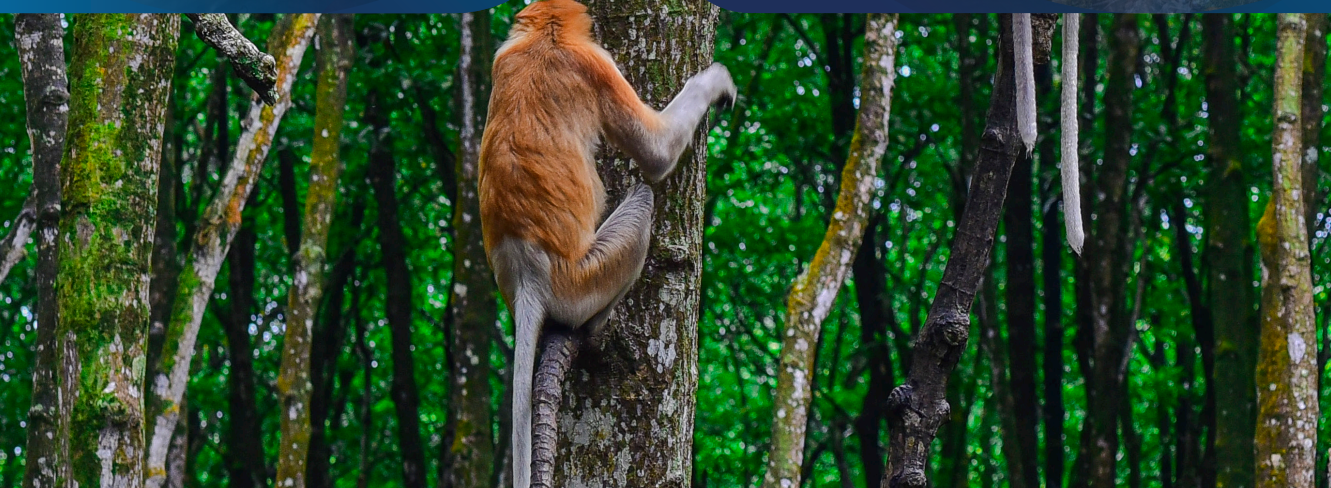

BAB 3 | PENUTUP

A. Strategi dalam Mendukung *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030

Desain Indonesia's FOLU Net Sink 2030 mendorong model kerja lintas Eselon I yang terpadu dan sinergis. Efektivitas kerjasama tersebut sangat menentukan keberhasilan tujuan ditetapkannya Indonesia's FOLU Net Sink 2030, sebagai komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung menurunan emisi Karbon di tingkat global.

Sebagai salah satu mitigasi utama FOLU Net Sink 2030, aksi mitigasi di bidang konservasi diharapkan menjadi penyumbang terbesar dalam pencapaian target Peningkatan Cadangan Karbon yang sekaligus juga menjadi trigger bagi manfaat lainnya (multiplier effect). Strategi pencapaian target Konservasi mencakup seluruh sasaran IPL dan melibatkan multipihak dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan keselarasan dan menjamin tercapainya target konservasi, perlu ditetapkan strategi, program dan rencana kegiatan yang memiliki tahapan yang jelas.

Berdasarkan Buku Renop FOLU NET SINK 2030, target luasan dan lokasi bidang konservasi dibedakan menjadi area di dalam kawasan hutan konservasi dan di ABKT. Total luas area kegiatan di dalam kawasan adalah 1.060.847 Ha dan luas area pelaksanaan program di ABKT secara keseluruhan adalah 39.689.111,18 Ha. Sedangkan luas total berdasarkan lokasi prioritas FOLU NET SINK hanya sebesar 38.329.548 Ha, maka dari itu terdapat selisih luas target LTS 2030 dan luas eksisting sebesar 2.420.410,18 Ha. Dengan semikian dalam rangka memenuhi target LTS 2030, maka lokasi aksi mitigasi Konservasi tersedia lebih luas daripada target awalnya.

Kebutuhan pendanaan bidang Konservasi sebesar Rp 36.834.946.550.000. Pendanaan tersebut terbagi dalam 5 aksi mitigasi, Rp 525.260.800.000 untuk kegiatan Pencegahan Deforestasi dan Degradasi, Rp 35.621.621.150.000 untuk Peningkatan Cadangan Karbon, kemudian Rp 120.761.200.000 untuk Pengelolaan Hutan Lestari, Rp 252.203.400.000 untuk Restorasi Gambut, serta untuk aksi mitigasi di ABKT sebanyak Rp 315.100.000.000. Selain itu, untuk mendukung pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Area Bernilai Kehati Tinggi, aksi mitigasi yang terkait dengan Perhutanan Sosial juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp 1.555.684.520.000. Keseluruhan kebutuhan pendanaan tersebut didapatkan dari beberapa sumber seperti APBN, APBD, dana hibah, dan sumber lainnya. Selain itu sumberdaya manusia yang akan diserap per tahunnya dari 2023-2030 sebanyak 1304 orang pegawai UPT kawasan Konservasi, ditunjang oleh tenaga pendamping untuk kegiatan Perhutanan Sosial yang setiap tahunnya berjumlah 64.944 orang dan juga Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan yang per tahunnya berjumlah 23.720 PKS.

Tercapainya target FOLU Net Sink 2030 perlu didukung dengan terimplementasikan dengan baik penegakan hukum, koordinasi antar ditjen, dan pokja terkait harus dapat terjalin untuk mendukung seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Monitoring dan evaluasi tapak per tahun harus dilakukan pada setiap unit KK dan juga di setiap lokasi ABKT. Untuk itu, diperlukan peningkatkan kualitas dan intensitas kerjasama para pihak baik di tingkat nasional dan di tataran tapak atau lapangan. Dukungan pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media massa, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program nasional ini. Faktor kunci lainnya adalah keberhasilan menerapkan governance atau tata kelola, di semua level (dari pusat, provinsi, kabupaten, desa,

dan tapak) dengan menerapkan empat prinsip dasar, yaitu : (1) partisipasi, (2) keterbukaan, (3) pertanggungjawaban publik, dan (4) akuntabilitas publik. Kesemuanya memerlukan spirit "5K", yaitu : (1) Kepeloporan, (2) Kepedulian, (3) Keberpihakan, (4) Konsistensi, dan (5) Kepemimpinan.

Buku Rencana Kerja ini merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dan sebagai instrumen arahan kebijakan teknis yang dapat dijadikan acuan bagi setiap sektor yang terlibat. Dengan tersusunnya buku ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun sub-nasional dapat menyusun rencana kegiatan ditingkat tapak yang selaras dengan strategi yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pencapaian target yang telah ditetapkan.

Beberapa substansi yang perlu dipertajam di Bidang Konservasi antara lain:

1. Setiap Kawasan Konservasi perlu menonjolkan kekhasan/keunikan ekosistem masing-masing.

2. Perlu penetapan jenis prioritas tanaman pada kegiatan penanaman di tiap Kawasan Konservasi. Jenis yang dipilih memiliki kemampuan regenerasi alam yang baik, melimpah, memiliki nilai ekonomi, dan semaksimal mungkin merupakan jenis yang selama ini dilindungi di dalam Kawasan Konservasi. Penanggung jawab masing-masing Kawasan Konservasi ini perlu memberikan rekomendasi jenis pohon yang tepat untuk penanaman di dalam dan di luar kawasan konservasi dengan ekosistem sejenis.

3. Nursery yang representatif perlu dibangun untuk setiap Kawasan Konservasi atau klaster Kawasan Konservasi yang berdekatan.

4. Aksesibilitas kawasan konservasi terbatas, sehingga perlu teknologi penanaman dan patroli yang modern.

5. Sebagai antisipasi pemanfaatan berlebihan yang dapat menghancurkan plasma nutfah, pengelola Kawasan Konservasi perlu melakukan budidaya/penangkaran yang dilanjutkan dengan domestikasi di luar Kawasan Konservasi. Hal ini menjadi alternatif peningkatan aspek pemanfaatan (dalam arti ekonomi) sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung arti penting Kawasan Konservasi.

6. Dalam rangka konservasi satwa, perlu dilakukan pengembangan jenis tanaman/hewan tertentu yang menjadi sumber pangan alami bagi satwa.

DAFTAR PUSTAKA

[BKSDA Kaltim] Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur. 2003. Kegiatan yang dilakukan di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Samarinda

[BKSDA] Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur 2022. Laporan Patroli Pengamanan Kawasan Bersama Masyarakat Mitra Polhut di Suaka Margasatwa Pulau Semama Mei 2022. Seksi Konservasi Wilayah I.

[BTNBBS] Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2011. Statistik Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tahun 2010 Tanggamus - Lampung: Balai Besar TNBBS.

[CBD] Convention on Biological Diversity. 2012. Convention on biological diversity: Aichi biodiversity targets. http://www.cbd.int/sp/targets/.

[Dit BPPE] Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem. 2021. Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar KSA, KPA dan TB. Dit BPPE: Jakarta.

[Dit PJLKK] Direktorat pengelolan jasa lingkungan dan kawasan konservasi. Renstra PJLKK Revisi 2020-2024. Dit PJLKK: Bogor.

[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016. Informasi 521 kawasan konservasi Region Kalimantan-Sulawesi.

[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Informasi 521 Kawasan Konservasi Region Kalimantan-Sulawesi.

[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Rencana operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030. KLHK: Jakarta

[LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2014. Laporan akhir kumulatif kegiatan kompetitif LIPI tahun anggaran 2014: Pemberdayaan masyarakat Desa Temiang di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu Menuju Konsep Biovillage LIPI. LIPI: Cibinong.

[UNGEGN] United Nations Group of Experts on Geographical Names. 2019. Country report of the Republic of Indonesia. Report: Governments on the situation in their countries and on the progress made in the standardization of geographical names.New York 29 April-3 May 2019.

BBKSDA Riau 2015

Benayas, J.M.R., Newton, A.C., Diaz, A. and Bullock, J.M., 2009. Enhancement of biodiversity and ecosystem services by ecological restoration: a meta-analysis. Science, 325(5944), pp.1121-1124.

BKSDA Sumatera Selatan. 2015. Blok pengelolaan Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan Sumatera Selatan. Palembang: BKSDA Sumsel.

[BTNBBS] Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2010. Penyusunan Master Plan Penanganan Perambahan TNBBS Tanggamus-Lampung: Balai Besar TNBBS.

[BTNBBS] Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2011. Statistik Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tahun 2010 Tanggamus - Lampung: Balai Besar TNBBS.

BTNTN 2015. RPJP

BTNWK 2010

Dariana A. 2011. Kajian Konflik Lahan Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, (Studi Kasus Desa Lawe Mamas dan Desa Jambur Lak-Lak STPN Wilayah IV Badar BPTN Wilayah II Kutacane, Aceh Tenggara). IPB. Bogor

Darmansyah R. dan Amin, M.R. 2019. Kearifan Lokal Desa Buluh Cina (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintahan Desa Dan Bbksda Riau Dalam Melindungi Taman Wisata alam Desa Buluh Cina). Jurnal Ilmu Pemerintahan. https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN.

Darmawan A. 2002. Perubahan penutupan lahan di Cagar Alam Rawa Danau Bogor. Skripsi. Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB: Bogor.

Dinerstein E, Wikramanayake E, Robinson J, Karanth U, Rabinowitz A, Olson D, Mathew T, Hedao P, Connor M. 1997. A Framework for Identifying High Priority Areas and Actions for the Conservation of Tigers in the Wild. World Wildlife Fund.

Epple, C., Williamson, A., Thorley, J. 2012. Strengthening benefits from REDD+ for biodiversity, ecosystem services and livelihoods. A guide to tools and resources that can help to plan for multiple benefits from REDD+ in Indonesia. UNEP-WCMC, Cambridge: UK.

Friedlingstein, P., O'sullivan, M., Jones, M.W., Andrew, R.M., Hauck, J., Olsen, A., Peters, G.P., Peters, W., Pongratz, J., Sitch, S. and Le Quéré, C., 2020. Global carbon budget 2020. Earth System Science Data, 12(4), pp.3269-3340.

Gesima, I., Firdaus, & Edorita, W. (2015). Pertanggungjawaban pemerintah terhadap Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu berdasarkan hukum lingkungan internasional. JOM Fakultas Hukum, 2(1), 1–15.

Hamka Sari Budiman, Defri Yoza, M. Mardhiansyah.2017. Faktor-Faktor Gangguan Pada Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Dan Alternatif Penyelesaian Berdasarkan Persepsi Masyarakat. Jurusan Kehutanan. Fakultas Kehutanan. Universitas Riau.

Harmita D 2021. Recipes for Co-Managing Environmental and Economic Goals in National Parks: Lessons from Indonesia. Nagoya University, Japan: MA Thesis.

Hicks C., Woroniecki S., Fancourt M., Bieri M., Garcia R.H., Trumper, K. Mant, R., 2014. The relationship between biodiversity, carbon storage and the provision of other ecosystem services. Cambridge: critical review for the forestry component of the international climate fund 102p.

Hockings M., Stolton S., Leverington F., Dudley N, Courray, J. 2006. Evaluating effectiveness - a framework for assessing management effectiveness of protected areas , second edition, Gland, Switzerland: IUCN. Best Practice Protected Area Guidelines Series no. 14

Hockings M., Stolton, S. dan Dudley N. 2000. Evaluating effectiveness: a framework for assessing management of protected areas, Best Practice Protected Area Guidelines Series no. 6 Gland, Switzerland: IUCN.

IPBES. 2019: Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673.

Juniarti F, Rusniarsyah L. 2021. Diversity of soil surface insects in three land use types in Sintang District, West Kalimantan. IOP Conference Series Earth and Environmental cience:959.

Kinnaird, MF, Sanderson, EW, O'Brien, TG, Wibisono, HT, Woolmer, G. 2003. Deforestation Trends in a Tropical Landscape and Implications for Endangered Large Mammals. Conservation Biology 17: 245-257

Kozlowski, T.T., 2002. Physiological ecology of natural regeneration of harvested and disturbed forest stands: implications for forest management. Forest ecology and management, 158(1-3), pp.195-221.

Kubo H, Wibawanto A, Rossanda D 2019. Toward a policy mix in conservation governance: A case of Gunung Palung National Park, West Kalimantan, Indonesia. Amsterdam, Netherlands: Elsevier

Kunarso A., Angga T., Mareti S., Azwar F., Kharis T., dan Nuralamin. 2017. Analisis Spasial Tingkat Kerusakan Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sumatera Selatan.

Lal, R., 2011. Sequestering carbon in soils of agro-ecosystems. Food policy, 36, pp.S33-S39.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2014). Laporan akhir kumulatif kegiatan kompetitif LIPI tahun anggaran 2014: Pemberdayaan masyarakat Desa Temiang di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu Menuju Konsep Biovillage LIPI. Cibinong: LIPI

LIPI (Pusat Penelitian Biologi) dan WWF Indonesia. 2003. Keanekaragaman Hayati di Tesso Nilo, Provinsi Riau. (Tidak Dipublikasikan).

Mahanani A.I. 2012. Daya dukung habitat gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus temminck) di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam: Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan "Meningkatkan Peran Stratetgis Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan" PSIL Pascasarjana Undip, Selasa, 11 September 2012,

McKinsey & Company, "Pathways to a low carbon economy. Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve" (London, U.K., 2009)

Melillo, J.M., Lu, X., Kicklighter, D.W., Reilly, J.M., Cai, Y. and Sokolov, A.P. 2016. Protected areas' role in climate-change mitigation. Ambio, 45(2), pp.133-145.

Noor, M., Masganti, dan Fahmuddin Agus, 2014. Pembentukan dan karakteristik gambut tropika Indonesia. Dalam: Lahan gambut Indonesia pembentukan, arakteristik, dan potensi mendukung ketahanan pangan (Edisi Revisi), Penyunting Fahmudin Agus, Markus Anda, Ali Jamil dan Masganti. IAARD Press, Jakarta. ISBN 978-602-344-034-4.

Oktaviani R, Amaliah S, Ringler C, Rosegrant MW, Sulser TB. 2011. The Impact of Global Climate Change on the Indonesian Economy. Internat. Food Policy Research Institute.

Pregitzer dan Euskirchen 2004

Prijono A 2017. Ekuilibrium Sentarum: Merayakan Interaksi manusia denggan Alam Jantung Borneo. Kalimantan Barat: Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum.

PT. ITCI Hutani Manunggal. 2010. Laporan Utama Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala, Penajam Paser Utara.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (2016)

Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) LPPM – Institut Pertanian Bogor. (2017). KAJIAN KEBIJAKAN: Akses Masyarakat Dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Bukit Rimbang Bukit Baling, Riau. LPPM Institut Pertanian Bogor.

Rahmawaty, M M Harahap, H Kurniawan, Rauf A. Assesment of land cover change over a period of five years in Deli Serdang, North Sumatera. IOP conf. series: earth and environmental science. 782.

Reilly JM., Melillo JM., Cai Y., Kicklighter DW., Gurgel AC, Paltsev S., Cronin T...,. Sokolov A, et al. 2012. Using land to mitigate climate change: Hitting the target, recognizing the tradeoffs. Environmental Science and Technology 46: 5672–5679.

Ricketts, T.H., B. Soares-Filho, G.A.B. da Fonseca, D. Nepstad, A.Pfaff, A. Petsonk, A. Anderson, D. Boucher, et al. 2010. Indigenous lands, protected areas, and slowing climate change. PLoS Biology 8: e1000331.

Rino, Dirhamsyah M, Yani A 2016. Kajian Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Asuansang Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Hutan Lestari 4 (4): pp 672 – 684.

Sadad A. 2018. Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Tnbt) Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Indragiri Hulu. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Riau. Dosen Fisip Universitas Riau.

Sari M.A. 2012. Perilaku makan gajah sumatera (Elephas Maximus Sumatranus) di Pusat Latihan Gajah Suaka Margasatwa Padang Sugihan Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan

Sintayehu, D.W., 2018. Impact of climate change on biodiversity and associated key ecosystem services in Africa: a systematic review. Ecosystem health and sustainability, 4(9), pp.225-239.

Supriatna S, Hashilah F, Mukhtar MK and Wardani KK. 2022. Determinant of Land Use Change in South Kalimantan: An Evidence from Banjarbaru City and Banjar Regency. Forest and Society 6(1): 422 – 435

Suryadi Si, Aipassa A, Ruchaemi R, Matius M. 2017. Studi Tata Guna Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. J Penelitian Ekosistem Dipterokarpaceae. 3(1): 43-48

Suwondo et al 2019.

Tribun Pekanbaru. 2020. 10 Suaka Margasatwa di Riau. https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com/amp/2020/04/01/10-suaka-margasatwa-di-riau

USAID. 2017. Greenhouse Gas Emissions in Indonesia Available at https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2017

Wangke H 2017. The Management of Kutai National Park Through the Multi Stakeholder Partnership. Paris, France: Atlantis Press.

Wartika Rosa F. 2013. Diversity of Forest Plants as Feed Resources and Habitat of Protected Mammals in Gumai Pasemah Wildlife Sanctuary, Lahat Regency, South Sumatera. Ringkasan Eksekutif Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan/SeHati Sumsel (2017-2021). Studi-Kelayakan-Pengembangan-Kemitraan-Area-Model-1-Kelola-Sendang-Dangku-Meranti-2019.

Weiskopf SR, Rubenstein MA, Crozier LG, Gaichas S, Griffis R, Halofsky JE, Hyde KJW, Lyn Morelli TL, Morisette JT, Muñoz RC, Pershing AJ, Peterson DL, Poudel R, Staudinger MD, Sutton-Grier AR, Thompson L, Vose J, Weltzin JF, Whyte KP. 2020. Climate Change Effects on Biodiversity, Ecosystems, Ecosystem Services, and Natural Resource Management in The United States. Science of The Total Environment, Volume 733.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 | Daftar nama desa-desa penyangga kawasan konservasi lokasi implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk bidang Konservasi

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
1	Kalimantan Tengah	1	BKSDA Kalimantan Tengah	CA Bukit Sapat Hawung
				CA Pararawen I dan II
				SM Lamandau
				TWA Bukit Tangkiling
				TWA Tanjung Keluang
				KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG 2)
				KSA/KPA Sungai Barito (Eks PLG)
				KSA/KPA Sungai Kapuas (Eks PLG)
		2	BTN Tanjung Putting	TN Tanjung Puting

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Tumbang Jojang	Kab/Kota Murung Raya Kec. Seribu Riam
Kalasin, Tumbang Tupus	Kab/Kota Murung Raya Kec. Uut Murung
Lemo I, Lemo II, Pendreh	Kab/Kota Barito Utara Kec. Teweh Tengah
Mendawai Seberang, Tanjung Putri	Kab/Kota Kotawaringin Barat Kec. Arut Selatan
Babual Baboti, Kota Waringin Hilir	Kab/Kota Kotawaringin Barat Kec. Kotawaringin Lama
Sungai Pasir	Kab/Kota Sukamara Kec. Pantai Lunci
Karta Mulia, Natai Sedawak	Kab/Kota Sukamara Kec. Sukamara
Banturung, Tangkiling	Kab/Kota Palangka Raya Kec. Bukit Batu
Kubu, Sungai Bakau	Kab/Kota Kotawaringin Barat Kec. Kumai
Bukit Rawi, Penda Barania	Kab/Kota Pulang Pisau Kec. Kahayan Tengah
Petuk Liti, Sigi, Tuwung	Kab/Kota Pulang Pisau Kec. Kahayan Tengah
Paduran, Sei Hambawang	Kab/Kota Pulang Pisau Kec. Sebangau Kuala
Baru, Madara, Muara Talang, Murung Paken, Teluk Telaga,	Kab/Kota Barito Selatan Kec. Dusun Selatan
Bintang Kurung	Kab/Kota Barito Selatan Kec. Karau Kuala
Bukit Batu, Danau Rawah, Humbang Ray, Lahei Mangkutup, Lapetan, Sei Gawing, Tabore, Tumbang Muroi	Kab/Kota Kapuas Kec. Mantangai
Aruk, Lawang Kajang, Lungku Layang, Petak Puti, Timpah	Kab/Kota Kapuas Kec. Timpah
Bukit Rawi, Petuk Liti, Sig	Kab/Kota Pulang Pisau Kec. Kahayan Tengah
Batampang, Batilap, Damparan, Mahajandau, Mengkatip, Sungai Jaya, Teluk Timbau,	Kab/Kota Barito Selatan Kec. Dusun Hilir
Salat Baru	Kab/Kota Barito Selatan Kec. Karau Kuala
Kalumpang, Katunjung, Mantangai Hulu	Kab/Kota Kapuas Kec. Mantangai
Papuyu Iii Sei Pudak	Kab/Kota Pulang Pisau Kec. Kahayan Kuala
Sei Hambawang	Kab/Kota Pulang Pisau Kec. Sebangau Kuala
Kumai Hilir, Sungai Cabang,	Kab/Kota Kotawaringin Barat Kec. Kumai

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
		3	BTN Sebangau	TN Sebangau
2	Kalimantan Barat	4	BKSDA Kalimantan Barat	CA Mandor
				CA Gunung Raya Pasi
				CA Karimata
				CA Nyiut Penrissen

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Sungai Sekonyer, Teluk Pulai	
Natai Kerbau	Kab/Kota Kotawaringin Barat Kec. Pangkalan Banteng
Banua Usang, Cempaka Baru, Palingkau, Paren, Ulak Batu	Kab/Kota Seruyan Kec. Danau Sembuluh
Bahaur, Parang Batang, Tanjung Hanau	Kab/Kota Seruyan Kec. Hanau
Baung, Jahitan, Muara Dua, Sungai Perlu, Tanjung Rangas	Kab/Kota Seruyan Kec. Seruyan Hilir
Asem Kumbang, Baun Bango, Galinggang, Jahanjang, Karuing Parupuk, Tampelas, Telaga, Tumbang Runen	Kab/Kota Katingan Kec. Kamipang
Bakung Raya, Bangun Jaya, Kampung Baru, Sebangau Jaya, Sungai Kaki	Kab/Kota Katingan Kec. Katingan Kuala
Mekar Tani, Mendawai, Perigi, Tewang Kampung, Tumbang Bulan	Kab/Kota Katingan Kec. Mendawai
Handiwung, Hiyang Bana, Petak Bahandang, Talingke	Kab/Kota Katingan Kec. Tasik Payawan
Banturung, Habaring Hurung, Marang, Tangkiling	Kab/Kota Palangka Raya Kec. Bukit Batu
Bukit Tunggal	Kab/Kota Palangka Raya Kec. Jekan Raya
Kereng Bangkirai, Sabaru	Kab/Kota Palangka Raya Kec. Sabangau
Paduran Mulya, Paduran Sebangau	Kab/Kota Pulang Pisau Kec. Sebangau Kuala
Kayu Ara, Mandor, Salatiga, Simpang Kasturi	Kab/Kota Landak Kec. Mandor
Peniti Dalam II	Kab/Kota Mempawah Kec. Segedong
Gerantung, Rantau, Sendoreng	Kab/Kota Bengkayang Kec. Monterado
Pangmilang, Sagatani	Kab/Kota Singkawang Kec. Singkawang Selatan
Bagak Sahwa, Nyarungkop, Pajintan	Kab/Kota Singkawang Kec. Singkawang Timur
Betok Jaya, Padang, Perairan Laut	Kab/Kota Kayong Utara Kec. Kepulauan Karimata
Betok JayaPadang, Perairan Laut	Kab/Kota Kayong Utara Kec. Kepulauan Karimata

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
				CA Muara Kendawangan
				TWA Bukit Kelam
				TWA Gunung Melintang
				TWA Sungai Liku
				TWA Tanjung Belimbing
				TWA Asuansang
				TWA Baning
				TWA Gunung Dungan/Gunung Batu
		5	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Danau Sentarum
				TN Betung Kerihun
		6	BTN Gunung Palung	TN Gunung Palung

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Bangkal Serai, Banjar Sari, Kendawangan Kanan, Keramat Jaya, Pembedilan, Seriam	Kab/Kota Ketapang Kec. Kendawangan
Samak, Taok	Kab/Kota Sintang Kec. Dedai
Kebong, Kelam Sejahtera, Merpak	Kab/Kota Sintang Kec. Kelam Permai
Sagu, Tempapan Hulu	Kab/Kota Sambas Kec. Galing
Nibung, Sebubus	Kab/Kota Sambas Kec. Paloh
Sanatab, Santaban, Sei Bening	Kab/Kota Sambas Kec. Sajingan Besar
Malek, Nibung, Sebubus	Kab/Kota Sambas Kec. Paloh
Sebubus	Kab/Kota Sambas Kec. Paloh
Sebubus	Kab/Kota Sambas Kec. Paloh
Sei Bening	Kab/Kota Sambas Kec. Sajingan Besar
Alai, Baning Kota, Sungai Ana, Ds. Tanjung Puri	Kab/Kota Sintang Kec. Sintang
Sebubus	Kab/Kota Sambas Kec. Paloh
Sei Bening	Kab/Kota Sambas Kec. Sajingan Besar
Pulau Majang, Tinting Seligi	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Badau
Lanjak Deras, Melemba, Sepandan	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Batang Lupar
Teluk Aur	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Bunut Hilir
Bajau Andai	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Empanang
Jongkong Kiri Hilir, Jongkong Kiri Hulu, Jongkong Kiri Tengah	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Jongkong
Dalam, Gudang Hilir, Nanga Leboyan, Sekulat, Semalah, Tempurau, Vega	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Selimbau
Laut Tawang, Lubuk Pengail, Madang Permai	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Suhaid
Mensiau Danau Sentarum	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Batang Lupar
Batu Lintang, Menua Sadap, Rantau Prapat	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Embaloh Hulu
Beringin Jaya, Bungan Jaya, Kereho, Tanjung Lokang	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Putussibau Selatan
Banua Tengah, Datah Dian, Seluan Tanjung Lasa,	Kab/Kota Kapuas Hulu Kec. Putussibau Utara
Long Apari, Long Penaneh Dua, Long Penaneh Satu, Naha Tifab	Kab/Kota Mahakam Hulu Kec. Long Apari
Lubuk Batu, Matan Jaya, Penjalaan Rantau Panjang	Kab/Kota Kayong Utara Kec. Simpang Hilir

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
		7	BTN Bukit Baka Bukit Raya	TN Bukit Baka Bukit Raya
		8	UPTD Tahura Pandan Puloh	Tahura Pandan Puloh
3	Kalimantan Timur	9	BKSDA Kalimantan Timur	CA Muara Kaman Sedulang
				CA Teluk Adang

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Benawai Agung, Gunung Sembilan, Harapan Mulia, Pampang Harapan, Pangkalan Buton, Riam Berasapjaya, Sedahan Jaya, Sejahtera, Simpang Tiga, Sutra	Kab/Kota Kayong Utara Kec. Sukadan
Laman Satong	Kab/Kota Ketapang Kec. Matan Hilir Utara
Pangkalan Telok	Kab/Kota Ketapang Kec. Nanga Tayap
Jago Bersatu	Kab/Kota Ketapang Kec. Sandai
Bayunsari, Mekar Harapan	Kab/Kota Ketapang Kec. Sungai Laur
Belaban Ella, Laman Mumbung, Nusa Poring, Sungai Sampak	Kab/Kota Melawi Kec. Menukung
Buntut Sabon, Nanga Mentomoi,	Kab/Kota Sintang Kec. Ambalau
Baras Nabun, Jelundung, Meroboi, Nanga Ruhan, Panekasan, Rantau Malam	Kab/Kota Sintang Kec. Serawai
Kupang Baru, Liang Buaya, Menamang Kiri, Muara Kaman Ulu, Muara Siran, Sabintulung, Sedulang, Tunjungan,	Kab/Kota Kutai Kartanegara Kec. Muara Kaman
Sumber Agung	Kab/Kota Kutai Timur Kec. Long Mesangat
Kelinjau Ilir, Kelinjau Ulu, Senyiur	Kab/Kota Kutai Timur Kec. Muara Ancalong
Muara Bengkal Ilir, Mulupan, Ngayau, Senambah	Kab/Kota Kutai Timur Kec. Muara Bengkal
Harapan Baru, Modang, Pasir Mayang, Pondong Baru, Rangan, Sandeley	Kab/Kota Paser Kec. Kuaro
Adang Jaya, Bukit Selok, Krayan Makmur, Muara Adang, Tajur, Teluk Waru,	Kab/Kota Paser Kec. Long Ikis
Maruat, Muara Telake, Petiku, Sebakung	Kab/Kota Paser Kec. Long Kali
Janju, Jone, Muara Pasir, Padang Pengrapat, Rantau Panjang	Kab/Kota Paser Kec. Tanah Grogot
Babulu Laut, Rawa Mulia	Kab/Kota Penajam Paser Utara Kec. Babulu

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
				SM Pulau Semama
				CA Teluk Apar
		10	BTN Kutai	TN Kutai
		11	UPTD Tahura Bukit Suharto	THR Bukit Soeharto

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Harapan Baru, Modang, Pasir Mayang, Pondong Baru, Rangan, Sandeley	Kab/Kota Paser Kec. Kuaro
Adang Jaya, Bukit Seloka, Krayan Makmur, Muara Adang, Tajur, Teluk War	Kab/Kota Paser Kec. Long Ikis
Maruat, Muara Telake, Petiku, Sebakung	Kab/Kota Paser Kec. Long Kali
Janju, Jone, Muara Pasir, Padang Pengrapat, Rantau Panjang, Sungai Langir	Kab/Kota Paser Kec. Tanah Grogot
Babulu Laut, Rawa Mulia	Kab/Kota Penajam Paser Utara Kec. Babulu
Bai Jaya, Langgai, Riwang, Segendang	Kab/Kota Paser Kec. Batu Engau
Laburan	Kab/Kota Paser Kec. Pasir Belengkong
Labuangkalo, Lori, Random, Selengot, Senipah, Tanjung Aru, Tunas Keladen	Kab/Kota Paser Kec. Tanjung Harapan
Belimbing	Kab/Kota Botang Kec. Bontang Barat
Botang Baru, Bontang Kuala, Guntung, Gunung Elai	Kab/Kota Bontang Kec. Bontang Utara
Menamang Kanan, Menamang Kiri	Kab/Kota Kutai Kertanegara Kec. Muara Kanam
Mawai Indah	Kab/Kota Kutai Timur Kec. Batu Ampar
Kebon Agung, Rantau Makmur, Tanjung Labu	Kab/Kota Kutai Timur Kec. Rantau Pulung
Sangatta Selatan, Sangkima, Singa Geweh, Teluk Singkama	Kab/Kota Kutai Timur Kec. Sangatta Selatan
Sangatta Utara, Swarga Bara, Teluk Lingga	Kab/Kota Kutai Timur Kec. Sangatta Utara
Kandolo, Martadinata, Suka Rahmat, Teluk Pandan	Kab/Kota Kutai Timur Kec. Teluk Pandan
Bakungan, Batuah, Loa Duri Ilir, Loa Duri Ulu	Kab/Kota Kutai Kartanegara Kec. Loa Janan
Sungai Payang	Kab/Kota Kutai Kartanegara Kec. Loa Kulu
Teluk Dalam	Kab/Kota Kutai Kartanegara Kec. Muara Jawa
Ambarawang Darat, Ambarawang Laut, Argosari, Bukit Merdeka, Handil Baru, Karya Jaya, Margomulyo, Sanipah, Sei Merdeka, Sungai Seluang, Tanjung Harapan, Wonotirto	Kab/Kota Kutai Kartanegara Kec. Samboja

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
		12	UPTD Tahura Lati Petangis	THR Lati Petangis
4	Kalimantan Selatan	13	BKSDA Kalimantan Selatan	CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku
				CA Gunung Kentawan
				SM Pleihari Tanah Laut
				TWA Pulau Bakut
				SM Pulau Kaget
				SM Kuala Lupak
				TWA Pulau Burung dan Suwangi

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Argo Mulyo, Karang Jinawi, Semoi Dua, Suko Mulyo, Tengin Baru	Kab/Kota Penajam Paser Utara Kec. Sepaku
Petangis, Saing Prupuk, Tebru Paser Damai	Kab/Kota Paser Kec. Batu Engau
Batang Kulur, Bungkukan	Kab/Kota Kotabaru Kec. Kelumpang Barat
Langadai, Mandala, Pulau Panci, Serongga, Tarjun, Telaga Sari	Kab/Kota Kotabaru Kec. Kelumpang Hilir
Bangkalan Melayu, Karang Liwar, Karang Payau	Kab/Kota Kotabaru Kec. Kelumpang Hulu
Bumi Asih, Pantai, Pembelancanan, Sangking Baru, Suka Maju, Sungai Kupang, Sungai Nipah, Tanjung Pangga	Kab/Kota Kotabaru Kec. Kelumpang Selatan
Geronggang, Sang Sang, Sembilang, Tamiang Bakung, Tanjung Batu, Tebing Tinggi	Kab/Kota Kotabaru Kec. Kelumpang Tengah
Mekar Pura, Pantai Baru, Salino, Selaru, Sungup Kanan	Kab/Kota Kotabaru Kec. Pulau Laut Tengah
Batu Tunau, Bekambit, Betung, Karang Sari Indah, Sejakah, Sungai Limau, Tanjung Pengharapan	Kab/Kota Kotabaru Kec. Pulau Laut Timur
Megasari, Sebelimbingan	Kab/Kota Kotabaru Kec. Pulau Laut Utara
Belambus, Kanibungan, Mandin, Rampa, Sarakaman, Sekapung, Sungai Bali	Kab/Kota Kotabaru Kec. Pulau Sebuku
Segumbang	Kab/Kota Tanah Bumbu Kec. Batu Licin
Sepunggur	Kab/Kota Tanah Bumbu Kec. Kusan Hilir
Batu Ampar, Gunung Besar, Pulau Panjang, Sungai Dua	Kab/Kota Tanah Bumbu Kec. Simpang Empat
Hulu Banyu, Lumpangi	Kab/kota Hulu Sungai Selatan Kec. Loksado
Jorong, Sabuhur, Swarangan	Kab/Kota Tanah Laut Kec. Jorong
Batakan	Kab/Kota Tanah Laut Kec. Panyipatan
Beringin	Kab/Kota Barito Kuala Kec. Alalak
Sungai Telan Muara, Tabunganen Muara	Kab/Kota Barito Kuala Kec. Tabunganen
Kuala Lupak, Sungai Telan Besat	Kab/Kota Barito Kuala Kec. Tabunganen
Batulicin	Kab/Kota Tanah Bumbu Kec. Batu Licin

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
5	Kalimantan Utara	14	BTN Kayan Mentarang	TN Kayan Mentarang
6	Jambi	15	BKSDA Jambi	

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Apau Ping, Long Alango, Long Berini, Long Kemuat, Long Tebulo, Long Uli	Kab/Kota Malinau Kec. Bahau Hulu
Data Dian, Long Metun	Kab/Kota Malinau Kec. Kayan Hilir
Lung Fala, Lung Kebinu, Lung Semamu, Lung Sulit	Kab/Kota Malinau Kec. Mentarang Hulu
Long Aran, Long Belaka Pitau, Long Bena, Long Jelet, Long Ketaman, Long Paliran, Long Pua, Long Pujungan	Kab/Kota Malinau Kec. Pujungan
Long Titi, Rian Tubu	Kab/Kota Malinau Kec. Sungai Tubu
Buduk Kubul, Lembudud, Long Kabid , Long Puak, Long Tugul, Ma Libu, Pa Butal, Pa Kemut, Pa Lutut, Pa Mering, Pa Mulak	Kab/Kota Nunukan Kec. Krayan Barat
Ba Sikor, Buduk Kinangan, Buduk Tumu, Cinglat, Liang Biadung, Long Api, Pa Padi, Pa Terutun, Wa Laya, Wa Yanud	Kab/Kota Nunukan Kec. Krayan
Long Budung, Long Pasia, Long Pupung, Pa Amai, Pa Dalan, Pa Ibang, Pa Kaber, Pa Tera, Pa Upan, Pa Urang	Kab/Kota Nunukan Kec. Krayan Selatan
Ba Liku, Long Kelupan, Long Mutan, Long Padi, Long Rian, Long Rungan, Pa Yalau, Tang Badui	Kab/Kota Nunukan Kec. Krayan Tengah
Bungayan, Long Nuat, Long Sepayang, Long Tenem, Long Umung, Pa Betung, Pa Kebuan, Pa Lidung, Pa Melade, Pa Pawan, Pa Raye, Pa Umung, Sinar Baru, Wa Yagung	Kab/Kota Nunukan Kec. Krayan Timur
Kabungalor, Kuyo, Langgason, Lepaga, Tantu Libing	Kab/Kota Nunukan Kec. Lumbis Ogong
Sungai Dualap	Kab/Kota Tanjung Jabung Barat Kec. Kuala Betara
Kuala Lagan, Tanjung Solok	Kab/Kota Tanjung Jabung Timur Kec. Kuala Jambi
Lagan Ilir, Ds. Mendahara Ilir, Pangkal Duri, Pangkal Duri Ilir, Sinar Kalimantan	Kab/Kota Tanjung Jabung Timur Kec. Mendahara
Alang-Alang, Kota Harapan, Kuala Simbur, Sungai Ular	Kab/Kota Tanjung Jabung Timur Kec. Muara Sabak Timur

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
		16	BBTN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Kab/Kota Tanjung Jabung Timur Kec. Nipah Panjang	Kab/Kota Tanjung Jabung Timur Kec. Nipah Panjang
Sungai Telang	Kab/Kota Bungo Kec. Bathin Iii Ulu
Pemunyian, Rantau Tipu, Renah Sungai Ipuh	Kab/Kota Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang
Batu Kerbau	Kab/Kota Bungo Kec. Pelepat
Pendung Hilir, Pendung Mudik, Pendung Tengah	Kab/Kota Kerinci Kec. Air Hangat
Air Hangat, Baru Air Hangat, Kemantan Agung, Kemantan Mudik , Kemantan Tinggi, Pungut Hilir, Pungut Mudik, Pungut Tengah, Sungai Medang	Kab/Kota Kerinci Kec. Air Hangat Timur
Batang Merangin, Muara Hemat, Pasar Tamiai, Tamiai, Tarutung	Kab/Kota Kerinci Kec. Batang Merangin
Bintang Marak, Pengasi Baru Prov. Jambi Kab/Kota Kerinci Kec. Bukit Kerman, Tanjung Syam	Kab/Kota Kerinci Kec. Bukit Kerman
Koto Tengah, Pendung Talang Genting, Talang Kemulun, Tebing Tinggi	Kab/Kota Kerinci Kec. Danau Kerinci
Belui Tinggi, Semumu, Tambak Tinggi	Kab/Kota Kerinci Kec. Depati Vii
Baru Sungai Betung Mudik, Danau Tinggi, Kel. Siulak Deras, Simpang Tutup, Suko Pangkat, Sungai Betung Hilir, Sungai Betung Mudik, Sungai Gelampeh, Tanjung Genting, Tanjung Genting Mudik	Kab/Kota Kerinci Kec. Gunung Kerinci
Air Mumu, Dusun Baru Lempur, Masgo, Perikan Tengah	Kab/Kota Kerinci Kec. Gunung Raya
Bengkolan Dua, Bumbun Duri, Jernih Jaya, Lubuk Pauh, Pauh Tinggi, Pelompek, Pelompek Pasar Baru, Pesisir Bukit, Sungai Jernih, Sungai Rumpun, Sungai Sikai, Tangkil, Telun Berasap	Kab/Kota Kerinci Kec. Gunung Tujuh
Bedeng Dua, Giri Mulyo, Gunung Labu, Kebun Baru, Sako Dua, Sungai Lintang, Sungai Renah, Batang Sangir, Bendung Air Timur, Kersik Tuo, Koto Baru, Koto Tengah,	Kab/Kota Kerinci Kec. Kayu Aro Barat

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
		17	BTN Berbak Sembilang	TN Berbak

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Koto Tuo, Renah Kasah, Sungai Bendung, Air, Sungai Dalam, Sungai Sampun, Tanjung Bungo	
Benik, Jembatan Merah Pulau Tengah , Koto AgungKoto Tuo Pulo Tengah, Pulau Tengah, Talang Lindung, Telago	Kab/Kota Kerinci Kec. Keliling Danau
Danau Gunung Tujuh, Hutan TNKS	Kab/Kota Kerinci Kec. Kerinci
Ambai Bawah,Betung Kuning	Kab/Kota Kerinci Kec. Sitinjau Laut
Air Terjun, Koto Lebuh Tinggi, Lubuk Nagodang, Pelak Gedang, Sungai Lebuh	Kab/Kota Kerinci Kec. Siulak
Lubuk Tabun, Mukai Pintu,Pasir Jaya, Sungai Kuning, Sungai Langkp, Talang Tinggi	Kab/Kota Kerinci Kec. Siulak Mukai
Koto Rawang, Lubuk Mentilin, Lubuk Pungguk, Muara Madras, Pulau Tengah, Rantau Kermas, Renah Alai, Tanjung Kasri	Kab/Kota Merangin Kec. Jangkat
Pematang Pauh, Talang Tembago, Tanjung Alam, Tanjung Mudo	Kab/Kota Merangin Kec. Jangkat Timur
Nilo Dingin, Sungai Lalang, Tanjung Berugo, Tuo	Kab/Kota Merangin Kec. Lembah Masurai
Durian Rambun	Kab/Kota Merangin Kec. Muara Siau
Baru Pangkalan Jambu, Birun, Bukit Perentak, Bunga Tanjung, Kampung Limo, Tanjung Mudo	Kab/Kota Merangin Kec. Pangkalan Jambu
Sungai Pinang	Kab/Kota Merangin Kec. Sungai Manau
Air Liki, Liki Baru, Batang Kibul, Ngaol	Kab/Kota Merangin Kec. Tabir Barat
Batu Empang, Paniban Baru	Kab/Kota Sarolangun Kec. Batang Asai
Meribung, Napal Melintang	Kab/Kota Sarolangun Kec. Limun
Renah Kayu Embun	Kab/Kota Sungai Penuh Kec. Kumun Debai
Sumur Gedang	Kab/Kota Sungai Penuh Kec. Pesisir Bukit
Sungai Jernih	Kab/Kota Sungai Penuh Kec. Pondok Tinggi
Sungai Ning, Talang Lindung	Kab/Kota Sungai Penuh Kec. Sungai Bungkal
Gedong Karya, Jebus, Sungai Aur	Kab/Kota Muaro Jambi Kec. Kumpeh
Rantau Rasau, Simpang, Sungai Rambut	Kab/Kota Tanjung Jabung Timur Kec. Berbak

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
		18	BTN Bukit Duabelas	TN Bukit Duabelas
7	Sumatera Barat	19	BKSDA Sumatera Barat	SM Arau Hilir dan Air Tarusan

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Simpang Datuk	Kab/Kota Tanjung Jabung Timur Kec. Nipah Panjang
Air Hitam Laut, Labuhan Pering, Sungai Cemara	Kab/Kota Tanjung Jabung Timur Kec. Sadu
Hutan	Kab/Kota Tanjung Jabung Timur Kec. Tanjung Jabung Timur
Jelutih, Olak Besar	Kab/Kota Batang Hari Kec. Batin Xxiv
Batu Sawar, Peninjauan	Kab/Kota Batang Hari Kec. Maro Sebo Ulu
Bukit Suban, Jernih, Lubuk Jering, Pematang Kabau, Semurung	Kab/Kota Sarolangun Kec. Air Hitam
Tanah Garo	Kab/Kota Tebo Kec. Muara Tabir
Bungus Timur, Teluk Kabung Utara	Kab/Kota Padang Kec. Bungus Teluk Kabung
Balai Gadang, Lubuk Minturun	Kab/Kota Padang Kec. Koto Tangah
Kuranji	Kab/Kota Padang Kec. Kuranji
Batu Gadang, Indarung	Kab/Kota Padang Kec. Lubuk Kilangan
Lambung Bukit, Limau Manis, Limau Manis Selatan	Kab/Kota Padang Kec. Pauh
Anduring, Guguak	Kab/Kota Padang Pariaman Kec. 2 X 11 Kayu Tanam
Kasang, Sungai Buluh Selatan, Sungai Buluh Timur	Kab/Kota Padang Pariaman Kec. Batang Anai
Lubuk Alung, Salibutan Lubuk Alung	Kab/Kota Padang Pariaman Kec. Lubuk Alung
Kapujan Koto Barapak, Kubang Koto Barapak	Kab/Kota Pesisir Selatan Kec. Bayang
Koto Ranah, Muaro Aie, Puluik Puluik, Puluik Puluik Selatan	Kab/Kota Pesisir Selatan Kec. Iv Nagari Bayang Utara
Barung Barung Balantai Selatan, Barung-Barung Balantai Tengah Barung-Barung Balantai Timur, Duku, Duku Utara, Kampung Baru Korong Nan Ampek, Siguntur, Taratak Sungai Lundang	Kab/Kota Pesisir Selatan Kec. Koto Xi Tarusan
Simpang Tanjuang Nan Iv	Kab/Kota Solok Kec. Danau Kembar
Aia Batumbuak, Batang Barus, Jawi-Jawi Guguak, Koto Gaek Guguak	Kab/Kota Solok Kec. Gunung Talang

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
		20	BTN Siberut	TN Siberut
8	Riau	21	BBKSDA Riau	SM Balai Raja
				SM Giam Siak Kecil
				SM Bukit Batu
				SM Kerumutan

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Paninggahan	Kab/Kota Solok Kec. Junjung Sirih
Gantuang Ciri, Koto Hilalang	Kab/Kota Solok Kec. Kubung
Koto Sani, Saniang Baka	Kab/Kota Solok Kec. X Koto Singkara
Tanah Garam	Kab/Kota Solok Kec. Lubuk Sikarak
Guguak Malalo, Padang Laweh Malalo	Kab/Kota Tanah Datar Kec. Batipuah Selatan
Batipuah Baruah	Kab/Kota Tanah Datar Kec. Batipuh
Jaho, Tambagan	Kab/Kota Tanah Datar Kec. X Koto
Pasakiat Teileleu, Sagulubbeg	Kab/Kota Kepulauan Mentawai Kec. Seberut Barat Daya
Sigapokna, Simalegi, Simatalu	Kab/Kota Kepulauan Mentawai Kec. Siberut Barat
Madobag, Matotonan	Kab/Kota Kepulauan Mentawai Kec. Siberut Selatan
Cimpungan, Saibi Samukop, Saliguma	Kab/Kota Kepulauan Mentawai Kec. Siberut Tengah
Bojakan,Malancan, Sirilogui	Kab/Kota Kepulauan Mentawai Kec. Siberut Utara
Buluh Manis	Kab/Kota Bengkalis Kec. Bathin Solapan
Pematang Pudu	Kab/Kota Bengkalis Kec. Mandau
Balai Raja, Buluh Apo, Muara Basung, Pangkalan Libut, Pinggir, Sungai Meranti, Tengganau SM Bukit Batu	Kab/Kota Bengkalis Kec. Pinggir
Api Api	Kab/Kota Bengkalis Kec. Bandar Laksamana
Bukit Kerikil	Kab/Kota Bengkalis Kec. Bandar Laksamana
Bandar Jaya	Kab/Kota Bengkalis Kec. Siak Kecil
Tasik Serai, Tasik Serai Barat, Tasik Serai Timur , Tasik Tebing Serai	Kab/Kota Bengkalis Kec. Talang Muandau
Tasik Betung	Kab/Kota S I A K Kec. Sungai Mandau
Api Api	Kab/Kota Bengkalis Kec. Bandar Laksamana
Temiang	Kab/Kota Bengkalis Kec. Bandar Laksamana
Sukajadi	Kab/Kota Bengkalis Kec. Bukit Batu
Bandar Jaya	Kab/Kota Bengkalis Kec. Siak Kecil
Pulau Gelang, Tambak	Kab/Kota Indragiri Hulu Kec. Kuala Cenaku
Rantau Bakung, Redang, Sialang Dua Dahan	Kab/Kota Indragiri Hulu Kec. Rengat Barat

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
				SM Bukit Rimbang, Bukit Baling & Rimbang Baling
				SM Tasik Belat
				SM Tasik Besar Serkap
				SM Tasik Serkap
				SM Tasik Tanjung Padang
				TWA Buluh Cina
				TN Zamrud
		22	BTN Bukit Tigapuluh	TN Bukit Tigapuluh
		23	BTN Tesso Nilo	TN Tesso Nilo

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Kampung Besar, Kampung Pulau, Kuantan Babu, Rantau Mapesai, Sungai Guntung Hilir, Sungai Guntung Tengah	Kab/Kota Indragiri Hulu Kec. Rengat
Kerumutan,Mak Teduh	Kab/Kota Pelalawan Kec. Kerumutan
Teluk Binjai, Teluk Meranti	Kab/Kota Pelalawan Kec. Teluk Meranti
Domo, Sungai Liti	Kab/Kota Kampar Kec. Kampar Kiri
Aur Kuning, Batu Sanggan, Dua Sepakat Gajah Bertalut, Ludai, Muara Bio, Pangkalan Kapas, Pangkalan Serai, Subayang Jaya, Sungai Santi, Tanjung Belit, Tanjung Beringin, Tanjung Permai, Terusan	Kab/Kota Kampar Kec. Kampar Kiri Hulu
Koto Kombu, Sumpu	Kab/Kota Kuantan Singingi Kec. Hulu Kuantan
Muara Lembu, Pangkalan Indarung, Pulau Padang	Kab/Kota Kuantan Singingi Kec. Singingi
Koto Baru, Petai, Sungai Paku	Kab/Kota Kuantan Singingi Kec. Singingi Hilir
Pulau Muda, Teluk Meranti	Kab/Kota Pelalawan Kec. Teluk Meranti
Teluk Lanus	Kab/Kota Siak K Kec. Sungai Apit
Teluk Meranti	Kab/Kota Pelalawan Kec. Teluk Meranti
Teluk Meranti	Kab/Kota Pelalawan Kec. Teluk Meranti
Mekar Delima, Tanjung Padang	Kab/Kota Kepulauan Meranti Kec. Tasik Putri Puyu
Desa Baru, Kepau Jaya, Tanjung Balam	Kab/Kota Kampar Kec. Siak Hulu Ds. Buluh Cina
Kuala Tolam, Ransang	Kab/Kota Pelalawan Kec. Pelalawan
Dayun	Kab/Kota Siak Kec. Dayun
Sungai Berbari	Kab/Kota Siak Kec. Pusako
Sungai Rawa	Kab/Kota Siak Kec. Sungai Apit
Batu Ampar, Keritang, Selensen	Kab/Kota Indragiri Hilir Kec. Kemuning
Alim, Aur Cina, Puntianai, Sanglap, Sipang	Kab/Kota Indragiri Hulu Kec. Batang Cenaku
Rantau Langsat, Siambul, Sungai Akar Talang Lakat	Kab/Kota Indragiri Hulu Kec. Batang Gansal
Simpang Kota Medan	Kab/Kota Indragiri Hulu Kec. Kelayang
Lubuk Batu Tinggal,	Kab/Kota Indragiri Hulu Kec. Lubuk Batu Jaya
Segati	Kab/Kota Pelalawan Kec. Langgam
Kesuma	Kab/Kota Pelalawan Kec. Pangkalan Kuras

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
9	Sumatera Selatan	24	BKSDA Sumatera Selatan	SM Gumai Pasemah
				SM Gunung Raya
				SM Padang Sugihan

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Air Hitam, Bagan Limau, Lubuk Kembang Bunga	Kab/Kota Pelalawan Kec. Ukui
Hutan Gumai Tebing T	Kab/Kota Empat Lawang Kec. Empat Lawang
Sawah	Kab/Kota Empat Lawang Kec. Muara Pinang
Pancurmas Unit Jaya	Kab/Kota Empat Lawang Kec. Tebing Tinggi
Endikat Ilir, Sugi Waras, Tanjung Baru	Kab/Kota Lahat Kec. Gumay Talang
Padang Gumay, Rindu Hati, Sinjar Bulan Tanjung Raja	Kab/Kota Lahat Kec. Gumay Ulu
Bandaraji, Pamah Salak, Pelajaran, Sadan	Kab/Kota Lahat Kec. Jarai
Beringin Janggut, Pandan Arang, Pulau Beringin, Tanjung Kurung	Kab/Kota Lahat Kec. Kikim Selatan
Bandu Agung, Lawang Agung Lama, Muara Gelumpai, Muara Payang, Talang Tinggi	Kab/Kota Lahat Kec. Muara Payang
Bantunan, Gelung Sakti, Jentian, Sukabumi Sumur, Ulak Bandung	Kab/Kota Lahat Kec. Pajar Bulan
Batu Niding, Lubuk Atung, Muara Cawang, Sukajadi	Kab/Kota Lahat Kec. Pseksu
Sukaraja	Kab/Kota Lahat Kec. Sukamerindu
Danau Jaya, Mekar Jaya, Sido Rahayu, Sidodadi, Sinar Baru, Sinar Napalan, Tanjung Jaya	Kab/Kota Ogan Komering Ulu Selatan Kec. Buay Pemaca
Simpang Sender Tengah, Simpang Sender Timur, Simpang Sender Utar, Sumber Jaya Sumber Mulia	Kab/Kota Ogan Komering Ulu Selatan Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
Pekuwolan, Pelawi	Kab/Kota Ogan Komering Ulu Selatan Kec. Buay Rawan
Bedeng Tiga, Bumi Agung, Gunung Raya Kiwis Raya, Mekar Sari, Pagar Dewa Remanam Jaya, Sigigok Raya, Tanjung Baru	Kab/Kota Ogan Komering Ulu Selatan Kec. Warkuk Ranau Selatan
Sebokor	Kab/Kota Banyu Asin Kec. Air Kumbang
Karang Anyar, Muara Padang, Baru Durian Gadis, Pelajau, Siju, Suka Pindah	Kab/Kota Banyu Asin Kec. Muara Padang
Bukit Batu	Kab/Kota Ogan Komering Ilir Kec. Air Sugihan
Bukit Batu, Perigi, Rambai, Riding, Sunggutan	Kab/Kota Ogan Komering Ilir Kec. Pangkalan Lapam

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
				SM Dangku
		25	BTN Berbak Sembilang	TN Sembilang
10	Sumatera Utara	26	BBTN Leuser	TN Gunung Leuser
				TN Batang Gadis

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Bukit Sejahtera, Bukit Selabu, Pangkalan Bulian, Saud, Talang Buluh, Ulak Kembang	Kab/Kota Musi Banyuasin Kec. Batanghari Leko
Tampang Baru	Kab/Kota Musi Banyuasin Kec. Bayung Lencir
Dawas, Tanjung Dalam	Kab/Kota Musi Banyuasin Kec. Keluang
Bukit Jaya	Kab/Kota Musi Banyuasin Kec. Sungai Lilin
Berlian Jaya, Pangkalan Tungkal, Peninggalan, Simpang Tungkal	Kab/Kota Musi Banyuasin Kec. Tungkal Jaya
Sebokor	Kab/Kota Banyu Asin Kec. Air Kumbang
Karang Anyar, Muara Padang	Kab/Kota Banyu Asin Kec. Muara Padang
Baru, Durian Gadis, Pelajau, Siju, Suka Pindah	Kab/Kota Banyu Asin Kec. Rambutan
Bukit Batu	Kab/Kota Ogan Komering Ilir Kec. Air Sugihan
Bukit Batu, Perigi, Rambai, Riding, Sunggutan	Kab/Kota Ogan Komering Ilir Kec. Pangkalan Lapam
Liang Jering	Kab/Kota Dairi Kec. Tanah Pinem
Suka Makmur	Kab/Kota Deli Serdang Kec. Kutalimbaru
Jinabun, Kuta Male, Lau Buluh, Mburidi, Rih Tengah, Ds. Kutambelin, Kuta Pengkih, Lau Pakam, Lau Pengulu, Kuta Rayat, Ndeskati, Kuta Kepar	Kab/Kota Karo Kec. Kuta Buluh
Namu Sialang, Sei Musam, Sei Serdang	Kab/Kota Langkat Kec. Batang Serangan
Bukit Mas, Bukit Selamat, Halaban, Pir Adb Besitang	Kab/Kota Langkat Kec. Besitang
Batu Jong Jong, Bukit Lawang, Lau Damak, Sampe Raya, Timbang Jaya, Ujung Bandar	Kab/Kota Langkat Kec. Bohorok
Kaperas, Kuta Gajah, Rampah, Sulkam	Kab/Kota Langkat Kec. Kutambaru
Ujung Bandar	Kab/Kota Langkat Kec. Salapian
Sawit Hulu	Kab/Kota Langkat Kec. Sawit Seberang
Belinteng, Telagah	Kab/Kota Langkat Kec. Sei Bingai
Harapan Maju, Mekar Makmur	Kab/Kota Langkat Kec. Sei Lepan
Rabi Jongor	Kab/Kota Pasaman Barat Kec. Gunung Tuleh
Parik	Kab/Kota Pasaman Barat Kec. Koto Balingka
Ujuang Gadiang	Kab/Kota Pasaman Barat Kec. Lembah Malintang

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	
11	Lampung	27	BTN Way Kambas	TN Way Kambas
		28	BBTN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Batahan	Kab/Kota Pasaman Barat Kec. Ranah Batahan
Beringin Jaya, Cabang, Cempaka Putih, Raja Wali, Sido Dadi, Surabaya Baru	Kab/Kota Lampung Tengah Kec. Bandar Surabaya
Meranggi Jaya, Rantau Jaya Baru, Rantau Jaya Ilir, Rantau Jaya Makmur	Kab/Kota Lampung Tengah Kec. Putra Rumbia
Bina Karya Buana	Kab/Kota Lampung Tengah Kec. Rumbia
Rawa Betik	Kab/Kota Lampung Tengah Kec. Seputih Surabaya
Braja Harjosari, Braja Kencana, Braja Luhur Braja Yekti	Kab/Kota Lampung Timur Kec. Braja Slebah
Karang Anyar, Margasari, Sukorahayu	Kab/Kota Lampung Timur Kec. Labuhan Maringgai
Labuhan Ratu Enam, Labuhan Ratu IX Labuhan Ratu Vii Raja Basa Lama Dua Raja Basa Lama Satu	Kab/Kota Lampung Timur Kec. Labuhan Ratu
Hutan	Kab/Kota Lampung Timur Kec. Lampung Timur
Taman Endah, Taman Fajar, Tambah Dadi, Tanjung Kesuma, Tegal Yoso, Muara Jaya, Rantau Jaya Udik II, Kali Pasir, Tanjung Tirto, Tegal Ombo, Toto Projo	Kab/Kota Lampung Timur Kec. Purbolinggo
Braja Asri	Kab/Kota Lampung Timur Kec. Way Jepara
Bratasena Adiwarna, Pasiran Jaya	Kab/Kota Tulangbawang Kec. Dente Teladas
Manggarai, Sidodadi, Sri Menanti, Suka Damai, Suka Jadi	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Air Hitam
Kubu Perahu, Padang Cahya, Sedampah Indah, Way Empulau Ulu Way Mengaku	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Balik Bukit
Bandar Agung, Bumi Hantatai, Gunung Ratu, Negeri Jaya, Ringin Jaya, Suoh, Tembelang	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Bandar Negeri Suoh
Kegeringan, Sukabumi, Teba Liyokh	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Batu Brak
Atar Bawang, Atar Kuwau, Sumber Rejo	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Batu Ketulis
Tri Mulyo	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Gedung Surian

No	Provinsi	Satuan Kerja		Nama Kawasan
		No	UPT	

Desa Penyangga	
Desa	**Kecamatan dan Kabupaten/Kota**
Kawasan	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Lampung Barat
Keagungan, Lombok Timur, Suka Banjar, Suka Banjar Ii Ujung Rembun	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Lumbok Seminung
Sekincau, Tiga Jaya	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Sekincau
Tapak Siring	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Sukau
Banding Agung, Ringin Sari, Suka Marga, Sumber Agung, Tugu Ratu	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Suoh
Padang Tambak, Sukananti, Sukaraja Tambak Jaya, Tanjung Raya	Kab/Kota Lampung Barat Kec. Way Tenong
Bandar Dalam, Pemerihan, Siring Gading. Sumber Rejo, Tanjung Kemala, Way Haru, Way Tias	Kab/Kota Pesisir Barat Kec. Bangkunat
Kebuayan Menyancang, Penggawa Lima Tengah Way Sindi, Hanuan	Kab/Kota Pesisir Barat Kec. Karya Penggawa
Lemong, Malaya, Penengahan, Rata Agung, Suka Mulya	Kab/Kota Pesisir Barat Kec. Lemong
Pekon Mon	Kab/Kota Pesisir Barat Kec. Ngambur
Kota Batu	Kab/Kota Pesisir Barat Kec. Ngaras
Bukit Barisan, Perairan Laut	Kab/Kota Pesisir Barat Kec. Pesisir Barat
Negeri Ratu Tenumbang, Paku Negara, Pelita Jaya, Sumur Jaya	Kab/Kota Pesisir Barat Kec. Pesisir Selatan
Pemancar	Kab/Kota Pesisir Barat Kec. Pesisir Utara
Gunung Kemala Timur, Labuhan Mandi	Kab/Kota Pesisir Barat Kec. Way Krui
Guring, Karang Brak, Kaur Gading, Pesanguan, Tampang, Tampang Muda, Tanjungan, Teluk Brak, Tirom, Way Asahan, Way Nipah	Kab/Kota Tanggamus Kec. Pematang Sawa
Karang Agung, Margo Mulyo, Sedayu, Sido Mulyo, Sukaraja, Tulung Asahan	Kab/Kota Tanggamus Kec. Semaka
Sirnagalih, Ulu Semong	Kab/Kota Tanggamus Kec. Ulubelu

LAMPIRAN 2 | Matrik Rencana Kerja Pencegahan Deforestasi dan Degradasi di Kawasan Konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
1	Pemantapan Kawasan Konservasi	Kawasan konservasi yang dilakukan penetapan (prakondisi) status dan fungsi untuk peningkatan nilai efektifitas	Penataan dan penandaan zonasi/blok kawasan konservasi			■						BKSDA Jambi		APBN KSDAE
				■	■		■					BKSDA Sumsel	69.8	
				■	■	■	■	■	■	■	■	BBKSDA Riau	69.8	
						■	■					BKSDA Kalteng		
				■	■		■		■	■	■	BKSDA Kalbar	69.8	
						■						Tahura Pandan Puloh		
				■					■		■	BKSDA Kaltim	69.8	
				■	■							BKSDA Kalsel	69.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
	APBN KSDAE	69.8	APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE			Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)	35
69.8						69.8											80
69.8		139.6		69.8		139.6		69.8		139.6		69.8					48
		69.8		69.8													45
69.8				69.8				69.8		69.8		69.8					41
		69.8															
								69.8				69.8					62
69.8																	45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
			Perencanaan kelola kawasan konservasi jangka panjang									BKSDA Kalteng		
												BTN Tanjung Puting		
												BKSDA Kalbar	165	
												BBTN BKDS		
												BTN Gunung Palung		
												Tahura Pandan Puloh		
												BKSDA Kaltim	165	
												Tahura Bukit Soeharto		
												BKSDA Kalsel		
												BKSDA Jambi		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
165		165				165		165				165					41
		165															39
165		165		165				165				165					41
				165													59
								165									41
						165											
						165						165					62
										165							
165										165							45
				165													35

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Berbak dan Sembilang	165	
												BKSDA Riau	165	
												BTN Bukit Tigapuluh		
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumsel	165	
			6739.PBV.002.054 Kerjasama penyelenggaraan kawasan konservasi									BKSDA Kalteng	15	
												BTN Tanjung Puting		
												BKSDA Kalbar	15	
												BBTN BKDS		
												BTN Gunung Palung		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
												165					60
165		330		165		330		165		165		330					48
		165															40
								165									41
165												165					80
		15				15		15				15					41
				15													39
		15		15		15		15				15					41
										15							59
						15											41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Tahura Pandan Puloh		
												BKSDA Kaltim	15	
												Tahura Bukit Soeharto		
												BKSDA Kalsel		
												BKSDA Jambi	15	
												BTN Berbak dan Sembilang	15	
												BKSDA Riau	15	
												BTN Bukit Tigapuluh	15	
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumsel	15	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
												15					
				15						15							62
						15											
15		15															45
																	35
15																	60
15		30		15		30		30		15		15					48
																	40
				15													41
				15						15							80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
2	Perlindungan, Pengaman An Dan Penjagaan Kawasan	Kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi									BKSDA Kalteng	1374	
												BTN Tanjung Puting	274.8	
												BKSDA Kalbar	1648.8	
												BBTN BKDS	274.8	
												BTN Gunung Palung	274.8	
												Tahura Pandan Puloh	274.8	
												BKSDA Kaltim	824.4	
												Tahura Bukit Soeharto	274.8	
												BKSDA Kalsel	549.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
1374		1374		1374		1374		1374		1374		1374			Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					39
1648.8		1648.8		1648.8		1648.8		1648.8		1648.8		1648.8					41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8				Target Renstra : 560 Unit KK	59
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					
824.4		824.4		824.4		824.4		824.4		824.4		824.4					62
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					
549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6					45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Jambi	274.8	
												BTN Berbak dan Sembilang	274.8	
												BKSDA Riau	3022.8	
												BTN Bukit Tigapuluh	274.8	
												BTN Tesso Nilo	274.8	
												BKSDA Sumsel	824.4	
3	Pengendalian Kahutla Di Kawasan Konservasi Dan Daerah Penyangga	6740.PBV.006 Kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	6740.PBV.006.054 Pengendalian kebakaran hutan									BKSDA Kalteng	390	
												BTN Tanjung Puting	78	
												BKSDA Kalbar	468	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					35
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					60
3022.8		3022.8		3022.8		3022.8		3022.8		3022.8		3022.8					48
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					40
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
824.4		824.4		824.4		824.4		824.4		824.4		824.4					80
390		390		390		390		390		390		390			Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	41
78		78		78		78		78		78		78				Target Renstra : 560 Unit KK	39
468		468		468		468		468		468		468					41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BBTN BKDS	78	
												BTN Gunung Palung	78	
												Tahura Pandan Puloh	78	
												BKSDA Kaltim	234	
												Tahura Bukit Soeharto	78	
												BKSDA Kalsel	156	
												BKSDA Jambi	78	
												BTN Berbak dan Sembilang	78	
												BKSDA Riau	858	
												BTN Bukit Tigapuluh	78	
												BTN Tesso Nilo	234	
												BKSDA Sumsel	78	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
78		78		78		78		78		78		78				Target FOLU:	59
78		78		78		78		78		78		78					41
78		78		78		78		78		78		78					
234		234		234		234		234		234		234					62
78		78		78		78		78		78		78					
156		156		156		156		156		156		156					45
78		78		78		78		78		78		78					35
78		78		78		78		78		78		78					60
858		858		858		858		858		858		858					48
78		78		78		78		78		78		78					40
78		78		78		78		78		78		78					41
78		78		78		78		78		78		78					80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
4	Penguatan Pengelola An Kawasan Konservasi Di Tingkat Tapak (Rbm)	6740.PBV.006 Kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	6740.PBV.006.0053 Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi											
5	Kemitraan Konservasi Akses Hhbk Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat	6740.REA.001 Akses pemanfaatan kemitraan konservasi di kawasan konservasi	6740.REA.001.052 Pemberian akses kelola kepada masyarakat									BKSDA Kalteng	21.6	
												BTN Tanjung Puting	21.6	
												BKSDA Kalbar	21.6	
												BBTN BKDS	21.6	
												BTN Gunung Palung	21.6	

Sumber	Anggaran 2024 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2025 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2026 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2027 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2028 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2029 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2030 Rp (juta)	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024 IKP	RKP 2023-2024 IKK	SDM (orang)
							21.6									Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan	41
							21.6										Target FOLU:	39
							21.6											41
							21.6											59
							21.6											41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Tahura Pandan Puloh	21.6	
												BKSDA Kaltim	21.6	
												Tahura Bukit Soeharto	21.6	
												BKSDA Kalsel	21.6	
												BKSDA Jambi	21.6	
												BTN Berbak dan Sembilang	21.6	
												BKSDA Riau	21.6	
												BTN Bukit Tigapuluh	21.6	
												BTN Tesso Nilo	21.6	
												BKSDA Sumsel	21.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
						21.6											
						21.6											62
						21.6											
						21.6											45
						21.6											35
						21.6											60
						21.6											48
						21.6											40
						21.6											41
						21.6											80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga	6740.QDB.001 Fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi	6740.QDB.001.051 Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi									BKSDA Kalteng	245	
												BTN Tanjung Puting		
												BKSDA Kalbar		
												BBTN BKDS		
												BTN Gunung Palung		
												Tahura Pandan Puloh		
												BKSDA Kaltim		
												Tahura Bukit Soeharto		
												BKSDA Kalsel	98	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
															Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produkti	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	41
49																	39
		294															41
49																	59
				49													41
						49											
				147													62
								49									
																	45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Jambi		
												BTN Berbak dan Sembilang		
												BKSDA Riau		
												BTN Bukit Tigapuluh	49	
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumsel		
			6740.QDB.001.052 Pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat									BKSDA Kalteng	62	
												BTN Tanjung Puting	12.4	
												BKSDA Kalbar	74.4	
												BBTN BKDS	12.4	
												BTN Gunung	12.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
										49							35
49																	60
						539											48
																	40
												49					41
										147							80
62		62		62		62		62		62		62					41
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					39
74.4		74.4		74.4		74.4		74.4		74.4		74.4				Target Renstra : 2500 Desa	41
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					59
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4				Target FOLU:	41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Palung		
												Tahura Pandan Puloh	12.4	
												BKSDA Kaltim	37.2	
												Tahura Bukit Soeharto	12.4	
												BKSDA Kalsel	24.8	
												BKSDA Jambi	12.4	
												BTN Berbak dan Sembilang	12.4	
												BKSDA Riau	136.4	
												BTN Bukit Tigapuluh	12.4	
												BTN Tesso Nilo	12.4	
												BKSDA Sumsel	67.5	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					
37.2		37.2		37.2		37.2		37.2		37.2		37.2					62
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					
24.8		24.8		24.8		24.8		24.8		24.8		24.8					45
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					35
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					60
136.4		136.4		136.4		136.4		136.4		136.4		136.4					48
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					40
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					41
37.2		37.2		37.2		37.2		37.2		37.2		37.2					80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
			6740.QDB.001.053 Pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi									BKSDA Kalteng	337.5	
												BTN Tanjung Puting	67.5	
												BKSDA Kalbar	405	
												BBTN BKDS	67.5	
												BTN Gunung Palung	67.5	
												Tahura Pandan Puloh	67.5	
												BKSDA Kaltim	202.5	
												Tahura Bukit Soeharto	67.5	
												BKSDA Kalsel	135	
												BKSDA Jambi	67.5	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
337.5		337.5		337.5		337.5		337.5		337.5		337.5					41
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					39
405		405		405		405		405		405		405					41
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					59
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					41
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					
202.5		202.5		202.5		202.5		202.5		202.5		202.5					62
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					
135		135		135		135		135		135		135					45
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					35

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Berbak dan Sembilang	67.5	
												BKSDA Riau	67.5	
												BTN Bukit Tigapuluh	67.5	
												BTN Tesso Nilo	67.5	
												BKSDA Sumsel	202.5	
7	Pengelola An Jasa Lingkunga N Dan Wisata Alam	5423.QAH.001 Entitas pemanfaata n jasa lingkungan non wisata alam yang dikembangkan	5423.QAH.001.051 Pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air									BKSDA Kalteng	64.3	
												BTN Tanjung Puting		
												BKSDA Kalbar	64.3	
												BBTN BKDS		
												BTN Gunung		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					60
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					48
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					40
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					41
202.5		202.5		202.5		202.5		202.5		202.5		202.5					80
		64.3				64.3		64.3				64.3					41
				64.3													39
		64.3		64.3		64.3		64.3				64.3					41
										64.3							59
						64.3											41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Palung		
												Tahura Pandan Puloh		
												BKSDA Kaltim	64.3	
												Tahura Bukit Soeharto		
												BKSDA Kalsel		
												BKSDA Jambi	64.3	
												BTN Berbak dan Sembilang	64.3	
												BKSDA Riau	64.3	
												BTN Bukit Tigapuluh	64.3	
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumsel	64.3	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
												64.3					
				64.3						64.3							62
						64.3											
64.3		64.3															45
																	35
64.3																	60
128.6		64.3				64.3		128.6		64.3		128.6					48
																	40
		64.3															41
				64.3						64.3							80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
		5423.QDD.001 Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka ekowisata	5423.QDD.001.051 Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi									BKSDA Kalteng	72.1	
												BTN Tanjung Puting		
												BKSDA Kalbar		
												BBTN BKDS		
												BTN Gunung Palung		
												Tahura Pandan Puloh		
												BKSDA Kaltim		
												Tahura Bukit Soeharto		
												BKSDA Kalsel		
												BKSDA Jambi		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
																	41
72.1																	39
				72.1													41
		72.1															59
						72.1											41
		72.1															
								72.1									62
												72.1					
										72.1							45
72.1																	35

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Berbak dan Sembilang	72.1	
												BKSDA Riau		
												BTN Bukit Tigapuluh		
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumsel		
			5423.QDD.001.052 Pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi									BKSDA Kalteng	67.5	
												BTN Tanjung Puting		
												BKSDA Kalbar	67.5	
												BBTN BKDS		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
																	60
72.1																	48
						72.1											40
												72.1					41
				72.1													80
		67.5				67.5		67.5				67.5					41
				67.5													39
		67.5		67.5		67.5		67.5				67.5					41
										67.5							59

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Gunung Palung		
												Taman Panda Nanpuloh		
												BKSDA Kaltim	67.5	
												Taman Bukit Soeharto		
												BKSDA Kalsel		
												BKSDA Jambi	67.5	
												BTN Berbak dan Sembilang	67.5	
												BKSDA Riau	67.5	
												BTN Bukit Tigapuluh		
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumsel	67.5	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
						67.5											41
												67.5					
				67.5						67.5							62
						67.5											
67.5		67.5															45
																	35
67.5																	60
135		67.5		67.5		135		67.5		67.5		135					48
								67.5									40
		67.5															41
				67.5						67.5							80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
8	Inventarisasi Dan Verifikasi Kehati	6739.REA.001 Kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	6739.REA.001.051 Inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan kawasan konservasi									BKSDA Kalteng	252	
												BTN Tanjung Puting	50.4	
												BKSDA Kalbar	302.4	
												BBTN BKDS	50.4	
												BTN Gunung Palung	50.4	
												Tahura Pandan Puloh	50.4	
												BKSDA Kaltim	151.2	
												Tahura Bukit Soeharto	50.4	
												BKSDA Kalsel	100.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
						252									Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (juta ha)	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Ha)	41
						50.4											39
						302.4										Target Renstra:	41
						50.4											59
						50.4										Target FOLU:	41
						50.4											
						151.2											62
						50.4											
						100.8											45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Jambi	50.4	
												BTN Berbak dan Sembilang	50.4	
												BKSDA Riau	554.4	
												BTN Bukit Tigapuluh	50.4	
												BTN Tesso Nilo	50.4	
												BKSDA Sumsel	151.2	
		6741.REA.001 Kawasan perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	6741.REA.001.051 Intervensi manajemen TSL di dalam kawasan konservasi									BKSDA Kalteng	119	
												BTN Tanjung Puting	23.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
						50.4											35
						50.4											60
						554.4											48
						50.4											40
						50.4											41
						151.2											80
119		119		119		119		119		119		119			Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar dengan Kawasan Konservasi	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies genetik dan TSL	41
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					39

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Kalbar	142.8	
												BBTN BKDS	23.8	
												BTN Gunung Palung	23.8	
												Tahura Pandan Puloh	23.8	
												BKSDA Kaltim	71.4	
												Tahura Bukit Soeharto	23.8	
												BKSDA Kalsel	47.6	
												BKSDA Jambi	23.8	
												BTN Berbak dan Sembilang	23.8	
												BKSDA Riau	261.8	
												BTN Bukit Tigapuluh	23.8	
												BTN Tesso Nilo	23.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
142.8		142.8		142.8		142.8		142.8		142.8		142.8					41
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8				Target Renstra : 1000 Entitas	59
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					41
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					
71.4		71.4		71.4		71.4		71.4		71.4		71.4				Target FOLU :	62
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					
47.6		47.6		47.6		47.6		47.6		47.6		47.6					45
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					35
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					60
261.8		261.8		261.8		261.8		261.8		261.8		261.8					48
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					40
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Sumsel	71.4	
9	Mitigasi Konflik Manusia Dan Satwa Liar	6741.QDB.001 Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang dikembangkan	6741.REA.001.053 Penanganan satwa transit dan konflik									BKSDA Kalteng	345.6	
												BTN Tanjung Puting	345.6	
												BKSDA Kalbar	345.6	
												BBTN BKDS	345.6	
												BTN Gunung Palung	345.6	
												Tahura Pandan Puloh	345.6	
												BKSDA Kaltim	345.6	
												Tahura Bukit Soeharto	345.6	
												BKSDA Kalsel	345.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
71.4		71.4		71.4		71.4		71.4		71.4		71.4					80
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6				Jumlah penyelamatan satwa liar :: 700 Kejadian	41
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					39
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					41
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					59
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					41
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					62
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Jambi	345.6	
												BTN Berbak dan Sembilang	345.6	
												BKSDA Riau	345.6	
												BTN Bukit Tigapuluh	345.6	
												BTN Tesso Nilo	345.6	
												BKSDA Sumsel	345.6	
10	Menerapkan Kebijakan Pelarangan Penebangan Hutan Primer Masuk Arahan Lindung Berdasarkan Ijlh.	Sama dengan AM I.2												

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					35
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					60
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					48
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					40
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					41
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dibidang Dalkarhutla.	Sama dengan AM I.3												
12	Pencegahan Penebangan Liar Di Areal Hutan Konservasi.	Sama dengan AM I.3												
13	Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan Dan Kelola Usaha) Kelompok Masyarakat.	Sama dengan AM I.4 dan 1.6												

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
14	Identifikasi, Pemetaan Dan Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan Dan Hhbk	Sama dengan AM I.5												
15	Sosialisasi Kepada Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan Setempat.	6740.PBV.006 Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	6740.pbv.006.053 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi									BKSDA Kalteng	1374	
												BTN Tanjung Puting	274.8	
												BKSDA Kalbar	1648.8	
												BBTN BKDS	274.8	
												BTN Gunung Palung	274.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
1374		1374		1374		1374		1374		1374		1374					41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					39
1648.8		1648.8		1648.8		1648.8		1648.8		1648.8		1648.8					41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					59
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Tahura Pandan Puloh	274.8	
												BKSDA Kaltim	824.4	
												Tahura Bukit Soeharto	274.8	
												BKSDA Kalsel	549.6	
												BKSDA Jambi	274.8	
												BTN Berbak dan Sembilang	274.8	
												BKSDA Riau	3022.8	
												BTN Bukit Tigapuluh	274.8	
												BTN Tesso Nilo	274.8	
												BKSDA Sumsel	824.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					
824.4		824.4		824.4		824.4		824.4		824.4		824.4					62
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					
549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6					45
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					35
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					60
3022.8		3022.8		3022.8		3022.8		3022.8		3022.8		3022.8					48
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					40
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
824.4		824.4		824.4		824.4		824.4		824.4		824.4					80

LAMPIRAN 3 | Matrik Rencana Kerja peningkatan Cadangan Karbon (PCK) Non-Rotasi di Kawasan Konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
1	PENANGANAN OPENED AREA	6740.REA.0 02 Luas Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang Ditangani	6740.REA.002.051 Penyusunan Data dan Informasi Potensi Konflik Tenurial									BKSDA Kalimantan Tengah	1147.5	APBN PDASRH
												BTN Tanjung Puting		
												BTN		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
	APBN PDASRH		APBN PDASRH		APBN PDASRH		APBN PDASRH		APBN PDASRH		APBN PDASRH		APBN PDASRH		Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	41
229.5																Target Renstra : 800 Ribu Ha	39
		229.5														Target	37

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Sebang au		
												BKSDA Kalimantan Barat		
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum		
												BTN Gunung Palung		
												BTN Bukit Baka		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																FOLU:	
				2754													41
						459											59
								229.5									41
												229.5					27

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Bukit Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur		
												BTN Kutai		
												UPTD Tahura Bukit Suharto		
												UPTD Tahura Lati Petangis		
												BKSDA Kali		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
918																	62
		229.5															47
		229.5															
										229.5							
				1606.5													45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												mantan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang		
												BKSDA Jambi		
												BBTN Kerinci Seblat		
												BTN Berbak dan Sembilang		
												BKSDA Sumat		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
												229.5					42
										229.5							35
229.5																	135
						229.5											60
								229.5									68

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												era Barat		
												BTN Siberut		
												BBKSDA Riau	688.5	
												BTN Bukit Duabelas		
												BTN Bukit Tigapuluh		
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Su		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
												229.5					34
																	48
		229.5															38
												229.5					40
						229.5											41
918																	80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												matera Selatan		
												BTN Berbak dan Sembilang		
												BBTN Gunung Leuser		
												BTN Batang Gadis	229.5	
												BTN Way Kambas		
												BBTN Bukit		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
				229.5													60
												229.5					53
																	36
229.5																	84
						229.5											71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barisan Selatan		
2	PEMULIHAN EKOSISTEM	6742.REA.002.Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	6742.REA.002.051 Penanaman Intensif Bersama Masyarakat									BKSDA Kalimantan Tengah	68112.625	
												BTN Tanjung Puting	182792.5	
												BTN Seb	4250	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
68112.625		68112.625		68112.625		68112.625		68112.625		68112.625		68112.625			Luas kawasan hutan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Luas ekosistem yang dipulihkan	41
182792.5		182792.5		182792.5		182792.5		182792.5		182792.5		182792.5					39
4250		4250		4250		4250		4250		4250		4250				Target Renstra :	37

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												angau		
												BKSDA Kalimantan Barat	248055.5	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	108419.625	
												BTN Gunung Palung	2813.5	
												BTN Bukit Baka	6375	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																200 Ribu Ha	
248 055.5		248 055.5		248 055.5		248 055.5		248 055.5		248 055.5		248 055.5					41
108 419.625		108 419.625		108 419.625		108 419.625		108 419.625		108 419.625		108 419.625					59
2813.5		2813.5		2813.5		2813.5		2813.5		2813.5		2813.5				Target FOLU:	41
6375		6375		6375		6375		6375		6375		6375					27

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Bukit Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur	145 617.75	
												BTN Kutai	850 00	
												UPTD Tahura Bukit Suharto	186 63.875	
												UPTD Tahura Lati Petangis	214 4.125	
												BKSDA Kali	354 47.125	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
145 617.75		145 617.75		145 617.75		145 617.75		145 617.75		145 617.75		145 617.75					62
850 00		850 00		850 00		850 00		850 00		850 00		850 00					47
186 63.875		186 63.875		186 63.875		186 63.875		186 63.875		186 63.875		186 63.875					
214 4.125		214 4.125		214 4.125		214 4.125		214 4.125		214 4.125		214 4.125					
354 47.125		354 47.125		354 47.125		354 47.125		354 47.125		354 47.125		354 47.125					45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												mantan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang	2125	
												BKSDA Jambi	1258	
												BBTN Kerinci Seblat	106250	
												BTN Berbak dan Sembilang	77520	
												BKSDA Sumat	21250	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
2125		2125		2125		2125		2125		2125		2125					42
1258		1258		1258		1258		1258		1258		1258					35
106250		106250		106250		106250		106250		106250		106250					135
77520		77520		77520		77520		77520		77520		77520					60
21250		21250		21250		21250		21250		21250		21250					68

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												era Barat		
												BTN Siberut	21250	
												BBKSDA Riau	22599.375	
												BTN Bukit Duabelas	3187.5	
												BTN Bukit Tigapuluh	14875	
												BTN Tesso Nilo	44304.125	
												BKSDA Su	69666	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
21250		21250		21250		21250		21250		21250		21250					34
22599.375		22599.375		22599.375		22599.375		22599.375		22599.375		22599.375					48
3187.5		3187.5		3187.5		3187.5		3187.5		3187.5		3187.5					38
14875		14875		14875		14875		14875		14875		14875					40
44304.125		44304.125		44304.125		44304.125		44304.125		44304.125		44304.125					41
69666		69666		69666		69666		69666		69666		69666					80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												matera Selatan		
												BTN Berbak dan Sembilang	21250	
												BBTN Gunung Leuser	21250	
												BTN Batang Gadis	12750	
												BTN Way Kambas	21250	
												BBTN Bukit	21250	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
21250		21250		21250		21250		21250		21250		21250					60
21250		21250		21250		21250		21250		21250		21250					53
12750		12750		12750		12750		12750		12750		12750					36
21250		21250		21250		21250		21250		21250		21250					84
21250		21250		21250		21250		21250		21250		21250					71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barisan Selatan		
			6742.REA.002.052 Pemeliharaan Bersama Masyarakat									BKSDA Kalimantan Tengah		
												BTN Tanjung Puting		
												BTN Sebangau		
												BKSDA Kalimantan Barat		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
20433.7875		68111.2625															41
54837.75		18279.25															39
1275		425															37
74416.65		24805.55															41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum		
												BTN Gunung Palung		
												BTN Bukit Baka Bukit Raya		
												BKSDA Kalimantan		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
32525.875		10841.9625															59
844.05		281.35															41
1912.5		637.5															27
43685.325		14561.775															62

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Timur		
												BTN Kutai		
												UPTD Tahura Bukit Suharto		
												UPTD Tahura Lati Petangis		
												BKSDA Kalimantan Selatan		
												BTN Kayan Me		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
25500		8500															47
5599.1625		1866.3875															
643.2375		214.4125															
10634.1375		3544.7125															45
637.5		212.5															42

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												ntarang		
												BKSDA Jambi		
												BBTN Kerinci Seblat		
												BTN Berbak dan Sembilang		
												BKSDA Sumatera Barat		
												BTN Siberut		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
377.4		125.8															35
31875		10625															135
23256		7752															60
6375		2125															68
6375		2125															34

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BBKSDA Riau		
												BTN Bukit Duabelas		
												BTN Bukit Tigapuluh		
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumatera Selatan		
												BTN Ber		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
6779.8125		2259.9375															48
956.25		318.75															38
4462.5		1487.5															40
13291.2375		4430.4125															41
20899.8		6966.6															80
6375		2125															60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												bak dan Sembilang		
												BBTN Gunung Leuser		
												BTN Batang Gadis		
												BTN Way Kambas		
												BBTN Bukit Barisan Selatan		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
6375		2125															53
3825		1275															36
6375		2125															84
6375		2125															71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
			6742.REA.002.057 Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem									BKSDA Kalimantan Tengah	106.5	
												BTN Tanjung Puting	21.3	
												BTN Sebangau	21.3	
												BKSDA Kalimantan Barat	255.6	
												BBTN Betung Keri	42.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	41
																	39
																	37
																	41
																	59

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												hundan Danau Sentarum		
												BTN Gunung Palung	21.3	
												BTN Bukit Baka Bukit Raya	21.3	
												BKSDA Kalimantan Timur	85.2	
												BTN Kutai	21.3	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	41
																	27
																	62
																	47

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												UPTD Tahura Bukit Suharto	21.3	
												UPTD Tahura Lati Petangis	21.3	
												BKSDA Kalimantan Selatan	149.1	
												BTN Kayan Mentarang	21.3	
												BKSDA Jambi	21.3	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	45
																	42
																	35

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BBTN Kerinci Seblat	21.3	
												BTN Berbak dan Sembilang	21.3	
												BKSDA Sumatera Barat	21.3	
												BTN Siberut	21.3	
												BBKSDA Riau	63.9	
												BTN Bukit	21.3	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	135
																	60
																	68
																	34
																	48
																	38

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Duabelas		
												BTN Bukit Tigapuluh	21.3	
												BTN Tesso Nilo	21.3	
												BKSDA Sumatera Selatan	85.2	
												BTN Berbak dan Sembilang	21.3	
												BBTN Gunung	21.3	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	40
																	41
																	80
																	60
																	53

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Leuser		
												BTN Batang Gadis	21.3	
												BTN Way Kambas	21.3	
												BBTN Bukit Barisan Selatan	21.3	
3	RHL PADA KAWASAN KONSERVASI	Sama dengan AM II.2												

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	36
																	84
																	71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENYANGGA	6740.QDB.0 01 Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	6740.QDB.0 01.051 Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi									BKSDA Kalimantan Tengah	245	
												BTN Tanjung Puting		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
															Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produkti	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampinga n dalam rangka pemberdayaan masyarakat	41
		49															39

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Sebangau		
												BKSDA Kalimantan Barat		
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum		
												BTN Gunung Palung		
												BTN Bukit		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
						49											37
588																	41
								98									59
										49							41
												49					27

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Baka Bukit Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur		
												BTN Kutai		
												UPTD Tahura Bukit Suharto		
												UPTD Tahura Lati Petangis		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
		196															62
				49													47
49																	
						49											

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Kalimantan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang	49	
												BKSDA Jambi		
												BBTN Kerinci Seblat		
												BTN Berbak dan Sembilang		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
								343									45
																	42
												49					35
										49							135
						49											60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Sumatera Barat		
												BTN Siberut		
												BBKSDA Riau		
												BTN Bukit Dua belas		
												BTN Bukit Tigapuluh		
												BTN Tes		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
		49															68
				49													34
147																	48
		49															38
										49							40
								49									41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												so Nilo		
												BKSDA Sumatera Selatan		
												BTN Berbak dan Sembilang		
												BBTN Gunung Leuser		
												BTN Batang Gadis	49	
												BTN Way Ka		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
				196													80
												49					60
49																	53
																	36
						49											84

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												mbas		
												BBTN Bukit Barisan Selatan		
			6740.QDB.001.052 Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat									BKSDA Kalimantan Tengah	62	
												BTN Tanjung Puting	12.4	
												BTN Sebangau	12.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
												49					71
62		62		62		62		62		62		62					41
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					39
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					37

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Kalimantan Barat	148.8	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	24.8	
												BTN Gunung Palung	12.4	
												BTN Bukit Baka Bukit	12.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
148.8		148.8		148.8		148.8		148.8		148.8		148.8					41
24.8		24.8		24.8		24.8		24.8		24.8		24.8					59
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					41
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					27

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur	49.6	
												BTN Kutai	12.4	
												UPTD Tahura Bukit Suharto	12.4	
												UPTD Tahura Lati Petangis	12.4	
												BKSDA Kalimman	86.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
49.6		49.6		49.6		49.6		49.6		49.6		49.6					62
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					47
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					
86.8		86.8		86.8		86.8		86.8		86.8		86.8					45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												tan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang	12.4	
												BKSDA Jambi	12.4	
												BBTN Kerinci Seblat	12.4	
												BTN Berbak dan Sembilang	12.4	
												BKSDA Sumatera	12.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					42
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					35
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					135
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					60
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					68

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barat		
												BTN Siberut	12.4	
												BBKSDA Riau	37.2	
												BTN Bukit Duabelas	12.4	
												BTN Bukit Tigapuluh	12.4	
												BTN Tesso Nilo	12.4	
												BKSDA Su	49.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					34
37.2		37.2		37.2		37.2		37.2		37.2		37.2					48
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					38
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					40
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					41
49.6		49.6		49.6		49.6		49.6		49.6		49.6					80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												matera Selatan		
												BTN Berbak dan Sembilang	12.4	
												BBTN Gunung Leuser	12.4	
												BTN Batang Gadis	12.4	
												BTN Way Kambas	12.4	
												BBTN Bukit	12.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					60
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					53
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					36
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					84
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barisan Selatan		
			6740.QDB.001.053 Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Kawasan Konservasi									BKSDA Kalimantan Tengah	337.5	
												BTN Tanjung Puting	67.5	
												BTN Sebangau	67.5	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
337.5		337.5		337.5		337.5		337.5		337.5		337.5					41
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					39
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					37

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Kalimantan Barat	810	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	135	
												BTN Gunung Palung	67.5	
												BTN Bukit Baka Bukit	67.5	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
810		810		810		810		810		810		810					41
135		135		135		135		135		135		135					59
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					41
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					27

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur	270	
												BTN Kutai		
												UPTD Tahura Bukit Suharto	67.5	
												UPTD Tahura Lati Petangis	67.5	
												BKSDA Kaliman	472.5	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
270		270		270		270		270		270		270					62
																	47
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					
472.5		472.5		472.5		472.5		472.5		472.5		472.5					45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												tan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang	67.5	
												BKSDA Jambi	67.5	
												BBTN Kerinci Seblat	67.5	
												BTN Berbak dan Sembilang	67.5	
												BKSDA Sumatera	67.5	

Anggaran 2024		Anggaran 2025		Anggaran 2026		Anggaran 2027		Anggaran 2028		Anggaran 2029		Anggaran 2030			RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Pelaksana	Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					42
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					35
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					135
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					60
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					68

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barat		
												BTN Siberut	67.5	
												BBKSDA Riau	202.5	
												BTN Bukit Duabelas	67.5	
												BTN Bukit Tigapuluh	67.5	
												BTN Tesso Nilo	67.5	
												BKSDA Su	270	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					34
202.5		202.5		202.5		202.5		202.5		202.5		202.5					48
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					38
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					40
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					41
270		270		270		270		270		270		270					80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												matera Selatan		
												BTN Berbak dan Sembilang	67.5	
												BBTN Gunung Leuser	67.5	
												BTN Batang Gadis	67.5	
												BTN Way Kambas	67.5	
												BBTN Bukit	67.5	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					60
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					53
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					36
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					84
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barisan Selatan		
5	INVENTARISASI DAN VERIFIKASI KEHATI	6739.REA.001 Kawasan Konservasi dengan Nilai Kehati Tinggi	6739.REA.001.052 Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi									BKSDA Kalimantan Tengah	252	
												BTN Tan	50.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
						252									Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (juta ha)	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Ha)	41
						50.4											39

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												jung Puting		
												BTN Sebangau	50.4	
												BKSDA Kalimantan Barat	604.8	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	100.8	
												BTN Gunung Palung	50.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
						50.4										Target Renstra:	37
						604.8											41
						100.8										Target FOLU:	59
						50.4											41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Bukit Baka Bukit Raya	50.4	
												BKSDA Kalimantan Timur	201.6	
												BTN Kutai	50.4	
												UPTD Tahura Bukit Suharto	50.4	
												UPTD Tahura Lati	50.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
						50.4											27
						201.6											62
						50.4											47
						50.4											
						50.4											

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Petangis		
												BKSDA Kalimantan Selatan	352.8	
												BTN Kayan Mentarang	50.4	
												BKSDA Jambi	50.4	
												BBTN Kerinci Seblat	50.4	
												BTN Berbak dan Sem	50.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
						352.8											45
						50.4											42
						50.4											35
						50.4											135
						50.4											60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												bilang		
												BKSDA Sumatera Barat	50.4	
												BTN Siberut	50.4	
												BBKSDA Riau	151.2	
												BTN Bukit Duabelas	50.4	
												BTN Bukit Tigapuluh	50.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
						50.4											68
						50.4											34
						151.2											48
						50.4											38
						50.4											40

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Teso Nilo	50.4	
												BKSDA Sumatera Selatan	201.6	
												BTN Berbak dan Sembilang	50.4	
												BBTN Gunung Leuser	50.4	
												BTN Batang Gadis	50.4	
												BTN	50.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
						50.4											41
						201.6											80
						50.4											60
						50.4											53
						50.4											36
						50.4											84

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Way Kambas		
												BBTN Bukit Barisan Selatan	50.4	
		6741.REA.001 Kawasan Perlindungan Keanekaraga man Spesies dan Genetik TSL	6741.REA.001.051 Intervensi Manajemen TSL di Dalam Kawasan Konservasi									BKSDA Kalimantan Tengah	119	
												BTN Tanjung Puting	23.8	
												BTN Seb	23.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
						50.4											71
119		119		119		119		119		119		119					41
																	39
																	37

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												angau		
												BKSDA Kalimantan Barat	285.6	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	47.6	
												BTN Gunung Palung	23.8	
												BTN Bukit Baka Buk	23.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
285.6		285.6		285.6		285.6		285.6		285.6		285.6					41
47.6		47.6		47.6		47.6		47.6		47.6		47.6					59
																	41
																	27

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												it Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur	95.2	
												BTN Kutai	23.8	
												UPTD Tahura Bukit Suharto	23.8	
												UPTD Tahura Lati Petangis	23.8	
												BKSDA Kalimman	166.6	

Anggaran 2024		Anggaran 2025		Anggaran 2026		Anggaran 2027		Anggaran 2028		Anggaran 2029		Anggaran 2030		Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber		Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2					62
																	47
166.6		166.6		166.6		166.6		166.6		166.6		166.6					45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												tan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang	23.8	
												BKSDA Jambi	23.8	
												BBTN Kerinci Seblat	23.8	
												BTN Berbak dan Sembilang	23.8	
												BKSDA Sumatera	23.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	42
																	35
																	135
																	60
																	68

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barat		
												BTN Siberut	23.8	
												BBKSDA Riau	71.4	
												BTN Bukit Duabelas	23.8	
												BTN Bukit Tigapuluh	23.8	
												BTN Tesso Nilo	23.8	
												BKSDA Su	95.2	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	34
71.4		71.4		71.4		71.4		71.4		71.4		71.4					48
																	38
																	40
																	41
95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2					80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												matera Selatan		
												BTN Berbak dan Sembilang	23.8	
												BBTN Gunung Leuser	23.8	
												BTN Batang Gadis	23.8	
												BTN Way Kambas	23.8	
												BBTN Bukit	23.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	60
																	53
																	36
																	84
																	71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barisan Selatan		
6	MITIGASI KONFLIK MANUSIA DAN SATWA LIAR	6741.QDB.001 Entitas perlindungan , dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	6741.REA.001.053 Penanganan Satwa Transit dan Konflik									BKSDA Kalimantan Tengah	345.6	
												BTN Tanjung Puting	345.6	
												BTN Sebangau	345.6	
												BKSDA Kalimantan	345.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6				Jumlah penyelamatan satwa liar :: 700 Kejadian	41
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					39
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					37
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barat		
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	345.6	
												BTN Gunung Palung	345.6	
												BTN Bukit Baka Bukit Raya	345.6	
												BKSDA Kali	345.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					59
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					41
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					27
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					62

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												mantan Timur		
												BTN Kutai	345.6	
												UPTD Tahura Bukit Suharto	345.6	
												UPTD Tahura Lati Petangis	345.6	
												BKSDA Kalimantan Selatan	345.6	
												BTN Kayan	345.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					47
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					45
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					42

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Mentarang		
												BKSDA Jambi	345.6	
												BBTN Kerinci Seblat	345.6	
												BTN Berbak dan Sembilang	345.6	
												BKSDA Sumatera Barat	345.6	
												BTN Siberut	345.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					35
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					135
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					60
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					68
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					34

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BBKSDA Riau	345.6	
												BTN Bukit Duabelas	345.6	
												BTN Bukit Tigapuluh	345.6	
												BTN Tesso Nilo	345.6	
												BKSDA Sumatera Selatan	345.6	
												BTN Ber	345.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					48
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					38
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					40
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					41
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					80
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												bak dan Sembilang		
												BBTN Gunung Leuser	345.6	
												BTN Batang Gadis	345.6	
												BTN Way Kambas	345.6	
												BBTN Bukit Barisan Selatan	345.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					53
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					36
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					84
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
7	PERLINDUNGAN, PENGAMANAN, DAN PENJAGAAN KAWASAN	6740.PBV.0 06 Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaann ya	6740.PBV.006.053 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi									BKSDA Kalimantan Tengah	1374	
												BTN Tanjung Puting	274.8	
												BTN Seb	274.8	

Anggaran 2024		Anggaran 2025		Anggaran 2026		Anggaran 2027		Anggaran 2028		Anggaran 2029		Anggaran 2030			RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Pelaksana	Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
1374		1374		1374		1374		1374		1374		1374			Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					39
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					37

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												angau		
												BKSDA Kalimantan Barat	3297.6	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	549.6	
												BTN Gunung Palung	274.8	
												BTN Bukit Baka Buk	274.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
3297.6		3297.6		3297.6		3297.6		3297.6		3297.6		3297.6				Target Renstra : 560 Unit KK	41
549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6					59
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					27

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												it Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur	1099.2	
												BTN Kutai	274.8	
												UPTD Tahura Bukit Suharto	274.8	
												UPTD Tahura Lati Petangis	274.8	
												BKSDA Kalimman	1923.6	

Anggaran 2024		Anggaran 2025		Anggaran 2026		Anggaran 2027		Anggaran 2028		Anggaran 2029		Anggaran 2030		Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber		Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
1099.2		1099.2		1099.2		1099.2		1099.2		1099.2		1099.2					62
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					47
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					
1923.6		1923.6		1923.6		1923.6		1923.6		1923.6		1923.6					45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												tan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang	274.8	
												BKSDA Jambi	274.8	
												BBTN Kerinci Seblat	274.8	
												BTN Berbak dan Sembilang	274.8	
												BKSDA Sumatera	274.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					42
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					35
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					135
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					60
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					68

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barat		
												BTN Siberut	274.8	
												BBKSDA Riau	824.4	
												BTN Bukit Duabelas	274.8	
												BTN Bukit Tigapuluh	274.8	
												BTN Tesso Nilo	274.8	
												BKSDA Su	1099.2	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					34
824.4		824.4		824.4		824.4		824.4		824.4		824.4					48
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					38
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					40
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
1099.2		1099.2		1099.2		1099.2		1099.2		1099.2		1099.2					80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												matera Selatan		
												BTN Berbak dan Sembilang	274.8	
												BBTN Gunung Leuser	274.8	
												BTN Batang Gadis	274.8	
												BTN Way Kambas	274.8	
												BBTN Bukit	274.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					60
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					53
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					36
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					84
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barisan Selatan		
8	PENGENDALIAN KARHUTLA DI KAWASAN KONSERVASI DAN DAERAH PENYANGGA	6740.PBV.0 06 Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efeefektivitas pengelolaannya	6740.PBV.0 06.054 Pengendalian Kebakaran Hutan									BKSDA Kalimantan Tengah	390	
												BTN Tanjung	78	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
390		390		390		390		390		390		390			Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	41
78		78		78		78		78		78		78				Target Renstra : 560	39

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Puting		
												BTN Sebangau	78	
												BKSDA Kalimantan Barat	936	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	156	
												BTN Gunung Palung	78	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																Unit KK	
78		78		78		78		78		78		78					37
936		936		936		936		936		936		936				Target FOLU:	41
156		156		156		156		156		156		156					59
78		78		78		78		78		78		78					41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Bukit Baka Bukit Raya	78	
												BKSDA Kalimantan Timur	312	
												BTN Kutai	78	
												UPTD Tahura Bukit Suharto	78	
												UPTD Tahura Lati	78	

Sumber	Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
	Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
	78		78		78		78		78		78		78					27
	312		312		312		312		312		312		312					62
	78		78		78		78		78		78		78					47
	78		78		78		78		78		78		78					
	78		78		78		78		78		78		78					

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Petangis		
												BKSDA Kalimantan Selatan	546	
												BTN Kayan Mentarang	78	
												BKSDA Jambi	78	
												BBTN Kerinci Sebelat	78	
												BTN Berbak dan Sem	78	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
546		546		546		546		546		546		546					45
78		78		78		78		78		78		78					42
78		78		78		78		78		78		78					35
78		78		78		78		78		78		78					135
78		78		78		78		78		78		78					60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												bilang		
												BKSDA Sumatera Barat	78	
												BTN Siberut	78	
												BBKSDA Riau	234	
												BTN Bukit Dua belas	78	
												BTN Bukit Tigapuluh	78	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
78		78		78		78		78		78		78					68
78		78		78		78		78		78		78					34
234		234		234		234		234		234		234					48
78		78		78		78		78		78		78					38
78		78		78		78		78		78		78					40

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Teso Nilo	78	
												BKSDA Sumatera Selatan	312	
												BTN Berbak dan Sembilang	78	
												BBTN Gunung Leuser	78	
												BTN Batang Gadis	78	
												BTN	78	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
78		78		78		78		78		78		78					41
312		312		312		312		312		312		312					80
78		78		78		78		78		78		78					60
78		78		78		78		78		78		78					53
78		78		78		78		78		78		78					36
78		78		78		78		78		78		78					84

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Way Kambas		
												BBTN Bukit Barisan Selatan	78	
9	PENANGANAN OPENED AREA PENANGANAN KONFLIK TENURIAL	6739.PBV.0 02 Kawasan konservasi yang dilakukan penetapan (prakondisi) status dan fungsi untuk peningkatan nilai efektifitas	6739.PBV.002.051 Penataan dan penandaan zonasi/ blok kawasan konservasi									BKSDA Kalimantan Tengah		
												BTN Tan		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
78		78		78		78		78		78		78					71
69.8				69.8		69.8		69.8				69.8			Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	41
		69.8															39

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												jung Puting		
												BTN Sebangau	69.8	
												BKSDA Kalimantan Barat	69.8	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum		
												BTN Gunung		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																Target Renstra: 800 Ribu Hektar	37
139.6		69.8		139.6		69.8		139.6		69.8		139.6					41
69.8								69.8								Target FOLU:	59
				69.8													41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Palung		
												BTN Bukit Baka Bukit Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur		
												BTN Kutai		
												UPTD Tahura Bukit Suharto	69.8	
												UPTD Tah	69.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
69.8																	27
		69.8				69.8		69.8		69.8							62
69.8																	47

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												ura Lati Petangis		
												BKSDA Kalimantan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang		
												BKSDA Jambi		
												BBTN Kerinci Seblat		
												BTN Berbakdan		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
69.8		69.8		69.8		69.8		69.8		69.8		69.8					45
												69.8					42
				69.8													35
69.8																	135
												69.8					60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Sembilang		
												BKSDA Sumatera Barat		
												BTN Siberut	69.8	
												BBKSDA Riau		
												BTN Bukit Dua belas		
												BTN Bukit Tigapuluh		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
						69.8											68
																	34
69.8						69.8						69.8					48
69.8																	38
				69.8													40

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumatera Selatan		
												BTN Berbak dan Sembilang	69.8	
												BBTN Gunung Leuser		
												BTN Batang Gadis		
												BTN		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
												69.8					41
		69.8				69.8				69.8		69.8					80
																	60
				69.8													53
												69.8					36
		69.8															84

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Way Kambas		
												BBTN Bukit Barisan Selatan		
			6739.PBV.002.053 Perencanaan kelola kawasan konservasi jangka panjang									BKSDA Kalimantan Tengah		
												BTN Tanjung Puting		
												BTN Seb		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
								69.8									71
165		165				165				165		165					41
				165													39
								165									37

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												angau		
												BKSDA Kalimantan Barat	165	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum		
												BTN Gunung Palung		
												BTN Bukit Baka Buk		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
330		165		330		165		330		165		330					41
165				165													59
												165					41
		165															27

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												it Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur	165	
												BTN Kutai		
												UPTD Tahura Bukit Suharto		
												UPTD Tahura Lati Petangis		
												BKSDA Kaliman		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
165						165				165							62
				165													47
								165									
		165															
165		165		165		165		165		165		165					45

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												tan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang	165	
												BKSDA Jambi		
												BBTN Kerinci Seblat		
												BTN Berbak dan Sembilang		
												BKSDA Sumatera		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	42
		165															35
												165					135
						165											60
										165							68

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barat		
												BTN Siberut	165	
												BBKSDA Riau		
												BTN Bukit Duabelas		
												BTN Bukit Tigapuluh		
												BTN Teso Nilo		
												BKSDA Su	165	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	34
165		165		165													48
								165									38
										165							40
												165					41
		165				165		165									80

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												matera Selatan		
												BTN Berbak dan Sembilang	165	
												BBTN Gunung Leuser		
												BTN Batang Gadis		
												BTN Way Kambas		
												BBTN Bukit		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	60
				165													53
								165									36
												165					84
165																	71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Barisan Selatan		
			Kerjasama penyelenggaraan kawasan konservasi									BKSDA Kalimantan Tengah	15	
												BTN Tanjung Puting		
												BTN Sebangau		
												BKSDA Kalimantan Barat	15	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
		15				15		15				15					41
										15							39
15																	37
30		30		15		30		15		30		15					41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum		
												BTN Gunung Palung		
												BTN Bukit Baka Bukit Raya		
												BKSDA Kalimantan		

Anggaran 2024		Anggaran 2025		Anggaran 2026		Anggaran 2027		Anggaran 2028		Anggaran 2029		Anggaran 2030			RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Rp (juta)	Sumber	Pelaksana	Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
		15						15									59
15																	41
												15					27
				15				15		15		15					62

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Timur		
												BTN Kutai	15	
												UPTD Tahura Bukit Suharto		
												UPTD Tahura Lati Petangis		
												BKSDA Kalimantan Selatan	15	
												BTN Kayan Me	15	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	47
						15											
15																	
15		15		15		15		15		15							45
																	42

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												ntarang		
												BKSDA Jambi		
												BBTN Kerinci Seblat		
												BTN Berbak dan Sembilang		
												BKSDA Sumatera Barat		
												BTN Siberut		
												BBKS		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
												15					35
										15							135
15																	60
						15											68
												15					34
15				15						15							48

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												DA Riau		
												BTN Bukit Duabelas	15	
												BTN Bukit Tigapuluh		
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumatera Selatan	15	
												BTN Berbakdan		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	38
				15													40
										15							41
		15						15				15					80
15																	60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Sembilang		
												BBTN Gunung Leuser		
												BTN Batang Gadis		
												BTN Way Kambas		
												BBTN Bukit Barisan Selatan		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
				15													53
										15							36
						15											84
15																	71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
10	PENINGKATAN KAPASITAS (KELOLA KAWASAN, KELOLA KELEMBAGAAN DAN KELOLA USAHA) KELOMPOK MASYARAKAT	Sama dengan AM II.6												
11	FASILITAS PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN.	5423.QAH. 001 Entitas pemanfaata n jasa lingkungan non wisata alam yang dikembangk an	5423.QAH.001.051 Pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air									BKSDA Kalimantan Tengah		
												BTN Tanjung		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
64.3		64.3				64.3				64.3		64.3					41
				64.3													39

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Puting		
												BTN Sebangau		
												BKSDA Kalimantan Barat	128.6	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum		
												BTN Gunung Palung		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
										64.3							37
64.3		128.6		64.3		128.6		64.3		64.3		128.6					41
64.3						64.3											59
												64.3					41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Bukit Baka Bukit Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur		
												BTN Kutai		
												UPTD Tahura Bukit Suharto	64.3	
												UPTD Tahura Lati		

Sumber	Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
	Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
											64.3							27
	64.3				64.3				64.3				64.3					62
			64.3															47
							64.3											

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Petangis		
												BKSDA Kalimantan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang	64.3	
												BKSDA Jambi		
												BBTN Kerinci Seblat		
												BTN Berbak dan Sem		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
64.3		64.3		64.3		64.3		64.3		64.3		64.3					45
																	42
64.3																	35
				64.3													135
64.3																	60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												bilang		
												BKSDA Sumatera Barat		
												BTN Siberut		
												BBKSDA Riau		
												BTN Bukit Dua belas		
												BTN Bukit Tigapuluh		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
												64.3					68
				64.3													34
64.3				64.3						64.3							48
								64.3									38
								64.3									40

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumatera Selatan	64.3	
												BTN Berbak dan Sembilang		
												BBTN Gunung Leuser	64.3	
												BTN Batang Gadis		
												BTN		

Sumber	Anggaran 2024 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2025 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2026 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2027 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2028 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2029 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2030 Rp (juta)	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
																Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
					64.3													41
	64.3								64.3				64.3					80
					64.3													60
																		53
			64.3															36
									64.3									84

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Way Kambas		
												BBTN Bukit Barisan Selatan		
		5423.QDD.001 Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka ekowisata	5423.QDD.001.051 Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi									BKSDA Kalimantan Tengah	72.1	
												BTN Tanjung		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
												64.3					71
																	41
				72.1													39

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Puting		
												BTN Sebangau		
												BKSDA Kalimantan Barat	72.1	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum		
												BTN Gunung Palung		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
								72.1									37
																	41
		72.1															59
						72.1											41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Bukit Baka Bukit Raya	72.1	
												BKSDA Kalimantan Timur		
												BTN Kutai		
												UPTD Tahura Bukit Suharto		
												UPTD Tahura Lati		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
																	27
												72.1					62
								72.1									47
										72.1							
		72.1															

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
						■						Petangis		
					■							BKSDA Kalimantan Selatan		
							■					BTN Kayan Mentarang		
									■			BKSDA Jambi		
				■								BBTN Kerinci Sebl at	72.1	
										■		BTN Berbak dan Sem		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
72.1																	45
				72.1													42
								72.1									35
																	135
										72.1							60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
										■		bilang		
											■	BKSDA Sumatera Barat		
					■							BTN Siberut		
								■				BBKSDA Riau		
					■							BTN Bukit Duabelas		
										■		BTN Bukit Tigapuluh		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
												72.1					68
72.1																	34
						72.1											48
72.1																	38
										72.1							40

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
					■							BTN Teso Nilo		
							■					BKSDA Sumatera Selatan		
											■	BTN Berbak dan Sembilang		
				■								BBTN Gunung Leuser	72.1	
								■				BTN Batang Gadis		
											■	BTN		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
72.1																	41
				72.1													80
												72.1					60
																	53
						72.1											36
												72.1					84

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Way Kambas		
												BBTN Bukit Barisan Selatan		
			5423.QDD.001.052 Pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi									BKSDA Kalimantan Tengah		
												BTN Tanjung		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
										72.1							71
67.5		67.5				67.5				67.5		67.5					41
				67.5													39

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Puting		
												BTN Sebangau		
												BKSDA Kalimantan Barat	135	
												BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum		
												BTN Gunung Palung		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
										67.5							37
135		135		135		135		135		135		135					41
67.5						67.5											59
												67.5					41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Bukit Baka Bukit Raya		
												BKSDA Kalimantan Timur		
												BTN Kutai		
												UPTD Tahura Bukit Suharto	67.5	
												UPTD Tahura Lati		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
										67.5							27
67.5				67.5				67.5				67.5					62
		67.5															47
						67.5											

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Petangis		
												BKSDA Kalimantan Selatan		
												BTN Kayan Mentarang	67.5	
												BKSDA Jambi		
												BBTN Kerinci Seblat		
												BTN Berbak dan Sem		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					45
																	42
67.5																	35
				67.5													135
67.5																	60

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												bilang		
												BKSDA Sumatera Barat		
												BTN Siberut		
												BBKSDA Riau		
												BTN Bukit Duabelas		
												BTN Bukit Tigapuluh		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
												67.5					68
				67.5													34
67.5				67.5						67.5							48
								67.5									38
								67.5									40

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Tesso Nilo		
												BKSDA Sumatera Selatan	67.5	
												BTN Berbak dan Sembilang		
												BBTN Gunung Leuser	67.5	
												BTN Batang Gadis		
												BTN		

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
				67.5													41
67.5								67.5				67.5					80
				67.5													60
																	53
		67.5															36
								67.5									84

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												Way Kambas		
												BBTN Bukit Barisan Selatan		
12	IDENTIFIKASI, PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI JASA LINGKUNGAN DAN HHBK.	Sama dengan AM II.11												

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
												67.5					71

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
13	MENERAPKAN KEBIJAKAN PELARANGAN PENEBANGAN HUTAN PRIMER MASUK ARAHAN LINDUNG BERDASARKAN IJLH.	Sama dengan AM II.7												
14	PENANGANN KONFLIK TENURIAL	Sama dengan AM II.1												

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
15	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN SERTA PEMULIHAN EKOSISTEM PADA KAWASAN IKN	Sama dengan AM II.5												
16	REHABILITASI, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI MANGROVE	Sama dengan AM II.3												
17	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN SERTA PEMULIHAN EKOSISTEM PADA KAWASAN IKN	Sama dengan AM II.9												

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
18	MELAKSANAKAN PENYUSUNAN MANUAL/GUIDELINES OPERASIONAL PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Sama dengan AM II.11												

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	

LAMPIRAN 4 | Matrik Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) (Enhanced Natural Regeneration) di Kawasan Konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
1	Pembinaan Habitat	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di Dalam Kawasan Konservasi									BTN Tanjung Puting	1428	APBN KSDAE
												BKSDA Kalbar	3570	
												BKSDA Kaltim		
												BKSDA Kalsel		
												BTN Berbak Sembilang		
												BTN Tesso Nilo		
			Penanganan Satwa Transit dan Konflik									BTN Tanjung Puting	345.6	
												BKSDA Kalbar	345.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
1428	APBN KSDAE	1428	APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	39
3570				3570													41
				2737				2737		2737						Target Renstra : 70 Juta hektar	62
		238				238						238					45
		1904						1904				1904					60
						1071				1071		1071				Target FOLU :	41
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6				Jumlah penyelamatan satwa liar	39
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BKSDA Kaltim	345.6	
												BKSDA Kalsel	345.6	
												BTN Berbak Sembilang	345.6	
												BTN Tesso Nilo	345.6	
2	Pengkayaan Jenis	.Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di Dalam Kawasan Konservasi									BTN Tanjung Puting	23.8	
												BKSDA Kalbar	23.8	
												BKSDA Kaltim	47.6	
												BKSDA Kalsel	23.8	
												BTN Berbak Sembilang	23.8	
												BTN Tesso Nilo	23.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6				Target Renstra : 700 Kejadian	62
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					45
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6				Target FOLU :	60
345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6		345.6					41
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8			Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	39
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					41
47.6		47.6		47.6		47.6		47.6		47.6		47.6				Target Renstra : 70 Juta hektar	62
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					45
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8					60
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8				Target FOLU :	41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
			Penanganan Satwa Transit dan Konflik	sama dengan AM III.1										
5	Perlindungan, Pengamanan dan Penjagaan Kawasan	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi									BTN Tanjung Puting	274.8	
												BKSDA Kalbar	274.8	
												BKSDA Kaltim	549.6	
												BKSDA Kalsel	274.8	
												BTN Berbak Sembilang	274.8	
												BTN Tesso Nilo	274.8	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8			Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	39
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6					62
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8				Target Renstra : 560 Unit KK	45
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					60
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
6	Pengendalian Karhutla Di Kawasan Konservasi Dan Desa Penyangga	Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan									BTN Tanjung Puting	78	
												BKSDA Kalbar	78	
												BKSDA Kaltim	156	
												BKSDA Kalsel	78	
												BTN Berbak Sembilang	78	
												BTN Tesso Nilo	78	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
78		78		78		78		78		78		78			Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	39
78		78		78		78		78		78		78				Target Renstra : 560 Unit KK	41
156		156		156		156		156		156		156					62
78		78		78		78		78		78		78				Target FOLU:	45
78		78		78		78		78		78		78					60
78		78		78		78		78		78		78					41

LAMPIRAN 5 | Matrik Rencana Kerja Pengelolaan Lahan Gambut (Restorasi) di Kawasan Konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
1	Revegetasi	Pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	Penanaman intensif bersama masyarakat									BKSDA Kalteng	445	APBN KSDAE
												BTN Tanjung Puting	11125	
												BTN Sebangau	140.175	
												BKSDA Kalbar	2225	
												BTN Gunung Palung	73.425	
												BKSDA Kaltim	4672.5	
												BTN Berbak Sembilang	2225	
												BBKSDA Riau	111.25	
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat									BKSDA Kalteng	70	
												BTN Tanjung Puting	1750	
												BTN Sebangau	22.05	
												BKSDA Kalbar	350	
												BTN Gunung Palung	11.55	
												BKSDA Kaltim	735	
												BTN Berbak Sembilang	350	
												BBKSDA Riau	17.5	
			Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem									BKSDA Kalteng	21.3	
												BTN Tanjung Puting	21.3	
												BTN Sebangau	21.3	
												BKSDA Kalbar	21.3	
												BTN Gunung Palung	21.3	
												BKSDA Kaltim	42.6	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
445	APBN KSDAE	445	APBN KSDAE	445	APBN KSDAE	445	APBN KSDAE	445	APBN KSDAE	445	APBN KSDAE	445	APBN KSDAE		Luas kawasan hutan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Luas ekosist em yang dipulih kan	41
11125		11125		11125		11125		11125		11125		11125					39
140.175		140.175		140.175		140.175		140.175		140.175		140.175					37
2225		2225		2225		2225		2225		2225		2225					41
73.425		73.425		73.425		73.425		73.425		73.425		73.425					41
4672.5		4672.5		4672.5		4672.5		4672.5		4672.5		4672.5					62
2225		2225		2225		2225		2225		2225		2225					60
111.25		111.25		111.25		111.25		111.25		111.25		111.25					48
70		70		70		70		70		70		70					41
1750		1750		1750		1750		1750		1750		1750					39
22.05		22.05		22.05		22.05		22.05		22.05		22.05					37
350		350		350		350		350		350		350					41
11.55		11.55		11.55		11.55		11.55		11.55		11.55					41
735		735		735		735		735		735		735					62
350		350		350		350		350		350		350					60
17.5		17.5		17.5		17.5		17.5		17.5		17.5					48
																	41
																	39
																	37
																	41
																	41
																	62

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Berbak Sembilang	21.3	
												BBKSDA Riau	42.6	
2	Rewetting (Pembasahan) Dengan Pembangunan Sekat Kanal	Pemulihan Ekosistem	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat									BKSDA Kalteng	26	
												BTN Tanjung Puting	26	
												BTN Sebangau	26	
												BKSDA Kalbar	26	
												BTN Gunung Palung	26	
												BKSDA Kaltim	52	
			Pemeliharaan Bersama Masyarakat									BTN Berbak Sembilang	26	
												BBKSDA Riau	52	
												BKSDA Kalteng		
												BTN Tanjung Puting		
												BTN Sebangau		
												BKSDA Kalbar		
												BTN Gunung Palung		
												BKSDA Kaltim		
												BTN Berbak Sembilang		
												BBKSDA Riau		
			Penyusunan Rencana Pemulihan	sama dengan AM IV.1										

Anggaran 2024 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2025 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2026 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2027 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2028 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2029 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2030 Rp (juta)	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
															IKP	IKK	60
																	48
	APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE		APBN KSDAE			Luas ekosistem yang dipulihkan	41
																	39
																	37
																	41
																	41
																	62
																	60
																	48
2.8																	41
2.8																	39
2.8																	37
2.8																	41
2.8																	41
5.6																	62
2.8																	60
5.6																	48
															Luas kawasan hutan hutan		

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun - 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	UPT	Anggaran 2023 Rp (juta)	Sumber
3	Patroli & Pemeliharaan Sekat Kanal	Pemulihan Ekosistem	Penanaman Intensif Bersama Masyarakat	sama dengan AM IV.1										
		Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi									BKSDA Kalteng	274.8	
												BTN Tanjung Puting	274.8	
												BTN Sebangau	274.8	
												BKSDA Kalbar	274.8	
												BTN Gunung Palung	274.8	
												BKSDA Kaltim	549.6	
												BTN Berbak Sembilang	274.8	
												BBKSDA Riau	549.6	
4	Pemberdayaan Masyaraat Desa Penyangga	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif Di Kawasan Konservasi	Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat Di Sekitar Kawasan Konservasi									BKSDA Kalteng	49	
												BTN Tanjung Puting		
												BTN Sebangau		
												BKSDA Kalbar		
												BTN Gunung Palung		
												BKSDA Kaltim		
												BTN Berbak Sembilang		
												BBKSDA Riau		
			Pendampingan									BKSDA Kalteng	12.4	
												BTN Tanjung Puting	12.4	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
															n yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif		
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					39
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					37
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6					62
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					60
549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6					48
															Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produkti	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	41
				49													39
										49							37
												49					41
49																	41
						98											62
		49															60
								98									48
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					41
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					39

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
												BTN Sebangau	12.4	
												BKSDA Kalbar	12.4	
												BTN Gunung Palung	12.4	
												BKSDA Kaltim	24.8	
												BTN Berbak Sembilang	12.4	
												BBKSDA Riau	24.8	
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa disekitar KK									BKSDA Kalteng	67.5	
												BTN Tanjung Puting	67.5	
												BTN Sebangau	67.5	
												BKSDA Kalbar	67.5	
												BTN Gunung Palung	67.5	
												BKSDA Kaltim	135	
												BTN Berbak Sembilang	67.5	
												BBKSDA Riau	135	
5	Perlindungan, Pengamanan Dan Penjagaan Kawasan	Kawasan Konservasi Yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Perlindungan Dan Pengamanankawasan Konservasi									BKSDA Kalteng	274.8	
												BTN Tanjung Puting	274.8	
												BTN Sebangau	274.8	
												BKSDA Kalbar	274.8	
												BTN Gunung Palung	274.8	
												BKSDA Kaltim	549.6	
												BTN Berbak Sembilang	274.8	
												BBKSDA Riau	549.6	

Anggaran 2024 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2025 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2026 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2027 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2028 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2029 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2030 Rp (juta)	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
															IKP	IKK	
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					37
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					41
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					41
24.8		24.8		24.8		24.8		24.8		24.8		24.8					62
12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4					60
24.8		24.8		24.8	24.8	24.8		24.8		24.8		24.8					48
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					41
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					39
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					37
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					41
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					41
135		135		135		135		135		135		135					62
67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		67.5					60
135		135		135		135		135		135		135					48
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8			Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatk	41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					39
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					37
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					41
549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6					62
274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8		274.8					60
549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6		549.6					48

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
6	Pengendalian Karhutla Di Kawasan Konservasi Dan Desa Penyangga	Kawasan Konservasi Yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Pengendalian Kebakaran Hutan									BKSDA Kalteng	78	
												BTN Tanjung Puting	78	
												BTN Sebangau	78	
												BKSDA Kalbar	78	
												BTN Gunung Palung	78	
												BKSDA Kaltim	156	
												BTN Berbak Sembilang	78	
												BBKSDA Riau	156	

Anggaran 2024 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2025 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2026 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2027 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2028 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2029 Rp (juta)	Sumber	Anggaran 2030 Rp (juta)	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
															IKP	IKK	
78		78		78		78		78		78		78			tinggi secara partisipatif (juta ha)	an perlindungan pengan dan pengendalian kebakaran	41
78		78		78		78		78		78		78					39
78		78		78		78		78		78		78					37
78		78		78		78		78		78		78					41
78		78		78		78		78		78		78					41
156		156		156		156		156		156		156					62
78		78		78		78		78		78		78					60
156		156		156		156		156		156		156					48

LAMPIRAN 6 | Matrik Rencana Kerja Konservasi Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Hutan Konservasi

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
1	Perlindungan, Rescue, Rehab Dan Release Satwa	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Rincian Spesies dan Genetik TSL	Satwa Transit dan Konflik									lokasi target di luar KK	345.6	APBN KSDAE
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kee	Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaann ya	Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Taman Kehati dan Karst Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Taman Kehati dan Karst									lokasi target di luar KK	85.1	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
345.6	APBN KSDAE	345.6	APBN KSDAE	345.6	APBN KSDAE	345.6	APBN KSDAE	345.6	APBN KSDAE	345.6	APBN KSDAE	345.6	APBN KSDAE		Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	Jumlah penyelamatan satwa liar	
85.1		85.1		85.1		85.1		85.1		85.1		85.1					

No	Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Tahun -								UPT	Anggaran 2023	Sumber
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Rp (juta)	
3	Inventarisasi Dan Verifikasi Abkt	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati									lokasi target di luar KK	1663.2	
4	Mitigasi Konflik Manusia Dan Satwa Liar	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	Sama dengan AM IV+.1											
5	Penyusunan NSPK Kehati di ABKT											Pusat	2300	

Anggaran 2024	Sumber	Anggaran 2025	Sumber	Anggaran 2026	Sumber	Anggaran 2027	Sumber	Anggaran 2028	Sumber	Anggaran 2029	Sumber	Anggaran 2030	Sumber	Pelaksana	RKP 2023-2024		SDM (orang)
Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)		Rp (juta)			IKP	IKK	
						1663.2										Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	
2300		2300															

LAMPIRAN 7 | Model Key Result Area Bidang Konservasi Tahun 2022 s/d 2024

TUJUAN	2022	2023		2024	
	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2
1. Pencegahan Deforestasi dan Degradasi					
a. Pemantapan kawasan. b. Melindungi kawasan konservasi dan mempertahankan status dan fungsi kawasan yang telah ditetapkan. c. Melindungi kawasan konservasi dan mempertahankan status dan fungsi kawasan yang telah ditetapkan. d. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman hayati ekosistem e. Melindungi kawasan dari dampak kebakaran di luar kawasan f. Memfasilitasi kegiatan pemungutan HHBK di beberapa bagian kawasan konservasi dengan dampak lingkungan yang minimal g. Mempertahankan, memulihkan, atau memodifikasi praktik budaya yang berkontribusi pada integritas ekologis kawasan konservasi					
2. Peningkatan Cadangan Karbon					
3. Peningkatan Suksesi Alami					
a. Identifikasi, perlindungan dan konservasi tumbuhana dan vegetasi alami. b. Pelindungan dan pelestarian habitat satwa. c. Meminimalisir dampak tumbuhan invasif					
4. Pengelolaan Ekosistem Gambut (Restorasi)					
5. Konservasi Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Konservasi					

KEY RESULT AREA
1.1 Kawasan mantap 1.2 Luas dan kualitas hutan konservasi tidak berkurang 1.3 Penyelesaian konflik tenurial 1.4 Tidak ada pembukaan hutan untuk kepentingan pengembangan wisata alam
2.1 Peningkatan pohon pakan/cover 2.2 Keberhasilan tingkat pertumbuhan tanaman pengayaan
3.1 Penurunan luas invasi tumbuhan invasif
4.1 Tingkat kebasahan dan kelembabab gambut tetap terjaga 4.2 Pemberian izin kepada masyarakat atau pihak lain untuk restorasi ekosistem
5.1 Pemberian akses kelola kepada masyarakat

LAMPIRAN 8 | Peta Sebaran Satwa Dilindungi di Area Bernilai Konservasi Tinggi

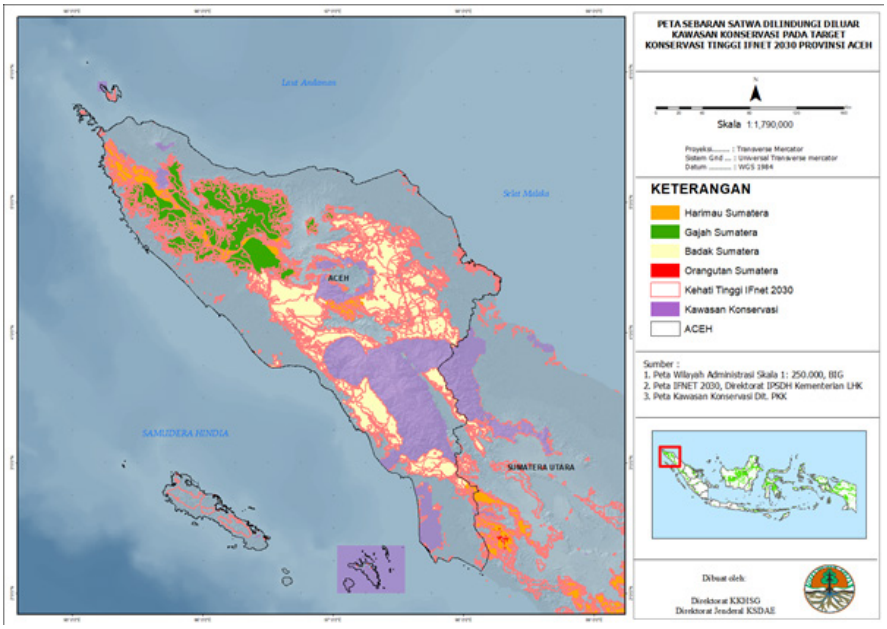

GAMBAR 115 | Provinsi Aceh

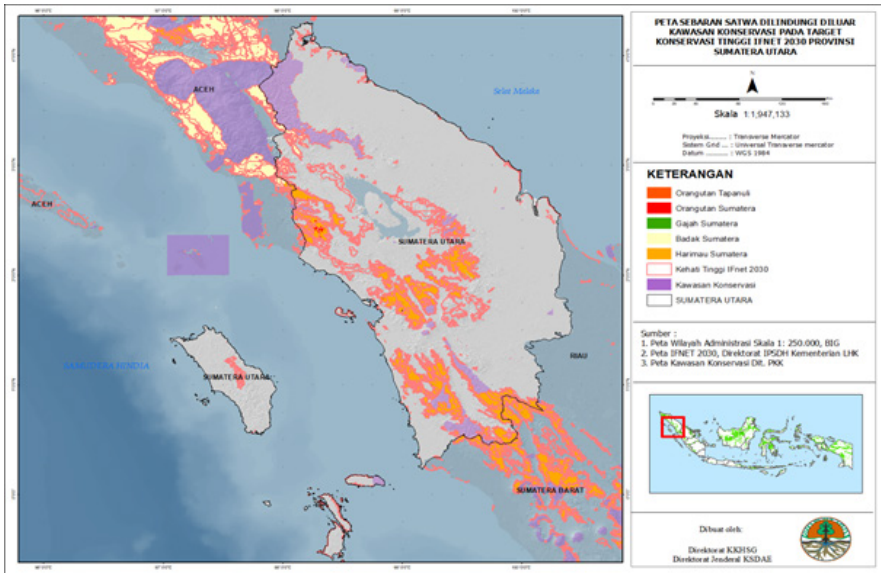

GAMBAR 116 | Provinsi Sumatera Utara

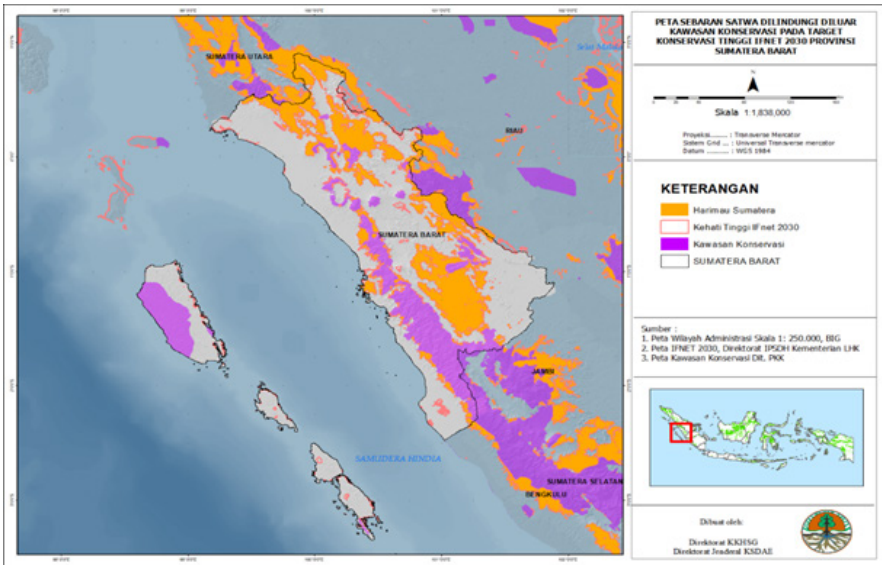

GAMBAR 117 | Provinsi Sumatera Barat

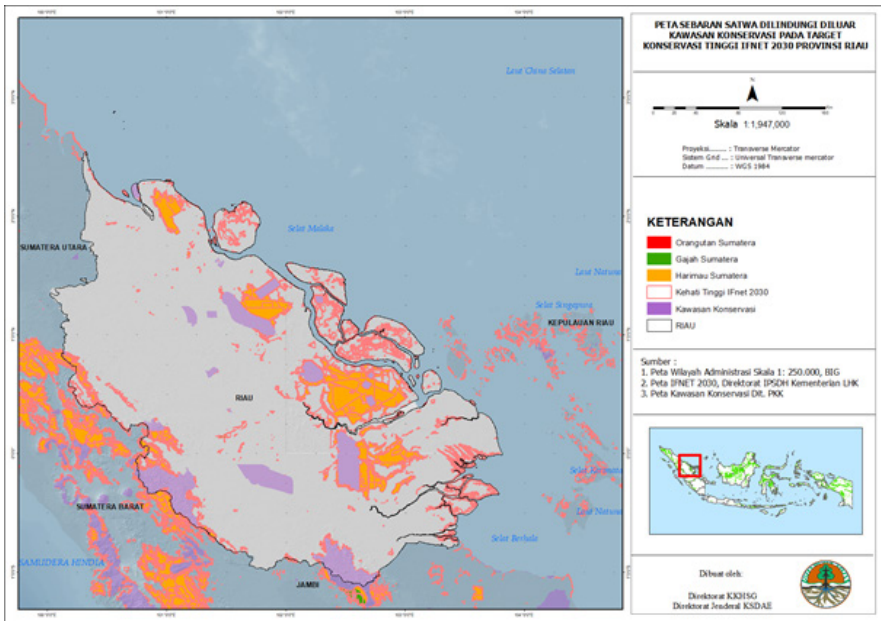

GAMBAR 118 | Provinsi Riau

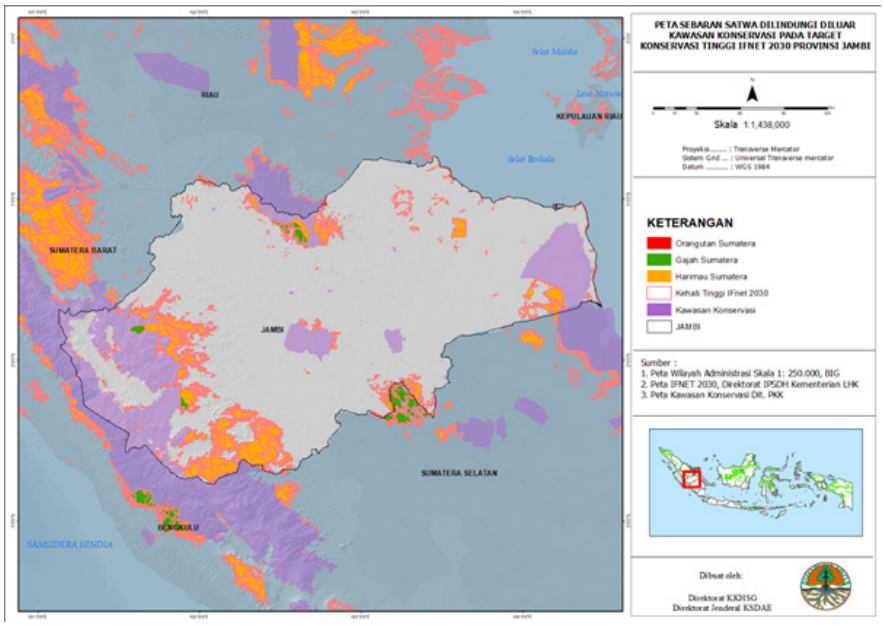

GAMBAR 119 | Provinsi Jambi

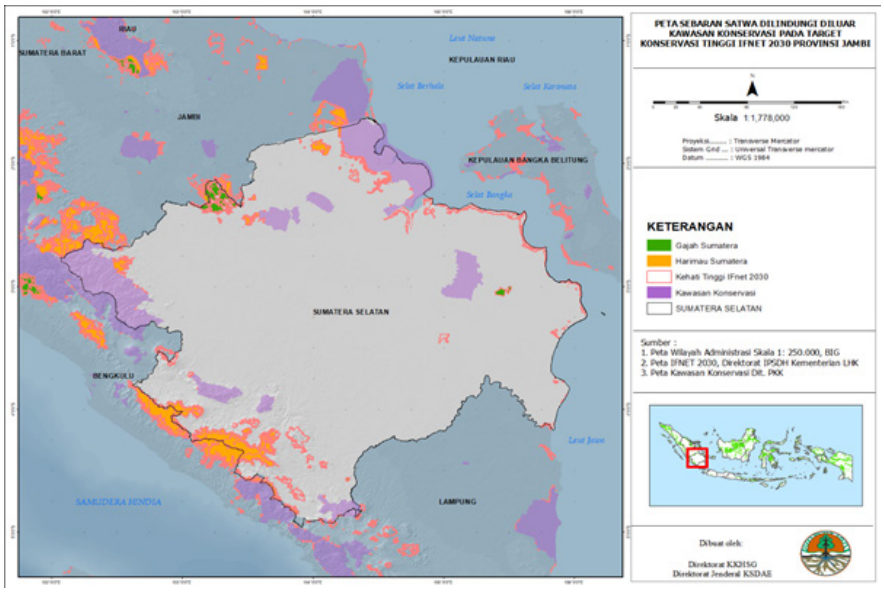

GAMBAR 120 | Provinsi Sumatera Selatan

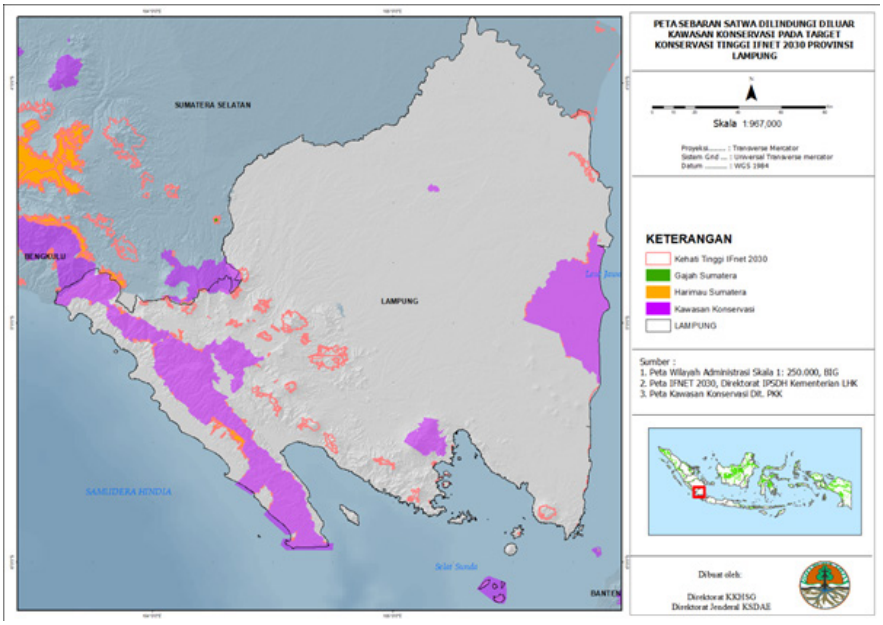

GAMBAR 121 | Provinsi Lampung

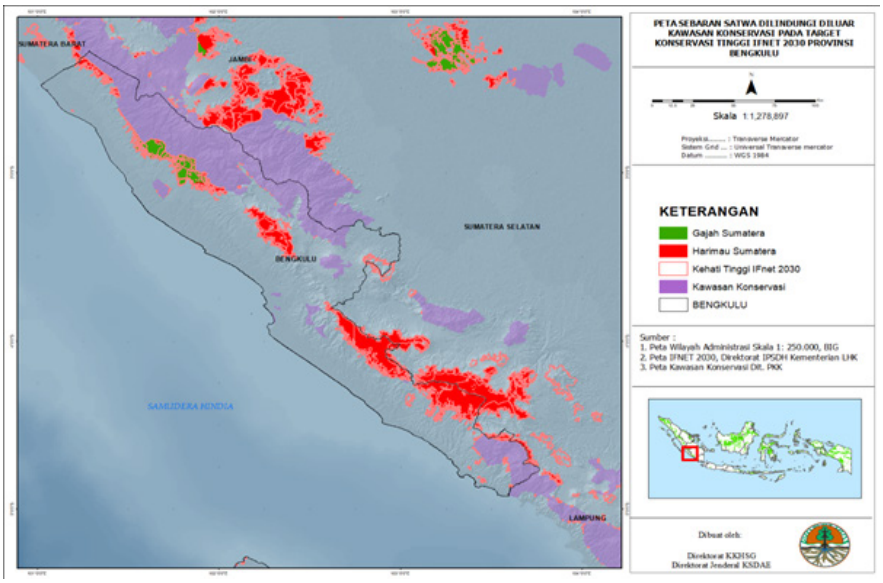

GAMBAR 122 | Provinsi Bengkulu

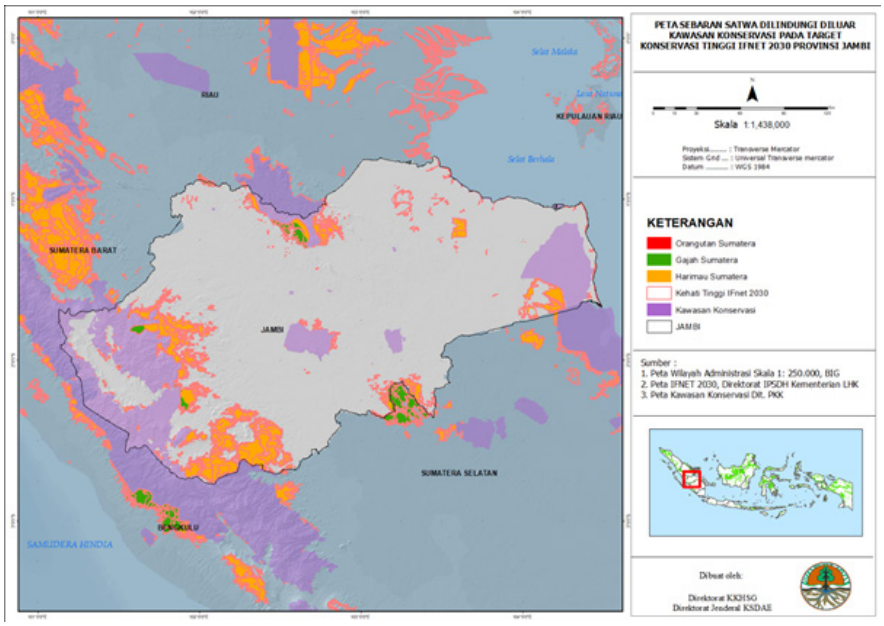

GAMBAR 123 | Provinsi Jambi

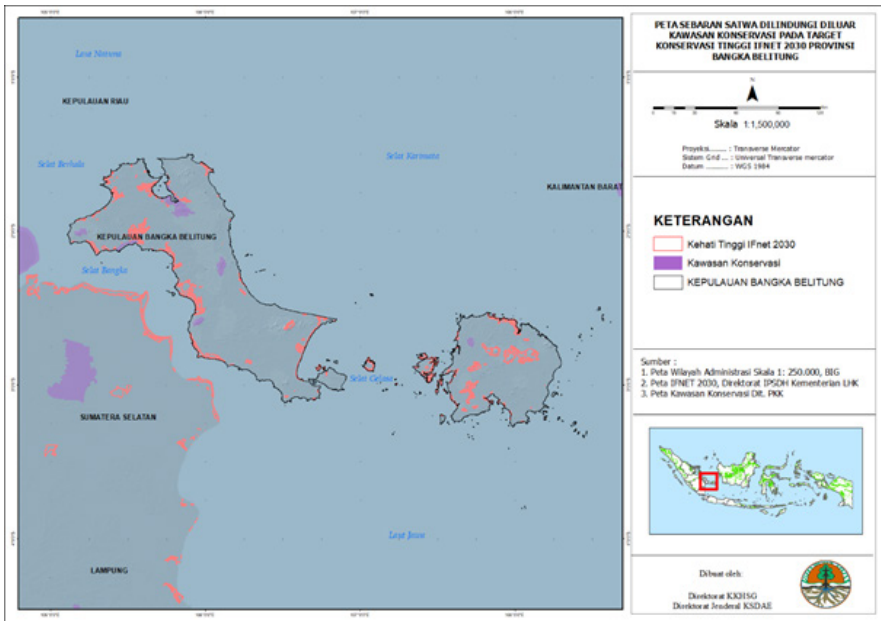

GAMBAR 124 | Provinsi Bangka Belitung

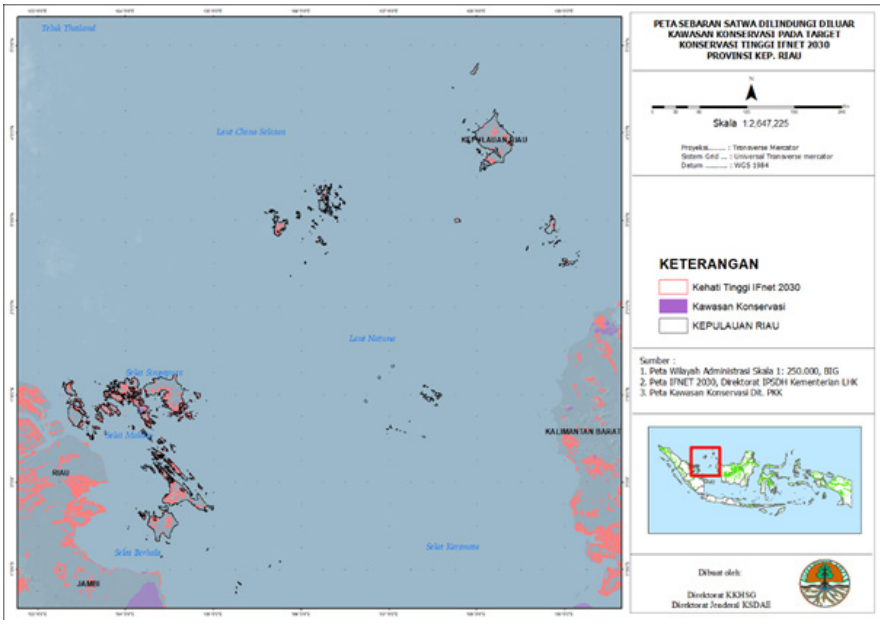

GAMBAR 125 | Provinsi Kepulauan Riau

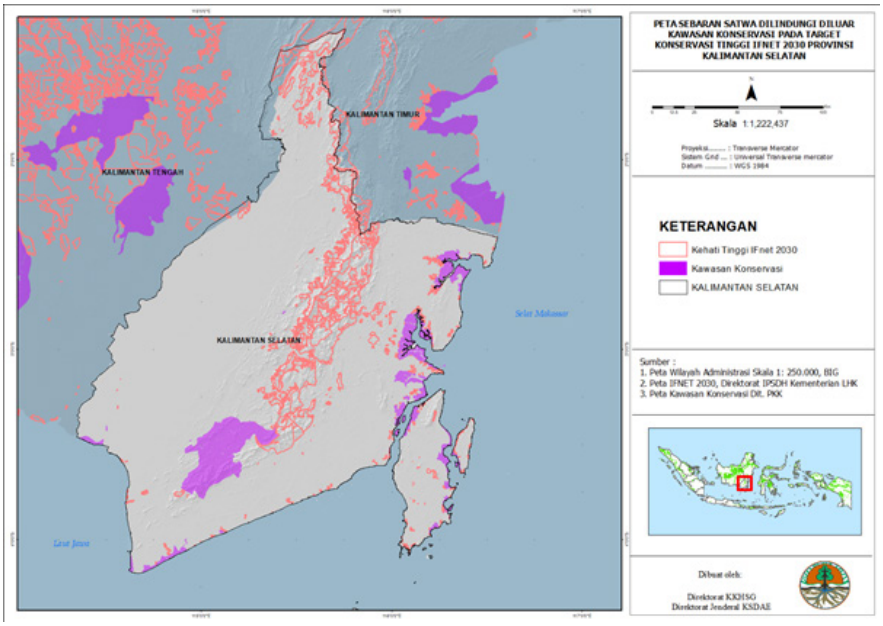

GAMBAR 126 | Provinsi Kalimantan Selatan

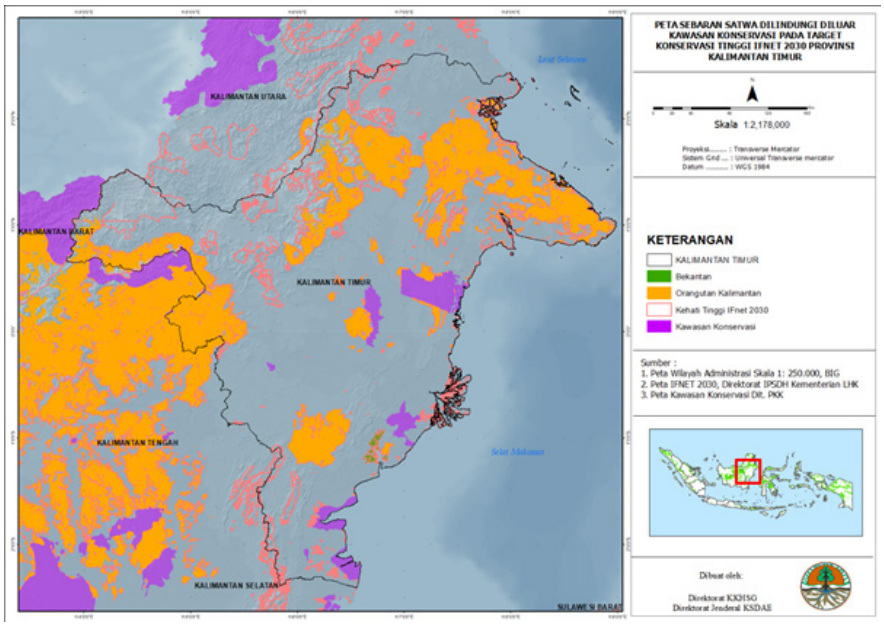

GAMBAR 127 | Provinsi Kalimantan Timur

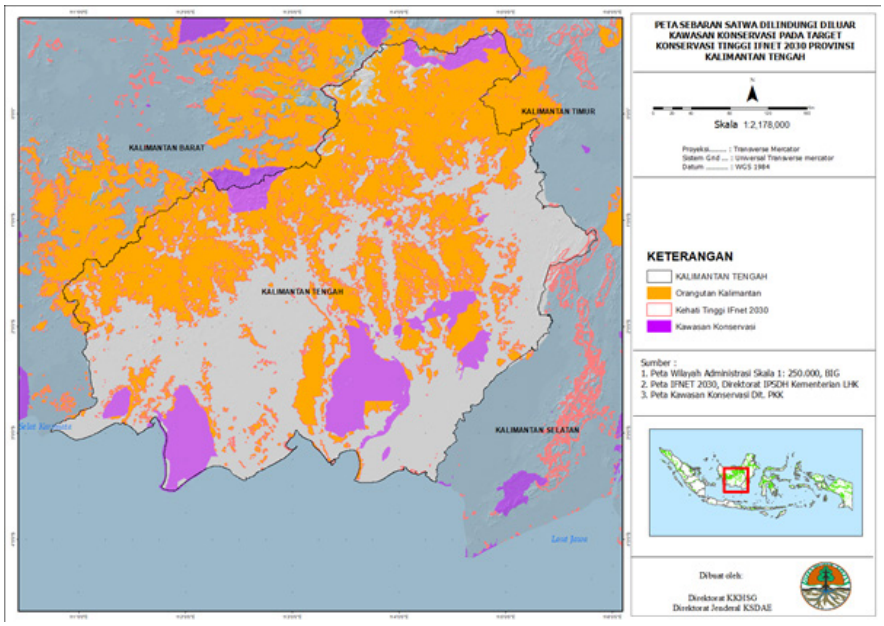

GAMBAR 128 | Provinsi Kalimantan Tengah

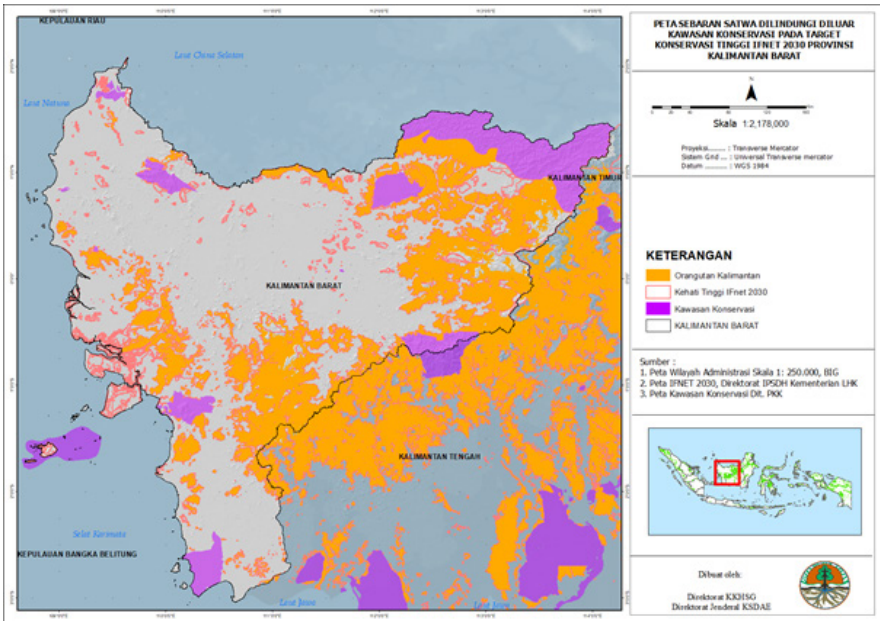

GAMBAR 129 | Provinsi Kalimantan Barat

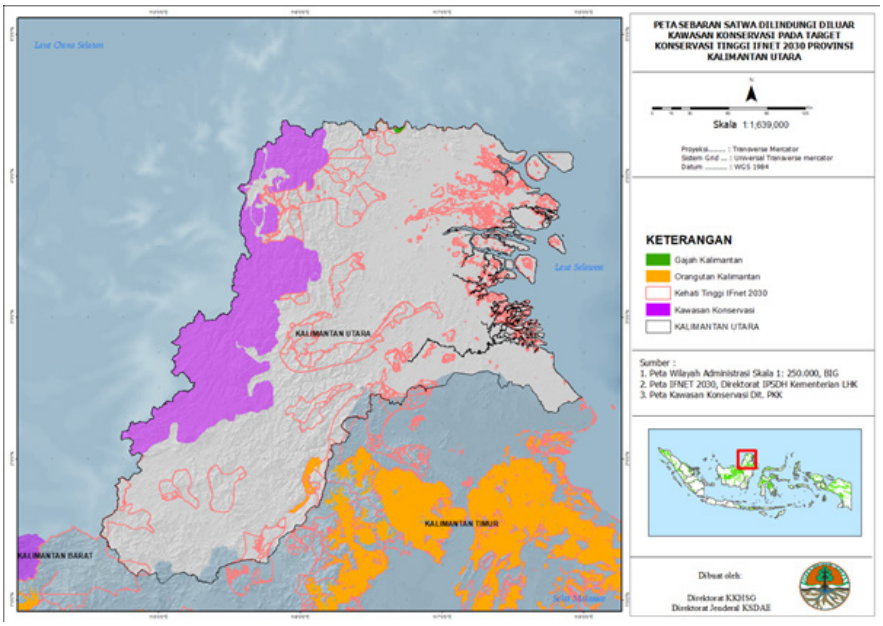

GAMBAR 130 | Provinsi Kalimantan Utara

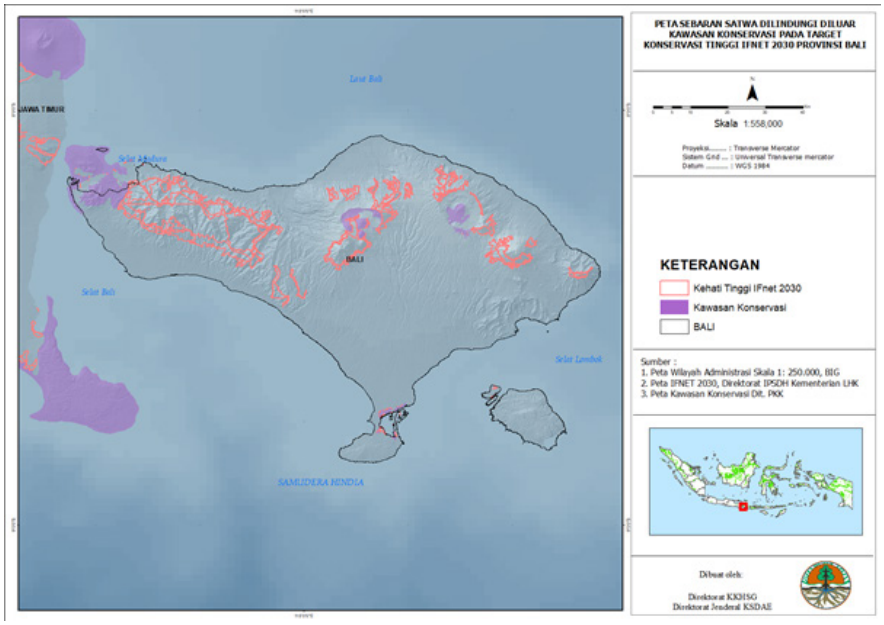

GAMBAR 131 | Provinsi Bali

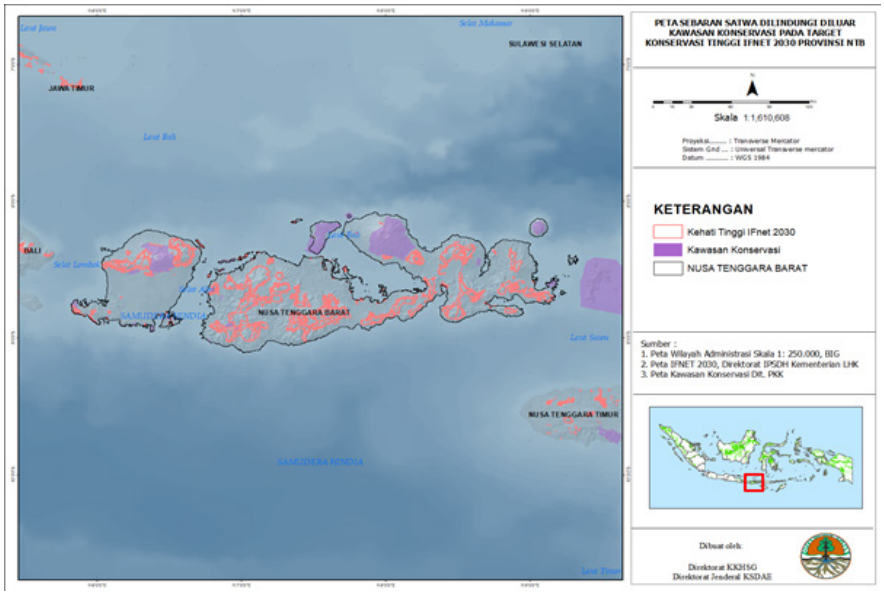

GAMBAR 132 | Tinggi Provinsi Bali

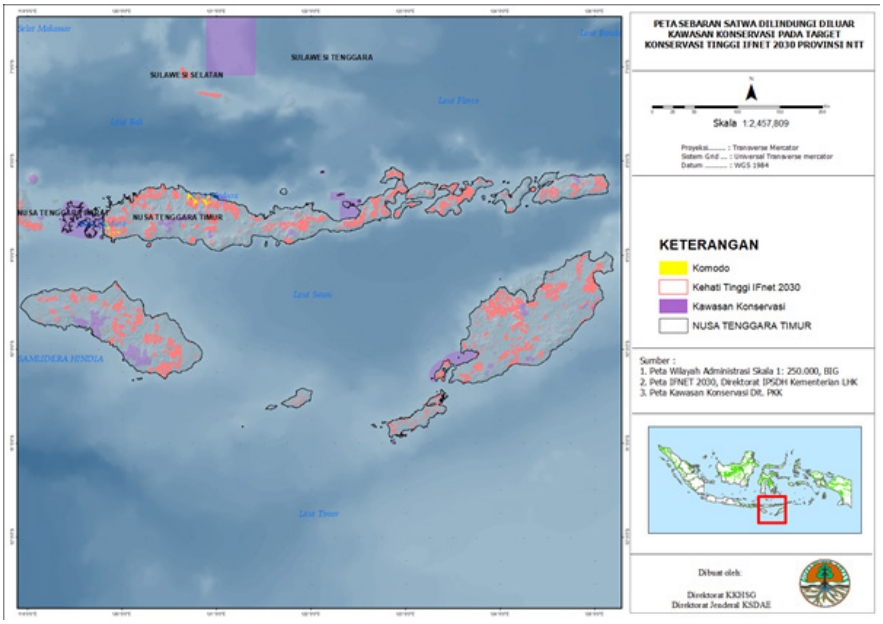

GAMBAR 133 | Provinsi Nusa Tenggara Timur

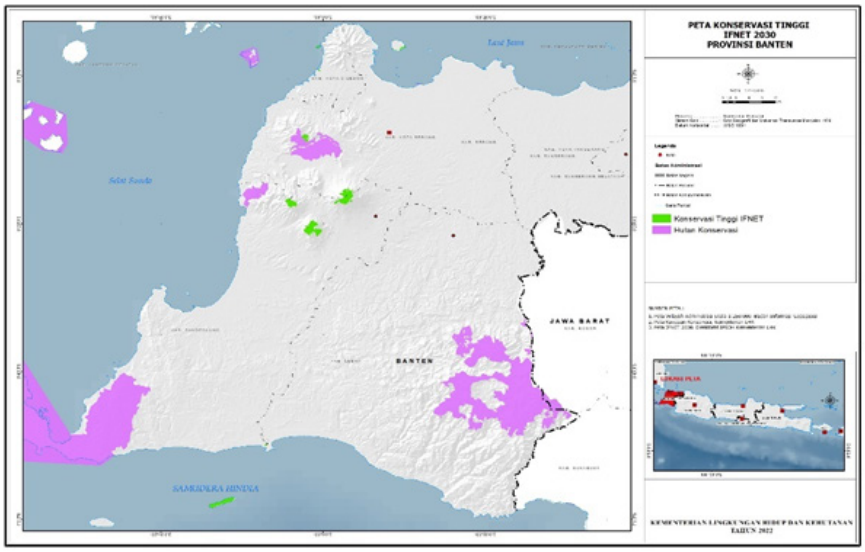

GAMBAR 134 | Provinsi Banten

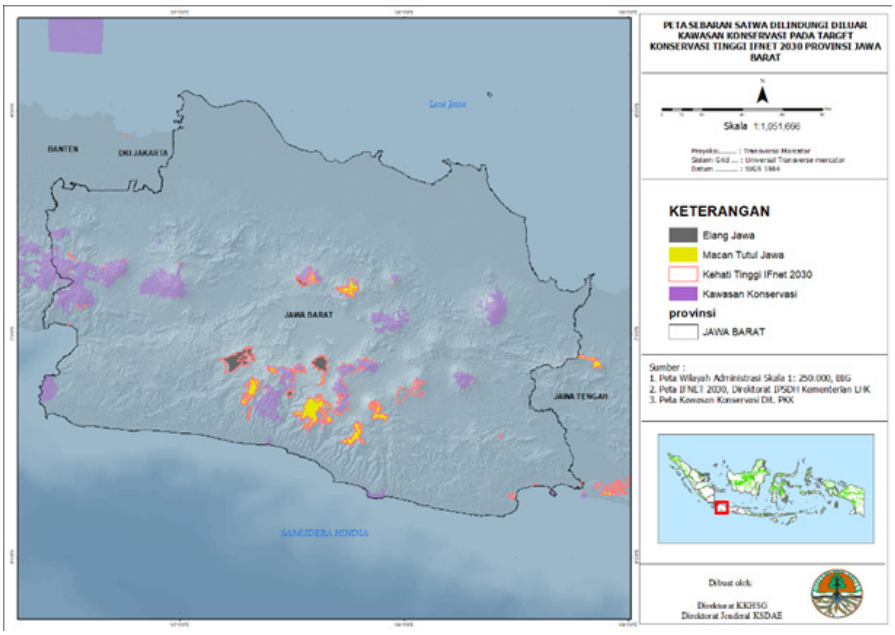

GAMBAR 135 | Provinsi Jawa Barat

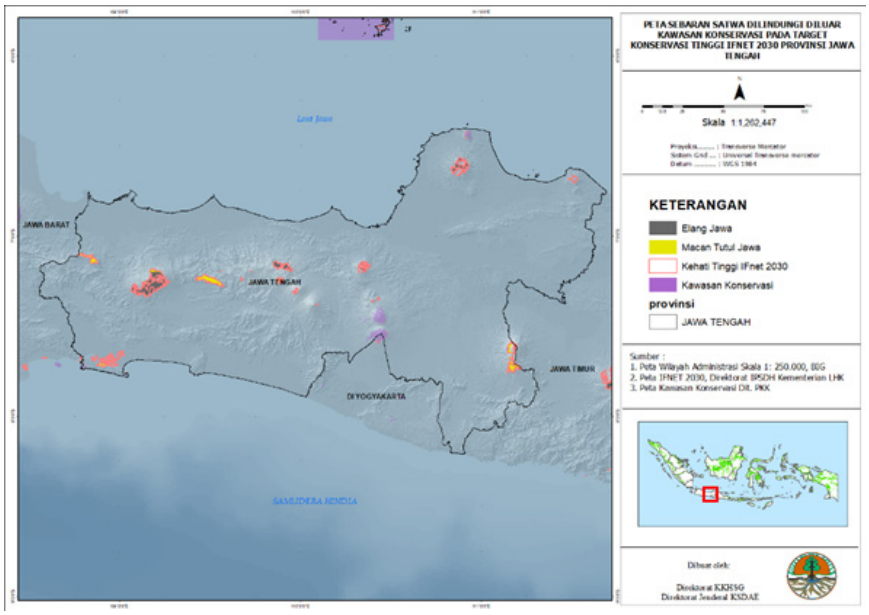

GAMBAR 136 | Provinsi Jawa Tengah

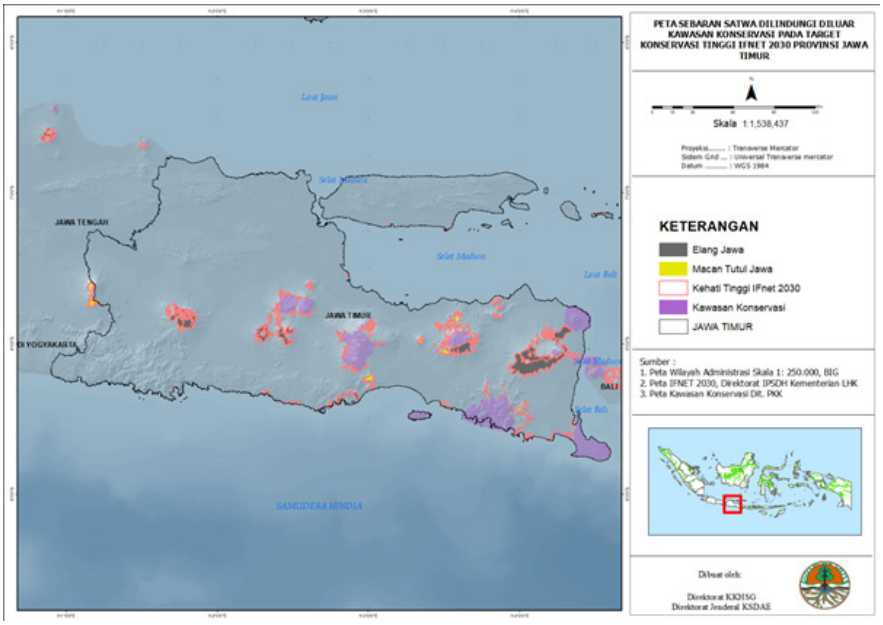

GAMBAR 137 | Provinsi Jawa Timur

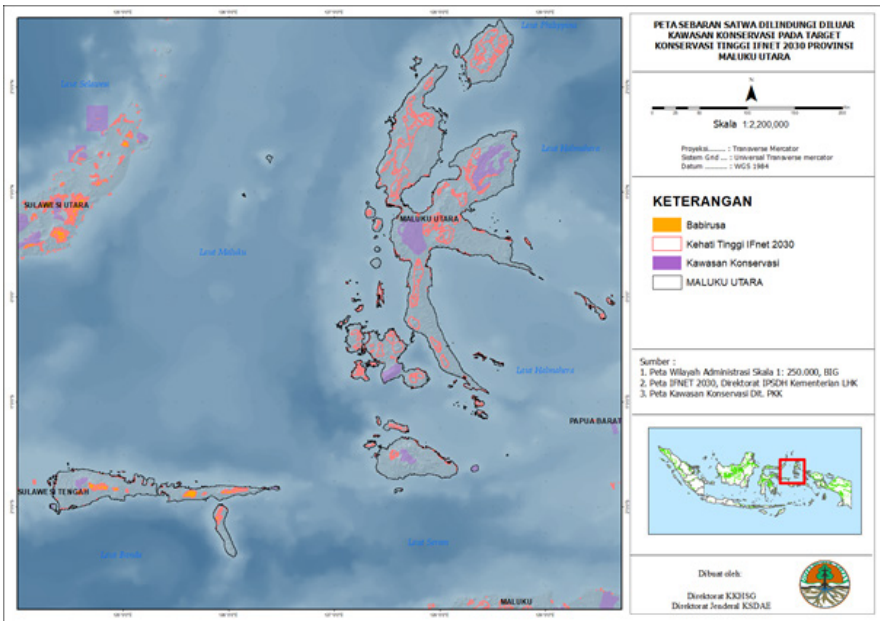

GAMBAR 138 | Provinsi Maluku Utara

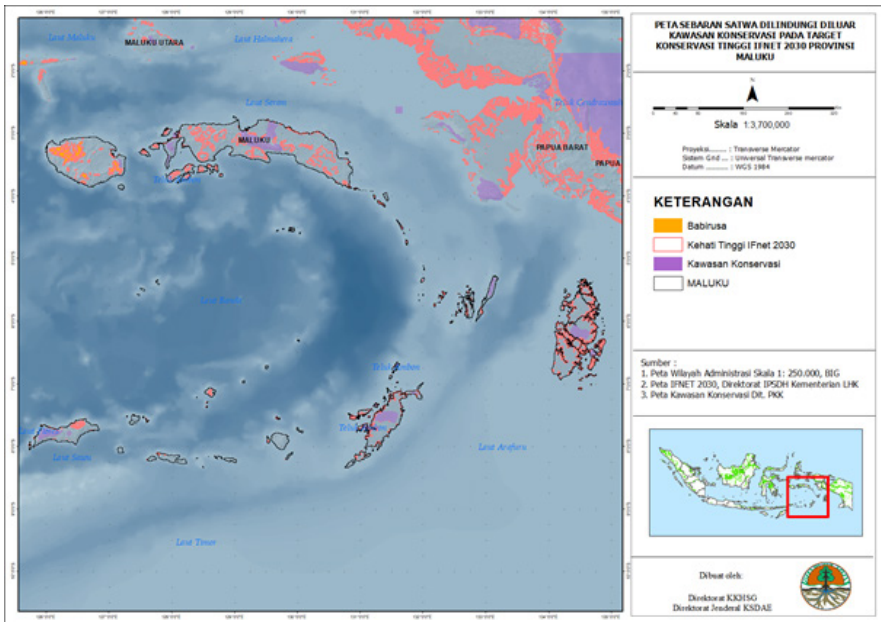

GAMBAR 139 | Provinsi Maluku

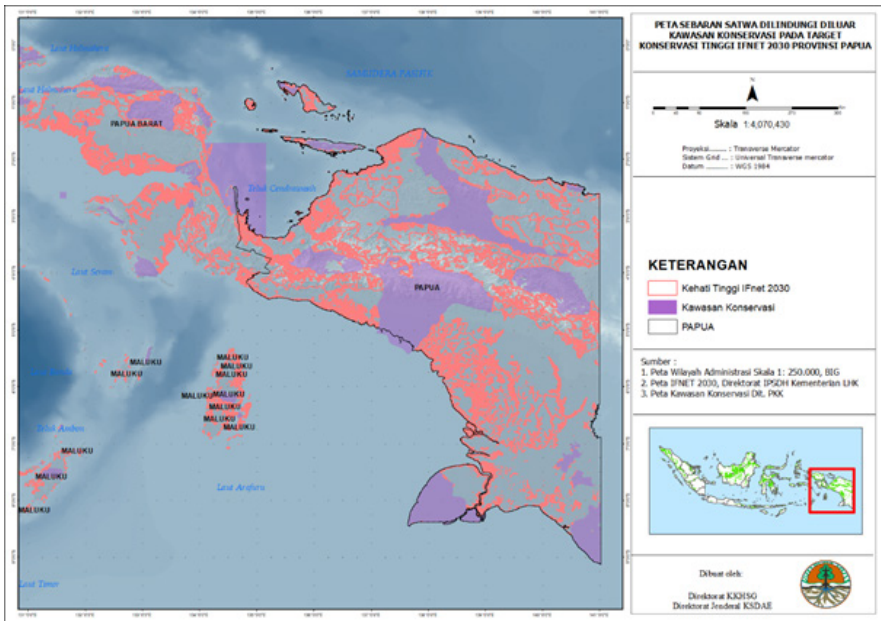

GAMBAR 140 | Provinsi Papua

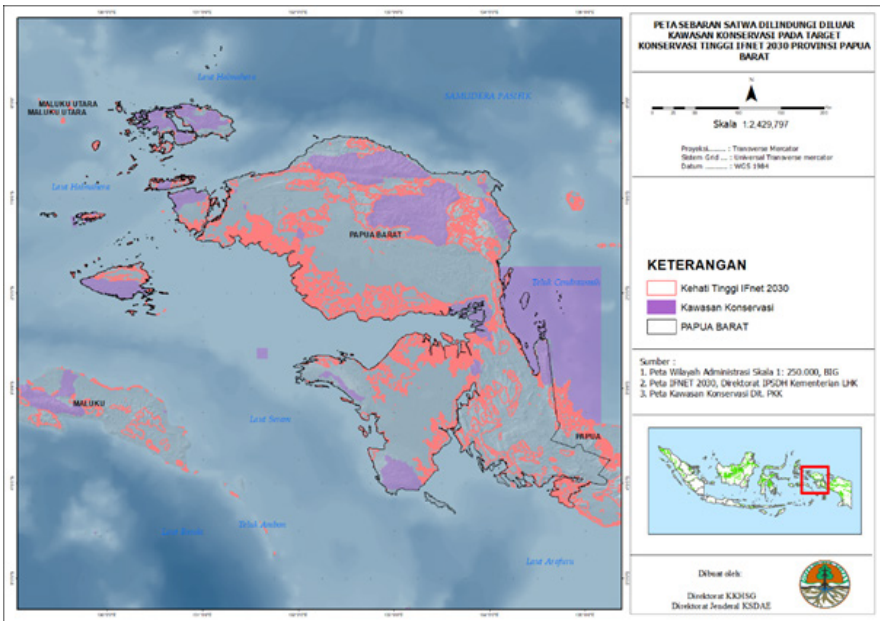

GAMBAR 141 | Provinsi Papua Barat

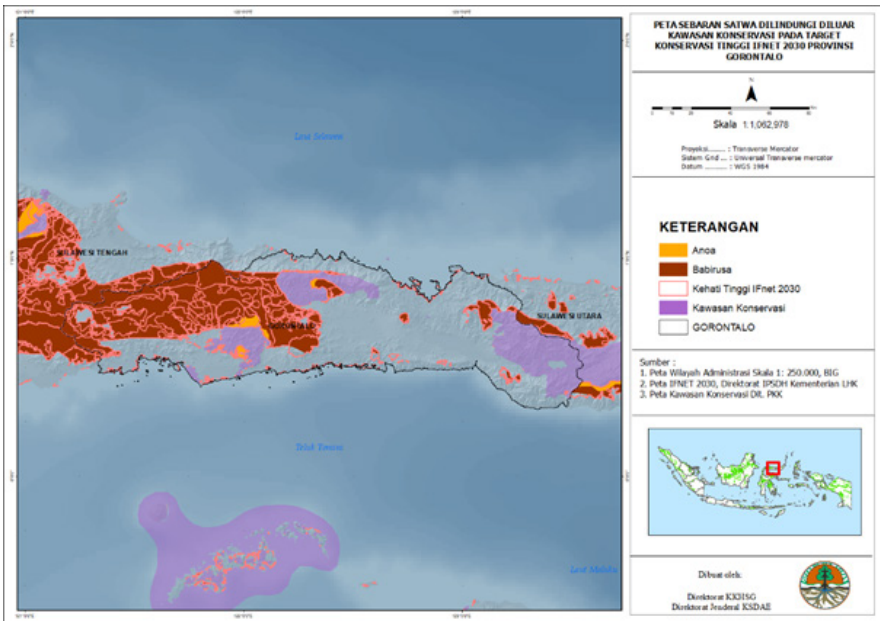

GAMBAR 142 | Provinsi Gorontalo

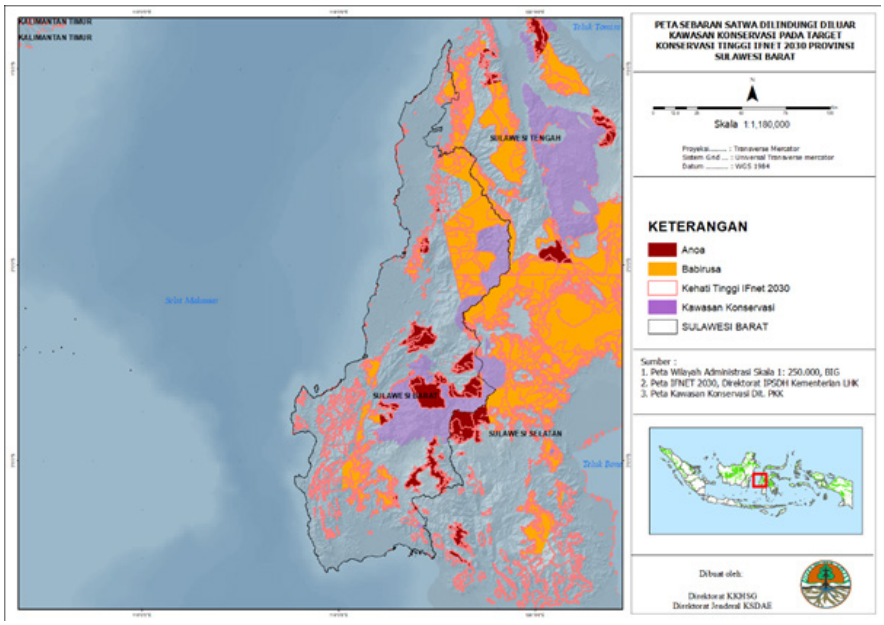

GAMBAR 143 | Provinsi Sulawesi Barat

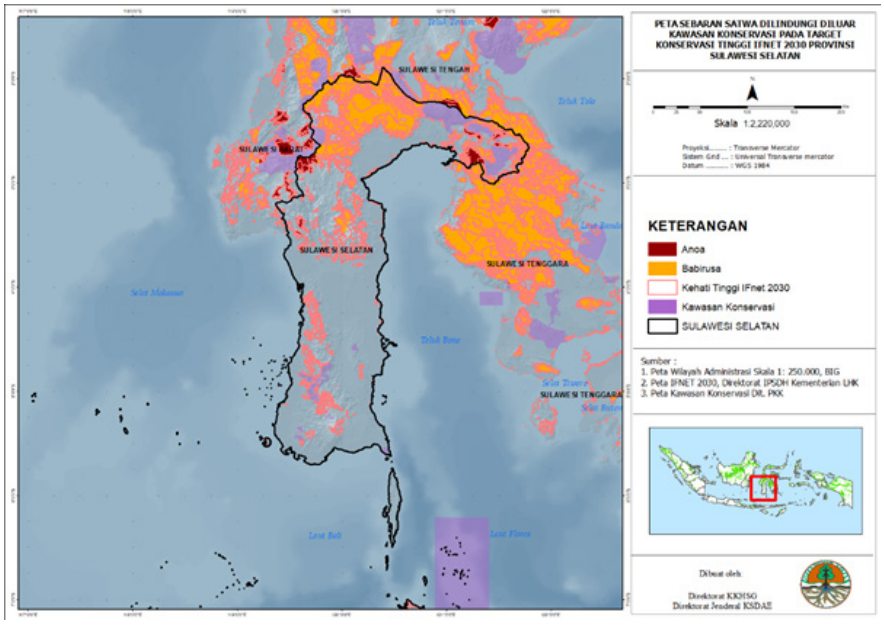

GAMBAR 144 | Provinsi Sulawesi Selatan

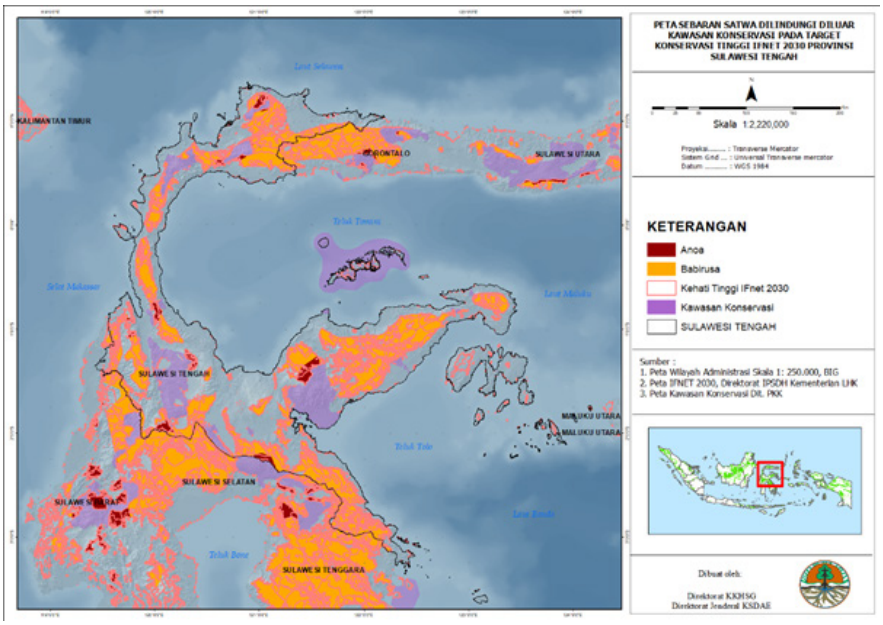

GAMBAR 145 | Provinsi Sulawesi Tengah

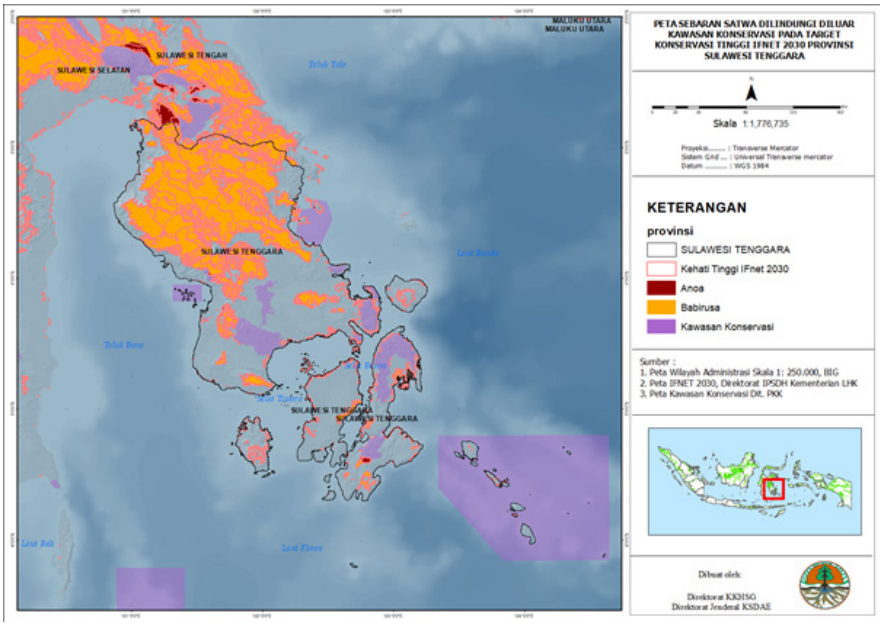

GAMBAR 146 | Provinsi Sulawesi Tenggara

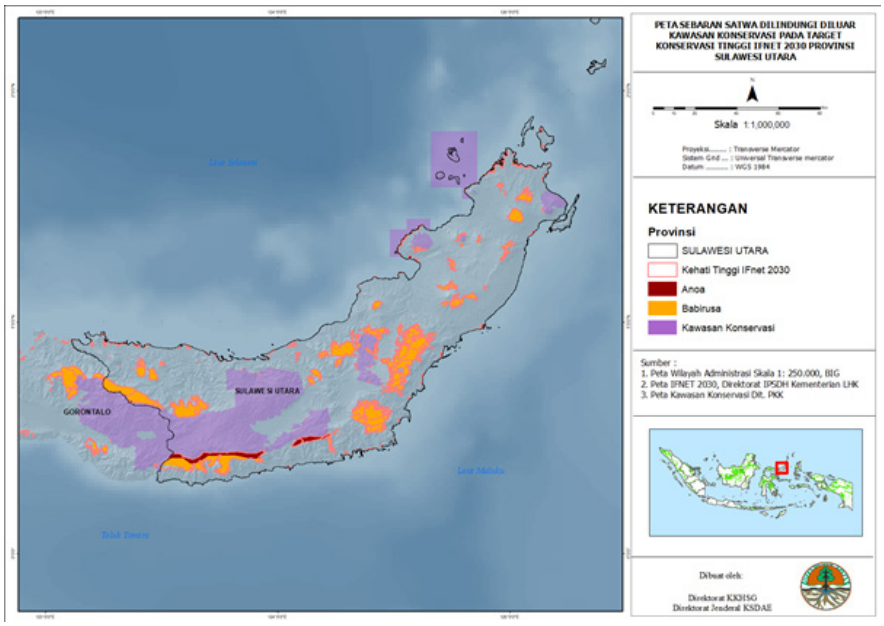

GAMBAR 147 | Provinsi Sulawesi Utara

INDONESIA'S FOLU Net Sink 2030

Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia